



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019



LKPJ

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 (LKPJ ATA) ini telah disusun dan disampaikan dalam sidang paripurna kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ ATA 2019 dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang memuat pertanggungjawaban kinerja yang secara langsung mengarah pada pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan secara jelas tergambar dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2019.

Sesuai dengan Visi Jawa Barat Juara Lahir Batin yang menerapkan teori pemerintahan 3.0 *Dinamic Governance*, semua keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada tahun 2019 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagai bentuk implementasi inovasi dan kolaborasi, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh elemen masyarakat Provinsi Jawa Barat secara luas.

Disamping keberhasilan yang telah dicapai, kami menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran serta rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat merupakan masukan penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Jawa Barat pada masa yang akan datang.

Demikian yang dapat kami laporkan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen LKPJ ATA Tahun 2019 ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat pada masa yang akan datang dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat sehingga terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh.

Bandung, Maret 2020
Gubernur Jawa Barat

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I- 1
1.2 Dasar Hukum	I- 2
1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah	I- 4
1.4 Data Umum Daerah	I- 6
1.4.1 Kondisi Geografis Daerah	I- 6
1.4.2 Kondisi Demografis Daerah	I- 12
1.4.3 Aspek Ketenagakerjaan	I- 12
1.4.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	I- 13
1.4.5 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi	I- 15
BAB II PENJABARAN APBD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019	II- 1
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	II- 1
2.2 Pengelolaan Belanja Daerah	II- 7
2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah	II- 16
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III- 1
3.1 Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	III- 1
3.2 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	III- 4
3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III- 10
3.3.1 Urusan Wajib	III- 10
3.3.2 Urusan Pilihan	III- 537
3.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan	III- 816
3.4 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	III- 1119
3.5 Tindakanjuz Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018	III- 1124
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM	IV- 1
4.1 Urusan Pemerintahan Tugas Pembantuan	IV- 1
4.1.1 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran	IV- 1
4.1.2 Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Pembantuan	IV- 2
4.1.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian	IV- 3
4.2 Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	IV- 6
4.2.1 Kerja Sama Antar Daerah	IV- 6
4.2.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	IV- 9
4.2.3 Kerjasama Luar Negeri	IV- 12
4.2.4 Pembinaan Batas Wilayah	IV- 14
4.2.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	IV- 16
4.2.6 Koordinasi dengan Instansi Vertikal Di Daerah	IV- 21
4.2.7 Pengelolaan Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah	IV- 22
4.2.8 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	IV- 22
4.2.9 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	IV- 23
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Penghargaan	V-1
5.2 Penutup	V- 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sebaran Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	I- 6
Tabel 1.2	Demografi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019	I- 12
Tabel 1.3	Indikator ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2019	I- 13
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019	I- 14
Tabel 1.5	Data Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019	I- 14
Tabel 1.6	Pertumbuhan Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019	I- 16
Tabel 2.1	Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019....	II- 4
Tabel 2.2	Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.....	II- 5
Tabel 2.3	Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019	II- 5
Tabel 2.4	Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.....	II- 6
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.....	II- 9
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019	II- 9
Tabel 2.7	BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2019.....	II- 10
Tabel 2.8	BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2019.....	II- 11
Tabel 2.9	Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 (Berdasarkan Kabupaten/Kota).....	II- 12
Tabel 2.10	Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 (Berdasarkan Komponen Belanja).....	II- 13
Tabel 2.11	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019	II- 14
Tabel 2.12	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2019	II- 15
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.....	II- 16
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.....	II- 17

Tabel 2.15	Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.....	II- 18
Tabel 3.1	Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	III- 1
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	III- 4
Tabel 3.3	Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa-Cita) dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	III- 1121
Tabel 3.4	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018.....	III- 1125
Tabel 4.1	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2019	IV- 2
Tabel 4.2	Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Jawa Barat Tahun 2018-2019.....	IV- 16
Tabel 4.3	Daftar Korban Jiwa Akibat Bencana di Jawa Barat Tahun 2018-2019	IV- 17
Tabel 4.4	Daftar Kerusakan Akibat Bencana di Jawa Barat Tahun 2018-2019	IV- 17
Tabel 4.5	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	IV- 24
Tabel 5.1	Penghargaan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	V- 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat	I- 7
Gambar 1.2	Peta Morfologi Provinsi Jawa Barat	I- 8
Gambar 1.3	Peta Topografi Provinsi Jawa Barat	I- 9
Gambar 1.4	Peta Penutupan Lahan Provinsi Jawa Barat.....	I- 10
Gambar 1.5	Peta Curah Hujan Provinsi Jawa Barat	I- 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan melalui 4 (empat) tahapan kegiatan yaitu : (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan fungsi dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 mengamanatkan kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas pemerintahan umum.

LKPJ disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan diberikan rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Akhir Tahun Anggaran (LKPJ ATA) 2019 akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada DPRD Provinsi Jawa Barat yang penyusunannya didasarkan pada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka

menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

LKPJ ATA 2019 tersebut, kemudian akan dibahas oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat dan menjadi rekomendasi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 47);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 37); dan
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 53).

1.3 VISI DAN MISI

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna bahwa Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
Konsep Jabar Juara secara "batin" sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan

berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjawaban visi Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tata kelola pemerintahan, 'Good Governance' atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara

dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel. Di Provinsi Jawa Barat, *Good Governance* direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien dan handal.

1.4 DATA UMUM DAERAH

1.4.1 Kondisi Geografis Daerah

a. Aspek Geografi

Provinsi Jawa Barat merupakan daratan yang dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai di tengah dengan ketinggian 100-1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara dengan ketinggian 0-10 m dpl, dan wilayah aliran sungai. Terletak pada posisi 104°48' - 108°48' Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah yang terdiri atas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

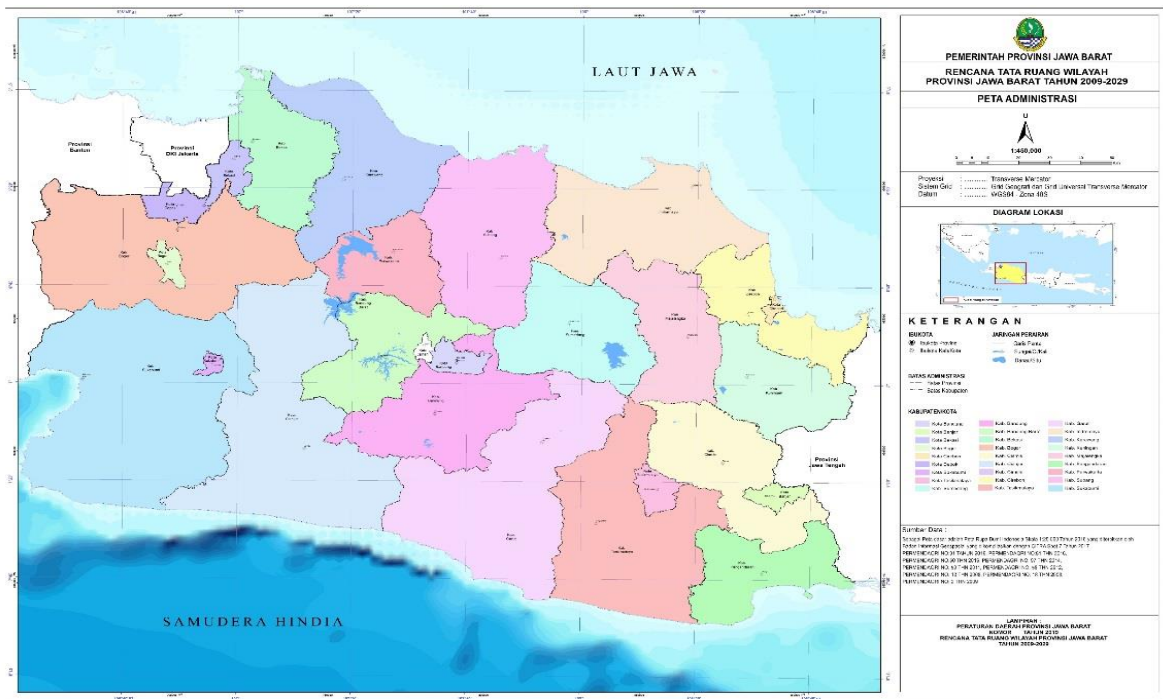
Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki luas daratan mencapai 35.377,76 km² dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara administratif pemerintahan, Wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 Kabupaten/Kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar, seperti disajikan pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1.

Tabel 1.1
Sebaran Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS WILAYAH JAWA BARAT (%)
1	Bogor	2.710,62	7,66
2	Sukabumi	4.145,70	11,72
3	Cianjur	3.840,16	10,85
4	Bandung	1.767,96	5,00
5	Garut	3.074,07	8,69
6	Tasikmalaya	2.551,19	7,21
7	Ciamis	1.414,71	4,00
8	Kuningan	1.110,56	3,14
9	Cirebon	984,52	2,78
10	Majalengka	1.204,24	3,40
11	Sumedang	1.518,33	4,29
12	Indramayu	2.040,11	5,77

NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS WILAYAH JAWA BARAT (%)
13	Subang	1.893,95	5,35
14	Purwakarta	825,74	2,33
15	Karawang	1.652,20	4,67
16	Bekasi	1.224,88	3,46
17	Bandung Barat	1.305,77	3,69
18	Pangandaran	1.010,00	2,85
19	Kota Bogor	118,50	0,33
20	Kota Sukabumi	48,25	0,14
21	Kota Bandung	167,67	0,47
22	Kota Cirebon	37,36	0,11
23	Kota Bekasi	206,61	0,58
24	Kota Depok	200,29	0,57
25	Kota Cimahi	39,27	0,11
26	Kota	171,61	0,49
27	Kota Banjar	113,49	0,32
Total Prov. Jawa Barat		35.377,76	100,00

Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017

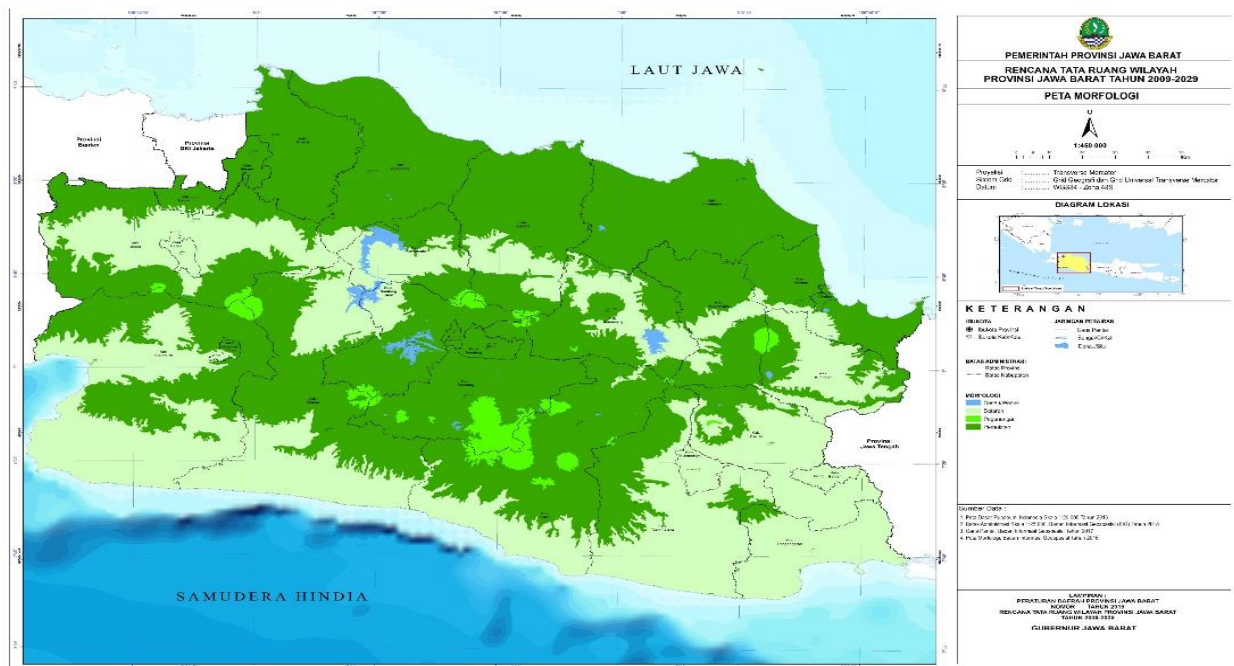


Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1
Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat

b. Morfologi dan Topografi

Kondisi morfologi wilayah Provinsi Jawa Barat sangat beragam, di wilayah sebelah utara terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai yang relatif landai; untuk wilayah tengah didominasi oleh dataran tinggi yang bergunung dan berbukit yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon; sedangkan untuk wilayah selatan didominasi oleh daerah berbukit-bukit dengan pesisir pantai yang memiliki kontur terjal. Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur *Circum Pacific* dan Mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi yang masih aktif bekerja sehingga memiliki resiko gempa bumi.

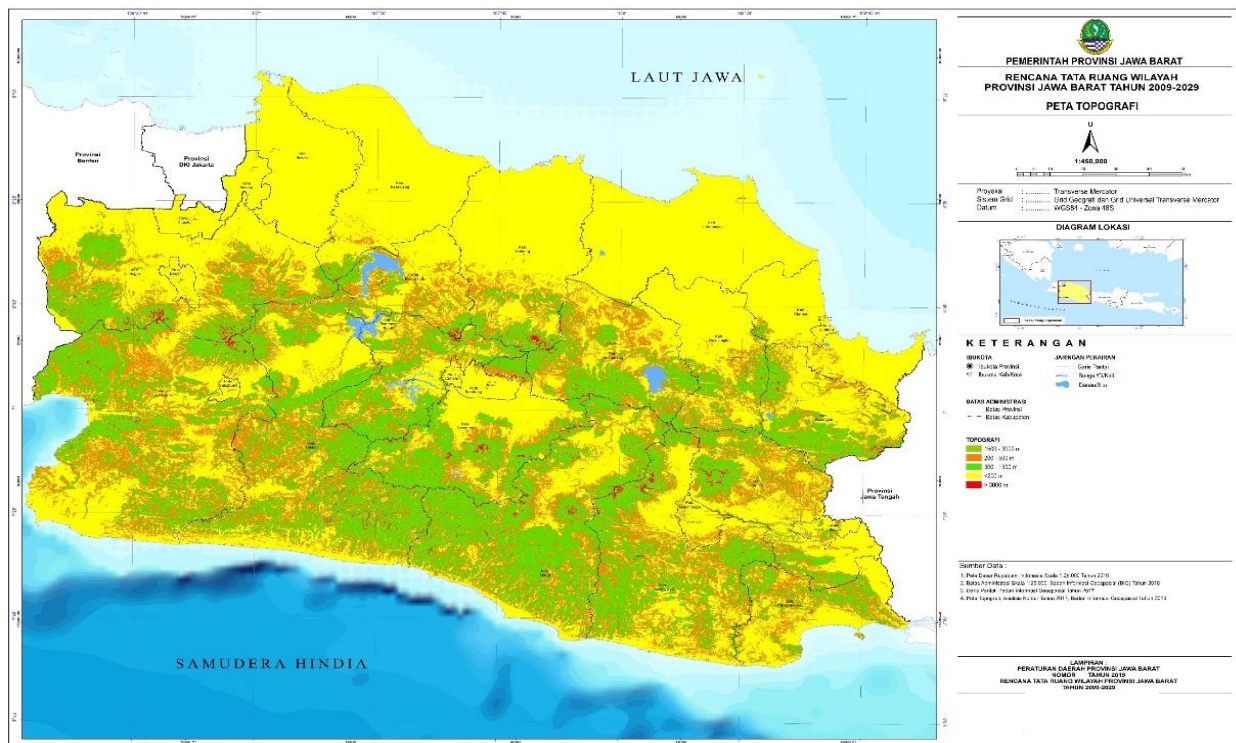


Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.2
Peta Morfologi Provinsi Jawa Barat

Kondisi Topografi ditinjau dari, 2 (dua) wilayah, yaitu Wilayah Pantai Utara (Pantura) dan Wilayah Pantai Selatan (Pansela). Topografi wilayah Pantura Jawa Barat terdiri atas dataran pantai dan rawa alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0%-5%, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus Laut Jawa, serta bervegetasi Mangrove dan terumbu karang. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantura diantaranya Sungai Cimanuk, Cipunagara, Citarum, Kali Bekasi, Pagadungan, Cilamaya, Ciasem, Kali Beji, Cipanas, Cimanggis, Ciwaringin, Kali Bunder, Bangkaderes, dan Cisanggarung. Perairan Laut relatif tenang menjadi lingkungan yang kondusif bagi perkembangan Wilayah, dengan aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi relatif berkembang cukup pesat.

Topografi Wilayah Pansela Jawa Barat merupakan pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang dipengaruhi keberadaan Samudera Indonesia. Vegetasi pada wilayah pantai berupa hutan pantai dan mangrove. Batimetri wilayah pantai selatan relatif curam karena berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, sehingga menimbulkan gelombang laut yang besar, yang dapat mencapai ketinggian 2-5 m, disertai arus laut yang relatif kuat. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan Wilayah Pansela. Pengembangan pelayaran di Wilayah Pansela sangat perlu memperhatikan berbagai aspek keamanan dengan tingkat pengamanan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan wilayah ini terletak pada Lempeng Eurasia dan Lempeng Australia yang merupakan zona aktif gempa dan berpotensi bencana Tsunami. Selain itu, adanya potensi ancaman lainnya berupa gelombang laut pasang, akresi dan abrasi, sedimentasi yang besar di muaramuara sungai yang menyebabkan pendangkalan, penyumbatan aliran sungai, rawan banjir bandang, erosi sungai dan terbentuknya delta baru. Abrasi yang telah terjadi sejak lama terdapat di Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Sungai-sungai di Jawa Barat yang bermuara ke Wilayah Pansela antara lain Sungai Citepus, Cimandiri, Cikaso, Cibuni, Cisokan, Cisadea, Ciujung, Cipandak, Cilaki, Cikandang, Cipalebuh, Cikaengan, Cisanggung, Cipatujah, Ciwulan, Cimedang, Cijulang dan Citanduy.



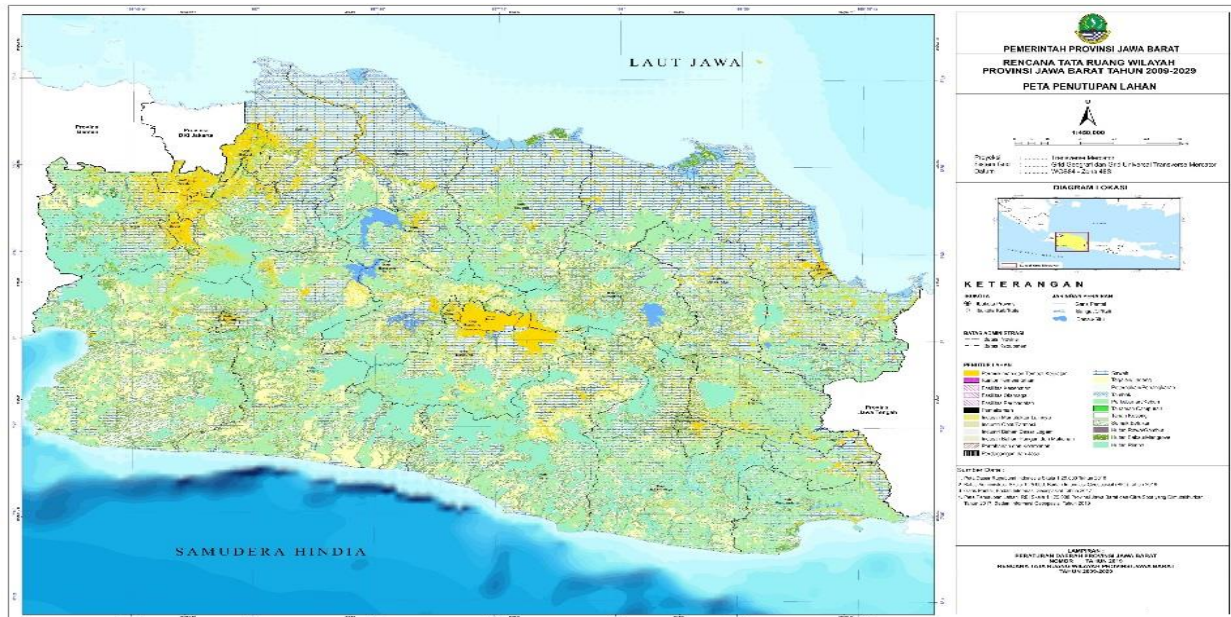
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.3
Peta Topografi Provinsi Jawa Barat

c. Tutupan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2009-2029, bahwa sebesar 45% dari luas wilayah Jawa Barat yang meliputi kawasan hutan lindung dan hutan konservasi (cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam), kawasan resapan air, kawasan perlindungan geologi, kawasan rawan bencana dan kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, pantai, waduk, dan situ).



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat

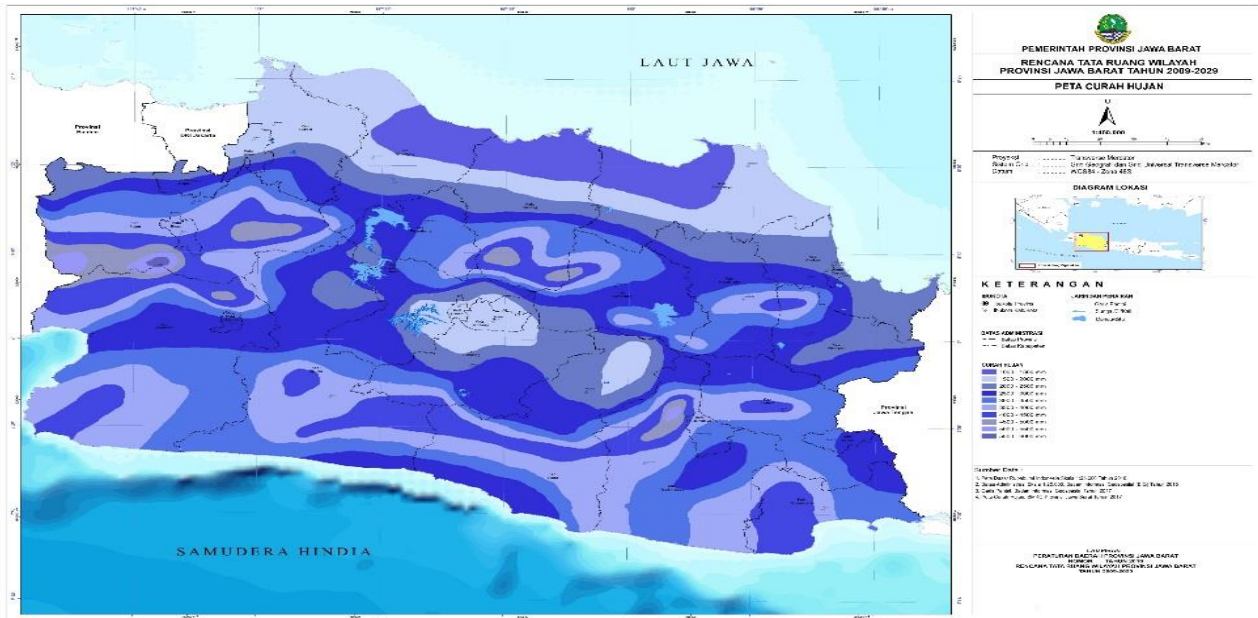
Gambar 1.4
Peta Penutupan Lahan Provinsi Jawa Barat

d. Iklim dan Curah Hujan

Iklim daerah Jawa Barat termasuk tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16° celsius - 34° celsius dan curah hujan yang beragam. Curah hujan di Jawa Barat menurut data BMKG berada pada rentang curah hujan 1.000 - 4.000 mm per tahun. Rata-rata hujan setiap bulan menunjukkan perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dengan curah hujan kurang dari 150 milimeter dan periode musim hujan dengan curah hujan lebih dari 150 milimeter.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Jawa Barat dipengaruhi oleh tipologi Monsun yang secara umum memiliki pola hujan rata-rata bulanan dengan satu puncak hujan maksimum yaitu pada Januari atau Desember dan minimum pada bulan Agustus. Sebaran wilayah hujan umumnya berada di Selatan Ekuator yang sensitif terhadap gerakan atau perubahan Sistem Angin Monsun. Puncak hujan biasanya terjadi pada saat Sistem Monsun Barat dominan melintasi wilayah tersebut. Di Wilayah Jawa Barat persebaran curah hujan terendah berada di Wilayah Utara (Pantura, Bekasi sampai dengan Cirebon dan Kuningan) dan sebagian Wilayah Tengah Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Bandung dan Garut dan sekitarnya); sedangkan sebaran curah hujan tinggi melingkupi Wilayah Barat-Selatan (Bogor dan Sukabumi), Wilayah Tengah (Purwakarta, Subang, Sumedang dan sekitarnya) serta Wilayah Timur-Selatan

(Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis dan Pangandaran). Karakteristik curah hujan di Jawa Barat sangat mempengaruhi ketersediaan air baku terutama di Wilayah Utara Jawa Barat sebagai kawasan lahan pertanian pangan beririgasi teknis dan merupakan kawasan lumbung padi nasional di saat puncak kemarau. Sedangkan pada Wilayah Selatan Jawa Barat, kondisi curah hujan yang tinggi perlu menjadi perhatian terhadap kerentanan resiko bencana longsor dan gerakan tanah.



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.5
Peta Curah Hujan Provinsi Jawa Barat

e. Hidrologi

Karakteristik curah hujan di Wilayah Jawa Barat mempengaruhi potensi sumber daya air pada aliran-aliran sungai yang ada di Provinsi Jawa Barat. Secara kewilayahan, potensi sumber daya air akan terdistribusi pada setiap Wilayah Sungai (WS) baik yang menjadi kewenangan Nasional/Pusat maupun yang menjadi kewenangan Provinsi. Wilayah sungai kewenangan pemerintah Pusat meliputi WS Ciliwung, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung dan WS Citanduy. Sementara kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat meliputi WS Cisadea-Cibareno dan WS Ciwulan-Cilaki. Berdasarkan perhitungan curah hujan yang turun di Wilayah Jawa Barat sepanjang tahun akan menghasilkan potensi sumber daya air permukaan (sungai induk dan anak sungainya) mencapai rata-rata 48.023,78 Juta m³/tahun dalam kondisi normal. Angka ketersediaan air permukaan berdasarkan debit 90 tahunan (Q90) adalah sebesar 43.773,02 Juta m³/tahun, berdasarkan debit 80 Tahunan (Q80) adalah sebesar 37.095,83 Juta m³/tahun dan berdasarkan debit 50 tahunan (Q50) adalah sebesar 34.013,40 Juta m³/tahun.

1.4.2 Kondisi Demografis Daerah

Penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 adalah sebanyak 49.316.712 jiwa. Jumlah penduduk tersebut ekuivalen dengan 18,40 persen jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 268,07 juta jiwa. Dilihat dari sisi pertumbuhan penduduk, Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang berhasil menekan pertumbuhan penduduk dimana Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2019 mencapai sebesar 1,30 persen turun 0,09 persen dari tahun 2018. Adapun mengenai kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yakni 1.394 jiwa/km². Dinamika kependudukan selama periode tahun 2018-2019 disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Demografi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		2018	2019
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	48.683.861	49.316.712
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,30
3. Kepadatan Penduduk	Jiwa Per Km ²	1.376	1.394

Sumber: BPS Tahun 2019

1.4.3 Aspek Ketenagakerjaan

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Hal ini tentunya berdampak terhadap masalah ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat yang cukup kompleks dibandingkan provinsi lainnya. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut kesempatan kerja tetapi juga terkait kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Provinsi Jawa Barat terdiri atas: 1) Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas); 2) Penduduk Angkatan Kerja; 3) Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas); 4) Pengangguran (Mencari Kerja); 5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan 7) Tingkat Kesempatan Kerja. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2019

Indikator	Satuan	Tahun	
		Agustus 2018	Agustus 2019
a. Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)	Juta Orang	35,96	36,58
a. Penduduk Angkatan Kerja	Juta Orang	22,63	23,80
a. Penduduk Bekerja (15 tahun keatas)	Juta Orang	20,78	21,90
d. Pengangguran (Mencari Kerja)	Juta Orang	1,95	1,90
e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	62,92	65,07
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,17	7,99
g. Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,83	92,02

Sumber: BPS Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja, penduduk angkatan kerja, penduduk bekerja bertambah dan menunjukkan perkembangan yang positif selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Penduduk angkatan kerja dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,17 juta orang dan penduduk bekerja meningkat sebesar 1,12 juta orang sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka menurun dari 8,17 persen menjadi 7,99 persen. Penurunan tingkat pengangguran terbuka sejalan dengan berkurangnya jumlah pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa selama satu tahun terakhir penduduk angkatan kerja yang dapat diserap pasar kerja meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.4.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perhitungan BPS, seluruh komponen indikator IPM Jawa Barat pada tahun 2019 menunjukkan tren positif. IPM Jawa Barat akan sangat dipengaruhi oleh komposit indikator yakni Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran perkapita. Adapun capaian IPM dan komposit IPM yang disajikan pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019

Indikator	Satuan	Tahun	
		2018	2019
a. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,30	72,03
b. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	72,66	72,85
c. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,45	12,48
d. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,15	8,37
e. Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp	10.790	11.152

Sumber: BPS Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.4 seluruh komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Jawa Barat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan sekaligus menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup penduduk Jawa Barat.

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya adalah tingkat kemiskinan. Untuk mengukur keadaan kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Secara lebih detail data kemiskinan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Data Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		September 2018	September 2019
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,91	6,82
Jumlah Penduduk Miskin	Juta Jiwa	3,54	3,38
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Poin	1,137	1,056

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		September 2018	September 2019
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Poin	0,265	0,237
Indeks Gini	Poin	0,405	0,398

Sumber: BPS 2019

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat terjadi secara signifikan dari angka 6,91 persen (3,54 juta jiwa) di tahun 2018 menjadi 6,82 persen (3,38 Juta jiwa) di tahun 2019. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut mencapai 0,09 persen sekaligus menunjukkan Provinsi Jawa Barat berada dibawah angka kemiskinan nasional, dimana tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,22 persen. Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam program pengentasan kemiskinan selama tahun 2019.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode September 2018 sampai dengan September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. P1 turun dari 1,137 pada September 2018 menjadi 1,056 pada September 2019. Demikian pula P2 juga menunjukkan penurunan dari 0,265 pada September 2018 menjadi 0,237 pada September 2019. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit. Kondisi ini semakin diperkuat dengan menurunnya Indeks Gini yang tercatat sebesar 0,398 Poin pada tahun 2019 dari 0,405 poin pada tahun 2018.

1.4.5 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian PDRB sebagai barometer indikasi peningkatan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Selain itu, investasi dan inflasi pun menjadi instrumen penting yang tidak dapat terpisahkan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019 disajikan pada Tabel 1.6

Tabel 1.6
Pertumbuhan Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 – 2019

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TAHUN	
			2018	2019
1	PDRB ADHB	Triliun Rupiah	1.962,23	2.125,16
2	PDRB ADHK	Triliun Rupiah	1.419,69	1.491,71
3	Nilai Investasi PMDN	Triliun Rupiah	42,3	49,3
4	Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta USD	5,6	5,9
5	Nilai Investasi/PMTB adhb	Triliun Rupiah	495,83	535,72
6	Laju Inflasi	Persen	3,54	3,21
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,64	5,07

Sumber: BPS, BKPM Tahun 2019

Perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan didukung hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar 2,76 persen serta pengadaan listrik dan gas sebesar 1,20 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh real estate sebesar 9,54 persen, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,48 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 9,31 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2019, industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,75 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,15 persen, konstruksi sebesar 0,52 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 0,38 persen.

Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan juga oleh angka inflasi dan nilai investasi. Angka Inflasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 tercatat 3,21% menurun dari angka 3,54% di tahun 2018. Data tersebut menunjukkan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Barat berjalan cukup baik dan kondisi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Selain itu dari aspek investasi, secara umum Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tujuan utama PMA secara nasional, sejalan dengan banyaknya industri dan kawasan industri yang berkembang di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai tujuan PMA dengan pangsa terhadap nasional mencapai 20,8 persen dengan jumlah PMA mencapai 5,9 Juta USD diikuti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan pangsa masing-masing

sebesar 14,6 persen, 9,7 persen, 6,6 persen dan 6,4 persen. Dukungan implementasi paket kebijakan ekonomi khususnya dalam mempermudah kegiatan investasi dan pengurusan perizinan juga menjadi salah satu faktor penarik PMA ke Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, realisasi PMDN Provinsi Jawa Barat tahun 2019 mencapai Rp49,3 Triliun meningkat dibanding periode investasi yang sama pada tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp42,3 Triliun. Secara nasional PMDN ke Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi ke dua (setelah Provinsi DKI Jakarta) dengan pangsa sebesar 12,7 persen terhadap total PMDN nasional. Sehingga secara keseluruhan PMA dan PMDN Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sebesar Rp137,5 Triliun menempati posisi pertama dengan pangsa pasar sebesar 17,0 persen secara nasional diikuti Provinsi DKI Jakarta dengan capaian sebesar Rp123,9 Triliun dengan pangsa pasar sebesar 15,3 persen kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 7,3 Persen, 7,2 persen dan 6,0 persen.

BAB II

PENJABARAN APBD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan yang akurat dan cermat serta tepat sasaran. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) dan Balai Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana

- perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
 5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
 6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
 7. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
 8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
 9. Mempercepat penyiapan regulasi teknis untuk pemberlakuan Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah, guna memperbaiki kapasitas pengelolaan potensi pendapatan, baik target maupun mekanisme pengurusannya.
 10. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
 11. Melakukan upaya signifikan dalam sosialisasi kepada wajib pajak, terutama terkait peningkatan tarif dasar serta persiapan penerapan pajak progresif yang menerapkan tarif lebih tinggi atas kepemilikan kendaraan mulai kepemilikan kedua dan seterusnya.
 12. Terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
 13. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; serta
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

- c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat dan *Samsat Mobile*, layanan SMS, pengembangan Samsat Outlet, dan Samsat Gendong serta e-Samsat;
 - e. Pengembangan sistem pembayaran melalui Samsat Jbret dimana pembayaran dapat dilakukan di gerai modern (alfamart, alfamidi, indomaret dan fintech bukalapak, tokopedia, kaspro dan PPOB serta BUMDES);
 - f. Program Double Untung untuk memberikan stimulus capaian realisasi PKB yang bersumber dari KTMDU dimana wajib pajak diberikan keringanan denda dan pengurangan pokok PKB 1 (satu) tahun bagi yang terlambat lebih dari 5 (lima) tahun;
 - g. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
 - h. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - i. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - j. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 - k. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

2.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Jawa Barat terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan sebesar 99,75 persen dari target yang telah ditetapkan. Target, realisasi, dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan
terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2019

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2019		Realisasi		Kontribusi terhadap Pendapatan (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Pendapatan Asli Daerah	19.765.448.937.775,00	20.933.819.874.978,00	21.244.266.222.017,70	101,48	58,95
Dana Perimbangan	15.052.236.213.800,00	15.115.298.993.485,00	14.715.372.046.649,00	97,35	40,83
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	64.623.794.000,00	77.999.644.000,00	78.256.117.794,00	100,33	0,22
Jumlah Pendapatan Daerah	34.882.308.945.575,00	36.127.118.512.463,00	36.037.894.386.460,70	99,75	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp19.765.448.937.775,00, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp20.933.819.874.978,00 sedangkan realisasinya tercapai sebesar 101,48 persen dari target yang telah ditetapkan dengan sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 92,38 persen terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2019

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2019		Realisasi		Kontribusi terhadap PAD (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Pajak Daerah	18.394.357.886.000,00	19.223.000.942.000,00	19.626.352.311.765,00	102,10	92,38
Retribusi Daerah	47.890.192.237,00	53.183.796.175,00	56.255.239.896,00	105,78	0,26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	366.500.271.290,00	387.109.923.387,00	386.442.976.038,00	99,83	1,82
Lain-lain PAD Yang Sah	956.700.588.248,00	1.270.525.213.416,00	1.175.215.694.318,66	92,50	5,53
Jumlah PAD	19.765.448.937.77,00	20.933.819.874.978,00	21.244.266.222.017,70	101,48	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

Pada Dana Perimbangan, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp15.052.236.213.800,00 sedangkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp15.115.298.993.485,00 dengan realisasi tercapai sebesar 97,35 persen dari target yang ditetapkan, adapun target yang tercapai 100 persen adalah pada Dana Alokasi Umum, sedangkan pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus tidak tercapai 100 persen. Kontribusi masing-masing rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Dana Perimbangan
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2019		Realisasi		Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	1.388.997.919.800	1.553.530.410.384,00	1.483.785.231.865,00	95,51	10,08
Dana Alokasi Umum	3.212.647.404.000	3.212.647.404.000,00	3.212.647.404.000,00	100,00	21,83
Dana Alokasi Khusus	10.450.590.890.000	10.349.121.179.101,00	10.018.939.410.784,00	96,81	68,08
Jumlah Dana Perimbangan	15.052.236.213.800,00	15.115.298.993.485,00	14.715.372.046.649,00	97,35	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp64.623.794.000,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp77.999.644.000,00, sedangkan realisasinya tercapai 100,33 persen. Kontribusi masing-masing rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2019

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2019		Realisasi		Kontribusi terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Pendapatan Hibah	22.044.000.000	22.932.000.000,00	23.188.473.794,00	101,12	29,63
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.579.794.000	42.579.794.000,00	42.579.794.000,00	100,00	54,41
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya		12.487.850.000,00	12.487.850.000,00	100,00	15,96
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	64.623.794.000,00	77.999.644.000,00	78.256.117.794,00	100,33	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

2.1.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Pajak Daerah meliputi:

1. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan di Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan dan perubahan regulasi yang ada.
3. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.
4. Belum seluruh Perangkat Daerah Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah.
5. Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan dalam menyikapi persaingan usaha yang makin kuat di daerah.
6. Penerimaan dana bagi hasil pajak pusat (PBB, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WP OPDN) masih belum optimal karena belum ditunjang oleh keakuratan data objek dan subjek pajak serta tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak yang harus terus ditingkatkan.
7. Belum optimalnya data potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan dana perimbangan.
8. Masih terjadinya keterlambatan pemerintah daerah penghasil migas dalam menyampaikan perhitungan, monitoring data produksi dan lifting Migas sehingga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam.
9. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan, dilakukan setelah APBD ditetapkan, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan setelah APBD perubahan. Kondisi ini menjadikan pelaksanaannya tidak optimal karena sisa waktu anggaran yang tersedia menjadi terbatas.

Adapun solusi untuk pemecahan masalah pada Pajak Daerah, meliputi:

1. Mengintensifkan sosialisasi terhadap seluruh pemilik kendaraan bermotor, terkait kebijakan penerapan pajak progresif.
2. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh Samsat melalui pemanfaatan kegiatan revitalisasi gedung.
3. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan orientasi pada tarif dan potensinya.
4. Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengisian jabatan pimpinan BUMD perbankan guna penguatan profesionalitas manajemen perbankan daerah.
6. Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, seperti dilakukan Operasi Gabungan dengan Mitra POLRI, Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) melalui pihak Kecamatan/Kelurahan, maupun perorangan dimana setiap pegawai Cabang pelayanan minimal menelusuri 2 Wajib Pajak pemilik Kendaraan Bermotor per hari. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah.
7. Meningkatkan dukungan dan fasilitasi kepada KPP dan Kanwil DJP Jabar I dan II dengan membuat regulasi terkait pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi bagi pelaku yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Jawa Barat.
8. Guna memperkuat informasi dalam perhitungan *lifting* migas dan penyaluran dana bagi hasil SDA, pada setiap triwulan dilakukan perhitungan bersama Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil.
9. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait DBHCHT.

2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Daerah Tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terutama merespon 5 (lima) Prioritas Nasional, 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian target indikator makro pembangunan, maka berdasarkan belanja prioritas, alokasi belanja dalam Tahun 2019 terutama diarahkan pada:

- 1) RPJMD 2018-2023, 8 Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019;
- 2) Program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) urusan pemerintahan pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan; serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;
- 3) Pendukung terhadap program *Sustainable Development Goals (SDGs)*; kemiskinan; dan pemenuhan Janji Gubernur;
- 4) Pendukung terhadap RKP 2019;
- 5) Penggunaan dana fungsi pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- 6) Penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
- 7) Penggunaan dan fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 8) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Desa, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi;
- 9) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), BOS Pusat dan Pajak Rokok;
- 10) Pendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
- 11) Pemberian penghargaan bagi altet berprestasi;
- 12) Revitalisasi Cabang Dinas dan Satuan Pelayanan baru dan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.

2.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 2 (dua) jenis belanja pembangunan daerah, yaitu : Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL).

Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp37.055.508.945.575,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp39.111.008.407.298,00 sedangkan realisasinya sebesar 91,62 persen dari target yang telah ditetapkan. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2019		Realisasi	
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%
Belanja Tidak Langsung	28.148.428.550.758	29.934.606.632.471,00	28.033.579.136.382,00	93,65
Belanja Langsung	8.907.080.394.817	9.176.401.774.827,00	7.799.506.984.134,50	85,00
Jumlah Belanja Daerah	37.055.508.945.575,00	39.111.008.407.298,00	35.833.086.120.516,50	91,62

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL)

Pada Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp28.148.428.550.758,00, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp29.934.606.632.471,00 sedangkan realisasi BTL pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar 93,65 persen dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian target dan dan realisasi Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2019 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2019		Realisasi	
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%
Belanja Pegawai	5.322.286.211.549	5.976.569.983.926,00	5.605.436.887.218,00	93,79
Belanja Subsidi	20.000.000.000	20.000.000.000,00	19.384.264.000,00	96,92
Belanja Hibah	9.213.738.682.702	9.218.746.973.712,00	8.736.051.702.117,00	94,76
Belanja Bantuan Sosial	298.152.000.000	298.152.000.000,00	277.421.000.000,00	93,05
Belanja Bagi Hasil	7.470.689.320.200	8.184.719.740.938,00	7.901.869.013.400,00	96,54
Belanja Bantuan Keuangan	5.798.562.336.307	6.205.159.446.715,00	5.493.416.269.647,00	88,53
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	31.258.487.180,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	28.148.428.550.758,00	29.934.606.632.471,00	28.033.579.136.382,00	93,65

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

- a) Belanja Pegawai pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp5.322.286.211.549,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.976.569.983.926,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp5.605.436.887.318,00 atau 93,79%
- b) Belanja Subsidi pada APBD Tahun Anggaran 2019 baik Murni maupun Perubahan dialokasikan sebesar Rp20.000.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp19.384.264.000,00 atau 96,92 persen.
- c) Belanja Hibah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp9.213.738.682.702,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.218.746.973.712,00 direalisasikan sebesar Rp8.736.051.702.117,00 atau 94,76 persen, yang diperuntukkan:
- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp413.602.106.195,00
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum sebesar Rp1.215.457.195.922,00.
 - 3) Belanja Hibah BOS (Pusat) sebesar Rp7.106.992.400.000,00 meliputi:
 - (a) Belanja Hibah BOS (Pusat) kepada Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp5.495.305.920.000,00. Rincian dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar
Tahun Anggaran 2019

No	Kabupaten/Kota	Realisasi (Rp)
1	Kabupaten Bandung	431.971.600.000,00
2	Kabupaten Bandung Barat	193.703.920.000,00
3	Kabupaten Bekasi	363.737.920.000,00
4	Kabupaten Bogor	624.847.720.000,00
5	Kabupaten Ciamis	119.526.440.000,00
6	Kabupaten Cianjur	314.018.480.000,00
7	Kabupaten Cirebon	246.785.640.000,00
8	Kabupaten Garut	342.038.040.000,00
9	Kabupaten Indramayu	199.942.160.000,00
10	Kabupaten Karawang	281.816.440.000,00
11	Kabupaten Kuningan	132.409.520.000,00
12	Kabupaten Majalengka	135.256.600.000,00
13	Kabupaten Pangandaran	44.403.680.000,00
14	Kabupaten Purwakarta	125.757.200.000,00
15	Kabupaten Subang	185.058.840.000,00
16	Kabupaten Sukabumi	287.866.600.000,00
17	Kabupaten Sumedang	135.923.080.000,00
18	Kabupaten Tasikmalaya	212.011.640.000,00
19	Kota Bandung	266.501.280.000,00
20	Kota Banjar	20.962.160.000,00
21	Kota Bekasi	284.776.400.000,00
22	Kota Bogor	119.747.360.000,00
23	Kota Cimahi	61.760.760.000,00
24	Kota Cirebon	47.400.520.000,00
25	Kota Depok	193.646.080.000,00
26	Kota Sukabumi	43.353.480.000,00
27	Kota Tasikmalaya	80.082.360.000,00
Jumlah		5.495.305.920.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

- (b) Belanja Hibah BOS (Pusat) kepada Satuan Pendidikan Menengah sebesar Rp1.611.686.480.000,00. Rincian selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah
Tahun Anggaran 2019

No	Kabupaten/Kota	Realisasi (Rp)
1	Kabupaten Bandung	122.842.320.000,00
2	Kabupaten Bandung Barat	53.476.800.000,00
3	Kabupaten Bekasi	90.624.520.000,00
4	Kabupaten Bogor	224.421.200.000,00
5	Kabupaten Ciamis	27.531.200.000,00
6	Kabupaten Cianjur	87.162.840.000,00
7	Kabupaten Cirebon	71.913.800.000,00
8	Kabupaten Garut	88.722.480.000,00
9	Kabupaten Indramayu	47.693.960.000,00
10	Kabupaten Karawang	67.261.080.000,00
11	Kabupaten Kuningan	27.090.120.000,00
12	Kabupaten Majalengka	23.295.800.000,00
13	Kabupaten Pangandaran	7.756.920.000,00
14	Kabupaten Purwakarta	15.112.440.000,00
15	Kabupaten Subang	49.162.320.000,00
16	Kabupaten Sukabumi	76.258.320.000,00
17	Kabupaten Sumedang	38.516.880.000,00
18	Kabupaten Tasikmalaya	64.661.760.000,00
19	Kota Bandung	102.554.400.000,00
20	Kota Banjar	5.338.800.000,00
21	Kota Bekasi	109.470.560.000,00
22	Kota Bogor	61.676.400.000,00
23	Kota Cimahi	25.157.680.000,00
24	Kota Cirebon	15.267.960.000,00
25	Kota Depok	70.572.680.000,00
26	Kota Sukabumi	12.446.000.000,00
27	Kota Tasikmalaya	25.697.240.000,00
JUMLAH		1.611.686.480.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

- (c) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp298.152.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp277.421.000.000,00 atau 93,05 persen;
- (d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp8.184.719.840.938,00 direalisasikan sebesar Rp7.901.869.013.400,00 atau 96,54 persen. Adapun rincian Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Rincian realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp7.901.869.013.400,00 berdasarkan Kabupaten/Kota selengkapnya disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
(Berdasarkan Kabupaten/Kota)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi (Rp)
1	Kabupaten Bandung	461.292.696.640,00
2	Kabupaten Bandung Barat	245.006.376.100,00
3	Kabupaten Bekasi	738.094.679.509,00
4	Kabupaten Bogor	773.953.465.729,00
5	Kabupaten Ciamis	124.171.550.133,00
6	Kabupaten Cianjur	238.192.462.285,00
7	Kabupaten Cirebon	294.592.460.792,00
8	Kabupaten Garut	209.872.884.147,00
9	Kabupaten Indramayu	238.959.202.982,00
10	Kabupaten Karawang	440.764.037.891,00
11	Kabupaten Kuningan	124.287.626.143,00
12	Kabupaten Majalengka	151.238.495.571,00
13	Kabupaten Pangandaran	44.720.429.740,00
14	Kabupaten Purwakarta	174.278.767.841,00
15	Kabupaten Subang	201.304.977.199,00
16	Kabupaten Sukabumi	259.577.558.059,00
17	Kabupaten Sumedang	136.437.021.093,00
18	Kabupaten Tasikmalaya	142.797.736.155,00
19	Kota Bandung	871.625.403.102,00
20	Kota Banjar	30.399.157.589,00
21	Kota Bekasi	811.483.111.469,00
22	Kota Bogor	252.139.954.160,00
23	Kota Cimahi	129.853.567.820,00
24	Kota Cirebon	96.108.159.099,00
25	Kota Depok	521.083.965.142,00
26	Kota Sukabumi	73.649.687.984,00
27	Kota Tasikmalaya	115.983.579.026,00
Jumlah		7.901.869.013.400,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

- Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp7.901.869.013.400,00 berdasarkan komponen belanja selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
(Berdasarkan Komponen Belanja)

No	Belanja Bagi Hasil	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.339.444.052.660,00
2	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang belum disalurkan	116.141.345.933,00
3	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.788.793.768.080,00
4	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum disalurkan	70.872.644.880,00
5	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.676.479.473.387,00
6	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang belum disalurkan	169.981.508.298,00
7	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	26.381.384.585,00
8	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan yang belum disalurkan	4.049.774.832,00
9	Bagi Hasil Pajak Rokok	1.705.917.801.341,00
10	Bagi Hasil Pajak Rokok yang belum disalurkan	3.807.259.404,00
Jumlah		7.901.869.013.400,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

- d) Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp6.205.159.446.715,00 dengan realisasi sebesar Rp5.493.416.269.647,00 atau 88,53 persen yang terdiri dari:
- 1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp4.765.500.572.826,00. Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
kepada Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2019

No	Kabupaten/Kota	Realisasi (Rp)
1	Kabupaten Bandung	149.215.750.781,00
2	Kabupaten Bandung Barat	74.709.167.557,00
3	Kabupaten Bekasi	55.765.014.035,00
4	Kabupaten Bogor	107.389.453.926,00
5	Kabupaten Ciamis	377.798.831.182,00
6	Kabupaten Cianjur	158.628.362.719,00
7	Kabupaten Cirebon	183.235.515.603,00
8	Kabupaten Garut	430.800.981.442,00
9	Kabupaten Indramayu	472.188.634.583,00
10	Kabupaten Karawang	79.793.176.750,00
11	Kabupaten Kuningan	119.207.186.178,00
12	Kabupaten Majalengka	153.284.600.891,00
13	Kabupaten Pangandaran	284.339.049.156,00
14	Kabupaten Purwakarta	37.047.507.069,00
15	Kabupaten Subang	80.932.366.621,00
16	Kabupaten Sukabumi	39.262.557.593,00
17	Kabupaten Sumedang	330.657.094.372,00
18	Kabupaten Tasikmalaya	628.098.842.465,00
19	Kota Bandung	270.435.589.719,00
20	Kota Banjar	96.020.450.454,00
21	Kota Bekasi	17.227.998.919,00
22	Kota Bogor	55.936.979.900,00
23	Kota Cimahi	48.860.258.783,00
24	Kota Cirebon	147.017.117.721,00
25	Kota Depok	20.692.931.427,00
26	Kota Sukabumi	52.520.608.759,00
27	Kota Tasikmalaya	294.434.544.221,00
Jumlah		4.765.500.572.826,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

- 2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp700.857.497.021,00. Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
Tahun Anggaran 2019

No	Kabupaten/Kota	Realisasi (Rp)
A	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Infrastruktur Perdesaan	675.644.704.000,00
1	Kabupaten Bandung	34.367.760.000,00
2	Kabupaten Bandung Barat	21.002.520.000,00
3	Kabupaten Bekasi	22.911.840.000,00
4	Kabupaten Bogor	52.697.232.000,00
5	Kabupaten Ciamis	32.840.304.000,00
6	Kabupaten Cianjur	45.059.952.000,00
7	Kabupaten Cirebon	52.442.656.000,00
8	Kabupaten Garut	53.588.248.000,00
9	Kabupaten Indramayu	39.331.992.000,00
10	Kabupaten Karawang	37.677.248.000,00
11	Kabupaten Kuningan	45.950.968.000,00
12	Kabupaten Majalengka	42.005.040.000,00
13	Kabupaten Pangandaran	11.837.784.000,00
14	Kabupaten Purwakarta	23.293.704.000,00
15	Kabupaten Subang	31.185.560.000,00
16	Kabupaten Sukabumi	48.369.440.000,00
17	Kabupaten Sumedang	34.367.760.000,00
18	Kabupaten Tasikmalaya	44.678.088.000,00
19	Kota Banjar	2.036.608.000,00
B	Bantuan Keuangan Kepada Desa di Bidang Lainnya	25.212.793.021,00
	Jumlah	700.857.497.021,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebelum Audit BPK RI

- 3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp25.058.199.800,00.
- 4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Lainnya sebesar Rp2.000.000.000,00, yaitu Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
- e) Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp31.258.487.180,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

2. Realisasi Belanja Langsung (BL)

Sementara itu, Belanja Langsung pada APBD Murni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp8.907.080.394.817,00 dan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp9.176.401.774.827,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp7.799.506.984.134,50 atau tercapai sebesar 85,00 persen dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah anggaran dan realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2019

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2019		Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
Belanja Pegawai	330.617.892.211	327.891.462.318,00	283.317.579.553,00	86,41
Belanja Barang dan Jasa	5.417.384.921.089	5.585.583.141.133,00	4.985.841.862.220,50	89,26
Belanja Modal	3.159.077.581.517	3.262.927.171.376,00	2.530.347.542.361,00	77,55
Jumlah Belanja Langsung	8.907.080.394.817,00	9.176.401.774.827,00	7.799.506.984.134,50	85,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA. 2019 sebelum Audit BPK RI

2.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi deficit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Struktur Pembiayaan Daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah bersumber dari SiLPA Tahun 2018. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Pada perubahan Tahun 2019 pengeluaran pembiayaan tidak mengalami penambahan dari anggaran murni 2019 yaitu sebesar Rp76.800.000.000 yang direncanakan untuk penyertaan modal ke Bank Jabar Banten (BJB).

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 masih sama seperti pada kebijakan APBD Tahun Anggaran 2019, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);

- b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukkan dan lain-lain;
- d. Peringkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umm yang menunjang aktivitas perekonomian; dan
- e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasasr modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

3.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah dan 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berikut adalah anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2019

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2019		Realisasi	
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	2.250.000.000.000,00	3.060.689.894.835,00	3.060.689.894.835,00	100,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		-	100.615.038.344,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.250.000.000.000,00	3.060.689.894.835,00	3.161.304.933.179,00	103,29
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	76.800.000.000,00	76.800.000.000,00	76.799.998.800,00	99,99
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	76.800.000.000,00	76.800.000.000,00	76.799.998.800,00	99,99

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA. 2019 sebelum Audit BPK RI

Pada penerimaan Pembiayaan terdapat komponen penerimaan yaitu penerimaan Kembali Dana Bergulir sebesar Rp100.615.038.344,00 sehingga penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp3.161.304.933.179,00. sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp76.799.998.800,00 seluruhnya merupakan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Selain kepada BUMD di atas, Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan juga kepada Perusahaan Milik Daerah/BUMD lainnya dan Perusahaan Patungan/Milik Swasta. Adapun rekapitulasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2019

No	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Jumlah Penyertaan Modal Per 1 Januari 2019 (Rp)	Jumlah Penyertaan Modal selama Tahun Anggaran 2019 (Rp)	Jumlah Penyertaan Modal per 31 Desember 2019 (Rp)
1	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	1.015.698.682.263,79	76.799.998.800,00	1.092.498.681.063,79
2	PT. Tirta Gemah Ripah	245.000.000.000,00		245.000.000.000,00
3	PT. Agronesia	255.000.000.000,00		255.000.000.000,00
4	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	700.000.000.000,00		700.000.000.000,00
5	PD. Jasa dan Kepariwisata	2.851.333.000.000,00		2.851.333.000.000,00
6	PD. Agribisnis dan Pertambangan	72.771.688.651,00		72.771.688.651,00
7	PT. Jamkrida Jabar	153.000.000.000,00		153.000.000.000,00
8	PT. Agro Jabar	30.000.000.000,00		30.000.000.000,00
9	PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat	1.521.554.593.000,00		1.521.554.593.000,00
10	PT. Migas Hulu Jabar	35.000.000.000,00		35.000.000.000,00
11	PT. Migas Hilir Jabar	35.000.000.000,00		35.000.000.000,00
12	PD Bank Perkreditan Rakyat	27.342.390.000,00		27.342.390.000,00
13	PT. BPR Intan Jabar	7.000.000.000,00		7.000.000.000,00
14	PT. BPR Karya Utama Jabar	5.996.750.000,00		5.996.750.000,00
15	PT. BPR Cianjur Jabar	9.165.566.750,00		9.165.566.750,00
16	PT. BPR Cipatujah Jabar	3.997.490.000,00		3.997.490.000,00
17	PT. BPR Wibawa Mukti Jabar	12.400.000.000,00		12.400.000.000,00
18	PT. BPR Majalengka Jabar	6.800.000.000,00		6.800.000.000,00
19	PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar	2.200.000.000,00		2.200.000.000,00
20	PT. BPR Karawang Jabar	900.000.000,00		900.000.000,00
21	PT. Lembaga Keuangan Mikro	29.647.803.250,00		29.647.803.250,00
22	PT. Asuransi Bangun Askrida	1.310.000.000,00		1.310.000.000,00
Jumlah		7.021.117.963.914,79	76.799.998.800,00	7.097.917.962.714,79

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA. 2019 sebelum Audit BPK RI*

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1 INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju pertumbuhan Penduduk, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Indikator Makro Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 3.1 adalah:

Tabel 3.1
Indikator Makro Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2019	
			2018	Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,30	71,42-71,91	72,03
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,36	1,50	1,30
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,25	6,66-6,96	6,82
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,17	7,70-8,00	7,99
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,66	5,4-5,9	5,07
6.	Indeks Gini	Poin	0,405	0,39-0,41	0,398

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 3.1 pencapaian terhadap kinerja pembangunan telah menunjukkan tren yang positif. Selama periode tahun 2019, pencapaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan ketercapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Ketercapaian Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat di tahun 2019 tercatat sebesar 1,30 % dari target 1,50% di tahun 2019. Penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat dimaknai bahwa penambahan penduduk Provinsi Jawa Barat dapat dikendalikan. Penurunan laju pertumbuhan

penduduk berdampak pada perubahan struktur umur penduduk yang dapat meningkatkan jumlah penduduk usia produktif sehingga dapat mempercepat fenomena bonus demografi di Provinsi Jawa Barat.

Kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat lainnya, ditunjukkan oleh capaian keadaan kemiskinan yang dapat ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin. Capaian Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tercatat sebesar 6,82 persen dari target target yang ditetapkan sebesar 6,66-6,96 persen. Penurunan persentase penduduk miskin dapat dimaknai bahwa Penduduk Jawa Barat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan telah berkurang secara signifikan. Tren positif kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kontribusi positif program-program pengentasan kemiskinan selama tahun 2019. Capaian positif keadaan kemiskinan diperkuat dengan menurunnya ketimpangan. Salah satu *parameter* ketimpangan yang sering digunakan adalah Indeks Gini. Capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Barat di tahun 2019 tercatat sebesar 0,398 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,39-0,41 poin. Semakin kecil nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Selain itu, keadaan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat di tahun 2019 tercatat sebesar 7,99 persen dari target yang ditetapkan sebesar 7,70-8,00 persen. Penurunan tingkat pengangguran sejalan dengan berkurangnya jumlah pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa selama tahun 2019, Penduduk Jawa Barat yang termasuk angkatan kerja yang dapat diserap pasar kerja telah meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 didukung pada hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian, serta Pengadaan Listrik dan Gas, sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi utama Jawa Barat tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir masih tetap ditopang oleh sektor industri pengolahan.

Namun demikian, pada tahun 2019 pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2018 (dari 6,52% menjadi 4,04%). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan ekspor karena kondisi ekonomi global yang melambat sehingga berakibat juga pada kinerja sektor industri pengolahan, terutama industri besar berorientasi ekspor yang notabene berada di Jawa Barat. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh penurunan PMA yang diakibatkan menurunnya kepercayaan investor akibat tingginya ketidakpastian ekonomi global dan ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri pada periode Pemilu kemarin.

Selain itu, dari sisi pengeluaran yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi utama Jawa Barat adalah sektor konsumsi rumah tangga yang pertumbuhannya juga mengalami perlambatan dari 5,03% pada tahun 2018 menjadi 4,75% pada tahun 2019. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan

pendapatan masyarakat akibat penurunan kenaikan UMP dan bantuan sosial yang tercatat menurun. Selain itu perlambatan terjadi juga pada sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari 5,88% di tahun 2018 menjadi 4,11% pada tahun 2019. Kondisi ini diakibatkan oleh banyaknya proyek infrastruktur di Jawa Barat yang memasuki tahap finalisasi.

3.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. Indikator kinerja utama (IKU) daerah dicapai dengan dukungan pencapaian Indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator kinerja utama (IKU) daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan Indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Adapun capaian indikator kinerja utama (IKU) daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Misi Kesatu : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid Dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun 2019	
				Target	Capaian
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,7	68,60 - 69	68,50
2.	Indeks Demokrasi	Poin	73,91	68,79 - 70,78	**65,5

Misi Kedua : Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia Dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik Yang Inovatif

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun 2019	
				Target	Capaian
1.	Indeks Kebahagiaan	Poin	70-71	70-71	*69,58
2.	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,76	73,67 - 74,87	72,85
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,14	70,34	**70,20
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,52	89,32	89,26
5.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,18	8,28	8,37
6.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,88	13,15	12,48

7.	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49	53,63	**46,20
8.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	N/A	16,63	17,43
9.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	69,61	70-71	77,50

Misi Ketiga: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun 2019	
				Target	Capaian
1.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	40,90-41,00	41-43	46,13
2.	Konsumsi listrik per kapita	kWh/kapita	1.231	1.300	1.302
3.	Indeks Desa Membangun	Poin	0,64	0,65	0,67
4.	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	0	0
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	49,54	49,76	52,12
6.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,38	2,8	3,85
7.	Indeks Penggunaan Air	Poin	N/A	1,1923	1,1920
8.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	166	165	152,13

Misi Keempat: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun 2019	
				Target	Capaian
1.	Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)	Triliun rupiah	1.962,23	2.288,75	2.125,16

2.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	81,6	82,4	89
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	110,90	113,11	112,36
4.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,85	2,30-3,00	6,84
5.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	6,52	2,63	4,04
6.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,21	3	7,51
7.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun rupiah	473	495,4	535,72
8.	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	Persen	20,1	21	21,1

Misi Kelima: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun 2019	
				Target	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB
2.	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	N/A	50	61,22

Keterangan : * Angka 2017 **Angka 2018

Sumber: BPS, Bappenas, Kementerian Agama RI dan Perangkat Daerah/Biro

Berdasarkan Tabel 3.2 bahwa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 dilengkapi parameter yang menjadi ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pencapaian indikator pada misi pertama ditunjukkan dengan ketercapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Demokrasi. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 68,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar 68,60 - 69 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama berada dalam kategori tinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa hubungan antar penganut agama tercipta secara toleran dan tidak terdapat gesekan yang berarti. Adapun capaian Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 65,50 persen pada tahun 2018. Capaian tersebut dapat dimaknai bahwa perkembangan demokrasi di Provinsi Jawa Barat berada pada kategori sedang.

Pencapaian indikator pada misi kedua ditunjukkan oleh ketercapaian 9 (sembilan) indikator kinerja daerah yakni Indeks Kebahagiaan, Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda, Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat

dan Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Kesatu, capaian Indeks Kebahagiaan Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 69,58 persen pada tahun 2017. Pengukuran Indeks Kebahagiaan didasarkan pada 3 (tiga) dimensi kehidupan yakni kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup. Indeks ini menunjukkan bahwa terdapat realisasi yang positif kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup penduduk Jawa Barat. Kedua, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) tercatat mencapai 72,85 tahun dari target yang ditetapkan mencapai 73,67-74,87 tahun. Kondisi ini merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat penduduk Jawa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketiga, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tercatat sebesar 70,20 poin pada tahun 2018. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa perempuan Jawa Barat berperan secara aktif didalam kehidupan ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Keempat, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercatat sebesar 89,26 poin dari target sebesar 89,32 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa komitmen untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender (PUG) terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kelima, capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tercatat mencapai 8,37 tahun dari target yang ditetapkan mencapai 8,28 tahun. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal terus meningkat dari tahun ke tahun. Keenam, capaian Harapan Lama Sekolah tercatat mencapai 12,48 tahun dari target yang ditetapkan mencapai 13,15 tahun. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan. Ketujuh, capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa barat tercatat sebesar 46,20 persen pada tahun 2018. Peningkatan angka tersebut didukung oleh angka partisipasi sekolah menengah dalam domain pendidikan serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dalam domain partisipasi dan kepemimpinan. Kedelapan, capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat tercatat sebesar 17,43 persen dari target yang ditetapkan sebesar 16,63 persen. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa pelestarian kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan dengan arah kebijakan meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal. Kesembilan, capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 77,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar 70-71 persen. Kondisi ini dimaknai adanya penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta meningkatnya perlindungan masyarakat. Adapun capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) akan rilis pada 17 Februari 2020 dan diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator pada misi ketiga ditunjukkan oleh ketercapaian 8 (delapan) indikator kinerja daerah yakni Tingkat Konektivitas Antar Wilayah, Konsumsi Listrik Per Kapita, Indeks Desa Membangun, Usulan pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru,, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Penggunaan Air dan Indeks Risiko Bencana (IRB). Kesatu, capaian Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 46,13 persen dari target yang

ditetapkan sebesar 41-43 persen. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa infrastruktur maupun ketersediaan prasarana transportasi berkontribusi positif terhadap aksesibilitas wilayah di Provinsi Jawa Barat. Kedua, capaian konsumsi listrik per kapita Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 1.302 kwh/kapita dari target yang ditetapkan sebesar 1.300 kwh/kapita. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa ketersediaan listrik telah memadai dan merata serta permintaan/penggunaan listrik lebih meningkat. Ketiga, capaian Indeks Desa Membangun tercatat sebesar 0,67 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,65 poin. Indeks ini dapat dimaknai bahwa status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Jawa Barat terus bertambah jumlahnya. Keempat, capaian usulan pembentukan daerah persiapan otonomi baru tercatat sebesar 0 usulan dari target yang ditetapkan sebesar 0 usulan. Meskipun usulan pembentukan daerah belum ada namun analisis dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah telah dilakukan. Kelima, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 52,12 poin dari target yang ditetapkan sebesar 49,76 poin. Pencapaian Indeks ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Keenam, Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 3,85 poin dari target yang ditetapkan sebesar 2,8 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa terdapat peningkatan upaya mitigasi perubahan iklim yang menyebabkan turunnya emisi gas rumah kaca di Provinsi Jawa Barat dibandingkan pada kondisi tanpa ada aksi mitigasi. Ketujuh, capaian Indeks Penggunaan Air tercatat sebesar 1,1920 poin dari target sebesar 1,1923 poin. Indeks ini dapat dimaknai bahwa ketersediaan air potensial ini jumlahnya relatif tetap. Kedelapan, capaian Indeks Resiko Bencana Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 152,13 poin dari target sebesar 165 poin. Penurunan angka resiko bencana dapat dimaknai bahwa tata kelola upaya penanggulangan bencana menjadi lebih baik.

Pencapaian indikator pada misi keempat ditunjukkan oleh ketercapaian 8 (delapan) indikator kinerja daerah yakni Produk Domestik Regional Bruto (ADHB), Skor Pola Pangan Harapan (SPPH), Nilai Tukar Petani (NTP), Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB, Laju pertumbuhan Sektor Industri, Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB dan Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Kesatu, capaian Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) tercatat sebesar 2.125,16 triliun dari target sebesar 2.288,75 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi dengan menurunnya pertumbuhan pada komponen lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan yang mengalami penurunan sebesar 2,76 persen serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami penurunan sebesar 1,20 persen. Kedua, capaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) tercatat sebesar 89 poin dari target sebesar 82,4 poin. Angka tersebut dapat dimaknai bahwa perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan terwujud secara ideal. Ketiga, capaian Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan desember tercatat sebesar 112,36 poin dari target sebesar 113,11 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kemampuan tukar (*term of trade*) komoditas hasil pertanian dengan barang dan jasa konsumsi petani baik untuk keperluan rumah tangga petani maupun biaya keperluan proses produksi menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan semakin tinggi

angka NTP Provinsi Jawa Barat berarti semakin kuat kemampuan daya beli petaninya. Keempat, capaian Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB tercatat sebesar 6,84 persen dari target sebesar 2,30-3,00 persen. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa komponen lapangan usaha pariwisata berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Kelima, capaian Laju Pertumbuhan Sektor Industri tercatat sebesar 4,04 persen dari target sebesar 2,63 persen. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa komponen lapangan usaha Industri menunjukkan peningkatan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Keenam, capaian Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan tercatat sebesar 7,51 persen dari target sebesar 3 persen. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa komponen lapangan usaha perdagangan menunjukkan peningkatan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Ketujuh, capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB tercatat sebesar 535,72 triliun dari target sebesar 495,3 triliun. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kedelapan, capaian Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 21,1 persen dari target sebesar 21 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bank umum yang memberikan kredit atau pembiayaan UMKM telah melampaui kewajiban minimal 20% pemberian kredit.

Pencapaian indikator pada misi kelima ditunjukkan oleh 2 (dua) indikator kinerja daerah yakni Indeks Reformasi Birokrasi dan Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tercatat pada kategori BB dari target kategori BB yang ditetapkan. Indeks ini dapat dimaknai bahwa hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut merefresentasikan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan hasil yang signifikan. Adapun mengenai capaian Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah tercatat sebesar 61,22 persen dari target sebesar 50 persen. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti sampai dengan terwujudnya hasil kerjasama telah dapat direalisasikan dan menunjukkan peningkatan yang positif.

3.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 meliputi 211 Program dan 4184 Kegiatan. Program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dijabarkan kedalam setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi baik urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Urusan konkuren pemerintahan ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan konkuren pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar maupun Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 18 (delapan belas) bidang urusan pemerintahan yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan terdiri atas 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan yakni Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Adapun Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yakni perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan serta fungsi penunjang urusan lainnya. Adapun rincian capaian program dan kegiatan dijabarkan adalah.

3.3.1 Urusan Wajib

3.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Capaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan pendidikan tahun 2019 adalah angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,37 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 8,28 tahun; Harapan lama sekolah sebesar 12,48 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 13,15 tahun; APK sekolah menengah atas/ sederajat sebesar 83,81% dari yang ditetapkan sebesar 72,00%; APM sekolah menengah atas/ sederajat sebesar 64,41% dari target yang ditetapkan sebesar 65,00%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pendidikan Menengah

Capaian indikator kinerja Program Pendidikan Menengah yakni peningkatan kapasitas dan kualitas satuan pendidikan menengah dengan realisasi sebesar 82,69% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendidikan Menengah adalah sebesar Rp1.314.521.365.825,00 dengan realisasi sebesar Rp1.235.421.005.369,00 atau setara dengan 93,98%.

- (1) Kegiatan Pengembangan Layanan Asrama Bina Siswa Cisarua Lembang yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.050.000.000,00 dan realisasi Rp2.888.062.833,00 atau setara dengan 94,69%. *Output* kegiatan adalah Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidup di asrama sebanyak 209 siswa. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan siswa Cisarua Lembang;
- (2) Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.007.885.000,00 dan realisasi Rp953.706.500,00 atau setara dengan 94,62%. *Output* kegiatan adalah 398 orang peserta didik, 8 orang peserta didik untuk mewakili Jawa Barat ke Tingkat Nasional, hasil KKP Tingkat Nasional : 1.Penggugah Pertama Vlog KKP 2019, 2. Terbaik I Penampilan Seni Budaya KKP SMA Nasional, 3.Terbaik II KKP SMA Nasional Putri, 4.Terbaik I Pembina KKP SMA Nasional Putri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui olimpiade, lomba-lomba;
- (3) Kegiatan Pasanggiri, Apresiasi, Helaran, dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.981.970.000,00 dan realisasi Rp2.899.564.050,00 atau setara dengan 97,24%. *Output* kegiatan adalah 584 orang peserta didik, 292 orang pendamping (guru), 26 orang seniman, 26 orang asisten seniman, 3 juara helaran, 36 juara pasanggiri bahasa, sastra, aksara dan kesenian daerah sunda Tingkat Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, lomba-lomba, pasanggiri;
- (4) Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA yang dilaksanakan

- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.170.000.000,00 dan realisasi Rp4.136.774.725,00 atau setara dengan 80,01%. *Output* kegiatan adalah 1250 orang peserta (KCD, MKKS, kepek, guru, pemerhati pendidikan), panduan/juklak/aturan PPDB SMA/SMK/SLB tahun pelajaran 2019/2020. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan kesempatan belajar dan daya tampung sekolah;
- (5) Kegiatan Pelayanan Olimpiade Kesiswaan Tingkat Provinsi dan Nasional SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.992.950.000,00 dan realisasi Rp1.811.070.300,00 atau setara dengan 90,87%. *Output* kegiatan adalah 103 orang peserta didik (peserta yang dikirim ke Tingkat Nasional lomba OSN, O2SN, FLS2, LDBI, NSDC, Kepak), 10 orang pelatih, Hasil juara Tingkat Nasional : 1. OSN : 29 orang peserta didik medali emas, perak, perunggu, 2. O2SN : 4 orang peserta didik medali emas, perak, perunggu, 3. FLS2N : 4 orang peserta didik medali emas, perak, perunggu. *Outcome* kegiatan adalah Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA ke Tingkat Nasional, Pembinaan Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris SMA, Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA. Meningkatkan Mutu Pembelajaran melalui Olimpiade, Lomba-lomba.;
- (6) Kegiatan Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang Pendidikan Dasar 2019 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.352.200.000,00 dan realisasi Rp1.262.588.775,00 atau setara dengan 93,37%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Rakor FLS2N SD SMP, FLS2N SD SMP Tk Provinsi 2 keg, Pembinaan FLS2N SD SMP 2 Kegiatan, Fasilitasi FLS2N SD SMP Tk Nasional 1 kegiatan sebanyak 565 peserta. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui Olimpiade, lomba-lomba dan literasi;
- (7) Kegiatan Pelaksanaan Literasi SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp984.790.000,00 dan realisasi Rp920.119.000,00 atau setara dengan 93,43%. *Output* kegiatan adalah 300 orang peserta didik, 100 orang guru, 350 eks buku hasil karya siswa dari 26 sekolah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan

- mutu pembelajaran melalui Olimpiade, Lomba-lomba dan literasi.;
- (8) Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.811.680.000,00 dan realisasi Rp5.522.945.300,00 atau setara dengan 95,03%. *Output* kegiatan adalah 1968 orang peserta didik, 620 orang pendamping/pelatih, 217 medali emas, perak, perunggu Tingkat Provinsi Jawa Barat (lomba OSN, O2SN, FLS2N, LDBI, NSDC, galaksi) & hasilnya 103 orang peserta didik untuk dikirim ke Tingkat Nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui olimpiade, lomba-lomba;
- (9) Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Operator Manajemen Data Pendidikan di Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya Belanja Barang dan Jasa Sebesar 100% Untuk: Kegiatan Penertiban dan Synchronisasi DAPODIK, Sosialisasi Sistem Aplikasi Layanan Data Terpadu (SAPDALINDA), Rapat Tim Efektif Sosialisasi Sistem Aplikasi Layanan Data Terpadu (SAPDALINDA), Sosialisasi Input Data Aplikasi Syncdapo Jabar untuk SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, Kegiatan Penertiban dan Synchronisasi Dapodik Serta Sosialisai Pembuatan Sistem Aplikasi Pemanfaatan Dapodik Untuk Layanan Data Terpadu (SAPDALINDA), Pelatihan Operator dan Verifikator PPDB, Rapat Panitia POSKO PPDB Tahun 2019, Kegiatan Simulasi Sistem Aplikasi Pemanfaatan DAPODIK Layanan Data Terpadu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Synchronisasi Dapodik di SMK NU Kaplongan, Sinkronisasi DAPODIK Cut Off TW IV dan Persiapan UN Tahun 2020 diikuti sebanyak 284 operator. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui penataan manajemen KCD;
- (10) Kegiatan Perlombaan-Perlombaan Tingkat Nasional O2SN, FLS2N, OSN LKS Tingkat KCD yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp750.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa Sebesar 100% Untuk Kegiatan: Rapat Persiapan OSN SMA Tahun 2019, Pelepasan Siswa Juara OSN SMA Tahun 2019 ke Provinsi, Pembukaan Lomba O2SN SMA Majalengka

- & Indramayu, Pembukaan O2SN SMK Majalengka & Indramayu, Rapat Persiapan FLS2N SMK Majalengka & Indramayu, Rapat Persiapan FLS2N SMA Majalengka & Indramayu, Pembukaan Pasanggiri di SMA Ligung Majalengka, Pembukaan FLS2N SMK Indramayu di SMK NU Kaplongan, Monev Lomba FLS2N ke Lampung, Pengukuhan Pelantikan Ketua OSIS SMA/SMK/SLB Negeri Cabang Dinas Wilayah IX, Rapat Koordinasi Kegiatan Perlombaan Perlombaan Tingkat Nasional O2SN, FLS2N, OSN, LKS Tingkat KCD dan Pengukuhan MKKS SMA/SMK dan Gugus SLB sebanyak 400 peserta lomba. *Outcome* meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, dan lomba-lomba;
- (11) Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp12.751.084.777,00 dan realisasi Rp10.604.069.000,00 atau setara dengan 83,16%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya 1. Rakor Penguatan Kelembagaan SMK diikuti sebanyak 600 peserta pada Tahun 2019; 2. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK diikuti sebanyak 500 siswa pada Tahun 2019; 3. Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan SMK Tahun 2019 ini diikuti sebanyak 500 peserta; 4. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Tahun 2019; 5. Kegiatan Bintek Akreditasi Tahun 2019 diikuti sebanyak 600 peserta; 6. Kegiatan O2SN SMK Tingkat Provinsi Tahun 2019 diikuti sebanyak 1500 orang; 7. Kegiatan FLS2N SMK Tingkat Provinsi Tahun 2019 diikuti sebanyak 750 peserta; 8. Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2019 diikuti sebanyak 700 orang; 9. Kegiatan EPITECH SMK Tahun 2019; 10. Kegiatan LCC 4 Pilar MPR-RI Tingkat Nasional Tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan karakter dan kepemimpinan;
- (12) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB Cabang Dinas Wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp510.000.000,00 dan realisasi Rp509.952.000,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan OSN, O2SN, LKS, FLS2N, PENTAS PAI, dan GALAKSI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, dan lomba-lomba;
- (13) Kegiatan Pendampingan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA/SLB Cabang Dinas Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

- sebesar Rp468.506.250,00 dan realisasi Rp468.360.450,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana 49 SMA/SMK/SLB Negeri 80 Sekolah Swasta. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui sistem informasi pengelolaan data;
- (14) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMKN dan SMAN/SLBN Cadisdik Wil XI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp624.860.000,00 dan realisasi Rp472.975.000,00 atau setara dengan 75,69%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya kegiatan Lombang-lomba yang sesuai dengan kalender pendidikan dan diikuti hampir 2700 Siswa yang berprestasi dibidangnya sesuai mata lomba dan kegiatannya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, dan lomba-lomba;
- (15) Kegiatan Kepemimpinan dan Karakter Siswa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp146.561.250,00 atau setara dengan 97,71%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penguatan karakter siswa di cabdin VI diikuti oleh 264 peserta didik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan karakter, dan kepemimpinan;
- (16) Kegiatan Pendampingan Akreditasi SMA, SMK, dan SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp23.150.000,00 dan realisasi Rp22.765.000,00 atau setara dengan 98,34%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya pendampingan persiapan akreditasi sebanyak 74 sekolah. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan layanan pembelajaran melalui sistem *digital learning*;
- (17) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp929.851.000,00 dan realisasi Rp929.214.200,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah Penyusunan RKJM, *action plan*, SPMI untuk 49 SMA/SMK/SLB Negeri 100 Sekolah Swasta dan SIAP JABAR untuk 49 SMA/SMK/SLB Negeri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui sistem informasi pengelolaan data;

- (18) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp55.000.000,00 dan realisasi Rp55.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Blanko Amplop Dinas 2500 lembar, Blanko SPPD 95 Rim, Kop Surat 250 Rim, Map Dinas 125 Lsn. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan alat kantor;
- (19) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp874.900.000,00 dan realisasi Rp829.250.000,00 atau setara dengan 94,78%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya O2SN perorangan dan O2SN beregu; FLS2N, LKS, EPITECH dalam 22 mata lomba. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, dan lomba-lomba;
- (20) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp874.640.000,00 dan realisasi Rp872.025.000,00 atau setara dengan 99,70%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Lomba SMA: OSN, O2SN, FLS2N, pasangiri dan debat bahasa, Lomba SLB: LKSN SLB, O2SN SLB, LITERASI SLB, ABK berseri SLB dalam seleksi 22 mata lomba. *Outcome* meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, lomba-lomba.
- (21) Kegiatan Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp92.425.000,00 atau setara dengan 92,43%. *Output* terlaksananya Kegiatan Bimtek Pemenuhan 8 SNP: Belanja ATK, Belanja Dokumentasi, Belanja Jasa profesi, Belanja Cetak, Belanja Sewa Kamar, Belanja makan minum Rapat, Belanja Mamin Diklat, Belanja Perjadin Dalam Daerah PNS Provinsi sebanyak 60 orang. *Outcome* meningkatkan mutu pemenuhan 8 SNP;
- (22) Kegiatan Lomba Kesiswaan Tingkat Sekolah Kabupaten Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp145.295.850,00 atau setara dengan 96,86%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Lomba Kesiswaan Tingkat Sekolah, Kabupaten, Monitoring Lomba Tingkat Nasional

- dalam 5 kegiatan. *Outcome* meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, lomba-lomba;
- (23) Kegiatan *Monitoring* Ujian Nasional USBN dan UNKP yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.846.250,00 atau setara dengan 99,92%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Monitoring Ujian Nasioanal UNBK dan USBN diikuti sebanyak 45 orang. *Outcome* meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan UN;
- (24) Kegiatan Pendampingan PPDB yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp72.000.000,00 dan realisasi Rp70.375.000,00 atau setara dengan 97,74%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pendampingan PPDB sebanyak 20 orang. *Outcome* meningkatkan kesempatan belajar dan daya tampung sekolah;
- (25) Kegiatan Penguatan Karakter Siswa SMA/SMK dan SLB cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah penguatan karakter siswa, SMA/SMK dan SLB Cabang, Dinas Pendidikan Wilayah VII diikuti sebanyak 200 siswa. *Outcome* meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan karakter, kepemimpinan;
- (26) Pengadaan Peralatan Pendidikan Jenjang SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp56.950.000.000,00 dan realisasi Rp56.556.009.819,00 atau setara dengan 99,31%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pengadaan printer penunjang kegiatan , pengadaan perangkat mobile interaktif pendukung kelas digital sudah dilaksanakan dan 73 sekolah sudah menerima perangkat tersebut, Pengadaan *Notebook* Untuk Kegiatan, Pengadaan Komputer Penunjang Kegiatan sudah teralisasi. Pengadaan Monitoring Kelas dan Guru barang sudah disalurkan ke setiap sekolah, sekolah penerima bantuan sebanyak 157 sekolah, Semua Kegiatan hampir mendekati 100% total bantuan pengadaan diberikan kepada 230 sekolah. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan Pendidikan;
- (27) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMA Terbuka dan SMK PJJ yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.100.000,00 dan realisasi Rp148.400.000,00 atau setara dengan

- 99,53%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya BIMTEK bagi Tutor SMATER PJJ sebanyak 2 kegiatan bimtek. *Outcome* meningkatkan akseibilitas pendidikan melalui SMATER dan PJJ;
- (28) Kegiatan Lomba Nasional Kesiswaan Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp121.825.000,00 atau setara dengan 81,22%. *Output* kegiatan adalah Telah dilaksanakannya Pendampingan O2SN, FLS2N Tk Provinsi Jawa Barat, Belanja Pakaian Batik Tradisional kegiatan lomba tk. Provinsi Jawa Barat diikuti sebanyak 250 peserta didik. *Outcome* meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, lomba-lomba;
- (29) Kegiatan Koordinasi Dan Penguatan Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.975.000,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya program pemberian bantuan beasiswa pendidikan dan bantuan hibah bagi Perguruan Tinggi di Jawa Barat dengan melibatkan 48 pengawas. *Outcome* meningkatkan tata kelola melalui ASN yang professional;
- (30) Kegiatan Pendampingan USBN UNBK/UNKP dan PPDB SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2018/2019 di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pendampingan USBN, UNBK/UNKP dan PPDB SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2018/2019 di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII diikuti sebanyak 361 sekolah. *Outcome* meningkatkan tata kelola KCD melalui sistem informasi pengelolaan data
- (31) Kegiatan Penyediaan Meubeler Kantor Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.600.000,00 atau setara dengan 99,60%. *Output* kegiatan adalah pengadaan kursi rapat (42 Buah), pengadaan rak (1 Paket), pengadaan meja rapat (1 Set). *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan kinerja di kantor cabang dinas;

- (32) Pembinaan dan Pengawasan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa Biasa di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp478.000.000,00 dan realisasi Rp472.075.000,00 atau setara dengan 98,76%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan bantuan pemerintah bagi sekolah penerima (SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta) diikuti oleh 100 orang peserta. *Outcome* meningkatkan tata kelola melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (33) Kegiatan Pengadaan Perluasan Lahan SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.050.000.000,00 dan realisasi Rp18.548.975.000,00 atau setara dengan 77,13%. *Output* kegiatan adalah 6 SMK Negeri untuk Perluasan Lahan dengan Total 37.734 M2. *Outcome* meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (34) Kegiatan Verifikasi Bimtek Penerima Hibah Smk Swasta yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp421.100.000,00 dan realisasi Rp40.362.500,00 atau setara dengan 9,59%. *Output* kegiatan adalah tersedianya bimtek bantuan hibah untuk 5 SMK swasta. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (35) Kegiatan Pembangunan RKB SMK Negeri dan rehabilitasi ruang belajar SMK Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp12.424.268.100,00 dan realisasi Rp12.226.907.434,00 atau setara dengan 98,41%. *Output* kegiatan adalah tersedianya RKB untuk 40 SMK Negeri dengan Jumlah 41 RKB dan 16 SMK Negeri untuk Rehabilitasi Ruang Belajar. *Outcome* Meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (36) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.071.725.400,00 dan realisasi Rp21.863.690.037,00 atau setara dengan 90,83%. *Output* kegiatan adalah tersedianya mebeulair untuk penerima RKB 175 SMK Negeri dengan total pengadaan berjumlah 6.433 Unit, Pengadaan Komputer 501 Unit Untuk 154 SMK Negeri, Pengadaan Mebulair Perpustakaan untuk 21 SMK Negeri terdiri dari 21 Meja, 252 Kursi, 63 Rak Buku. Pembangunan Infrastruktur sekolah untuk 32 SMK Negeri terdiri dari (Paving Block, Pengaspalan Jalan,

- Pembentengan Lingkungan Sekolah, Penahan Tebing/Kirmir dan Pemagaran Lingkungan Sekolah. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (37) Kegiatan Pembangunan USB SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.917.000.000,00 dan realisasi Rp12.563.210.436,00 atau setara dengan 50,42%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 2 USB SMK Negeri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (38) Pendampingan Pembelajaran SMA Terbuka yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.400.375.000,00 dan realisasi Rp1.317.531.400,00 atau setara dengan 94,08%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pendampingan pembelajaran SMA terbuka angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3 diikuti sebanyak 261 sekolah SMA. *Outcome* meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui SMATER dan PJJ;
- (39) Pengembangan dan Pemberdayaan Sekolah Berbasis Vokasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.442.837.500,00 dan realisasi Rp1.161.783.000,00 atau setara dengan 80,52%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan dan pemberdayaan sekolah berbasis vokasi angkatan 1, 2, dan 3, diikuti sebanyak 40 Sekolah SMA. *Outcome* meningkatkan pemenuhan 8 SNP;
- (40) Pemberdayaan dan Penguatan Tim Pengembang Kurikulum SMA, MKKS, MKPS dan MGMP serta Layanan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.916.000.000,00 dan realisasi Rp1.798.991.400,00 atau setara dengan 93,89%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan workshop pemberdayaan dan penguatan tim pengembang kurikulum SMA, MKKS, MKPS dan MGMP serta layanan pendidikan angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan melibatkan peserta sebanyak 400 orang. *Outcome* meningkatkan mutu pembelajaran melalui MGMP dan pengembangan kurikulum;
- (41) Kegiatan Pembinaan Dan Penyusunan Program Kerja SMA/SMK/SLB Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp605.325.000,00 dan realisasi Rp590.587.500,00 atau setara dengan 97,57%.

- Output* kegiatan adalah tersusunnya laporan program kerja di cabang dinas wilayah xii diikuti sebanyak 1225 orang. *Outcome* meningkatkan tata kelola KCD Melalui penataan manajemen;
- (42) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SMK/SLB Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp943.300.000,00 dan realisasi Rp904.296.750,00 atau setara dengan 95,87%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya perlombaan tingkat nasional SMA/SMK/SLB, lomba tersebut ada 43 mata Lomba. *Outcome* meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, lomba-lomba;
- (43) Pengembangan dan Penguatan Sekolah Berbasis *Digital Smart School* yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.783.312.500,00 dan realisasi Rp49.137.986.000,00 atau setara dengan 98,70%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penguatan bidang pendidikan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pendidikan diikuti sebanyak 266 SMA. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya indeks pendidikan di Jawa Barat;
- (44) Penguatan dan Supervisi 8 Standar Nasional Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.400.656.250,00 dan realisasi Rp1.274.252.600,00 atau setara dengan 90,98%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penguatan dan supervisi 8 standar nasional pendidikan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan tahap 6, total SMA yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 482 SMA. *Outcome* meningkatkan pemenuhan 8 SNP;
- (45) Penetapan Pelaksanaan Kurikulum SMA dan Penilaian Sekolah serta Pengembangan Evaluasi Pembelajaran yang dilaksanakan Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.384.798.000,00 dan realisasi Rp1.159.102.700,00 atau setara dengan 83,70%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya workshop kurikulum SMA dan penilaian sekolah serta pengembangan evaluasi pembelajaran dan membuat kajian pembentukan lembaga pengakuan kesetaraan SMA bagi kelompok usia diatas 21 tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5 sebanyak 284 SMA. *Outcome* meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan karakter;
- (46) Pendampingan Sekolah Ramah Anak yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

- sebesar Rp915.534.750,00 dan realisasi Rp851.936.000,00 atau setara dengan 93,05%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pendampingan sekolah ramah anak tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, total sekolah 280 SMA. *Outcome* meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui sekolah ramah anak;
- (47) Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi Rp1.197.982.500,00 atau setara dengan 59,90%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya penyesuaian model penilaian SMK dan terbukanya jurusan baru bagi 15 SMK yang ada di Jawa Barat. *Outcome* meningkatkan pemenuhan 8 smp melalui penyusunan program;
- (48) Kegiatan Penyusunan Soal USBN SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 5,00%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyusunan kisi-kisi UN SMK. *Outcome* meningkatkan pemenuhan 8 SNP melalui koordinasi;
- (49) Kegiatan Penguatan Peran MKKS SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp340.204.000,00 atau setara dengan 68,04%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi pergub revitalisasi bagi 100 SMK di Jawa Barat. *Outcome* meningkatkan tata kelola KCD melalui penataan manajemen;
- (50) Penyelenggaraan *Teaching Factory* SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.860.000.000,00 dan realisasi Rp861.645.000,00 atau setara dengan 46,33%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi kegiatan *Teaching Factory* SMK bagi 300 SMK di Jawa Barat. *Outcome* meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, lomba-lomba;
- (51) Kegiatan *Boarding School* SMK Berbasis Agama di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.300.000.000,00 dan realisasi Rp2.294.139.000,00 atau setara dengan 69,52%. *Output* kegiatan adalah terealisasinya bantuan dana untuk 11 sekolah penerima *Boarding School* selama 6 bulan dan tersosialisasi dan terjaringnya data PJJ SMK sebanyak 116 SMK di Jawa Barat. *Outcome*

- meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui perlombaan tingkat nasional;
- (52) Pengadaan Lahan SMA Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat sebesar Rp14.940.000.000,00 dan realisasi Rp14.089.504.100,00 atau setara dengan 94,31%. *Output* kegiatan adalah Pemenuhan Lahan SMA Negeri (1) SMAN 1 Surade Kab. Sukabumi; (2) SMAN 1 Cidahu Kab. Sukabumi; (3) SMAN 1 Baregbeg Kab. Ciamis; (4) SMAN 2 Cianjur; dan (5) SMAN 2 Sukatani Kab.Purwakarta. *Outcome* meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (53) Kegiatan Pendampingan Beasiswa Pembangunan RKB dan Rehab SMA/MA dan Perguruan tinggi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.091.382.631,00 dan realisasi Rp48.324.574.000,00 atau setara dengan 96,47%. *Output* kegiatan adalah (1) Beasiswa S1 : 1.495 Orang; (2) Beasiswa S2 : 157 Orang; (3) Beasiswa S3 : 50 Orang. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (54) Pengadaan Komputer bagi SMA Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp6.200.000.000,00 dan realisasi Rp4.614.426.250,00 atau setara dengan 74,43%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya belanja atk dan belanja jasa tenaga kerja non pegawai, komputer akan disalurkan pada pertengahan desember ada 27 Sekolah SMA Negeri yang mendapat bantuan. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (55) Pelaksanaan Pemenuhan Sarana *Mebeullair* Ruang Kelas dan Guru SMA Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.452.250.000,00 dan realisasi Rp3.349.372.500,00 atau setara dengan 97,02%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya verifikasi untuk calon sekolah penerima bantuan mebeler sudah teralisasi , pengadaan meubeulair baru tahap pemesanan di bulan september dan tahap pencairan maupun tahap pengiriman barang akan dilakukan di bulan desember, ada 39 sekolah yang mendapat bantuan. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (56) Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Sekolah yang

- dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realisasi Rp3.916.767.650,00 atau setara dengan 97,92%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah dan sarana prasarana sekolah; rehab kantor =1, RKB=49 sekolah. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (57) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp2.628.397.250,00 atau setara dengan 87,61%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembangunan rkb sekolah sebanyak SMA/MA = 31 sekolah. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (58) Pembangunan USB SMA Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp18.553.441.467,00 dan realisasi Rp18.511.016.500,00 atau setara dengan 99,77%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembangunan USB SMA, bantuan diberikan kepada 6 sekolah. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (59) Kegiatan Pendampingan USBN UNBK/UNKP dan PPDB SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2018/2019 di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp149.478.583,00 atau setara dengan 99,65%. *Output* kegiatan adalah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan USBN, UNBK/UNKP dan PPDB SMA/SMK/SLB TA 2018/2019 Sejumlah SMAN = 66 Sekolah, SMKN = 49 Sekolah. *Outcome* meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan *monitoring* dan evaluasi;
- (60) Kegiatan Pendampingan Lomba Siswa Nasional Guru Kepala Sekolah Pengawas di lingkungan Cabang Dinas Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp145.582.500,00 atau setara dengan 97,06%. *Output* kegiatan adalah pendampingan kegiatan lomba O2SN, FLSN, OSN, LKS SMA/SMK/SLB cabang dinas wilayah IV. *Outcome* Meningkatkan pemenuhan 8 SNP melalui pendampingan sarpras;

- (61) Kegiatan Pendampingan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA SMK dan SLB di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp494.400.144,00 atau setara dengan 98,88%. *Output* kegiatan adalah monitoring dan evaluasi bantuan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB cabang dinas pendidikan wilayah IV sejumlah SMAN = 66 Sekolah, SMKN = 49 Sekolah. *Outcome* meningkatkan pemenuhan 8 snp melalui pendampingan sarpras;
- (62) Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNBK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.676.300.000,00 dan realisasi Rp1.629.710.000,00 atau setara dengan 97,22%. *Output* kegiatan adalah (1) 1.275 SMA, dengan jumlah peserta 122.603; (2) 2.809 SMK, dengan jumlah peserta 321.148; (3) 122 SMALB yang menyelenggarakan UNKP dengan jumlah peserta 256; dan (4) 163 SMPLB yang menyelenggarakan UNKP dengan jumlah peserta 357. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan UNBK SMA/SMALB/SMK/Paket C/MA dan SMP/MTs/Paket B;
- (63) Kegiatan Pelayanan Pendidikan Untuk Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah Se Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi Rp597.086.400,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kepala sekolah SMA/SMK/SLB cabang dinas wilayah IV. *Outcome* meningkatkan tata kelola melalui ASN yang *professional* wilayah IV;
- (64) Kegiatan Pengelolaan Bos Pusat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.506.400.000,00 dan realisasi Rp1.419.677.700,00 atau setara dengan 94,24%. *Output* kegiatan adalah sekolah SD 19205, sekolah SMP 5086, sekolah SMA 1532, sekolah SMK 2844, sekolah SLB 380. *Outcome* meningkatkan tata kelola melalui sistem informasi pengelolaan data;
- (65) Kegiatan Implementasi Pendidikan Karakter Jabar Masagi Bagi SMA/SMK/LB di 27 Kab/Kota yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp13.343.580.000,00 dan realisasi Rp7.279.020.490,00 atau setara dengan 54,55%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembinaan

- dan penyusunan program kerja SMA/SLB wilayah 4 sebanyak 63 sekolah. *Outcome* meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan karakter, kepemimpinan;
- (66) DAK Fisik SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp278.483.890.000,00 dan realisasi Rp271.287.692.600,00 atau setara dengan 97,42%. *Output* kegiatan adalah Rehabilitasi Ruang Kelas : 577 ruang, Rehabilitasi Ruang Guru : 16 ruang, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) : 293 ruang, Pembangunan Lab. IPA : 175 ruang, Pembangunan Toilet Siswa/Guru : 292 ruang, Pengadaan Peralatan Pendidikan : 277 ruang, Pengadaan Alat Kesenian Tradisional : 49 paket, Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola : 390 OH, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi : 1, Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan :1, Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah : 1. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (67) DAK Fisik SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp189.986.332.000,00 dan realisasi Rp188.022.458.600,00 atau setara dengan 98,97%. *Output* kegiatan adalah tersedianya ruang praktek siswa (RPS) SMK untuk 88 SMK Negeri dan 47 SMK Swasta dengan jumlah ruang sebanyak 135 ruangan, tersedianya ruang kelas baru (RKB) untuk 13 SMK Negeri dan 10 SMK Swasta dengan Jumlah 46 Ruangan, Rehabilitasi Ruang Belajar 35 SMK Negeri sebanyak 147 Ruangan, tersedianya alat praktek siswa 147 Paket terdiri dari Sektor industri, Ketahanan Pangan, Industri Kreatif dan ketahanan energi. *Outcome* meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (68) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp17,676,620,000,00 dan realisasi Rp14.814.880.000,00 atau setara dengan 83,81%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pembayaran tenaga honor sekolah. *Outcome* meningkatkan tata kelola KCD II melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;

- (69) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp70.372.770.000,00 dan realisasi Rp66.004.545.000,00 atau setara dengan 93,79%. *Output* kegiatan adalah pembayaran honorarium GTK Non PNS KCD IV guru dan tata usaha SMA/SMK/SLB cabang dinas wilayah IV Sebanyak Guru = 1854 org, Tata Usaha = 794 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IV melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (70) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp29.064.425.000,00 dan realisasi Rp29.000.955.000,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah pemberian honorarium 652 orang tenaga pendidik 565 orang tenaga kependidikan. *Outcome* meningkatkan tata kelola KCD v melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (71) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.368.955.000,00 dan realisasi Rp50.285.185.000,00 atau setara dengan 99,83%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya GTK Non PNS SMA/SMK/SLB kantor cabang dinas wilayah VI Bulan Januari s.d Mei dan gaji 13 (THR). *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (72) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.918.710.000,00 dan realisasi Rp39.648.760.000,00 atau setara dengan 99,32%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya GTK Non PNS SMA/SMK/SLB kantor cabang dinas wilayah VII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (73) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp37.057.735.000,00 dan realisasi Rp34.278.980.000,00 atau setara dengan 92,50%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya honor GTK Non PNS pada SMA/SMK/SLB Negeri di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah VIII Sampai Dengan Pembayaran Bulan September 2019.

- Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD VIII melalui Pengelolaan Anggaran yang akuntabel;
- (74) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp67.628.015.000,00 dan realisasi Rp65.850.750.000,00 atau setara dengan 97,37%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja jasa tenaga kerja non pegawai untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB kantor cabang dinas wilayah IX sebesar 100%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola kcd ix melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (75) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Wilayah X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp25.862.915.000,00 dan realisasi Rp24.810.605.000,00 atau setara dengan 95,93%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya pembayaran honor GTK Bulan Januari, february, April, Mei dan Gaji ke-13 (THR), juni, juli dan agustus, september, oktober, November. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMK wilayah 5 ditingkat nasional;
- (76) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Wilayah XI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp37.880.830.000,00 dan realisasi Rp36.638.440.000,00 atau setara dengan 96,72%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya 1567 orang pendidik maupun tenaga pendidik dari 47 sekolah di Kabupaten Garut telah dibayarkan jasa tenaga non tenaga kerja 11 kali pembayaran. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD XI melalui Pengelolaan Anggaran yang akuntabel;
- (77) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp28.379.975.000,00 dan realisasi Rp27.949.090.000,00 atau setara dengan 98,48%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembayaran honor GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII selama 10 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD XII melalui Pengelolaan Anggaran yang akuntabel;
- (78) Kegiatan PMU untuk GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Wilayah XIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp30.777.045.000,00 dan realisasi Rp29.456.645.000,00 atau setara dengan 95,71%. *Output* kegiatan adalah

terlaksananya pembayaran honor GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII selama 7 bulan. *Outcome* Meningkatkan Tata Kelola KCD XII melalui Pengelolaan Anggaran yang akuntabel;

- (79) Kegiatan Saldo DAK Fisik SMK 2018 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp26,763,145,200,00 dan realisasi Rp15.071.798.816,00 atau setara dengan 56,32%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya verifikasi penerima bantuan, proses pembangunan, proses pemantauan penyedia alat praktik, pengecekan ke gudang penyedia alat sebelum di kontribusikan ke sekolah. *Outcome* Meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (80) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), SMA Negeri 1 Pangandaran yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.634.400.000,00 dan realisasi Rp1.634.400.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan SMAN 1 Pangandaran. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Pangandaran;
- (81) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), SMA Negeri 1 Parigi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.453.200.000,00 dan realisasi Rp1.453.200.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMAN 1 Parigi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Parigi;
- (82) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), SMA Negeri 1 Mangunjaya yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.215.600.000,00 dan realisasi Rp1.166.350.000,00 atau setara dengan 95,95%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMAN 1 MANGUNJAYA. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Mangunjaya;
- (83) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), SMA Negeri Langkap Lancar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp471.600.000,00 dan realisasi Rp471.600.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMAN Langkap Lancar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN Langkap Lancar;
- (84) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), SMK Negeri 1 Cijulang yang dilaksanakan Dinas Pendidikan

- Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.393.200.000,00 dan realisasi Rp1.392.507.000,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMKN 1 Cijulang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Cijulang;
- (85) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), SMK Negeri 1 Padaherang yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.881.600.000,00 dan realisasi Rp1.879.413.200,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMAN 1 Padaherang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Padaherang;
- (86) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), SMK Negeri 1 Pangandaran yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.254.000.000,00 dan realisasi Rp1.254.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMKN 1 Pangandaran. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Pangandaran;
- (87) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), SMK Negeri 2 Pangandaran yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp338.400.000,00 dan realisasi Rp338.400.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMKN 2 Pangandaran. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 2 Pangandaran;
- (88) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), Kegiatan Banjar Pintar SMKN 1 Banjar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp528.550.000,00 dan realisasi Rp525.893.300,00 atau setara dengan 99,50%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMKN 1 Banjar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Banjar;
- (89) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), Kegiatan Banjar Pintar SMKN 2 Banjar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp527.000.000,00 dan realisasi Rp510.310.000,00 atau setara dengan 96,83%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMKN 2 Banjar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 2 Banjar;
- (90) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), Kegiatan Banjar Pintar SMKN 3 Banjar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp478.950.000,00 dan realisasi Rp478.950.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMKN 3 Banjar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 3 Banjar;
- (91) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), Kegiatan Banjar Pintar SMKN 4 Banjar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp255.750.000,00 dan realisasi Rp255.750.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMKN 4 Banjar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 4 Banjar;
- (92) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), Kegiatan Banjar Pintar SMAN 1 Banjar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp130.000.000 dan realisasi Rp130.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMAN 1 Banjar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Banjar;
- (93) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), Kegiatan Banjar Pintar SMAN 2 Banjar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp468.000.000,00 dan realisasi Rp460.294.727,00 atau setara dengan 98,35%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMAN 2 Banjar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 2 Banjar;
- (94) BKK (Bantuan Keuangan Khusus), Kegiatan Banjar Pintar SMAN 3 Banjar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp457.600.000,00 dan realisasi Rp455.724.500,00 atau setara dengan 99,59%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMAN 3 Banjar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 3 Banjar.

b. Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus

Capaian Indikator Kinerja Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus adalah peningkatan kapasitas dan kualitas satuan pendidikan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dengan realisasi sebesar 89,39% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus adalah sebesar Rp53.731.543.650,00 dengan realisasi sebesar Rp49.100.914.853,00 atau setara dengan 91,38%.

- (1) Kegiatan Keterampilan Bagi Siswa SLB se-Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp726.518.750,00 dan realisasi Rp613.925.200,00 atau setara dengan 84,50%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan keterampilan kreasi barang bekas untuk siswa SLB se Jawa Barat angkatan I dan II sudah terlaksana. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan Mutu Pembelajaran melalui, kreasi keterampilan;
- (2) Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) PK PLK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp952.375.000,00 dan realisasi Rp933.460.500,00 atau setara dengan 98,01%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Camping bersama dengan nama Camping Milenial. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan Mutu Pembelajaran melalui Milinial Camp;
- (3) Pelatihan Kewirausahaan Peserta Didik PK PLK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp917.237.500,00 dan realisasi Rp803.332.000,00 atau setara dengan 87,58%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Angkatan 1 di Kabupaten Bandung Barat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Kegiatan Pengembangan karakter;
- (4) Pelaksanaan dan Pengembangan Sekolah Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.624.205.000,00 realisasi sebesar Rp24.189.500.000,00 atau setara dengan 98,23%. *Output* kegiatan adalah masih dalam tahap persiapan kegiatan, sudah melakukan pembayaran honor tenaga non pegawai sebanyak 4 orang selama 10 Bulan, sudah membayarkan honorarium pengelola dan guru tutor selama 9 bulan sedang mempersiapkan penghonoran pengelola dan guru pamong SMA Terbuka dan SMK PJJ untuk 3 bulan terakhir tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan aksebilitas pendidikan melalui SMATER dan PJJ;
- (5) Pengembangan Sarana dan Prasarana PKPLK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10.810.777.500,00 dan realisasi Rp8.695.166.785,00 atau setara dengan 80,43%. *Output* kegiatan adalah melaksanakan *monitoring* infrastruktur dan USB untuk Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKPLK dan Untuk Kegiatan Belanja Modal telah diselesaikan 14

- Paket Pekerjaan dan Sisa Paket dalam Proses Pelaksanaan Pencairan. Pembangunan 3 USB dalam Proses Pengerjaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (6) Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran SLB yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp690.600.000,00 dan realisasi Rp572.988.000,00 atau setara dengan 82,97%. *Output* kegiatan adalah telah melakukan kegiatan *monitoring* pelaksanaan USBN, sudah melaksanakan kegiatan *workshop* rapat koordinasi gugus. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan pemenuhan 8 SNP melalui rapat koordinasi gugus;
 - (7) Gebyar Perkemahan Gerakan Pramuka PKPLK Se Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.281.806.150,00 dan realisasi Rp1.043.782.050,00 atau setara dengan 81,43%. *Output* kegiatan adalah pengadaan (KAK, HPS, spesifikasi teknis). *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan karakter, kepemimpinan dengan adanya gebyar perkemahan Pramuka;
 - (8) Kegiatan Pengembangan dan Pendampingan Pendidikan Inklusif dan CIBi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp464.375.000,00 dan realisasi Rp416.130.000,00 atau setara dengan 89,61%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *workshop* kelompok kerja pendidikan program inklusif, sudah melaksanakan *workshop* penyelenggaraan pendidikan program CIBi *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui penataan manajemen dengan adanya *workshop*;
 - (9) Lomba Lomojari (Motivasi Belajar Mandiri) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp944.806.250,00 dan realisasi Rp870.496.250,00 atau setara dengan 92,13%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya perlombaan tingkat Nasional dan sosialisasi dalam kegiatan lomba. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, Olimpiade, Lomba-lomba;
 - (10) Sosialisasi Pendidikan Berbasis Nilai Pada Satuan Pendidikan Luar Biasa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp477.975.000,00 dan realisasi Rp459.645.000,00 atau setara dengan 96,17%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan *workshop* pendidikan

- berbasis karakter 2 angkatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan karakter, kepemimpinan;
- (11) Lomba dan Festival Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Lomba Tingkat Nasional PKPLK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.583.385.000,00 dan realisasi Rp3.203.270.068,00 atau setara dengan 89,39%. *Output* kegiatan adalah tahap penyeleksian dan sosialisasi kegiatan untuk lomba. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, olimpiade, lomba-lomba;
- (12) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal PKPLK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp709.537.500,00 dan realisasi Rp664.410.000,00 atau setara dengan 93,64%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan *workshop* pengembangan kurikulum muatan lokal PKPLK 3 Wilayah (Barat, Tengah, Timur) sedang mempersiapkan pencetakan buku. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan kurikulum muatan lokal;
- (13) DAK Fisik SLB yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp7.547.945.000,00 dan realisasi Rp6.634.809.000,00 atau setara dengan 87,90%. *Output* kegiatan adalah tersedianya DAK Fisik SLB (DAK Penugasan). *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan daya tampung satuan pendidikan.

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah pemenuhan jumlah, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kompetensi GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) dengan realisasi sebesar 84,68% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebesar Rp50.383.020.340,00 dengan realisasi sebesar Rp42.560.880.780,00 atau setara dengan 84,47%.

- (1) Pembinaan Keagamaan Pejabat Struktural Fungsional Pengawas Sekolah Kepala Sekolah Guru dan Staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp33.450.000,00 atau setara dengan 66,90%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pembinaan

keagamaan pejabat struktural, fungsional pengawas sekolahan, kepala sekolah, guru dan staf cabang Dinas pendidikan wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan keagamaan;

- (2) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK dan SMA/LB yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.960.000,00 dan realisasi Rp796.075.000,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah melaksanakan kegiatan *wokshop* RKKAS, kegiatan *focus group discussion*, kegiatan peta jalan revitalisasi SMK, jasa sewa kamar dan penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan *workshop* penyusunan RKJM (RKT dan RAKS) dan RKKK jenjang SMA/SLB dan SMK pada kegiatan pembinaan dan penyusunan program kerja SMA/SLB di cabang Dinas wilayah XI, pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi kegiatan rapat kerja rapor mutu sekolah dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan (PTK) untuk meningkatkan mutu pendidikan dan perolehan nilai rata-rata UNBK Tahun 2020 pada cabang Dinas pendidikan wilayah XI. *Outcome* kegiatan meningkatkan tata kelola KCD melalui penataan manajemen KCD;
- (3) Fasilitasi Lomba PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat KCD yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp975.000.000,00 dan realisasi Rp827.083.850,00 atau setara dengan 84,83%. *Output* kegiatan adalah belanja makan minum peserta GTK berprestasi dan berdedikasi di 13 KCD, pembayaran honor narasumber seleksi GTK berprestasi tingkat. KCD *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan GTK berprestasi;
- (4) Kegiatan SIMPKB/PKG yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp139.531.250,00 atau setara dengan 93,02%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan bimtek SIMPKB/PKG. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD 8 melalui sistem informasi pengelolaan data;
- (5) Kegiatan Verifikasi KIP/PIP yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp189.457.000,00 atau setara dengan 94,73%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *monitoring* dan evaluasi kegiatan verifikasi KIP/PIP di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatkan tata kelola KCD 8 melalui sistem informasi pengelolaan data;
- (6) Kegiatan Pemberdayaan MGMP Cabdin VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp237.637.500,00 dan realisasi Rp234.637.500,00 atau setara dengan 98,74%. *Output* kegiatan adalah terlaksana BIMTEK peningkatan MGMP dan tim pengembang pendidikan cabang Dinas pendidikan wilayah VI, pembayaran alat tulis kantor kegiatan publikasi ilmiah dan karya ilmiah MGMP, pembayaran jasa profesi kegiatan publikasi ilmiah dan karya ilmiah MGMP. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui penataan manajemen;
 - (7) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Penghargaan dan Perlindungan Pegawai Non PNS pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp138.000.000,00 dan realisasi Rp137.000.000,00 atau setara dengan 99,28%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembinaan, pengelolaan, peningkatan kompetensi, penghargaan dan perlindungan Pegawai Non PNS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui penataan manajemen;
 - (8) Kegiatan Penguatan Kompetensi Manajemen Keuangan Kasubag TU VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp31.200.000,00 atau setara dengan 62,40%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi kegiatan penguatan kompetensi manajerial keuangan Kasubag TU. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui penataan manajemen;
 - (9) Kegiatan Pemberdayaan MKKS Cabdin VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp46.150.000,00 dan realisasi Rp39.150.000,00 atau setara dengan 84,83%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi dan koordinasi dengan MKKS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pemberdayaan MKKS KCD VI;
 - (10) Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kinerja Guru pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp63.687.500,00 dan realisasi Rp59.865.500,00 atau setara dengan 94,00%. *Output* kegiatan adalah penyusunan dokumen pelaksanaan tim penilai penilai guru 3 kegiatan dan penilaian kinerja kepala

- sekolah SMA, SMK dan SLB 3 kegiatan, penilaian kinerja Kepala Sekolah SMA 1 kegiatan, penilaian kinerja Kepala Sekolah SMK 1 kegiatan, penilaian kinerja Kepala SLB. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan karakter, kepemimpinan;
- (11) Kegiatan Seleksi PTK berprestasi tingkat Wilayah pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp104.000.000,00 dan realisasi Rp102.300.000,00 atau setara dengan 98,37%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pembekalaan PTK berprestasi tingkat wilayah pada Cabang Dinas Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan PTK berprestasi;
- (12) Pembinaan dan Pengawasan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi Rp69.412.500,00 atau setara dengan 99,16%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya laporan pembinaan dan pengawasan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah luar biasa (SLB) di lingkungan cabang Dinas pendidikan Wilayah VII; meningkatnya pembinaan dan pengawasan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah luar biasa (SLB) di lingkungan cabang Dinas pendidikan wilayah VII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengawasan ke satuan pendidikan;
- (13) Lomba Inovasi Pembelajaran (Inobel) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp724.500.000,00 dan realisasi Rp553.625.000,00 atau setara dengan 73,93%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembayaran honor non pegawai, bimtek lomba inobel. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, lomba-lomba;
- (14) Kegiatan Penghargaan EEN SUKAESIH AWARD Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp995.000.000,00 dan realisasi Rp741.442.500,00 atau setara dengan 74,52%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi penghargaan EEN SUKAESIH AWARD tahun 2019, pengumpulan dan pemeriksaan foto folio peserta, rapat koordinasi dengan tim juri dan

- tim penilai untuk pemilihan nomine, penilaian tahap I (penilaian portofolio peserta dan verifikasi lapangan). *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, penghargaan EEN SUKAESIH AWARD;
- (15) Kegiatan Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Program Literasi Teknologi Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp522.750.000,00 dan realisasi Rp472.700.000,00 atau setara dengan 90,43%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya FGD persiapan literasi 1 angkatan, terlaksananya sosialisasi persiapan literasi 3 angkatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui ASN yang *professional*;
- (16) Kegiatan Penyelenggaraan Kihajar (Kita Harus Belajar) Kerjasama Pustekkom yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.300.000.000,00 dan realisasi Rp2.082.663.433,00 atau setara dengan 90,55%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya FGD persiapan Kihajar dan angkatan 2 angkatan, terlaksananya sosialisasi Kihajar dan atikan, terlaksananya cetak bahan sosialisasi pelaksanaan Kihajar dan Atikan tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui lomba kihajar;
- (17) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Promosi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.554.260.000,00 dan realisasi Rp1.100.680.000,00 atau setara dengan 70,82%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi rumah belajar 2 angkatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui rumah belajar;
- (18) Kegiatan Peningkatan Mutu Pengembangan Produksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp2.355.690.000,00 atau setara dengan 78,52%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya FGD aplikasi data dasar angkatan 1, terlaksananya rapat koordinasi persiapan desa digital, terlaksananya *workshop* pembuatan bahan ajar, terlaksananya *workshop* profiling data pendidikan, terlaksananya *workshop internet of things* (IOT) pendidikan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan *workshop* dan FGD;

- (19) Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Akademik GTK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.481.000.000,00 dan realisasi Rp1.753.455.782,00 atau setara dengan 70,68%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi penguatan kepala, penguatan kepala sekolah tahap 1 dan tahap 2 sebanyak 170 orang, cetak modul diklat penguatan kepala sekolah, seleksi administrasi calon kepala sekolah sebanyak 982 berkas jenjang SMA/SMK/SLB, seleksi substansi calon kepala sekolah sebanyak 100 orang, diklat bakal calon kepala sekolah sebanyak 69 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan seleksi kepala sekolah;
- (20) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sekolah Riset yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.490.000.000,00 dan realisasi Rp1.049.043.250,00 atau setara dengan 70,41%. *Output* kegiatan adalah tersedianya pelatihan VCT stem angkatan pertama sebanyak 100 Orang, pelatihan stem angkatan kedua sebanyak 100 orang, pelatihan stem angkatan ketiga sebanyak 100 orang, pelatihan stem angkatan ke empat sebanyak 100 orang, OJL kegiatan stem ke wilayah cabang dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pelatihan stem;
- (21) *Workshop* Penyusunan Model Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Daerah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp322.575.000,00 atau setara dengan 64,52%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya belanja jasa non pegawai, pelaksanaan kegiatan pelatihan guru SMK Negeri di Jawa Barat bidang keahlian teknologi informasi sebanyak 100 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pelatihan guru SMK;
- (22) Peningkatan Kompetensi Guru Seni Budaya Sunda Cerbon-Dermayu dan Melayu-Betawi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.250.000.000,00 dan realisasi Rp1.194.500.000,00 atau setara dengan 95,56%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya diklat guru seni budaya sebanyak 345 orang guru bahasa daerah dalam 3 angkatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan diklat guru seni budaya dan bahasa daerah;

- (23) Kegiatan Manajemen Peningkatan Kompetensi dan Profesi GTK dalam Keahlian Ganda yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp489.999.840,00 dan realisasi Rp359.190.000,00 atau setara dengan 73,30%. *Output* kegiatan adalah belanja jasa non pegawai, pelaksanaan kegiatan pelatihan guru SMK negeri di Jawa Barat bidang keahlian teknologi informasi sebanyak 100 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pelatihan guru SMK;
- (24) Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penulisan Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif Bagi Pendidik SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp484.875.000,00 dan realisasi Rp475.675.500,00 atau setara dengan 98,10%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kompetensi PTK dalam menyusun penulisan, publikasi ilmiah dan karya inovatif untuk memenuhi target kenaikan pangkat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan kompetensi PTK;
- (25) Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Bagi PTK SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp284.000.000,00 dan realisasi Rp278.299.000,00 atau setara dengan 97,99%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan pengembangan keprofesional, berkelanjutan bagi PTK SMA/SMK/SLB pada cabang Dinas wilayah XII sebanyak 240 PTK. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan keprofesional;
- (26) Pelaksanaan PKB Dalam Mendukung Peningkatan Uji Kompetensi Guru (UKG) di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.955.800.000,00 dan realisasi Rp1.745.159.000,00 atau setara dengan 89,23%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya persiapan UKG, pembayaran tenaga non pegawai jenjang S1 sebanyak 4 Orang bulan Januari - Oktober 2019, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan P4TK pertanian, P4TK PLB, P4TK bahasa, P4TK BINPAR, sosialisasi pelaksanaan PKB dalam mendukung peningkatan UKG di Jawa Barat sebanyak 100 Orang, pelaksanaan Diklat PKB di P4TK bahasa dan P4 TK Binpar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan UKG;

- (27) Sistem Pendataan PTK Terpadu yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp471.425.000,00 dan realisasi Rp312.733.400,00 atau setara dengan 66,34%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya persiapan pendataan GTK pada triwulan 3, FGD pendataan PTK terpadu. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui sistem informasi pengelolaan data;
- (28) Pelayanan Perlindungan dan Disiplin PTK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp322.760.000,00 atau setara dengan 43,03%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya FGD penyusunan dokumen peraturan mengenai pelayanan perlindungan dan disiplin PTK. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui PTK yang professional;
- (29) Apresiasi PAUD DIKDAS dan DIKMAS yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp980.410.000,00 dan realisasi Rp915.529.450,00 atau setara dengan 93,38%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi apresiasi GTK PAUD DIKMAS 1 kegiatan, apresiasi GTK PAUD dikmas berprestasi Jawa Barat 16 lomba, TC apresiasi GTK Tingkat nasional 2 kegiatan, fasilitasi apresiasi GTK PAUD DIKMAS berprestasi Tingkat Nasional 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, lomba-lomba;
- (30) Kegiatan Penguatan Peran Pengawas SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.171.437.500,00 dan realisasi Rp1.954.512.000,00 atau setara dengan 90,01%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis pengawas sebanyak 153 orang, seleksi administrasi calon pengawas sebanyak 441 orang, seleksi substansi calon pengawas sebanyak 130 orang, diklat calon pengawas sebanyak 129 orang, pelaksanaan PIKI sebanyak 162 Orang, terealisasinya penilaian angka kredit guru sebanyak 1500 berkas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan seleksi calon pengawas;
- (31) Penyelenggaraan Magang Guru Di Dunia Usaha dan Industri SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp662.987.700,00 atau setara dengan 66,30%. *Output* kegiatan adalah tersiapkannya pelaksanaan, koordinasi dan

- konsolidasi dengan PPPPTK BMTI, pelaksanaan FGD kegiatan magang guru di dunia usaha dan industri SMK di Jawa Barat, pelaksanaan sosialisasi kegiatan magang guru di dunia usaha dan industri SMK di Jawa Barat sebanyak 70 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan magang guru;
- (32) Penyelenggaraan Lisensi Sertifikasi Profesi Guru SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp856.650.000,00 atau setara dengan 85,67%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dengan PPPPTK BMTI, FGD kegiatan penyelenggaraan lisensi sertifikasi profesi guru SMK di Jawa Barat, sosialisasi penyelenggaraan lisensi sertifikasi profesi guru SMK di Jawa Barat sebanyak 70 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan sertifikasi profesi guru SMK;
- (33) Pelaksanaan Olimpiade Guru Nasional (OGN) TK SD SMP yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp999.850.000,00 dan realisasi Rp794.609.000,00 atau setara dengan 79,47%. *Output* kegiatan adalah pembayaran akomodasi pelaksanaan OGN Dikdas, belanja batik, pembekalan dan pelaksanaan OGN, pembinaan finalis OGN ke tingkat nasional, pendampingan pelaksanaan OGN tingkat Nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan OGN;
- (34) Manajemen Penanganan Pelayanan Tunjangan Profesi dan Kesejahteraan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp985.000.000,00 dan realisasi Rp588.361.250,00 atau setara dengan 59,73%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya FGD Penerima Tunjangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui ASN /PTK yang *professional*;
- (35) Manajemen Penilaian Kinerja Guru dan Pengawas Sekolah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp875.522.500,00 dan realisasi Rp854.761.500,00 atau setara dengan 97,63%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya dokumen pelaksanaan tim penilai penilai guru 3 kegiatan dan penilaian kinerja kepala sekolah SMA, SMK dan SLB 3 kegiatan, penilaian kinerja kepala sekolah SMA 1 kegiatan, penilaian kinerja kepala sekolah SMK 1 kegiatan, penilaian kinerja kepala SLB *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatkan tata kelola melalui penataan manajemen;
- (36) Pemetaan dan Pengolahan Data GTK SMA SMK dan SLB yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp483.560.000,00 dan realisasi Rp455.654.000,00 atau setara dengan 94,23%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya FGD analisis kebutuhan 6 kegiatan, penguatan operator SIDAKEP GTK 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui sistem informasi pengelolaan data;
- (37) Pelaksanaan Kinerja MGMP Bahasa dan Sastra Sunda Jenjang SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp955.702.500,00 dan realisasi Rp925.398.500,00 atau setara dengan 96,83%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kinerja MGMP bahasa dan sastra sunda jenjang SMA Wilayah 1-3, peningkatan kinerja MGMP bahasa dan sastra sunda jenjang SMA Wilayah 4-6, peningkatan kinerja MGMP bahasa dan sastra sunda jenjang SMA Wilayah 7-9, peningkatan Kinerja mgmp bahasa dan sastra sunda jenjang SMA Wilayah 10-13. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kinerja MGMP bahasa dan sastra sunda jenjang SMA Wilayah 1-3, peningkatan kinerja MGMP bahasa dan sastra sunda jenjang SMA Wilayah 4-6, peningkatan kinerja MGMP bahasa dan sastra sunda jenjang SMA Wilayah 7-9, peningkatan kinerja MGMP bahasa dan sastra sunda jenjang SMA Wilayah 10-13;
- (38) Penguatan dan Pembinaan GTK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.600.000.000,00 dan realisasi Rp1.390.228.056,00 atau setara dengan 86,89%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi penguatan pengawas sebanyak 90 Orang, koordinasi kegiatan penguatan peran pengawas, seleksi administrasi bakal calon pengawas sebanyak 441 orang, seleksi substansi bakal calon pengawas sebanyak 130 orang, terlaksananya Kegiatan *In Service Training* (IST) sebanyak 142 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan seleksi pengawas;
- (39) Kesejahteraan Guru Non PNS di Daerah Terpencil yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp732.587.500,00 dan realisasi Rp692.250.000,00 atau setara dengan 94,49%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi penguatan GBDT, penguatan GBDT I dan

- II 2 kegiatan, penguatan GBDT III dan V 3 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan GBDT;
- (40) Fasilitasi Penunjang Sertifikasi GTK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp302.357.500,00 atau setara dengan 60,47%. *Output* kegiatan adalah terlatihnya operator tunjangan jenjang SMA, SMK, SLB dan KCD mengenai tunjangan profesi di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (41) Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi SMA SMK dan SLB Tk. Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi Rp1.372.314.000,00 atau setara dengan 91,49%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi GTK Berprestasi dan berdedikasi, seleksi guru SMA, SMK dan SLB berprestasi, seleksi TAS SMA, perpustakaan SMA/SMK dan laboran SMA/SMK, pembinaan ke lomba tingkat nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan rapat koordinasi GTK berprestasi dan berdedikasi;
- (42) Seleksi Pendidik Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi TK, SD dan SMP tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.200.000.000,00 dan realisasi Rp1.088.896.000,00 atau setara dengan 90,74%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya seleksi guru TK, SD dan SMP, seleksi kepala TK, SD dan SMP, pembinaan ke lomba tingkat nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan seleksi PTK;
- (43) Olimpiade Guru Nasional (OGN) Jenjang Menengah dan Khusus 2019 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp999.380.500,00 dan realisasi Rp936.505.500,00 atau setara dengan 93,71%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya OGN Dikmen, pembinaan ke lomba tingkat nasional. *Outcome* kegiatan adalah pelaksanaan OGN Dikmen, pembinaan ke lomba tingkat nasional;
- (44) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.945.100.000,00 dan realisasi Rp2.695.961.129,00 atau setara dengan

- 91,54%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi O2SN SD SMP, O2SN SD SMP tingkat Jawa Barat 2 kegiatan, pembinaan O2SN SD SMP tingkat NASIONAL 2 kegiatan, Fasilitasi O2SN SD SMP tingkat Nasional 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, lomba-lomba;
- (45) Lomba Keahlian Guru Produktif yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp971.425.000,00 dan realisasi Rp508.761.152,00 atau setara dengan 52,37%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembayaran honor non pegawai, perjalanan Dinas luar provinsi koordinasi dan konsultasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, lomba-lomba;
- (46) Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah se Cabang Dinas Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp349.037.500,00 atau setara dengan 99,73%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, belanja jasa akomodasi *fullboard* bimtek meningkatkan mutu pendidikan melalui program TEKUN (Telusuri Kemampuan UN) SMA/SMK/SLB, Belanja Jasa akomodasi *fullboard* kegiatan *workshop* peningkatan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah se Cabang Dinas Wilayah VIII angkatan II, belanja jasa akomodasi *fullboard* kegiatan *workshop* peningkatan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah se cabang Dinas wilayah VIII Angkatan III. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah KCD VIII;
- (47) Kegiatan Peningkatan Profesi melalui PPG dalam Jabatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp2.575.327.550,00 atau setara dengan 85,84%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis PPG. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan bimtek PPG;
- (48) Pemberian Penghargaan GTK Berprestasi dan Berdedikasi SMA SMK dan SLB Tk. Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.995.000.000,00 dan realisasi Rp4.879.424.528,00 atau setara dengan 97,69%. *Output* kegiatan terlaksananya rapat persiapan *pre departure short course*, penggandaan

bahan administrasi, pemberian uang pembinaan, pemberian hadiah uang umroh, perjalanan Dinas *short course ke Prancis*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan penghargaan GTK berprestasi.

d. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Capaian Indikator Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Peningkatan Tata Kelola BOS yang efektif dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebesar Rp1.287.252.372.590,00 dengan realisasi sebesar Rp1.199.763.869.230,00 atau setara dengan 93,20%.

- (1) BOS pusat SMA/SMK/LB Negeri di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.286.271.000.000,00 dan realisasi Rp1.198.801.038.040,00 atau setara dengan 93,20%. *Output* kegiatan adalah tersalurkannya dana BOS sampai TW 4. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (2) Kegiatan saldo BOS pusat Tahun 2018, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp981.372.590,00 dan realisasi Rp962.831.190,00 atau setara dengan 98,11%. *Output* kegiatan adalah tersalurkannya dana BOS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel.

e. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian, dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian, dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan adalah meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dengan realisasi sebesar 88,35% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan adalah sebesar Rp15,126,400,000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.551.228.908,00 atau setara dengan 89,59%.

- (1) Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kinerja Guru pada Cabang Dinas Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah

- terpenuhinya belanja barang dan jasa sampai dengan bulan november sebesar 73,10% Untuk Kegiatan: sosialisasi K-MOB dan SIAP JABAR, penilaian kinerja kepala sekolah, rapat persiapan PPKS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui ASN yang professional;
- (2) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp453.711.883,00 atau setara dengan 90,74%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis keuangan kepada bendahara di OPD Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. *Outcome* meningkatkan tata kelola KCD melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
 - (3) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp390.500.000,00 dan realisasi Rp389.850.000,00 atau setara dengan 99,83%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyusunan program kerja SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui penyusunan program kerja penataan manajemen;
 - (4) Kegiatan Pemberdayaan MKPS VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi Rp64.100.000,00 atau setara dengan 91,57%. *Output* terlaksananya Pembinaan Pengawas sekolah di lingkungan cabang Dinas pendidikan wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pembinaan pengawas sekolah;
 - (5) Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Operator Manajemen Data Pendidikan di Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp291.575.000,00 atau setara dengan 72,89%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya pembinaan da pengelolaan operator di cabang dinas wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui penataan manajemen data pendidikan;
 - (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi Rp409.501.700,00 atau setara dengan 91,00%. *Output* kegiatan adalah

- terlaksananya Rapat Internal dan Rapat pimpinan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui ASN/PTK yang professional;
- (7) Kegiatan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp50.837.500,00 atau setara dengan 50,84%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi PPDB dan telah dilaksanakannya sosialisasi PPDB untuk jenjang SMP/MTS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan kesempatan belajar dan daya tampung sekolah Koordinasi dan Sosialisasi PPDB;
 - (8) Kegiatan Lomba Nasional Kesiswaan pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp240.000.000,00 dan realisasi Rp184.300.000,00 atau setara dengan 76,79%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Olimpiade Saints Kabupaten Tingkat Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat, terlaksananya kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui Olimpiade Saints;
 - (9) Kegiatan Pendampingan perizinan kelembagaan sekolah swasta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp20.725.000,00 dan realisasi Rp20.590.000,00 atau setara dengan 99,35%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pendampingan perizinan kelembagaan sekolah swasta, verifikasi dan validasi pemberian hibah/ bantuan sosial kepada sekolah, badan/ institusi swasta di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI Melalui penataan manajemen Pendampingan perizinan kelembagaan sekolah swasta;
 - (10) Kegiatan Pengendalian Pengawas Sekolah Berbasis Android (PESO BEBAN) di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp148.229.000,00 atau setara dengan 98,82%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pengawas berbasis PESO BEBAN di cabang dinas wilayah IV. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IV melalui PESO BEBAN sistem informasi pengelolaan data;

- (11) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Data Administrasi Kantor dan Pengarsipan pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp38.125.000,00 atau setara dengan 76,25%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan manajemen data, administrasi kantor cabang dinas pendidikan wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui penataan manajemen;
- (12) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK SMA dan PK PLK Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp87.875.000,00 dan realisasi Rp87.085.000,00 atau setara dengan 99,10%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya program kerja SMK Di cabang Dinas wil VI *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui penataan manajemen;
- (13) Kegiatan Koordinasi dan Penguatan Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp244.256.875,00 atau setara dengan 97,70%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya laporan kinerja pengawas dan penyusunan program kerja pengawas. *Outcome* kegiatan meningkatkan tata kelola melalui laporan kinerja dan program kerja pengawas untuk ASN yang professional;
- (14) Kegiatan Penguatan Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp693.200.000,00 dan realisasi Rp450.902.000,00 atau setara dengan 65,05%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya 4 kegiatan koordinasi unsur pendidikan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui penataan manajemen dengan melaksanakan 4 kegiatan koordinasi unsur pendidikan;
- (15) Pembinaan dan Pengawasan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi Rp570.571.200,00 atau setara dengan 95,10%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kepala sekolah SMA/SMK/SLB. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui ASN yang professional;

- (16) Kegiatan Pengembangan SIM Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.487.000.000,00 dan realisasi Rp2.342.924.500,00 atau setara dengan 94,21%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rekonsiliasi data pada 27 Kab/Kota di Jawa Barat, Kegiatan *Workshop* Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) terbaru, Kegiatan TOT Operator Dapodik di 13 Kantor Cabang Dinas, Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui sistem informasi pengelolaan data DAPODIK;
- (17) Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Program Dinas Pendidikan 2018 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi Rp500.497.500,00 atau setara dengan 83,42%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *Monitoring* dan evaluasi berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pada penggunaan dana bantuan hibah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (18) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp817.900.000,00 dan realisasi Rp591.440.000,00 atau setara dengan 72,31%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya laporan sinkronisasi dan evaluasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pendidikan di Jawa Barat;
- (19) Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp950.000.000,00 dan realisasi Rp891.850.000,00 atau setara dengan 93,88%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Forum PD 3 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
- (20) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar 935.000.000,00 dan realisasi Rp850.998.750,00 atau setara dengan 91,02%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya bimtek tentang pelaporan dan capaian kinerja keuangan sebanyak 4 kali, setiap Triwulan (setiap kegiatan bimtek peserta=60 orang mencakup bidang dan KCD

- 1-13). *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Pengelolaan Anggaran yang akuntabel;
- (21) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.834.200.000,00 dan realisasi Rp4.470.565.000,00 atau setara dengan 92,48%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya 1) Laporan Bimtek e-RKAS; 2) Draft Dokumen Renstra; 3) Draft Dokumen Renja; 4) Draft Dokumen RPJMD, Bimtek Pelaporan RKAKS kedalam aplikasi SIPBOS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui penataan manajemen;
- (22) Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.318.000,00 atau setara dengan 99,66%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja barang dan jasa sampai dengan bulan november Sebesar 89,72% Untuk Kegiatan: Rapat Kerja Penyampaian Informasi Kadisdik Prov. Jabar, Rapat Program Kerja Pembahasan Zonasi SMA, Sosialisasi Kegiatan *Smarttren* Ramadhan, Rapat Kerja Penyusunan KTSP, RKT dan RKAS SMA/SLB, Sosialisasi Program Kewirausahaan di SMAN 1 Sindangwangi, Bimtek Persiapan Penyusunan RKAS SMA/SMK/SLB Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020, Pembinaan Kepala SMA, Rapat Penyusunan RKAS, Penyusunan Action Plan Melalui Pemberdayaan MGMP dalam Rangka Meningkatkan Hasil UN SMA/SMK Cabang Dinas Wilayah IX Untuk Mewujudkan Jabar Juara, Penyusunan RKAS, Rapat Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK Wilayah 9. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui penataan manajemen;
- (23) Pembinaan dan penyusunan program kerja SMK wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja barang dan jasa sampai dengan Bulan November 2019 sebesar 90,59% untuk Kegiatan: rapat kerja penyampaian informasi kadisdik Provinsi Jawa Barat, sosialisasi kegiatan *smarttren* ramadhan, rapat kerja penyusunan KTSP, RKT dan RKAS SMK, kreatifitas kepala sekolah dan pengawasan dalam

penguatan pendidikan karakter, pembinaan kepala SMK, *outbond* hari pramuka Ke-58, Undangan SMK Rujukan di SMK Karnas Sindangwangi, Penyusunan *Action Plan* Melalui Pemberdayaan MGMP dalam Rangka Meningkatkan Hasil UN SMA/SMK Cabang Dinas Wilayah IX Untuk Mewujudkan Jabar Juara, Penyusunan *Action Plan* Melalui Pemberdayaan MGMP dalam Rangka Meningkatkan Hasil UN SMA/SMK Cabang Dinas Wilayah IX Untuk Mewujudkan Jabar Juara, Rapat Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK Wilayah 9. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui pemenuhan sarana dan prasarana.

f. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur dengan realisasi sebesar 87,79% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan adalah sebesar Rp37.474.633.023,00 dengan realisasi sebesar Rp34.247.502.029,00 atau setara dengan 91,39%.

- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp12.747.753.000,00 dan realisasi Rp11.740.803.100,00 atau setara dengan 92,10%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kebutuhan ATK Tw.3, penggandaan fotocopy, penjilidan, mesin pemotong rumput, troly, vacuum cleaner, lambang-lambang negara, printer portable, keyboard dan mouse, kompor gas, dispenser, peralatan dapur, audio conference, voice recorder, smartphone/tablet, sound system opro, filling kabinet, printer infus, telepon/smartphone, laptop, monitor interactive, paving blok SMK Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat, desain interior pantry/dapur, pemasangan pintu elektrik, pengecatan taman dan halaman, pembentengan bagian belakan, pembuatan taman depan area mesjid, penggantian paving blok disdik, pengadaan gerobak sampah, pengadaan rak arsip, kursi kerja PSMK, kursi kerja PSMA, kursi tunggu, instalasi listrik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

- (2) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor IX yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp268.500.000,00 dan realisasi Rp268.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja makanan dan minuman sampai dengan Bulan November sebesar 96,09% untuk kegiatan: Rapat Kunjungan Kerja DPRD Komisi V, Rapat Kunjungan Kerja Wagub Jabar, penyerahan produk cabang dinas, penandatanganan NPHD BPMU SMA/SMK/SLB Swasta, persiapan penyelenggaraan usbn berbasis komputer/android, UNBK dan UKK, kegiatan pembinaan dan pengarahan CPNS yang ditempatkan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Halal Bihalal Iedul Fitri 1 Syawal 1440 H, Persiapan Pelaksanaan PPDB SMA/SMK/SLB Majalengka, persiapan pelaksanaan PPDB SMA/SMK/SLB Indramayu, persiapan pemilihan PTK Berprestasi dan Berdedikasi, Penyusunan Program Prioritas Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020, Pengenalan Materi Pendidikan Karakter Jabar Masagi, Rapat Kerja Kepala SMA/SMK/SLB dan Pengawas, Sosialisasi Peer Review Bagi Pengawas, Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum SMA/SMK/SLB Negeri, Sosialisasi Penilaian Prestasi Kinerja Kepala Sekolah (PPKS). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD IX melalui pemenuhan Makanan dan Minuman;
- (3) Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan Dokumentasi Kantor Pada Cabang Dinas Wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp314.500.000,00 dan realisasi Rp265.850.000,00 atau setara dengan 84,53%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor pada Cabang Dinas Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II melalui pemenuhan publikasi dan dokumentasi;
- (4) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang Dinas pendidikan wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp192.200.000,00 dan realisasi Rp191.900.000,00 atau setara dengan 99,84%. *Output* kegiatan adalah belanja alat dapur, meja rapat, kursi rapat, audio conference, lemari/rak. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD V melalui pemenuhan alat kantor;

- (5) Kegiatan penyediaan kerohanian sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur cabang Dinas Pendidikan wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp152.300.000,00 dan realisasi Rp152.300.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja pakaian batik, PDH, belaja EO, sewa mobilitas darat, pakaian olahraga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan belanja pakaian;
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor cabang Dinas pendidikan wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.200.000,00 dan realisasi Rp49.200.000,00 atau setara dengan 66,31%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan halaman kantor, *service* komputer, belanja peralatan dapur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan alat kantor;
- (7) Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp190.000.000,00 dan realisasi Rp190.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah sewa gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD V melalui pemenuhan alat kantor dan sewa gedung kantor;
- (8) Kegiatan Penyediaan Kerohanian Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja baju PDH 15 Stel, baju korpri 10 stel, batik tradisional 14 stel, pakaian kerja lapangan 10 stel, dan pakaian olahraga 14 stel. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui pemenuhan belanja baju dan pakaian;
- (9) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp791.400.000,00 dan realisasi Rp791.400.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja modal s.d. Bulan Juni. mesin hitung 3 unit, tabung pemadam 4 unit, papan tulis 2 buah, kipas angin 15 unit, printer 5 unit, ups 8 unit, kompor gas 1 unit, jam dinding 15 unit,

- gordyn 48 meter, server 2 unit, mic wireless 12 unit, hardisk 10 unit, kamera 3 unit, *handycam* 3 unit. 1 dokumen LS SDH terbit SP2D, dan 2 dokumen lagi sdg dlm proses pengajuan SPM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui pemenuhan alat kantor;
- (10) Kegiatan pemeliharaan kendaraan bermotor pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp55.000.000,00 dan realisasi Rp41.000.000,00 atau setara dengan 74,55%. *Output* kegiatan adalah *service* motor 1 kali dan mobil Dinas 2 kali dan penggantian suku cadang mobil dan motor Dinas 3 kali, pelumas 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan *service* kendaraan dinas;
- (11) Kegiatan penyediaan sewa gedung/kantor/tempat/kamar/gudang pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi Rp532.500.000,00 atau setara dengan 66,56%. *Output* kegiatan sosialisasi koperasi, kegiatan monev inspektorat (pemeriksaan SPJ sekolah sampel), dokumen sewa gedung kantor sudah selesai. Dokumen LS sewa SMKN 13 SDH pencairan dana, dan masih ada 2 dokumen sewa lagi yg masih tahap pengajuan SPM (Sewa SMAN 19 Kota Bekasi dan SMAN 22 Kota Bekasi). *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui pemenuhan alat kantor sarana dan prasarana;
- (12) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur pada Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp419.700.000,00 dan realisasi Rp0,00 atau setara dengan 0%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar penyelenggaraan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur di Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP). *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola melalui ASN yang profesional berupa diklat kursus singkat dan bimbingan teknis aparatur;
- (13) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp6.391.350.000,00 dan realisasi Rp5.716.307.800,00 atau setara dengan 89,44%. *Output* kegiatan adalah

- terlaksananya belanja pengadaan genset, belanja pengadaan meja ruang comand centrer dan ruang radio, belanja modal pengadaan karpet, belanja pengadnan switch managed, belanja pengadnan switch unmanaged, belnaja pengadaan firewall, belanja pengadaan CCTV, belanja pengadaan rack wallmount, braket portable, kabel KVM, railkit, crimping tool, push down tool, kabel ties velcro dan kabel ties velcro, belanja kursi (beanbag), belanja modal pengadaan saklar lampu otomatis (remote saklar), belanja modal pengadaan jam dinding/meja, belanja pengadnan bahan akustik ruangan, belanja pengadaan perangkat micro controller. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui pemenuhan alat kantor;
- (14) Kegiatan Penyediaan Barang Inventaris Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.499.943.324,00 dan realisasi Rp1.496.490.010,00 atau setara dengan 99,77%. *Output* kegiatan adalah tersediannya mesin fotocopy, brankas, gordyn, komputer PC, AC, printer, kulkas, sound system, note book, smart phone, almari. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VIII melalui pemenuhan alat kantor;
- (15) Kegiatan Service Peralatan Penunjang Sarana prasarana Cabang Dinas Pendiidkan Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp46.312.000,00 atau setara dengan 92,62%. *Output* kegiatan adalah tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VIII melalui pemenuhan penunjang sarana prasarana;
- (16) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp150.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor, terbayarnya jasa pramubakti 2 x 6 bulan, jasa keamanan 2 x 6 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui pemenuhan jasa keamanan dan kebersihan;
- (17) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor X yang dilaksanakan Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp228.349.980,00 dan realisasi Rp225.310.700,00 atau setara dengan 98,67%. *Output* kegiatan adalah Pembayaran Belanja Pemeliharaan WC untuk para pegawai, pos satpam, paving blok, gerbang/gapura, taman belakang kantor, pintu utama loby, perlengkapan dan peralatan kantor, renovasi ruang pimpinan (desain interior). *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD X melalui pemenuhan pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung;

- (18) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp17.000.000,00 dan realisasi Rp16.802.819,00 atau setara dengan 98,84%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dengan nopol D 1333 B. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD X melalui pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas;
- (19) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp338.203.392,00 dan realisasi Rp337.769.915,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pengadaan almari, peralatan olahraga, pengadaan notebook, kulkas, *exhaust fan*, *air purifier*, *running text*, nomenklatur, televisi. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD X melalui pemenuhan Alat kantor;
- (20) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp194.000.000,00 dan realisasi Rp184.907.320,00 atau setara dengan 95,31%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya belanja langganan air, listrik, surat kabar atau majalah, internet, jasa kebersihan dan tenaga kerja non-PNS s.d Bulan November. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD X melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (21) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor II yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp764.000.000,00 dan realisasi Rp758.143.500,00 atau setara dengan 99,23%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan alat pendukung fasilitas kantor cabang Dinas Wilayah II; belanja alat tulis kantor; belanja modal pengadaan mesin TIK; penghancur kertas; AC dan scanner. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatkan tata kelola KCD II melalui pemenuhan alat kantor, sarana prasarana;
- (22) Kegiatan Pemeliharaan Gedung Taman dan Infrastruktur Kantor VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.960.000,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan gedung, taman dan infrastruktur kantor cabang Dinas Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (23) Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp48.809.841,00 atau setara dengan 97,62%. *Output* kegiatan adalah penyediaan cetak dan penggandaan pada kantor cabang Dinas Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan penyediaan cetak dan penggandaan;
- (24) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp56.000.000,00 dan realisasi Rp43.372.409,00 atau setara dengan 77,45%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya bahan bakar gas dan *service* kendaraan, pelumas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas;
- (25) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp550.000.000,00 dan realisasi Rp520.962.500,00 atau setara dengan 94,72%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat pendukung fasilitas kantor cabang dinas wilayah VI, belanja pengadaan peraalatan listrik, gordyn, genset, alat pendingin, brankas, telephone. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD VI melalui pemenuhan alat kantor, sarana prasarana;
- (26) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp146.996.454,00 atau setara dengan 98,00%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya makan minum rapat dan tamu. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan makanan dan minuman kantor;
- (27) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas

- Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp80.000.000,00 dan realisasi Rp80.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat tulis kantor pada cabang dinas Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan alat tulis kantor;
- (28) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp194.000.000,00 dan realisasi Rp178.950.000,00 atau setara dengan 92,24%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja jasa kebersihan dan keamanan dan belanja pengadaan sentolop, pentungan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (29) Kegiatan Penyediaan mebel kantor sekolah Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp84.010.000,00 atau setara dengan 84,01%. *Output* kegiatan adalah penyediaan mebel kantor cabang Dinas Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan penyediaan mebel kantor;
- (30) Kegiatan Penyediaan komputer kantor Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp71.170.000,00 atau setara dengan 94,89%. *Output* kegiatan adalah penyediaan komputer kantor cabang Dinas Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan Penyediaan komputer;
- (31) Kegiatan Pendampingan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA SMK dan PK dan PLK Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp43.000.000,00 dan realisasi Rp41.950.000,00 atau setara dengan 97,56%. *Output* kegiatan adalah peningkatannya sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB Wilayah VII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui penataan manajemen pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA SMK dan PK dan PLK;
- (32) Kegiatan Pendampingan Hibah Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah badan/institusi Swasta Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp22.000.000,00 dan realisasi Rp21.500.000,00 atau setara dengan 97,73%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pendampingan penyusunan usulan kebutuhan sarana dan prasarana, verifikasi dan validasi pemberian hibah/bantuan sosial kepada sekolah, badan/institusi swasta di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah Tata Kelola KCD VI Melalui penataan manajemen Pendampingan Hibah Peningkatan Sarana dan Prasarana;

- (33) Kegiatan Pemeliharaan sarana prasarana kantor Alat Pendukung kendaraan dan Fasilitas Kantor Pada Kantor Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp60.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya *service* kendaraan dan ganti oli kendaraan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan *service* kendaraan dinas;
- (34) Kegiatan penyediaan pengadaan gedung kantor Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp8.800.000.000,00 dan realisasi Rp8.409.212.000,00 atau setara dengan 95,56%. *Output* kegiatan adalah penyediaan pengadaan gedung kantor cabang Dinas Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan sarana prasarana pengadaan gedung kantor;
- (35) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.997.600,00 dan realisasi Rp99.908.149,00 atau setara dengan 99,91%. *Output* kegiatan adalah tersedianya BBM, *service* kendaraan, belanja suku cadang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan sarana prasarana pemeliharaan kendaraan Dinas;
- (36) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Cabang Dinas Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp95.000.000,00 atau setara dengan 95,00%. *Output* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana kantor cabang Dinas Wilayah VI. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD VI melalui pemenuhan Sarana Prasarana;

- (37) Kegiatan Penyediaan Kerohanian Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur II yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp84.494.207,00 dan realisasi Rp77.700.000,00 atau setara dengan 91,96%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan penyediaan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur di cabang Dinas Pendidikan Wilayah II - Pengadaan Batik, Pakaian Olahraga dan Peralatan Olahraga. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD II melalui pemenuhan Sarana Prasarana Pakaina dan alat olahraga;
- (38) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp37.740.800,00 dan realisasi Rp35.480.425,00 atau setara dengan 94,01%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD melalui pemenuhan Sarana Prasarana Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- (39) Peningkatan Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Wilayah XI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp610.200.720,00 dan realisasi Rp509.108.100,00 atau setara dengan 83,43%. *Output* kegiatan adalah belanja modal alat-alat keperluan kantor cabang Dinas wilayah XI. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD II melalui pemenuhan alat tulis kantor;
- (40) Pemeliharaan Perabot fasilitas dan gedung kantor pada Cabang Dinas Wilayah XI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp44.350.373,00 atau setara dengan 22,18%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya perawatan halaman dan gedung. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD II melalui pemenuhan Sarana Prasarana perawatan halaman dan gedung;
- (41) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp110.000.000,00 dan realisasi Rp109.999.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah materai, belanja cetak, penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD IV melalui pemenuhan alat tulis kantor Penyediaan Barang Habis Pakai;

- (42) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp39.999.614,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas *service* dan anti oli. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD IV melalui pemenuhan Sarana Prasarana pemeliharaan kendaraan Dinas;
- (43) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.000.000,00 dan realisasi Rp24.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pembayaran belanja pemeliharaan WC untuk para pegawai, pos satpam, paving blok. *Outcome* kegiatan Meningkatkan Tata Kelola KCD IV melalui pemenuhan Sarana Prasarana Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung;
- (44) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor CADISDIK Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.800.000,00 dan realisasi Rp199.566.000,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja modal perlengkapan kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX sampai dengan bulan November 2019 sebesar 99,88% yang dialokasikan untuk belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput, belanja modal pengadaan lambang-lambang pemerintah/negara, dan belanja modal pengadaan komputer note book untuk pengawas SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD IX melalui pemenuhan Sarana Prasarana.

g. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, dan pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dengan realisasi sebesar 85,47% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan adalah sebesar Rp182.982.853.599,00 dengan realisasi sebesar Rp162.011.203.310,00 atau setara dengan 88,54%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.884.400.000,00 dan realisasi Rp2.193.028.532,00 atau setara dengan 56,46%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pembayaran internet, majalah, koran, listrik PLN) dan air PDAM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola penyediaan langganan kantor pada sekretariat dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp7.000.000.000,00 dan realisasi Rp6.831.360.166,00 atau setara dengan 97,59%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan alat listrik dan elektronik, jasa internet, pajak kendaraan, servis kendaraan, penggantian suku cadang, pelumas oli, pemeliharaan komputer, perlengkapan kantor, alat rumah tangga, pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan taman pekarangan, jasa keamanan, jasa kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola pemeliharaan sarana dan prasarana pada sekretariat dinas pendidikan provinsi jawa barat melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (3) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp8.575.500.000,00 dan realisasi Rp7.320.504.705,00 atau setara dengan 85,37%. *Output* kegiatan adalah Belanja ATK Penunjang Kegiatan, elanja ATK *Workshop*/Sosialisasi Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Prov. Jabar, Belanja ATK *Workshop*/Sosialisasi Keuangan dan Asset Dinas Pendidikan Prov. Jabar, Belanja Materai Penunjang Kegiatan, Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Souvenir pada Dinas Pendidikan Prov. Jabar, Belanja Peralatan/Perlengkapan Olahraga pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Belanja Jasa Instruktur Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Belanja Jasa Instruktur Olahraga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Belanja Tenaga Non Teknis Kegiatan Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jabar, Belanja Cetak Penunjang Kegiatan,

- Belanja Fotocopy Dokumen Kegiatan, Belanja Sewa Kamar Kegiatan Penilaian Angka Kredit, Belanja Sewa Kamar Kegiatan *Workshop*/Sosialisasi Kegiatan Kepegawaian dan Umum, Belanja Sewa Kamar Kegiatan *Workshop*/Sosialisasi Kegiatan Keuangan dan Asset, Belanja Sewa Kamar Peserta Kegiatan PORPEMPROV, Belanja Materai Penunjang Kegiatan, Belanja Cetak Penunjang Kegiatan, Belanja Fotocopy Dokumen Kegiatan, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Kamar/Gudang, Belanja Makanan dan Minuman Diklat/Seminar/Pelatihan/Lokakarya dan Sejenisnya, Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan, Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penilaian Angka Kredit, Belanja Makan dan Minum Kegiatan PORPEMPROV, Belanja Makan dan Minum Sosialisasi/*Workshop* Kegiatan Kepegawaian dan Umum, Belanja Makan dan Minum Sosialisasi/*Workshop* Kegiatan Keuangan dan Asset, Belanja Pakaian PORPEMPROV Dinas Pendidikan Prov. Jabar, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Dinas Pendidikan Prov. Jabar, Dinas Pendidikan Prov. Jabar, Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Dinas Pendidikan Prov. Jabar, Belanja Pelatihan dan Sertifikasi, Belanja Bimbingan Teknis Aparatur Dinas Pendidikan Prov. Jabar. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui pemenuhan Sarana Prasarana, pemenuhan alat tulis kantor, pemenuhan Makan dan Minum;
- (4) Kegiatan Seleksi PTK berprestasi tingkat Wilayah pada Cabang Dinas Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.886.000,00 dan realisasi Rp199.850.000,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja barang dan jasa sampai dengan bulan november sebesar 82,74% untuk kegiatan gebyar pemberian anugerah kegiatan seleksi PTK berprestasi tingkat wlayah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan seleksi ptk berprestasi tingkat wilayah;
- (5) Kegiatan Pemberdayaan MKKS Cabdin IX yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.964.000,00 dan realisasi Rp149.910.000,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja barang

- dan jasa sampai dengan bulan November sebesar 50,02% untuk kegiatan: rapat kerja MKKS bulan januari tahun 2019, rapat kerja MKKS bulan february tahun 2019, rapat kerja persiapan seleksi calon kepala SMA/SMK/SLB negeri tahun 2019, rapat kerja MKKS bulan maret tahun 2019, rapat kerja MKKS bulan April tahun 2019, rapat kerja MKKS bulan Mei tahun 2019, rapat kerja mkks bulan Juni tahun 2019, rapat dalam rangka rapat koordinasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola pemberdayaan MKKS Cabdin IX melalui penataan manajemen;
- (6) Kegiatan Pemberdayaan MGMP Cabdin IX yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp150.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja barang dan jasa sampai dengan bulan november sebesar 89,50% untuk kegiatan: persiapan dan pelaksanaan USBN SMA, penyusunan dan perakitan naskah soal untuk pelaksanaan USBN dan Ujian Praktek, revitalisasi MGMP SMA/SMK, penyusunan MGMP, penyusunan action plan melalui pemberdayaan MGMP dalam rangka meningkatkan hasil UN SMA/SMK cabang Dinas wilayah ix untuk mewujudkan jabar juara, *workshop* peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama islam bagi guru PAI SMK Kab Majalengka. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui penataan manajemen pemberdayaan MGMP;
- (7) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor IX yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp225.450.000,00 dan realisasi Rp225.450.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja pengadaan komputer PC, pengadaan komputer note book, pengadaan mesin pemotong rumput, pengadaan papan tulis, pengadaan almari, pengadaan filling kabinet, pengadaan alat pendingin ruangan, pengadaan podium/mimbar, pengadaan printer, pengadaan scanner, pengadaan dispenser, belanja modal pengadaan kelengkapan/*accessoris* komputer dan jaringan, belanja modal pengadaan kamera. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (8) Kegiatan Pemberdayaan MKPS IX yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.900.000,00 dan realisasi

- Rp199.900.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja barang dan jasa sampai dengan bulan November 2019 sebesar 78,86% untu kegiatan; rapat kerja MKPS bulan Januari tahun 2019, rapat kerja MKPS Bulan Maret tahun 2019, rapat kerja MKPS bulan Juni tahun 2019, rapat kerja MKPS pembahasan PPDB tahun 2019, JABAR MASAGI (Pengawas), Hibah Bansos (Pengawas), rapat kerja MKPS Pembahasan PPDB Tahun 2019, rapat pleno pembahasan program kerja tahun 2020, rapat dalam rangka rapat koordinasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui penataan manajemen pemberdayaan MKPS;
- (9) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor Cabang Dinas Wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp24.974.000,00 atau setara dengan 16,65%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (10) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Cabang Dinas Wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp59.900.000,00 dan realisasi Rp38.905.501,00 atau setara dengan 64,95%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan pemeliharaan kendaraan Dinas dan pengadaan Dinas pada cabang Dinas Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (11) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur SMK Wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp325.000.000,00 dan realisasi Rp287.006.701,00 atau setara dengan 88,31%. *Output* kegiatan terlaksananya diklat, kursus singkat bimbingan teknis aparatur SMK cabang Dinas Pendidikan Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II melalui penyediaan Diklat kursus singkat dan Bimtek ASN yang professional;
- (12) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur SMA/SLB Wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp329.999.900,00 dan realisasi Rp270.333.000,00 atau setara dengan 81,92%.

- Output* kegiatan adalah terlaksananya diklat, kursus singkat bimbingan teknis aparatur SMA/SLB cabang Dinas Pendidikan Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II melalui asn yang professional;
- (13) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor SMK pada Cabang Dinas Wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp329.000.000,00 dan realisasi Rp174.400.000,00 atau setara dengan 53,01%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan rapat internal dan luar kantor SMK pada Cabang Dinas Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II Melalui penataan manajemen rapat internal;
- (14) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pada Cabang Dinas Wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp26.000.000,00 dan realisasi Rp26,000,000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kinerja cabang dinas; terpenuhinya penyediaan barang habis pakai kantor pada Cabang Dinas Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II melalui pemenuhan sarana prasarana barang habis pakai;
- (15) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada Cabang Dinas Wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp751.312.500,00 dan realisasi Rp587.942.550,00 atau setara dengan 78,26%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penyediaan rapat internal dan luar kantor pada Cabang Dinas Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II Melalui penataan manajemen rapat internal;
- (16) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.391.619,00 dan realisasi Rp150.391.619,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jasa kebersihan dan keamanan bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober belanja alat kebersihan dan bahan pembersih. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD V melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (17) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah 5 yang

- dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp275.947.739,00 dan realisasi Rp271.557.739,00 atau setara dengan 98,41%. *Output* kegiatan adalah belanja printer, aksesoris komputer, pengadaan komputer PC *all in one* pengadaan laptop, belanja *scanner*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD V melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (18) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah V yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp424.000.000,00 dan realisasi Rp421.000.000,00 atau setara dengan 99,29%. *Output* kegiatan adalah belanja jasa non pegawai bulan Januari s.d. Oktober dan THR. listrik, air dan internet Januari s.d. September. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD V melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (19) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp300.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi pembelian ATK dan pencetakan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD V melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (20) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp640.000.000,00 dan realisasi Rp638.991.250,00 atau setara dengan 99,84%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi kepala sekolah dan pengawas dan pembelian mamin tamu, briefing internal, SPPD dalam kota/kab PNS, SPPD dalam provinsi PNS, desk verval GTK non-PNS, kegiatan millennial camp. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui penataan manajemen rapat internal;
- (21) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp190.000.000,00 dan realisasi Rp159.600.000,00 atau setara dengan 84,00%. *Output* kegiatan adalah belanja peralatan dan bahan pembersih 1 paket, belanja jasa kebersihan 2 org bulan Januari s.d. November, belanja jasa keamanan 2 org bulan Januari s.d. November. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola

- KCD III melalui pemenuhan sarana prasarana jasa keamanan dan kebersihan;
- (22) Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp701.100.000,00 dan realisasi Rp700.887.500,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah rapat kerja kepala sekolah negeri dan swasta, kegiatan rapat koordinasi kepeksek dan pengawas, rapat koordinasi kepeksek, rapat koordinasi kasubbag TU, rapat koordinasi kepala sekolah swasta. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui ASN yang professional;
- (23) Kegiatan Penyediaan makam dan minum pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah makan minum rapat dan mamin tamu, kegiatan desk keuangan, belanja air galon, air mineral botol dan air mineral gelas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui pemenuhan makan dan minum;
- (24) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp45.000.000,00 atau setara dengan 60,00%. *Output* kegiatan adalah pengadaan instalasi listrik, pemeliharaan instalasi jaringan internet dan telepon. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui pemenuhan sarana prasarana jasa komunikasi;
- (25) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja ATK TW 4. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (26) Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Jaringan dan Halaman pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp42.500.000,00 dan realisasi Rp30.000.000,00 atau setara dengan 70,59%. *Output* kegiatan adalah

- tingkat pemenuhan operasional Perangkat Daerah lingkup Dinas Pendidikan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui pemenuhan sarana prasarana instalasi jaringan;
- (27) Kegiatan Penyediaan Kerohanian Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur pada Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp740.000.000,00 dan realisasi Rp227.000.000,00 atau setara dengan 30,68%. *Output* kegiatan adalah belanja peralatan olahraga, belanja pakaian kerja lapangan, seragam cleaning service dan seragam satpam lengkap, belanja jaket pakaian kerja lapangan, belanja rompi makanan, belanja sepatu olahraga, belanja batik tradisional, belanja pengadaan pakaian olahraga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (28) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor pada Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.599.100.000,00 dan realisasi Rp1.467.116.500,00 atau setara dengan 91,75%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan/pemasangan instalasi jaringan listrik ruang genset, belanja service kendaraan operasional roda 4 (empat), belanja pengantian suku cadang kendaraan, belanja pelumas kendaraan operasional roda 4 (empat), belanja pemeliharaan lampu dan alat listrik, belanja pemeliharaan alat kebersihan, belanja pemeliharaan air kotor, belanja pemeliharaan peralatan barang elektronik, belanja pemeliharaan komputer, laptop dan printer, belanja pemeliharaan server, belanja pemeliharaan barang elektronik dan pemeliharaan lampu dan alat listrik, belanja pemeliharaan alat rumah tangga dan pemeliharaan alat kebersihan, belanja pemeliharaan sound system, kamera dan handycame dan pemeliharaan infocus, belanja pemeliharaan ruang genset, belanja pemeliharaan halaman pekarangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola BTIKP yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (29) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pada Balai Teknologi informasi dan Komunikasi Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

- yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.384.399.000,00 dan realisasi Rp2.289.616.784,00 atau setara dengan 67,65%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan/pemasangan instalasi jaringan listrik ruang genset, belanja service kendaraan oprasional roda 4 (empat), belanja pengantian suku cadang kendaraan, belanja pelumas kendaraan operasional roda 4 (empat), belanja pemeliharaan lampu dan alat listrik, belanja pemeliharaan alat kebersihan, belanja pemeliharaan air kotor, belanja pemeliharaan peralatan barang elektronik, belanja pemeliharaan komputer, laptop dan printer, belanja pemeliharaan server, belanja pemeliharaan barang elektronik dan pemeliharaan lampu dan alat listrik, belanja pemeliharaan alat rumah tangga dan pemeliharaan alat kebersih, belanja pemeliharaan sound system, kamera dan handycam dan pemeliharaan infocus, belanja pemeliharaan ruang genset, belanja pemeliharaan halaman pekarangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (30) Kegiatan Pengadaan jasa Pegawai NON PNS Jasa Pengamanan dan Jasa Kebersihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp534.600.000,00 dan realisasi Rp534.600.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya honorarium jasa non-PNS, keamanan dan jasa kebersihan pada KCD Wilayah VIII sampai dengan bulan September 2019. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VIII melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (31) Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan Dokumentasi Kantor pada Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp302.000.000,00 dan realisasi Rp300.300.000,00 atau setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa, tersedianya sewa gedung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VIII melalui pemenuhan sarana prasarana sewa publikasi dan dokumentasi;
- (32) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor pada Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.800.000,00 dan realisasi Rp86.952.853,00 atau setara dengan 86,26%. *Output* kegiatan adalah belanja jasa langganan air

- s.d bulan November 2019, belanja jasa langganan listrik s.d bulan November 2019, belanja jasa langganan internet s.d bulan November 2019, belanja jasa langganan koran/majalah s.d bulan November 2019. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VIII melalui pemenuhan sarana prasarana langganan kantor;
- (33) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor pada Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.997.790,00 dan realisasi Rp147.053.540,00 atau setara dengan 98,04%. *Output* kegiatan adalah tersedianya barang habis pakai kantor pada kantor cabang dinas wilayah VIII, cetak, ATK, perangko. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VIII melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (34) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Pada Cabang Dinas Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp748.000.000,00 dan realisasi Rp741.661.000,00 atau setara dengan 99,15%. *Output* kegiatan adalah penyelenggaraan rapat pada cabang Dinas wilayah VIII, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan Dinas dalam daerah PNS provinsi, belanja perjalanan Dinas lokal dalam kab/kota PNS provinsi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola kcd VIII melalui pemenuhan makan dan minum, penataan manajemen;
- (35) Kegiatan Penghargaan (KCD AWARDS) bagi Pegawai Cabang Dinas Wilayah VIII yang berdedikasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp148.724.000,00 atau setara dengan 99,15%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan KCD Awards, terseleksinya GTK berprestasi tingkat KCD dan menjadi peserta GTK berprestasi tingkat nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VIII melalui ASN yang professional penghargaan (KCD AWARDS);
- (36) Kegiatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai Cabang Dinas Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp332.989.250,00 atau setara dengan 95,14%. *Output* kegiatan adalah jasa profesi instruktur olahraga tersedianya honor PPK, pejabat pengadaan barang jasa, penerima hasil pekerjaan tersedianya pakaian Dinas harian, pakaian olahraga,

- terlaksananya out bound dalam rangka meningkatkan sinegritas, kreatifitas, kinerja serta jiwa korsa bagi aparatur , terlaksananya outbound dalam rangka pembekalan sikap disiplin mental aparatur cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VIII melalui ASN yang professional peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- (37) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat Bimtek Aparatur Sosialisasi dll pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.814,00 dan realisasi Rp299.252.000,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya layanan pendidikan di KCD. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui penataan manajemen penyediaan diklat kursus singkat bimtek aparatur;
- (38) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya umur ekonomis inventaris kantor; meningkatnya penyediaan pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui pemenuhan sarana prasarana pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor;
- (39) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pengadaan Kendaraan Dinas pada Cabang Dinas Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp23.500.000,00 dan realisasi Rp23.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya umur ekonomis kendaraan; meningkatnya penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas dan pengadaan kendaraan dinas pada cabang Dinas Wilayah VII. service, kendaraan dinas roda 4 dan roda 2. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui pemenuhan sarana prasarana kendaraan dinas;
- (40) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dalam dan luar Kantor dan Perjalanan Dinas PNS Provinsi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp679.404.750,00 dan realisasi Rp660.939.553,00

- atau setara dengan 97,28%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kinerja dan layanan cabang dinas; meningkatnya penyediaan rapat internal dalam dan luar kantor dan perjalanan Dinas PNS Provinsi Cabang Dinas Wilayah VII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui penataan manajemen rapat internal dalam dan luar kantor;
- (41) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp139.600.000,00 dan realisasi Rp139.600.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kinerja cabang dinas; meningkatnya penyediaan barang habis pakai kantor pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan barang habis pakai;
- (42) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Honor Non PNS Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp736.700.000,00 dan realisasi Rp735.849.000,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah langganan telepon, langganan air, langganan listrik, langganan internet, langganan surat kabar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan langganan kantor;
- (43) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada Cabang Dinas Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp590.050.000,00 dan realisasi Rp590.050.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sampai dengan bulan November sebesar 59,94%. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata kelola KCD IX melalui penataan manajemen rapat internal dan luar kantor;
- (44) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp604.790.000,00 dan realisasi Rp559.920.000,00 atau setara dengan 92,58%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi PPDB SMA/SMK tahun pelajaran 2019/2020, bimtek penyusunan kurikulum SMA/SMK, bimtek rewiev RKAS Lembaga TP 2019/2020, bimtek penyusunan program wakasek, Ijin prinsip/operasional, bimtek penyusunan RKAS

- BOS, sosialisasi PKG dan PKKS, sosialisasi dan sinkronisasi penerimaan BOS dan DAPODIK, bimtek aplikasi e-Persediaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD X melalui penataan manajemen penyediaan diklat kursus singkat dan bimtek;
- (45) Kegiatan Penyediaan Kerohanian Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp93.800.000,00 dan realisasi Rp93,800,000,00 atau setara dengan 100,00 *Output* kegiatan adalah pengadaan pakaian Korpri dan batik tradisional, pakaian olahraga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD X melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan kerohanian;
- (46) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp156.106.932,00 dan realisasi Rp152.418.466,00 atau setara dengan 97,64%. *Output* kegiatan adalah belanja jasa keamanan dan kebersihan, bahan dan alat kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD X melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan jasa keamanan dan kebersihan;
- (47) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.171.186.300,00 dan realisasi Rp1.133.750.750,00 atau setara dengan 96,80%. *Output* kegiatan adalah rapat-rapat kegiatan, perjalanan Dinas dalam daerah, dalam kota/kab, luar provinsi, millennial camp anti radikalisme, Cianjur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD X melalui penataan manajemen rapat internal dan luar kantor;
- (48) Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan Dokumentasi Kantor X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi Rp30.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah publikasi PPDB dan ITB, publikasi anti radikalisme. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD X melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan sewa publikasi dan dokumentasi;
- (49) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya II yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp107.250.000,00 dan realisasi

- Rp107.250.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan operasional perangkat cabang Dinas dalam menyediakan jasa keamanan dan jasa kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan jasa keamanan dan kebersihan;
- (50) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor II yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp137.407.500,00 dan realisasi Rp67.210.500,00 atau setara dengan 48,91%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan penyediaan langganan kantor di kantor Cabang Dinas Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan langganan kantor;
- (51) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp650.000.000,00 dan realisasi Rp166.074.000,00 atau setara dengan 25,55%. *Output* kegiatan adalah tidak terlaksananya kegiatan penyediaan rapat internal dan luar kantor di Cabang Dinas Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II melalui penataan manajemen rapat internal dan luar kantor;
- (52) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur II yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi Rp13.000.000,00 atau setara dengan 43,33%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan penyediaan diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur di cabang Dinas Pendidikan Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD II melalui ASN yang professional diklat kursus singkat dan bimtek;
- (53) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor X yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp155.400.000,00 dan realisasi Rp155.400.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah penyediaan ATK, penjilidan dan belanja cetak map kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD X melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (54) Kegiatan Pendampingan sarana dan Prasarana Pendidikan SMA SMK dan SLB di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

- sebesar Rp375.000.000,00 dan realisasi Rp366.227.500,00 atau setara dengan 97,66%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pendampingan sarana dan prasarana pendidikan SMA, SMK dan SLB di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII; - tersedianya kegiatan pendampingan sarana dan prasarana pendidikan SMA, SMK dan SLB di Lingkungan cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola kcd melalui pemenuhan sarana prasarana pendampingan sarana dan prasarana Pendidikan;
- (55) Kegiatan Pendampingan Lomba Siswa Nasional Guru Kepala Sekolah Pengawas di lingkungan Cabang Dinas Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.014.500.000,00 dan realisasi Rp1.010.959.500,00 atau setara dengan 99,65%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pendampingan lomba siswa nasional, guru, kepala sekolah, pengawas di lingkungan cabang Dinas Wilayah VII; tersedianya kegiatan pendampingan lomba siswa nasional, guru, kepala sekolah, pengawas di lingkungan cabang Dinas Wilayah VII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VII melalui penataan manajemen pendampingan lomba siswa nasional guru kepala sekolah pengawas;
- (56) Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan Dokumentasi Kantor VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp780.000.000,00 dan realisasi Rp715.462.387,00 atau setara dengan 91,73%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sewa publikasi dan dokumentasi kantor cabang Dinas wilayah vi, belanja langganan listrik, majalah/koran, air minum/galon, jasa profesi, sewa gedung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan sewa publikasi dan dokumentasi;
- (57) Kegiatan pembinaan dan perjalanan Dinas Pengawas Sekolah SMA SMK dan PK PLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp89.675.000,00 dan realisasi Rp86.915.000,00 atau setara dengan 96,92%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kebutuhan fasilitasi pembinaan dan perjalanan Dinas sekolah SMA, SMK dan PK PLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI. *Outcome*

- kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD VI melalui penataan manajemen pembinaan dan perjalanan Dinas pengawas sekolah;
- (58) Kegiatan Layanan Publikasi dan Informasi Program Pendidikan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi Rp1.385.705.900,00 atau setara dengan 92,38%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pembuatan website di Dinas Pendidikan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui pemenuhan sarana prasarana pembuatan *website*;
- (59) Kegiatan Penyediaan Kerohanian Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp191.823.500,00 atau setara dengan 95,91%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kebutuhan kesejahteraan aparatur Cabang Dinas Wilayah XII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan kerohanian;
- (60) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp28.000.000,00 dan realisasi Rp24.000.000,00 atau setara dengan 85,71%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor pada Cabang Dinas Wilayah XII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui pemenuhan sarana prasarana pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor;
- (61) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp124.500.000,00 dan realisasi Rp124.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional perangkat cabang Dinas dalam penyediaan jasa keamanan dan jasa kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan jasa keamanan dan kebersihan;
- (62) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang

- dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp372.988.521,00 dan realisasi Rp368.471.780,00 atau setara dengan 98,79%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan alat pendukung fasilitas kantor cabang Dinas wilayah XII 1. Penghancur Kertas 3 unit 3. Flip Chart 2 unit 4. Komputer PC 2 unit 5. Laptop 2 unit 6. Printer 2 unit 7. Scanner 2 unit 8. Handycam 1 unit 9. Proyektor 2 unit 10. Screen 2 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (63) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada Cabang Dinas Wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.965.750,00 dan realisasi Rp432.212.000,00 atau setara dengan 86,45%. *Output* kegiatan rapat 1 minggu sekali, perjalanan dinas luar provinsi untuk studi banding. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XI melalui penataan manajemen rapat internal dan luar kantor;
- (64) Penyediaan sewa publikasi dan dokumentasi kantor pada Cabang Dinas Wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.955.000,00 dan realisasi Rp172.345.000,00 atau setara dengan 86,19%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Cabang Dinas Wilayah XI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XI melalui pemenuhan sarana prasarana sewa publikasi dan dokumentasi;
- (65) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor pada Cabang Dinas Wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp90.000.000,00 dan realisasi Rp89.650.000,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan adalah bahan alat tulis kantor terpenuhi sebesar 100%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XI melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (66) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Cabang Dinas Wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.700.000,00 dan realisasi Rp22.009.420,00 atau setara dengan 44,28%. *Output* kegiatan adalah mengelola kendaraan Dinas sebagai aset pemerintah yang harus dipelihara, pembelian 4 ban mobil. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XI melalui pemenuhan sarana prasarana pemeliharaan kendaraan dinas;

- (67) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta peralatannya pada Cabang Dinas Wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp323.735.114,00 dan realisasi Rp153.672.428,00 atau setara dengan 47,47%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan dan supir dan hama terealisasi sebesar 100%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XI melalui pemenuhan sarana prasarana jasa keamanan dan kebersihan;
- (68) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas kantor pada Cabang Dinas Wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.712.125,00 dan realisasi Rp489.985.000,00 atau setara dengan 98,05%. *Output* kegiatan adalah pengembangan website, belanja modal macbook 1 unit, belanja modal meja dan kursi kerja 60 unit, meja rapat 15 unit, kursi rapat 60 unit, proyektor 2 unit dan 9 unit komputer PC. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan sarana prasarana alat pendukung fasilitas kantor;
- (69) Penyediaan Diklat Kursus singkat dan bimtek aparatur pada Cabang Dinas Wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp599.841.000,00 dan realisasi Rp481.280.000,00 atau setara dengan 80,23%. *Output* kegiatan 3P (Penampilan Pelayanan dan Prestasi), kegiatan OPAK peningkatan aparatur cabang dinas. kegiatan Dapodik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XI melalui sistem informasi pengelolaan data;
- (70) Penyediaan kerohanian sarana dan prasarana olahraga serta Pakaian Aparatur pd cabang Dinas Wil 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.740.000,00 dan realisasi Rp93.800.000,00 atau setara dengan 94,04%. *Output* kegiatan adalah 65 stel pakaian batik, 65 stel baju olahraga 1 stel dan pelatih senam. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XI melalui pemenuhan sarana prasarana kerohanian sarana dan prasarana;
- (71) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp237.800.000,00 dan realisasi Rp155.540.302,00 atau setara dengan 65,41%. *Output* kegiatan adalah pembayaran honorarium non-PNS KCD Wilayah IV. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (72) Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp220.000.000,00 dan realisasi Rp169.300.000,00 atau setara dengan 76,95%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor pada cabang Dinas Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui penataan manajemen;
- (73) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp55.300.000,00 atau setara dengan 92,17%. *Output* kegiatan adalah belanja jasa keamanan, jasa kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IV melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan jasa keamanan dan kebersihan;
- (74) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp489.826.000,00 atau setara dengan 97,97%. *Output* kegiatan adalah dilaksanakannya 3 kali bimbingan teknis. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IV melalui penataan manajemen penyediaan diklat kursus singkat dan bimtek;
- (75) Kegiatan Penyediaan Kerohanian Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi Rp66.660.000,00 atau setara dengan 95,23%. *Output* kegiatan adalah pembelian seragam batik, dan seragam yg lainnya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IV melalui pemenuhan sarana prasarana kerohanian dan olahraga;
- (76) Kegiatan pembinaan dan perjalanan Dinas aparatur PNS) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp850.000.000,00 dan realisasi Rp850.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah perjalanan dinas lokal dalam kota/kabupaten PNS provinsi, perjalanan dinas dalam daerah PNS provinsi, dan perjalanan Dinas

- luar provinsi PNS provinsi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (77) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA SMK dan PK dan PLK Cabang Dinas Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp8.174.254.500,00 dan realisasi Rp4.994.209.450,00 atau setara dengan 61,10%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana SMA SMK dan PK dan PLK cabang dinas wilayah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan daya tampung satuan pendidikan;
- (78) Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan Dokumentasi Kantor. yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.031.057.500,00 dan realisasi Rp1.011.052.100,00 atau setara dengan 98,06%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor pada Cabang Dinas Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui penataan manajemen penyediaan sewa publikasi dan dokumentasi;
- (79) Kegiatan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Cabang Dinas Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp195.500.000,00 atau setara dengan 97,75%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi PPDB. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui sistem informasi pengelolaan data Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- (80) Kegiatan Pemberdayaan MKKS yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp487.225.000,00 atau setara dengan 97,45%. *Output* kegiatan adalah koordinasi dan rapat internal. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I Melalui penataan manajemen pemberdayaan MKKS;
- (81) Kegiatan Pemberdayaan MGMP yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp60.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja alat tulis kantor dan rapat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (82) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor yang dilaksanakan Dinas Pendidikan

- Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp150.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat dan lembur pegawai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan makan dan minum rapat;
- (83) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp220.000.000,00 dan realisasi Rp219,995,450,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah bertambahnya alat pendukung fasilitas kantor yakni printer. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui pemenuhan sarana prasarana printer;
- (84) Kegiatan Penyediaan mebel kelas Cabang Dinas Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100,000,000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Pengadaan Kursi Kerja dan Kursi Rapat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan mebel;
- (85) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Cabang Dinas Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan suku cadang kendaraan bermotor dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui pemenuhan sarana prasarana pemeliharaan kendaraan dinas;
- (86) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada Cabang Dinas Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp620.480.000,00 dan realisasi Rp620.480.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja makan dan minum rapat internal. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan makan dan minum rapat;
- (87) Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan pada Cabang Dinas Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja ATK, cetak dan penggandaan/fotocopy. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;

- (88) Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Operator Manajemen Data Pendidikan di Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp400.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja makan dan minum lokakarya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui pemenuhan makan dan minum lokakarya;
- (89) Kegiatan pemeliharaan gedung taman dan infrastruktur kantor yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi Rp70.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja pemeliharaan perlengkapan kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan sarana prasarana pemeliharaan gedung taman dan infrastruktur;
- (90) Kegiatan Perlombaan Tingkat Nasional O2SN FLS2N OSN LKS Tingkat KCD yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp300.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja ATK dan mamim rapat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui pemenuhan alat tulis kantor, pemenuhan makan dan minum;
- (91) Kegiatan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Cabang Dinas Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp189.647.500,00 atau setara dengan 94,82%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi PPDB dan rapat persiapan PPDB. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui penataan manajemen;
- (92) Kegiatan Perlombaan Perlombaan Tingkat Nasional O2sn Fls2n OSN LKS Tingkat KCD yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi Rp331.355.000,00 atau setara dengan 73,63%. *Output* kegiatan OSN, O2SN. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, lomba-lomba;
- (93) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Penghargaan dan Perlindungan Pegawai Non PNS pada Cabang Dinas Wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp155.200.000,00 dan realisasi

- Rp155.200.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya pembinaan, pengelolaan, peningkatan kompetensi, penghargaan dan perlindungan pegawai Non PNS pada Cabang Dinas Wilayah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui penataan manajemen pembinaan pengelolaan peningkatan kompetensi;
- (94) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor. yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi Rp521.313.158,00 atau setara dengan 86,89%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya fasilitas pendukung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (95) Kegiatan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Cabang Dinas Wilayah. yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp217.553.000,00 atau setara dengan 72,52%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi PPDB. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan kesempatan belajar dan daya tampung sekolah sosialisasi PPDB;
- (96) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Cabang Dinas Wilayah. yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp21.817.650,00 atau setara dengan 21,28%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya perawatan kendaraan dinas service and ganti oli. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui pemenuhan sarana prasarana pemeliharaan kendaraan dinas;
- (97) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada Cabang Dinas Wilayah. yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.299.960.000,00 dan realisasi Rp1.007.817.850,00 atau setara dengan 77,53%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat internal dan rapat diluar kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui penataan manajemen rapat internal dan luar kantor;
- (98) Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Operator Manajemen Data Pendidikan di Wilayah. yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi Rp278.877.500,00 atau setara dengan 39,84%.

- Output* kegiatan adalah belanja pemeliharaan perlengkapan kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XIII melalui sistem informasi pengelolaan data;
- (99) Kegiatan Pemberdayaan MKPS yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp392.693.750,00 atau setara dengan 78,54%. *Output* kegiatan adalah pembinaan pengawas sekolah di lingkungan cabang Dinas pendidikan wilayah XIII. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XIII melalui ASN yang professional pemberdayaan MKPS;
- (100) Kegiatan pemeliharaan gedung taman dan infrastruktur kantor yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp265.375.000,00 atau setara dengan 53,08%. *Output* kegiatan adalah belum membuat laporan selama 3 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan sarana prasarana;
- (101) Kegiatan Perlombaan Perlombaan Tingkat Nasional O2SN FLS2N OSN LKS Tingkat KCD. yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi Rp390.881.050,00 atau setara dengan 48,86%. *Output* kegiatan adalah pembelian belanja barang habis pakai, bahan kantor, peralatan kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui, Lomba-lomba;
- (102) Pelayanan Adminisrasi Perkantoran pada Sekertariat Dinas Pendidikan Prov. Jabar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp9.000.000.000,00 dan realisasi Rp8.977.346.215,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah pembelian belanja habis pakai, pembelian bahan kantor, pembelian cetak dan pengadaan, belanja perlengkapan dan peralatan kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola Dinas Pendidikan Prov. Jabar melalui pemenuhan sarana prasarana adminisrasi perkantoran;
- (103) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur cabang Dinas pendidikan wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp497.200.000,00 dan realisasi Rp496.882.520,00 atau setara dengan 99,94%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi guru berprestasi dan sosialisasi KMOB. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatkan tata kelola KCD V melalui penataan manajemen diklat kursus singkat dan bimtek;
- (104) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Cabang Dinas Wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp660.000.000,00 dan realisasi Rp623.532.000,00 atau setara dengan 94,47%. *Output* kegiatan adalah perjalanan dinas dalam daerah PNS provinsi, perjalanan dinas lokal dalam kabupaten/kota PNS provinsi, MILENIAL CAMP. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD V melalui penataan manajemen rapat internal dan luar kantor;
- (105) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor III yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp241.300.300,00 atau setara dengan 68,94%. *Output* kegiatan adalah pembayaran honor jasa tenaga kerja januari s.d. November 6 org, langganan air bulan s.d. Oktober, langganan internet bulan s.d. Oktober, langganan listrik bulan s.d. Oktober. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan langganan kantor;
- (106) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor IX yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja bahan pakai habis sampai dengan bulan November 2019 sebesar 98,50%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui pemenuhan fasilitas dan alat tulis kantor;
- (107) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp113.600.000,00 dan realisasi Rp113.600.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja jasa kebersihan/pramu bakti, belanja jasa keamanan/pengemudi/front office, dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sampai dengan bulan November 2019 sebesar 83,63%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui pemenuhan sarana prasarana jasa keamanan dan kebersihan;
- (108) Kegiatan Penyediaan Kerohanian Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp250.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah perbaikan kinerja PNS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan sarana prasarana kerohanian, olahraga;
- (109) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp299.124.500,00 atau setara dengan 99,71%. *Output* kegiatan adalah belanja modal pengadaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan sarana prasarana belanja modal pengadaan;
- (110) Penyediaan Sewa Publikasi dan Dokumentasi Kantor pada Cabang Dinas Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp200,000,000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya sewa gedung untuk kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui pemenuhan sarana prasarana sewa gedung;
- (111) Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur pada Cabang Dinas Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp476.586.000,00 dan realisasi Rp476.586.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi sampai dengan bulan November sebesar 67,84%. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Tata Kelola KCD IX Melalui penataan manajemen Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur;
- (112) Penyediaan Kerohanian Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur pada Cabang Dinas Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp90.710.000,00 dan realisasi Rp90.710.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja pakaian dinas harian untuk, belanja pakaian Korpri, belanja pakaian batik tradisional, dan belanja pakaian olahraga untuk aparatur di cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX sebanyak 97,56%. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatkan tata kelola KCD IX melalui penataan manajemen diklat kursus singkat dan bimtek aparatur;
- (113) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp34.000.000,00 dan realisasi Rp33.276.117,00 atau setara dengan 97,87%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja perawatan kendaraan bermotor untuk kendaraan Dinas di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX realisasi bulan November Mencapai 52,42%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui pemenuhan sarana prasarana kendaraan dinas;
- (114) Penyediaan Langganan Kantor Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja jasa kantor : belanja langganan listrik, belanja langganan surat kabar/majalah, belanja jasa kawat/faksimil/internet, sampai dengan bulan November Sebesar 57,92%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IX melalui pemenuhan sarana prasarana langganan kantor;
- (115) Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp76.000.000,00 dan realisasi Rp76.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja pemeliharaan sampai dengan bulan November sebesar 45,50%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD melalui pemenuhan sarana prasarana pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung;
- (116) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp608.200.000,00 dan realisasi Rp603.529.750,00 atau setara dengan 99,23%. *Output* kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar, dalam rangka mendukung tugas pokok, dan fungsinya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui penataan manajemen rapat internal dan luar kantor;
- (117) Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan Dokumentasi Kantor Pada Cabang Dinas Wilayah

- XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp222.000.000,00 dan realisasi Rp194.800.000,00 atau setara dengan 87,75%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhi Persentase unit kerja, SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui penataan manajemen penyediaan sewa publikasi dan dokumentasi;
- (118) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp48.000.000,00 dan realisasi Rp45.449.115,00 atau setara dengan 94,69%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya persentase unit kerja, SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan langganan kantor;
- (119) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp34.374.245,00 dan realisasi Rp34.372.605,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya persentase unit kerja, SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD XII melalui pemenuhan sarana prasarana penyediaan barang habis pakai;
- (120) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Pada Cabang Dinas Wilayah XII yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp550.050.000,00 dan realisasi Rp543.858.750,00 atau setara dengan 98,87%. *Output* kegiatan adalah laporan prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD Melalui penataan manajemen enyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimtek;
- (121) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi Rp774.337.724,00 atau setara dengan

- 96,79%. *Output* kegiatan adalah rapat internal pengawas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IV melalui penataan manajemen rapat internal dan luar kantor;
- (122) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor IV yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp247.200.000,00 dan realisasi Rp245.700.000,00 atau setara dengan 99,39%. *Output* kegiatan adalah melengkapi persyaratan pengadaan (KAK, HPS, spesifikasi teknis). *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD IV melalui pemenuhan sarana prasarana alat pendukung fasilitas;
- (123) Kegiatan GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp70.965.635.000,00 dan realisasi Rp64.066.195.000,00 atau setara dengan 90,28%. *Output* kegiatan adalah pembayaran honor GTK Non PNS bulan Januari s.d. November. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD III melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel;
- (124) Kegiatan GTK Non PNS SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp31.648.890.000,00 dan realisasi Rp29.871.960.000,00 atau setara dengan 94,39%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya honor GTK Non PNS bulan Januari s.d. November 2019. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan tata kelola KCD I melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

a. Permasalahan

- (1) APM dan RLS masih sangat rendah :
- a. Kemampuan ekonomi masyarakat untuk pendidikan masih rendah;
 - b. Status dan distribusi guru belum merata;
 - c. Distribusi pelayanan pendidikan belum merata;
 - d. Kapasitas satuan pendidikan belum mencukupi.
- (2) Tingkat Kepuasan Stakeholder
- a. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan monev belum optimal;
 - b. SOTK belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan program;
 - c. Disparitas distribusi dan kompetensi ASN;

- d. Pelaksanaan peraturan pendidikan belum terpenuhi;
- e. Sistem informasi Disdik belum terintegrasi.
- (3) Rata-rata nilai UN sangat rendah
 - a. Daya serap informasi layanan pendidikan masih rendah;
 - b. Disparitas sarana dan prasarana pendidikan belum optimal;
 - c. Kompetensi GTK masih rendah;
 - d. Pendidikan karakter masih perlu diperkuat (Jabar Masagi).

b. Solusi

- (1) Menjadikan semua anak bisa sekolah dan unggul:
 - a. Peningkatan dayaampung satuan pendidikan;
 - b. Pemberdayaan sekolah (sekolah juara, SMK juara, guru juara, budaya juara, Perguruan Tinggi juara);
 - c. Pemberdayaan KCD (Kantor Cabang Dinas).
- (2) Tata kelola Dinas Pendidikan yang professional dan akuntabel:
 - a. Perencanaan, penganggaran dan monev pendidikan yang handal;
 - b. ASN Dinas Pendidikan yang professional;
 - c. Peraturan kependidikan yang memadai;
 - d. Sistem informasi layanan Dinas Pendidikan yang lengkap, akurat dan transparan (Smart layanan pendidikan);
 - e. Pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan yang akuntabel.

2. Urusan Kesehatan

Capaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan kesehatan tahun 2019 adalah Usia Harapan Hidup dengan realisasi sebesar 72,85 tahun dari target sebesar 73,67 – 74,87 tahun; Ratio Kematian Ibu dengan realisasi sebesar 78,30/100.000 kelahiran hidup dari target yang ditetapkan sebesar 86/100.000 kelahiran hidup; Ratio Kematian Bayi dengan realisasi sebesar 3,28/1.000 kelahiran hidup dari target yang ditetapkan sebesar 5,2/1.000 kelahiran hidup; Prevalansi Stunting dengan realisasi sebesar 26,21% dari target yang ditetapkan sebesar 27,2%; Persentase Keberhasilan Pengobatan TB dengan realisasi sebesar 86,8% dari target yang ditetapkan sebesar 89%; Persentase Hipertensi dengan realisasi sebesar 39,6% dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 39%; Persentase Puskesmas yang Terakreditasi dengan realisasi sebesar 95,89% dari target yang ditetapkan sebesar 94,76%; Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Layad Rawat dengan realisasi sebesar 44,44% dari target yang ditetapkan sebesar 29,63%; Persentase Rumah Sakit Terakreditasi dengan realisasi sebesar 88,89% dari target yang ditetapkan sebesar 59,13% dan Persentase Penduduk yang Mendapat Jaminan Kesehatan Menuju *Universal Health Coverage* dengan realisasi sebesar 84,46% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Promosi Kesehatan

Capaian Indikator Kinerja Program Promosi Kesehatan adalah meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat sebesar 40,7% dari target sebesar 40,7%. Alokasi anggaran program sebesar Rp2.153.124.752,00 dengan realisasi sebesar Rp1.904.306.086,00 atau setara dengan 88,44%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan sebesar Rp1.276.346.962,00 dan realisasi sebesar Rp1.148.695.794,00 atau setara dengan 90%. *Output* kegiatan adalah 27 Kab/Kota yang dilakukan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) rumah tangga; 9 Kab/Kota dan 18 rumah sakit yang dilakukan pembinaa /monev PKRS; 3 Kab/Kota PHBS di Poskestren; 1 aktivitas promosi kesehatan melalui issue actual; 1 kegiatan peringatan hari kesehatan nasional; 19 Kab/Kota yang dilakukan monitoring evaluasi PHBS; 6 kegiatan penayangan ILM audio visual; 21 kali promosi kesehatan melalui berbagai media. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya cakupan rumah tangga ber-PHBS;

- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp876.777.790,00 dan realisasi sebesar Rp755.610.292,00 atau setara dengan 86%. *Output* kegiatan adalah 1 kegiatan pertemuan desa siaga aktif; 2 kab/kota peningkatan strata desa siaga aktif di Kab/Kota se Jawa Barat; 1 laporan hasil pertemuan dengan tokoh masyarakat serta mitra kesehatan mengikuti sosialisasi dan advokasi jejaring di provinsi Jawa Barat; 1 kab/kota melaksanakan replikasi emas dalam penyelamatan ibu dan bayi baru lahir; 16 kab/kota yang dilakukan monitoring evaluasi desa siaga aktif di lokus stunting. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya cakupan rumah tangga ber-PHBS.

b. Program Pengembangan lingkungan sehat

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat sebesar 72,39% dari target sebesar 75%. Alokasi anggaran Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah sebesar Rp1.178.513.241,00 dengan realisasi sebesar Rp1.109.039.957,00 atau setara dengan 94,11%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja dan Olahraga) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp189.870.189,00 dan realisasi sebesar Rp185.450.439,00 atau setara dengan 97,67%. *Output* kegiatan adalah 120 orang pegawai yang diukur kebugaran jasmaninya; 17 kabupaten/kota yang dilakukan pendampingan GP2SP; 27 kabupaten/kota yang dilakukan bimbingan teknis kesehatan lingkungan kerja. *Outcome* kegiatan adalah persentase puskesmas di kabupaten/kota menyelenggarakan kesehatan kerja dasar;
- (2) Kegiatan Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp620.398.373,00 dan realisasi sebesar Rp576.486.214,00 atau setara dengan 92,92%. *Output* kegiatan adalah 27 Kab/ Kota yang mendapatkan Pembelajaran Program STBM; 54 Orang petugas yang dilatih Wirausaha Sanitasi; 27 Kab/ Kota yang dilakukan Monev Program STBM; 27 Kab/ Kota yang dilakukan Pendampingan Implementasi PAMSIMAS; 27 Kab/ Kota yang dilakukan Pendampingan kegiatan Kab/ Kota Sehat. *Outcome* kegiatan adalah persentase penduduk yang menggunakan air minum yang berkualitas;

- (3) Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 Bidang Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp368.244.679,00 dan realisasi sebesar Rp347.103.304,00 atau setara dengan 94,26%. *Output* kegiatan adalah jumlah petugas kab/ kota yang mengikuti pengelollan limbah medis fasyankes; jumlah kab/ kota yang dilakukan pendampingan kesehatan lingkungan TTU dan TPM; jumlah orang yang melaksanakan penilaian asrama haji; jumlah TPM yang dijadikan tempat transit jemaah haji yang diperiksa higiene sanitasinya; jumlah dokumen pengawasan higiene sanitasi di asrama haji bekasi; jumlah kab/ kota yang dilakukan pendampingan pemicuan STBM di DAS citarum. *Outcome* kegiatan adalah persentase penduduk menggunakan jamban sehat.

c. Program Pelayanan Kesehatan

Capaian Indikator Kinerja Program Pelayanan Kesehatan adalah meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis layanan kesehatan sebesar 65,74% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pelayanan Kesehatan adalah sebesar Rp69.018.498.117,00 dengan realisasi sebesar Rp23.657.929.992,00 atau setara dengan 34,28%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.693.590.795,00 dan realisasi sebesar Rp1.486.229.506,00 atau setara dengan 87,76%. *Output* kegiatan adalah 27 kab/kota mengikuti pertemuan koordinasi program kesehatan keluarga; 1 laporan orientasi SDIDTK bagi petugas kesehatan dan non kesehatan di tingkat provinsi; 1 laporan hasil orientasi pedoman pelayanan kesehatan keluarga bagi perguruan tinggi di tingkat provinsi; 1 laporan hasil pertemuan pemantapan dalam perencanaan program KIA, kespro dan KB melalui PTKIA di 5 kabupaten/ kota; 1 laporan hasil pertemuan koordinasi program keluarga berencana di tingkat provinsi; 1 laporan hasil pertemuan evaluasi model sekolah sehat di tingkat provinsi; 1 laporan hasil pertemuan koordinasi program tatalaksana KtP/A di Tingkat Provinsi; 1 laporan hasil peningkatan kapasitas pengelola program kesehatan keluarga di tingkat provinsi; 1 laporan hasil pendampingan program kesehatan keluarga; pembinaan dan pemenuhan undangan kegiatan dalam provinsi. *Outcome* kegiatan adalah persentase

- kabupaten/kota dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan minimal 88%;
- (2) Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.237.597.518,00 dan realisasi sebesar Rp1.104.646.641,00 atau setara dengan 89,26%. *Output* kegiatan adalah 56 peserta dari 27 Kab/Kota mengikuti Rapat Koordinasi Peningkatan Gizi Masyarakat; 115 peserta lintas program dan lintas sektor mengikuti Pertemuan evaluasi percepatan penurunan stunting; 105 peserta mengikuti Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN); 145 peserta lintas sektor provinsi jawa barat mengikuti Rapat Penyusunan RAD Penurunan Stunting di Jawa Barat; 56 peserta dari 27 Kab/Kota mengikuti Pertemuan evaluasi Peningkatan Gizi Masyarakat; 17 Kab/Kota mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Gizi Masyarakat; 15 Kab/Kota melakukan Pelacakan Kasus Gizi Buruk. *Outcome* kegiatan adalah persentase kabupaten/kota dengan cakupan pemberian tablet tambah darah pada bumil minimal 95%;
- (3) Kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.841.030.585,00 dan realisasi sebesar Rp1.512.006.300,00 atau setara dengan 82,13%. *Output* kegiatan adalah 11 Kab/Kota mengikuti Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir; 12 Kab/Kota mengikuti Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir; sebanyak 60 orang Orientasi Tim Pendamping Kabupaten dalam Pendampingan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir; Penyeliaan Fasilitatif di 5 Kabupaten; Pendampingan Klinis P4-K1 di 2 Kabupaten; 1 laporan hasil Pemantauan AMP di Kab. Sumedang; 1 draft dokumen Penyusunan MoU Rujukan; 1 draft dokumen Penyusunan Maklumat Pelayanan; 30 peserta kab/kota mengikuti Worskhop APKJR; 1 laporan hasil Pendampingan Klinis P1; 1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis K2; 1 laporan Penyeliaan Fasilitatif di Kabupaten Sumedang; 1 Laporan hasil Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Organisasi Program EMAS dan Penyusunan TIM POKJA di Kab. Ciamis; 1 laporan hasil Assessment Fasyankes; Penetapan dan Sosialisasi Fasyankes di Kab. Ciamis; 30 peserta di 7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengikuti pertemuan Membangun Komitmen dan Workshop Pengenalan Tool Klinis

- Puskesmas dan RS di kab. Ciamis. *Outcome* kegiatan adalah persentase kabupaten/kota dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan minimal 88%;
- (4) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.090.847.514,00 dan realisasi sebesar Rp994.019.624,00 atau setara dengan 91,12%. *Output* kegiatan adalah 27 kab/kota dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi di FKTP, FKTL dan fasilitas kesehatan lainnya. *Outcome* kegiatan adalah persentase puskesmas siap akreditasi;
 - (5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.697.615.188,00 dan realisasi sebesar Rp1.484.973.195,00 atau setara dengan 87,47%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Pertemuan Penguatan Pelayanan Kesehatan; 1 Laporan Penguatan Pelaksanaan PPRA; 1 Laporan Rakontek Pelayanan Kesehatan Rujukan; Pertemuan Evaluasi RS Regional; 27 Kab Kota mengikuti Pertemuan Koordinasi Yankes Rujukan Kab/Kota; 1 Laporan Pendampingan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS; sosialisasi BPRS, Pemantauan kegiatan RS yang bersifat non teknis medis, menangani keluhan yg bersifat non teknis medis; 1 Laporan Monev Pelayanan Kesehatan Rujukan. *Outcome* kegiatan adalah persentase kabupaten/kota yang mempunyai 80% rumah sakit dengan pencapaian SPM;
 - (6) Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60.999.977.923,00 dan realisasi sebesar Rp16.851.689.276,00 atau setara dengan 27,63%. *Output* kegiatan adalah 27 Kab/Kota terfasilitasi , koordinasi dan monitoring dan evaluasi manajemen dan upaya pelayanan kesehatan primer; 27 Kab/Kota terpantau pekayaan kesehatan pada arus mudik dan balik di hari libur nasional; 27 Kab/Kota terfasilitasi, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi penguatan PIS-PK di Jawa Barat; 27 Kabupten/Kota bersinergi dengan provinsi dalam bidang pelayanan kesehatan; 8 Kab/Kota kerjasama Layad Rawat; manajemen layad rawat di provinsi dan 8 Kabupaten/kota. *Outcome* kegiatan adalah persentase puskesmas di kabupaten/kota sesuai standar;

- (7) Kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp457.838.594,00 dan realisasi sebesar Rp224.365.450,00 atau setara dengan 49,01%. *Output* kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat sebesar 65,81%; pengelola Kestrad di 27 Kab/Kota mengikuti Rakor /pertemuan; Perwakilan Dinkes di 27 Kab/kota mengikuti acara workshop; 27 Kab/Kota dimonitor dan dievaluasi kestrad, unit aplikasi sistem pembinaan dan pengawasan berbasis online Gan Hatra; Meningkatnya capaian kegiatan yankes primer dan kestrad di 27 Kab/Kota di 1088 puskesmas yang tercapai 620 puskesmas , target 75% capaian 75 , 98%; Pembinaan dan Pengawasan pelayanan kesehatan tradisional tidak. *Outcome* kegiatan adalah persentase kabupaten/kota dengan minimal 50% puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional.

d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular adalah meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar 80% dari target sebesar 80%. Alokasi anggaran Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular adalah sebesar Rp8.095.793.882,00 dengan realisasi sebesar Rp7.065.994.500,00 atau setara dengan 87,28%.

- (1) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp208.149.147,00 dan realisasi sebesar Rp165.020.050,00 atau setara dengan 79,28%. *Output* kegiatan adalah pertemuan penguatan jejaring dalam rangka advokasi percepatan eliminasi malaria; pertemuan penguatan surveilans dan Sistem Informasi Malaria; pemantauan penguatan surveilans dan Sistem Informasi Malaria; *assessment* pengendalian vektor malaria terpadu. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya persentase kabupaten/kota yang sudah eliminasi malaria;
- (2) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.778,00 dan realisasi sebesar Rp260.858.050,00 atau setara dengan 86,95%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program Kawasan Bebas Jentik dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik; 1

- Laporan Pertemuan Penguatan Jejaring dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD; 1 Laporan Pertemuan Peningkatan Tata Laksana dalam Pengendalian Penyakit DBD; 1 Laporan Pemantauan Wilayah Bebas Jentik dengan Akselerasi Pelaksanaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik; 1 Laporan Pemantauan dalam rangka Peningkatan Tatalaksana dan penanggulangan kasus DBD. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya persentase kabupaten/kota yang mencapai IR DBD < 49/100.000 PDDK;
- (3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hepatitis dan ISP sebesar Rp284.999.746,00 dan realisasi sebesar Rp252.908.500,00 atau setara dengan 88,74%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan Pertemuan Deteksi Dini Hepatitis pada Kelompok paling beresiko; 1 Laporan Pertemuan Evaluasi & Perencanaan HPISP; 1 Laporan Workshop LROA; Bimbingan Teknis HPISP. *Outcome* kegiatan adalah persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil;
 - (4) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS dan IMS yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp997.498.692,00 dan realisasi sebesar Rp913.182.112,00 atau setara dengan 91,55%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan Pertemuan Validasi Data Kasus HIV AIDS dan IMS; 1 Laporan Pertemuan Jejaring HIV AIDS & Tripel Eliminasi di 4 Wilayah; 1 Laporan Pertemuan Validasi Data TB HIV bagi Petugas TB HIV di Kab/Kota; 1 Laporan Evaluasi Manajemen Program HIV dan IMS; 1 Laporan Sinkronisasi Data Program HIV AIDS; 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP); 1 Laporan Monitoring Desentralisasi Obat ARV; Monitoring dan Evaluasi Layanan Konseling Tes. *Outcome* kegiatan adalah persentase pasien HIV yang di obati;
 - (5) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp437.999.958,00 dan realisasi sebesar Rp364.863.750,00 atau setara dengan 83,30%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan Bimbingan Teknis dan Monitoring P2 Zoonosis ke 10 kabupaten/kota; 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi P2 Zoonosis; Pertemuan Validasi Data; 1 draft dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah perihal Pengendalian Penyakit Menular di Perbatasan. *Outcome* kegiatan adalah persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi rabies;

- (6) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp347.949,923,00 dan realisasi sebesar Rp288.083.570,00 atau setara dengan 82,79%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan Pertemuan Review Managemen Informasi Pelaporan Filariasis & Kecacangan berbasis online dengan aplikasi e-filca; Buku Pedoman P2 Cacingan sebanyak 640 buku; Pemantauan POPM Filariasis pada 3 kabupaten yaitu Kab. Bogor, Kuningan dan Purwakarta; Pemantauan Survei Penularan Kejadian Filariasis pada 2 Kab/Kota yaitu Kab. Subang dan Kota Bekasi; Pembinaan Eliminasi Filariasis sebanyak 14 Kab/Kota; Pembinaan Pengendalian Cacingan pada Kab/Kota non stunting sebanyak 8 Kab/Kota. *Outcome* kegiatan adalah proporsi kabupaten/kota yang mencapai eliminasi filariasis;
- (7) Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular ISPA yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp197.999.752,00 dan realisasi sebesar Rp189.279.250,00 atau setara dengan 95,60%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan Pertemuan Kewaspadaan Dini Avian Influenza; Pertemuan Validasi Data Program P2 ISPA; 1 Laporan Pembinaan Pengendalian Penyakit ISPA ke 12 Kab/Kota. *Outcome* kegiatan adalah persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmas melaksanakan tata laksana pnemonia balita sesuai *standar*;
- (8) Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp756.188.056,00 dan realisasi sebesar Rp728.628.948,00 atau setara dengan 96,36%. *Output* kegiatan adalah 1 draft dokumen MOU tentang Penaggulangan Kusta pada anak sekolah; 1 Laporan refrehsing Tatalaksana Kasus Kusta bagi petugas; 1 Laporan monitoring evaluasi dan validasi data kusta di 27 kab./kota; 1 Laporan Rekomendasi Tindaklanjuti Permasalahan Kusta Dari Subdit Kusta Kementerian Kesehatan RI; 1 Laporan pembelajaran penanganan Kusta di Provinsi Sulawesi Utara. *Outcome* kegiatan adalah proporsi cacat kusta tingkat II;
- (9) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis Kusta yang Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.137.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.002.048.694,00 atau setara dengan 88,009%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Laboratorium Tingkat Provinsi; 1 Laporan

Pertemuan PPM Tingkat Provinsi Jawa Barat (14 Kabupaten/Kota : Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Purwakarta, Kota Bandung, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kab. Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kab. Sumedang dan Kab. Majalengka); 1 Laporan Pertemuan Penguatan Surveilans TB di Tingkat Provinsi; 1 Laporan Pertemuan Logistik TB di Tingkat Provinsi; 1 Laporan Workshop TB Anak di Tingkat Provinsi; 1 Laporan Pertemuan Koalisi Organisasi Profesi di Tingkat Provinsi; 1 Laporan Assessment layanan TB RO di 9 Rumah Sakit; 1 Laporan Monev dan bimtek LRI di 17 LRI; 1 Laporan Surveilans TB di 27 Kab./kota; 1 Laporan Bimbingan Teknis Program TB di 27 Kab./Kota. *Outcome* kegiatan adalah persentase keberhasilan pengobatan TB (*treatment success rate*);

- (10) Kegiatan Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp574.139.830,00 dan realisasi sebesar Rp507.833.170,00 atau setara dengan 88,45%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan Audit atas dugaan Kasus KIPI yang dilakukan oleh Komda KIPI Jawa Barat; 8 kab/kota mendapat fasilitasi pengelolaan coldchain yang sesuai standar; 21 kab/kota mendapatkan fasilitasi persiapan dan pelaksanaan BIAS tahun 2019; 17 kab/kota mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL; 1 Laporan penyusunan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS; 27 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan/ investigasi atas laporan dugaan Kasus Kejadian Ikutan Imunisasi (KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa Barat; 1 Laporan Upaya peningkatan koordinasi dan terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI; 54 peserta kab/kota dan Provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas; 100 Peserta Mengikuti Seminar Pekan Imunisasi. *Outcome* kegiatan adalah persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI >90%;
- (11) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian PTM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.853.389.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.393.288.406,00 atau setara dengan 83,88%. *Output* kegiatan adalah Sebanyak 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa serta Pengelola Program P2PTM) mengikuti Pertemuan Monitoring

dan Evaluasi Program P2PTM bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; Sebanyak 54 peserta (Pengelola Program P2PTM dan Penanggungjawab Data) mendapatkan sosialisasi SIPTM; Sebanyak 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa atau Pengelola Program dan Perwakilan Dinas Pendidikan) mengikuti Pertemuan Koordinasi Upaya Berhenti Merokok di Sekolah; 54 peserta (Pengelola Program GIF Dinas Kesehatan dan 1 puskesmas terpilih) mendapatkan peningkatan kapasitas bagi petugas pada Workshop Deteksi Dini GIF bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa serta Pengelola Program P2 Keswa) mengikuti Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Pengendalian Kesehatan Jiwa bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 54 peserta (Pengelola Program P2 Keswa dan 1 puskesmas terpilih) mengikuti Pertemuan Koordinasi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa serta Pengelola Program) mendapatkan peningkatan kapasitas pada kegiatan Workshop Deteksi Dini Pelaksanaan Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota; 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa atau Pengelola Program dan Guru BK dari 1 Sekolah terpilih) mendapatkan materi dalam Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelola Penyalahgunaan Napza bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 28 peserta (Direktur, Wadir, Kabid Medik dan Subbag Perencanaan) dari 7 RS Rujukan Regional di Jawa Barat mengikuti Pertemuan RS Rujukan Regional Kesehatan Jiwa bagi Petugas Provinsi dan Petugas RS di Jawa Barat; Bimbingan Teknis Penyakit Kanker dan Kelainan Darah (PKKD) ke 17 Kab/Kota; Bimbingan Teknis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) ke 24 Kab/Kota; Bimbingan Teknis Kasus Pasung pada Gangguan Jiwa ke 17 Kab/Kota; Bimbingan Teknis Gangguan Indera dan Fungsional (GIF) ke 25 Kab/Kota; Monitoring dan Evaluasi Program Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) ke 14 Kab/Kota; Monitoring dan Evaluasi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) ke 16 Kab/Kota; kegiatan Skrining KTR dan Konseling UBM pada 4 sekolah terpilih di 16 Kab/Kota; Konsolidasi dan Konsultasi Kesehatan Jiwa ke Luar ke Jawa Timur. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU).

e. Program Sumber Daya Kesehatan

Capaian Indikator Kinerja Program Sumber Daya Kesehatan adalah meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis sumber daya kesehatan sebesar 79,62% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Sumber Daya Kesehatan adalah sebesar Rp52.453.521.897,00 dengan realisasi sebesar Rp49.449.452.663,00 atau setara dengan 94,27%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan UPTD Pelatihan Kesehatan sebesar Rp1.266.495.495,00 dan realisasi sebesar Rp838.604.450,00 atau setara dengan 66,21%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil Pelatihan Penggerak Obat Rasional; Pelatihan Akupresur untuk Kesehatan Ibu dan Anak; Pelatihan Mandiri Dengan Ramuan dan Pemanfaatan Toga untuk Kesehatan Ibu dan Anak; Pelatihan Hipnoterapy Bagi Kesehatan Ibu dan Anak; Pelatihan Kusta bagi Dokter Puskesmas; Pelatihan Kusta bagi Petugas Kusta Puskesmas; Pelatihan Pengelola Vaksin dan Cold Chain; Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas; Bimbingan Teknis Laboratorium Lapangan; Pertemuan Desiminasi Informasi Pelatihan Kesehatan dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/Kota; Konsolidasi Pelatihan dengan Kabupaten/Kota; Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan;
- (2) Kegiatan Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan sebesar Rp1.999.966.600,00 dan realisasi sebesar Rp1.212.367.600,00 atau setara dengan 60,62%. *Output* kegiatan adalah Evaluasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; Pengelolaan data SDM di Fasilitas Kesehatan; Evaluasi Pendamping Puskesmas dan Pendamping RS, Direktur RS dan Dinas Kesehatan di Jawa Barat; Koordinasi Pengelolaan TKWNA & WKDS; Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan; Koordinasi MTKP; Pengelolaan Registrasi; Pengelolaan peningkatan mutu tenaga; Pengelolaan WKDS; Pengelolaan RPL. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Nutu Tenaga Kesehatan;
- (3) Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes, dan Mamin sebesar Rp865.230.871,00 dan realisasi sebesar Rp779.092.429,00 atau setara dengan 90,04%.

- Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota; 1 Laporan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit; 1 Laporan hasil Monev Ketersediaan Obat bagi Unit Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota; 1 laporan hasil pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa; 1 laporan hasil Maintenance Software e logistik. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Obat Esensial;
- (4) Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes, dan Mamin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp696.058.592,00 dan realisasi sebesar Rp648.035.000,00 atau setara dengan 93,10%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Monev Pelaksanaan Gema Cermat; 1 Laporan hasil Pertemuan Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional; 1 Laporan hasil Pertemuan Evaluasi Gema Cemat pada Stakeholder; 1 Laporan hasil Workshop Formularium; 1 Laporan hasil Monitoring Sarana Kefarmasian dan Alkes. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan;
- (5) Kegiatan Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non-PNS Provinsi Jawa Barat sebesar Rp44.734.771.907,00 dan realisasi sebesar Rp43.409.710.561,00 atau setara dengan 97,04%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan bulanan kinerja nakes non PNS; 1 Laporan hasil Pendayagunaan Tenaga Kesehatan non PNS; 1 Laporan hasil Honor tenaga pengelola; 1 Laporan hasil evaluasi dr, drg, bidan dan nakes lain non PNS; 1 Laporan hasil Monitoring evaluasi. *Outcome* Kegiatan adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan;
- (6) Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat sebesar Rp1.699.998.536,00 dan realisasi sebesar Rp1.528.595.673,00 atau setara dengan 89,92%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Sosialisasi Kegiatan; 1 Laporan hasil Rapat persiapan; 1 Laporan hasil Pelaksanaan Pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas Teladan. *Outcome* Kegiatan adalah Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan;
- (7) Kegiatan Penguatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebesar Rp1.190.999.896,00 dan realisasi sebesar Rp1.033.046.950,00 atau setara dengan 86,74%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Penguatan penyelenggaraan JKN dan pembiayaan di

kab/kota provinsi Jawa Barat; 1 Laporan hasil pelaksanaan persiapan penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat; 1 Laporan hasil Pelaksanaan Cap building agar terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan; 1 Laporan hasil Rapat koordinasi dan evaluasi pembiayaan tingkat Provinsi Jawa Barat di 4 Wilayah; 1 Laporan hasil pelaksanaan penyusunan PHA/DHA di Provinsi Jawa Barat; 1 Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi multi pihak dalam pencapaian UHC; 1 Laporan hasil pelaksanaan identifikasi pelaksanaan JKN. *Outcome* Kegiatan adalah Persentase Pembiayaan Kesehatan Pbi Ke Kab/Kota.

f. Program Manajemen Kesehatan

Capaian Indikator Kinerja Program Manajemen Kesehatan adalah meningkatnya layanan manajemen kesehatan sebesar 80% dari target sebesar 80%. Alokasi anggaran Program Manajemen Kesehatan adalah sebesar Rp3.238.211.275,00 dengan realisasi sebesar Rp2.660.767.537,00 atau setara dengan 82,17%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp447.639.965,00 dan realisasi sebesar Rp368.655.064,00 atau setara dengan 82,36%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Akreditasi Institusi; 1 Laporan hasil Akreditasi Pelatihan; 1 Laporan hasil Riview Kurikulum dan Modul; 1 Laporan hasil Penyusunan Kurikulum dan Modul; 1 Laporan hasil Evaluasi Pasca Pelatihan. *Outcome* kegiatan adalah Nilai Komponen yang Sesuai dengan Pembobotan;
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai *Centre of Excellent* Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp251.120.000,00 dan realisasi sebesar Rp218.919.482,00 atau setara dengan 87,18%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Akreditasi Laboratorium Kesehatan; 1 Laporan hasil Penyelenggaraan Uji Profisiensi pemeriksaan mutu eksternal Laboratorium. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan yang diakreditasi;
- (3) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain sebesar Rp179.868.000,00 dan realisasi sebesar Rp47.557.083,00 atau setara dengan 26,44%. *Output* kegiatan adalah 1 draft dokumen MoU

Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah kerjasama program bidang kesehatan;

- (4) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.924.889.394,00 dan realisasi sebesar Rp1.664.848.066,00 atau setara dengan 86,49%. *Output* kegiatan adalah 1 Draft Tabel Profil Kesehatan; 1 hasil laporan dan kesepakatan pemutakhiran data kesehatan tahun 2018; 1 Buku Profil Kesehatan Prov Jawa Barat Tahun 2018; 27 Petugas Kab/Kota yang mengikuti pertemuan GIS; 27 Pengelola data RSUD di Kab/Kota mengikuti pertemuan sistem informasi Rumah Sakit (SIRS); 27 pengelola data di Kab/Kota mengikuti pertemuan sistem informasi kesehatan (SIK); 1 Laporan hasil Monitoring dan evaluasi sitem informasi kesehatan di Kab/Kota; 1 Laporan hasil kaji Banding Sistem Informasi Kesehatan; Jumlah pengadaan aplikasi video conference (V Meet). *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Buku Profile Kesehatan;
- (5) Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan sebesar Rp434.693.916,00 dan realisasi sebesar Rp360.787.842,00 atau setara dengan 83,00%. *Output* kegiatan adalah 1 Draft Dokumen Regulasi Bidang Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat.

g. Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi

Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi adalah persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi adalah sebesar Rp1.956.626.797,00 dengan realisasi sebesar Rp1.468.866.500,00 atau setara dengan 75,07%.

- (1) Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) sebesar Rp948.099.830,00 dan realisasi sebesar Rp863.454.820,00 atau setara dengan 91,07%. *Output* kegiatan adalah 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi surveilans AFP/PD3I; 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat; 135 orang yang berasal dari 27 kab-kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan

Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit; 27 kab-kota mengikuti Pertemuan Riview Penanggulangan KLB Tingkat Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Masyarakat yang dilayani dilokasi Bencana;

- (2) Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.008.526.967,00 dan realisasi sebesar Rp605.411.680,00 atau setara dengan 60,03%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil pelatihan Tim Gerak Cepat Wabah dan atau Bencana alam pada Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota; 27 dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi TGC; 27 Petugas di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat yang dilakukan pembinaan dalam Penanggulangan Bencana; 1 Laporan hasil pemantauan kejadian bencana dan atau KLB diwilayah Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat terdampak krisis kesehatan dan Kejadian Luar Biasa; 27 Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji; 27 kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan *Outcome* kegiatan adalah persentase kegiatan *rapid health assessment*.

h. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit sebesar 71,84% dari target 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi adalah sebesar Rp822.423.759.290,00 dengan realisasi sebesar Rp660.860.792.452,00 atau setara dengan 80,36%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Habis RSUD Jampangkulon sebesar Rp9.999.957.838,00 dan realisasi sebesar Rp9.960.940.409,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah obat generik sebanyak 273 jenis, jumlah bahan habis pakai farmasi 153 jenis, jumlah bahan habis pakai ruang operasi (OK) sebanyak 3 jenis. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);

- (2) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD Jampangkulon alokasi anggaran sebesar Rp18.199.999.849,00 dan realisasi sebesar Rp16.578.256.229,00 atau setara dengan 91,09%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat kedokteran umum 519 unit, jumlah alat kedokteran bedah 22 unit; jumlah alat kedokteran anak 4 unit; tersedianya alat laboratorium 4 unit, jumlah generator oksigen 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (3) Kegiatan Fasilitasi Pasien Gakin RSUD Jampangkulon sebesar Rp9.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.152.978.400,00 atau setara dengan 90,59%. *Output* kegiatan adalah biaya *sharing* pasien Gakin R. Jalan 2.500 pasien; biaya *sharing* pasien Gakin R. Inap 500 pasien. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (4) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru RSUD Jampangkulon sebesar Rp28.805.250.423,00 dan realisasi sebesar Rp26.602.607.843,00 atau setara dengan 92,35%. *Output* kegiatan adalah pembangunan gedung rawat jalan 1 unit; pembangunan gedung farmasi 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (5) Kegiatan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD Jampangkulon sebesar Rp303.623.421,00 dan realisasi sebesar Rp152.644.571,00 atau setara dengan 50,27%. *Output* kegiatan adalah kalibrasi alat diagnostik 149 alat; kalibrasi alat kalibrator 50 alat; kalibrasi alat *life support* dan *theraphy* 265 alat. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (6) Kegiatan Jasa *Outsourcing* Kebersihan dan Keamanan RSUD Jampangkulon sebesar Rp4.211.598.466,00 dan realisasi sebesar Rp3.881.257.370,00 atau setara dengan 92,16%. *Output* kegiatan adalah dibayarkannya jasa *outsourcing* kebersihan 12 bulan, dan dibayarkannya jasa *outsourcing* keamanan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (7) Kegiatan Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon sebesar Rp4.530.096.500,00 dan realisasi sebesar Rp3.913.611.224,00 atau setara dengan 86,39%. *Output* kegiatan adalah jumlah pengadaan alat listrik/elektronik 2 unit; jumlah pengadaan tabung

oksigen 50 tabung; jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga 9 jenis; jumlah pengadaan pakaian perawat dan dokter 35 stel; jumlah pengadaan transformator 1 unit; jumlah pengadaan suku cadang mesin rumput 9 jenis; jumlah pengadaan alat pemelihara pertamanan 9 jenis; jumlah pengadaan almari 9 jenis; jumlah pengadaan brankas 1 unit, pengadaan filling kabinet 13 unit; jumlah pengadaan mesin jahit 2 unit; jumlah pengadaan penunjuk waktu 10 buah; jumlah pengadaan alat pendingin ruangan 25 unit; jumlah pengadaan *trolley* 10 unit; jumlah pengadaan televisi 25 unit; jumlah pengadaan tangga 6 unit; jumlah pengadaan komputer PC 5 unit; jumlah pengadaan komputer *notebook* 8 unit; jumlah pengadaan *printer* 12 unit; jumlah pengadaan *scanner* 6 unit; jumlah pengadaan aksesoris komputer dan jaringan 3 jenis pengadaan *fingerprint* 6 unit; jumlah pengadaan meja kerja 12 set; jumlah pengadaan kursi kerja 17 unit; jumlah pengadaan kursi rapat 150 buah; jumlah pengadaan sofa 7 unit; jumlah pengadaan kursi tunggu pasien 25 unit; jumlah pengadaan dispenser 10 unit; jumlah pengadaan kulkas 11 unit; jumlah pengadaan alat dapur 11 jenis; jumlah pengadaan gorden 260 meter; jumlah pengadaan kamera 1 unit; jumlah pengadaan CCTV 30 titik; jumlah pengadaan Infocus 2 unit; jumlah pengadaan *sound system* 1 set; jumlah pengadaan *hand railing* 219 unit; jumlah pengadaan regulator oksigen 50 unit; jumlah pengadaan PJU *solar cell* 15 titik; jumlah pengadaan kubikal 1 unit; jumlah pembuatan sumur bor 4 titik. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);

- (8) Kegiatan Pembuatan Amdal RSUD Jampangkulon sebesar Rp799.785.768,00 dan realisasi sebesar Rp783.719.531,00 atau setara dengan 97,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya biaya konsultan pembuatan amdal 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (9) Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.927.558.999,00 dan realisasi sebesar Rp1.708.428.552,00 atau setara dengan 88,63%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil belanja Cetak; 1 Laporan hasil belanja Cinderamata; 1 Laporan hasil Belanja Dekorasi dan Desain Interior dan Eksterior; Jumlah Belanja Iklan di televisi; 1 Laporan hasil Belanja Jasa EO Study Banding; 1

- Laporan hasil Belanja Pembuatan Video animasi; 1 Laporan hasil Belanja Plakat; Jumlah Belanja Produksi Video; 1 Laporan hasil Belanja Souvenir VIP; 1 Laporan hasil ATK; Jumlah Iklan di Radio; Jumlah Penayangan ILM Bioskop; 1 Laporan hasil Spot Iklan Media Elektronik (Radio); 1 Laporan hasil Iklan layanan masyarakat di media cetak/elektronik; 1 Laporan hasil Jingle; 1 Laporan hasil Sewa Sarana penyelenggaraan tenda; 1 Laporan hasil Belanja Dokumentasi dan Publikasi. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (10) Kegiatan Pembuatan DED Gedung RI, Rehabilitasi Medik, IBS, dan ICU RSUD Jampangkulon sebesar Rp999.996.705,00 dan realisasi sebesar Rp756.412.721,00 atau setara dengan 75,64%. *Output* kegiatan adalah DED gedung rawat inap 1 dokumen; jumlah DED gedung IBS ICU 1 gedung; jumlah DED gedung IPSRS 1 dokumen; jumlah DED gedung jenazah 1 dokumen; jumlah DED pembuatan landscape 1 dokumen; jumlah DED gedung genset 1 dokumen; jumlah DED gedung gizi 1 dokumen; jumlah DED gedung *workshop* 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (11) Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan Berkala Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru dan Gedung Diagnostic Center RSUD Jampangkulon sebesar Rp432.872.587,00 dan realisasi sebesar Rp430.757.500,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah biaya konsultan pengawasan pembangunan gedung rawat jalan; gedung farmasi 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (12) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp557.232.482,00 dan realisasi sebesar Rp498.032.500,00 atau setara dengan 89,38%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Cinderamata rehabilitan Peserta Poskesremen; 1 Laporan hasil Bahan Praktek untuk terapi studio tata rias; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio tata boga; 1 Laporan hasil Bahan Praktek untuk terapi studio musik; 1 Laporan hasil Bahan Praktek untuk terapi studio keputrian; 1 Laporan hasil Bahan Praktek untuk terapi studio kerohanian; 1 Laporan hasil Bahan Praktek untuk terapi studio psikomotor; 1 Laporan hasil Bahan Praktek untuk terapi studio kreatif; 1 Laporan hasil Belanja Jasa Event Organizer

- Kegiatan Poskesremen; 1 Laporan hasil Sewa stand/booth/tempat pameran; 1 Laporan hasil Sewa pakaian Adat sesuai tema kesenian; 1 Laporan hasil Pakaian Batik Untuk Poskesremen; 1 Laporan hasil Pakaian Olahraga lengkap Untuk Poskesremen; 1 Laporan hasil Papan nama; 1 Laporan hasil Sewa Alat Kesenian Poskesremen. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (13) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan RS Jiwa sebesar Rp868.091.394,00 dan realisasi sebesar Rp844.239.944,00 atau setara dengan 97,25%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya Belanja Alat tulis Kantor; Jumlah Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Ruang Perawatan Pasien : 1 keg; Jumlah Souvenir : Belanja Paket Perlengkapan Pasien Rawat Inap : 1 keg; Jumlah Belanja Linen Pasien Rawat Inap : 1 Keg; Jumlah Pakaian Pasien Harian : 1 keg; Jumlah Mamin Rapat dan Perjalanan Dinas Jan. S.d Desember 2019. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (14) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Medis RS Jiwa sebesar Rp1.044.483.300,00 dan realisasi sebesar Rp912.899.933,00 atau setara dengan 87,40%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya Belanja Penggandaan/Penjilidan Mamin Rapat; Jumlah Perjalanan Dinas Jan s.d Juli 2019; Jumlah Belanja Alat-Alat Rehabilitasi Medik (Infra RedLamp on Mobile Stand) : 1 Keg; Jumlah Belanja Rehabilitasi Medik (Thermo Three (Infra Red Lamp with 3 Spot) : 1 Keg; Jumlah X-Ray Viewer: 1 Keg; Jumlah Emergency Kit: 1 Keg; Jumlah termometer Infrared: 1 Keg; Jumlah tensimeter Digital Dewasa: 1 Keg; Jumlah Timbangan Bayi: 1 Keg; Jumlah Regulator O2: 1 Keg; Jumlah AED Plus: 1 Keg; Jumlah Hacting Set: 1 Keg; Jumlah Matras Decubitus: 1 Keg; Jumlah Timbangan Badan + Tinggi Badan: 1 Keg; Jumlah Portable Suction Pump: 1 Keg; Jumlah Kursi Roda: 1 Keg; Jumlah Termometer Digital: 1 Keg; Jumlah Timbangan Biasa: 1 Keg. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (15) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Nonmedik RS Jiwa sebesar Rp621.508.460,00 dan realisasi sebesar Rp507.892.928,00 atau setara dengan 81,72%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Belanja sewa forklift; 1 Laporan hasil Belanja Perjalanan Dinas

- Dalam provinsi; 1 Laporan hasil Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi; 1 Laporan hasil Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; 1 Laporan hasil Lemari Laundry Stainless Steel; Jumlah Meja Stainles Steel/Work Table; 1 Laporan hasil Mesin pengering; 1 Laporan hasil ATK dan Dispenser Chemical. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (16) Kegiatan Akreditasi RS dan Akreditasi Klinik Utama RS Jiwa sebesar Rp467.247.000,00 dan realisasi sebesar Rp381.024.747,00 atau setara dengan 81,55%. *Output* kegiatan adalah tersedianya belanja ATK; jumlah bimbingan akreditasi RS Jiwa; jumlah survei verifikasi akreditasi RS Jiwa. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (17) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa sebesar Rp281.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp268.921.800,00 atau setara dengan 95,38%. *Output* kegiatan adalah jasa sertifikasi pemantapan mutu eksternal laboratorium (1 kegiatan); jumlah pengadaan *ducting exhause fan* dan instalasinya (1 kegiatan); jumlah pengukuran paparan radiasi pada petugas (1 kegiatan); jumlah belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai (1 kegiatan); jumlah belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi (1 kegiatan); jumlah fotokopi; jumlah perjalanan Dinas dalam daerah; jumlah belanja mamin rapat; jumlah belanja modal pengadaan alat dapur (mesin pengemas *wrapping*) (1 kegiatan). *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (18) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan RS Jiwa sebesar Rp1.212.804.394,00 dan realisasi sebesar Rp1.001.840.210,00 atau setara dengan 82,61%. *Output* kegiatan adalah tersedianya biaya pemeriksaan air bersih, limbah, uji laboratorium/uji sampling bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2019; jumlah pemilahan dan pemusnahan limbah domestik (4 kegiatan). *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (19) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) RS Jiwa sebesar Rp270.399.919,00 dan realisasi sebesar Rp178.255.549,00 atau setara dengan 65,92%. *Output* kegiatan adalah tersedianya biaya jasa profesi asesor penilaian akreditasi RS Pendidikan; sewa kamar hotel; perjalanan Dinas

- dalam rangka konsultasi dan koordinasi. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (20) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) RS Jiwa sebesar Rp223.899.952,00 dan realisasi sebesar Rp221.004.460,00 atau setara dengan 98,71%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Pelayanan (Survey kepuasan pelanggan proses); 1 Laporan hasil Biaya Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi; 1 Laporan hasil Tersedianya Biaya mamin rapat. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (21) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa sebesar Rp172.314.652,00 dan realisasi sebesar Rp151.899.242,00 atau setara dengan 88,15%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Biaya Jasa Akomodasi Fullboard (Konsinyiring); 1 Laporan hasil Biaya Mamin Rapat; 1 Laporan hasil biaya Fotocopy dan penjilidan; 1 Laporan hasil biaya Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi Jan s.d Desember 2019; tersedianya biaya ATK. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (22) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RS Jiwa sebesar Rp3.195.374.600,00 dan realisasi sebesar Rp2.916.316.852,00 atau setara dengan 91,27%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil belanja Mesin Penghancur Kertas (1 keg); 1 Laporan hasil Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (1 keg); 1 Laporan hasil Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (HP Spectre X 360)(1 keg); 1 Laporan hasil Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (HP NB)(5); Jumlah 1 (keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan Printer; Jumlah Epson LQ-310 (1 keg); Jumlah Belanja modal Pengadaan Printer; Jumlah Epson L 1800 (1 keg); Jumlah Belanja modal Pengadaan Printer; Jumlah HP M 254NW (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu ; JumlahDANKHA WC 054 (4 dudukan) (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan Printer; Jumlah Epson L 3110 (7) (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Televisi (TV LED 40 &32) (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan UPS/Stabilizer (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan Kursi Kerja (15 Dir; Jumlah 4Lab; Jumlah 32 Staff) (1 keg); Jumlah Belanja Alat-alat Rumah Tangga / Dapur Pakai Habis Spesifikasi :

Bantal; Jumlah Kasur; Jumlah Kabel Roll/Gulung (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan Printer; Jumlah Epson L 3110 (1) (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sofa (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Meja Makan (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Handycam (1 keg); Jumlah Camera Digital (1 keg); Jumlah Charger Box Costum (1 keg); Jumlah DVD Combo dan DVD Player (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sound System Microphone Wireles dan Speaker Aktif (1 keg); Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Khusus Pengangkut Makanan (1 keg); Jumlah PABX (1 keg); Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Dispenser (1 keg); Jumlah Pengadaan Alat Dapur (1 keg); Jumlah CCTV (1 keg); Jumlah Pengadaan Peralatan Bengkel Elektro (1 keg); Jumlah Pengadaan Visual Elektronik Mesin Antri + Monitor (1 keg); Jumlah Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran (1 keg); Jumlah mamin Rapat dan Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi jan s.d Desember 2019. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);

- (23) Kegiatan Penyusunan DED dan *Review* DED Gedung RS Jiwa sebesar Rp591.849.865,00 dan realisasi sebesar Rp567.563.650,00 atau setara dengan 95,90%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya biaya ATK; tersedianya biaya Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) Penyusunan DED Gedung dan *Review* DED. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (24) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa sebesar Rp874.955.000,00 dan realisasi sebesar Rp622.712.039,00 atau setara dengan 71,17%. *Output* kegiatan adalah Penanganan Pasien Pasung : Januari (Penjemputan : 0; Jumlah Pemulangan : 0; Jumlah Pendampingan : 0; Jumlah Diantar Stakeholder : 3; Jumlah Februari Penjemputan : 5; Jumlah Pemulangan : 0; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 0; Jumlah Maret Penjemputan : 6; Jumlah Pemulangan : 4; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 1; Jumlah April Penjemputan : 5; Jumlah Pemulangan : 7; Jumlah Pendampingan : 3; Jumlah Diantar Stakeholder : 1; Jumlah Mei Penjemputan : 7; Jumlah Pemulangan : 6; Jumlah Pendampingan : 1; Jumlah Diantar Stakeholder : 2; Jumlah Juni Penjemputan : 2; Jumlah Pemulangan

- : 5; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 7; Jumlah Juli Penjemputan : 6; Jumlah Pemulangan : 1; Jumlah Pendampingan : 6; Jumlah Diantar Stakeholder : 5; Jumlah Agustus Penjemputan : 7; Jumlah Pemulangan : 5; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 2; Jumlah September Penjemputan : 10; Jumlah Pemulangan : 6; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 1; Jumlah Oktober Penjemputan : 6; Jumlah Pemulangan : 7; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder.
- Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- (25) Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa sebesar Rp2.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.476.265.400,00 atau setara dengan 59,05%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya biaya pasien JPKM Bulan Januari s.d Desember 2019 sebanyak 1.361 pasien. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- (26) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa sebesar Rp324.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp323.156.239,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah Pertemuan koordinasi rujukan Kesehatan Jiwa dengan Kabupaten Kota : 1 keg; Jumlah Outbond Keswara : 1 keg. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (27) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.328.519.100,00 atau setara dengan 66,57%. *Output* kegiatan adalah Jumlah pasien miskin rawat inap dan rawat jalan sebanyak 17.500 jiwa. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (28) Kegiatan Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas RSUD Jampangkulon sebesar Rp1.199.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.199.513.302,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi RS Jampangkulon sebanyak 58 Orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (29) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.197.809.584,00 atau setara dengan 61,32%. *Output* kegiatan adalah 1 Dokumen Laporan hasil

- pengadaan Alat kedokteran umum, alat kedokteran radiologi, alat rehabilitasi medik, alat kedokteran gigi, alat kedokteran THT, alat kedokteran mata, alat kedokteran bedah, alat kedokteran anak, alat kedokteran kebidanan dan kandungan, alat kedokteran penyakit kulit dan kelamin, alat kedokteran kardiologi, alat kedokteran neurologi, alat laboratorium kedokteran. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (30) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan sebesar Rp53.764.278.976,00 dan realisasi sebesar Rp25.292.248.443,00 atau setara dengan 47,04%. *Output* kegiatan adalah Selesaiannya pembangunan gedung D, F dan G yang berfungsi sebagai ruang perkantoran, gizi dan haemodialisa. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (31) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan sebesar Rp8.064.023.705,00 dan realisasi sebesar Rp6.629.635.805,00 atau setara dengan 82,21%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil pengadaan Mesin fotocopy portable, mesin penghancur kertas, cctv, mesin antrian, tabung APR, cassette mamografi, dvd external, almari arsip, almari alat dan bahan, almari bahan berbahaya, almari pakaian petugas, filling kabinet 4 laci, AC, 1, PK, 1, 5 PK, 2 PK, Penunjuk Alat, Trolley alat medis, Troli pengangkut, Televisi, Braket Tv Vacuum Cleaner. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (32) Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan RS Kesehatan Kerja sebesar Rp1.367.815.175,00 dan realisasi sebesar Rp951.527.544,00 atau setara dengan 69,57%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Dokumen perencanaan pengadaan tanah RSUD Kesehatan Kerja; 1 Laporan hasil Dokumen Hasil Kajian Survey Pemetaan Layanan Kesehatan; 1 Laporan hasil Dokumen Perijinan Jumlah Draft Dokumen penyusunan BLUD; 1 Laporan hasil Pembuatan Media Informasi Layanan Publik RSUD Kesehatan Kerja. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (33) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif sebesar Rp1.400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp843.917.342,00 atau setara dengan 60,28%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Pengadaan diklat/in house training/ pelatihan; pengadaan workshop/kursus-kursus singkat.

- Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (34) Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp1.350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.052.943.884,00 atau setara dengan 78,00%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kinerja pelayanan penunjang di RSUD kesehatan kerja; terpenuhinya sarana penunjang kebutuhan rumah sakit seperti alat listrik dan elektronik, APD K3RS/Alur K3RS, bahan laboratorium, jasa uji laboratorium/uji sampling (kesehatan lingkungan), jasa profesi, dan belanja modal/alat; jumlah dokumen pengadaan langsung; jumlah dokumen hasil uji sampling. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (35) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp17.099.999.832,00 dan realisasi sebesar Rp14.541.856.241,00 atau setara dengan 85,04%. *Output* kegiatan adalah 1 Dokumen Pengadaan Bahan Obat-Obatan; 1 Dokumen Pengadaan Bahan Laboratorium; Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis; Pengadaan Jasa Profesi Kesehatan dan Non Kesehatan; 1 Dokumen Pengadaan Komputer; 1 Dokumen Pengadaan Printer; 1 Dokumen Pengadaan Note Book; 1 Dokumen Pengadaan Kulkas; Pengadaan Komputer Mainframe; 1 Dokumen Pengadaan Alat-Alat Kedokteran; 1 Dokumen Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan; 1 Dokumen Pengadaan Software Jadi Antivirus. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (36) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp99.342.950,00 dan realisasi sebesar Rp60.822.500,00 atau setara dengan 61,22%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Pembuatan Media Informasi Layanan Publik RSUD Kesehatan Kerja; 1 Dokumen Jasa Kantor. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (37) Kegiatan Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp8.475.997.500,00 dan realisasi sebesar Rp5.994.345.479,00 atau setara dengan 70,72%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil dokumen pekerjaan renovasi gedung rsud kesehatan kerja; pekerjaan pemagaran dan pembuatan lahan parkir RSUD Kesehatan Kerja; pengadaan papan nama kantor; 1 laporan hasil dokumen konsultan perencanaan; 1 laporan hasil dokumen konsultan pengawas; 1 laporan hasil pengadaan lampu LED Penerangan Jalan Umum.

- Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (38) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD kesehatan kerja sebesar Rp626.048.250,00 dan realisasi sebesar Rp462.060.100,00 atau setara dengan 73,81%. *Output* kegiatan adalah pengadaan alat rumah tangga/dapur pakai habis (alat pengemas); Pengadaan exhaust fan; Pengadaan alat dapur. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (39) Kegiatan Pengadaan peralatan kantor RS Paru sebesar Rp1.199.999.762,00 dan realisasi sebesar Rp1.149.646.650,00 atau setara dengan 95,80%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil pengadaan Kursi dan Meja Rapat, 1 unit Gudang, 1 Laporan hasil pengadaan Filling Kabinet, 1 Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (40) Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru sebesar Rp1.775.460.402,00 dan realisasi sebesar Rp1.080.745.500,00 atau setara dengan 60,87%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen kegiatan barang dan jasa; 1 Dokumen Filling; 1 unit gudang; 1 unit kendaraan bermotor; 1 Dokumen pengadaan alat studio; 1 Dokumen pengadaan Infokus; 1 Dokumen pengadaan Kursi dan meja rapat; 1 Laporan hasil melakukan perjalanan dinas; 1 Laporan hasil peserta mengikuti rapat. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (41) Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp191.171.379,00 atau setara dengan 95,59%. *Output* kegiatan adalah 1 Dokumen Laporan Bulanan; 1 Dokumen Laporan Triwulan; 1 Dokumen Laporan Semester; 1 Dokumen Laporan Tahunan. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (42) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.465.000,00 atau setara dengan 48,47%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Penyuluhan bersama Faskes Pratama di wilayah kerja RSUD Pameungpeuk sebanyak 16 Kecamatan; 1 Laporan hasil Promosi Pelayanan media cetak dan elektronik; Website Rumah Sakit. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);

- (43) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja RS Paru sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp146.679.833,00 atau setara dengan 73,34%. *Output* kegiatan adalah 175 Orang 275 Orang 275 Orang 10020 Lembar 195 kali/media 10 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (44) Kegiatan Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru sebesar Rp133.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp122.175.500,00 atau setara dengan 91,59%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil sinergitas dengan Instansi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lain dalam rangka memberikan edukasi terhadap masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (45) Kegiatan Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp130.222.907,00 atau setara dengan 86,82%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil pelayanan asuhan medis sesuai dengan standar; 1 Laporan hasil pelayanan asuhan Keperawatan sesuai dengan standar; 1 Laporan hasil seminar Kedokteran; 1 Laporan hasil seminar Keperawatan; 1 Laporan hasil Inhouse training mutu keselamatan pasien; 1 Laporan hasil rapat komite. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (46) Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Jejaring Eksternal dalam Penanggulangan Penyakit TB Paru di RS Paru sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp130.788.750,00 atau setara dengan 65,39%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Pertemuan dengan Dinas Kesehatan sewilayah III Cirebon; 1 Laporan hasil seminar TB; 1 Laporan hasil seminar HIV. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (47) Kegiatan Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru sebesar Rp291.862.500,00 dan realisasi sebesar Rp270.127.000,00 atau setara dengan 92,55%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Kegiatan Pengadaan Barang Jasa dilaksanakan jumlah Perawat memiliki sertifikat PPGD/BTCLS; 1 Laporan hasil narasumber memberikan materi jumlah melakukan rapat; 1 Laporan hasil Inhouse training dilaksanakan; 1 Dokumen pengadaan Kit Pelatihan; 1 Laporan hasil pendampingan pasien dirujuk; 1 Laporan hasil pasien dirujuk. *Outcome*

- kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (48) Kegiatan Akreditasi RS Paru sebesar Rp299.999.880,00 dan realisasi sebesar Rp195.009.789,00 atau setara dengan 65,00%. *Output* kegiatan adalah 1 Laporan hasil Workshop SNARS; 1 Laporan hasil Bimbingan SNARS; 1 Laporan hasil Survei Simulasi SNARS; 1 Laporan hasil Survei verifikasi SNARS; 1 Laporan hasil SISMADAK KARS; 1 Laporan hasil pelatihan terkait akreditasi. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (49) Kegiatan Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.842.725.600,00 atau setara dengan 92,14%. *Output* kegiatan adalah peningkatan layanan perawatan pasien masyarakat miskin di RS Paru. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (50) Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan RS Paru sebesar Rp1.083.335.212,00 dan realisasi sebesar Rp862.695.273,00 atau setara dengan 79,63%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen kegiatan barang dan jasa; 1 dokumen hasil pengadaan alat kedokteran umum. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (51) Kegiatan Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan non-PNS dan Tenaga Nonkesehatan Non-PNS sebesar Rp5.852.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.134.312.500,00 atau setara dengan 87,73%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan sumber daya rumah sakit yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (52) Kegiatan Penyediaan media informasi RS Paru sebesar Rp82.812.500,00 dan realisasi sebesar Rp80.250.000,00 atau setara dengan 96,91%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen hasil pengadaan media informasi. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (53) Kegiatan Penyediaan perlengkapan pasien RS Paru sebesar Rp1.711.424.830,00 dan realisasi sebesar Rp1.397.577.181,00 atau setara dengan 81,66%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan sumber daya rumah sakit yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. *Outcome*

- kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (54) Kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp339.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp308.317.518,00 atau setara dengan 90,92%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil bahan penunjang pengelolaan air limbah; 1 laporan hasil uji lab/sampling; 1 laporan hasil pembuangan sampah medis dan non medis. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (55) Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.896.318.800,00 atau setara dengan 97,41%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil pelayanan pasien rawat inap; 1 laporan hasil pelayanan pasien rawat jalan. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (56) Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp6.377.850.788,00 dan realisasi sebesar Rp5.919.702.256,00 atau setara dengan 92,82%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil adanya obat dental/gigi adanya reagen laboratorium; adanya bahan pemeriksaan radiologi; 1 laporan hasil adanya obat-obatan; 1 laporan hasil adanya bahan medis habis pakai. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (57) Kegiatan Pembangunan Masjid di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp5.328.626.608,00 dan realisasi sebesar Rp2.547.212.380,00 atau setara dengan 47,80%. *Output* kegiatan adalah 1 bangunan masjid; 1 dokumen Review DED; 1 dokumen pengawasan. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (58) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp15.404.963.198,00 dan realisasi sebesar Rp14.501.810.145,00 atau setara dengan 94,14%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan peralatan sarana dan prasarana kantor; 1 dokumen pengadaan peralatan mebel; 1 dokumen pengadaan sarana dan prasarana kesehatan; 1 dokumen penagadaan sarana dan prasarana laboatorium; 1 dokumen pengadaan alat generator oxygen. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

- (59) Kegiatan Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp101.399.211.248,00 dan realisasi sebesar Rp86.213.106.179,00 atau setara dengan 85,02%. *Output* kegiatan adalah 1 unit gedung OK. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (60) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Jampangkulon sebesar Rp49.369.340.089,00 dan realisasi sebesar Rp45.043.507.223,00 atau setara dengan 91,24%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil tersedianya sumber daya rumah sakit yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (61) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Jiwa sebesar Rp44.962.789.505,00 dan realisasi sebesar Rp22.296.014.859,00 atau setara dengan 49,59%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil belanja makanan dan minuman pasien bulan Januari-Oktober 2019; jumlah belanja makan minum petugas piket jaga bulan Januari s.d Oktober; jumlah belanja gas LPG honorarium tenaga BLUD; jumlah bahan terapi bulan Januari; jumlah februari; jumlah Maret; jumlah April; jumlah Mei; jumlah Juni; jumlah Juli; jumlah Agustus; jumlah September; jumlah Oktober 2019; Jumlah belanja pembinaan jiwa korsa; jumlah belanja bahan bangunan; jumlah belanja alat listrik dan elektronik; jumlah belanja air; jumlah listrik; jumlah telepon dan internet; Jumlah Belanja Pakaian Batik Tenaga BLUD; Jumlah Belanja MCU Petugas beresiko; jumlah belanja pengangkutan sampah; jumlah belanja kasur; jumlah belanja modal (laptop). *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (62) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru sebesar Rp13.173.848.016,00 dan realisasi sebesar Rp11.436.962.838,00 atau setara dengan 86,82%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (63) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Pameungpeuk sebesar Rp19.432.042.622,00 dan realisasi sebesar Rp18.636.170.075,00 atau setara dengan 95,90%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil masyarakat Jabar Selatan yang terinformasikan pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan; Terpenuhinya kebutuhan layanan yang memerlukan Obat; 1 Laporan hasil bahan medis

- habis pakai, Radiologi, Dental/gigi dan Reagen Laboratorium, labu darah. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (64) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Al Ihsan sebesar Rp266.985.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp232.128.070.956,00 atau setara dengan 86,94%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil operasional administrasi pelayanan kesehatan; 1 laporan hasil operasional belanja pegawai dan jasa pelayanan RSUD Al Ihsan. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (65) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK-Nonfisik sebesar Rp3.623.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.433.630.172,00 atau setara dengan 67,17%. *Output* adalah 1 laporan hasil meningkatnya realisasi anggaran DAK non fisik Tahun 2018 di 27 Kabupaten/Kota; Realisasi anggaran DAK non fisik dapat dilaksanakan; Dokumen perencanaan BOK Provinsi Jawa Barat; Kesepakatan upaya pencapaian anggaran BOK di 5 wilayah; Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan BOK. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan manajemen kesehatan;
- (66) Kegiatan Pembangunan Gedung Mortuary di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp2.354.547.515,00 dan realisasi sebesar Rp1.879.461.000,00 atau setara dengan 79,82%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil terbangunnya gedung mortuary di RSUD Pameungpeuk. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (67) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Al Ihsan (DBHCHT) sebesar Rp11.560.454.494,00 dan realisasi sebesar Rp8.987.561.518,00 atau setara dengan 77,74%. *Output* kegiatan adalah pengadaan alat kesehatan sebanyak 37 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (68) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Jiwa (DBHCHT) sebesar Rp3.828.041.720,00 dan realisasi sebesar Rp3.619.863.299,00 atau setara dengan 94,56%. *Output* kegiatan adalah ambulance 3 unit; jumlah instalasi pengolah limbah noninsinerator. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (69) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Paru (DBHCHT) sebesar Rp3.545.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.941.588.000,00 atau setara dengan 82,97%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pengadaan alat kesehatan di UPTD RS Paru Provinsi

- Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (70) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Jampangkulon (DBHCHT) sebesar Rp9.707.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.231.684.460,00 atau setara dengan 95,10%. *Output* kegiatan adalah pengadaan alat kedokteran umum 7 unit; jumlah pengadaan alat kedokteran mata 12 unit; jumlah pengadaan alat kedokteran bedah 6 unit; jumlah pengadaan alat kedokteran anak 1 unit; jumlah pengadaan alat kedokteran obgyn 4 unit; jumlah pengadaan alat laboratorium 1 unit; jumlah pengadaan ambulance jenazah 1 unit; jumlah pengadaan kendaraan pengangkut limbah B3 medis 1 Unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (71) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Pameungpeuk (DBHCHT) sebesar Rp13.966.766.887,00 dan realisasi sebesar Rp10.808.338.751,00 atau setara dengan 77,39%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan tempat tidur pasien; 1 dokumen pengadaan alat-alat kedokteran umum; 1 dokumen pengadaan alat-alat kedokteran bedah; 1 dokumen pengadaan alat-alat kedokteran anak; 1 dokumen pengadaan alat-alat laboratorium. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (72) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja (DBHCHT) sebesar Rp623.808.750,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau setara dengan 0%. *Output* kegiatan adalah tidak dilaksanakan. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- (73) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan UPT Labkes (DBHCHT) sebesar Rp25.295.589.802,00 dan realisasi sebesar Rp11.900.039.994,00 atau setara dengan 47,04%. *Output* kegiatan adalah 1 (satu) Dokumen Laporan Belanja Bahan Pakai Habis; 1 (satu) Dokumen Laporan Belanja Bahan Laboratorium; 1 (satu) Dokumen Laporan Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor; 1 (satu) Dokumen Laporan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium. *Outcome* kegiatan adalah persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM).

i. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp4.046.482.422,00 dengan realisasi sebesar Rp2.053.882.184,00 atau setara dengan 50,76%.

- (1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebesar Rp873.770.000,00 dan realisasi sebesar Rp743.601.950,00 atau setara dengan 85,10%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit. *Outcome* kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Kegiatan Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.306.731.374,00 dan realisasi sebesar Rp796.360.661,00 atau setara dengan 34,52%. *Output* kegiatan adalah 1 Dokumen Pengadaan langsung; 1 Tenaga Pembantu Teknis Penyusunan Perencanaan; 27 kab/kota yang terfasilitasi penyusunan perencanaan tahun 2020; 27 Kepala Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota, Perencana Dinkes Kab/kota Organisasi Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi menghadiri rapat; 1 Dokumen Laporan hasil perencana Dinkes Kab Kota dan Direktur RSUD Kab Kota, Bidang Dinkes kab/kota terkait, Bidang Seksi Dinkes Provinsi; 1 Laporan hasil melaksanakan perjadiin ke luar provinsi; Jumlah tenaga teknis yg terbayar honorarium; Jumlah Kab/kota yang terverifikasi usulannya; 1 Laporan hasil Menghadiri undangan pertemuan; 1 Laporan Pertemuan KPA, PPK, PPTK dan Perencana Bidang/UPTD mengikuti pertemuan koordinasi perencanaan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan bidang kesehatan;
- (3) Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019 sebesar Rp191.499.643,00 dan realisasi sebesar Rp79.006.200,00 atau setara dengan 41,26%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil kab/kota yang terverifikasi usulan kegiatan; 1 laporan hasil perencana Dinkes dan RSUD kab/kota yang

- melaporkan kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah dokumen *monitoring* dan evaluasi bantuan keuangan pembangunan bidang kesehatan tahun 2019;
- (4) Kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp118.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp52.910.144,00 atau setara dengan 44,61%. *Output* kegiatan adalah seluruh KPA, PPTK, bendahara Dinkes mengikuti rapat; 1 dokumen LKPJ; 1 dokumen Renstra kabid dan kasie; 1 Laporan hasil pembinaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja. *Outcome* kegiatan adalah jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 - (5) Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp205.887.500,00 dan realisasi sebesar Rp128.814.992,00 atau setara dengan 62,57%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen laporan capaian kinerja; 1 dokumen LKPJ Dinkes Provinsi Jawa Barat Tahun 2019; 1 Dokumen LAKIP Dinkes Provinsi Jawa Barat Tahun 2019; 1 Dokumen LPPD Dinkes Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 - (6) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.993.905,00 dan realisasi sebesar Rp253.188.237,00 atau setara dengan 72,34%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen laporan bulanan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah 1 dokumen laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp78.843.843.753,00 dengan realisasi sebesar Rp75.594.348.331,00 atau setara dengan 95,88%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan sebesar Rp3.060.765.587,00 dan realisasi sebesar Rp2.775.680.836,00 atau setara dengan 90,69%.

Output kegiatan adalah 1 Dokumen pengadaan dan instalasi water heate; 1 Dokumen pengadaan setrika uap dan meja setrika; 1 dokumen pengadaan komputer; 1 dokumen pengadaan note book; 1 dokumen pengadaan printe; 1 dokumen pengadaan pengadaan stabilizer; 1 dokumen pengadaan sarpras internet; 1 dokumen pengadaan meja rapa; 1 dokumen pengadaan kursi kerja; 1 dokumen pengadaan kursi rapa; 1 dokumen alat tulis kantor penunjang pengadaan barang dan jasa; 1 dokumen pengadaan sofa; 1 dokumen pengadaan kulkas; 1 dokumen pengadaan dan instalasi CCT; 1 dokumen pengadaan proyektor; 1 dokumen pengadaan megaphon; Jumlah pengadaan handy talki; 1 dokumen pengadaan interior dinding gran; 1 dokumen pengadaan buku perpustakaan; 1 dokumen software Ms. Office; 1 dokumen penggandaan dokumen pengadaan barang dan jasa; 1 dokumen konsultan perencanaan desain interior; 1 dokumen konsultan pengawasan desain interior; 1 dokumen pengadaan penghancur kertas; 1 dokumen pengadaan visual elektroni; 1 dokumen pengadaan almari; 1 dokumen pengadaan alat pendingin ruangan; 1 dokumen pengadaan papan nama OPD. *Outcome* kegiatan adalah peresentase peningkatan sarana dan prasarana UPTD Pelatian Kesehatan;

- (2) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp14.073.653.323,00 dan realisasi sebesar Rp13.170.607.274,00 atau setara dengan 93,58%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS dan Non PNS; 1 laporan hasil Jasa Konsultasi Perencanaan; 1 dokumen Jasa Konsultasi Management/Keuangan/SDM; 1 dokumen Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium; 1 Dokumen pengadaan Reagen; 1 dokumen Pengemasan/Packing barang Uji Profisiensi; 1 dokumen Jasa Profesi Pembuatan Laboratorium Information System; 1 dokumen Jasa Profesi Radiologi; 1 dokumen Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian & Budaya/Rumah Tangga; 1 dokumen pengadaan Makan & Minum; 1 dokumen pengadaan Belanja Pakaian Batik Tradisional. *Outcome* kegiatan adalah jumlah penambahan parameter pemeriksaan baru;
- (3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp509.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp424.284.280,00 atau setara dengan 83,73%.

- Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan barang bercorak kesenian dan kebudayaan; 1 dokumen pengadaan alat bengkel; 1 dokumen pengadaan peralatan kantor; tersedianya perlengkapan kantor; 1 dokumen pengadaan komputer; 1 dokumen pengadaan mebeulair; 1 dokumen pengadaan peralatan dapur; 1 dokumen pengadaan penghias ruangan rumah tangga; 1 dokumen pengadaan alat-alat studio; 1 dokumen pengadaan alat-alat komunikasi. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- (4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.363.191.150,00 dan realisasi sebesar Rp4.229.798.835,00 atau setara dengan 96,94%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen penambahan daya listrik gedung baru; 1 kegiatan penataan ulang ruang lobby/ruang tamu; 1 dokumen kegiatan konsultan perencana penataan ulang ruang lobby/ruang tamu; 1 dokumen kegiatan konsultan pengawas penataan ulang ruang lobby/ruang tamu; 1 dokumen kegiatan pengadaan kursi kantor; 1 dokumen kegiatan pengadaan kelengkapan/accessories komputer; 1 dokumen panitia barjas mendapat honorarium; 1 dokumen kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat kedokteran.; 1 dokumen kegiatan pengadaan alat rumah tangga/dapur habis pakai; 1 dokumen pengadaan mesin penghancur kertas; 1 dokumen pengadaan almari; 1 dokumen pengadaan proyektor; 1 dokumen pengadaan sound system; 1 dokumen kegiatan pengadaan alat alat peraga/praktik sekolah; 1 dokumen kegiatan pemindahan beban daya listrik. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- (5) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lantai III Gedung Serba Guna/Masjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp7.631.403.763,00 dan realisasi sebesar Rp6.122.989.678,00 atau setara dengan 80,23%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen panitia barjas mendapat honorarium; 1 dokumen makan dan minum rapat pembangunan lantai III gedung serbaguna/masjid; 1 dokumen paket perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pembangunan lantai III gedung serbaguna/masjid kantor; 1 dokumen tenaga konsultan perencanaan dan pengawasan berkala lanjutan pembangunan lantai III gedung serbaguna/ masjid kantor dinas

- kesehatan provinsi jabar yang mendapat pembayaran jasa konsultan; 1 dokumen tenaga konsultan pengawas lanjutan pembangunan lantai III gedung serbaguna/ mesjid kantor dinas kesehatan provinsi jabar yang mendapat pembayaran jasa konsultan; 1 dokumen paket kegiatan pengadaan kontruksi /pembelian bangunan; 1 dokumen kegiatan pengadaan kontruksi air bersih. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan sarana prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon sebesar Rp6.598.510.045,00 dan realisasi sebesar Rp6.504.651.625,00 atau setara dengan 98,58%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase BOR;
- (7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Pameungpeuk sebesar Rp4.915.944.305,00 dan realisasi sebesar Rp4.915.944.305,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil pasien yang terlayani pemeriksaan kesehatannya di RSUD Pameungpeuk. *Outcome* kegiatan adalah persentase BOR;
- (8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Jiwa sebesar Rp501.188.400,00 dan realisasi sebesar Rp501.188.400,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan ambulance transport, ambulance emergency, bed elektrik, genset, pengolah sampah medis, notebook/ laptop, ventilator, oxygen consentrat, tempat tidur elektrik. *Outcome* kegiatan adalah persentase BOR;
- (9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru sebesar Rp4.304.662.632,00 dan realisasi sebesar Rp4.265.662.632,00 atau setara dengan 99,09%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen peningkatan alat-alat kesehatan dan prasarana di RS Paru Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah persentase BOR;
- (10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan sebesar Rp31.982.465.348,00 dan realisasi sebesar Rp31.955.465.348,00 atau setara dengan 99,92%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan alat kesehatan sebanyak 18 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase BOR;
- (11) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana di UPTD Pelatihan Kesehatan (DAK) sebesar Rp502.582.700,00 dan realisasi sebesar Rp502.582.700,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan peralatan

media; 1 dokumen peralatan laboratorium kebidanan; 1 dokumen peralatan laboratorium; 1 dokumen peralatan akupresur; 1 dokumen peralatan alat peraga gawat darurat; 1 dokumen *kit* keperawatan kesehatan masyarakat; 1 dokumen peralatan proses belajar mengajar; 1 dokumen peralatan laboratorium praktek meramu obat tradisional. *Outcome* kegiatan adalah persentase peningkatan sarana dan prasarana UPTS Pelatihan Kesehatan;

- (12) Kegiatan Peningkatan Akreditasi UPTD Laboratorium Kesehatan (DAK) sebesar Rp399.976.500,00 dan realisasi sebesar Rp225.492.418,00 atau setara dengan 56,38%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase kepuasan pelanggan.

k. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp133.641.137.466,00 dengan realisasi sebesar Rp113.940.916.074,00 atau setara dengan 85,26%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan sebesar Rp215.525.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.753.800,00 atau setara dengan 87,11%. *Output* kegiatan adalah Terselenggaranya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur, tersedianya pakaian dinas dan atribut pegawai, penyediaan pakaian kerja Non PNS, terfasilitasinya perjalanan dinas, terfasilitasinya kursus/pelatihan. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di UPTD Pelatihan Kesehatan;
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan sebesar Rp1.051.670.663,00 dan realisasi sebesar Rp958.061.686,00 atau setara dengan 91,10%. *Output* kegiatan adalah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih habis pakai, penyediaan peralatan pemadam kebakaran habis pakai, pemeliharaan lift, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan bangunan air, pemeliharaan instalasi jaringan, pemeliharaan

- halaman/taman.tanaman, mpemeliharaan bangunan bukan kantor. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemeliharaan sarana prasarana;
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan sebesar Rp144.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp110.624.213,00 atau setara dengan 76,69%. *Output* kegiatan adalah Penyediaan bahan bakar minyak kendaraan dinas, perpanjangan STNK Kendaraan Operasional, terawatnya kendaraan dinas. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemeliharaan sarana prasarana;
- (4) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan sebesar Rp237.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp202.293.265,00 atau setara dengan 85,18%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya alat listrik dan elektronik serta alat-alat rumah tangga/dapur pakai habis, Terpeliharanya komputer, printer, AC, alat studio dan komunikasi. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemeliharaan sarana prasarana;
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan sebesar Rp2.102.419.341,00 dan realisasi sebesar Rp2.019.668.632,00 atau setara dengan 96,06%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya langganan telepon, langganan air, langganan listrik, langganan surat kabar/majalah, jasa kawat/*faximili*/internet, jasa paket/pengiriman surat, jasa pengangkutan sampah, jasa penyedotan tinja, jasa kebersihan, jasa keamanan, langganan TV berbayar, jasa tenaga kerja kontrak Non PNS. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan sebesar Rp144.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp135.548.700,00 atau setara dengan 94,13%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman piket/jaga, rapat, tamu, dan lembur, Terfasilitasnya perjalanan dinas PNS Provinsi, Terfasilitasnya perjalanan dinas Non PNS. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data;
- (7) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan sebesar Rp63.237.972,00 dan realisasi sebesar Rp63.158.143,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya bahan pakai habis penunjang pelayanan administrasi, Tersedianya biaya cetak dan

- penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- (8) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10.949.413.393,00 dan realisasi sebesar Rp10.371.051.204,00 atau setara dengan 94,72%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya Kursus Singkat/Pelatihan, tersedianya Jasa Konsultan/Narasumber. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi;
- (9) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS Jiwa sebesar Rp553.636.721,00 dan realisasi sebesar Rp527.219.600,00 atau setara dengan 95,23%. *Output* kegiatan adalah pemenuhan bahan kerja/alat kerja penunjang pemeliharaan alat kesehatan dan alat kedokteran, terkalibrasinya jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran, pemenuhan etiket pemeliharaan alat, pemenuhan pemeliharaan alat laboratorium laik pakai sesuai kebutuhan dan standar, Pemenuhan pemeliharaan alat laboratorium laik pakai sesuai kebutuhan dan standar. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemeliharaan sarana prasarana;
- (10) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa sebesar Rp182.796.752,00 dan realisasi sebesar Rp152.630.590,00 atau setara dengan 83,50%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil perawat mengikuti penyegaran manajemen cairan dan oksigen, 1 laporan hasil perawat yang mendapat penyegaran Hipno terapi, 1 laporan hasil perawat mengikuti penyegaran penyegaran PANSS-EC, 1 laporan hasil perawat yang mengikuti penyegaran evidence based nursing, jumlah perawat yang mengikuti penyegaran pelaksanaan pencegahan terjadinya infeksi, 1 laporan hasil perawat yang mengikuti penyegaran mutu profesi keperawatan, 1 laporan hasil perawat yang mendapat kewenangan klinis, 1 laporan hasil pelaksanaan manajemen keperawatan yang professional. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi;
- (11) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Nonkesehatan RS Jiwa sebesar Rp1.496.768.676,00 dan realisasi sebesar Rp1.245.536.494,00 atau setara dengan 83,22%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan kegawatdaruratan psikiatri

Adiksi; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan penanggulangan/kesiagaan bencana dan pembentuk tim bencana; 1 laporan Penyegaran ASKEP dasar jiwa; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan Keperawatan Jiwa; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan penguatan perawat intensif psikiatri; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan penanggulangan TB-HIV di RSJ; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan manajemen nyeri; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan PPI Dasar; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan PPI; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan musik tradisional; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan sosial skill training; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan manajemen kasus sosial ODGJ; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan manajemen bangsal; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan SP2KP; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan Preseptorship; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan komunikasi efektif; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan PPDG; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan BTCL; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan ACLS; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan Konseling Adiksi; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan Diagnosis Coding; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan kredensial tenaga kesehatan lain; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan melalui *inhouse training*; 1 laporan SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan melalui *inhouse training*; 1 laporan SDM kesehatan dan non keset dapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan eksternal. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi;

- (12) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp179.071.374,00 atau setara dengan 89,54%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen laporan keuangan, 1 laporan kinerja pelayanan, 1 dokumen LKIP, 1 dokumen LKPJ, 1 dokumen LPPD, 1 dokumen E-Monev Scorecard, 1 dokumen Atisibada pelaporan. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (13) Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp992.151.000,00 dan realisasi sebesar Rp931.789.200,00 atau setara dengan 93,92%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan even Pengisi acara halal bi halal, 1

- dokumen sewa gedung olahraga, 1 dokumen sewa kostum, 1 laporan snack pengajian rutin, 1 laporan dokumen pengadaan pakaian dinas harian, pakaian seragam batik, pakaian olah raga peserta porpemprov, perjalanan dinas peserta porpemprov, pembinaan jiwa korsa (dua gelombang); 1. penceramah agama, instruktur baca alquran, instruktur senam, instruktur kesenian, instruktur bulutangkis, instruktur beladiri, instruktur tenis meja, instruktur futsal, penceramah acara halal bi halal. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (14) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor RS Jiwa sebesar Rp852.714.000,00 dan realisasi sebesar Rp623.191.502,00 atau setara dengan 73,08%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan pemeliharaan AC; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan alat kesenian; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan alat listrik dan elektronik; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan CCTV; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan depot air dan instalasi; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan jaringan air bersih; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan komputer; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan laptop; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan lif; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan mesin antrian pasien; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan mesin cuci; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan mesin fax; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan mesin genzet/panel listrik; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan mesin photocopy; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan mesin risograf; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan mesin rumput; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan PABX; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan printer; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan setrika; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan sound system; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan sumur artesis; 1 dokumen pengadaan pemeliharaan torn dan instalasi; 1 dokumen pengadaan persediaan untuk pemeliharaan bangunan; 1 dokumen pengadaan persediaan untuk pemeliharaan bangunan; 1 dokumen pengadaan persediaan untuk pemeliharaan kebersihan dan bahan pembersih; 1 dokumen pengadaan persediaan untuk pemeliharaan kebersihan dan bahan pembersih. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;

- (15) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa sebesar Rp5.976.052.776,00 dan realisasi sebesar Rp5.892.395.920,00 atau setara dengan 98,60%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan ATK, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa kebersihan, jasa keamanan. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (16) Kegiatan Pemeliharaan/rehab bangunan kantor RS Jiwa sebesar Rp6.914.696.910,00 dan realisasi sebesar Rp5.630.493.380,00 atau setara dengan 81,43%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan peningkatan bangunan pos jaga Rumah Sakit Jiwa, pembangunan jalan, pembangunan selasar Rumah Sakit Jiwa, pemeliharaan gedung pelayanan, pemeliharaan gedung rawat inap Kasuari, pemeliharaan rumah dinas pegawai Rumah Sakit Jiwa, peningkatan bangunan genset Rumah Sakit Jiwa, pemeliharaan gedung Kantor RS Jiwa, pembangunan jalan *hotmix* lebar 5 meter. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (17) Kegiatan Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa sebesar Rp404.570.000,00 dan realisasi sebesar Rp223.056.968,00 atau setara dengan 55,13%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan perizinan tempat pembuangan sampah medis; Jasa Giro/jasa transfer dan Cek; Jasa dokumentasi publikasi/yellow page/surat kabar dan spanduk; Iuran ARSADA, ARSAWAKOI, Health Promotion Hospital; Jasa Profesi Supir; Surat Kabar; Surat; Sertifikasi/Perizinan pengangkal petir; Sertifikasi/Perizinan IMB; Perizinan Hydrant; Perizinan penggunaan sumber daya air; Sertifikasi uji Genset; Perizinan SIPA Artesis. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (18) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK RS Jiwa sebesar Rp802.813.000,00 dan realisasi sebesar Rp704.546.370,00 atau setara dengan 87,76%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Tersedianya ATK; Materai @ Rp. 6000; Materai @ Rp. 3000; langganan majalah kesehatan; Cetakan undangan Halal Bihalal; Cetakan administrasi medis dan perkantoran; Fotocopy Dokumen; Penjilidan; Belanja buku kesehatan/ manajemen/ penelitian/hukum/tata kelola/jurnal/Pendidikan. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;

- (19) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Rapat Rapat dan koordinasi RS Jiwa sebesar Rp1.205.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp997.195.659,00 atau setara dengan 82,69%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan Tersedianya Makan dan minum lembur; Belanja Air Galon; Belanja Air dalam Kemasan; Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi/ konsultasi serta menghadiri rapat/pertemuan; Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi; Sewa kursi; Sewa tenda, panggung; Sewa Sound System; Makan dan Minum tamu undangan halal bihalal (prasmanan); Snack Halal Bihalal; Penyediaan makan dan minum rapat kedinasan/kegiatan; snack rapat kedinasan/kegiatan; Makan dan minum tamu; Snack tamu. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (20) Kegiatan Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp531.638.800,00 dan realisasi sebesar Rp514.529.855,00 atau setara dengan 96,78%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan terlaksananya Tausiyah/Pengajian di labkes; Jumlah terselenggaranya olah raga; Jumlah pegawai yang divaksinasi dan menerima makanan penambah daya tahan tubuh; Jumlah pakaian aparatur. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (21) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp104.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.495.000,00 atau setara dengan 91,51%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan penyediaan kursus/pelatihan singkat, penyediaan makan dan minum. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi;
- (22) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp441.797.998,00 dan realisasi sebesar Rp407.102.606,00 atau setara dengan 92,15%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor UPTD Labkes. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (23) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp81.317.300,00 dan realisasi

- sebesar Rp65.763.987,00 atau setara dengan 80,87%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (24) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp822.984.250,00 dan realisasi sebesar Rp774.114.811,76 atau setara dengan 94,06%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Terpeliharanya bangunan gedung kantor, halaman, pekerjaan konstruksi pemeliharaan Gedung. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (25) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp177.052.462,00 dan realisasi sebesar Rp162.085.401,00 atau setara dengan 91,55%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi, tersedianya perjalanan dinas dalam mendukung tupoksi. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (26) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp334.827.517,00 dan realisasi sebesar Rp293.725.815,00 atau setara dengan 87,72%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Tersedianya barang cetakan dan ATK. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (27) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.693.146.972,00 dan realisasi sebesar Rp1.642.082.120,00 atau setara dengan 96,98%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Tersedianya jasa keamanan kantor, Tersedianya jasa kebersihan kantor, Jumlah jasa kantor; tersedianya alat listrik/elektronik; Pembayaran honorarium tenaga dokter radiologi, terpenuhinya kebutuhan tenaga, tenaga front office, tenaga pengemudi; Tersedianya Pengiriman kilat khusus Belanja transaksi keuangan Minuman pasien. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (28) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp880.953.117,00 dan realisasi sebesar

- Rp854.386.617,00 atau setara dengan 96,98%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Tersedianya alat listrik/ elektronik; Tersedianya gas; Tersedianya langganan telepon; Tersedianya langganan air; Tersedianya langganan listrik; Tersedianya langganan surat kabar/majalah; Tersedianya langganan internet Pengiriman kilat khusus; Tersedianya transaksi keuangan. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (29) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp90.413.050,00 atau setara dengan 90,41%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (30) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor RSUD Jampangkulon sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp905.015.909,00 atau setara dengan 60,33%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Tersedianya jasa telepon; Tersedianya jasa air bersih; Tersedianya jasa listrik; Tersedianya jasa internet. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (31) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp469.403.034,00 atau setara dengan 93,88%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa telepon; tersedianya jasa air bersih; tersedianya jasa listrik; tersedianya jasa internet. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (32) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp185.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp147.553.467,00 atau setara dengan 79,76%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan Penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan, pemeliharaan rutin kendaraan dinas, perpanjangan Pajak Kendaraan bermotor. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (33) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp1.543.317.426,00 dan realisasi sebesar Rp1.533.280.940,00 atau setara dengan 99,35%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan penyediaan jasa kebersihan, penyediaan

- jasa keamanan, pemeliharaan instalasi jaringan, iuran wajib tahunan evaluasi TLD Radiologi. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (34) Kegiatan penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp422.419.950,00 dan realisasi sebesar Rp338.295.568,24 atau setara dengan 80,09%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan Penyediaan makan dan minum rapat, koordinasi dan imolementasi tim kesehatan kerja, rapat-rapat dan koordinasi manajemen, penyediaan air mineral. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (35) Kegiatan Penyediaan barang dan ATK RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp249.999.634,00 dan realisasi sebesar Rp219.020.815,00 atau setara dengan 87,61%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan penyediaan ATK dan barang habis pakai. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (36) Kegiatan Penyediaan jasa kantor RSUD kesehatan kerja sebesar Rp873.096.727,00 dan realisasi sebesar Rp685.237.238,00 atau setara dengan 78,48%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan penyediaan langganan telepon, langgan listrik, langganan Internet, penyediaan tabung gas oksigen, langganan surat kabar, pengadaan alat listrik dan elektronik. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (37) Kegiatan peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur RSUD Kesehatan Kerja sebesar Rp899.990.000,00 dan realisasi sebesar Rp786.319.968,00 atau setara dengan 87,37%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan *Capacity building*, pelatihan/kursus singkat, tersedianya sarana olah raga. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (38) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor RS Paru sebesar Rp2.200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.698.941.187,00 atau setara dengan 77,22%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Tersedianya cetakan; Tersedianya alat listrik dan elektronik; Tersedianya pakaian Korpri; Tersedianya pakaian batik; Tersedianya pakaian dan sepatu olahraga; Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa; Tersedianya meterai; Tersedianya pemesanan karangan bunga; Tersedianya surat kabar; Tersedianya obyek yang dipajakkan; Jumlah pengangkutan pengapusan barang; tersedianya

- ATK. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja
- (39) Kegiatan Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.490.100.784,00 atau setara dengan 99,34%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan; Tersedianya jamuan makan minum rapat; Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah; Tersedianya melakukan perjalanan dinas luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (40) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk sebesar Rp11.700.392.696,00 dan realisasi sebesar Rp9.428.764.411,00 atau setara dengan 80,59%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan tersedianya alat tulis kantor; Terbayarnya honor tenaga kesehatan Dokter, Perawat, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya; Tersedianya makan dan minum rapat; Tersedianya makan dan minum tamu; Tersedianya perjalanan dinas PNS dan Non PNS. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (41) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru sebesar Rp2.136.807.516,00 dan realisasi sebesar Rp2.103.527.039,00 atau setara dengan 98,44%. *Output* kegiatan adalah 1 gedung perawatan RSP dipelihara; 1 gedung non perawatan RSP di pelihara; 1 laporan hasil melakukan perjalanan dinas dalam daerah; 1 dokumen pengadaan konsultan gedung oleh konsultan perencana; 1 dokumen pengadaan pengawasan gedung oleh konsultan pengawas; 1 dokumen pelaksanaan kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (42) Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk sebesar Rp146.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp87.650.000,00 atau setara dengan 59,83%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil pelatihan/kursus singkat yang diikuti; Jumlah sosialisasi yang diikuti; 1 laporan hasil pelatihan/kursus singkat yang diikuti. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi;
- (43) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp408.664.673,00 atau setara dengan 54,49%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan

- sumur artesis dipelihara; 1 dokumen penangkal petir dipelihara; 1 dokumen pengisian tabung; 1 dokumen kegiatan barang dan jasa; 1 laporan pengeluaran BBM; Jumlah kendaraan diservice; Jumlah kendaraan diservice; Jumlah pelumas; Jumlah alat laboratorium yang dipelihara; jumlah alat rumah tangga yang dipelihara; Jumlah alat berat dipelihara (genset); jumlah instalasi listrik dipelihara. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (44) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru sebesar Rp1.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp997.004.419,00 atau setara dengan 79,76%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen perlengkapan dapur; Jumlah megatron; Jumlah film; Jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah mebeuleir; Jumlah komputer; Jumlah lemari; Jumlah komputer dipelihara; Jumlah fotocopy; Jumlah mesin cuci; Jumlah mesin fax dan PABX; Jumlah TV yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (45) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru sebesar Rp1.490.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.397.991.741,00 atau setara dengan 93,82%. *Output* kegiatan adalah jumlah makan minum piket jaga ramadan/idul fitri; Jumlah pakaian kerja lapangan; Jumlah pakaian dinas harian; Jumlah pakaian Korpri; Jumlah pakaian batik; Jumlah pakaian dan sepatu olahraga; Jumlah perjalanan dinas; jumlah pegawai mengikuti diklat lebih 20 jam; Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa; Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat; Jumlah cinderamata; Jumlah spanduk dan Banner; Jumlah kaos tim; Jumlah instruktur/penceramah; Jumlah Pegawai yang mengikuti jiwa korsa; Jumlah pegawai yang mengikuti Halal Bi Halal; Jumlah gedung olahraga/stand pameran yang disewa. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (46) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp913.089.247,00 dan realisasi sebesar Rp869.538.425,00 atau setara dengan 95,23%. *Output* kegiatan adalah Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; jumlah paket atk untuk operasional dinas kesehatan; jumlah bulan penyediaan kebutuhan benda pos; jumlah paket

- pekerjaan cetak; jumlah bulan penyediaan biaya fotocopy. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (47) Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp610.490.000,00 dan realisasi sebesar Rp493.900.000,00 atau setara dengan 80,90%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen panitia barjas mendapat honorarium; 1 dokumen asn dinkes menpatakan uang saku diklat; 1 dokumen tenaga ahli/pakar mendapatkan honorarium narasumber; 1 dokumen laporan asn dinkes mampu membangun dan menanamkan jiwa kemandirian, kebersamaan, disiplin, dan meningkatkan motivasi kerja; 1 dokumen ASN Dinkes mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, manajerial, fungsional dan pemerintahan. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi;
- (48) Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.709.570.200,00 dan realisasi sebesar Rp3.221.448.367,00 atau setara dengan 86,84%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen bulan penyediaan biaya makanan dan minuman rapat kedinasan, tamu kedinasan, dan petugas SPGDT; 1 dokumen penyediaan jasa akomodasi rapat rapat koordinasi; 1 dokumen bulan penyediaan biaya perjalanan dalam daerah PNS dan Non PNS dinas kesehatan; 1 dokumen laporan hasil perjalanan dinas luar daerah PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (49) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp570.830.000,00 dan realisasi sebesar Rp537.172.500,00 atau setara dengan 94,10%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen panitia barjas mendapat honorarium; 1 dokumen instruktur senam dan kebugaran, Khotib Jum'at, siraman rohani, qori, saritilawah mendapat honor jasa profesi; 1 dokumen lapangan olahraga yang disewa; 1 dokumen jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar mendapat pakaian seragam putih biru; 1 dokumen ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar mendapat pakaian seragam olahraga. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;

- (50) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.030.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.237.662.822,00 atau setara dengan 80,34%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen panitia barjas mendapat honorarium; 1 dokumen jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan gedung kantor; 1 dokumen jumlah kegiatan penyedotan septictank; 1 dokumen bulan penyediaan jasa keamanan kantor; 1 dokumen paket kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor dinas kesehatan; 1 dokumen kegiatan pemeliharaan taman/tanaman hias. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (51) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.826.270.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.445.796.654,00 atau setara dengan 86,54%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen panitia barjas mendapat honorarium; 1 dokumen pengadaan kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran; 1 dokumen presentasi pendokumentasian kegiatan kedinasan; 1 dokumen bulan penyediaan langganan kantor; 1 dokumen bula penyediaan biaya ucapan, iklan, reklame; 1 dokumen tenaga teknis yang mendapat pembayaran jasa pelayanan. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (52) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp728.182.000,00 dan realisasi sebesar Rp526.298.767,00 atau setara dengan 72,28%. *Output* kegiatan adalah 1) Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan Operasional roda 4 dan roda 2; 2) Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang diperpanjang STNK nya; 3) Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dilaukan KIR; 4) Jumlah bulan kendaraan dinas yang dilakukan penggantian suku cadang; 5) Jumlah bulan kendaraan dinas yang dilakukan penggantian pelumas. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (53) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp51.185.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp42.506.929.500,00 atau setara dengan 83,04%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen panitia barjas mendapat honorarium; 1 laporan peserta rapat pengadaan tanah untuk gudang vaksin yang mendapat mamin rapat; 1 laporan hasil kegiatan

- perjalanan dinas kegiatan koordinasi pengadaan tanah gudang vaksin dinas kesehatan; jumlah paket belanja modal pengadaan tanah untuk gudang vaksin. *Outcome* kegiatan adalah persentase ketersediaan data kinerja;
- (54) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.359.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp958.557.141,00 atau setara dengan 70,50%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pengadaan terpelihara dengan baik sesuai fungsinya. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan

a. Permasalahan

- (1) Masih banyaknya jumlah kematian ibu dan bayi;
- (2) Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular;
- (3) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- (4) Masalah Gizi masyarakat;
- (5) Masih rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata;
- (6) Masalah aspek Jaminan Kesehatan, seperti :
 - a) Kepesertaan Jaminan Kesehatan;
 - b) Pelayanan menyangkut prinsip portabilitas;
 - c) Regionalisasi rujukan. Pelayanan dalam program JKN dilaksanakan secara berjengjang mulai dari FKTP sampai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTL);
 - d) Kriteria gawat darurat (emergency);
 - e) Perihal pembagian kelas perawatan;
 - f) Persoalan pengadaan obat – obatan;
 - g) Terkait klasifikasi tarif INA-CBGs;
 - h) Pembagian jasa medis di RS Pemerintah.

b. Solusi

- (1) Melakukan *mapping* ketersediaan input dan proses yang dilakukan di Kabupaten/Kota dalam Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi;
- (2) Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kesehatan kegawatdaruratan ibu dan bayi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan (FKTL);
- (3) Penguatan system dan jejaring rujukan terintegrasi terutama untuk kasus-kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi;

- (4) Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan bayi melalui pemantapan pelaksanaan Maternal Perinatal Death Surveilans dan Respons (MPDSR/AMP);
- (5) Melakukan Bimbingan Teknis/Pendampingan ke Kabupaten/Kota untuk akselerasi penurunan kematian ibu dan bayi;
- (6) Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga lintas sektor terkait di wilayah kerja;
- (7) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam akselerasi pencapaian persalinan di fasilitas kesehatan;
- (8) Melakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- (9) Melakukan Pemberantasan penyakit menular;
- (10) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dengan komitmen daerah dalam penanganan penyakit menular;
- (11) Melakukan peningkatan sistem informasi surveilans penyakit;
- (12) Penyediaan Ruang Rawat Inap minimal 10 tempat tidur bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota;
- (13) Meningkatkan promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko Penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui pemberdayaan masyarakat ;
- (14) Melakukan koordinasi dengan Lintas Sektor Terkait untuk percepatan penambahan peserta dan kemudahan dalam pelayanan jaminan kesehatan;
- (15) Pendayagunaan Program Intership Dokter Indonesia (PIDI) untuk memenuhi sementara kekosongan dokter di Puskesmas dan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) di Rumah Sakit;
- (16) Pendayagunaan lulusan Stikes dan Poltekes melalui rekrutmen yang bersumber dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas;
- (17) Program tugas belajar memberikan kesempatan untuk peningkatan jenjang pendidikan, dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi yang bersumber dana APBD dan APBN;
- (18) Kepatuhan pada regulasi pemenuhan tenaga kesehatan maupun dokter spesialis berdasarkan kajian telaahan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, untuk memperbaiki distribusi tenaga kesehatan baik di FKTP dan FKTL;

- (19) Fasilitasi peningkatan manajemen SDMK baik bersumber anggaran APBD maupun APBN;
- (20) Rekrutmen tenaga kesehatan Non PNS untuk memenuhi kekosongan maupun untuk memenuhi rasio tenaga kesehatan, melalui penugasan khusus mengacu kepada Permenkes 33 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat;
- (21) Perlu adanya dukungan advokasi dan dukungan dari lintas sektor terkait dalam pencapaian implementasi urusan kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2019 adalah Tingkat Konektivitas Antar Wilayah dengan capaian 46,13% dari target sebesar 41%-43%; Indeks Penggunaan Air (IPA) dengan capaian sebesar 1,1920 poin dari target sebesar 1,1923 poin; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan capaian sebesar 52,12 poin dari target sebesar 49,76 poin; Indeks Resiko Bencana (IRB) dengan capaian sebesar 152,13 poin dari target sebesar 165 poin; Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 91,90% dari target sebesar 91,48%; persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan sebesar 1,35% dari target sebesar 2,49%; persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dengan capaian sebesar 79,25% dari target sebesar 79,25%; persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air dengan capaian sebesar 0,29% dari target sebesar 0,31%; Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dengan capaian sebesar 52,20% dari target sebesar 52,31%; Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air dengan capaian sebesar 50% dari target sebesar 50%; persentase titik terdampak banjir dan kekeringan yang ditangani dengan capaian sebesar 8,6% dari target sebesar 5%; cakupan akses infrastruktur dasar permukiman dengan capaian sebesar 74,57% dari target sebesar 74% dan persentase luasan genangan permukiman yang tertangani dengan capaian sebesar 29,20% dari target sebesar 85%. Indikator kinerja dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Capaian Indikator Kinerja Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yakni mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan memiliki indikator Tingkat Kemantapan Jalan (Kondisi Baik dan Sedang) sebesar 91,90% dari target sebesar 91,48%. Alokasi anggaran program Rp420.667.834.669,00 adalah dengan realisasi sebesar Rp360.801.876.029,00 setara dengan 85,77%.

- (1) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp31.013.146.755,00 dan realisasi

- Rp27.850.378.798,00 atau setara dengan 89,80%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 10,44 km. *Outcome* kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan;
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp29.249.708.431,00 dan realisasi Rp28.211.199.412,00 atau setara dengan 96,45%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 395,587 km di Kab/Kota Bogor, Kota Depok, Kab/Kota Bekasi, dan Kab. Cianjur, pemeliharaan jembatan provinsi sepanjang 2.095,70 m di Kab/Kota Bogor, Kota Depok, Kab/Kota Bekasi, dan Kab. Cianjur. *Outcome* kegiatan adalah terpertahkannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana;
- (3) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp51.817.160.679,00 dan realisasi Rp35.330.252.059,00 atau setara dengan 68,18% *Output* kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 4,50 km. *Outcome* kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan;
- (4) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp21.665.084.483,00 dan realisasi Rp21.033.190.300,00 atau setara dengan 97,08%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 328,95 km di Kab/Kota Sukabumi, pemeliharaan jembatan provinsi sepanjang 2.064 m di Kab/Kota Sukabumi. *Outcome* kegiatan adalah terpertahkannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana;
- (5) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah

Pelayanan III yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp81.184.912.419,00 dan realisasi Rp58.863.378.695,00 atau setara dengan 72,51%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 15,759 km. *Outcome* kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan;

- (6) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp41.499.624.100,00 dan realisasi Rp41.194.629.129,00 atau setara dengan 99,27%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 567,027 km di Kab/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab.Bandung Barat, Kab.Subang, Kab.Purwakarta dan Kab.Karawang, pemeliharaan jembatan provinsi sepanjang 4.393,03m di Kab/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab.Bandung Barat, Kab.Subang, Kab.Purwakarta dan Kab.Karawang *Outcome* kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana;
- (7) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp25.927.852.366,00 dan realisasi Rp23.584.078.674,00 atau setara dengan 90,96%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 10,20 km. *Outcome* kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan;
- (8) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp22.081.509.400,00 dan realisasi Rp21.391.864.309,00 atau setara dengan 96,88%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 401,832 km di Kab.Sumedang dan Kab. Garut, pemeliharaan

jembatan provinsi sepanjang 1.386,10 m di Kab.Sumedang dan Kab. Garut. *Outcome* kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana;

- (9) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp19.417.445.300,00 dan realisasi Rp18.333.625.705,00 atau setara dengan 94,42%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 6,50 km. *Outcome* kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan;
- (10) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp18.104.723.625 dan realisasi Rp17.536.835.885,00 atau setara dengan 96,86%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan provinsi di Kab/Kota Tasikmalaya, Kab.Ciamis, Kota Banjar, Kab.Pangandaran. Kab. Kuningan sepanjang 286,428 km, pemeliharaan jembatan provinsi di Kab/Kota Tasikmalaya, Kab.Ciamis, Kota Banjar, Kab.Pangandaran. Kab. Kuningan sepanjang 1.837,95 m. *Outcome* kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana;
- (11) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp41.297.813.816,00 dan realisasi Rp38.934.596.718,00 atau setara dengan 94,28%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 11,66 km *Outcome* kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan;
- (12) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan

alokasi anggaran Rp23.881.566.137,00 dan realisasi Rp23.187.219.440,00 atau setara dengan 97,09%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 362,235 km di Kab/Kota Cirebon, Kab.Indramayu, Kab. Majalengka, pemeliharaan jembatan provinsi sepanjang 2.594 m di Kab/Kota Cirebon, Kab.Indramayu, Kab. Majalengka. *Outcome* kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana;

- (13) Verifikasi/*Monitoring* Bantuan Gubernur dan Kerjasama/Regulasi Bidang Kebinamargaan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp149.999.837,00 dan realisasi Rp88.627.606,00 atau setara 59,09%. *Output* kegiatan adalah termonitornya usulan pengajuan bantuan dari gubernur. *Outcome* kegiatan adalah bantuan gubernur dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- (14) Penyusunan Sistem Informasi dan Data Base Leger Jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.147.115.570,00 dan realisasi Rp2.807.381.130,00 atau setara dengan 89,20%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya survey leger jalan *Outcome* tersedianya database leger jalan untuk penyusunan kebijakan pengelolaan jalan;
- (15) Pembinaan Pemanfaatan Jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.103.599.978,00 dan realisasi Rp1.017.887.475,00 atau setara dengan 92,23%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pengaturan dan pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan. *Outcome* kegiatan adalah pemanfaatan lahan pada Rumija (ruang milik jalan) tidak mengganggu fungsi jalan;
- (16) Kegiatan Pengujian Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp530.001.150,00 dan realisasi Rp266.436.750,00 atau setara dengan 50,27%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pengujian kualitas bahan dan penanganan jalan dan jembatan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku;
- (17) Kegiatan Pengujian Tanah dan Bangunan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- Rp124.999.980,00 dan realisasi Rp124.612.500,00 atau setara dengan 99,69%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data hasil pengujian bahan perkerasan jalan dan kondisi tanah dan bangunan *Outcome* kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang berlaku;
- (18) Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp202.500.000,00 dan realisasi Rp201.950.000,00 atau setara dengan 99,73%. *Output* kegiatan adalah tersedianya peralatan pendukung pengujian jalan dan jembatan. *Outcome* kegiatan adalah pelaksanaan pengujian menghasilkan kualitas yang sesuai dalam waktu yang tidak lama;
- (19) Kegiatan *Monitoring* Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.999.885,00 dan realisasi Rp199.693.452,00 atau setara dengan 99,85%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *monitoring* pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan. *Outcome* kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana;
- (20) Kegiatan Pengadaan Paving Block Untuk Jalan Mulus Pedesaan (Jamu) yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp8.069.070.758,00 dan realisasi Rp644.037.992,00 atau setara dengan 7,98%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan desa dengan menggunakan material *paving block*. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya jalan mulus di perdesaan yang mempunyai nilai strategis.

b. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan yakni meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan memiliki indikator Tingkat Kemantapan Jalan (Kondisi Baik dan Sedang) sebesar 91,90% dari target sebesar 91,48%. Alokasi anggaran Program Rp608.307.100.086,00 adalah dengan realisasi sebesar Rp518.058.006.946,00 setara dengan 85,16%.

- (1) Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa

- Barat dengan alokasi anggaran Rp14.588.757.377,00 dan realisasi Rp11.765.911.677,00 atau setara dengan 80,65%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan jalan berupa FS, Amdal dan DED. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan;
- (2) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp87.414.173.802,00 dan realisasi Rp81.305.503.148,00 atau setara dengan 93,01%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 9,00 km. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana;
- (3) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp129.022.622.501,00 dan realisasi Rp108.102.931.211,00 atau setara dengan 83,79%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 9,00 km. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana;
- (4) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp124.813.356.932,00 dan realisasi Rp97.398.883.365,00 atau setara dengan 78,04%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 19,26 km. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana;
- (5) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp36.047.858.095,00 dan realisasi Rp32.553.469.350,00 atau setara dengan 90,31%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 9,40 km. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana;
- (6) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah

- Pelayanan V yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp30.249.428.215,00 dan realisasi Rp30.109.463.968,00 atau setara dengan 99,54%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 7,10 km. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana;
- (7) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp133.617.171.709,00 dan realisasi Rp107.430.640.382,00 atau setara 80,40%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 5,00 km *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana;
- (8) Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp14.654.403.470,00 dan realisasi Rp12.113.820.710,00 atau setara dengan 82,66%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya supervisi pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan, penggantian jembatan, pembangunan jalan dan jembatan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku;
- (9) Kegiatan *Monitoring* Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp299.999.757,00 dan realisasi Rp288.757.963,00 atau setara dengan 96,25%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *monitoring* pelaksanaan pekerjaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku;
- (10) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Sumber Dana DAK yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp15.920.959.255,00 dan realisasi Rp15.920.957.802,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan

jalan sepanjang 6,10 km. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana;

- (11) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI Sumber Dana DAK yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp8.632.818.973,00 dan realisasi Rp8.632.818.970,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 3,00 km. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana;
- (12) Pengadaan Alat-Alat Berat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp13.045.550.000,00 dan realisasi Rp12.434.848.400,00 atau setara 95,32%. *Output* kegiatan adalah tersedianya peralatan pendukung pengelolaan jalan dan jembatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produktifitas dan kualitas penanganan jalan.

c. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan Jasa Konstruksi yakni meningkatkan kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi di Jawa Barat dengan realisasi sebesar 21% dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 20%. Alokasi anggaran Program Rp146.991.658.183,00 Realisasi sebesar Rp125.570.116.083,00 setara dengan 85,43%.

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp474.992.936,00 dan realisasi Rp409.174.520,00 atau setara 86,14%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pelatihan tenaga ahli konstruksi. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya tenaga ahli yang bersertifikat untuk pelaksanaan konstruksi;
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp159.445.452,00 dan realisasi Rp145.008.907,00 atau setara 90,95%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sistem informasi jasa konstruksi di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya tertib pengelolaan jasa konstruksi di Jawa Barat;

- (3) *Monitoring* dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp149.994.113,00 dan realisasi Rp102.415.550,00 atau setara 68,28%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *monitoring* dan evaluasi jasa konstruksi di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya pelaksanaan jasa konstruksi di Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- (4) Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp180.244.647,00 dan realisasi Rp165.264.250,00 atau setara 91,69%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis jasa konstruksi. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya kegiatan konstruksi sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis;
- (5) Forum Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp254.091.494,00 dan realisasi Rp0,00 atau setara 0%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya forum jasa konstruksi se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya kesamaan visi dalam membangun jasa konstruksi di Jawa Barat;
- (6) Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Tahap Ii) yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp143.268.460.143,00 dan realisasi Rp122.700.558.356,00 atau setara 85,64%. *Output* kegiatan adalah tersedianya pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat tahap kedua. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana peribadatan;
- (7) Perencanaan Desain Ma'rodz Masjid Raya Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.504.429.398,00 dan realisasi Rp2.047.694.500,00 atau setara 81,76%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya perencanaan desain ma'rodz Masjid Raya Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya desain ma'rodz sebagai dasar dalam pembangunan fisik ma'rodz.

d. Program Penataan Ruang

Capaian Indikator Kinerja Program Penataan Ruang yaitu terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan capaian 79,25% sesuai dengan target yaitu sebesar 79,25%. Alokasi anggaran Program penataan ruang adalah sebesar Rp4.340.417.600,00 dengan realisasi sebesar Rp3.093.797.699,00 setara dengan 71,28%.

- (1) Penyusunan Raperda Kawasan Strategis Provinsi (Ksp) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp411.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp323.973.700,00 atau setara dengan 78,67%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya Raperda Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya naskah Raperda Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity;
- (2) Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Bandung Utara yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp464.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp389.998.000,00 atau setara dengan 83,95%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya naskah akademis dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Bandung Utara. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya naskah akademis dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Bandung Utara sebagai bahan untuk penetapan Perda;
- (3) Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp502.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp397.211.299,00 atau setara dengan 79,02%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya koordinasi penataan ruang di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya kesepahaman antar kepentingan penataan ruang di Jawa Barat;
- (4) Pembinaan Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.417.253.400,00 dan realisasi sebesar Rp1.526.808.950,00 atau setara dengan 63,16%.

Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi TKPRD dalam pemberian rekomendasi gubernur untuk penataan ruang di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah pemberian rekomendasi gubernur tentang penataan ruang sesuai dengan aturan yang berlaku;

- (5) *Monitoring* Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Ruang Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp544.134.200,00 dan realisasi sebesar Rp455.805.750,00 atau setara dengan 83,77%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemberian pertimbangan teknis dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara. *Outcome* kegiatan adalah pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara sesuai dengan perencanaan tata ruang yang ada;

e. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang yaitu terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan capaian 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp610.279.885,00 dengan realisasi sebesar Rp523.142.209,00 setara dengan 85,72%.

- (1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Kebinamargaan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp476.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp412.440.659,00 atau setara dengan 86,56%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan sinergi antar sektor dan hirarki pemerintahan. *Outcome* kegiatan adalah didapatnya rencana pengelolaan sub urusan jalan, penataan ruang dan jasa konstruksi yang komprehensif;
- (2) Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal OPD yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan

alokasi anggaran sebesar Rp133.799.885,00 dan realisasi sebesar Rp110.701.550,00 atau setara dengan 82,74%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tahun anggaran 2019. *Outcome* kegiatan adalah manajemen pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tahun anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan realisasi 94,00% dari target yang sebesar yaitu 94,00%. Alokasi anggaran sebesar Rp6.885.518.984,00 realisasi anggaran sebesar Rp6.070.577.815,00 atau setara 88,16%.

- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.901.243.954,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.712.438.155,00 atau setara dengan 90,07%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasana kantor dan pembangunan dan peningkatan gedung kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan tingkat capaian 100%;
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.938.898,00 realisasi anggaran sebesar Rp397.072.261,00 atau setara dengan 99,28%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasana kantor dan pembangunan dan peningkatan gedung kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan tingkat capaian 100%;
- (3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp699.375.255,00 realisasi anggaran sebesar Rp651.500.159,00 atau setara dengan 93,15%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasana kantor dan pembangunan dan

- peningkatan gedung kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan tingkat capaian 100%;
- (4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.057.772.104,00 realisasi anggaran sebesar Rp559.595.644,00 atau setara dengan 52,90%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasana kantor dan pembangunan dan peningkatan gedung kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan tingkat capaian 100%;
- (5) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp415.580.340,00 realisasi anggaran sebesar Rp402.189.512,00 atau setara dengan 96,78%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasana kantor dan pembangunan dan peningkatan gedung kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan tingkat capaian 100%;
- (6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp990.318.500,00 atau setara dengan 99,03%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasana kantor dan pembangunan dan peningkatan gedung kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan tingkat capaian 100%;
- (7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp903.095.281,00 realisasi anggaran sebesar Rp896.086.722,00 atau setara dengan 99,22%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasana kantor dan pembangunan dan peningkatan gedung kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya

pelaksanaan tugas dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan tingkat capaian 100%;

- (8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp508.513.152,00 realisasi anggaran sebesar Rp461.376.862,00 atau setara dengan 90,73%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasana kantor dan pembangunan dan peningkatan gedung kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan tingkat capaian 100%.

g. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang yaitu terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran untuk mendukung kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp23.740.493.282,00 dengan realisasi sebesar Rp20.947.996.054,00 setara dengan 88,24%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp544.656.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp490.730.175,00 atau setara dengan 90,10%. *Output* kegiatan adalah tersedianya Alat Tulis Kantor, cetak, *photocopy* dan penggandaan selama 12 bulan. *Outcome* terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tersedianya barang habis kantor 100%;
- (2) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp285.120.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp162.328.652,00 atau setara dengan 56,93%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan internet, surat kabar dan TV berbayar selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan internet, surat kabar dll dengan capaian 100%;

- (3) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp787.612.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp529.152.934,00 atau setara dengan 67,18%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan fasilitas kantor yang memadai dengan capaian 100%;
- (4) Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp344.752.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp209.198.000,00 atau setara dengan 60,68%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya publikasi kantor dan dokumentasi selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas dengan didukung oleh dokumentasi dan publikasi dengan capaian 100%;
- (5) Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp897.564.980,00 realisasi anggaran sebesar Rp847.539.117,00 atau setara dengan 94,43%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan biaya perjalanan Dinas untuk rapat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas memenuhi rapat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan dengan capaian 100%;
- (6) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.977.470.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp2.685.355.726,00 atau setara dengan 90,19%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa dan alat kebersihan serta alat keamanan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan lingkungan yang bersih dan aman dengan capaian 100%;
- (7) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp936.540.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp783.857.994,00 atau setara dengan 83,70%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional,

- terbayarkannya pajak kendaraan/STNK, terpeliharanya kendaraan operasional Dinas selama 12 bulan. *Outcome* nya adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan kendaraan Dinas dengan tingkat capaian 100%;
- (8) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.958.918.400,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.904.163.425,00 atau setara dengan 97,20%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan fasilitas kantor yang terpelihara dengan tingkat capaian 100%;
- (9) Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga Serta Pakaian Aparatur Anian, Sarana dan Prasarana Olah Raga Alokasi Anggaran sebesar Rp2.230.421.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.822.258.000,00 atau setara dengan 90,10%. *Output* kegiatan adalah tersedianya penceramah kerohanian dan pengajar senam, pakaian dinas, batik, korpri dan olahraga selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tingkat capaian 100%;
- (10) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp796.770.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp593.664.345,00 atau setara dengan 74,51%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis, diklat dan kursus singkat dan terpenuhinya uang saku diklat. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tingkat capaian 100%;
- (11) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.850.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp58.899.108,00 setara dengan 83,13%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan

- dengan dukungan fasilitas kantor yang memadai dengan capaian 100%;
- (12) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp100.326.863,00 setara dengan 83,61%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan fasilitas kantor yang memadai dengan capaian 100%;
- (13) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.922,00 realisasi anggaran sebesar Rp88.501.000,00 setara dengan 88,50%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor, cetak, *photocopy* dan penggandaan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tersedianya barang habis kantor 100%;
- (14) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp829.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp783.945.861,00. Setara dengan 94,57%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa dan alat kebersihan serta alat keamanan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan lingkungan yang bersih dan aman dengan capaian 100%;
- (15) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.297.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp125.192.150,00 setara dengan 96,83%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional, terbayarkannya pajak kendaraan/STNK, terpeliharanya kendaraan operasional Dinas selama 12 bulan. *Outcome* nya adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan kendaraan Dinas dengan tingkat capaian 100%;
- (16) Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

- Rp65.997.669,00 setara dengan 66,00%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan internet, surat kabar dan TV berbayar selama 12 bulan. *Outcome* terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan internet, surat kabar dan lain-lain dengan capaian 100%;
- (17) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp726.495.492,00 realisasi anggaran sebesar Rp715.910.108,00 setara dengan 98,54%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan fasilitas kantor yang terpelihara dengan tingkat capaian 100%;
- (18) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp195.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp188.187.500,00 setara dengan 96,51%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan biaya perjalanan Dinas untuk rapat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas memenuhi rapat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan dengan capaian 100%;
- (19) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp477.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp467.344.406,00 setara dengan 97,98%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa dan alat kebersihan serta alat keamanan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan lingkungan yang bersih dan aman dengan capaian 100%;
- (20) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.990.377 realisasi anggaran sebesar Rp99.976.339,00 setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya Alat Tulis Kantor, cetak, *photocopy* dan penggandaan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tersedianya barang habis kantor 100%;

- (21) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp48.870.200,00 atau setara dengan 97,74%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional, terbayarkannya pajak kendaraan/STNK, terpeliharanya kendaraan operasional Dinas selama 12 bulan. *Outcome* nya adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan kendaraan Dinas dengan tingkat capaian 100%;
- (22) Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp89.872.004,00 atau setara dengan 90,23%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan internet, surat kabar dan TV berbayar selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan internet, surat kabar dll dengan capaian 100%;
- (23) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp111.592.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp85.259.431,00 atau setara dengan 76,40%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan fasilitas kantor yang memadai dengan capaian 100%;
- (24) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III Alokasi anggaran sebesar Rp165.162.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp164.356.250,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan dan minum rapat,tamu dan biaya perjalanan Dinas untuk rapat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas memenuhi rapat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan dengan capaian 100%;
- (25) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp740.050.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp697.316.175,00 atau

- setara dengan 94,23%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan fasilitas kantor yang terpelihara dengan tingkat capaian 100%;
- (26) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.153,00 realisasi anggaran sebesar Rp99.270.000,00 atau setara dengan 99,27%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor, cetak, *photocopy* dan penggandaan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tersedianya barang habis kantor 100%;
- (27) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI dengan alokasi anggaran sebesar Rp262.611.884,00 realisasi anggaran sebesar Rp143.054.769,00 atau setara dengan 54,47%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan fasilitas kantor yang memadai dengan capaian 100%;
- (28) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp361.199.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp360.179.775,00 atau setara dengan 99,72%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa dan alat kebersihan serta alat keamanan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan lingkungan yang bersih dan aman dengan capaian 100%;
- (29) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD. Laboratorium Bahan Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.859.200,00 realisasi anggaran sebesar Rp127.269.000,00 atau setara dengan 98,01%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan biaya perjalanan Dinas untuk rapat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas memenuhi rapat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan dengan capaian 100%;

- (30) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.509.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp295.293.050,00 atau setara dengan 98,59% *Output* kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan fasilitas kantor yang terpelihara dengan tingkat capaian 100%;
- (31) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp67.819.484,00 atau setara dengan 67,82%. *Output* Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan. *Outcome* Terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan fasilitas kantor yang memadai dengan capaian 100%;
- (32) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp117.540.600,00 realisasi anggaran sebesar Rp68.213.600,00 atau setara dengan 58,03%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional, terbayarkannya pajak kendaraan/STNK, terpeliharanya kendaraan operasional Dinas selama 12 bulan. *Outcome* nya adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan kendaraan Dinas dengan tingkat capaian 100%;
- (33) Penyediaan Langganan Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp70.362.354,00 atau setara dengan 70,36%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan internet, surat kabar dan TV berbayar selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan internet, surat kabar dll dengan capaian 100%;
- (34) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI dengan alokasi anggaran sebesar Rp396.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp395.264.019,00 atau setara

- dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa dan alat kebersihan serta alat keamanan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan lingkungan yang bersih dan aman dengan capaian 100%;
- (35) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI dengan alokasi anggaran sebesar Rp169.998.424,00 realisasi anggaran sebesar Rp110.928.550,00 atau setara dengan 65,25%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional, terbayarkannya pajak kendaraan/STNK, terpeliharanya kendaraan operasional Dinas selama 12 bulan. *Outcome* nya adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan kendaraan Dinas dengan tingkat capaian 100%;
- (36) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp699.833.245,00 realisasi anggaran sebesar Rp674.002.850,00 atau setara dengan 96,31%. *Output* tersedianya jasa dan alat kebersihan serta alat keamanan selama 12 bulan. *Outcome* terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan lingkungan yang bersih dan aman dengan capaian 100%;
- (37) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.938.398,00 realisasi anggaran sebesar Rp92.853.950,00 atau setara dengan 92,91%. *Output* tersedianya alat tulis kantor, cetak, *photocopy* dan penggandaan selama 12 bulan. *Outcome* terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tersedianya barang habis kantor 100%;
- (38) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp162.875.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp160.218.750,00 atau setara dengan 98,37%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan biaya perjalanan Dinas untuk rapat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas memenuhi rapat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan dengan capaian 100%;

- (39) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V dengan alokasi anggaran sebesar Rp114.998.525,00 realisasi anggaran sebesar Rp71.702.539,00 atau setara dengan 62,35%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan fasilitas kantor yang memadai dengan capaian 100%;
- (40) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.375.283.740,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.194.315.172,00 atau setara dengan 86,84%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan fasilitas kantor yang terpelihara dengan tingkat capaian 100%;
- (41) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp141.956.721,00 atau setara dengan 94,64%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan fasilitas kantor yang terpelihara dengan tingkat capaian 100%;
- (42) Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.878.848,00 realisasi anggaran sebesar Rp183.116.100,00 atau setara dengan 73,28%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional, terbayarkannya pajak kendaraan/STNK, terpeliharanya kendaraan operasional Dinas selama 12 bulan. *Outcome* nya adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan kendaraan Dinas dengan tingkat capaian 100%;
- (43) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan

- VI dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.916,00 realisasi anggaran sebesar Rp96.937.350,00 atau setara dengan 96,94%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor, cetak, *photocopy* dan penggandaan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tersedianya barang habis kantor 100%;
- (44) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD. Laboratorium Bahan Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.999.638,00 realisasi anggaran sebesar Rp47.225.392,00 atau setara dengan 94,45%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor, cetak, *photocopy* dan penggandaan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tersedianya barang habis kantor 100%;
- (45) Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.998.977,00 realisasi anggaran sebesar Rp135.766.553,00 atau setara dengan 90,51%;
- (46) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp102.337.828,00 atau setara dengan 93,03%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan fasilitas kantor yang memadai dengan capaian 100%;
- (47) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.771.967,00 realisasi anggaran sebesar Rp42.124.350,00 atau setara dengan 66,05%. *Output* tersedianya alat tulis kantor, cetak, *photocopy* dan penggandaan. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor, cetak, *photocopy* dan penggandaan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan tersedianya barang habis kantor 100%;
- (48) Penyediaan Langgan Kantor dan Tenaga Non Pegawai di UPTD. Laboratorium Bahan Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp161.000.000,00

- realisasi anggaran sebesar Rp145.473.383,00 atau setara dengan 90,36%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan internet, surat kabar dan TV berbayar selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan internet, surat kabar dll dengan capaian 100%;
- (49) Penyediaan Langganan Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.680.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp51.501.115,00 atau setara dengan 64,63%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan internet, surat kabar dan TV berbayar selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan internet, surat kabar dll dengan capaian 100%;
- (50) Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp70.804.554,00 atau setara dengan 70,95%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan internet, surat kabar dan TV berbayar selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan internet, surat kabar dll dengan capaian 100%;
- (51) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp373.700.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp370.302.000,00 atau setara dengan 99,09%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa dan alat kebersihan serta alat keamanan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan lingkungan yang bersih dan aman dengan capaian 100%;
- (52) Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.050.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp59.880.825,00 atau setara dengan 86,72%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan internet, surat kabar dan TV berbayar selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan

- dengan dukungan internet, surat kabar dll dengan capaian 100%;
- (53) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI dengan alokasi anggaran sebesar Rp168.250.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp146.261.747,00 atau setara dengan 86,93%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan biaya perjalanan Dinas untuk rapat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas memenuhi rapat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan dengan capaian 100%;
- (54) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp126.937.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp125.430.768,00 atau setara dengan 98,81%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan biaya perjalanan Dinas untuk rapat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas memenuhi rapat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan dengan capaian 100%;
- (55) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp130.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp123.363.900,00 atau setara dengan 94,90%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional, terbayarkannya pajak kendaraan/STNK, terpeliharanya kendaraan operasional Dinas selama 12 bulan. *Outcome* nya adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan kendaraan Dinas dengan tingkat capaian 100%;
- (56) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V dengan alokasi anggaran sebesar Rp164.250.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp155.500.000,00 atau setara dengan 94,67%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan biaya perjalanan Dinas untuk rapat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas memenuhi rapat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan dengan capaian 100%;
- (57) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Jalan dan

- Jembatan Wilayah Pelayanan V dengan alokasi anggaran sebesar Rp610.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp603.346.024,00 atau setara dengan 98,91%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa dan alat kebersihan serta alat keamanan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan lingkungan yang bersih dan aman dengan capaian 100%;
- (58) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp188.975.000,00 atau setara dengan 99,46%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan fasilitas kantor yang terpelihara dengan tingkat capaian 100%;
- (59) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.700.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp296.899.650,00 atau setara dengan 98,74%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan fasilitas kantor yang terpelihara dengan tingkat capaian 100%;
- (60) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.967.096,00 realisasi anggaran sebesar Rp121.841.500,00 atau setara dengan 93,75%. *Output* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional, terbayarkannya pajak kendaraan/STNK, terpeliharanya kendaraan operasional Dinas selama 12 bulan. *Outcome* nya adalah terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan kendaraan Dinas dengan tingkat capaian 100%.

h. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya adalah persentase peningkatan kapasitas sumber daya air sebesar 0,5% dari target 0,5% dan tingkat pelayanan rekomendasi perizinan sumber daya air sebesar 60% dari target 60%. Alokasi anggaran program sebesar Rp214.317.715.777,00 dengan realisasi sebesar Rp61.374.187.944,00 setara dengan 28,64%.

- (1) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.031.776.202,00 realisasi anggaran sebesar Rp7.540.089.586,00 setara 23,54%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kondisi situ. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan air baku melalui kapasitas tampung situ dan terjaminnya kelangsungan fungsi situ untuk mengairi daerah irigasi;
- (2) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.496.469.650,00 realisasi anggaran sebesar Rp2.378.430.080,00 setara 95,27%. *Output* kegiatan adalah operasi dan pemeliharaan situ, curah hujan, data banjir dan kekeringan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan air baku melalui kapasitas tampung situ dan terjaminnya kelangsungan fungsi situ untuk mengairi Daerah Irigasi;
- (3) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Citarum yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.993.697.501,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.986.352.773,00 setara 99,63%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kondisi situ. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan air baku melalui kapasitas tampung situ dan terjaminnya kelangsungan fungsi situ untuk mengairi daerah irigasi;
- (4) Kegiatan Rehabilitasi Situ-Situ Wilayah Sungai Citarum (GCB) yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp64.363.201.900,00 realisasi anggaran sebesar Rp9.784.016.090,00

- setara 15,20% dari 100%. *Output* kegiatan adalah rehabilitasi situ. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya daya tampung situ;
- (5) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.725.994.016,00 realisasi anggaran sebesar Rp2.639.044.216,00 setara 96,81%. *Output* kegiatan adalah operasi dan pemeliharaan situ. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan air baku melalui kapasitas tampung situ dan terjaminnya kelangsungan fungsi situ untuk mengairi daerah irigasi;
 - (6) Kegiatan Rehabilitasi Situ-Situ Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung (BIJB) yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.376.651.278,00 realisasi anggaran sebesar Rp9.596.078.315,00 setara 16,72%. *Output* kegiatan adalah rehabilitasi situ situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung. *Outcome* kegiatan adalah mempertahankan daya tampung situ;
 - (7) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.099.996.600,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.089.332.200,00 setara 99,03%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kondisi situ. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan air baku melalui kapasitas tampung situ dan terjaminnya kelangsungan fungsi situ untuk mengairi daerah irigasi;
 - (8) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.249.864.966,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.245.577.690,00 setara 99,66%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kondisi situ. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan air baku melalui kapasitas tampung situ dan terjaminnya kelangsungan fungsi situ untuk mengairi daerah irigasi;
 - (9) Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sundawapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.999.910,00 realisasi

- anggaran sebesar Rp143.791.306,00 setara 95,86%. *Output* kegiatan adalah penyusunan data OP Sundawapan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sundawapan;
- (10) Kegiatan Pemantauan dan Koordinasi OP Sundawapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.963,00 realisasi anggaran sebesar Rp236.102.031,00 setara 94,44%. *Output* kegiatan adalah penyusunan data OP Sundawapan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya OP Sundawapan;
- (11) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Kegiatan OP Sundawapan di UPTD yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.984.334,00 realisasi anggaran sebesar Rp138.166.584,00 setara 92,12%. *Output* kegiatan adalah dokumen pemantauan dan sinergi perencanaan OP Sundawapan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya OP Sundawapan di lingkungan UPTD;
- (12) Kegiatan Pendampingan Pembangunan 8 Waduk Strategis di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.997.942,00 realisasi anggaran sebesar Rp284.661.328,00 setara 94,89%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya dukungan terhadap pembangunan waduk strategis di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya pembangunan waduk strategis di Jawa Barat;
- (13) Kegiatan Pelayanan Penatagunaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp403.734.927,00 realisasi anggaran sebesar Rp385.984.833,00 setara 95,60%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen rencana penatagunaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan penatagunaan sumber daya air;
- (14) Kegiatan Penatagunaan Pemanfaatan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp514.499.776,00 realisasi anggaran sebesar Rp491.763.526,00 setara 95,58%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen rencana penatagunaan. *Outcome* kegiatan

- adalah meningkatnya penatagunaan pemanfaatan penatagunaan sumber daya air;
- (15) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.870,00 realisasi anggaran sebesar Rp242.925.002,00 setara 97,17%. *Output* kegiatan adalah pemanfaatan air permukaan. *Outcome* kegiatan adalah terkendalinya pemanfaatan air permukaan;
- (16) Kegiatan Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.723.036.316,00 realisasi anggaran sebesar Rp5.433.401.637,00 setara 94,14%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan teknis, yaitu: DED Air Baku TPPARS Legok Nangka, Dokumen Penyediaan Air baku di 4 Mata Air, Dokumen Teknis Morfologi Sungai Ciwulan, Dokumen Perencanaan Teknis Situ Wangi. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan teknis dalam rangka dukungan penanganan situ dan sungai, serta pembangunan waduk di Jawa Barat;
- (17) Kegiatan Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.011.400.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp971.303.447,00 setara 96,04%. *Output* kegiatan adalah dokumen penyusunan kebutuhan infrastruktur strategis SDA di Jawa Barat, kajian akademis struktur organisasi Dinas SDA dan penyusunan pergub dok masterplan penyediaan air baku. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya infrastruktur sumber daya air;
- (18) Kegiatan Survey Investigasi Potensi Embung, Kolam Tampungan Air Lainnya, dan Pemetaan Daerah Rawan Air yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.608.172,00 realisasi anggaran sebesar Rp 78.639.429,00 setara 87,76%. *Output* kegiatan adalah rencana dokumen survey potensi embung dan kolam tampungan air. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya daya tampung air;
- (19) Kegiatan Supervisi Konstruksi Bidang Sungai, Situ, Embung, Kolam dan Tampungan Air Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp199.998.789,00 realisasi anggaran sebesar Rp192.716.230,00 setara 96,36%. *Output* kegiatan adalah dokumen pengawasan dan pembinaan konstruksi bidang irigasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan konstruksi bidang irigasi;
- (20) Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.499.999.817,0 realisasi anggaran sebesar Rp15.109.788.526,00 setara 37,31%. *Output* kegiatan adalah normalisasi dan TPT Sungai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengamanan dan pemeliharaan sungai wilayah sungai;
- (21) Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.908.108,00 realisasi anggaran sebesar Rp988.378.000,00 setara 98,85%. *Output* kegiatan adalah normalisasi dan TPT Sungai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengamanan dan pemeliharaan sungai wilayah sungai;
- (22) Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (P3) yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp437.895.740,00 realisasi anggaran sebesar Rp417.645.115,00 setara 95,38%. *Output* kegiatan adalah normalisasi dan TPT Sungai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengamanan dan pemeliharaan sungai wilayah sungai.

i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan lainnya

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan lainnya adalah Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan realisasi sebesar 52,20% dari target yang ditetapkan sebesar 52,31%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp79.953.042.459,00 dengan realisasi sebesar Rp77.315.820.162,00 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan lainnya atau setara dengan 96,70%.

- (1) Kegiatan Supervisi Konstruksi Bidang Irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp99.998.056,00 realisasi anggaran sebesar Rp86.243.764,00 setara 82,65%. *Output* kegiatan adalah dukungan pembebasan lahan dan pembangunan bendung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan pangan;
- (2) Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan *Monitoring* Kegiatan Kontruksi Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.999.817,00 realisasi anggaran sebesar Rp279.251.742,00 setara 93,08%. *Output* kegiatan adalah dukungan pembebasan lahan dan pembangunan bendung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan pangan;
 - (3) Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.999.823,00 realisasi anggaran sebesar Rp148.291.323,00 setara 98,86%. *Output* kegiatan adalah dukungan pembebasan lahan dan pembangunan bendung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan pangan;
 - (4) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.999.999.098,00 realisasi anggaran sebesar Rp4.904.744.184,00 setara 98,09%. *Output* kegiatan adalah jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya target kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi;
 - (5) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.556.693.683,00 realisasi anggaran sebesar Rp8.497.329.410,00 setara 99,31%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi dan parsial jaringan irigasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi;
 - (6) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.134.374.427,00 realisasi anggaran sebesar Rp14.089.868.830,00 setara 99,69%. *Output* kegiatan adalah jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara

- secara berkelanjutan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya target kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi;
- (7) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.999.999.343,00 realisasi anggaran sebesar Rp13.892.627.422,00 setara 99,23%. *Output* kegiatan adalah jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya target kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi;
- (8) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.470.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp4.980.724.086,00 setara 99,61%. *Output* kegiatan adalah jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya target kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi;
- (9) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.499.999.862,00 realisasi anggaran sebesar Rp7.457.105.987,00 setara 99,43%. *Output* kegiatan adalah jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya target kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi;
- (10) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.999.996,00 realisasi anggaran sebesar Rp199.560.300,00 setara 99,78%. *Output* kegiatan adalah jaringan irigasi ter rehabilitasi secara partial. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya target kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi;
- (11) Kegiatan Pemantauan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 299.988.481,00 realisasi anggaran sebesar

- Rp187.583.343,00 setara 62,53%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemantauan kegiatan OP pemeliharaan jaringan irigasi. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya target kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi;
- (12) Kegiatan Pembinaan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp395.184.224,00 setara 79,04%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembinaan OP jaringan irigasi. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya SDM yang handal;
- (13) Kegiatan Lomba Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.977.637,00 realisasi anggaran sebesar Rp317.979.465,00 setara 90,86%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan lomba petugas OP. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya SDM yang handal;
- (14) Kegiatan Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.984.260,00 realisasi anggaran sebesar Rp237.217.290,00 setara 94,86%. *Output* kegiatan adalah dokumen data angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi kewenangan provinsi. *Outcome* kegiatan adalah kegiatan pengelolaan irigasi lebih optimal;
- (15) Kegiatan Penyusunan Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp259.987.930,00 realisasi anggaran sebesar Rp227.763.113,00 setara 87,16%. *Output* kegiatan adalah terhitungnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Kinerja Irigasi menjadi lebih terukur;
- (16) Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Kegiatan DAK yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.995,00 realisasi anggaran sebesar Rp236.380.436,00 setara 94,55%. *Output* kegiatan adalah terhitungnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah kinerja irigasi menjadi lebih terukur;
- (17) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi yang

- dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.143.807.215,00 realisasi anggaran sebesar Rp3.454.698.749,00 setara 83,37%. *Output* kegiatan adalah dokumen desain jaringan irigasi di Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Karawang. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen desain jaringan irigasi;
- (18) Kegiatan Survey Investigasi Rekayasa Teknik Irigasi Tambak yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 759.399.517,00 realisasi anggaran sebesar Rp 737.129.593,00 setara 97,07%. *Output* kegiatan adalah peta situasi Waduk Darma Kab. Kuningan, peta DIT Kapur Asem dan Tanjung Tiga. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen survey potensi DIT;
- (19) Kegiatan Pembebasan Lahan dan Pembangunan Daerah Irigasi Caringin Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.961.698.919,00 realisasi anggaran sebesar Rp13.260.762.567,00 setara 94,98%. *Output* kegiatan adalah terhitungnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah kinerja irigasi menjadi lebih terukur;
- (20) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.672.423.686,00 realisasi anggaran sebesar Rp3.605.059.384,00 setara 98,17%. *Output* kegiatan adalah terhitungnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah kinerja irigasi menjadi lebih terukur;
- (21) Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Caringin di Kabupaten Sukabumi (DAK) yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp564.711.400,00 realisasi anggaran sebesar Rp120.314.950,00 setara 21,31%. *Output* kegiatan adalah dukungan pembebasan lahan dan pembangunan bendung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan pangan.

j. Program Pengendalian Daya Rusak Air

Capaian Indikator Kinerja Program Daya Rusak Air adalah tingkat pengurangan titik terdampak banjir dan kekeringan dengan realisasi sebesar 8% dari target sebesar 5%. Alokasi anggaran program adalah Rp3.924.105.705,00 dengan realisasi sebesar Rp3.525.951.141,00 setara dengan 89,88%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Konstruksi Bahan Banjiran pada 6 UPTD Wilayah Sungai yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.499.998.844,00 realisasi anggaran sebesar Rp2.473.105.930,00 setara 98,92%. *Output* kegiatan adalah tertanganinya bencana banjir dan kekeringan yang menimpa infrastruktur SDA dan irigasi. *Outcome* kegiatan adalah infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana banjir dan kekeringan tertangani sementara untuk menghindari kerusakan yang semakin besar;
- (2) Kegiatan Pemantauan Banjir dan Penanggulangan Kekeringan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.999.251,00 realisasi anggaran sebesar Rp177.570.001,00 setara 88,79%. *Output* kegiatan adalah dokumen data kejadian (existing) dan potensi bencana banjir dan kekeringan. *Outcome* kegiatan adalah tertanggulangnya kejadian bencana alam di Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Abrasi Pantai Batu Karas Kab. Pangandaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.009.499.935,00 realisasi anggaran sebesar Rp 824.670.285,00 setara 81,69%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan teknis abrasi Batukaras Kabupaten Pangandaran. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya pedoman penanganan pantai akibat degradasi pantai;
- (4) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengendalian Banjir BIJB Kertajati (BIJB) yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp214.607.675,00 realisasi anggaran sebesar Rp51.604.925,00 setara 24,05%. *Output* kegiatan dokumen masterplan pengendalian banjir BIJB Kertajati (BIJB) *Outcome* tersedianya pedoman Pengendalian Banjir BIJB.

k. Program Pengelolaan Kelembagaan, Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air

Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan Kelembagaan, Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air adalah tingkat implementasi penerapan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan kelembagaan sumber daya air dengan realisasi sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 50% dan tingkat penyediaan sistem informasi sumber daya air yang dapat diakses masyarakat dengan realisasi sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 45%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp10.053.023.848,00 dengan realisasi sebesar Rp9.455.108.608,00 atau setara dengan 94,05%.

- (1) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp662.949.092,00 setara 94,71%. *Output* kegiatan adalah dokumen data dan pelaporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya kondisi sungai, sempadan sungai dan debit andalan untuk pengembangan kebijakan operasional pengelolaan irigasi dan sumber daya air serta peningkatan PAD;
- (2) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.449.998.979,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.400.679.499,00 setara 96,60%. *Output* kegiatan adalah dokumen data dan laporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA, dokumen laporan TKPSDA. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya kondisi sungai, sempadan sungai dan debit andalan untuk pengembangan kebijakan operasional irigasi dan sumber daya air serta peningkatan PAD;
- (3) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Citarum yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.090.128.035,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.043.982.303,00 setara 95,77%. *Output* kegiatan adalah dokumen data dan laporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya kondisi sungai, sempadan sungai dan debit andalan untuk pengembangan kebijakan operasional pengelolaan irigasi dan sumber daya air serta peningkatan PAD;

- (4) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.499.997.985,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.323.512.702,00 setara 88,23%. *Output* kegiatan adalah dokumen data dan pelaporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya kondisi sungai, sempadan sungai dan debit andalan untuk pengembangan kebijakan operasional pengelolaan irigasi dan sumber daya air serta peningkatan PAD;
- (5) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Citanduy yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.999.893,00 realisasi anggaran sebesar Rp998.058.973,00 setara 99,81%. *Output* kegiatan adalah dokumen data dan laporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya kondisi sungai, sempadan sungai dan debit andalan untuk pengembangan kebijakan operasional pengelolaan irigasi dan sumber daya air serta peningkatan PAD;
- (6) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.374.999.987,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.366.324.120,00 setara 99,37%. *Output* kegiatan adalah terkelolanya sarana dan prasarana situ, dokumen data dan pelaporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya kondisi sungai, sempadan sungai dan debit andalan untuk pengembangan kebijakan operasional pengelolaan irigasi dan sumber daya air serta peningkatan PAD;
- (7) Kegiatan Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.622.210,00 realisasi anggaran sebesar Rp394.845.504,00 setara 98,80%. *Output* kegiatan adalah dokumen data muka air, data curah air, data iklim dan data debit sesaat. *Outcome* kegiatan adalah terpublikasinya data sumber daya air di Jawa Barat;
- (8) Kegiatan Pemberdayaan Komisi Irigasi Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.911.330,00 realisasi anggaran sebesar Rp114.189.576,00 setara 57,12%. *Output* kegiatan

- adalah dokumen lapangan koordinasi Komisi Irigasi. *Outcome* kegiatan adalah mempertahankan kondisi baik jaringan irigasi;
- (9) Kegiatan Peringatan Hari Air Dunia yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp288.731.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp286.239.050,00 setara 99,31%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan peringatan Hari Air Dunia. *Outcome* kegiatan adalah tersosialisasi pentingnya air sebagai sumber kehidupan;
- (10) Kegiatan Forum Kerjasama dan Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.999.782,00 realisasi anggaran sebesar Rp374.578.459,00 setara 93,64%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kerjasama pada pengelolaan sumber daya air. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan kerjasama pengelolaan SDA terutama perbatasan;
- (11) Kegiatan TKPSDA Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.999.961,00 realisasi anggaran sebesar Rp332.132.765,00 setara 83,03%. *Output* kegiatan adalah ditetapkannya Pergub. PSDA WS. Cisadea-Cibareno *Outcome* kegiatan adalah kebijakan pengelolaan sumber daya air menjadi terarah dan teratur sesuai dengan pedoman yang akan ditetapkan melalui Pergub;
- (12) Kegiatan TKPSDA Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.999.850,00 realisasi anggaran sebesar Rp231.368.927,00 setara 77,12%. *Output* kegiatan adalah ditetapkannya Pergub. PSDA WS. Cisadea-Cibareno. *Outcome* kegiatan adalah Kebijakan pengelolaan sumber daya air menjadi terarah dan teratur sesuai dengan pedoman yang akan ditetapkan melalui Pergub;
- (13) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.274.844,00 realisasi anggaran sebesar Rp485.707.096,00 setara 97,09%. *Output* kegiatan adalah buku panduan dan software pengembangan Web dan GIS. *Outcome* kegiatan adalah sistem informasi di Jawa Barat

- terbarukan dan terkelola mengikuti perkembangan teknologi informasi;
- (14) Kegiatan Pembuatan Video Dinas yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.485.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 146.738.000,00 setara 98,16%. *Output* kegiatan adalah video publikasi dan himbauan sumber daya air. *Outcome* kegiatan adalah pembangunan SDA di Jawa Barat dapat diinformasikan kepada publik;
 - (15) Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.406.250,00 realisasi anggaran sebesar Rp146.030.950,00 setara 97,74%. *Output* kegiatan adalah penyampaian informasi data pelaksanaan pembangunan SDA melalui media TV, media cetak. *Outcome* kegiatan adalah pembangunan SDA di Jawa Barat dapat diinformasikan kepada publik;
 - (16) Kegiatan Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.468.742,00 realisasi anggaran sebesar Rp147.271.592,00 setara 97,88%. *Output* kegiatan adalah dokumen database meliputi buku SDA, booklet SDA, dll. *Outcome* kegiatan adalah informasi database di Jawa Barat terinventarisasi, terkelola dan terpublikasikan kepada publik.

1. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air adalah tingkat pelaporan yang disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Program adalah sebesar Rp978.600.576,00 dengan realisasi sebesar Rp922.792.424,00 setara dengan 94,30%.

- (1) Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.529.800,00 realisasi anggaran sebesar Rp14.529.800,00 setara 82,89%. *Output* kegiatan adalah dokumen verifikasi usulan bantuan keuangan kabupaten/kota. *Outcome*

- kegiatan adalah terfasilitasinya kabupaten/kota dalam pemberian bantuan keuangan;
- (2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan SDA yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp430.870.776,00 realisasi anggaran sebesar Rp415.154.203,00 setara 96,35%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan SDA yang disepakati. *Outcome* kegiatan adalah perencanaan bidang SDA menjadi lebih bersinergi;
 - (3) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp530.200.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp493.108.421,00 setara 93,00%. *Output* kegiatan adalah dokumen rencana dan pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dinas. *Outcome* kegiatan adalah terevaluasinya program dan kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sumber Daya Air

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sumber Daya Air adalah presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan dengan realisasi sebesar 70% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Alokasi anggaran Program adalah sebesar Rp3.723.952.484,00 dengan realisasi sebesar Rp3.516.154.093,00 setara dengan 94,42%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp410.397.481,00 realisasi anggaran sebesar Rp399.219.400,00 setara 97,28%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor dinas;
- (2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS Ciliwung-Cisadane dengan alokasi anggaran sebesar Rp184.200.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp179.525.000,00 setara 97,46%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD;
- (3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS Cisadea- Cibareno, dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp249.347.680,00 realisasi anggaran sebesar Rp245.893.800,00 setara 98,61%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD;
- (4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp202.599.590,00 realisasi anggaran sebesar Rp202.489.590,00 setara 99,95%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD;
 - (5) Kegiatan Pembangunan Gudang Lahan Parkir dan Renovasi Kantor SUP UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.221.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.043.830.500,00 setara 85,49%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD;
 - (6) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp234.100.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp233.500.000,00 setara 99,74%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD;
 - (7) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional UPTD PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp467.370.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp466.150.000,00 setara 99,74%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kendaraan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya mutu layanan kualitas sarana dan prasarana kantor UPTD;
 - (8) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Studio UPTD PSDA WS.Cimanuk- Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp48.500.000,00 setara 100%. *Output* kegiatan adalah pengadaan alat studio. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD;
 - (9) Kegiatan Pemasangan Papan Nama Kepemilikan Aset dan Patok Batas Aset UPTD PSDA WSCimanuk - Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.065.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp49.065.000,00 setara 100%. *Output* kegiatan adalah terpasangnya papan nama kepemilikan aset

- dan patok batas asset. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya asset;
- (10) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS Ciwulan- Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 199.959.930,00 realisasi anggaran sebesar Rp196.925.000,00 setara 98,48%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD;
 - (11) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp159.962.803,00 realisasi anggaran sebesar Rp159.037.803,00 setara 99,42%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD;
 - (12) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD PSDA WS Ciwulan- Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 202.300.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp201.718.000,00 setara 99,71%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD;
 - (13) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.150.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 90.300.000,00 setara 94,90%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat-alat angkutan darat bermotor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan kantor UPTD.

n. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sumber Daya Air

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sumber Daya Air adalah presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan dengan realisasi sebesar 70% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, presentase sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap unit kerja dengan realisasi sebesar 70% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, dan tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup sumbe daya air dengan realisasi sebesar 70% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp27.510.373.993,00 dengan realisasi sebesar Rp25.138.383.027,00 setara dengan 91,38%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.299.919.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.175.176.250,00 setara 90,40%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai terpenuhi sandang dan kesehatan rohani dan jasmaninya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM Dinas SDA;
- (2) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp141.300.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp82.000.000,00 setara 58,03%. *Output* kegiatan adalah jumlah SDM yang mengikuti Diklat PIM, kursus/pelatihan/bimtek/diklat teknis lainnya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM Dinas SDA;
- (3) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp184.970.000,00 setara 92,49%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai terpenuhi sandang dan kesehatan rohani dan jasmaninya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM dalam instansi pemerintahan;
- (4) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp39.000.000,00 setara 97,50%. *Output* kegiatan adalah jumlah SDM yang mengikuti Diklat PIM, kursus/pelatihan/bimtek/diklat teknis lainnya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM Dinas SDA;
- (5) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno, dengan alokasi anggaran sebesar Rp179.935.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp178.978.000,00 setara 99,47%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai terpenuhi sandang dan kesehatan rohani dan jasmaninya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM dalam instansi pemerintahan;
- (6) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD PSDA WS. Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp271.558.000,00 realisasi anggaran sebesar

- Rp260.304.000,00 setara 95,86%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai terpenuhi sandang dan kesehatan rohani dan jasmaninya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM dalam instansi pemerintahan;
- (7) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp295.650.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp293.174.000,00 setara 99,16%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai terpenuhi sandang dan kesehatan rohani dan jasmaninya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM dalam instansi pemerintahan;
 - (8) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD PSDA WS. Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp161.400.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp157.000.000,00 setara 97,20%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai terpenuhi sandang dan kesehatan rohani dan jasmaninya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM dalam instansi pemerintahan;
 - (9) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp161.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp159.028.000,00 setara 98,78%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai terpenuhi sandang dan kesehatan rohani dan jasmaninya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM dalam instansi pemerintahan;
 - (10) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.242.200.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp2.132.652.800,00 95,11%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat-alat kebersihan, jasa keamanan. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
 - (11) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp765.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp715.510.900,00 setara 93,53%. *Output* kegiatan adalah ATK, cetak, fotocopy, penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
 - (12) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Dinas SDA Provinsi Jawa Barat,

- dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.885.900.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp108.481.670,00 setara 90,36%. *Output* kegiatan adalah langganan internet, surat kabar, TV berbayar iuran tahunan dan tenaga kerja non pegawai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (13) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp115.331.800,00 setara 98,57%. *Output* kegiatan adalah sewa publikasi dan dokumentasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (14) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.112.085.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp2.066.756.854,00 setara 97,85%. *Output* kegiatan adalah makan minum rapat serta perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (15) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.935,00 realisasi anggaran sebesar Rp 95.098.100,00 setara 95,10%. *Output* kegiatan adalah ATK, cetak, fotocopy, penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (16) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp375.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp342.423.864,00 setara 91,31%. *Output* kegiatan adalah makan minum rapat serta perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (17) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.050.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp108.481.670,00 setara 90,36%. *Output* kegiatan adalah langganan internet, surat kabar, dan tenaga kerja non pegawai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (18) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp117.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp115.331.800,00 setara 98,57%. *Output* kegiatan

- adalah sewa publikasi dan dokumentasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (19) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.995.087,00 realisasi anggaran sebesar Rp99.037.600,00 setara 99,04%. *Output* kegiatan adalah ATK, cetak, fotocopy, penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (20) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp193.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp186.578.600,00 setara 96,67%. *Output* kegiatan adalah telepon, listrik, tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (21) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp920.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp587.773.393,00 setara 63,89%. *Output* kegiatan adalah service rutin kendaraan, penggantian suku cadang/bbm, pajak dan KIR. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas dapat dioperasikan dengan optimal;
- (22) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.357.939.486,00 realisasi anggaran sebesar Rp3.101.617.728,00 setara 92,37%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor;
- (23) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp243.998.625,00 realisasi anggaran sebesar Rp190.764.413,00 setara 78,18%. *Output* kegiatan adalah telepon, listrik, tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (24) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.138.391,00 realisasi anggaran sebesar Rp449.530.335,00 setara 89,88%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat-alat kebersihan, jasa keamanan. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya

- lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (25) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp254.700.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp146.490.023,00 setara 57,51%. *Output* kegiatan adalah service rutin kendaraan, penggantian suku cadang/bbm, pajak dan KIR. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas dapat dioperasikan dengan optimal;
- (26) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane, dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp84.420.500,00 setara 84,42%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor;
- (27) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno, dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.930.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp73.975.000,00 setara 98,73%. *Output* kegiatan adalah telepon, listrik, tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (28) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD PSDA WS. Cisadea Cibareno, dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 329.688.387,00 setara 94,20%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat-alat kebersihan, jasa keamanan. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (29) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp172.546.908,00 setara 86,27%. *Output* kegiatan adalah service rutin kendaraan, penggantian suku cadang/bbm, pajak dan KIR. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas dapat dioperasikan dengan optimal;
- (30) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno, dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.996.051,00 realisasi anggaran sebesar Rp 125.229.000,00 setara 96,33%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor. *Outcome*

- kegiatan adalah meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor;
- (31) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD PSDA WS. Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.987.696,00 realisasi anggaran sebesar Rp110.131.500,00 setara 73,43%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor;
- (32) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PSDA WS. Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp224.997.750,00 realisasi anggaran sebesar Rp165.615.053,00 setara 73,61%. *Output* kegiatan adalah service rutin kendaraan, penggantian suku cadang/bbm, pajak dan KIR. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas dapat dioperasikan dengan optimal;
- (33) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Perelataannya UPTD PSDA WS. Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp676.313.361,00 realisasi anggaran sebesar Rp 621.823.172,00 setara 91,94%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat-alat kebersihan, jasa keamanan. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (34) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PSDA WS. Citarum, dengan lokasi anggaran sebesar Rp199.991.797,00 realisasi anggaran sebesar Rp179.776.739,00 setara 89,89%. *Output* kegiatan adalah telepon, listrik, tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (35) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD PSDA WS. Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp65.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp64.650.000,00 setara 99,46%. *Output* kegiatan adalah sewa publikasi dan dokumentasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (36) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisangarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp607.816.800,00 realisasi anggaran sebesar Rp589.920.300,00 setara 97,06%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor;

- (37) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD PSDA WS. Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.359,00 realisasi anggaran sebesar Rp98.046.649,00 setara 98,05%. *Output* kegiatan adalah ATK, cetak, fotocopy, penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (38) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD PS WS. Cimanuk-Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp522.180.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp470.545.450,00 setara 90,11%, realisasi fisik 100%. *Output* kegiatan adalah makan minum rapat serta perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (39) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp105.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp105.725.269,00 setara 99,93%. *Output* kegiatan adalah langganan internet, surat kabar dan tenaga kerja non pegawai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (40) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp264.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp250.691.744,00 setara 94,96%. *Output* kegiatan adalah service rutin kendaraan, penggantian suku cadang/bbm, pajak dan KIR. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas dapat dioperasikan dengan optimal;
- (41) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp225.460.955,00 realisasi anggaran sebesar Rp211.516.800,00 setara 93,82%. *Output* kegiatan adalah ATK, cetak, fotocopy, penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (42) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp387.985.800,00 realisasi anggaran sebesar Rp382.152.779,00 setara 98,50%. *Output* kegiatan adalah telepon, listrik, tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (43) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.265.081.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.259.444.320,00 setara 99,55%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat-alat kebersihan, jasa

- keamanan. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (44) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD PSDA WS. Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp87.927.069,00 setara 89,72%. *Output* kegiatan adalah ATK, cetak, fotocopy, penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (45) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD PSDA WS. Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp274.998.850,00 realisasi anggaran sebesar Rp273.920.718,00 setara 99,88%. *Output* kegiatan adalah makan minum rapat serta perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (46) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD PSDA WS. Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp38.386.996,00 setara 91,40%. *Output* kegiatan adalah langganan internet, surat kabar dan tenaga kerja non pegawai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (47) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD PSDA WS. Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 437.099.816,00 realisasi anggaran sebesar Rp436.459.000,00 setara 99,25%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat-alat kebersihan, jasa keamanan. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (48) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD PSDA WS. Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 setara 100%. *Output* kegiatan adalah sewa publikasi dan dokumentasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (49) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD PSDA WS. Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp429.290.780,00 realisasi anggaran sebesar Rp424.262.880,00 setara 98,83%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor;
- (50) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PSDA WS. Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.997.600,00 realisasi anggaran

- sebesar Rp208.017.217,00 setara 83,21%. *Output* kegiatan adalah service rutin kendaraan, penggantian suku cadang/bbm, pajak dan KIR. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas dapat dioperasikan dengan optimal;
- (51) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp233.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp167.611.561,00 setara 71,75%. *Output* kegiatan adalah langganan internet, surat kabar dan tenaga kerja non pegawai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (52) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PSDA WS. Citanduy, dengan alokasi anggaran sebesar Rp189.999.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp159.692.603,00 setara 84,05%. *Output* kegiatan adalah telepon, listrik, tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (53) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp311.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp308.506.972,00 setara 99,20%. *Output* kegiatan adalah makan minum rapat serta perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (54) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 setara 83,33%. *Output* kegiatan adalah sewa publikasi dan dokumentasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (55) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp252.300.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp247.663.200,00 setara 98,16%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor;
- (56) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp414.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp414.396.000,00 setara 99,95%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat-alat kebersihan, jasa keamanan. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya

- lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (57) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp269.185.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp234.929.400,00 setara 87,27%. *Output* kegiatan adalah service rutin kendaraan, penggantian suku cadang/bbm, pajak dan KIR. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas dapat dioperasikan dengan optimal;
- (58) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 51.000.000,00 setara 100%. *Output* kegiatan adalah telepon, listrik, tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya lingkungan kantor yang nyaman, layak, bersih dan aman;
- (59) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.999.972,00 realisasi anggaran sebesar Rp149.960.397,00 setara 99,97%. *Output* kegiatan adalah ATK, cetak, fotocopy, penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (60) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, dengan alokasi anggaran sebesar Rp230.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp200.323.400,00 setara 87,10%. *Output* kegiatan adalah langganan internet, surat kabar dan tenaga kerja non pegawai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (61) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno, dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 69.463.000,00 setara 99,23%. *Output* kegiatan adalah sewa publikasi dan dokumentasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;
- (62) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno, dengan alokasi anggaran sebesar Rp450.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp393.691.432,00 setara 87,49%. *Output* kegiatan adalah makan minum rapat serta perjalanan dinas. *Outcome* meningkatnya pelayanan kantor;
- (63) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD PSDA WS. Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.995.400,00 realisasi anggaran

sebesar Rp284.448.895,00 setara 94,82%. *Output* kegiatan adalah makan minum rapat serta perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor;

- (64) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD PSDA WS. Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp209.998.482,00 realisasi anggaran sebesar Rp197.131.331,00 setara 93,87%. *Output* kegiatan adalah langganan internet, surat kabar dan tenaga kerja non pegawai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor.

o. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yakni cakupan pelayanan air minum dengan capaian sebesar 78,78% dari target sebesar 78%; cakupan pelayanan penanganan persampahan dengan capaian sebesar 69,01% target sebesar 69%; cakupan pengurangan sampah dengan capaian sebesar 6,16% dari target sebesar 3,49%; cakupan pelayanan air limbah domestik dengan capaian sebesar 72,44% dari target sebesar 70,67% dan pengurangan luasan genangan di permukiman dengan realisasi sebesar 29,20% dari target sebesar 85%. Alokasi anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman adalah sebesar Rp13.902.643.384,00 dengan realisasi sebesar Rp10.449.024.574,00 atau setara dengan 75,16%.

- (1) Kegiatan Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung Wilayah Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.516.000,00 dan realisasi Rp649.210.250,00 atau setara dengan 92,81%. *Output* kegiatan adalah yaitu dokumen studi AMDAL SPAM Regional Kertasari. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
- (2) Pembangunan SPAM Regional Cirebon yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.726.398.126,00 dan realisasi Rp1.583.215.700,00 atau setara dengan 91,71%. *Output* kegiatan adalah dokumen review studi AMDAL SPAM Regional Cirebon Raya serta pemagaran lahan Desa Babakan Anyar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
- (3) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Khusus yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp717.838.750,00 dan realisasi Rp635.532.500,00 atau setara dengan 88,53%.

- Output* kegiatan adalah Dokumen Rencana Teknis Rinci SPAM Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
- (4) Penyelenggaraan Program Pamsimas yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp377.581.120,00 atau setara dengan 94,40%. *Output* kegiatan adalah laporan penyelenggaraan program Pamsimas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
 - (5) Pemutakhiran Data Baseline SPAM Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp392.197.400,00 atau setara dengan 98,05%. *Output* kegiatan adalah dokumen data baseline SPAM Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
 - (6) *Monitoring* Penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp76.042.200,00 atau setara dengan 76,04%. *Output* kegiatan adalah laporan *monitoring* penyelenggaraan SPAM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
 - (7) SPAM Regional Metropolitan Bandung Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.990.000.000,00 dan realisasi Rp2.341.406.360,00 atau setara dengan 46,92%. *Output* kegiatan adalah pengadaan lahan Bendung Cikalong. *Outcome* kegiatan meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
 - (8) Konsultan Penyediaan Penyediaan Air Minum 100% yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp165.000.000,00 dan realisasi Rp158.865.950,00 atau setara dengan 96,28%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan penyediaan air minum 100%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
 - (9) Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) SPALD Regional di Metropolitan Bandung Raya Bekarapur, yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp967.103.563,00 dan realisasi Rp947.420.550,00 atau setara dengan 97,96%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen studi kelayakan SPALD

- Regional di Metropolitan Bandung Raya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik;
- (10) Pendampingan penyelenggaraan percepatan pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP) di Jawa Barat (Saniamas IDB) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp362.310.159,00 dan realisasi Rp235.805.062,00 atau setara dengan 65,08%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya cakupan layanan sanitasi di area risiko sanitasi tinggi dan sangat tinggi. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan air limbah domestik;
 - (11) Pendampingan Penyelenggaraan pembangunan Sanitasi Permukiman di Jawa Barat (HIBAH SANIMAS JABAR) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp613.585.062,00 dan realisasi Rp550.360.450,00 atau setara dengan 89,70%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya cakupan layanan sanitasi di area risiko sanitasi tinggi dan sangat tinggi. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan air limbah domestik;
 - (12) Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) sistem drainase permukiman di Metropolitan Bodebekkarpur yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp755.018.339,00 dan realisasi Rp736.825.700,00 atau setara dengan 97,59%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen studi kelayakan sistem drainase permukiman di Metropolitan Bodebekkarpur. *Outcome* kegiatan adalah pengurangan genangan Setinggi Minimal 30 cm selama 2 jam;
 - (13) Penyusunan Rencana Induk TPPAS Regional Bekarpur yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp314.747.523,00 dan realisasi Rp311.419.946,00 atau setara dengan 98,94%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Rencana Induk TPPAS Regional Bekarpur. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan penanganan persampahan;
 - (14) Penyelenggaraan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (GRK) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp89.980.665,00 dan realisasi Rp58.763.454,00 atau setara dengan 65,31%. *Output* kegiatan adalah Laporan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (GRK). *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan penanganan persampahan;

-
- (15) *Monitoring* Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.979.833,00 dan realisasi Rp218.476.940,00 atau setara dengan 87,40%. *Output* kegiatan adalah laporan pemantauan pelaksanaan pengelolaan persampahan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan penanganan persampahan 69%; cakupan pengurangan sampah 3,49%;
 - (16) Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Sumber kepada Masyarakat di Sekitar DAS Citarum yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.963.297,00 dan realisasi Rp173.693.100,00 atau setara dengan 86,86%. *Output* kegiatan adalah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Sumber. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan penanganan persampahan 69%; cakupan pengurangan sampah 3,49%;
 - (17) Kajian Penanganan Sampah Sungai Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp311.961.836,00 dan realisasi Rp273.257.200,00 atau setara dengan 87,59%. *Output* kegiatan adalah laporan kajian penanganan sampah sungai Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan penanganan persampahan;
 - (18) Penyusunan Jakstrada Persampahan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp314.982.097,00 dan realisasi Rp238.107.900,00 atau setara dengan 75,59%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan penanganan persampahan 69%, cakupan pengurangan sampah 3,49%;
 - (19) Konsultan Pendampingan Pembangunan Air Minum Dan Sanitasi Di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp85.193.500,00 atau setara dengan 85,19%. *Output* kegiatan adalah laporan fasilitasi teknis pembangunan sarana dan prasarana persampahan di kabupaten/kota. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan penanganan persampahan;
 - (20) Penyusunan Rencana Induk TPAS bersama Sukabumi yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan

Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp304.258.134,00 dan realisasi Rp286.242.082,00 atau setara dengan 94,08%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Rencana Induk TPAS Bersama Sukabumi. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan penanganan persampahan;

- (21) Penyusunan rencana kerja masyarakat dalam pengelolaan sampah di DAS yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi Rp119.469.000,00 atau setara dengan 99,56%. *Output* kegiatan adalah dokumen rencana kerja masyarakat dalam pengelolaan sampah di DAS Citarum. *Outcome* kegiatan adalah cakupan pelayanan penanganan persampahan 69 persen; cakupan pengurangan sampah 3,49 persen.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Permasalahan

- (1) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Wilayah Pelayanan II :
- a. Pada pekerjaan pembangunan jembatan (Overpass) Cibereum Di Lingkar Sukabumi Segmen 3 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pekerjaan.
- (2) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Wilayah Pelayanan III :
- a. Pada pekerjaan pembangunan *Fly Over* jalan Laswi/Pelajar Pejuang 45-Gatot Subroto tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pekerjaan;
 - b. Pada pekerjaan peningkatan jalan Cagak – Bts.Subang/Sumedang (Cikaramas) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pekerjaan;
 - c. Pada pekerjaan penggantian jembatan Bojong Ruas Jalan Majalaya (Sp.3Jl. Cikareo/Jl.Tengah) Sawahbera (Sp.3Cijapati) Bts.Bandung/Garut (Cijapati) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pekerjaan;
 - d. Pada pekerjaan Penataan Jalur Penyelamatan dan Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Subang – Bts.Kab. Bandung/Kab.Subang (Tahap.2) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai waktu

yang telah ditentukan dalam perjanjian pekerjaan.

- (3) Kegiatan Forum Jasa Konstruksi tidak jadi dilaksanakan karena terbitnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, dimana diperlukan Peraturan Pemerintah sebagai acuan dalam operasional;
- (4) Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
- (5) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase);
- (6) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional;
- (7) Terdapat beberapa akibat dari BABS atau sanitasi buruk yaitu tingginya angka kematian balita, diare pada balita dan stunting;
- (8) Sebesar 27% desa/kelurahan di Jawa Barat berada di area risiko sanitasi sangat tinggi dan tinggi (sektor air limbah domestik) berdasarkan studi *Environmental Health Risk Assesment (EHRA)*;
- (9) Berdasarkan kajian kondisi eksisting maupun data yang diperoleh dari hasil *Focused Group Discussion (FGD)* dengan kabupaten/kota, ditemukan bahwa masalah yang dibahas tiap kota dan kabupaten masih berkulat di persoalan klasik, yang terfokus pada kinerja pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan pola kumpul-angkut-buang, serta tingginya beban pengangkutan sampah ke TPA;
- (10) Rata-rata tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan jaringan perpipaan yang masih rendah yaitu sebesar $\pm 1,4\%$. dibandingkan dengan selisih target cakupan pelayanan sebesar 6% yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 tahun untuk mencapai target pemerintah terhadap 100% akses aman air minum pada tahun 2019.

b. Solusi

- (1) Solusi telah diupayakan berbagai pemecahannya sesuai dengan kemampuan sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai antara lain:
 - a. sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Perpres No.16 Tahun 2018, penyedia jasa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun melampaui tahun anggaran;
 - b. Untuk pembayaran sisa pekerjaan akan dibayar melalui APBD perubahan tahun anggaran 2020, dengan memperhatikan denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 601/Kep.1060-DBMPR/2019.

- (2) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum secara sinergis kegiatan dan pembiayaan dengan pusat, provinsi dan kabupaten kota;
- (3) Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase) secara sinergis kegiatan dan pembiayaan;
- (4) Meningkatkan penyediaan dan percepatan operasional infrastruktur sampah Regional (Nambo dan Legok Nangka);
- (5) Pembangunan infrastruktur untuk mempersempit area risiko sanitasi buruk salah satunya dengan cara ODF. *Open Defecation Free (ODF)* merupakan suatu kondisi dimana setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan;
- (6) Mencari pendanaan lain untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sanitasi contohnya dari pemerintah kab/kota, pemerintah provinsi, APBN, KPBU, CSR;
- (7) Menyusun roadmap persampahan yang dikembangkan dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait;
- (8) Mengembangkan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan kualitas air baku, dan mengembangkan teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik. Melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.

4 **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pencapaian Indikator Kinerja terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah Rasio permukiman layak dengan realisasi sebesar 0,9962 poin dari target sebesar 0,9952 poin; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan capaian sebesar 52,12 poin dari target sebesar 49,76 poin; pemenuhan unsur penyelenggaraan bangunan gedung dengan realisasi sebesar 100% dan tingkat kualitas kawasan permukiman dengan realisasi sebesar 6,39% dari target sebesar 6,86% dan tingkat ketersediaan rumah layak dengan realisasi sebesar 91,70% dari target sebesar 91,63%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) **Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

a. **Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni penyediaan rumah layak huni dengan capaian sebesar 91,70% dari target sebesar 91,63%; peningkatan kualitas rumah layak huni dengan capaian sebesar 98,72% dari target sebesar 98,77%; prosentase penanganan hunian rumah untuk pendukung pelaksanaan program pemerintah dan pasca bencana dengan capaian sebesar 100%; prosentase layanan pembinaan teknis bangunan gedung dan rumah negara dengan capaian sebesar 100%; persentase luas kawasan permukiman kumuh dengan realisasi capaian sebesar 46,12% dari target sebesar 66,91% dan persentase prasarana dan sarana yang dibangun dan dikembangkan dengan capaian sebesar 6,39% dari target sebesar 6,87% dan indeks kepuasan masyarakat terhadap UPTD P3JB dengan capaian sebesar 79,59% dari target sebesar 80%. Alokasi anggaran Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp186.541.708.142,00 dengan realisasi sebesar Rp81.016.680.181,00 atau setara dengan 43,43%. Uraian kegiatan adalah:

- (1) Kegiatan *Review* DED Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp517.869.768,00 dan realisasi Rp479.438.268,00 atau setara dengan 92,58%. *Output* kegiatan adalah mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh;
- (2) Kegiatan Penataan kawasan kumuh perkotaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan

- Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.782.342.516,00 dan realisasi Rp2.695.448.989,00 atau setara dengan 96,88%. *Output* kegiatan adalah mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh;
- (3) Kegiatan Fasilitasi penataan kawasan kumuh perkotaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.714.752,00 dan realisasi Rp154.776.340,00 atau setara dengan 51,64%. *Output* kegiatan adalah mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh;
 - (4) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kawasan Permukiman yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.705.089.500,00 dan realisasi Rp1.529.981.052,00 atau setara dengan 89,73%. *Output* kegiatan adalah mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh;
 - (5) Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman di Kawasan Agropolitan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.520.773.790,00 dan realisasi Rp1.221.741.830,00 atau setara dengan 80,34%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas jalan poros desa di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan (1 kawasan). *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya jalan poros desa di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan (1 kawasan);
 - (6) Kegiatan Identifikasi Infrastruktur Dasar Permukiman Perdesaan Kawasan Minapolitan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.450.000,00 dan realisasi Rp1.680.000,00 atau setara dengan 68,57%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kebutuhan infrastruktur dasar permukiman perdesaan di kawasan minapolitan. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar permukiman perdesaan di kawasan minapolitan;
 - (7) Identifikasi dan perencanaan infrastruktur dasar permukiman perdesaan kawasan rawan bencana yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp231.160.936,00 dan realisasi Rp143.575.500,00 atau setara dengan 62,11%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil

- identifikasi (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir). *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil identifikasi (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir);
- (8) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cimangkok, Kabupaten Sukabumi (Tahap III) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.844.219.295,00 dan realisasi Rp3.780.823.861,00 atau setara dengan 98,35%. *Output* kegiatan adalah pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cimangkok, Kabupaten Sukabumi (Tahap III) 1 Kawasan. *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat di Cimangkok, Kabupaten Sukabumi (1 Kawasan);
 - (9) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cikembar, Kabupaten Sukabumi (Tahap III) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.933.176.844,00 dan realisasi Rp2.847.804.500,00 atau setara dengan 97,09%. *Output* kegiatan adalah pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cikembar, Kabupaten Sukabumi (Tahap III) 1 Kawasan. *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat di Cikembar, Kabupaten Sukabumi (1 Kawasan);
 - (10) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cipeuyeum, Kabupaten Cianjur (Tahap III) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.700.819.264,00 dan realisasi Rp3.542.035.750,00 atau setara dengan 95,71%. *Output* kegiatan adalah pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cipeuyeum, Kabupaten Cianjur (Tahap III) 1 Kawasan. *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat di Cipeuyeum, Kabupaten Cianjur (1 Kawasan);
 - (11) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong, Kabupaten Cianjur (Tahap III) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.769.199.622,00 dan realisasi Rp2.274.587.206,00 atau setara dengan 47,69%. *Output* kegiatan adalah pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong, Kabupaten Cianjur (Tahap III) 1 Kawasan. *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya Masjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong, Kabupaten Cianjur (1 Kawasan);
 - (12) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka (Tahap III) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp6.848.193.622,00 dan realisasi Rp6.172.161.750,00 atau setara dengan 90,13%. *Output* kegiatan adalah pembangunan Masjid Provinsi

- Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka (Tahap III) 1 Kawasan. *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya Masjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka (1 Kawasan);
- (13) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya (Tahap III) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp6.823.821.174,00 dan realisasi Rp6.220.401.100,00 atau setara dengan 91,16%. *Output* kegiatan adalah pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cikalong Kabupaten Tasikmalaya (Tahap III) 1 Kawasan. *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat di Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya (1 Kawasan);
- (14) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kalipucang, Kabupaten Pangandaran (Tahap III) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.905.328.321,00 dan realisasi Rp1.848.632.946,00 atau setara dengan 97,02%. *Output* kegiatan adalah pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kalipucang, Kabupaten Pangandaran (Tahap III) 1 Kawasan. *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya Masjid Provinsi Jawa Barat di Kalipucang, Kabupaten Pangandaran (1 Kawasan);
- (15) Penyempurnaan pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon, Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp502.033.832,00 dan realisasi sebesar Rp479.826.673,00 atau setara dengan 95,58%. *Output* kegiatan adalah penyempurnaan pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon, Kabupaten Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya Masjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- (16) Penyediaan ruang terbuka hijau /ruang terbuka publik /revitalisasi kawasan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp65.281.351.461,00 dan realisasi Rp9.233.173.136,00 atau setara dengan 14,14%. *Output* kegiatan adalah perjuangan, penyusunan DED alun-alun dan pusat budaya. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya DED penataan Kawasan Gasibu dan Monju, tersedianya DED penataan alun-alun di 9 Kab/Kota, tersedianya DED penataan kawasan pusat budaya di 5 kab/kota;
- (17) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Rancabuaya, Kabupaten Garut (Tahap III) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp614.121.762,00 dan

- realisasi Rp555.821.173,00 atau setara dengan 90,51%. *Output* kegiatan adalah pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Rancabuaya, Kabupaten Garut (Tahap III) 1 Kawasan. *Outcome* kegiatan adalah terbangunnya Masjid Provinsi Jawa Barat di Rancabuaya, Kabupaten Garut (1 Kawasan);
- (18) Kegiatan Rehabilitasi gedung kantor pemerintah yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60.504.176.734,00 dan realisasi Rp16.826.375.778,00 atau setara dengan 27,81%. *Output* kegiatan adalah rehabilitasi Gedung *Creative Centre* dan penyusunan DED *Creative Centre* di 9 kab/kota, Penyusunan DED Gedung FKPD. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya DED Gedung FKPD, tersedianya DED di 9 kab/kota dan terbangunnya Gedung *Creative Centre* di 2 kab/kota;
- (19) Kegiatan Pematangan Lahan Rusunawa yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp771.435.333,00 dan realisasi Rp765.438.700,00 atau setara dengan 99,22%. *Output* kegiatan adalah tersedianya lahan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyusunan DED Gedung FKPD. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya lahan untuk pembangunan rumah layak huni;
- (20) Penyusunan AMDAL Pembangunan Rusunawa yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp530.086.415,00 dan realisasi Rp523.914.250,00 atau setara dengan 98,84%. *Output* kegiatan adalah dokumen AMDAL pembangunan rusunawa. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya lahan yang siap bangun untuk memenuhi kebutuhan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- (21) Sosialisasi Peraturan Daerah RP3KP yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp198.871.956,00 dan realisasi Rp196.120.000,00 atau setara dengan 98,62%. *Output* kegiatan adalah tersosialisasinya aturan perumahan. *Outcome* kegiatan adalah terkendali dan terencananya pembangunan rumah bagi MBR di Jawa Barat;
- (22) Penyelenggaraan klinik rumah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.175.923.796,00 dan realisasi Rp1.108.719.608,00 atau setara dengan 94,28%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sistem informasi perumahan bagi masyarakat, laporan penyelenggaraan aplikasi Karya Mobile (Si Umah),

- laporan pendampingan Karya Kita, kajian untuk teknologi perumahan, kajian rumah khusus nelayan. *Outcome* kegiatan adalah masyarakat Jawa Barat dapat secara cepat dan mudah mengakses informasi mengenai berbagai hal dalam membangun rumah secara mandiri maupun kelompok; masyarakat yang mendaftar aplikasi Karya Kita; laporan pendampingan; dokumen kajian untuk teknologi perumahan; dokumen kajian rumah nelayan;
- (23) Operasionalisasi Pokja PKP yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp174.994.313,00 dan realisasi Rp169.723.550,00 atau setara dengan 96,99%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya program Pokja PKP dalam pemenuhan kebutuhan pemenuhan perumahan bagi masyarakat di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah laporan kinerja Pokja PKP Jawa Barat dan program kerja PKP Jawa Barat;
- (24) Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rusunawa Ujung Berung yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp463.940.380,00 dan realisasi Rp437.150.500,00 atau setara dengan 94,23%. *Output* kegiatan adalah cakupan unit terhuni rusunawa. *Outcome* kegiatan adalah cakupan unit terhuni rusunawa;
- (25) Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Batujajar yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp463.372.337,00 dan realisasi Rp448.045.000,00 atau setara dengan 96,69%. *Output* kegiatan adalah cakupan unit terhuni rusunawa. *Outcome* kegiatan adalah cakupan unit terhuni rusunawa;
- (26) *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PSU dalam Penyediaan Perumahan MBR di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp91.185.679,00 dan realisasi Rp88.592.000,00 atau setara dengan 97,16%. *Output* kegiatan adalah laporan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan PSU untuk mencapai rumah layak bersubsidi. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data yang valid mengenai jumlah rumah, nama pengembang, lokasi perumahan yang dibangun dengan bantuan PSU; tersedianya bahan-bahan rumusan yang akan dijadikan masukan bagi pengambil kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; terkendalinya

- pembangunan perumahan dengan harga jual perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- (27) Pendampingan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp16.277.569.086,00 dan realisasi Rp15.687.303.793,00 atau setara dengan 96,37%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan pendampingan perbaikan rumah tidak layak huni di 26 Kab/Kota kepada 15.000 MBR. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya rumah sehat layak huni bagi MBR di 26 Kab/Kota sebanyak 15.000;
- (28) Penyusunan standar operasional prosedur bidang perumahan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp123.797.327,00 dan realisasi Rp120.470.500,00 atau setara dengan 97,31%. *Output* kegiatan adalah tersedianya pedoman dalam pembagian kewenangan penyediaan hunian yang sehat dan layak huni, baik pada pasca terjadinya bencana alam maupun akibat dilaksanakannya pembangunan oleh pemerintah. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya dokumen standar operasional bidang perumahan;
- (29) Evaluasi dan *updating* data rumah tidak layak huni dan rumah swadaya yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp318.445.410,00 dan realisasi Rp307.196.700,00 atau setara dengan 96,47%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni, baik pada pasca terjadinya bencana alam maupun akibat dilaksanakannya pembangunan oleh Pemerintah. *Outcome* kegiatan adalah penyusunan dokumen evaluasi dan *updating* data rumah tidak layak huni;
- (30) Identifikasi kebutuhan relokasi program pemerintah dan bencana yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp306.068.805,00 dan realisasi Rp300.149.000,00 atau setara dengan 98,07%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya dokumen penyiapan lokasi yang representatif dalam penanggulangan tanggap darurat hunian sementara kebencanaan serta relokasi akibat bencana dan program pemerintah. *Outcome* kegiatan adalah terhunikannya masyarakat korban bencana akibat pelaksanaan program pembangunan pemerintah;
- (31) Kegiatan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung /Rumah Negara yang dilaksanakan

- Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.995.615,00 dan realisasi Rp498.802.750,00 atau setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya laporan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung/rumah negara. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan bangunan gedung negara/daerah di Jawa Barat;
- (32) Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Perda Bangunan Gedung pada kabupaten/kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.341.076,00 dan realisasi Rp49.333.750,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya dokumen teknis implementasi Perda Bangunan Gedung di kab/kota di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya peraturan terkait penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sesuai kebutuhan di Jawa Barat;
- (33) Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa Rancaekek yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp154.959.221,00 dan realisasi Rp152.710.228,00 atau setara dengan 98,55%. *Output* kegiatan adalah penataan kantor pengelola Rusunawa Rancaekek dan perbaikan kebocoran unit hunian serta rooftop. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya capaian target unit terhuni rusunawa;
- (34) Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Kantor Balai yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp31.973.000,00 dan realisasi Rp31.424.000,00 atau setara dengan 98,28%. *Output* kegiatan adalah penataan dapur. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana prasarana kerja perangkat daerah;
- (35) Kegiatan Promosi, Publikasi dan Informasi Apartemen Transit Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp123.905.200,00 dan realisasi Rp123.300.000,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah laporan penyelenggaraan promosi, publikasi dan informasi apartemen transit Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya capaian target unit terhuni rusunawa.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman yakni persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan di Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar 100%. Alokasi anggaran program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebesar Rp981.761.826,00 dan realisasi sebesar Rp800.053.778,00 atau setara dengan 81,49%.

- (1) Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.950,00 dan realisasi Rp191.902.268,00 atau setara dengan 95,95%. *Output* kegiatan adalah diketahuinya solusi terhadap permasalahan pertanahan, dan terumuskannya kebijakan tentang bidang pertanahan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pembahasan mendalam tentang pertanahan, dan kendala/permasalahan pelaksanaan pertanahan bagi kepentingan umum;
- (2) Kegiatan *Monitoring* Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp89.999.683,00 dan realisasi Rp75.332.625,00 atau setara dengan 83,70%. *Output* kegiatan adalah diketahuinya solusi terhadap permasalahan pertanahan, dan terumuskannya kebijakan tentang bidang pertanahan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pembahasan mendalam tentang pertanahan, dan kendala/permasalahan pelaksanaan pertanahan bagi kepentingan umum;
- (3) Kegiatan Perencanaan Lingkup Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp641.762.289,00 dan realisasi Rp486.114.685,00 atau setara dengan 75,75%. *Output* kegiatan adalah diketahuinya solusi terhadap permasalahan pertanahan, dan terumuskannya kebijakan tentang bidang pertanahan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pembahasan mendalam tentang pertanahan, dan kendala/permasalahan pelaksanaan pertanahan bagi kepentingan umum;

- (4) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.999.904,00 dan realisasi Rp46.704.200,00 atau setara dengan 93,41%. *Output* kegiatan adalah diketahuinya solusi terhadap permasalahan pertanahan, dan terumuskannya kebijakan tentang bidang pertanahan, *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pembahasan mendalam tentang pertanahan, dan kendala/permasalahan pelaksanaan pertanahan bagi kepentingan umum.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan Dan Permukiman

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman yakni tingkat persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Perumahan dan Permukiman dan UPTD P3JB dengan realisasi sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebesar Rp1.292.860.276,00 dengan realisasi sebesar Rp1.267.404.600,00 atau setara dengan 98,03%.

- (1) Penyediaan perlengkapan, peralatan dan *meubelair* yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp900.425.438,00 dan realisasi Rp876.932.300,00 atau setara dengan 97,39%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
- (2) Penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rusunawa UPTD P3JB yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp392.434.838,00 dan realisasi Rp390.472.300,00 atau setara dengan 99,50%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana kerja. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya motivasi pegawai UPTD P3JB.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Dan Permukiman

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman yakni tingkat persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebesar Rp23.288.610.577,00 dengan realisasi sebesar Rp22.419.472.640,00 atau setara dengan 96,27%. Uraian kegiatan adalah.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp650.000.000,00 dan realisasi Rp640.091.420,00 atau setara dengan 98,48%. *Output* kegiatan adalah kinerja pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya motivasi kerja;
- (2) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp439.250.000,00 dan realisasi Rp333.533.094,00 atau setara dengan 75,93%. *Output* kegiatan adalah kinerja pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya motivasi kerja;
- (3) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp241.115.000,00 atau setara dengan 96,45%. *Output* kegiatan adalah kinerja pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya motivasi kerja;
- (4) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.534.583.250,00 dan realisasi Rp1.348.931.778,00 atau setara dengan 87,90%. *Output* kegiatan adalah kinerja pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya motivasi kerja;
- (5) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp395.550.600,00 atau setara dengan 98,89%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman;
- (6) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan

- Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi Rp698.347.384,00 atau setara dengan 87,29%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman;
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.485.000.000,00 dan realisasi Rp4.418.544.500,00 atau setara dengan 98,52%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman;
- (8) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.272.900.000,00 dan realisasi Rp1.245.985.360,00 atau setara dengan 97,89%. *Output* kegiatan adalah kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan mengoptimalkan kemampuan aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp55.737.000,00 dan realisasi Rp25.350.000,00 atau setara dengan 45,48%. *Output* kegiatan adalah kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan mengoptimalkan kemampuan aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
- (10) Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp39.475.700,00 atau setara dengan 98,69%. *Output* kegiatan adalah kinerja pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya motivasi kerja pegawai dalam pelayanan bagi masyarakat;
- (11) Penilaian Kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan

- Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.850.000,00 dan realisasi Rp244.977.200,00 atau setara dengan 98,05%. *Output* kegiatan adalah penilaian kinerja pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya motivasi kerja pegawai;
- (12) Diklat peningkatan kualitas aparatur yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.254.000,00 atau setara dengan 99,63%. *Output* kegiatan kualitas kinerja Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya motivasi kerja pegawai;
- (13) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.400.000.000,00 dan realisasi Rp1.392.516.000,00 atau setara dengan 99,47%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman;
- (14) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD P3JB dan Rusunawa yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.575.000,00 dan realisasi Rp784.255.287,00 atau setara dengan 98,08%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor P3JB. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup UPTD P3JB;
- (15) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya dan Tenaga Pengelola Rusunawa Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp7.299.787.979,00 dan realisasi Rp7.161.450.920,00 atau setara dengan 98,10%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional pendukung kantor P3JB. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup UPTD P3JB;
- (16) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional, Iuran Wajib Tahunan, Sarana dan Prasarana Kantor dan Rusunawa yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.887.998.363,00 dan realisasi Rp1.856.935.734,00 atau setara dengan 98,35%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor P3JB. *Outcome* kegiatan adalah

- tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup UPTD P3JB;
- (17) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD P3JB dan Rusunawa yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp823.998.485,00 dan realisasi Rp712.346.500,00 atau setara dengan 86,45%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor P3JB. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup UPTD P3JB;
 - (18) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD P3JB yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.930.500,00 dan realisasi Rp680.812.163,00 atau setara dengan 97,27%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor P3JB. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup UPTD P3JB.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Permasalahan

- (1) Masih tingginya angka *backlog* perumahan;
- (2) Masih terdapat rumah tidak layak huni;
- (3) Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
- (4) Kurangnya komitmen LPM/BKM dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu; dan
- (5) Kawasan Gasibu merupakan kawasan aktif, dan tidak pernah tidur, dari berbagai kegiatan dan interaksi publik, sehingga sehingga sarana dan prasarana baik yg sudah terbangun maupun tuntutan kebutuhan layanan publik harus disesuaikan dengan teknologi dan perkembangan jaman.

b. Solusi

- (1) Meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui antara lain: optimalisasi klinik rumah dalam melakukan penyuluhan terkait permasalahan perumahan, terutama untuk pengadaan rumah; dan optimalisasi peran pokja PKP yg terdiri atas multi sektor baik itu pemerintah, pengembang, maupun perbankan;
- (2) Melakukan upaya perbaikan rumah tidak layak huni;
- (3) Meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui penataan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh);

- (4) Penguatan dan pembekalan LPM/BKM; dan
- (5) Berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada, kegiatan penanganan Gasibu, disesuaikan skala prioritas kebutuhan publik bersifat mendesak.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2019 adalah Indeks Demokrasi dengan capaian sebesar 65,5% dari target sebesar 68,6 – 69%; Indeks Ketenteraman Dan Ketertiban dengan capaian sebesar 77,50% dari target sebesar 70-71% dan Indeks Risiko Bencana (IRB) dengan capaian sebesar 152,13 poin dari target sebesar 165 poin. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Capaian Indikator Kinerja Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat yakni tingkat penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat adalah dengan capaian sebesar 82,50% dari target sebesar 70%. Alokasi anggaran Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat adalah sebesar Rp8.702.994.718,00 dengan realisasi sebesar Rp8.061.949.705,00 atau setara dengan 92,63%.

- (1) Peningkatan Linmas se-Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp345.389.000,00 dan realisasi Rp326.333.000,00 atau setara dengan 94,48%. *Output* kegiatan adalah FDG dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Tahun 2019 se-Jawa Barat, sosialisasi dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas perlindungan masyarakat dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 se-Jawa Barat;
- (2) Identifikasi satuan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Jawa Barat tahun 2019 yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp101.147.500,00 atau setara dengan 28,90%. *Output* kegiatan adalah identifikasi Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Jawa Barat tahun 2019 di 27 kab/kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesiapsiagaan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Jawa Barat tahun 2019;

- (3) Pengerahan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 di Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp330.800.000,00 dan realisasi Rp304.858.700,00 atau setara dengan 92,16%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi Satlinmas dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 di Jawa Barat, gelar pasukan anggota Linmas dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 di Jawa Barat; *Monitoring* dan evaluasi Satlinmas dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terkerahnya anggota perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 di Jawa Barat;
- (4) Jambore perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.935.000,00 dan realisasi Rp335.179.000,00 atau setara dengan 83,81%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya defile dan pembukaan Jambore perlindungan masyarakat se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya peran aktif perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat dan mitigasi kebencanaan di Jawa Barat;
- (5) Peningkatan Operasional Kesadaran Hukum Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp464.993.793,00 dan realisasi Rp432.947.450,00 atau setara dengan 93,11%. *Output* kegiatan adalah operasi sidak Gerakan Disiplin Daerah (GDD) ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta operasi pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah terhadap ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan ASN Provinsi Jawa Barat, serta menurunnya jumlah pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (6) Operasional Terpadu Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp514.992.220,00 dan realisasi Rp490.888.000,00 atau setara dengan 95,32%. *Output* kegiatan adalah operasi pengawasan

- melekat, penegakan penegakan terpadu serta penanganan pelanggaran peraturan daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan pada masyarakat dan badan usaha, serta menurunnya jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Jawa Barat;
- (7) Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp493.399.055,00 dan realisasi Rp475.285.500,00 atau setara dengan 96,33%. *Output* kegiatan adalah operasi identifikasi dugaan pelanggaran Peraturan Daerah, serta operasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan pada masyarakat dan badan usaha, serta menurunnya jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Jawa Barat;
- (8) Penertiban Aset Dan Pengamanan Objek Vital Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp347.252.000,00 atau setara dengan 99,21%. *Output* kegiatan adalah pengamanan aset dan rapat teknis penertiban billboard/reklame. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengamanan aset dan objek vital milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Patroli Pengamanan dan Penanganan Gangguan Trantibum di Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp738.069.950,00 atau setara dengan 98,41%. *Output* kegiatan adalah patroli gabungan TNI/Polri/Satpol PP Kab/Kota, Patroli ke Kab/Kota/OPD/UPTD/UPTB/Sub unit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat;
- (10) Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Trantibum secara Terpadu di Wilayah Perbatasan Provinsi Kab/Kota alokasi sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp396.600.100,00 atau setara dengan 99,15%. *Output* kegiatan adalah operasi terpadu tibumtranmas dan forum komunikasi masyarakat wilayah perbatasan. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatkan budaya taat hukum bagi aparatur, masyarakat dan badan hukum;
- (11) Operasi Praja Wibawa Dan Operasi Bhakti Praja yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp396.600.100,00 atau setara dengan 99,15%. *Output* kegiatan adalah Operasi Praja Wibawa dan Operasi Bhakti Praja. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat;
 - (12) Deteksi Dini, Pengumpulan dan Analisis Bahan Keterangan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp298.773.750,00 atau setara dengan 99,59%. *Output* kegiatan adalah analisis dan evaluasi intelijen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat;
 - (13) Analisis, Evaluasi dan Pengawasan Dampak Operasi Trantibum yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi Rp558.831.355,00 atau setara dengan 93,14%. *Output* kegiatan adalah tertibnya data dan informasi pelaksanaan kegiatan Trantibum. *Outcome* kegiatan adalah terevaluasinya dampak operasi trantibum dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat;
 - (14) Pengamanan Wilayah Pemilu Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp497.119.000,00 atau setara dengan 99,42%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pengamanan wilayah pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden; terlaksananya FGD pengamanan wilayah pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden; terlaksananya pengamanan tahapan sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih; terlaksananya pengamanan tahapan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS; terlaksananya pengamanan tahapan pengadaan dan distribusi surat suara dan kelengkapan pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden; terlaksananya pengamanan tahapan kampanye pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat selama pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden;
 - (15) Operasi Pengamanan dan Penertiban Kawasan Lindung/Daerah Aliran Sungai Citarum yang

- dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp346.324.000,00 atau setara dengan 98,95%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya patrol/pengendalian massa/deteksi dini/operasi pengamanan/penertiban kawasan lindung/DAS Citarum; Terlaksananya rapat koordinasi pengamanan/penertiban kawasan lindungan/DAS Citarum. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kawasan lindung/daerah aliran Sungai Citarum;
- (16) Pembinaan Masyarakat, Aparatur dan Kerjasama yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp780.272.750,00 dan realisasi Rp688.078.950,00 atau setara dengan 88,18%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi terbatas Mitra Praja Utama, serta operasi terpadu cukai rokok ilegal dan tidak dilekatkan cukai. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kerangka Mitra Praja Utama, serta teridentifikasinya data pelanggaran cukai rokok ilegal dan tidak dilekatkan cukai;
- (17) Peningkatan Kapasitas Aparatur PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp438.250.000,00 dan realisasi Rp427.960.800,00 atau setara dengan 97,65%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi, serta pendidikan dan pelatihan PNS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah dan kemampuan PNS di Jawa Barat;
- (18) Peningkatan Profesionalisme Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.993.400 dan realisasi Rp690.384.200 atau setara dengan 98,63%. *Output* kegiatan adalah bimbingan teknis intelegen, serta Jambore Satpol PP tingkat Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan Polisi Pamong Praja dalam aspek intelegen, serta terbentuknya jiwa korsa Satuan Polisi Pamong Praja se-Jawa Barat;
- (19) Kegiatan Operasional Sekretariat PNS Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp234.969.500 dan realisasi Rp212.876.250 atau setara dengan 90,60%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi teknis dan sinergitas PNS di Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya sinergitas, kolaborasi

dab koordinasi penegakan peraturan daerah oleh PNS provinsi dan kabupaten/kota.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yakni persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan di Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar Rp983.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp885.039.700,00 atau setara dengan 90,00%.

- (1) Pengembangan Data dan Informasi Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja se-Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.820.000,00 atau setara dengan 99,91%. *Output* kegiatan adalah penyusunan data dan informasi, forum data dan informasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Jawa Barat;
- (2) Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi Rp377.371.500,00 atau setara dengan 83,86%. *Output* kegiatan adalah penyusunan rencana kerja anggaran, Renja, LKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan dan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian pelaporan capaian kinerja dengan anggaran pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- (3) Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp233.410.000,00 dan realisasi Rp225.003.900,00 atau setara dengan 96,40%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi forum OPD, pra-musrenbang wilayah I, II, III dan IV. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

- (4) Peningkatan wawasan bidang penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp82.844.300,00 atau setara dengan 82,84%. *Output* kegiatan adalah penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan kunjungan kerja. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya percepatan pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yakni tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar 95,00% dari target sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar Rp1.107.258.200,00 dengan realisasi sebesar Rp1.056.946.900,00 atau setara dengan 95,46%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp656.500.000,00 dan realisasi Rp625.190.900,00 atau setara dengan 95,23%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kendaraan Dinas yang layak pakai. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp395.958.200,00 dan realisasi Rp390.506.000,00 atau setara dengan 98,62%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp54.800.000,00 dan realisasi Rp41.250.000,00 atau setara dengan 75,27%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja yakni persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp5.464.579.376,00 dengan realisasi sebesar Rp4.937.835.250,00 atau setara dengan 90,36%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp838.800.000,00 dan realisasi Rp725.519.100,00 atau setara dengan 86,49%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kegiatan kerohanian, olahraga dan pakaian aparat Satpol PP. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya jasmani dan rohani serta *performance* Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp18.000.000,00 dan realisasi Rp18.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya anggaran untuk diklat, kursus singkat dan bimbingan teknis bagi Satuan Polisi Pamong Praja. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas dan profesional;
- (3) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp502.400.000,00 dan realisasi Rp474.131.150,00 atau setara dengan 94,37%. *Output* kegiatan adalah tersedianya barang habis pakai kantor. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- (4) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp297.100.000,00 dan realisasi Rp235.615.100,00 atau setara dengan 79,30%. *Output* kegiatan adalah tersedianya anggaran untuk listrik, koran dan media sosial. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- (5) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

- Rp87.000.000,00 dan realisasi Rp45.890.700,00 atau setara dengan 52,75%. *Output* kegiatan adalah tersedianya anggaran untuk sewa alat, publikasi dan dokumentasi kegiatan dinas. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp2.469.350.400,00 dan realisasi Rp2.300.908.150,00 atau setara dengan 93,18%. *Output* kegiatan adalah tersedianya anggaran untuk makan minum, perjalanan Dinas dan pengawasan pribadi gubernur dan wakil gubernur. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Rp1.251.928.976,00 dan realisasi Rp1.137.771.050,00 atau setara dengan 90,88%. *Output* kegiatan adalah tersedianya anggaran keamanan serta alat dan bahan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Program Pengurangan Kerentanan Bencana

Capaian Indikator Kinerja Program Pengurangan Kerentanan Bencana adalah tingkat sadar risiko bencana sebesar 100%. Alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah sebesar 1.422.927.187,00 dengan realisasi sebesar Rp1.311.904.200,00 setara dengan 92,20%.

- 1) Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp499.672.680,00 dan realisasi sebesar Rp403.035.180,00 atau setara dengan 80,66%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya pengarusutamaan PRB di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi PRB;
- 2) Pengembangan Materi Informasi Sosialisasi yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.795.000,00 dan realisasi sebesar Rp143.850.000,00 atau setara dengan 96,03%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. *Outcome* kegiatan adalah tersedia dan tersusunnya bahan cetak dan visual;

- 3) Pendampingan Penanganan Bencana dan *Monitoring* Kejadian Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.755.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.506.520,00 atau setara dengan 99,92%. *Output* kegiatan adalah pendampingan dan *monitoring* kejadian bencana. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya prosentase upaya penanggulangan bencana di Jawa Barat;
- 4) Pendistribusian Bantuan Logistik yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp348.857.297,00 dan realisasi sebesar Rp348.293.750,00 atau setara dengan 99,84%. *Output* kegiatan adalah pendistribusian bantuan logistik ke daerah yang tertimpa bencana. *Outcome* kegiatan adalah bantuan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat korban bencana;
- 5) Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp64.971.980,00 dan realisasi sebesar Rp58.301.750,00 atau setara dengan 89,73%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya prosentase upaya penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Jawa Barat;
- 6) Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kekeringan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.875.230,00 dan realisasi sebesar Rp58.917.000,00 atau setara dengan 98,40%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi penanganan bencana kekeringan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya prosentase upaya penanganan bencana kekeringan di Jawa Barat.

f. Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Capaian Indikator Kinerja Program Pengurangan Kerentanan Bencana adalah tingkat kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebesar 100%. Alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah sebesar Rp11.631.869.071,00 dengan realisasi sebesar Rp10.451.064.369,00 setara dengan 89,85%

- 1) Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp899.981.334,00 dan realisasi sebesar Rp547.015.084,00 atau setara dengan 60,78%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya jumlah destana di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terbentuknya destana di Jawa Barat;
- 2) Pengembangan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.887.500,00 dan realisasi sebesar Rp336.824.500,00 atau setara dengan 84,23%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya SMAB di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kualitas SDM dan kinerja Pusdalops BPBD Jabar;
- 3) Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana (PB) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.668.981,00 dan realisasi sebesar Rp197.468.981,00 atau setara dengan 98,90%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas relawan PB. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kapasitas relawan PB;
- 4) Profil Kesiapsiagaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.134.892.977,00 dan realisasi sebesar Rp4.558.056.211,00 atau setara dengan 88,77%. *Output* kegiatan adalah (1) tersedianya informasi sumber daya kesiapsiagaan di Jawa Barat; (2) Tersedianya cetak biru resiliensi provinsi; (3) Terbentuknya *Resilliance Centre*; (4) Pembinaan masyarakat tangguh bencana (*Resilliance citizen*); (5) Review kajian risiko dan kesiapsiagaan bencana *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana;
- 5) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kedaruratan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.879.306,00 dan realisasi sebesar Rp197.226.250,00 atau setara dengan 98,67%. *Output* kegiatan adalah pelatihan peningkatan kapasitas kedaruratan bagi aparatur PB kab/kota di Jawa Barat *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan aparatur penanggulangan bencana dalam penanganan darurat dan operasional posko;

- 6) Pelatihan e-logistik yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp193.832.282,00 dan realisasi sebesar Rp192.872.250,00 atau setara dengan 99,50%. *Output* kegiatan adalah pelatihan e-logistik bagi aparatur penanggulangan di Jawa barat *Outcome* kegiatan adalah jumlah apatur PB yang handal dan profesional dalam mengelola logistik di Jawa Barat;
- 7) Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.905.198,00 dan realisasi sebesar Rp96.505.198,00 atau setara dengan 96,60%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan jumlah Forum PRB. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kapasitas dan pembentukan Forum PRB;
- 8) Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.955.660,00 dan realisasi sebesar Rp190.954.410,00 atau setara dengan 95,50%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas program pencegahan dan kesiapsiagaan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi bidang PK se-Jawa Barat;
- 9) Bulan Bhakti Pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.987.270,00 atau setara dengan 98,99%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya penanggulangan bencana di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya bulan bhakti PRB;
- 10) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.000.000,00 atau setara dengan 93,33%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman aparatur BPBD kab/kota. *Outcome* kegiatan adalah tersosialisasikan peraturan perundang-undangan BPBD Provinsi Jabar;
- 11) Kegiatan Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan, Kursus Singkat dan Bimbingan Teknis Aparatur yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana

- Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp124.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp123.866.000,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan *outbond* di BPBD Provinsi Jabar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPBD Provinsi Jabar;
- 12) Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.999.630,00 dan realisasi sebesar Rp477.664.797,00 atau setara dengan 95,53%. *Output* kegiatan adalah 140 orang peserta JITUPASNA. *Outcome* kegiatan adalah terlatihnya aparatur dalam penyusunan JITUPASNA;
 - 13) Perkuatan Kelembagaan Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.199.812.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.157.461.520,00 atau setara dengan 98,07%. *Output* kegiatan adalah 50 orang petugas PUSDALOP PB. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya daya dukung dan kualitas penanganan bencana;
 - 14) Forum OPD Bidang Kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp265.264.860,00 dan realisasi sebesar Rp251.887.360,00 atau setara dengan 94,96%. *Output* kegiatan adalah rekomendasi program/kegiatan dalam penanggulangan bencana di Jawa barat. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya dan terkoordinasinya bidang kebencanaan dalam perumusan program/kegiatan penanggulangan bencana di Jawa Barat;
 - 15) Rapat Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Se-Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.993.292,00 dan realisasi sebesar Rp188.355.692,00 atau setara dengan 94,18%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya langkah dan kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya dan terkoordinasikannya langkah dan kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana;
 - 16) *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) dan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebencanaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp534.729.500,00 dan realisasi sebesar Rp484.544.795,00 atau setara dengan 90,61%. *Output* kegiatan adalah 1000 HOK perjalanan Dinas monev dan Rapat koordinasi kebencanaan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya monev dan Rapat koordinasi bidang kebencanaan di Jawa Barat;

- 17) Gladi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp190.642.500,00 atau setara dengan 95,33%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Barat;
- 18) Posko Kesiapsiagaan Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.986.551,00 dan realisasi sebesar Rp132.731.551,00 atau setara dengan 88,50%. *Output* kegiatan adalah posko kesiapsiagaan. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasi dan tersedianya posko kesiapsiagaan.

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah tingkat peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah sebesar Rp1.305.935.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.259.095.114,00 setara dengan 96,41%.

- 1) Kegiatan Layanan Logistik untuk Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.305.935.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.259.095.114,00 atau setara dengan 96,41%. *Output* kegiatan adalah pengadaan kebutuhan hidup dasar untuk masyarakat korban bencana *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dasar korban bencana dan masyarakat korban bencana dapat menerima dan merasakan bantuan pada saat tanggap darurat.

h. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah sebesar Rp968.581.447,00 dengan realisasi sebesar Rp781.967.297,00 setara dengan 80,73%

- 1) Rapat Teknis Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan BPBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.812.221,00 dan realisasi sebesar Rp144.301.790,00 atau setara dengan 96,32%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi dan rapat evaluasi pengelolaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya SDM dan kinerja dalam pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 2) Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.923.250,00 dan realisasi sebesar Rp130.011.098,00 atau setara dengan 86,72%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan keuangan bulanan; dokumen laporan keuangan triwulanan; dokumen laporan keuangan tahunan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel;
- 3) *Assessment*, Verifikasi, *Monitoring* dan Evaluasi Pascabencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp343.897.770,00 dan realisasi sebesar Rp260.356.278,00 atau setara dengan 75,71%. *Output* kegiatan adalah laporan *assessment*, verifikasi, *monitoring* dan evaluasi pascabencana. *Outcome* kegiatan adalah ter-*assessment*-nya, terverifikasinya, ter-*monitoring*-nya dan terevaluasinya pasca bencana;
- 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.998.009,00 dan realisasi sebesar Rp208.507.386,00 atau setara dengan 83,40%. *Output* kegiatan adalah 3 dokumen perencanaan 2019 Renstra, Renja dan RKA/DPA. *Outcome* kegiatan adalah dokumen Renstra tahun 2019 – 2023 dan dokumen Renja tahun 2019, RKA tahun 2020 dan DPA perubahan tahun 2018;

- 5) Penyusunan Dokumen Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.950.197,00 dan realisasi sebesar Rp38.790.745,00 atau setara dengan 51,76%. *Output* kegiatan adalah 4 dokumen pelaporan (LAKIP, LPPD, LKPJ, DLL) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah sebesar Rp1.540.478.372,00 dengan realisasi sebesar Rp462.248.693,00 setara dengan 30,01%

- 1) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan dan Sewa Lapangan Olah Raga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau setara dengan 40,00%. *Output* kegiatan adalah 48 kali kegiatan olahraga senam. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kegiatan olah raga di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp170.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp138.625.003,00 atau setara dengan 81,54%. *Output* kegiatan adalah optimalisasi

sarana dan prasarana kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor penunjang peralatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;

- 3) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.030.848.372,00 dan realisasi sebesar Rp99.556.327,00 atau setara dengan 9,66%. *Output* kegiatan adalah 1 kegiatan pemeliharaan atap gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 4) Belanja Jasa Angkut Sampah dan Langganan TV berbayar yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp113.227.113,00 atau setara dengan 90,58%. *Output* kegiatan adalah 24 kali ongkos angkut sampah dan 1 paket tv berbayar. *Outcome* kegiatan adalah optimalisasi sarana dan prasarana kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 5) Penyediaan Makanan dan Minuman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.630.000,00 dan realisasi sebesar Rp104.840.250,00 atau setara dengan 52,52%. *Output* kegiatan adalah 12 bulan snack dan makan rapat *Outcome* kegiatan adalah tersedianya makanan dan minuman rapat.

j. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah sebesar Rp4.620.968.504,00 dengan realisasi sebesar Rp4.457.914.470,00 setara dengan 96,47%.

- 1) Pengadaan Pakaian PNS beserta kelengkapannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp147.318.500,00 atau setara dengan 98,21%. *Output* kegiatan adalah 148 stel pakaian kerja. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan seragam PDH dan pakaian adat;
- 2) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah 66 stel dan kelengkapan porpemprov. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp511.990.378,00 dan realisasi sebesar Rp510.704.197,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah 66 stel dan 10 orang *cleaning service*, 1 paket taman. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya kebersihan gedung dan bangunan kantor, taman dan pekarangan;
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp433.492.000,00 dan realisasi sebesar Rp423.346.150,00 atau setara dengan 97,66%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya 32 (tiga puluh dua) buah kendaraan roda 4 (empat), 3 (tiga) buah alat berat dan 20 (dua puluh) kendaraan roda 28 (dua puluh delapan). *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 5) Belanja BBM yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.996.400,00 dan realisasi sebesar Rp299.996.400,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah bahan bakar minyak. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan BBM selama 12 bulan di Badan

- Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 6) Belanja Jasa Kantor yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp781.197.530,00 dan realisasi sebesar Rp779.219.907,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah 9 orang pengemudi lapangan, 9 orang tenaga keamanan *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan supir dan keamanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 7) Belanja Jasa Perpanjangan STNK yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp82.658.450,00 atau setara dengan 82,66%. *Output* kegiatan adalah 30 kendaraan Roda 4 dan 40 kendaraan Roda 2 perpanjangan STNK. *Outcome* kegiatan adalah optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp425.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp352.907.929,00 atau setara dengan 83,04%. *Output* kegiatan adalah 12 kali pembayaran telepon, listrik, surat kabar/majalah lokal/nasional serta langganan internet. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran;
 - 9) Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.960.746,00 dan realisasi sebesar Rp119.429.638,00 atau setara dengan 99,56%. *Output* kegiatan adalah 4 kali pembelanjaan alat tulis kantor. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya administrasi perkantoran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.613.450,00 dan realisasi sebesar Rp414.603.852,00 atau setara dengan 92,21%. *Output* kegiatan adalah makan

- minum rapat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran;
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.300.218.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.278.229.447,00 atau setara dengan 98,31%. *Output* kegiatan adalah 2150 HOK perjalanan Dinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;

k. Program Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kinerja Program Kesatuan Bangsa dan Politik yakni tingkat bina kesatuan bangsa dan tingkat bina politik demokratisasi adalah sebesar 65,50 poin dari target sebesar 68,79-70,78 poin. Alokasi anggaran Program Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp9.548.824.243,00 dengan realisasi sebesar Rp8.941.759.645,00 setara dengan 93,64%.

- (1) Kegiatan Jambore Organisasi Masyarakat (Ormas) di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi sebesar Rp349.666.530,00 dan realisasi sebesar Rp330.600.000,00 atau setara dengan 94,45%. *Output* kegiatan adalah jumlah anggota Ormas yang mengikuti sosialisasi pemahaman tentang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 melalui penyelenggaraan 2 kali *capacity building outdoor* yang diikuti oleh 300 orang pengurus Ormas di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terjalinnnya harmonisasi anggota Ormas di Jawa Barat dalam mendukung pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Tahun 2019;
- (2) Kegiatan Penguatan Pemahaman Kearifan Lokal bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.342.750,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah jumlah pelaku budaya yang mengikuti penguatan pemahaman kearifan lokal melalui 1 kali sosialisasi penguatan pemahaman kearifan lokal bagi pelaku budaya di Jawa Barat yang diikuti oleh 150 orang pelaku budaya. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya pelaku budaya yang memahami kearifan lokal untuk

- menjaga kelestarian budaya di Jawa Barat dari pengaruh globalisasi;
- (3) Kegiatan Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi sebesar Rp393.679.850,00 dan realisasi sebesar Rp375.865.600,00 atau setara dengan 95,47%. *Output* kegiatan adalah jumlah anggota Ormas yang mengikuti pelatihan wirausaha melalui 1 kali sosialisasi pelatihan Wirausaha yang diikuti oleh 150 orang anggota Ormas di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya wirausaha baru bagi anggota Ormas di Jawa Barat;
 - (4) Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp349.250.000,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah jumlah pengurus RT/RW dan generasi muda yang mengikuti sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat melalui 2 kali sosialisasi yang diikuti oleh 300 orang pengurus RT/RW dan Generasi Muda. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat/generasi muda;
 - (5) Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Ormas bagi Pengurus Ormas dan Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp279.230.250,00 atau setara dengan 93,07%. *Output* kegiatan adalah 250 orang anggota ormas dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi undang-undang tentang keormasan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman anggota Ormas dan Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab/kota tentang undang-undang keormasan;
 - (6) Kegiatan Verifikasi Ormas, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp100.000,00 dan realisasi sebesar Rp69.768.000,00 atau setara dengan 69,76%. *Output* kegiatan adalah 200 Ormas yang terdata keberadaannya di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terinformasikannya data keberadaan dan kegiatan Ormas di Jawa Barat yang valid dan akurat;
 - (7) Kegiatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp1.050.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp921.850.900,00 atau setara dengan 87,79%. *Output* kegiatan adalah jumlah pengurus FKUB dan generasi muda lintas agama yang mengikuti dialog kerukunan umat beragama dan pemberian *Toleransi Award* melalui 1 kali *Trainer For Volunteer* bagi 30 masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan 3 kali *Compassionate Village* bagi 30 masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, 1 kali sosialisasi bagi 250 orang masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, 1 kali FGD dan Kajian Welas Asih Award. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya harmoni keberagaman masyarakat dalam menunjang kondusifitas daerah di Jawa Barat;

- (8) Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.335.750,00 atau setara dengan 18,33%. *Output* kegiatan adalah 10 Ormas yang terpantau kegiatannya di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terbinanya kegiatan Ormas yang disesuaikan dengan norma dan ketentuan undang-undang Ormas;
- (9) Kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan bagi Pengurus Partai Politik, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.899.810,00 atau setara dengan 93,94%. *Output* kegiatan adalah 120 pengurus partai politik yang mengikuti bimbingan teknis bantuan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengurus partai politik yang memahami teknis pengelolaan bantuan keuangan;
- (10) Kegiatan Gebyar Jawa Barat memilih menjelang pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPD dan pemilihan presiden tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp962.395.000,00 atau setara dengan 96,23%. *Output* kegiatan adalah jumlah masyarakat di Jawa Barat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPD dan pemilihan presiden tahun 2019 sebanyak 1500 orang melalui pentas seni mengenai partisipasi dalam pileg, pemilihan DPD dan pemilihan presiden. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

- pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPD dan pemilihan presiden tahun 2019;
- (11) Kegiatan Jambore Infrastuktur Politik Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp249.265.000,00 atau setara dengan 99,70%. *Output* kegiatan adalah jumlah anggota partai, tokoh masyarakat dan ormas sebanyak 150 orang yang berkumpul untuk berkomunikasi dan kerjasama setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres melalui 1 kali pertemuan. *Outcome* kegiatan adalah rekomendasi bagi pimpinan untuk bahan kebijakan pembangunan infrastuktur politik di Jawa Barat;
 - (12) Kegiatan Penguatan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp192.081.500,00 atau setara dengan 96,04%. *Output* kegiatan adalah jumlah anggota partai, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sebanyak 100 orang yang mengikuti sosialisasi tentang pemahaman aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui 2 kali sosialisasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat;
 - (13) Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp249.999.000,00 dan realisasi sebesar Rp243.825.000,00 atau setara dengan 97,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah anggota partai, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat di Jawa Barat sebanyak 132 orang yang mengikuti sosialisasi tentang pendidikan politik melalui 2 kali sosialisasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman politik pembangunan bagi masyarakat di Jawa Barat;
 - (14) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp319.850.608,00 dan realisasi sebesar Rp319.174.180,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen pemantauan perkembangan politik di 27 kab/kota di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah rekomendasi bagi pimpinan untuk penentuan kebijakan kondusifitas di Jawa Barat;
 - (15) Kegiatan Penguatan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan

- Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp245.337.500,00 atau setara dengan 98,13%. *Output* kegiatan adalah jumlah anggota partai, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat di Jawa Barat sebanyak 200 orang yang mengikuti sosialisasi tentang sistem demokratisasi berbasis kearifan lokal melalui pentas seni. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman sistem demokratisasi berbasis kearifan lokal;
- (16) Kegiatan Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Wilayah Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp1.138.006.115,00 realisasi sebesar Rp1.115.693.315,00 atau setara dengan 98,03%. *Output* kegiatan adalah 200 orang peserta dari unsur intelijen di Jawa Barat dalam mendorong terciptanya stabilitas keamanan dalam mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di daerah. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sistem kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini dalam menjaga kondusifitas di Daerah;
- (17) Kegiatan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp449.999.888,00 realisasi sebesar Rp439.863.739,00 atau setara dengan 97,74%. *Output* kegiatan adalah 162 orang dari unsur Tim Terpadu provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama Tim Terpadu penanganan konflik sosial provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan konflik sosial di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya kinerja Tim Terpadu penanganan konflik sosial provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan kondusifitas di Jawa Barat;
- (18) Kegiatan Pengawasan Orang Asing di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp449.856.220,00 realisasi sebesar Rp444.609.299,00 atau setara dengan 98,83%. *Output* kegiatan adalah 200 orang peserta dari unsur Tim Pora Jawa Barat dalam meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kerjasama aparatur dan aparat keamanan dalam pengawasan kegiatan dan keberadaan orang asing di daerah. *Outcome* kegiatan adalah Terwujudnya situasi dan

- kondisi daerah yang kondusif dari dampak keberadaan serta kegiatan orang asing di Jawa Barat;
- (19) Kegiatan Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara bagi generasi muda, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp349.872.324,00 realisasi sebesar Rp326.089.973,00 atau setara dengan 93,20%. *Output* kegiatan adalah jumlah generasi muda yang mengikuti sosialisasi tentang tata nilai dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Jawa Barat sebanyak 300 orang melalui 2 kali sosialisasi. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya pemahaman generasi muda tentang tata nilai dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Jawa Barat;
- (20) Kegiatan Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp249.572.441,00 realisasi sebesar Rp244.632.500,00 atau setara dengan 98,02%. *Output* kegiatan adalah jumlah generasi muda yang memahami tentang pembauran kebangsaan di Jawa Barat sebanyak 80 orang melalui 1 kali sosialisasi. *Outcome* kegiatan adalah jumlah generasi muda yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pembauran kebangsaan;
- (21) Kegiatan Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp249.269.222,00 realisasi sebesar Rp246.044.222,00 atau setara dengan 98,70%. *Output* kegiatan adalah jumlah generasi muda yang mengikuti sosialisasi tentang Pendidikan Bela Negara sebanyak 120 orang melalui 1 kali sosialisasi. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya pemahaman kesadaran bela negara;
- (22) Kegiatan Peningkatan Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp149.765.414,00 realisasi sebesar Rp148.680.414,00 atau setara dengan 99,27%. *Output* kegiatan adalah 100 orang peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan peran FPK dari unsur pengurus Forum Pembauran Kebangsaan melalui 1 kali Sosialisasi. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya masyarakat yang harmonis di Jawa Barat;

- (23) Kegiatan Diseminasi Nilai-Nilai Kebangsaan Terhadap Pengembangan Seni dan Budaya Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp199.412.717,00 realisasi sebesar Rp194.358.000,00 atau setara dengan 97,46% *Output* kegiatan adalah jumlah pelaku seni dan budaya yang memahami nilai-nilai kebangsaan terhadap pembangunan seni dan budaya di Jawa Barat sebanyak 30 Orang melalui studi banding ke D.I. Yogyakarta. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya pemahaman pelaku seni dan budaya tentang nilai-nilai kebangsaan terhadap pembangunan seni dan budaya di Jawa Barat;
- (24) Kegiatan Pemantapan Ideologi Bangsa, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp249.997.414,00 realisasi sebesar Rp179.167.350,00 atau setara dengan 71,66%. *Output* kegiatan adalah jumlah generasi muda yang mengikuti sosialisasi tentang ideologi bangsa sebanyak 90 Orang melalui 1 kali sosialisasi. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya pemahaman generasi muda tentang ideologi bangsa;
- (25) Kegiatan Peningkatan Ideologi Bangsa dalam Rangka Pemantapan Etika dan Budaya Politik di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp400.000.000,00 realisasi sebesar Rp392.899.594,00 atau setara dengan 98,22%. *Output* kegiatan adalah jumlah kader generasi muda yang mengikuti sosialisasi tentang etika dan budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebanyak 150 orang melalui 2 kali sosialisasi. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya pemahaman generasi muda tentang etika dan budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- (26) Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Mitra Strategis Kesbangpol se-Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp199.953.500,00 realisasi sebesar Rp197.075.000,00 atau setara dengan 98,58%. *Output* kegiatan adalah sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi mitra-mitra kesatuan bangsa dan politik se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah rekomendasi bagi pimpinan sebagai bahan pengambil kebijakan dalam menunjang kondusifitas daerah;
- (27) Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA), yang dilaksanakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan alokasi sebesar Rp149.590.000,00 realisasi sebesar Rp73.850.000,00 atau setara dengan 49,36%. *Output* kegiatan adalah terbinanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya Jawa Barat yang kondusif, aman dan sejahtera.

1. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yakni persentase ketersediaan dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan yang akurat, tepat waktu dan akuntabel adalah sebesar 79,75%. dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp1.148.475.130,00 dengan realisasi sebesar Rp 915.918.450,00 setara dengan 79,75%.

- (1) Kegiatan Forum OPD Bidang Kesbangpol, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan anggaran sebesar Rp399.247.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp313.004.800,00 setara 78,39%. *Output* kegiatan adalah dokumen rencana kerja pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya tata hubungan kerja antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Jawa Barat; Terbangunnya sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi bidang Kesbangpol se-Jawa Barat dalam penanganan isu-isu strategis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Kegiatan Penatausahaan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan anggaran sebesar Rp99.998.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp98.939.200,00 setara 98,84%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya penatausahaan keuangan selama satu tahun; terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Jabar. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan yang akurat dan tepat waktu;

- (3) Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan anggaran sebesar Rp399.994.280,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 300.872.350,00 setara 75,21%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya penyusunan evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terumuskan dan tersusunnya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk RENJA 2020, RKT 2020, dan RKA/DPA 2020; terumuskan dan tersusunnya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat tahun 2020 melalui RKA/DPA Perubahan tahun 2020; tersusunnya LKPJ/LKPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat; terselenggara dan tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dalam bentuk pelaporan bulanan (laporan kinerja, laporan sistem TEPRAs dan laporan penyerapan anggaran), pelaporan triwulan, dan pelaporan semesteran; tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
- (4) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan anggaran sebesar Rp249.235.050,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 203.202.100,00 setara 81,53%. *Output* kegiatan adalah terkelolanya sistem informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat yang komprehensif melalui Rapat koordinasi Data Informasi dengan Kesatuan Bangsa dan Politik kab/kota se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya komunikasi dan sinkronisasi data bidang kesatuan bangsa dan politik se-Jawa Barat; terverifikasinya data bidang kesatuan bangsa dan politik se-Jawa Barat; terkelolanya data bidang kesatuan bangsa dan politik se-Jawa Barat.

m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni tingkat pemenuhan sarana dan prasarana

kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar 82,54%. dari target sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp721.876.500,00 dengan realisasi sebesar Rp595.840.814,00 - setara dengan 82,54%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp256.816.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp169.330.814,00 setara 65,93%. *Output* kegiatan adalah tersedianya pendukung fasilitas kantor. *Outcome* kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp465.060.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 426.510.000,00 setara 91,71%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pelaksanaan tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

n. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar 88,52%. dari target sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp5.185.633.846,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.590.607.496,00 setara dengan 88,53%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 0 setara 0%. *Output* kegiatan 85 persen terciptanya manajemen sumber daya aparatur yang berbasis kompetensi dan komprehensif. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya kursus-kursus diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur;

- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp625.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp606.332.662,00 setara 97,01%. *Output* kegiatan jumlah jasa kebersihan dan keamanan. *Outcome* kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (3) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp429.403.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp308.478.575,00 setara 71,84%. *Output* kegiatan jumlah kendaraan Dinas atau operasional yang terpelihara *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas atau operasional terpelihara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp227.349.047,00 setara 75,78%. *Output* kegiatan meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor dan sewa mesin *photo copy*;
- (5) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp864.948.204,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp809.043.793,00 setara 93,54%. *Output* kegiatan tersedianya jasa surat kabar/majalah dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional dalam mendukung tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp2.267.250.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.157.536.819,00 setara 95,16%. *Output* kegiatan terwujudnya administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional dalam mendukung tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Sinergitas Kapasitas Aparatur Sipil Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp99.034.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp90.399.600,00 setara 91,28%. *Output* kegiatan terciptanya peningkatan kualitas dan kapasitas kinerja pegawai khususnya pengelola kepegawaian; tejalannya kerjasama mediasi dalam memberikan solusi dan sinergitas kapasitas aparatur sipil negara; terciptanya SDM aparatur yang profesional dalam menghadapi persaingan global. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya sinergitas pelaksanaan program kerja, peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta program kepegawaian dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas aparatus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- (8) Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Kearsipan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp49.998.642,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp34.617.000,00 setara 69,24%. *Output* kegiatan terwujudnya tata pengelolaan arsip pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya tata pengelolaan arsip pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp 450.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 356.850.000,00 setara 79,30%. *Output* manajemen sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berbasis kompetensi dan komprehensif. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur;

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

a. Permasalahan

- (1) Masih tingginya ancaman konflik sosial dan konflik agama yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- (2) Masih rendahnya kesiapsiagaan bencana masyarakat;
- (3) Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda yang berlaku.

b. Solusi

- (1) Optimalisasi deteksi dini konflik sosial dan konflik agama;
- (2) Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui sosialisasi dan pembentukan desa tangguh bencana;
- (3) Peningkatan pengawasan dan penegakan Perda.

6. Urusan Sosial

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Sosial tahun 2019 adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial dengan realisasi sebesar 72,43% dari target sebesar 59,81% dan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), LKS, BU yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dengan realisasi sebesar 50,82% dari target sebesar 40%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Capaian Indikator Kinerja Program pelayanan rehabilitasi sosial yakni persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial adalah sebesar 0,58% dari target sebesar 0,22%. Alokasi anggaran program pelayanan rehabilitasi sosial adalah sebesar Rp41.094.217.732,00,00 dengan realisasi sebesar Rp39.221.814.414,00 setara dengan 95,44%.

- (1) Kegiatan Layanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.729.926.478,00 dan realisasi Rp2.352.083.564,00 atau setara dengan 86,16%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani sebanyak 360 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (2) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Anak Berhadapan dengan Hukum UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp242.448.400,00 atau setara dengan 96,98%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani sebanyak 241 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (3) Kegiatan Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp9.799.994.040,00 dan

- realisasi Rp9.178.931.358,00 atau setara dengan 93,66%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani sebanyak 407 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (4) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran di UPTD panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.918.750,00 dan realisasi Rp466.887.222,00 atau setara dengan 93,39%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani sebanyak 407 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
 - (5) Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.799.800.000,00 dan realisasi Rp2.708.095.002,00 atau setara dengan 96,72%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani sebanyak 300 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
 - (6) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp849.993.750,00 dan realisasi Rp842.038.500,00 atau setara dengan 99,06%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani sebanyak 300 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
 - (7) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp9.002.493.647,00 dan realisasi Rp8.981.943.991,00 atau setara dengan 99,77%. *Output* kegiatan adalah jumlah lanjut usia yang dilayani sebanyak 530 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
 - (8) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran kelayan Lanjut Usia di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi

- Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp305.000.000,00 dan realisasi Rp298.106.096,00 atau setara dengan 93,50%. *Output* kegiatan adalah jumlah lanjut usia yang dilayani sebanyak 530 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (9) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran PPKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.010.000.000,00 dan realisasi Rp787.048.250,00 atau setara dengan 77,93%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani sebanyak 1026 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (10) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PPKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.799.999.971,00 dan realisasi Rp2.484.445.000,00 atau setara dengan 88,73%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani sebanyak 1026 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (11) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp534.849.350,00 dan realisasi Rp534.240.843,00 atau setara dengan 99,89%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani sebanyak 120 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (12) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.849.964.318,00 dan realisasi Rp2.826.635.692,00 atau setara dengan 99,18%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani (120 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;

- (13) Kegiatan Layanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja Di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.774.904.000,00 dan realisasi Rp2.754.276.000,00 atau setara dengan 99,26%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan remaja putus sekolah yang dilayani (271 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS;
- (14) Penerimaan dan Penyaluran Remaja Putus Sekolah di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp650.000.000,00 dan realisasi Rp618.292.500,00 atau setara dengan 95,12%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan remaja putus sekolah yang dilayani (271 orang). *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS;
- (15) Kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial di luar balai yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp459.728.967,00 dan realisasi Rp458.588.500,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani 238 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS;
- (16) Kegiatan Bimbingan Sosial, Penangan dan Pencegahan Korban Tindak Kekerasan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp404.014.945,00 dan realisasi Rp401.893.250,00 atau setara dengan 99,47%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani (517 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (17) Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp449.968.920,00 dan realisasi Rp434.490.000,00 atau setara dengan 96,56%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan lanjut usia dan anak yang dilayani (26 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;

- (18) Kegiatan Lanjut Usia Terlantar di Luar Balai yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp258.492.426,00 dan realisasi Rp250.725.300,00 atau setara dengan 97,00%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kelayan lanjut usia terlantar yang dilayani (110 orang). *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (19) Kegiatan Penanganan Dan Pemulangan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial Dan Eks Psikotik) Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp421.777.010,00 dan realisasi Rp420.405.700,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani (300 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (20) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika di Luar Balai yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp211.999.278,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp211.189.250,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah jumlah korban narkotika yang dilayani (203 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (21) Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bidang Rehsos yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.999.776,00 dan realisasi Rp378.949.150,00 atau setara dengan 94,74%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani (175 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (22) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar balai yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp649.999.900,00 dan realisasi Rp617.384.022,00 atau setara dengan 94,98%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan disabilitas yang dilayani (145 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (23) Kegiatan Hari Disabilitas Internasional Tk Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp274.997.799,00 dan realisasi Rp273.543.200,00 atau setara

- dengan 99,47%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan disabilitas yang dilayani (203 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (24) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Panti yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp101.219.258,00 dan realisasi Rp100.495.500,00 atau setara dengan 99,28%. *Output* kegiatan adalah jumlah kelayan lanjut usia yang dilayani (500 orang). *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (25) Kegiatan Penanganan Anak Jalanan Terpadu Bersama Kab/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp157.998.383,00 dan realisasi Rp151.598.150,00 atau setara dengan 95,95%. *Output* kegiatan adalah jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi (yang dilayani (81 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan PSKS dalam penanganan kesejahteraan sosial;
- (26) Kegiatan Penanganan Anak Terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp229.999.890,00 dan realisasi Rp228.350.850,00 atau setara dengan 99,28%. *Output* kegiatan adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang turut berpartisipasi (yang dilayani (242 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan PSKS dalam penanganan kesejahteraan sosial;
- (27) Kegiatan Anak Berhadapan dengan Hukum yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 209.992.019,00 dan realisasi sebesar Rp 208.924.650,00 atau setara dengan 99,49%. *Output* kegiatan adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang turut berpartisipasi (180 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan PSKS dalam penanganan kesejahteraan sosial.

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Capaian Indikator Kinerja Program perlindungan dan jaminan sosial yakni persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial adalah sebesar 37,20% dari target sebesar 37,20%. Alokasi anggaran program perlindungan dan jaminan sosial adalah sebesar Rp5.756.882.658,00,00 dengan realisasi sebesar Rp5.296.806.862,00 setara dengan 92,01%.

- (1) Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.020.030.549,00 dan realisasi Rp1.005.019.072,00 atau setara dengan 98,53%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin dengan pemberdayaan PSKS sebagai pendamping (5295 orang) *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (2) Perlindungan Sosial Korban Bencana yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.286.853.750,00 dan realisasi Rp3.859.487.140,00 atau setara dengan 90,03%. *Output* kegiatan adalah terlindunginya korban bencana dalam masa tanggap darurat (3848 orang, 920 KK). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (3) Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp449.998.359,00 dan realisasi Rp432.300.650 atau setara dengan 96,07%. *Output* kegiatan adalah jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam kesejahteraan sosial (589 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS.

c. Program Pemberdayaan Sosial

Capaian Indikator Kinerja Program pemberdayaan sosial yakni persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), LKS, BU dan seterusnya yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dengan capaian sebesar 38,60% dari target sebesar 38,14%. Alokasi anggaran Program Pemberdayaan Sosial adalah sebesar Rp5.032.799.548,00,00 dengan realisasi sebesar Rp4.869.395.029,00 - setara dengan 96,75%.

- (1) Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat yang dilaksanakan Dinas Sosial

- Provinsi Jawa Barat sebesar Rp274.999.300,00 dan realisasi Rp274.999.300,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah PSKS yang diberdayakan (250 orang). *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (2) Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp224.997.659,00 dan realisasi Rp222.264.250,00 atau setara dengan 98,79%. *Output* kegiatan adalah jumlah PSKS yang diberdayakan, (40 LKS) *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap PSKS untuk kesejahteraan sosial;
 - (3) Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.499.949.864,00 dan realisasi Rp2.497.732.250,00 atau setara dengan 99,91%. *Output* kegiatan adalah jumlah TKSK yang diberdayakan (627 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
 - (4) Peningkatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.703,00 dan realisasi Rp194.200.814,00 atau setara dengan 97,10%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta rapat koordinasi jumlah dunia usaha yang diberdayakan (54 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
 - (5) Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp261.993.522,00 dan realisasi Rp259.771.500,00 atau setara dengan 99,15%. *Output* kegiatan adalah jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuh (400 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
 - (6) Layanan Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS)/Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.712.984,00 dan realisasi Rp353.778.000,00 atau setara dengan

- 70,80%. *Output* kegiatan adalah jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS (75 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (7) Pengembangan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp471.148.434,00 dan realisasi Rp468.534.867,00 atau setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah jumlah PSKS yang bertambah pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan UKS (400 PSKS). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap PSKS untuk kesejahteraan sosial;
- (8) Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan, Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp599.997.898,00 dan realisasi Rp598.111.048,00 atau setara dengan 99,69%. *Output* kegiatan adalah jumlah TKSK yang bertambah pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan UKS (165 TKSK). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap PSKS untuk kesejahteraan sosial.

d. Program Penanganan Fakir Miskin

Capaian Indikator Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin yakni persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial dengan capaian sebesar 53,81% dari target sebesar 53,83%. Alokasi anggaran program penanganan fakir miskin adalah sebesar Rp3.096.895.705,00 dengan realisasi sebesar Rp3.058.380.241,00 - setara dengan 98,76%.

- (1) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.998.240,00 dan realisasi Rp399.998.190,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah keluarga miskin perkotaan yang dilayani (499 orang) dan PSKS yang berpartisipasi (48 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;

- (2) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.999.110,00 dan realisasi Rp496.319.110,00 atau setara dengan 99,26%. *Output* kegiatan adalah jumlah keluarga miskin pesisir yang dilayani (430 orang) dan PSKS yang berpartisipasi (83 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (3) Penanganan Fakir Miskin Pedesaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp718.942.073,00 dan realisasi Rp684.261.659,00 atau setara dengan 95,18%. *Output* kegiatan adalah jumlah keluarga miskin pedesaan yang dilayani (760 orang) dan PSKS yang berpartisipasi (91 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS;
- (4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.477.956.282,00 dan realisasi Rp1.477.801.282,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah keluarga miskin yang dilayani (141 orang) dan PSKS yang berpartisipasi (545 orang). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PPKS.

e. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial

Capaian indikator kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial yakni tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Sosial adalah sebesar 100%. dari target sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian Dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial adalah sebesar Rp2.881.713.080,00 dengan realisasi sebesar Rp2.488.840.316,00 setara dengan 86,37%.

- (1) Kegiatan Sinergitas Penyusunan Program Dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.963,00 dan realisasi sebesar Rp241.870.950 atau setara dengan 96,75%. *Output* kegiatan adalah 1 kali rapat forum OPD, 3 kali koordinasi sinergitas program kesejahteraan

- sosial. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya sinergitas penyusunan program dan aspek pembangunan kesejahteraan sosial;
- (2) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp94.924.964,00 dan realisasi sebesar Rp94.924.500,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
 - (3) Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Sosial Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp260.649.200,00 dan realisasi sebesar Rp258.535.797,00 atau setara dengan 99,19%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya koordinasi intern dan antar lembaga dalam pengelolaan keuangan. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan mengenai regulasi perundang-undangan keuangan;
 - (4) Sinkronisasi Data PMKS dan PSKS dengan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp227.999.900,00 dan realisasi sebesar Rp176.935.750,00 atau setara dengan 77,60%. *Output* kegiatan adalah rapat sinkronisasi data verivali data. *Outcome* kegiatan adalah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - (5) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.440.999.200,00 dan realisasi sebesar Rp1.201.102.432,00 atau setara dengan 83,35%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya RKA dan DPA, Renja, LKIP, Laporan Akhir Studi Kebutuhan (Kajian) Panti Khusus bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa ODGJ. *Outcome* Kegiatan adalah dokumen RKA dan DPA, Renja, LKIP, Laporan Akhir Studi Kebutuhan (Kajian) Panti Khusus bagi Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ;
 - (6) Perencanaan Program dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

anggaran sebesar Rp257.139.933,00 dan realisasi sebesar Rp186.792.639,00 atau setara dengan 72,64%. *Output* kegiatan adalah terjalinnya sinergitas program kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota, dan terpantaunya pelaksanaan program kegiatan di 8 UPTD dan 13 satpel Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah koordinasi program dengan kab/kota 120 orang, dan pengendalian dan evaluasi program 8 UPTD dan 13 Satpel Dinas Sosial;

- (7) Konsultasi dalam rangka sinergitas program dan aspek pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.999.920,00 dan realisasi sebesar Rp328.678.248,00 atau setara dengan 93,91%. *Output* kegiatan adalah terjalinnya sinergitas program kegiatan kesejahteraan sosial. *Outcome* kegiatan adalah sinergitas Program Kegiatan Kesejahteraan Sosial.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial yakni tingkat pemenuhan sapras kerja Dinas Sosial adalah sebesar 100%. dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Sosial adalah sebesar Rp24.807.534.961,00 dengan realisasi sebesar Rp21.757.738.035,00 setara dengan 87,71%.

- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.306.368.983,00 dan realisasi sebesar Rp1.283.302.760,00 atau setara dengan 98,23%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya belanja modal sarana dan prasarana. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Dinas Sosial;
- (2) Pembangunan Gedung BPPKS Cibabat Cimahi Tahap 2 yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.499.956.078,00 dan realisasi sebesar Rp2.874.883.149,00 atau setara dengan 82,14%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS). *Outcome* kegiatan

- adalah pemanfaatan sarana dan prasarana UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- (3) Pembangunan Gedung Sub Unit RPSTW Karawang yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.649.918.985,00 dan realisasi sebesar Rp3.846.544.186,00 atau setara dengan 83,11%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan Prasarana RPSTW Karawang. *Outcome* kegiatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana RPSTW Karawang;
 - (4) Pembangunan Asrama Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Bandung yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.499.999.955,00 dan realisasi sebesar Rp4.528.163.286,00 atau setara dengan 82,33%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya Gedung Asrama Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung. *Outcome* kegiatan adalah pemanfaatan Gedung Asrama Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung;
 - (5) Pembangunan Gedung Asrama Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Pangandaran yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.501.961.107,00 dan realisasi sebesar Rp1.116.353.298,00 atau setara dengan 74,33%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya Gedung Asrama Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Pangandaran. *Outcome* kegiatan adalah pemanfaatan Gedung Asrama Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Pangandaran;
 - (6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD PSRPD Cibabat – Cimahi yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.948.637,00 dan realisasi sebesar Rp991.262.349,00 atau setara dengan 99,13%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan bangunan dan pengadaan kebutuhan klien. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan pelayanan bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan terhadap klien penyandang disabilitas;
 - (7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor dan Satuan Pelayanan Subang

yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp967.533.800,00 atau setara dengan 96,76%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan bangunan dan pengadaan kebutuhan klien. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan pelayanan bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan terhadap klien anak berhadapan dengan hukum;

- (8) Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp982.381.807,00 atau setara dengan 98,24%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan bangunan dan pengadaan kebutuhan klien. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan pelayanan bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan terhadap klien lanjut usia;
- (9) Revitalisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp997.786.000,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan bangunan dan pengadaan kebutuhan klien. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan pelayanan bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan terhadap klien remaja putus sekolah;
- (10) Renovasi Sarana dan Prasarana Bangunan Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp850.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp843.255.100,00 atau setara dengan 99,21%. *Output* kegiatan adalah renovasi bangunan asrama klien. *Outcome* Kegiatan adalah bangunan asrama klien siap pakai;
- (11) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.431.216,00 dan realisasi sebesar Rp973.215.000,00 atau setara dengan 97,38%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan bangunan

- dan pengadaan kebutuhan klien. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan pelayanan bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan terhadap klien wanita tuna sosial;
- (12) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.335.057.300,00 atau setara dengan 93,40%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan bangunan dan pengadaan kebutuhan klien. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan pelayanan bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan terhadap klien anak terlantar dan anak membutuhkan perlindungan khusus.

g. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sosial

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sosial yakni tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Sosial adalah sebesar 100%. dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sosial adalah sebesar Rp25.598.777.598,00 dengan realisasi sebesar Rp24.284.974.451,00 - setara dengan 94,87%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.127.947.274,00 dan realisasi sebesar Rp1.066.702.654,00 atau setara dengan 94,57%. *Output* kegiatan adalah akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (2) Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga Serta Pakaian Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp478.400.000,00 atau setara dengan 95,74%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan kerohanian dan olah raga bagi 400- 500 orang ASN dan Non ASN Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah kualitas keimanan ASN dan

- tingkat kebugaran ASN di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (3) Penyediaan Diklat/Kursus Singkat, dan Bimtek Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.910.476,00 dan realisasi sebesar Rp459.258.800,00 atau setara dengan 76,55%. *Output* kegiatan adalah terdidiknya dan terlatihnya 376 Org ASN dalam penambahan pengetahuan dan wawasan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas /kompetensi ASN Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
 - (4) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.740.000,00 dan realisasi sebesar Rp383.430.569,00 atau setara dengan 85,26%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya listrik, telepon, air. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
 - (5) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.264.933.947,00 dan realisasi sebesar Rp1.255.905.400,00 atau setara dengan 99,29%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya honor satpam /kamdal dan OB serta tersedianya alat2 keamanan dan kebersihan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
 - (6) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.993.500,00 dan realisasi sebesar Rp719.582.704,00 atau setara dengan 71,96%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional -Roda 2 Sebanyak 52 Unit -Roda 4 Sebanyak 28 Unit -Roda 6 Sebanyak 4 Unit. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas siap pakai;
 - (7) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

- dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.661.402.068,00 dan realisasi sebesar Rp1.649.075.305,00 atau setara dengan 99,26%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah perabotan dan fasilitas gedung kantor siap pakai;
- (8) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp348.992.500,00 atau setara dengan 99,71%. *Output* kegiatan adalah publikasi kegiatan. *Outcome* Kegiatan adalah tersampainya informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat;
- (9) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Internal Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.300.423.300,00 dan realisasi sebesar Rp1.207.954.148,00 atau setara dengan 92,89%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas dinas;
- (10) Penyediaan Barang Habis Pakai Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.998.644,00 dan realisasi sebesar Rp483.905.400,00 atau setara dengan 96,78%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran;
- (11) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD PPKS yang dilaksanakan UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah publikasi kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat;
- (12) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PPKS yang dilaksanakan UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.967.192,00 dan realisasi

- sebesar Rp26.404.000,00 atau setara dengan 82,60%. *Output* kegiatan adalah *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional - roda 2, roda 4, mesin pemotong rumput, bahan bakar minyak. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas siap pakai;
- (13) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PPKS yang dilaksanakan UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.999.200,00 dan realisasi sebesar Rp109.206.079,00 atau setara dengan 72,80%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya listrik, telepon, air. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (14) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD PPKS yang dilaksanakan UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp219.911.170,00 dan realisasi sebesar Rp219.454.000,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah perabotan dan fasilitas gedung kantor siap pakai;
- (15) Penyediaan Langganan Kantor UPTD PPKS yang dilaksanakan UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.250.000,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (16) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.992.500,00 dan realisasi sebesar Rp96.846.250,00 atau setara dengan 88,05%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas dinas;
- (17) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.999.948,00 dan realisasi sebesar Rp33.030.000,00 atau setara dengan 82,58%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai

- administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran;
- (18) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp417.724.905,00 dan realisasi sebesar Rp417.689.905,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya honor satpam /kamdal dan OB serta tersedianya alat-alat keamanan dan kebersihan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (19) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PSRPD Cibabat – Cimahi yang dilaksanakan UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.773.318,00 atau setara dengan 94,39%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya listrik, telepon, air. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (20) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD PSRPD Cibabat-Cimahi yang dilaksanakan UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp749.971.705,00 dan realisasi sebesar Rp745.715.000,00 atau setara dengan 99,43%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah perabotan dan fasilitas gedung kantor siap pakai;
- (21) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PSRPD Cibabat – Cimahi yang dilaksanakan UPTD PSRPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp71.586.708,00 atau setara dengan 95,45%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional -roda 2, roda 4, mesin pemotong rumput, bahan bakar minyak. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas siap pakai;
- (22) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD PSRPD Cibabat – Cimahi yang dilaksanakan UPTD PSRPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp548.999.867,00 dan realisasi sebesar Rp548.999.467,00 atau setara dengan

- 100%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya honor satpam /kamdal dan OB serta tersedianya alat-alat keamanan dan kebersihan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (23) Penyediaan Langganan Kantor UPTD PSRPD Cibabat – Cimahi yang dilaksanakan UPTD PSRPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp120.154.500,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan adalah akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (24) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD PSRPD Cibabat – Cimahi yang dilaksanakan UPTD PSRPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran;
- (25) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD PSRPD Cibabat – Cimahi yang dilaksanakan UPTD PSRPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.763.199,00 atau setara dengan 99,68%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas dinas;
- (26) Penyediaan Barang Habis UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor dan Satuan Pelayanan Subang yang dilaksanakan UPTD PRSABH Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.951.200,00 dan realisasi sebesar Rp43.708.525,00 atau setara dengan 87,50%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran;
- (27) Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi dan Satuan Pelayanan Subang yang dilaksanakan UPTD PRSABH Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp134.450.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp127.224.563,00 atau setara dengan 94,63%. *Output* kegiatan adalah akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (28) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Satuan Pelayanan Subang yang dilaksanakan UPTD PRSABH Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp102.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.161.000,00 atau setara dengan 95,91%. *Output* kegiatan adalah publikasi kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat;
- (29) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Panti Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor dan Satuan Pelayanan Subang yang dilaksanakan UPTD PRSABH Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp875.892.000,00 dan realisasi sebesar Rp862.779.451,00 atau setara dengan 98,50%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya honor satpam /kamdal dan OB serta tersedianya alat-alat keamanan dan kebersihan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan di Dinas sosial provinsi jawa barat;
- (30) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor dan Satuan Pelayanan Subang yang dilaksanakan UPTD PRSABH Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp65.994.400,00 dan realisasi sebesar Rp41.905.454,00 atau setara dengan 63,50%. *Output* kegiatan adalah *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional -roda 2, roda 4, mesin pemotong rumput, bahan bakar minyak. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas siap pakai;
- (31) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor dan Satuan Pelayanan Subang yang dilaksanakan UPTD PRSABH Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp374.200.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp361.984.500,00 atau setara dengan 96,74%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah perabotan dan fasilitas gedung kantor siap pakai;
- (32) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Satuan Pelayanan Subang yang dilaksanakan UPTD PRSABH Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp218.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp185.803.826,00 atau setara dengan 85,00%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya listrik, telepon, air. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (33) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor dan Satuan Pelayanan Subang yang dilaksanakan UPTD PRSABH Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp141.326.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.71.625,00 atau setara dengan 94,62%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas dinas;
- (34) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan yang dilaksanakan UPTD PRSLU Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp364.634.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.456.355,00 atau setara dengan 82,13%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya listrik, telepon, Air. *Outcome* Kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (35) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan yang dilaksanakan UPTD PSRLU Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.042.650.013,00 dan realisasi sebesar Rp2.042.567.142,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya honor satpam /kamdal dan OB serta tersedianya alat-alat keamanan dan kebersihan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya keamanan

- dan kebersihan lingkungan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (36) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan yang dilaksanakan UPTD PRSLU Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.200,00 dan realisasi sebesar Rp248.216.337,00 atau setara dengan 99,29%. *Output* adalah terpeliharanya kendaraan operasional roda 2, roda 4, mesin pemotong rumput, bahan bakar minyak. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas siap pakai;
- (37) Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan yang dilaksanakan UPTD PRSLU Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.503.442,00 atau setara dengan 99,01%. *Output* kegiatan adalah akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (38) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan yang dilaksanakan UPTD PRSLU Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.850.000,00 atau setara dengan 99,00%. *Output* kegiatan adalah publikasi kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat;
- (39) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan yang dilaksanakan UPTD PRSLU Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp174.971.850,00 dan realisasi sebesar Rp173.956.825,00 atau setara dengan 99,42%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas dinas;
- (40) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan yang dilaksanakan UPTD PRSLU Dinas Sosial Provinsi

- Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran;
- (41) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan yang dilaksanakan UPTD PRSLU Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp497.264.250,00 atau setara dengan 99,45%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah perabotan dan fasilitas gedung kantor siap pakai;
- (42) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.062.000,00 dan realisasi sebesar Rp90.960.562,00 atau setara dengan 72,73%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya listrik, telepon, air. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (43) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp829.466.401,00 dan realisasi sebesar Rp829.456.435,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya honor Satpam /Kamdal dan OB serta tersedianya alat-alat keamanan dan kebersihan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (44) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp86.525.800,00 atau setara dengan 96,14%. *Output* kegiatan adalah *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional -roda 2, Roda 4, mesin pemotong

- rumput, bahan bakar minyak. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas siap pakai;
- (45) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp732.912.188,00 atau setara dengan 97,72%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah perabotan dan fasilitas gedung kantor siap pakai;
- (46) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.850.000,00 atau setara dengan 99,00%. *Output* kegiatan adalah publikasi kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat;
- (47) Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.930.880,00 dan realisasi sebesar Rp196.209.029,00 atau setara dengan 98,14%. *Output* kegiatan adalah akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (48) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp110.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas UPTD;
- (49) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.999.915,00 dan

- realisasi sebesar Rp49.999.915,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran;
- (50) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas PRSBK dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PRSBK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp136.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp127.513.100,00 atau setara dengan 93,35%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional -roda 2, roda 4, mesin pemotong rumput, bahan bakar minyak. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas siap pakai;
- (51) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di PRSBK dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PRSBK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp674.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp673.996.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya honor satpam /kamdal dan OB serta tersedianya alat2 keamanan dan kebersihan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (52) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor PRSBK Bina Karya dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PRSBK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp88.229.382,00 atau setara dengan 73,52%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya listrik, telepon, air. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (53) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor PRSBK dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PRSBK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp170.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp162.264.850,00 atau setara dengan 95,45%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas UPTD;
- (54) Penyediaan Langganan Kantor di PRSBK dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD

- PRSBK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp235.493.760,00 dan realisasi sebesar Rp220.136.843,00 atau setara dengan 93,48%. *Output* kegiatan adalah akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (55) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di PRSBK dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PRSBK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp64.999.881,00 dan realisasi sebesar Rp64.999.630,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya opsional perkantoran;
- (56) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor di PRSBK dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PRBK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.970.700,00 atau setara dengan 99,80%. *Output* kegiatan adalah publikasi kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat;
- (57) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di PRSBK dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PRSBK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp308.982.000,00 dan realisasi sebesar Rp284.369.000,00 atau setara dengan 92,03%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah perabotan dan fasilitas gedung kantor siap pakai;
- (58) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial yang dilaksanakan UPTD PSRTS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp592.464.621,00 dan realisasi sebesar Rp584.687.135,00 atau setara dengan 98,69%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya honor satpam /kamdal dan OB serta tersedianya alat-alat keamanan dan kebersihan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan di Dinas sosial provinsi jawa barat;

- (59) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial yang dilaksanakan UPTD PSRTS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.418.728,00 atau setara dengan 75,59%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya listrik, telepon, air. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (60) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial yang dilaksanakan UPTD PSRTS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.785.200,00 dan realisasi sebesar Rp63.737.527,00 atau setara dengan 91,33%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional -roda 2, roda 4, mesin pemotong rumput, bahan bakar minyak. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas siap pakai;
- (61) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitas Sosial yang dilaksanakan UPTD PSRTS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp624.798.500,00 dan realisasi sebesar Rp615.331.000,00 atau setara dengan 98,48%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah perabotan dan fasilitas gedung kantor siap pakai;
- (62) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial yang dilaksanakan UPTD PSRTS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp142.130.170,00 dan realisasi sebesar Rp141.298.000,00 atau setara dengan 99,41%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran;
- (63) Penyediaan Langganan Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial yang dilaksanakan UPTD PSRTS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.246.820,00 dan realisasi sebesar

- Rp52.260.800,00 atau setara dengan 94,60%. *Output* kegiatan adalah akses internet dan informasi di lingkungan Dinas sosial. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (64) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial yang dilaksanakan UPTD PSRTS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp127.467.500,00 dan realisasi sebesar Rp125.642.500,00 atau setara dengan 98,57%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya Makan minum rapat dan Perjalanan Dinas. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas UPTD;
- (65) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial yang dilaksanakan UPTD PSRTS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.933.000,00 atau setara dengan 99,33%. *Output* kegiatan adalah publikasi kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat;
- (66) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PSRAMPK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.349.617,00 dan realisasi sebesar Rp86.265.022,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran;
- (67) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PSRAMPK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah publikasi kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat;

- (68) Langganan Kantor di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PSRAMPK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp161.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp60.593.775,00 atau setara dengan 87,33%. *Output* kegiatan adalah akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya akses internet dan informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (69) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PSRAMPK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.903.800,00 dan realisasi sebesar Rp195.817.403,00 atau setara dengan 97,96%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas UPTD;
- (70) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PSRAMPK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp303.974.326,00 dan realisasi sebesar Rp243.127.547,00 atau setara dengan 79,98%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya listrik, telepon, air. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya operasional perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- (71) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PSRAMPK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp295.972.848,00 dan realisasi sebesar Rp282.825.640,00 atau setara dengan 95,56%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional roda 2, roda 4, mesin pemotong rumput, bahan bakar minyak. *Outcome* kegiatan adalah kendaraan Dinas siap pakai;
- (72) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PSRAMPK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.342.355.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.333.632.739,00 atau setara dengan 99,35%. *Output* kegiatan adalah terbayarnya honor Satpam /Kamdal dan OB serta tersedianya alat-alat keamanan dan kebersihan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

- (73) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan yang dilaksanakan UPTD PSRAMPK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp439.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp436.182.000,00 atau setara dengan 99,15%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah perabotan dan fasilitas gedung kantor siap pakai.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

a. Permasalahan

- (1) Penduduk masih terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah PPKS;
- (2) Kurang optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota, serta partisipasi PSKS;
- (3) Kurangnya pemenuhan sarana prasarana dalam penanganan PMKS;
- (4) Jarak lokasi satpel dengan UPTD yg jauh menyulitkan koordinasi;
- (5) Kurangnya Sumber Daya Manusia, dan belum ketersediaannya SDM, dengan kemampuan Teknis tertentu;
- (6) Kepemilikan BPJS untuk anak asuh , belum terjangkau;
- (7) Pemanfaatan/Registrasi Online belum, semuanya turut aktif;
- (8) Biaya hidup / *living cost* anak asuh yang masuk perguruan tinggi melalui jalur bidik misi;
- (9) Penyaluran anak asuh yang sudah, usia 18 tahun.

b. Solusi

- (1) Sinkronisasi, integrasi dan sinergitas penanganan PPKS (Pemerintah Pusat, Daerah, dan unsur masyarakat/Dunia Usaha);
- (2) Melaksanakan optimalisasi penanganan PPKS melalui peran dan fungsi perangkat daerah yang relevan dan terkait;
- (3) Peningkatan fasilitas panti sosial untuk menangani PPKS;
- (4) Satpel menjadi UPTD karena secara potensi unsur persyaratan sebagai upt memenuhi setidaknya menjadi UPT kelas B;
- (5) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM berdasarkan *job* Analisa;
- (6) Fasilitasi BPJS Untuk Anak Asuh;
- (7) Sosialisasi ke Dinas kabupaten/Kota pemanfaatan layanan Registrasi online di UPTD PSRAMPK;
- (8) Mengajak pelaku usaha/CSR agar responsif terhadap permasalahan pendidikan anak asuh;
- (9) Fasilitasi Bimbingan Kewirausahaan/BLK melalui, Bimbingan Bhs Inggris, Komputer, Montir Motor dan Tata Boga.

3.3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

7. Urusan Tenaga Kerja

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan tenaga kerja tahun 2019 adalah Persentase pencari kerja yang bersertifikat dengan realisasi sebesar 0,17% dari target yang ditetapkan sebesar 0,25%; Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan dengan realisasi sebesar 18,08% dari target yang ditetapkan sebesar 5%; Persentase jumlah perusahaan yang diawasi dengan realisasi sebesar 19,20% dari target yang ditetapkan sebesar 20%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi sebanyak 400 orang dari target 500 orang dan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 830 orang dari target 1.000 orang. Alokasi anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebesar Rp13,009,526,055.00 dengan realisasi sebesar Rp11,824,050,928.00 setara dengan 90,89%.

- (1) Peningkatan Keterampilan Kerja Mandiri Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 646.658.612,00 dan realisasi sebesar Rp574.972.500,00 atau setara dengan 88,91%. *Output* keterampilan kerja mandiri sumber daya manusia bidang pariwisata sebanyak 100 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelompok rintisan kerja mandiri berdaya saing;
- (2) Kegiatan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.969.066,00 dan realisasi sebesar Rp701.329.350,00 atau setara dengan 70,14%. *Output* kegiatan adalah pemagangan dalam negeri berbasis pengguna sebanyak 20 orang, seleksi pemagangan ke luar negeri/Jepang sebanyak 600 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keahlian tenaga kerja;
- (3) Kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp124.970.088,00 dan realisasi sebesar Rp91.082.250,00 atau setara dengan 72,88%. *Output* kegiatan adalah akreditasi lembaga pelatihan kerja sebanyak 5 LPK, bimtek akreditasi sebanyak 10 orang (1 akt). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK);
- (4) Kegiatan Uji Kompetensi Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.432.458.680,00 dan realisasi sebesar Rp985.720.850,00 atau setara dengan 68,81%. *Output* kegiatan adalah uji kompetensi tenaga kerja sebanyak 400 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tenaga kerja yang kompeten di bidangnya;
 - (5) Kegiatan Bimbingan Teknis Training Need Analysis yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp117.971.979,00 dan realisasi sebesar Rp91.162.300,00 atau setara dengan 77,27%. *Output* kegiatan adalah bimtek Teknis Training Need Analysis sebanyak 20 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan, wawasan, dan keterampilan para karyawan perusahaan/pengelola LPK mengenai analisa kebutuhan pelatihan;
 - (6) Kegiatan Bimbingan Teknis Produktivitas 5 S yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.993.603,00 dan realisasi sebesar Rp96.491.550,00 atau setara dengan 85,40%. *Output* kegiatan adalah Bimbingan Teknis Produktivitas 5 S sebanyak 20 orang. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan para karyawan perusahaan mengenai tata graha lingkungan tempat bekerja;
 - (7) Kegiatan Pelatihan kerja Purna Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp229.599.911,00 dan realisasi sebesar Rp224.197.361,00 atau setara dengan 97,65%. *Output* kegiatan adalah pelatihan purna TKI sebanyak 20 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan daya saing Purna Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat;
 - (8) Kegiatan Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan

- Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.696.629.029,00 dan realisasi sebesar Rp1.692.446.000,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah Terlatihnya calon tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 140 orang. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kualitas dan daya saing Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Pelatihan Kerja Purna Pekerja Migran Indonesia melalui *Mobile Training Unit* (MTU) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp339.531.917,00 dan realisasi sebesar Rp338.275.067,00 atau setara dengan 99,63%. *Output* kegiatan adalah Pelatihan Kerja Purna Pekerja Migran Indonesia melalui *Mobile Training Unit* (MTU) sebanyak 40 orang. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya Purna PMI Jawa Barat yang memiliki jiwa wirausaha;
- (10) Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Pemasaran Latihan Kerja Mandiri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp305.322.448,00 dan realisasi sebesar Rp282.810.800,00 atau setara dengan 92,63%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan akses pencari kerja mandiri terhadap dunia usaha (sumber modal, sumber teknologi dan sumber pemasaran) sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akses pencari kerja mandiri terhadap dunia usaha (sumber modal, sumber teknologi dan pemasaran);
- (11) Kegiatan Pelatihan Kerja Mandiri melalui *mobile training unit* (MTU) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.982.667.018,00 dan realisasi sebesar Rp3.836.724.860,00 atau setara dengan 96,34%. *Output* kegiatan adalah pelatihan kerja mandiri melalui *Mobile Training Unit* (MTU) sebanyak 450 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelompok rintisan kerja mandiri berdaya saing;
- (12) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.086.768.747,00 dan realisasi sebesar Rp2.018.554.043,00 atau setara dengan 96,73%. *Output* kegiatan adalah kejuruan teknik las 48 orang, kejuruan teknik otomotif 32

- orang, kejuruan operator mesin bubut 48 orang, kejuruan mesin bubut CNC 32 orang, kejuruan pemrograman 32 orang, kejuruan listrik industri 16 orang, kejuruan PLC 16 orang, Kejuruan Menjahit 16 orang, kejuruan *forklift* 16 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya prosentasi tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja;
- (13) Kegiatan Pemasaran Alumni Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp118.918.811,00 dan realisasi sebesar Rp118.853.890,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi pengembangan jejaring informasi dengan industri 1 kali, rapat forum jejaring Komuniasi 4 kali, FGD forum HR dengan BLKK 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya penyebaran informasi dan pendayagunaan alumni;
- (14) Kegiatan Pelatihan Kerja Mandiri Sesuai Minat Usaha yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp466.275.167,00 dan realisasi sebesar Rp450.752.150,00 atau setara dengan 96,67%. *Output* kegiatan adalah pelatihan kewirausahaan berbasis arah minat usaha mandiri sebanyak 100 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelompok rintisan kerja mandiri berdaya saing;
- (15) Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Keuangan Pencari Kerja Mandiri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp348.790.979,00 dan realisasi sebesar Rp320.677.957,00 atau setara dengan 91,94%. *Output* kegiatan adalah pelatihan pengelolaan keuangan pencari kerja mandiri sebanyak 120 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keterampilan pengelolaan keuangan pencari kerja mandiri;

b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Capaian Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan realisasi sebesar 31,07% dari target sebesar 50%. Alokasi anggaran Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan adalah

sebesar Rp4,585,374,919.00 dengan realisasi sebesar Rp4,166,627,418.00 setara dengan 90,87% dan dilaksanakan melalui kegiatan adalah:

- (1) Kegiatan Penerapan Sistem Pengupahan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.444.803.737,00 dan realisasi sebesar Rp1.332.643.368,00 atau setara dengan 92,24%. *Output* kegiatan adalah ditetapkan kebijakan pengupahan di Jawa Barat 27 kab/kota. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, terjaganya eksistensi dan daya saing usaha di Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Akselerasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp892.799.160,00 dan realisasi sebesar Rp883.210.850,00 atau setara dengan 98,93%. *Output* kegiatan adalah pelayanan terhadap pengaduan perselisihan hubungan industrial 80 persen. *Outcome* kegiatan adalah pelayanan terhadap pengaduan perselisihan hubungan industrial;
- (3) Kegiatan Pembinaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp579.999.982,00 dan realisasi sebesar Rp575.243.950,00 atau setara dengan 99,18%. *Output* kegiatan adalah jumlah mediator hubungan industrial yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya sebanyak 80 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan mediator hubungan industrial se Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan LKS Tripartit yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.304.558.100,00 dan realisasi sebesar Rp 1.018.484.750,00 atau setara dengan 78,07%. *Output* kegiatan adalah rapat BP 12 kali, rapat pleno 6 kali, rapat koordinasi 1 kali, rapat BP persiapan rapat koordinasi 1 kali, rapat persiapan rapat koordinasi 1 kali, kunjungan kerja 1 kali, dan 4 kali konsolidasi/FGD/seminar serikat pekerja/serikat buruh. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha;

- (5) Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp363.213.940,00 dan realisasi sebesar Rp357.044.500,00 atau setara dengan 98,30%. *Output* kegiatan adalah pembinaan hubungan industrial, tersedianya data hubungan industrial tahun 2019 sebanyak 100 perusahaan *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pemahaman tentang hubungan kerja, meningkatnya jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pemahaman tentang kesetaraan di tempat kerja dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja adalah besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dengan capaian sebesar 35,37% dari target sebesar 60%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Kesempatan Kerja adalah sebesar Rp4,314,043,758.00 dengan realisasi sebesar Rp3.669.910.709.00 setara dengan 85,07% dan dilaksanakan melalui kegiatan adalah :

- (1) Kegiatan Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp181.058.262,00 dan realisasi sebesar Rp0 atau setara dengan 0%. *Output* kegiatan adalah nihil. *Outcome* kegiatan adalah nihil;
- (2) Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Perpanjangan Imta dan RPTKA di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp244.999.961,00 dan realisasi sebesar Rp97.456.281,00 atau setara dengan 39,78%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi pelayanan perpanjangan IMTA dan RPTKA di Jawa Barat 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah harmonisasi dengan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan PTSP tentang pelayanan perpanjangan IMTA dan RPTKA;
- (3) Kegiatan Layanan Antar Kerja melalui Gerai Layanan Info Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 95.525.528,00 dan realisasi sebesar Rp93.461.538,00 atau setara

- dengan 97,84%. *Output* kegiatan adalah layanan antar kerja dan konseling 15 Kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penempatan tenaga kerja;
- (4) Kegiatan Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp366.853.961,00 dan realisasi sebesar Rp330.188.411,00 atau setara dengan 90,01%. *Output* kegiatan adalah pembekalan dan penempatan Tenaga Kerja Lokal (AKL) sebanyak 50 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
 - (5) Kegiatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp756.759.937,00 dan realisasi sebesar Rp632.048.487,00 atau setara dengan 83,52%. *Output* kegiatan adalah penyelenggaraan bursa kerja 1 kali, penyelenggaraan bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK) 1 kali dan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja;
 - (6) Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya Pemberdayaan Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp671.999.493,00 dan realisasi sebesar Rp613.482.993,00 atau setara dengan 91,29%. *Output* kegiatan adalah padat karya pemberdayaan lingkungan sebanyak 825 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase serapan tenaga kerja;
 - (7) Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya Infrastruktur Pengerasan Jalan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp905.099.788,00 dan realisasi sebesar Rp898.989.288,00 atau setara dengan 99,32%. *Output* kegiatan adalah padat karya infrastruktur pengerasan jalan dapat memberikan kesempatan kerja secara temporer kepada 550 orang tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur. *Outcome* kegiatan adalah terserapnya tenaga kerja;
 - (8) Kegiatan Dukungan Serapan Pencari Kerja yang Terdaftar yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp466.998.426,00 dan

- realisasi sebesar Rp420.963.176,00 atau setara dengan 90,14%. *Output* kegiatan adalah dukungan serapan pencari kerja yang terdaftar 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data perluasan kesempatan kerja yang terdaftar;
- (9) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pelatihan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp271.998.053,00 dan realisasi sebesar Rp270.263.350,00 atau setara dengan 99,36%. *Output* kegiatan adalah diseminasi informasi penempatan dan perlindungan PMI Jawa Barat 200 orang dan pengolahan data dan informasi PMI asal Jawa Barat 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- (10) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terpadu yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp352.750.349,00 dan realisasi sebesar Rp313.057.185,00 atau setara dengan 88,75%. *Output* kegiatan adalah notulen kesepahaman 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase penyelesaian kasus PMI.

d. Program Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah besaran pemeriksaan perusahaan sebanyak 7.471 perusahaan dari target 12.000 perusahaan. Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp6,084,659,250.00 dengan realisasi sebesar Rp5.754.453.120.00 setara dengan 94,57%.

- (1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Norma Kerja Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp176.200.750,00 dan realisasi sebesar Rp170.800.750,00 atau setara dengan 96,94%. *Output* kegiatan adalah *workshop* norma ketenagakerjaan sebanyak 60 perusahaan dan FGD norma ketenagakerjaan sebanyak 60 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang norma kerja, perempuan, anak dan jaminan sosial tenaga kerja;

- (2) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp192.699.283,00 dan realisasi sebesar Rp180.324.283,00 atau setara dengan 93,58%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi norma K3 bidang kebakaran sebanyak 30 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya wawasan dan pemahaman tentang norma keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja;
- (3) Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.109.905,00 dan realisasi sebesar Rp298.904.905,00 atau setara dengan 99,60%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi daerah pengawasan ketenagakerjaan 194 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan antar seluruh *stakeholder* pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Pemeriksaan Penerapan Norma Kerja di Perusahaan dan di Tempat Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp314.458.978,00 dan realisasi sebesar Rp314.138.978,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah pemeriksaan norma ketenagakerjaan upah, Jamsostek dan hubungan kerja sebanyak 120 perusahaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan;
- (5) Kegiatan Gerakan Efektif Masyarakat Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp408.345.046,00 dan realisasi sebesar Rp404.936.296,00 atau setara dengan 99,17%. *Output* kegiatan adalah upacara pencanangan bulan K3 300 Orang, aksi sosial bulan K3 300 Orang, rapat pengawas spesialis 60 Orang dan rapat koordinasi kelembagaan K3 60 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman tentang membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja dan masyarakat;
- (6) Kegiatan Penanganan Kasus Norma Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Tenaga

- Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp316.781.988,00 dan realisasi sebesar Rp305.782.720,00 atau setara dengan 96,53%. *Output* kegiatan adalah penanganan Kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak 3 kasus dan FGD penanganan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan 4 wilayah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan;
- (7) Kegiatan Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.203.123.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.054.396.250,00 atau setara dengan 87,64%. *Output* kegiatan adalah pemeriksaan norma ketenagakerjaan, penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sebanyak 4.380 perusahaan. *Outcome* kegiatan adalah terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja di Jawa Barat berdasarkan peraturan-perundang ketenagakerjaan yang berlaku;
- (8) Kegiatan Supervisi/Pemeriksaan K3 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.212.000,00 dan realisasi sebesar Rp180.813.250,00 atau setara dengan 62,30%. *Output* kegiatan adalah pemeriksaan norma K3 sebanyak 4380 Perusahaan. *Outcome* kegiatan adalah terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja di Jawa Barat berdasarkan peraturan-perundang ketenagakerjaan yang berlaku;
- (9) Kegiatan Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan dan K3 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp685.337.400,00 dan realisasi sebesar Rp677.325.800,00 atau setara dengan 98,83%. *Output* kegiatan adalah pemeriksaan norma K3 sebanyak 1.500 perusahaan. *Outcome* kegiatan adalah terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja di Jawa Barat berdasarkan peraturan-perundang ketenagakerjaan yang berlaku;

-
- (10) Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah IV Bandung yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp158.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp153.065.350,00 atau setara dengan 96,39%. *Output* kegiatan adalah pemeriksaan norma K3 sebanyak 100 perusahaan. *Outcome* kegiatan adalah terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja di Jawa Barat berdasarkan peraturan-perundang ketenagakerjaan yang berlaku;
- (11) Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pembinaan Ketentuan Norma Kerja Dan K3 Bagi Pemangku Kepentingan Wilayah V Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.531.000,00 dan realisasi sebesar Rp169.545.438,00 atau setara dengan 93,91%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan 3 kegiatan, sosialisasi KNK 3 kegiatan, dan sosialisasi penegakan hukum ketenagakerjaan 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- (12) Kegiatan Pembinaan/Suervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 348.680.000,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah aplikasi masker 1 aplikasi, pembinaan, pemeriksaan dan pemeriksaan khusus norma kerja 589 perusahaan. *Outcome* kegiatan adalah terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja di Jawa Barat berdasarkan peraturan-perundang ketenagakerjaan yang berlaku;
- (13) Kegiatan Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp488.072.000,00 dan realisasi sebesar Rp487.868.600,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan adalah terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja. *Outcome* kegiatan adalah terlindunginya dan terpenuhinya

- hak-hak tenaga kerja di Jawa Barat berdasarkan peraturan-perundang ketenagakerjaan yang berlaku;
- (14) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp208.010.000,00 atau setara dengan 94,55%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan para penerima manfaat dan unsur pekerja dan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- (15) Kegiatan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.994.500,00 dan realisasi sebesar Rp49.873.750,00 atau setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah pengujian objek alat K3 di perusahaan sebanyak 100 perusahaan. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya kecelakaan kerja;
- (16) Kegiatan Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp749.993.400,00 dan realisasi sebesar Rp749.986.750,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah supervisi/pemeriksaan norma ketenagakerjaan sebanyak 1.200 perusahaan. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya kecelakaan kerja terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja di Jawa Barat berdasarkan peraturan-perundang ketenagakerjaan yang berlaku.

e. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2019 adalah. Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, tingkat

akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan tingkat ketersediaan data dan informasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebesar Rp2.703.202.924,00 dengan realisasi sebesar Rp2.458.424.427,00 setara dengan 90,94% dan dilaksanakan melalui kegiatan adalah:

- (1) Kegiatan Pengembangan Perencanaan Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp104.368.850,00 dan realisasi sebesar Rp103.969.970,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah mesin pompa *jet washer* 1 unit, alat pendingin ruangan 1 unit, *filling* kabinet 5 unit, komputer 1 unit, *note book* 1 unit dan printer 5 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Perencanaan Program Pelatihan Kerja Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp178.415.848,00 dan realisasi sebesar Rp165.665.000,00 atau setara dengan 92,85%. *Output* kegiatan adalah sinergitas program dan kegiatan latihan kerja mandiri yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan sebanyak 27 kab./kota. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (3) Kegiatan Perencanaan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Disnakertrans dengan alokasi anggaran sebesar Rp893.920.710,00 dan realisasi sebesar Rp792.317.532,00 atau setara dengan 88,63%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi kab/kota, forum OPD, review Renstra, koordinasi program kegiatan Dinas Pra-Musrenbang dan Musrenbang Provinsi (kewilayahan), *monitoring* dan evaluasi program/kegiatan Dinas sebanyak 6 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (4) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Disnakertrans dengan alokasi anggaran sebesar Rp687.999.850,00 dan realisasi sebesar Rp568.910.660,00 atau setara dengan

- 82,69%. *Output* kegiatan adalah dokumen rencana kerja, dokumen rencana dan dokumen pelaksanaan anggaran Disnakertrans, dokumen LAKIP, dokumen LPPD, dokumen LKPJ, dokumen laporan capaian kinerja internal sebanyak 6 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (5) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.998.978,00 dan realisasi sebesar Rp199.653.234,00 atau setara dengan 99,83%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan keuangan, dokumen pemutakhiran asset, sosialisasi penatausahaan keuangan sebanyak 4 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (6) Kegiatan Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan alokasi anggaran sebesar Rp492.442.496,00 dan realisasi sebesar Rp481.871.150,00 atau setara dengan 97,85%. *Output* kegiatan adalah dokumen pengelolaan buletin ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pengelolaan teknis jaringan, publikasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui media , Pameran sebanyak 3 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (7) Kegiatan Kegiatan Perencanaan Program dan Kegiatan Balai Latihan Kerja Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp146.056.192,00 dan realisasi sebesar Rp146.036.881,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya perencanaan, program dan kegiatan balai latihan kerja kompetensi sebanyak 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yakni tingkat pemenuhan sarana adalah prasarana kerja sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi adalah sebesar Rp13.834.945.193,00 dengan realisasi sebesar Rp6.618.478.381,00 setara dengan 47,84%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja Mandiri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.931.414,00 dan realisasi sebesar Rp90.989.000,00 atau setara dengan 91,05%. *Output* kegiatan adalah mesin pompa *jet washer* 1 unit, alat pendingin ruangan 1 unit, *filling* kabinet 5 unit, komputer 1 unit, note book 1 unit dan printer 5 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Sewa Gedung Kantor dan Rumah Dinas UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp380.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp375.500.000,00 atau setara dengan 98,82%. *Output* kegiatan adalah sewa rumah Dinas 1 unit, sewa gedung kantor 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Pembangunan Prasarana Penunjang Pelatihan Kerja Mandiri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp407.899.189,00 dan realisasi sebesar Rp391.430.146,00 atau setara dengan 95,96%. *Output* kegiatan adalah pembangunan MCK di Demplot, pembangunan benteng di Demplot, rehab kanopi Mushola sebanyak 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BLK PMI yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.863.600,00 dan realisasi sebesar Rp48.663.600,00 atau setara dengan 99,59%. *Output* kegiatan adalah pompa penyedot air 2 unit, printer 2 unit dan kamera 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Sewa Rumah Dinas UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

- Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau setara dengan 96,00%. *Output* kegiatan adalah Sewa rumah Dinas 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.999.774,00 dan realisasi sebesar Rp71.605.000,00 atau setara dengan 87,32%. *Output* kegiatan adalah jam dinding/meja 1 unit, meja rapat 1 unit, komputer *note book* 1 unit dan *filling* kabinet 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.820.000,00 dan realisasi sebesar Rp139.585.000,00 atau setara dengan 93,79%. *Output* kegiatan adalah alat pemadam kebakaran 3 unit, lemari arsip 3 unit, lemari locker 3 unit, *filling* kabinet 6 unit, TV LED 1 unit, tangga (Besar) 1 unit, komputer PC 1 unit, printer 1 unit, printer laser warna 1 unit, kulkas 1 unit, jam dinding 4 buah, karpet, karpet sejadah 3 buah, partisi 1 unit, LCD proyektor, screen 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (8) Kegiatan penyediaan sewa gedung kantor dan rumah Dinas UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah V Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp114.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp106.500.000,00 atau setara dengan 93,42%. *Output* kegiatan adalah sewa rumah Dinas 1 Tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp1.895.407.456,00 dan realisasi sebesar Rp1.808.157.000,00 atau setara dengan 95,40%. *Output* kegiatan adalah tersedianya fasilitas kantor untuk mendukung kinerja Dinas enaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (10) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Disnakertrans yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.457.758.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.705.065.678,00 atau setara dengan 28,60%. *Output* kegiatan adalah honor barang dan jasa. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (11) Pengadaan Gedung Kantor UPTD, Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp0 atau setara dengan 0,00%. *Output* kegiatan adalah nihil. *Outcome* kegiatan adalah nihil;
- (12) Kegiatan Sewa Gedung Kantor dan Rumah Dinas UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp219.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp219.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah gedung kantor 1 tahun, rumah Dinas 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (13) Pengadaan Gedung Kantor UPTD. Pengawasan ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.082.750,00 dan realisasi sebesar Rp30.338.750,00 atau setara dengan 40,95%. *Output* kegiatan adalah persiapan pengadaan gedung kantor sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (14) Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor yang

dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.950.009,00 dan realisasi sebesar Rp85.957.000,00 atau setara dengan 97,73%. *Output* kegiatan adalah tersedianya fasilitas kantor untuk mendukung kinerja UPTD penagawasan ketenagakerjaan selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;

- (15) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Latihan Kerja Kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp113.475.000,00 dan realisasi sebesar Rp109.650.000,00 atau setara dengan 96,63%. *Output* kegiatan adalah *infocus* 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
- (16) Kegiatan Pembangunan Benteng Kantor Disnakertrans yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp650.458.001,00 dan realisasi sebesar Rp387.537.207,00 atau setara dengan 59,58%. *Output* kegiatan adalah pembangunan benteng kantor Disnakertrans 3 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat.

g. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar 70% dari target sebesar 70% dan jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 350 unit dari target sebesar 350 unit dan tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebesar Rp19.487.343.668,00

dengan realisasi sebesar Rp17.513.728.314,00 setara dengan 89,87%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Balai Latihan Kerja Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp83.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp269.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp265.282.654,00 atau setara dengan 98,62%. *Output* kegiatan Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja kantor Balai Latihan Kerja Mandiri sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Balai Latihan Kerja Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp154.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp142.549.336,00 atau setara dengan 92,41%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana balai latihan kerja mandiri guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Balai Latihan Kerja Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp482.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp482.720.000,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah Terwujudnya keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja kantor Balai Pelatihan Kerja

- Mandiri sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala dan perizinan kendaraan operasional BLK PMI dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.462.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.752.913,00 atau setara dengan 91,56%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan Prasarana BLK PMI Dalam Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (6) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Balai Latihan Kerja Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp107.200.000,00 atau setara dengan 97,01%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja balai sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (7) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Surat Kabar Balai Latihan Kerja Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp242.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp220.775.860,00 atau setara dengan 91,00%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja balai sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (8) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur BLK PMI dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.966.000,00 dan realisasi sebesar Rp75.966.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur balai latihan kerja mandiri sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan

- elayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (9) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Balai Latihan Kerja Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp124.997.500,00 dan realisasi sebesar Rp113.051.316,00 atau setara dengan 90,44%. *Output* kegiatan adalah Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (10) Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Pakaian PNS Beserta Kelengkapannya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon dengan alokasi anggaran sebesar Rp101.792.626,00 dan realisasi sebesar Rp100.862.530,00 atau setara dengan 99,09%. *Output* kegiatan adalah tercapainya Kesejahteraan Aparatur UPTD sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (11) Kegiatan Jasa Penceramah,Instruktur Senam dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau setara dengan 98,04%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur UPTD wilayah III Cirebon sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (12) Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.433.600,00 dan realisasi sebesar Rp9.465.100,00 atau setara dengan 90,72%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD wilayah III Cirebon sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

-
- (13) Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.800.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD wilayah III Cirebon sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (14) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.866.211,00 dan realisasi sebesar Rp151.435.040,00 atau setara dengan 98,42%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional UPTD dalam mendukung kualitas pelayanan sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (15) Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Surat Kabar, Surat Menyurat serta Non Pegawai UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp118.337.823,00 atau setara dengan 89,89%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah III Cirebon sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (16) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Surat Kabar dan Surat Menyurat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dengan alokasi anggaran sebesar Rp138.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.020.374,00 atau setara dengan 71,75%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Dinas dalam mendukung kualitas pelayanan, terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Dinas dalam mendukung kualitas pelayanan sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan
-

- adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (17) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dengan alokasi anggaran sebesar Rp370.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp370.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terwujudnya keamanan dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja kantor UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah II Karawang sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (18) Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp29.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah II Karawang guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (19) Kegiatan Pengadaan Pakaian PNS beserta kelengkapannya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dengan alokasi anggaran sebesar Rp210.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp208.170.000,00 atau setara dengan 99,13%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur UPTD pengawasan ketenagakerjaan UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah II Karawang sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (20) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.276.404,00 atau setara dengan 51,38%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah II Karawang guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (21) Kegiatan Jasa Penceramah, Instruktur Senam dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.000.000,00 atau setara dengan 38,96%. *Output* kegiatan adalah Tercapainya Kesejahteraan Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (22) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.400.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah I Bogor guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (23) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, listrik, dan surat kabar serta Tenaga Kerja Non Pegawai BLK PMI dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.098.100,00 dan realisasi sebesar Rp207.479.531,00 atau setara dengan 91,77%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk

- mendukung kinerja BLK PMI sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (24) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai, Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon dengan alokasi anggaran sebesar Rp464.480.188,00 dan realisasi sebesar Rp464.195.520,00 atau setara dengan 99,94%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur UPTD pengawasan ketenagakerjaan UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah II Karawang sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (25) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dengan alokasi anggaran sebesar Rp239.294.835,00 dan realisasi sebesar Rp239.287.200,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terwujudnya keamanan dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja kantor UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah I Bogor sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (26) Kegiatan Jasa Penceramah, Instruktur Senam, Bimbingan Teknis serta Pakaian PNS Bagi Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.505.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.869.300,00 atau setara dengan 91,23%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah I Bogor sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (27) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Oprasional UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp28.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.400.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah I Bogor guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (28) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Serta Peralatan dan Penuhengkapan Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dengan alokasi anggaran sebesar Rp169.079.245,00 dan realisasi sebesar Rp163.018.600,00 atau setara dengan 38,96%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah I Bogor sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (29) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Surat Kabar dan Surat Menyurat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dengan alokasi anggaran sebesar Rp232.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp212.536.330,00 atau setara dengan 91,43%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah I Bogor sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (30) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dengan alokasi anggaran sebesar Rp161.333.400,00 dan realisasi sebesar Rp160.948.000,00 atau setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah I Bogor sebanyak 1 tahun.

- Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (31) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya BLK PMI dengan alokasi anggaran sebesar Rp454.090.560,00 dan realisasi sebesar Rp453.786.560,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur UPTD pengawasan ketenagakerjaan UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah II Karawang sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (32) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Serta Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dengan alokasi anggaran sebesar Rp323.583.000,00 dan realisasi sebesar Rp308.354.950,00 atau setara dengan 95,29%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah II Karawang sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (33) Kegiatan Pengadaan Pakaian PNS Beserta Kelengkapannya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.000.000,00 atau setara dengan 96,73%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah IV Bandung sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (34) Kegiatan Jasa Penceramah, Instruktur Senam dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur UPTD Wilayah IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.593.600,00 dan realisasi sebesar Rp16.012.500,00 atau setara dengan 58,03%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah IV Bandung

- sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (35) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.399.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.842.000,00 atau setara dengan 61,04%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah IV Bandung guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (36) Kegiatan Jasa perbaikan peralatan kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.900.000,00 atau setara dengan 74,50%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah IV Bandung guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (37) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran sebesar Rp231.780.850,00 dan realisasi sebesar Rp219.571.700,00 atau setara dengan 94,73%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Dinas dalam mendukung kualitas pelayanan sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (38) Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Surat Kabar dan Surat Menyurat UPTD

- Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran sebesar Rp114.844.764,00 dan realisasi sebesar Rp88.991.347,00 atau setara dengan 77,49%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah IV Bandung sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (39) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran sebesar Rp241.366.230,00 dan realisasi sebesar Rp213.292.460,00 atau setara dengan 88,37%. *Output* terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Dinas dalam mendukung kualitas pelayanan sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (40) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran sebesar Rp241.366.230,00 dan realisasi sebesar Rp231.364.380,00 atau setara dengan 95,86%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Dinas dalam mendukung kualitas pelayanan sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (41) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.824.867,00 dan realisasi sebesar Rp149.391.407,00 atau setara dengan 97,12%. *Output* kegiatan adalah terwujudnya keamanan dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja kantor UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah V Tasikmalaya sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap

- PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (42) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Surat Kabar dan Surat Menyurat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp31.218.200,00 atau setara dengan 61,21%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah V Tasikmalaya sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (43) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp265.067.250,00 dan realisasi sebesar Rp262.946.198,00 atau setara dengan 99,20%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah V Tasikmalaya sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (44) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp441.912.121,00 dan realisasi sebesar Rp417.283.535,00 atau setara dengan 94,43%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah V Tasikmalaya sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (45) Kegiatan Jasa Penceramah, Instruktur Senam, Bimbingan Teknis dan Pakaian Bagi Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.800.000,00 atau setara dengan 100%. *Output*

- tercapainya kesejahteraan aparatur UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah V Tasikmalaya sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (46) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.004.960,00 atau setara dengan 30,02%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah V Tasikmalaya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayan sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (47) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Pajak Rumah Dinas, Surat Kabar, Surat Menyurat serta Tenaga Kerja Non Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.517.932.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.201.308.532,00 atau setara dengan 79,14%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (48) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp905.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp753.510.961,00 atau setara dengan 83,24%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- (49) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.525.862.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.966.406.520,00 atau setara dengan 77,85%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (50) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Bimtek serta Pakaian Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.282.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.089.826.000,00 atau setara dengan 85,00%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (51) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan Operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp849.996.800,00 dan realisasi sebesar Rp717.669.864,00 atau setara dengan 84,43%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana Dinas guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (52) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.172.900.541,00 dan realisasi sebesar Rp2.077.257.278,00 atau setara dengan 95,60%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin fasilitas sarana dan prasarana Dinas guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Dinas agar dapat berjalan dengan baik dan

- dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (53) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan, Kebersihan Beserta Peralatannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp915.182.720,00 dan realisasi sebesar Rp826.431.120,00 atau setara dengan 90,30%. *Output* kegiatan adalah jasa kebersihan kantor Disnakertrans, jasa kebersihan kantor Disnakertrans sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (54) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Bimtek, Instruktur Senam serta Pakaian Aparatur Balai Latihan Kerja Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.698.755,00 dan realisasi sebesar Rp78.548.755,00 atau setara dengan 96,14%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur balai latihan kerja kompetensi sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (55) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Surat Kabar, Surat Menyurat serta Tenaga Kerja non Pegawai Balai Latihan Kerja Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp323.846.678,00 dan realisasi sebesar Rp253.895.229,00 atau setara dengan 78,40%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya Administrasi Perkantoran sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (56) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala dan Perizinan Kendaraan Operasional Balai Latihan Kerja Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.499.560,00 dan realisasi sebesar Rp74.158.659,00 atau setara dengan 98,22%. *Output* kegiatan adalah Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor sebanyak 12 bulan. *Outcome*

- kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (57) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.294.991,00 dan realisasi sebesar Rp448.674.000,00 atau setara dengan 99,86%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana balai latihan kerja kompetensi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (58) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Balai Latihan Kerja Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.199.825,00 dan realisasi sebesar Rp60.198.925,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur UPTD pengawasan ketenagakerjaan UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah II Karawang sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya administrasi perkantoran;
- (59) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan, Kebersihan Beserta Peralatannya Balai Latihan Kerja Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp635.685.176,00 dan realisasi sebesar Rp635.677.994,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terwujudnya penyelenggaraan operasional balai untuk mendukung pelayanan pada masyarakat sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (60) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Balai Latihan Kerja Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp129.527.772,00 atau setara dengan 99,94%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya administrasi perkantoran sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- (61) Kegiatan Pemeliharaan Gedung, Fasilitas dan Peralatan Kantor BLK PMI dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.549.983,00 dan realisasi sebesar Rp81.978.983,00 atau setara dengan 99,31%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan operasional dasar balai latihan kerja pekerja migran Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (62) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Serta Rapat Internal dan Luar Kantor BLK PMI dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.796.882,00 dan realisasi sebesar Rp220.597.694,00 atau setara dengan 99,91%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya administrasi perkantoran sebanyak 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Tenaga Kerja

a. Permasalahan

- (1) Pada masa sebelum bekerja:
- Kualitas tenaga kerja masih rendah;
 - Persebaran tenaga kerja yang tidak merata;
 - Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah;
 - Rendahnya akses terhadap lapangan kerja.
- (2) Pada masa selama bekerja:
- Produktivitas tenaga kerja masih rendah;
 - Hubungan Industrial belum kondusif;
 - Kesejahteraan pekerja/buruh masih rendah;
 - Perlindungan tenaga kerja masih rendah.
- (3) Pada masa setelah bekerja:
- Peluang untuk bekerja kembali terbatas;
 - Minat untuk berwirausaha setelah bekerja rendah
- Fasilitasi purna tenaga kerja terbatas.

b. Solusi

Solusi yang dihadirkan dalam upaya pengembangan ketenagakerjaan adalah dengan 3 (tiga) Program Utama yaitu

- (1) Smartnakertrans :
- Pembenahan pelayanan penyelesaian sengketa Hubungan Industrial;

- b) Pembenahan Sistem Pengawasan;
- c) Revitalisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Dewan Pengupahan;
- d) Percepatan Kebijakan Pengupahan dan Revormasi Kebijakan Pengupahan;
- e) Pembenahan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f) Membangun Program SMART TRANS;
- g) Membangun layanan Informasi ketenagakerjaan;
- h) Mengembangkan Program Khusus Desa;
- i) Program DCL (*Demo Creation Of Labour*). Program ini adalah program yang dikembangkan dalam rangka Hari Buruh sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei.

(2) Migran Juara:

Dengan membentuk tim khusus di Disnakertrans Jabar untuk membangun *Jabar Migrant Service Center* dengan sistem navigasinya, sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem perekrutan yang melibatkan peran Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga Desa, sistem pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan, serta sistem tracking warga Jabar yang bekerja ke luar negeri.

(3) Milenial Juara:

- a) Mengaktifkan Komite Pelatihan Vokasi Daerah yang merupakan program Kementerian Tenaga Kerja di daerah;
- b) Melakukan restrukturisasi dan reorganisasi 2 Balai Latihan Ketenagakerjaan yang dimiliki Disnakertrans, yaitu BLK-Mandiri dan BLK Kompetensi;
- c) Memfungsikan BLK Kompetensi sebagai BLK untuk menyelenggarakan pendidikan-pendidikan vokasi jabatan dalam era teknologi 4.0 dan era Internet of Things. Juga akan dibangun Silicon Valey di lokasi BLK Kompetensi;
- d) Memfungsikan BLK Mandiri untuk khusus mengembangkan pelatihan kewirausahaan termasuk agar kaum milenial dapat memiliki

- pengetahuan dan ketrampilan untuk memulai *start up company*;
- e) Membangun *network* lembaga keuangan terutama *Angel Investor* untuk keperluan dukungan pendanaan bagi *start up company*.
- (4) Menyelenggarakan *Job Expo* untuk kaum milenial.

3.3.2.1 8. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Capaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan realisasi sebesar 89,26% dari target sebesar 89,32%; Persentase perempuan di legislatif dengan realisasi sebesar 20% dari target yang ditetapkan sebesar 24%; Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender dengan realisasi sebesar 88,89% dari target sebesar 29%; Persentase kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan realisasi 85,18% dari target sebesar 81%; Persentase kabupaten/kota yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 40% dan Persentase keberhasilan penanganan kasus KED terhadap perempuan dan anak sebesar 100%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) **Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

a. **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak lintas daerah Kabupaten/Kota**

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak lintas daerah Kabupaten/Kota yakni tingkat persentase kabupaten kota yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 40%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak lintas daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp19.761.555.911,00 dengan realisasi sebesar Rp17.655.512.546,00 setara dengan 89,34%.

- (1) Kegiatan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi Rp1.449.239.659,00 atau setara dengan 96,62%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1. Pemilihan Duta Anak Jawa Barat ; 2. Pengiriman Duta Anak Jawa Barat ke Forum Anak Nasional; 3. Peringatan Hari Anak Nasional; 4. Jambore Forum Anak ; 5. *Award* Forum Anak Jawa Barat; 6. Sosialisasi Forum Anak melalui mobil Forum Anak Jawa Barat; 7. *Monitoring* dan *Evaluasi* Forum Anak Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya lembaga penyedia layanan sipil

- informasi dan partisipasi yang mendapatkan penguatan dan pengembangan;
- (2) Kegiatan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.999.999.991,00 dan realisasi Rp1.666.828.001,00 atau setara dengan 83,34%. *Output* kegiatan adalah 1. Rapat koordinasi gugus tugas tingkat kabupaten/kota dan provinsi; 2. Konvensi hak anak bagi tenaga pendidik; 3. Parenting skill; 4. Pesantren ramah anak; 4. Lomba kreativitas teman sebaya; 6. Pendampingan evaluasi kabupaten/kota layak anak; 7 Analisis data anak Jawa Barat; 8. *Monitoring* dan Evaluasi kabupaten/kota layak anak ; 9. Penghargaan kabupaten/kota layak anak; 10. Komparasi keberhasilan pencapaian kabupaten/kota layak anak; 11. Ngabring bareng ka sakola (Ngabaso). *Outcome* kegiatan adalah terbentuknya kabupaten/kota layak yang memenuhi persyaratan serta sesuai dengan kategori penilaian mengenai kabupaten/kota layak anak;
- (3) Kegiatan Penguatan Lembaga Layanan Kesehatan dan Sekolah Sehat (Kegiatan NGABASO/Ngabring Bareng Ka Sakola) yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp860.288.631,00 atau setara dengan 86,03%. *Output* kegiatan adalah 1. Pelatihan KHA; 2. Evaluasi progres pelaksanaan RAD Provila; 3. FGD kelembagaan ramah anak; 4. Analisis data kelembagaan ramah anak di Jawa Barat; 5. Pemetaan masalah kelembagaan ramah anak di Jawa Barat; 6. *Workshop* kelembagaan ramah anak; 7. Komparasi kelembagaan ramah anak sebagai dasar pengembangan kebijakan; 8. FGD implementasi anak juara oleh multi pihak; 9. *Monitoring* dan Evaluasi; 10. Advokasi ruang ramah Anak. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya pemenuhan hak anak di Jawa Barat sesuai indikator Kota Layak Anak (KLA) khususnya kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- (4) Kegiatan Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi Rp847.842.150,00 atau setara dengan

- 94,20%. *Output* kegiatan adalah 1. Fasilitasi dan koordinasi layanan anak penyandang disabilitas ; 2. Pelatihan internet ramah anak; 3. Pelatihan anak berhadapan dengan hukum; 4. Fasilitasi dan koordinasi perlindungan anak korban kekerasan, eksploitasi, terorisme, dan diskriminasi; 5. Konsultasi dan koordinasi; 6. Pengembangan kerjasama dalam rangka perlindungan anak dengan *South Australia* sebagai *sister Province*. *Outcome* kegiatan adalah terlayannya perlindungan anak, pelatihan, pendampingan dan penjangkauan;
- (5) Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi Gugus Tugas yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi Rp1.407.839.155,00 atau setara dengan 93,86%. *Output* kegiatan adalah 1. Penanganan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. Pertemuan gugus tugas TPPO kabupaten/kota; 3. Rapat koordinasi pencegahan KDRT; 4. Advokasi gugus tugas; 5. FGD revisi KEPGUB *trafficking*; 6. Pembinaan operasional gugus tugas; 7. Fasilitasi koordinasi dan penanganan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. *Outcome* kegiatan adalah menurun dan tertanganinya kasus *trafficking*, KDRT, dan pornografi di masyarakat Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.520.000.000,00 dan realisasi Rp2.225.733.250,00 atau setara dengan 88,32%. *Output* kegiatan adalah 1. Penanganan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. Pertemuan gugus tugas TPPO kabupaten/Kota; 3. Rapat koordinasi pencegahan KDRT; 4. Advokasi gugus tugas; 5. FGD revisi KEPGUB *trafficking*; 6. Pembinaan operasional gugus tugas; 7. Fasilitasi koordinasi dan penanganan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. *Outcome* kegiatan adalah terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan serta menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat;

- (7) Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.648.082.000,00 dan realisasi Rp1.720.824.340,00 atau setara dengan 64,98%. *Output* kegiatan adalah 1. terfasilitasi dan terlayannya korban eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi; 2. Sosialisasi hasil kajian UPTD Provinsi; 3. *Workshop* relawan pendamping korban; 4. Tersedianya tenaga konselor dan penunjang kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- (8) Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp943.942.000,00 dan realisasi Rp903.348.800,00 atau setara dengan 95,70%. *Output* kegiatan adalah 1. Rapat koordinasi PUG tingkat provinsi Jawa Barat; 2. Rapat koordinasi PUG tingkat kabupaten/kota; 3. Pelatihan PPRG dan klinik PPRG Tk. Provinsi Jawa Barat; 4. Pelatihan PPRG dan klinik PPRG Tk. kabupaten kota; 5. Peningkatan wawasan vokal *point* PUG; 6. Konsultasi ke pusat/kementerian PPA; 6. Pendampingan klinik PPRG tingkat Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pembangunan menuju kesetaraan dan keadilan gender;
- (9) Kegiatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi Rp885.990.600,00 atau setara dengan 98,44%. *Output* kegiatan adalah 1. Verifikasi saptas yang responsif gender di OPD kabupaten/kota; 2. Verifikasi saptas yang responsif gender di perusahaan kabupaten/kota; 3. Verifikasi saptas yang responsif gender di rumah sakit kabupaten/kota; 4. Pembinaan operator SIGA. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan data terpilah gender dan anak serta meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender dan peduli anak;
- (10) Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp2.406.058.000,00 dan realisasi Rp2.335.149.090 atau setara dengan 97,05%. *Output* kegiatan adalah 1. tercapainya kesepakatan antara Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota tentang pelaksanaan program P2WKSS; 2. Rapat koordinasi P2WKSS; 3. TOT Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita); 4. FGD. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya jumlah keluarga yang prasejahtera;
- (11) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.080.999.020,00 dan realisasi Rp1.050.923.870,00 atau setara dengan 97,22%. *Output* kegiatan adalah 1. Pemberian honor Pl. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) ; 2. Pameran luar provinsi dengan satu kegiatan; 3. Lomba kreativitas Pekka; 4. Pelatihan keterampilan PEKKA. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya jumlah keluarga yang prasejahtera;
- (12) Kegiatan Pemberdayaan Hukum, Politik dan Sosial Perempuan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.862.474.900,00 dan realisasi Rp1.810.405.000,00 atau setara dengan 97,20%. *Output* kegiatan adalah 1. Komunikasi perempuan politik ke 16 partai politik yang diikuti 544 orang; 2. Pelatihan pengolahan makanan sehat dengan peserta sebanyak 154 orang; 3. Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga diikuti sebanyak 154 peserta; 4. Pelatihan politik praktis yang diikuti oleh 154 orang ; 5. Pembinaan organisasi perempuan dengan peserta sebanyak 188 orang; 6. Peningkatan kapasitas kepemimpinan lurah/kepala desa perempuan Se-Jawa Barat yang diikuti sebanyak 81 orang; 7. Evaluasi kiprah perempuan di bidang politik dengan peserta 234 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pejabat perangkat daerah kabupaten/kota dan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan;
- (13) Kegiatan Peningkatan Potensi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp491.100.000,00 atau setara dengan 98,22%. *Output* kegiatan adalah 1. pelatihan usaha

mandiri/pelatihan tata busana yang diikuti sebanyak 100 orang; 2. Lomba seni tari dan musik tradisional Jawa Barat yang diikuti 50 orang; 3. Pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan peserta sebanyak 30 orang; 4. Sosialisasi ketahanan keluarga dengan peserta sebanyak 100 orang; 5. HUT DWP yang diikuti 400 orang; 6. Donor darah dengan peserta sebanyak 250 orang; 6. Pembinaan istri ASN yang diikuti sebanyak 350 orang; 7. Kunjungan ke posyandu; 8. Kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo; 9. Serta olah tubuh yang diikuti oleh peserta sebanyak 125 orang. *Outcome* kegiatan adalah adanya pelatihan bagi istri-istri ASN, sosialisasi dan pembinaan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama para istri ASN se-Jawa Barat.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana yakni Persentase ketersediaan data kinerja dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja adalah sebesar Rp1.490.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.425.782.768,00 setara dengan 95,69%.

- (1) Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi DP3AKB yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp719,863,500 atau setara dengan 95,98%. *Output* kegiatan yaitu 1. Pertemuan forum perangkat daerah Se-Jawa Barat dengan peserta sebanyak 108 orang; 2. Review penyusunan Renstra sebanyak 1 (satu) dokumen; 3. Pembinaan perencanaan dan program dengan kabupaten/kota di 27 kabupaten/kota; 4. Penyusunan profil DP3AKB sebanyak 4 kali; 5. Koordinasi teknis dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data dan informasi perencanaan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Penyusunan dan Pelaporan Internal DP3AKB yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana sebesar Rp640.000.000,00 dan realisasi Rp608.394.268,00 atau setara dengan 95,06%. *Output* kegiatan yaitu tersusunnya dokumen perencanaan (Renja, RKA, DPA, LPPD, LAKIP, LKPJ, laporan bulanan, laporan triwulan) selama 12 (dua belas) bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen rencana dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan capaian kinerja dan keuangan;
- (3) Kegiatan Pengelolaan Keuangan DP3AKB Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp97.525.000,00 atau setara dengan 97,53%. *Output* kegiatan yaitu laporan keuangan DP3AKB Jabar selama 12 (dua belas) bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen rencana dan laporan capaian keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan capaian keuangan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana yakni Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja DP3AKB dengan realisasi sebesar 14% dari target sebesar 90%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebesar Rp21.080.593.650,00 dengan realisasi sebesar Rp2.926.556.460,00 setara dengan 13,88%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp480.885.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp447.928.000,00 atau setara 93,15%. *Output* kegiatan yaitu jumlah PNS Pemprov Jabar yang lulus diklat dengan predikat minimal memuaskan.

- Outcome* kegiatan terpenuhinya Diklat PIM bagi pegawai DP3AKB;
- (2) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp323.324.234,00 atau setara 92,38%. *Output* kegiatan yaitu terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor DP3AKB sebanyak 29 Unit. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor DP3AKB;
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.430.230.387,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.398.763.691,00 setara 97,80%. *Output* kegiatan yaitu terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor DP3AKB selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor DP3AKB selama 12 bulan;
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp18.533.999.855,00 realisasi anggaran sebesar Rp479.424.285,00 atau setara 2,86%. *Output* kegiatan yaitu 1. tersedianya alat pendukung fasilitas kantor; 2.terlayaninya pengaduan dari masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya kebutuhan dasar operasional kantor DP3AKB dan menurunnya kasus kekerasan di masyarakat;
 - (5) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur DP3AKB yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp285.478.408,00 realisasi anggaran sebesar Rp277.116.250,00 atau setara 97,07%. *Output* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang memadai dan terpelihara secara berkala. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana yakni Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana adalah sebesar Rp4.612.211.691,00 dengan realisasi sebesar Rp4.322.907.864,00 setara dengan 93,73%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp308.040.000,00 atau setara 82,14%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya siraman rohani dan kebugaran jasmani Pegawai DP3AKB yang diikuti oleh ASN DP3AKB Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya siraman rohani dan kebugaran jasmani Pegawai DP3AKB;
- (2) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp289.048.600,00 atau setara 96,35%. *Output* kegiatan adalah tersedianya barang habis pakai kantor selama satu tahun. *Outcome* kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor;
- (3) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp503.300.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp337.979.596,00 atau setara 67,15%. *Output* kegiatan yaitu terpenuhinya biaya listrik, telepon, internet dan air ledeng selama 12 (dua belas) bulan. *Outcome* kegiatan terlaksananya pemenuhan biaya listrik, telepon, internet dan air ledeng;
- (4) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp199.960.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp179.826.000,00 atau setara 89,93%. *Output* kegiatan yaitu terpenuhinya dokumentasi dan publikasi selama 12 (dua belas) bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sewa kursi/pangungserta dokumentasi dan publikasi selama 12 (dua belas) bulan;
- (5) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.625.630.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.575.099.155,00 atau setara 96,89%. *Output* kegiatan yaitu terselenggaranya rapat internal dan luar kantor serta perjalanan Dinas selama 12 (dua belas) bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya rapat-rapat internal dan luar kantor serta perjalanan dinas;
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp701.326.363,00 realisasi anggaran sebesar Rp628.040.590,00 atau setara 89,55%. *Output* kegiatan yaitu terselenggaranya honorarium pengamanan gedung kantor dan non pegawai selama 12 (dua belas) bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya honorarium jasa tenaga kerja non-pegawai selama 12 (dua belas) bulan;
- (7) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp406.999.948,00 realisasi anggaran sebesar Rp371.967.710,00 atau setara 91,39%. *Output* kegiatan yaitu terpenuhinya operasional perangkat daerah lingkup DP3AKB selama 12 (dua belas) bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya pembayaran jasa tenaga non-pegawai selama 12 (dua belas) bulan;
- (8) Kegiatan Sosialisasi Bidang PP, PA Dan KB Melalui Media yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.995.380,00 realisasi anggaran sebesar Rp478.567.500,00 atau setara 95,71%. *Output* kegiatan yaitu terpenuhinya layanan masyarakat melalui media elektronik produksi audio visual ILM

sebanyak 3 paket; Produksi ILM audio (radio) sebanyak 6 Paket, dan produksi profil DP3AKB sebanyak 1 (satu) paket. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya layanan masyarakat melalui media elektronik selama 1 (satu) tahun anggaran.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Permasalahan

1. Adapun permasalahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu;
2. Masih tingginya kasus kekerasan dan trafficking pada perempuan dan anak;
3. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;
4. Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan;
5. Belum optimalnya akses kaum disabilitas terhadap fasilitas pelayanan publik.

b. Solusi

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan melalui perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat;
2. Memperkuat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi;
3. Memfasilitasi keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
4. Meningkatkan akses kaum disabilitas terhadap fasilitas pelayanan publik.

9. Urusan Pangan

Pencapaian urusan kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk urusan pangan tahun 2019 adalah Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Tingkat Konsumsi dengan realisasi sebesar 89 Poin dari target 82,40 poin; Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Tingkat Ketersediaan dengan realisasi sebesar 90,40 Poin dari target 89,80 poin.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Ketahanan Pangan

Capaian indikator kinerjanya adalah tingkat konsumsi pangan energi dengan capaian 2218 kkal/kap/hr dari target 2150 kkal/kap/hr, protein dengan capaian sebesar 64,8 gr/kap/hr dari target sebesar 57 gr/kap/hr, keamanan pangan segar asal tumbuhan yang sesuai SNI dengan capaian sebesar 83,2% dari target sebesar 84% dan SPPH tingkat ketersediaan dengan capaian sebesar 90,40 poin dari target sebesar 89,8 poin. Alokasi anggaran Rp8.191.912.354,00 dan realisasi Rp7.327.797.491,00 atau setara dengan 89,45%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp2.482.162.380,00. dan realisasi sebesar dan realisasi Rp2.447.238.026,00 atau setara dengan 98,59%. *Output* kegiatan adalah peningkatan pola pangan masyarakat dengan penyediaan sosialisasi menu B2SA, lomba cipta menu, analisis konsumsi pangan, panganekaragaman pangan keluarga yang tersedia di skala rumah tangga, gerakan pangan lokal, Dewan Ketahanan Pangan di kab/kota, pengawasan keamanan pangan segar dan kawasan rumah pangan lestari. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan meningkatkan skor pola pangan harapan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dalam mendukung kinerja Dinas yang efisien, efektif, tepat sasaran dan akuntabel;
- (2) Kegiatan Pelayanan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan yang dilaksanakan di Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jabar sebesar sebesar Rp267.080.775,00 dan realisasi sebesar Rp230.360.572,00 atau setara dengan 86,25% . *Output* kegiatan adalah pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dengan Pengujian terhadap pestisida, mikrobiologi, logam berat. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya

- mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dimasyarakat dalam mendukung kinerja Dinas yang efisien, efektif, akurat dan akuntabel;
- (3) Kegiatan Sertifikasi Prima yang dilaksanakan Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.531.309,00 dan realisasi Rp659.161.973,00 atau setara dengan 94,23%. *Output* kegiatan adalah terawasinya mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang disertifikasi, Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terregistrasi, *packing house* yang terregistrasi dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). *Outcome* kegiatan adalah persentase pangan segar asal tumbuhan yang diregistrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - (4) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Penanggulangan Rawan Pangan alokasi anggaran Rp1.057.724.403,00 dan realisasi Rp825.377.620,00 atau setara dengan 78,03%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data dan informasi terhadap kegiatan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan tertanganinya daerah rawan pangan. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya pemantauan, informasi, kebijakan dan analisa ketersediaan bahan pangan serta tertangani daerah rawan pangan;
 - (5) Kegiatan Sumber Daya dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.098.898.609,00 dan realisasi Rp931.250.250,00 atau setara dengan 84,74%. *Output* terselenggaranya sumber daya dan cadangan pangan pada kegiatan cadangan pangan pemerintah daerah, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). *Outcome* terfasilitasinya ketersediaan pangan dengan tertangani daerah rawan pangan;
 - (6) Kegiatan Penguatan Pemasaran dan Distribusi Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.843.293.253,00 dan realisasi Rp1.536.357.780,00 atau setara dengan 83,35%. *Output* kegiatan adalah terkendalinya dan terpantaunya ketersediaan pangan dengan menjaga stabilitas harga pangan melalui kegiatan bazaar, operasi pasar, pemantauan, sarana pergudangan yang dibangun. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya stabilitas harga pangan, akses pangan masyarakat dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi;

- (7) Pelatihan Teknis Peternakan di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole. Alokasi anggaran Rp593.221.775,00 dan realisasi Rp555.572.700,00 atau setara dengan 93,65%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan melalui penyusunan silabi, kurikulum, dan penyelenggaraan pelatihan, peserta pendidikan bagi SDM Balai Pelatihan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). *Outcome* kegiatan adalah peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan SDM dalam mengikuti pelatihan teknis sektor peternakan dan ketahanan pangan;
- (8) Kegiatan Penyusunan Program dan Evaluasi Pelatihan di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole sebesar Rp149.999.850,00 dan realisasi Rp142.478.570,00 atau setara dengan 94,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya *monitoring* dan evaluasi dengan tingkat pemahaman peserta pelatihan peternakan dan ketahanan pangan, hasil survei kebutuhan jenis pelatihan, analisa kebutuhan pelatihan. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan tingkat pengetahuan, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengikuti pelatihan teknis peternakan dan ketahanan pangan dalam mendukung kinerja balai dan dinas.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Pangan

a. Permasalahan

Sarana prasana laboratorium pengujian pangan kurang memadai.

b. Solusi

Meningkatkan sarana prasarana laboratorium pengujian.

10. Urusan Pertanahan

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan pertanahan adalah persentase tertib tata kelola pertanahan melalui pemenuhan urusan wajib sesuai konkuren dengan capaian sebesar 19,59% dari target sebesar 21,77%.

Indikator kinerja dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

Capaian Indikator Kinerja Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan yakni persentase tertib tata kelola pertanahan melalui pemenuhan urusan wajib sesuai konkuren dengan capaian sebesar 19,59% dari target sebesar 21,77%. Alokasi anggaran Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan adalah sebesar Rp2.931.688.278,00 dengan realisasi sebesar Rp2.862.149.657,00 atau setara dengan 97,63%.

- (1) Rapat Kerja Pertanahan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp444.799.660,00 dan realisasi Rp440.684.960,00 atau setara dengan 99,07%. *Output* kegiatan adalah memahami solusi terhadap permasalahan pertanahan, dan terumuskannya kebijakan tentang bidang pertanahan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pembahasan mendalam tentang pertanahan, dan kendala/permasalahan pelaksanaan pertanahan bagi kepentingan umum;
- (2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Gapura Batas Provinsi Jawa Barat - Provinsi Banten yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp178.692.250,00 dan dan realisasi sebesar Rp176.608.750,00 atau setara dengan 98,83%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk gapura batas daerah Provinsi Jawa Barat-Banten dalam pelaksanaan pengadaan tanah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tertib tata kelola pertanahan melalui urusan wajib pertanahan sesuai konkuren;
- (3) Inventarisasi Penguasaan dan Konflik Pertanahan Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp218.493.854,00

- dan realisasi Rp218.464.650,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset *idle* Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kawasan Metropolitan Bandung untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi tanah aset *idle* Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kawasan Metropolitan Bandung untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Barat;
- (4) Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.718,00 dan realisasi Rp280.140.353,00 atau setara dengan 93,38%. *Output* kegiatan adalah dokumen kumpulan regulasi, data dan produk hukum daerah sebagai tindaklanjut amanat undang-undang, yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terinformasikannya peraturan perundangan terkait pertanahan dalam mengimplementasikan penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- (5) Kajian Penyelesaian Permasalahan dan Pemanfaatan Tanah Kosong Atau Tanah Terlantar di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp175.240.336,00 dan realisasi Rp174.913.450,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan kajian penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan tanah kosong atau tanah terlantar di Jawa Barat, yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi sebagai bahan kebijakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan tanah kosong atau tanah terlantar di Jawa Barat;
- (6) Kajian Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Maksimum atau Tanah Absentee di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.910,00 dan realisasi Rp143.279.500,00 atau setara dengan 95,52%.

- Output* kegiatan adalah dokumen laporan kajian subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah maksimum atau tanah *absentee* di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi sebagai bahan kebijakan dalam penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah maksimum atau tanah *absentee* di Jawa Barat;
- (7) Penunjang Kegiatan Sertifikasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp331.111.050,00 dan realisasi Rp300.652.694,00 atau setara dengan 90,80%. *Output* kegiatan adalah dokumen data dan pedoman sebagai penunjang kegiatan sertifikasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program PTSL, serta ganti kerugian tanah maksimum atau tanah *absentee* di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pelaksanaan PTSL di Jawa Barat;
- (8) Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp283.692.500,00 dan realisasi Rp283.092.500,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sistem informasi manajemen penatagunaan tanah di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah perencanaan pembangunan di Jawa Barat disusun berdasarkan data dan informasi pertanahan yang andal;
- (9) Penyusunan Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp95.769.000,00 dan realisasi Rp95.769.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah penyelenggaraan ruang terbuka hijau di Jawa Barat berbasis data dan informasi yang andal dan dapat diakses oleh berbagai *stakeholders*. *Outcome* kegiatan adalah termutakhirnya *database* ruang terbuka hijau di Jawa Barat;
- (10) Pembuatan Peta Dasar Skala Detail Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebesar Rp753.890.000,00 dan realisasi Rp748.543.800,00 atau setara dengan 99,29%. *Output* kegiatan adalah

tersedianya peta dasar untuk perencanaan pembangunan kawasan perkotaan. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya peta dasar skala detail pada kawasan perkotaan terpilih di Jawa Barat.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanahan

a. Permasalahan

- (1) Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya;
- (2) Kelengkapan proses administrasi kelengkapan pertanahan dan pemerintah desa;
- (3) Masih banyak tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain.

b. Solusi

- (1) Meningkatkan konsultasi ke pemerintah pusat dan koordinasi ke kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya;
- (2) Melaksanakan kegiatan setifikasi lahan terutama yang merupakan asset pemerintah provinsi; dan
- (3) Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan capaian sebesar 52,12 poin dari target sebesar 49,76 poin; Indeks Kualitas Air (IKA) dengan capaian sebesar 42,73 poin dari target sebesar 42,47 poin; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan capaian sebesar 79,40 poin dari target sebesar 79,31 poin; Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan capaian 3,85% dari target sebesar 2,8% dan Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik dengan capaian 0,78% dari target sebesar 0,62%. Indikator kinerja dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yakni meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan capaian sebesar 42,73 poin dari target sebesar 42,47 poin; meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan capaian sebesar 79,4 poin dari target sebesar 79,31 poin dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik dengan capaian sebesar 0,78 dari target sebesar 0,62%. Alokasi anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp59.894.088.979,00 dengan realisasi sebesar Rp36.348.358.069,00 setara dengan 60,69%.

- (1) Kegiatan Implementasi *Green Building (Eco-Office)* (Kantor Berbudaya Lingkungan) Tahun 2019 DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.998.210,00 dan realisasi sebesar Rp248.892.575,00 atau setara dengan 71,11%. *Output* kegiatan adalah jumlah pelaksanaan kegiatan penilaian *Eco Office* sejumlah 40 kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (2) Kegiatan Operasional Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jawa Barat sebesar Rp6.190.819.166,00 dan realisasi sebesar Rp5.188.949.734,00 atau setara dengan 83,82%. *Output* kegiatan adalah adanya kegiatan oleh Kab/Kota di DAS Citarum dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 22 sektor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (3) Kegiatan Publikasi Citarum Bestari DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp229.575.000,00 atau setara dengan 76,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah sosialisasi dan kampanye di media sebanyak 2 media. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (4) Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bagi Aparatur yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp649.999.290,00 dan realisasi sebesar Rp636.050.950,00 atau setara dengan 97,85%. *Output* kegiatan adalah jumlah aparatur Kabupaten/Kota yang dapat menyusun KLHS sebanyak 85 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (5) Kegiatan Bimtek Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.999.759,00 dan realisasi sebesar Rp236.320.818,00 atau setara dengan 94,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah aparat yang mengikuti Bimtek RPPLH sebanyak 70 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara

- dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (6) Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan KLHS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.892,00 dan realisasi sebesar Rp297.309.500,00 atau setara dengan 99,10%. *Output* kegiatan adalah jumlah KLHS Kabupaten/Kota yang direview sejumlah 28 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (7) Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penatalaksanaan Dokumen Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.480,00 dan realisasi sebesar Rp293.983.450,00 atau setara dengan 97,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah komisi penilai AMDAL yang mengikuti Pembinaan Teknis sebanyak 80 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (8) Kegiatan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.999.484,00 dan realisasi sebesar Rp249.996.550,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen lingkungan hidup hasil penilaian KPA Provinsi Jawa Barat yang direview sebanyak 20 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (9) Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.981,00 dan realisasi sebesar

- Rp291.630.250,00 atau setara dengan 97,21%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen DIKPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebanyak 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (10) Kegiatan DED Pusat Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.999.980,00 dan realisasi sebesar Rp466.088.788,00 atau setara dengan 93,22%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen DED pusat pengelolaan limbah B3 rumah tangga di Jawa Barat sejumlah 1 dokume. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (11) Kegiatan Pembinaan Industri Melalui Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp599.997.683,00 dan realisasi sebesar Rp577.696.116,00 atau setara dengan 96,28%. *Output* kegiatan adalah jumlah industri yang mengikuti pembinaan teknis penilaian kinerja perusahaan sejumlah 60 industri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (12) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.999.979,00 dan realisasi sebesar Rp195.218.150,00 atau setara dengan 78,09%. *Output* kegiatan adalah jumlah Kab/Kota yang dievaluasi pelaksanaan izin PPLHnya sejumlah 27 Kab/Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31

- poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (13) Kegiatan Pemantauan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp494.915.574,00 atau setara dengan 98,98%. *Output* kegiatan adalah jumlah zona di DAS Citarum Hulu yang terpantau oleh patroli masyarakat sejumlah 7 zona sungai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (14) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp749.997.323,00 dan realisasi sebesar Rp732.756.383,00 atau setara dengan 97,70%. *Output* kegiatan adalah jumlah badan air (sungai dan waduk) yang dipantau kualitasnya sejumlah 7 DAS dan 1 Waduk 7 DAS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (15) Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp749.997.779,00 dan realisasi sebesar Rp745.308.028,00 atau setara dengan 99,37%. *Output* kegiatan adalah jumlah lokasi yang terpantau kualitas udara ambien menggunakan metoda *passive sampler* sejumlah 54 lokasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (16) Kegiatan Pembinaan Laboratorium dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.574,00 dan realisasi sebesar Rp97.504.100,00 atau setara dengan 97,50%. *Output* kegiatan adalah jumlah laboratorium Kab/Kota yang dibina sejumlah 20 laboratorium. *Outcome* kegiatan adalah

meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (17) Kegiatan Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan oleh PPLH di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.998.182,00 dan realisasi sebesar Rp476.834.323,00 atau setara dengan 95,37%. *Output* kegiatan adalah jumlah berita acara hasil pengawasan sebanyak 50 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (18) Kegiatan Penyediaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online (DAK Penugasan) yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp560.052.500,00 dan realisasi sebesar Rp558.878.000,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan *online* sejumlah 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (19) Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan IPAL industri sektor UMKM tahu/tempe yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp258.896.750,00 atau setara dengan 51,78%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen DED IPAL yang akan dibangun sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (20) Kegiatan Penyusunan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah dalam Pencapaian Adipura yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.749.998.210,00 dan realisasi sebesar Rp321.707.867,00 atau setara dengan 18,38%. *Output* kegiatan adalah jumlah aplikasi; jumlah buku pedoman 2 sistem aplikasi; 5 jenis buku panduan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (21) Kegiatan Gerakan *Ecovillage* di DAS Citarum yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.299.999.589,00 dan realisasi sebesar Rp1.297.495.906,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah jumlah desa berbudaya lingkungan di DAS Citarum sebanyak 138 desa. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (22) Kegiatan Inventarisasi dan Mitigasi GRK yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.993.357,00 dan realisasi sebesar Rp199.846.812,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan inventarisasi GRK 4 Sektor sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (23) Kegiatan Pengembangan Adaptasi Perubahan Iklim yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp261.999.254,00 dan realisasi sebesar Rp261.999.245,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah kajian pendukung rencana aksi adaptasi perubahan iklim Jabar sejumlah 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks

- Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (24) Kegiatan Pengembangan Desa Berbudaya Lingkungan (*ecovillage*) di DAS Cimanuk, Ciliwung Citanduy yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.499.999.820,00 dan realisasi sebesar Rp1.496.517.020,00 atau setara dengan 99,77%. *Output* kegiatan adalah jumlah desa berbudaya lingkungan di DAS Cimanuk, Ciliwung, dan Citanduy sebanyak 125 desa. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (25) Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Lindung yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.915,00 dan realisasi sebesar Rp99.996.115,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan di Jawa Barat dan pedoman evaluasi teknis jasa lingkungan sejumlah 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (26) Kegiatan Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.999.591,00 dan realisasi sebesar Rp399.411.408,00 atau setara dengan 99,85%. *Output* kegiatan adalah jumlah taman kehati yang dikembangkan sarana dan prasarannya sejumlah 1 taman. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (27) Kegiatan Peningkatan Kinerja Lingkungan (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan SBL) yang

dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.199.999.471,00 dan realisasi sebesar Rp1.195.597.899,00 atau setara dengan 99,63%. *Output* kegiatan adalah jumlah Kab/Kota yang dibina sejumlah 27 Kab/Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (28) Kegiatan Program Kampung Iklim yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.754,00 dan realisasi sebesar Rp299.723.125,00 atau setara dengan 99,91%. *Output* kegiatan adalah jumlah lokasi setingkat RW/dusun yang masyarakatnya menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di Jawa Barat sebanyak 50 lokasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (29) Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Secara Administratif yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp673.606.970,00 atau setara dengan 89,81%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen tindak lanjut pengaduan dan/pengenaan sanksi administratif sebanyak 50 kegiatan/usaha. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (30) Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp446.397.000,00 atau setara dengan 55,80%. *Output* kegiatan adalah jumlah kasus pidana yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sejumlah 1 kasus. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin,

meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (31) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.050.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp982.855.999,00 atau setara dengan 93,61%. *Output* kegiatan adalah Data Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (SIPP) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Jawa Barat; SDM 27 Kab/Kota trampil melakukan pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH 1 sistem; 54 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (32) Kegiatan Pengembangan instrument hukum lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.662.000,00 atau setara dengan 99,33%. *Output* kegiatan adalah jumlah naskah akademik hasil kajian sejumlah 9 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (33) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp436.429.100,00 atau setara dengan 87,29%. *Output* kegiatan adalah kasus lingkungan yang diselesaikan melalui mekanisme perdata lingkungan sebanyak 2 kasus. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (34) Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp247.426.100,00 atau setara dengan 98,97%. *Output* kegiatan adalah jumlah produk hukum yang disusun dalam pengelolaan lingkungan (pergub dan kepgub) sebanyak 1 produk. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (35) Kegiatan Operasional Project Management Unit (PMU) TPPAS Regional Lulut Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.993.200,00 dan realisasi sebesar Rp144.388.500,00 atau setara dengan 48,13%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan pengendalian kinerja PT. Jabar Bersih Bestari sesuai kontrak KPBU sejumlah 1 laporan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (36) Kegiatan Pembangunan Jalan Operasional Lanjutan TPPAS Regional Lulut Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.469.760.067,00 dan realisasi sebesar Rp3.417.454.550,00 atau setara dengan 98,49%. *Output* kegiatan adalah jumlah panjang jalan operasional lanjutan yang dibangun sepanjang 1 km. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (37) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.497.539.531,00 dan realisasi sebesar Rp1.140.486.667,00 atau setara dengan 76,16%. *Output* kegiatan adalah jumlah panjang pembangunan drainase sepanjang 6 km. *Outcome*

- kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (38) Kegiatan Pembayaran Kompensasi Lahan Perhutani untuk TPPAS Regional Ciayumajakuning yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp11.101.778.595,00 dan realisasi sebesar Rp191.581.565,00 atau setara dengan 1,73 %. *Output* kegiatan adalah jumlah luas lahan perhutani untuk TPPAS Regional Ciayumajakuning sebesar 45 Ha, namun karena kegiatan tidak terlaksana maka *Outputnya* tidak tercapai, yang dikarenakan adanya dokumen Amdal yang belum selesai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (39) Kegiatan Pembayaran Tipping Fee TPPAS Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.375.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp0 atau setara dengan 0%. *Output* kegiatan adalah jumlah sampah per ton/hari 300 Ton/hari, tapi karena kegiatannya tidak dapat teralisasi maka. *Outputnya* tidak tercapai, hal ini dikarenakan adanya penolakan dari warga dan belum siapnya PT. JBL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (40) Kegiatan Pendampingan Teknis Lelang Investasi TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.518.293.600,00 dan realisasi sebesar Rp869.012.021,00 atau setara dengan 57,24%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen pendampingan teknis untuk proses lelang investasi TPPAS Regional Legok Nangka sebanyak 1 dokumen lelang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas

udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (41) Kegiatan Pendampingan Teknis Pengelolaan Kualitas Lingkungan TPA Leuwigajah yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp122.179.300,00 dan realisasi sebesar Rp114.698.000,00 atau setara dengan 93,88%. *Output* kegiatan adalah dokumen teknis pengelolaan kualitas lingkungan TPA Leuwigajah sebanyak 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (42) Kegiatan Pendampingan Teknis Pengelolaan Kualitas Lingkungan TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp138.395.000,00 dan realisasi sebesar Rp123.658.500,00 atau setara dengan 89,35%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan RKL/RPL sebanyak 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (43) Kegiatan Pendampingan Teknis Pengelolaan Kualitas Lingkungan TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp136.482.200,00 dan realisasi sebesar Rp130.275.000,00 atau setara dengan 95,45%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan RKL/RPL sejumlah 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (44) Kegiatan Pendampingan Teknis Pengelolaan Kualitas Lingkungan TPPAS Regional Lulut Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp133.596.050,00 dan realisasi sebesar Rp127.680.250,00 atau setara

- dengan 95,57%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan RKL/RPL sejumlah 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (45) Kegiatan Pengadaan alat pengolah kompos TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.722.977.500,00 dan realisasi sebesar Rp48.867.500,00 atau setara dengan 2,83%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pengolah kompos di TPK Sarimukti 1 set tapi karena gagal lelang kegiatan tersebut tidak terlaksana. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (46) Kegiatan Pengadaan APAR TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp115.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.810.000,00 atau setara dengan 84,65%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pemadam kebakaran sejumlah 1 set. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (47) Kegiatan Pengadaan Batu Pecah untuk menuju jalan manuver area sementara I di TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp215.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp201.789.500,00 atau setara dengan 93,86%. *Output* kegiatan adalah jumlah panjang pemasangan batu pecah menuju jalan manuver area I sepanjang 200 meter. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (48) Kegiatan Pengadaan Batu Pecah untuk menuju jalan manuver area sementara II di TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp214.731.000,00 dan realisasi sebesar Rp207.104.700,00 atau setara dengan 96,45%. *Output* kegiatan adalah jumlah panjang pemasangan batu pecah menuju jalan manuver area II sepanjang 200 meter. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (49) Kegiatan Pengadaan Batu Pecah untuk menuju jalan manuver area sementara III di TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp214.731.000,00 dan realisasi sebesar Rp211.755.000,00 atau setara dengan 98,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah panjang pemasangan batu pecah menuju jalan manuver area III sepanjang 200 meter. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (50) Kegiatan Pengadaan Brongsong Bambu TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.982.700,00 dan realisasi sebesar Rp67.192.100,00 atau setara dengan 89,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah brongsong bambu untuk melindungi pipa gas dari tumpukan sampah sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (51) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Pengolahan Air Bersih di TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.936.000,00 dan realisasi sebesar Rp270.840.500,00 atau setara dengan 54,18%. *Output* kegiatan adalah jumlah lokasi pengadaan

instalasi Pengolahan Air Bersih sejumlah 1 lokasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (52) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik di TPPAS Regional Legok yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp754.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp632.333.651,00 atau setara dengan 83,77%. *Output* kegiatan adalah jumlah jaringan listrik yang dipasang sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (53) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan jaringan listrik PLN TPPAS Regional Lulut Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp258.336.940,00 dan realisasi sebesar Rp227.257.950,00 atau setara dengan 87,97%. *Output* kegiatan adalah jumlah lokasi yang dipasang penerangan sejumlah 1 lokasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (54) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Timbang TPPAS Regional Lulut Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.005.846.050,00 dan realisasi sebesar Rp59.790.250,00 atau setara dengan 5,94%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat ukur sampah masuk sistem sensor dan online sejumlah 1 set. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (55) Kegiatan Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Pengelola TPK Sarimukti yang

dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp365.591.900,00 dan realisasi sebesar Rp341.526.800,00 atau setara dengan 93,42%. *Output* kegiatan adalah jumlah personel TPK Sarimukti yang mendapat makanan penambah daya tahan tubuh sebanyak 48 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (56) Kegiatan Pengadaan peralatan takel/katrol yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.997.150,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah takel/katrol pengangkat sejumlah 1 set. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (57) Kegiatan Pengadaan Pipa Lindi dan Gas di TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp504.790.300,00 dan realisasi sebesar Rp443.172.000,00 atau setara dengan 87,79%. *Output* kegiatan adalah jumlah panjang pipa gas (untuk menyalurkan gas dalam tumpukan sampah sepanjang 300 meter dan Jumlah panjang pipa lindi sepanjang 500 meter. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (58) Kegiatan Pengadaan rambu-rambu keselamatan kerja yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.249.288,00 dan realisasi sebesar Rp92.585.500,00 atau setara dengan 92,36%. *Output* kegiatan adalah jumlah rambu-rambu peringatan untuk keselamatan kerja di lapangan sejumlah 1 set. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks

- Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (59) Kegiatan Pengadaan tanki BBM di TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp164.691.500,00 dan realisasi sebesar Rp160.043.000,00 atau setara dengan 97,18%. *Output* kegiatan adalah jumlah tanki penampung BBM 1unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (60) Kegiatan Pengelolaan TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.699.048.096,00 dan realisasi sebesar Rp4.120.622.413,00 atau setara dengan 87,69%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai Non PNS untuk operasional TPK Sarimukti dan tenaga bantuan kantor UPTD PSTR sebanyak 84 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (61) Kegiatan Perbaikan Pagar TPPAS Regional Lulut Namboyang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesarRp435.023.800,00 dan realisasi sebesar Rp272.689.398,00 atau setara dengan 62,68%. *Output* kegiatan adalah jumlah panjang pagar yang diperbaiki (robok) sepanjang 600 meter. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (62) Kegiatan Perbaikan reservoir air bersih operasional TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp214.727.700,00 dan realisasi sebesar Rp211.171.319,00 atau setara dengan 98,34%. *Output* kegiatan adalah jumlah reservoir air bersih operasional yang diperbaiki sebanyak 2 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47

poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (63) Kegiatan Perluasan TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.057.210.439,00 dan realisasi sebesar Rp1.469.406.360,00 atau setara dengan 71,43%. *Output* kegiatan adalah jumlah perluasan lahan TPK Sarimukti sebesar 10 Ha. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yakni meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,73 poin dari target sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,4 poin dari target 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,78 dari target 0,62%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp2.330.499.196,00 dengan realisasi sebesar Rp1.900.118.220,00 setara dengan 81,53%.

- (1) Kegiatan Agenda Nasional dalam Upaya meningkatkan Opini WTP DLH yang dilaksanakan Dinas lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.900,00 dan realisasi sebesar Rp98.901.493,00 atau setara dengan 98,90%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan Kegiatan Agenda Nasional dalam Upaya mendapatkan Opini WTP sebanyak 1 laporan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (2) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp649.999.924,00 dan realisasi sebesar Rp648.060.547,00 atau setara dengan 99,70%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan sebanyak 1 Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (3) Kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DLH Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.664,00 dan realisasi sebesar Rp99.999.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan sebanyak 12 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (4) Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp440.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp439.199.627,00 atau setara dengan 99,70%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 1 Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (5) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.850,00 dan realisasi sebesar Rp95.554.105,00 atau setara dengan 95,55%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen verifikasi atas laporan pertanggungjawaban asset sebanyak 1 laporan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA)

sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (6) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp939.999.858,00 dan realisasi sebesar Rp518.403.448,00 atau setara dengan 55,15%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan operasional tim percepatan pembangunan 4 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Lingkungan Hidup yakni Meningkatkan kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,73 poin dari target sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,4 poin dari target 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,78 dari target 0,62%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp3.830.582.328,00 dengan realisasi sebesar Rp3.512.496.899,00 setara dengan 91,71%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jasa Perkantoran DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp585.752.509,00 atau setara dengan 78,10%. *Output* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana (alat pendingin ruangan, alat pemotong kertas, mesin *photocopy*, *server* aplikasi, komputer pelayanan publik, laptop *virtual meeting*, dan lain-lain sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin dan tingkat upaya penurunan Gas

- Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTDLLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.544.152.738,00 dan realisasi sebesar Rp2.484.727.765,00 atau setara dengan 97,66%. *Output* kegiatan adalah jumlah pelaksanaan rehabilitasi gedung, pengadaan alat-alat laboratorium dan perlengkapan kantor 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
 - (3) Kegiatan Penataan Ruang Laktasi PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.891.600,00 dan realisasi sebesar Rp- atau setara dengan 0%. *Output* kegiatan adalah jumlah ruang laktasi yang ditata 1 unit tapi karena tidak terealisasi kegiatannya sehingga *output* tidak tercapai hal ini dikarenakan kantor UPTD PSTR pindah dari Jalan Suci ke Jalan Kawalayaan, sehingga untuk penataan ruang laktasi harus direncanakan kembali mengingat gedung baru PSTR berbarengan dengan Dinas lain. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
 - (4) Kegiatan Pengadaan AC PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.243.490,00 dan realisasi sebesar Rp39.200.000,00 atau setara dengan 99,89%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana pendingin ruangan 5 Unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
 - (5) Kegiatan Pengadaan drone yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp29.780.000,00 atau setara dengan 99,27%.

- Output* kegiatan adalah jumlah *drone* 1 set. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (6) Kegiatan Pengadaan kendaraan roda 2 operasional PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60.544.500,00 dan realisasi sebesar Rp41.845.000,00 atau setara dengan 69,11%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan operasional roda dua 2 Unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (7) Kegiatan Pengadaan komputer PC PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.632.000,00 atau setara dengan 98,63%. *Output* kegiatan adalah jumlah komputer PC 9 Unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (8) Kegiatan Pengadaan laptop PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp47.300.000,00 atau setara dengan 94,60%. *Output* kegiatan adalah jumlah laptop 2 Unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (9) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp56.552.800,00 atau setara dengan 75,71%. *Output* kegiatan adalah jumlah pakaian kerja lapangan dan alat pelindung diri 60 Set. *Outcome*

kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (10) Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam PDH Non PNS yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp132.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp128.706.825,00 atau setara dengan 97,47%. *Output* kegiatan adalah pakaian Dinas harian Non PNS 84 Stel. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup yakni Meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,73 poin dari target sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,4 poin dari target 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,78 dari target 0,62%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp44.115.230.323,00 dengan realisasi sebesar Rp35.024.336.896,00 setara dengan 79,39%.

- (1) Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.708.104.806,00 dan realisasi sebesar Rp1.514.071.700,00 atau setara dengan 88,64%. *Output* kegiatan adalah jumlah periode pemeliharaan perabotan kantor dan fasilitas gedung kantor 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (2) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.997.972,00 dan realisasi sebesar Rp352.468.821,00 atau setara dengan 70,49%. *Output* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung fasilitas kantor 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (3) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp286.135.100,00 atau setara dengan 95,38%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (4) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.050.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp693.064.300,00 atau setara dengan 66,01%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 50 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (5) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.420.060,00 dan realisasi sebesar Rp724.835.895,00 atau setara dengan 90,67%. *Output* kegiatan adalah jumlah periode jasa kebersihan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks

- Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (6) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp369.910.950,00 atau setara dengan 73,98%. *Output* kegiatan adalah jumlah penyediaan sewa lapangan olahraga, pengajar senam, pengajar kerohanian 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (7) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.871.313.320,00 dan realisasi sebesar Rp889.862.884,00 atau setara dengan 47,55%. *Output* kegiatan adalah jumlah periode layanan jasa listrik, internet & telepon yang disediakan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (8) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp749.994.500,00 dan realisasi sebesar Rp669.655.103,00 atau setara dengan 89,29%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan yang *dimaintenance* 47 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (9) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp917.812.500,00 dan realisasi sebesar Rp849.129.374,00 atau setara dengan 92,52%. *Output* kegiatan adalah jumlah makan dan minum

penyelenggaraan rapat 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (10) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor DLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.662.000,00 atau setara dengan 62,55%. *Output* kegiatan adalah jumlah sosialisasi dan kampanye 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (11) Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTDLLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp533.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp511.590.452,00 atau setara dengan 95,93%. *Output* kegiatan adalah jumlah gedung yang direhab 1 gedung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (12) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTDLLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp209.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp185.051.738,00 atau setara dengan 88,18%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pendukung fasilitas kantor 1 Paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (13) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor PTDLLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp887.146.400,00 dan realisasi sebesar Rp882.989.419,00 atau setara dengan 99,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah periode penyediaan barang habis kantor (ATK, benda pos obat-obatan, pembelian bahan laboratorium, pengadaan alat gelas dan *photo copy*) 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (14) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur UPTDLLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp131.174.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.275.200,00 atau setara dengan 70,35%. *Output* kegiatan adalah jumlah bimtek diklat dan khusus 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (15) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTDLLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp442.550.092,00 dan realisasi sebesar Rp439.515.035,00 atau setara dengan 99,31%. *Output* kegiatan adalah jumlah periode penyediaan jasa keamanan dan kebersihan 1 Tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (16) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTDLLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp107.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp104.257.000,00 atau setara dengan 96,89%. *Output* kegiatan adalah jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas aparatur 1 Paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA)

- sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (17) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTDLLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.333.704.018,00 dan realisasi sebesar Rp1.302.095.264,00 atau setara dengan 97,63%. *Output* kegiatan adalah jumlah penyediaan langganan kantor 1 Paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (18) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTDLLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp165.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp160.296.044,00 atau setara dengan 96,83%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan rutin 1 Paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (19) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD LLH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp773.395.800,00 dan realisasi sebesar Rp740.273.289,00 atau setara dengan 95,72%. *Output* kegiatan adalah jumlah makanan dan minuman rapat tamu, koordinasi pengambilan contoh uji dan memenuhi undangan 1 Paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (20) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.613.470.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.448.503.006,00 atau setara dengan 97,06%. *Output* kegiatan adalah jumlah periode

pemeliharaan sarana dan prasarana yang dipelihara 1 Tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (21) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.003.633.000,00 dan realisasi sebesar Rp221.275.963,00 atau setara dengan 22,05%. *Output* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung fasilitas kantor 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (22) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.997.250,00 atau setara dengan 99,50%. *Output* kegiatan adalah jumlah penyediaan alat tulis kantor 1 Paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (23) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau setara dengan 20%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Kursus dan Bimtek 84 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (24) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jawa Barat sebesar Rp4.507.404.655,00 dan realisasi sebesar Rp4.363.798.557,00 atau setara dengan 96,81%. *Output* kegiatan adalah jumlah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (25) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.664.770,00 atau setara dengan 53,33%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai yang diakomodasi sewa lapangan olahraga dan instruktur olahraga 84 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (26) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp128.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.869.464,00 atau setara dengan 57,71%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan kantor PSTR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;
- (27) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp18.926.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.399.664.260,00 atau setara dengan 70,80%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan Dinas PSTR dalam kondisi baik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%;

- (28) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor PSTR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.159.200,00 dan realisasi sebesar Rp330.424.058,00 atau setara dengan 88,08%. *Output* kegiatan adalah jumlah makanan dan minuman rapat tamu, koordinasi pengambilan contoh uji dan memenuhi undangan 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas air dengan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,47 poin, meningkatnya kualitas udara dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,31 poin, dan tingkat upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) limbah domestik sebesar 0,62%.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup

a. Permasalahan

- (1) Kinerja pengendalian pencemaran masih dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat tergantung pada upaya dan komitmen dari berbagai sektor, diantaranya sektor permukiman dan perumahan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, energi, dan perhubungan;
- (2) Kinerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sangat tergantung pada upaya dan komitmen dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan juga rentan terhadap dampak perubahan iklim, diantaranya sektor kehutanan, perkebunan, energi, perhubungan dan permukiman dan perumahan.

b. Solusi

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan sektoral;
- (2) Berbagai aktivitas pada sektor kehutanan, perkebunan, energi, perhubungan dan permukiman dan perumahan diupayakan agar rendah emisi dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 adalah tingkat penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan realisasi sebesar 81,12% dengan target sebesar 92,00%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Capaian Indikator Kinerja Program Penataan Administrasi Kependudukan yakni tingkat penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan capaian sebesar 81,12% dari target sebesar 92,00%. Alokasi anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah sebesar Rp5.249.216.643,00 dengan realisasi sebesar Rp5.069.411.670,00 setara dengan 96,57%.

- (1) Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp157.314.981,00 realisasi Rp141.392.949,00 atau setara dengan 89,88%. *Output* kegiatan adalah FGD Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *desk discussion* pemeliharaan dan penataan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, *desk discussion* kelembagaan kependudukan dan pencatatan sipil. Peningkatan kapasitas tenaga *front office*, sosialisasi kebijakan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. evaluasi kinerja aparatur adminduk di Jawa Barat, FGD Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Kab/Kota di Jawa Barat, supervisi, dan studi komparatif. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman personil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Pembinaan aparatur pendaftaran penduduk yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp149.996.566,00 realisasi Rp143.262.165,00 atau setara dengan 95,51%. *Output* kegiatan adalah penyelenggaraan kegiatan perihal penanganan penduduk pindah datang di Jawa Barat;

- penyelenggaraan kegiatan identitas penduduk di Jawa Barat; penyelenggaraan kegiatan perihal penanganan penduduk rentan, non permanen, orang asing di Jawa Barat; penyelenggaraan kegiatan perihal pendaftaran penduduk di Jawa Barat; penyelenggaraan studi komparatif dalam rangka peningkatan wawasan bagi aparatur yang membidangi pendaftaran penduduk; penyelenggaraan pendampingan bagi ADB di Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penduduk di Jawa Barat dalam hal pentingnya tertib administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan;
- (3) Pembinaan aparatur pencatatan sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp149.907.955,00 realisasi Rp144.189.955,00 atau setara dengan 96,19%. *Output* kegiatan adalah FGD peningkatan pencapaian cakupan pencatatan sipil; Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan cakupan akta Kematian di Provinsi Jawa Barat; Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan cakupan akta perkawinan dan perceraian; Bimbingan dan pelatihan pencatatan sipil bagi operator *database* yang membidangi pencatatan sipil; Pendampingan pencatatan sipil di Jawa Barat; Studi komparatif; Rapat koordinasi tentang kepemilikan akta lahir anak 0-18 tahun bagi anak yatim piatu di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para aparatur pencatatan sipil dalam meningkatkan cakupan akta pencatatan sipil;
- (4) Pembinaan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp99.997.300,00 realisasi Rp91.799.500,00 atau setara dengan 91,80%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, Bimtek *Administrator Database* (ADB) pemula. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan pengembangan SIAK termasuk penyelesaian permasalahan dan menjawab tantangan yang dihadapi daerah;
- (5) Penyusunan data agregat dan profil perkembangan kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp50.000.000,00 realisasi Rp48.380.000,00

- atau setara dengan 96,76%. *Output* kegiatan adalah *softfile* data agregat kependudukan dan bahan profil kependudukan. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya data agregat kependudukan per semester dan rumusan tenaga ahli terhadap analisis profil kependudukan;
- (6) Sinkronisasi data kependudukan (Validasi Data) yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp99.993.004,00 realisasi Rp91.263.750,00 atau setara dengan 91,27%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sinkronisasi data kependudukan, perjalanan Dinas dukungan sinkronisasi data kependudukan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan data kependudukan yang valid pada database SIAK;
- (7) Pengelolaan *data center* kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp199.671.740,00 realisasi Rp197.626.140,00 atau setara dengan 98,98%. *Output* kegiatan adalah pengelolaan *data center* kependudukan sesuai SOP dan dokumen koordinasi/konsultasi pengelolaan pusat data SIAK. *Outcome* kegiatan adalah pusat data SIAK dapat berkontribusi sebagai sumber data perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat;
- (8) Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp99.993.735,00 realisasi Rp80.889.500,00 atau setara dengan 80,89%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi pemanfaatan data kependudukan dan pembuatan kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen kerjasama dalam melaksanakan pemanfaatan data kependudukan;
- (9) Monitoring dan evaluasi PIAK dan pemanfaatan data yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp99.789.000,00 realisasi Rp83.030.000,00 atau setara dengan 83,21%. *Output* kegiatan adalah penggunaan aplikasi pelaporan untuk pembuatan pelaporan sarana dan prasarana di bidang pengelolaan informasi data kependudukan dan pemanfaatan data. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan pelaporan sarana dan prasarana di bidang pengelolaan informasi data kependudukan

- dan pemanfaatan data terintegrasi dalam suatu aplikasi pelaporan;
- (10) Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp4.142.552.362,00 realisasi Rp4.047.302.711,00 atau setara dengan 97,70%. *Output* kegiatan adalah jumlah elemen pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. *Outcome* kegiatan adalah tingkat penyelenggaraan administrasi kependudukan.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yakni persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil adalah sebesar 92% dari target sebesar 92%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja adalah sebesar Rp449.967.710,00 dengan realisasi sebesar Rp413.824.864,00 setara dengan 91,97%.

- (1) Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Barat Rp149.994.225,00 realisasi Rp136.144.250,00 atau setara dengan 90,77%. *Output* kegiatan adalah penyusunan catatan laporan akuntansi keuangan bulanan, penyusunan catatan laporan akuntansi keuangan triwulan, penyusunan catatan laporan akuntansi keuangan semester, penyusunan catatan laporan akuntansi keuangan tahunan, penyusunan laporan dan realisasi bulanan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
- (2) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Internal yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp149.979.054,00 realisasi Rp129.811.864,00 atau setara dengan 86,55%. *Output* kegiatan adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal, Penyusunan RKA/DPA

- Murni dan Perubahan, Penyusunan Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan. *Outcome* kegiatan adalah Menyelaraskan kegiatan untuk peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat;
- (3) Sinkronisasi Program Perencanaan Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp149.994.431,00 realisasi Rp147.868.750,00 atau setara dengan 98,58%. *Output* kegiatan adalah Penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Tahun 2020, Usulan Kegiatan Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Menyelaraskan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Jawa Barat.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yakni Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebesar 96% dari target sebesar 95%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp1.067.763.227,00 dengan realisasi sebesar Rp1.025.480.323,00 setara dengan 96,04%.

- (1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp607.764.805,00 realisasi Rp589.470.000,00 atau setara dengan 96,99%. *Output* kegiatan adalah Pengadaan Perlengkapan Kantor. *Outcome* kegiatan adalah Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan alat perlengkapan dan peralatan kantor guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- (2) Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp229.999.211,00 realisasi Rp218.196.821,00 atau setara dengan 94,87%. *Output* kegiatan adalah Rehabilitasi Gedung FPAK. *Outcome* kegiatan adalah Kegiatan ini untuk memperbaiki dan

- mengatur tata letak ruangan gedung kantor untuk Bidang FPAK sesuai dengan kebutuhan kantor;
- (3) Rehabilitasi Gedung Sekretariat yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp229.999.211,00 realisasi Rp217.813.502,00 atau setara dengan 94,70%. *Output* kegiatan adalah Rehabilitasi Gedung Sekretariat. *Outcome* kegiatan adalah Kegiatan ini untuk memperbaiki dan mengatur tata letak ruangan gedung Sekretariat untuk ruang *lobby* dan galeri Dukcapil sesuai dengan kebutuhan kantor.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yakni Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebesar 93% dari target sebesar 90%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 4.060.538.340,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.195.207.213,00 setara dengan 78,69%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp249.993.800,00 realisasi Rp249.812.955,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Kendaraan Operasional, Perpanjangan STNK. *Outcome* kegiatan adalah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp569.741.075,00 realisasi Rp559.573.146,00 atau setara dengan 98,22%. *Output* kegiatan adalah tenaga jasa keamanan pakaian, jasa keamanan, tenaga jasa kebersihan pakaian, jasa kebersihan, jasa angkut sampah. *Outcome* kegiatan adalah untuk merekrut tenaga jasa keamanan dan kebersihan yang ditugaskan menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan kantor;

- (3) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp200.000.000,00 realisasi Rp82.474.931,00 atau setara dengan 41,24%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Jiwa Korsa Aparatur Disdukcapil/*Outbond* di alam terbuka; terselenggaranya forum komunikasi bidang umum dan kepegawaian; Keikursertaan aparatur disdukcapil dalam diklat/kursus/bimtek/seminar/sosialisasi yang diselenggarakan lembaga pemerintah maupun swasta. *Outcome* kegiatan adalah aparatur disdukcapil yang berwawasan luas, terampil, memiliki kapabilitas dan profesional di bidangnya;
- (4) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp235.881.250,00 realisasi Rp220.738.335,00 atau setara dengan 93,58%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pembinaan rohani aparatur disdukcapil Provinsi Jawa Barat dalam bentuk siraman rohani oleh alim ulama; terselenggaranya senam kebugaran jasmani oleh instruktur yang professional di bidangnya; terpenuhinya kebutuhan pakaian Dinas harian aparatur disdukcapil Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya kebutuhan pakaian batik tradisional aparatur Disdukcapil Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya kebutuhan pakaian KORPRI aparatur Disdukcapil Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga dan kelengkapannya bagi aparatur disdukcapil Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah aparatur disdukcapil yang sehat jasmani dan rohani dengan ditunjang oleh etika berbusana yang bersahaja;
- (5) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp224.957.125,00 realisasi Rp214.167.900,00 atau setara dengan 95,20%. *Output* kegiatan adalah belanja pemeliharaan komputer; belanja pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor; belanja pemeliharaan jaringan internet/telepon; belanja pemeliharaan pagar/tanaman/pekarangan;

- belanja bangunan bukan gedung. *Outcome* kegiatan adalah gedung dan kantor disdukcapil Provinsi Jawa Barat yang terpelihara dan dapat berfungsi optimal;
- (6) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp149.999.600,00 realisasi Rp82.898.809,00 atau setara dengan 55,27%. *Output* kegiatan adalah alat listrik dan elektronik, pengisian tabung gas, belanja listrik, belanja air galon dan kemasan, pemeliharaan alat rumah tangga. *Outcome* kegiatan adalah lingkungan kantor disdukcapil Provinsi Jawa Barat yang asri, sehat & seluruh fasilitas pendukungnya berfungsi secara optimal;
- (7) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp199.999.620,00 realisasi Rp179.383.448,00 atau setara dengan 89,69%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya belanja ATK; Terlaksananya belanja materai; Terlaksananya belanja tanaman habis pakai; Terlaksananya belanja plakat; Terlaksananya belanja alat rumah tangga habis pakai; Terlaksananya belanja cetak. *Outcome* kegiatan adalah kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan pada Disdukcapil Provinsi Jawa Barat;
- (8) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp1.200.000.000,00 realisasi Rp709.916.133,00 atau setara dengan 59,16%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan surat kabar/majalah; Terpenuhinya kebutuhan langganan jaringan internet; Terpenuhinya kebutuhan langganan TV prabayar; Terpenuhinya honorarium jasa tenaga kerja non pegawai. *Outcome* kegiatan adalah optimalisasi kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh sumber informasi tambahan dan tenaga SDM non PNS yang terlatih/terampil;
- (9) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp979.965.870,00 realisasi Rp875.319.326,00 atau setara dengan 89,32%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alokasi belanja makan dan minuman untuk keperluan rapat internal di

- lingkungan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, tersedianya belanja makan dan minum tamu yang berkunjung ke Disdukcapil, tersedianya belanja makanan dan minuman lembur pegawai, belanja perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan pada Disdukcapil Provinsi Jawa Barat;
- (10) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Rp50.000.000,00 realisasi Rp21.322.230,00 atau setara dengan 42,64%. *Output* kegiatan adalah penyediaan publikasi dan dokumentasi, penyediaan sewa. *Outcome* kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan sewa, publikasi, dokumentasi kantor guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Permasalahan

1. Masih terdapatnya masalah dalam pembuatan, pengurusan atau penggantian e-KTP;
2. Akurasi data kependudukan skala provinsi;
3. Kesadaran pemanfaatan data kependudukan di tingkat perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat;
4. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dalam menangani permasalahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terbatas pada lingkup; fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi;
5. Kondisi sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan admindukcapil di Kabupaten/Kota belum optimal;
6. Kualitas dan kuantitas SDM Disdukcapil, baik di provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal, dan belum sesuai dengan kebutuhan;
7. Akurasi dan konsolidasi data kependudukan di Jawa Barat, sangat bergantung kepada akurasi data yang disajikan oleh kabupaten/kota, dan kecepatan konsolidasi data yang merupakan kewenangan pemerintah pusat; dan
8. Data kependudukan dari Disdukcapil, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk semua keperluan proses pembangunan, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

b. Solusi

1. Meningkatkan pelayanan dan penyelesaian masalah administrasi kependudukan di level provinsi;
2. Sinkronisasi data kependudukan antar Kabupaten/Kota dan provinsi;
3. Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan tingkat perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Ditjen Dukcapil;
5. Mengupayakan pemberian bantuan keuangan dari APBD provinsi kepada Kabupaten/Kota Khususnya untuk Disdukcapil dalam rangka optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Memperbanyak volume kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan rapat-rapat koordinasi terkait kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Mengembangkan sistem yang dapat menunjang akurasi data kependudukan, seperti: SiSOLID, SiMONESA, dan SiDATUK; dan
8. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan perangkat daerah dalam rangka pemanfaatan data kependudukan dengan berikannya hak akses dan data balikan dari seluruh perangkat daerah.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 adalah Indeks Desa Membangun dengan realisasi sebesar 0,67% dari target sebesar 0,65%; Persentase Desa Mandiri dengan realisasi sebesar 1,58% dari target sebesar 1,18%; kabupaten/kota yang melaksanakan TMMD dengan realisasi sebesar 12 kabupaten/kota dari target sebesar 12 kabupaten/kota; kabupaten/kota yang melaksanakan BBGRM dengan realisasi sebesar 1 kabupaten/kota dari target sebesar 1 Kabupaten/Kota; kabupaten/kota yang melaksanakan BSMSS dengan realisasi sebesar 24 kabupaten/kota dari target sebesar 24 kabupaten/kota dan jenis inovasi dan TTG yang dihasilkan dari 27 kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 9 inovasi dari target sebesar 8 inovasi.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat yakni peningkatan kapasitas PKP (Pendamping Kader Posyandu) tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 654 Orang dari target sebesar 654 Orang; penguatan peran Posyandu (DACIN) tingkat kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 34 buah dari target sebesar 34 buah; peningkatan kapasitas lembaga adat tingkat kabupaten dengan realisasi sebesar 3 desa dari target sebesar 3 desa dan peran PKK dalam pembangunan tingkat kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 78,69%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp8.773.450.250,00 dan realisasi Rp7.908.347.047,00 setara dengan 90,14%.

- (1) Penguatan Peran Posyandu di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp861.621.247,00 atau setara dengan 95,74%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah Posyandu Mandiri;

- (2) Honor Pendamping Kader Posyandu (PKP) di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.633.450.250,00 dan realisasi sebesar Rp4.461.148.152,00 atau setara dengan 96,28%. *Output* kegiatan adalah jumlah penerima honor kader Posyandu. *Outcome* kegiatan meningkatnya jumlah Posyandu Mandiri;
- (3) Peran PKK dalam Pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.470.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.156.169.266,00 atau setara dengan 78,69%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah lembaga-lembaga budaya dan keswadayaan masyarakat;
- (4) Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp429.408.382,00 atau setara dengan 85,88%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya jumlah lembaga-lembaga budaya dan keswadayaan masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah 1. Terumuskannya rencana laboratorium dan model sinergi kampung adat; 2. Meningkatnya peran dan kerjasama kampung adat.

b. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Capaian indikator kinerja Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yakni Mobil Aspirasi Kampung Juara (MASKARA) tingkat kabupaten dengan realisasi sebesar 126 Unit dari target sebesar 126 Unit; jumlah desa yang sudah menerapkan SISKEUDES dengan realisasi sebesar 90% dari target sebesar 100%; Jambore desa dan kelurahan dengan realisasi sebesar 100%; penataan administrasi desa dengan realisasi sebesar 60% dari target sebesar 100%; *workshop* perencanaan pembangunan desa dengan realisasi sebesar 90% dari target sebesar 100%; penataan data dan profile desa dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebesar Rp54.614.895.121,00 realisasi anggaran Rp52.002.869.010,00 setara dengan 95,22%.

- (1) Kegiatan Penataan Data dan Profil Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp556.997.766,00 dan realisasi sebesar Rp513.465.856,00 atau setara dengan 90,72%. *Output* kegiatan adalah 1. Peningkatan jumlah desa berklasifikasi swakarya dan swasembada; 2. Validasi data profil untuk bahan kebijakan. *Outcome* kegiatan adalah persentase tingkat perkembangan desa mandiri;
- (2) Kegiatan Workshop Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.999.475,00 dan realisasi sebesar Rp186.812.330,00 atau setara dengan 53,38%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kinerja pemerintah desa. *Outcome* kegiatan adalah persentase tingkat perkembangan desa mandiri;
- (3) Kegiatan Jambore Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.849.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.548.034.074,00 atau setara dengan 83,73%. *Output* kegiatan adalah 1) Kerjasama desa; 2) Pemasaran hasil TTG desa; 3) Model pemanfaatan hasil TTG; 4) Peningkatan hasil usaha BUMDes. *Outcome* kegiatan adalah persentase tingkat perkembangan mandiri;
- (4) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.999.844,00 dan realisasi sebesar Rp128.159.206,00 atau setara dengan 36,62%. *Output* kegiatan adalah pemerintah desa mengelola keuangan aset desa berbasis aplikasi. *Outcome* kegiatan adalah jumlah desa yang sudah menerapkan SISKEUDES;
- (5) Kegiatan Penataan Administrasi Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.998.036,00 dan realisasi sebesar Rp109.271.391,00 atau setara dengan 43,71%. *Output* kegiatan adalah pedoman penguatan penerapan kewenangan desa. *Outcome* kegiatan adalah jumlah perangkat desa/kelurahan yang memiliki pendidikan diatas pendidikan;
- (6) Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan dan Penilaian Loma Desa/Kelurahan yang

dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.517.126.153,00 atau setara dengan 96,62%. *Output* kegiatan adalah bertambah desa dan kelurahan dengan tingkat perkembangan cepat berkembang dan berkembang. *Outcome* kegiatan adalah persentase tingkat perkembangan mandiri.

c. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yakni jumlah penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Patriot Desa) dengan realisasi sebesar 110 orang dari target 110 orang; TMMD dengan realisasi sebesar 12 kabupaten/kota dari target 12 kabupaten/kota; BSMSS dengan realisasi sebesar 24 kabupaten/kota dari target 24 kabupaten/kota; BBGRM dengan realisasi sebesar 1 kabupaten/kota dari target 1 kabupaten/kota; desa yang mendapat bantuan APBD dengan realisasi sebesar 5.308 desa dari target sebesar 5.312 desa; jumlah desa yang mendapatkan bantuan jembatan desa dengan realisasi sebesar 23 unit dari target 20 unit dan pelotting pemetaan batas desa dengan realisasi sebesar 4 kabupaten dari 3 kabupaten. Alokasi anggaran Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan sebesar Rp19.224.731.200,00 dengan realisasi Rp13.689.508.050,00 atau setara dengan 71,21%.

- (1) Kegiatan Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.685.246.450,00 dan realisasi sebesar Rp4.585.500.965,00 atau setara dengan 85,17%. *Output* kegiatan adalah pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam implementasi penetapan dan penegasan batas desa serta penataan ruang desa. *Outcome* adalah prosentase anggaran APB-Desa diatas 30% untuk pembangunan infrastruktur perdesaan;
- (2) Kegiatan Evaluasi dan verifikasi Bantuan Keuangan/Hibah yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp851.739.000,00 atau setara dengan 85,17%. *Output* kegiatan adalah 1. Bantuan keuangan ke 5312 desa dilaksanakan sebagaimana Usulan

Proposal yang diajukan: 2. Penyelenggaraan bankeu pembangunan infrastruktur perdesaan tepat sasaran, jumlah dan kualitas. *Outcome* kegiatan adalah prosentase anggaran APB-Desa diatas 30% untuk pembangunan infrastruktur perdesaan;

- (3) Kegiatan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.539.484.750,00 dan realisasi sebesar Rp8.252.268.085,00 atau setara dengan 65,81%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga desa dalam kegiatan BBGRM, TMMD, dan BSMSS. *Outcome* kegiatan adalah prosentase anggaran APB-Desa diatas 30% untuk pembangunan infrastruktur perdesaan.

d. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan yakni peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa tingkat jenis inovasi dan TTG yang dihasilkan dari 27 kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 27 kabupaten/kota dari target sebesar 27 kabupaten/kota; penguatan akses permodalan dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 496 desa dari target sebesar 500 desa; peningkatan kapasitas lembaga ekonomi tingkat kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 88% dari target sebesar 100%; pengembangan kawasan perdesaan tingkat kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 73% dari target sebesar 100% dan peningkatan pemasaran perdesaan tingkat kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 97% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan sebesar Rp53.406.600.000,00 dan realisasi Rp52.487.529.036,00 atau setara dengan 98,28%.

- (1) Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi & Tingkat Nasional yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp969.669.500,00 atau setara dengan 96,97%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya perkembangan inovasi dan Teknologi Tepat Guna

- untuk solusi permasalahan perdesaan dari perkotaan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp660.975.437,00 atau setara dengan 88,13%. *Output* kegiatan a) Terlaksananya workshop peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan b) Dihasilkannya 3 BUMDes juara/terbaik di Jawa Barat adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengelolaan BUMDesa. *Outcome* meningkatnya wawasan dan pengetahuan pengelola BUMDes;
 - (3) Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp367.110.589,00 atau setara dengan 73,42%. *Output* kegiatan adalah a) Terlaksananya *expo* BUMDes dan b) Terlaksananya rapat koordinasi kawasan perdesaan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kerjasama pengembangan bisnis BUMDes dan BUMDes bersama;
 - (4) Kegiatan Peningkatan Pemasaran Perdesaan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp388.532.294,00 atau setara dengan 97,13%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya workshop pemasaran produk Badan Usaha Milik Desa. *Outcome* kegiatan pengembangan kapasitas produksi dan akses pemasaran potensi desa;
 - (5) Kegiatan Penguatan Akses Permodalan dan Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.756.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.101.241.180,00 atau setara dengan 98,71%. *Output* kegiatan adalah a) Terlaksananya diseminasi permodalan BUMDes, b) Terlaksananya temu bisnis BUMDes dan 3) Terlaksananya fasilitasi pengembangan modal bagi 496 BUMDes. *Outcome* kegiatan adalah

meningkatkan fasilitasi pengembangan kerjasama dan permodalan desa.

e. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Tersedianya laporan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp3.685.600.000,00 dan realisasi Rp2.572.487.051,00 atau setara dengan 69,80%.

- (1) Kegiatan Perencanaan Program Kegiatan DPM-Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.135.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp944.679.769,00 atau setara dengan 83,19%. *Output* kegiatan adalah ada 35/50 kegiatan dapat terselenggara secara optimal dan efektif, keberhasilannya bisa diukur. *Outcome* kegiatan adalah tingkat ketersediaan data dan informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DPM-Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.507.250,00 atau setara dengan 21,75%. *Output* kegiatan-Kegiatan akan *visible* dan deviasinya akan terkendali. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan DPM-Desa Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp88.650.961,00 atau setara dengan 88,65%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan DPM-Desa Provinsi Jawa Barat yang tepat waktu. *Outcome* kegiatan adalah tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (4) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban DPM-Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.305.745,00 atau setara dengan 25,31%. *Output* kegiatan adalah efektifitas penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran secara optimal. *Outcome* kegiatan tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (5) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Wilayah Perbatasan Perdesaan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.550.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.054.221.404,00 atau setara dengan 68,01%. *Output* kegiatan adalah terwujudnya kesetaraan pembangunan desa-desa perbatasan antar provinsi. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (6) Kegiatan Pembinaan Desa Emas Jawa Barat Nomor 140/Kep.1010-BPMPD/2016 tentang Lokasi Desa *Entrepreneur*, Mandiri, Adil dan Sejahtera yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp416.121.922,00 atau setara dengan 69,35%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya sinergitas perencanaan pembangunan desa dan daerah (*Bottom Up Meet Top Down*). *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni tingkat sarana dan prasarana aparatur Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp8.886.752.997,00 dan realisasi Rp7.612.346.640,00 atau setara dengan 85,66%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp8.886.752.997,00 dan realisasi sebesar Rp7.612.346.640,00 atau setara dengan 85,66%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terselenggara secara optimal. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

g. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni tingkat dukungan administrasi perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp7.460.634.772,00 dan realisasi Rp6.267.122.850,00 atau setara dengan 84,00%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.183.870.071,00 dan realisasi sebesar Rp1.164.850.437,00 atau setara dengan 98,39%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp367.430.599,00 atau setara dengan 59,51%. *Output* kegiatan adalah kelancaran pelaksanaan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional DPM-Desa. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang

- dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp575.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp536.921.550,00 atau setara dengan 93,38%. *Output* kegiatan adalah semangat kerja, disiplin, jiwa korsa. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (4) Kegiatan Pemeliharaan Perabot, Fasilitas dan Gedung Kantor Pengadaan Kontruksi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp747.130.000,00 dan realisasi sebesar Rp534.929.210,00 atau setara dengan 71,60%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pada DPM-Desa Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB;
- (5) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Penyediaan Jasa Kantor, Komunikasi, Sumber Daya Listrik, Internet dan Air yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.846.992.060,00 dan realisasi sebesar Rp1.628.249.824,00 atau setara dengan 88,16%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terselenggara secara optimal. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Kegiatan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.644.792.888,00 dan realisasi sebesar Rp1.368.640.195,00 atau setara dengan 83,21%. *Output* kegiatan adalah bahan kebijakan, bahan perencanaan strategis dan bahan keputusan. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (7) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Peningkatan Kopetensi Aparatur DPM-Desa yang dilaksanakan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp62.175.000,00 atau setara dengan 41,45%. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya Kompetensi Pegawai DPM-Desa. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(8) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp395.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp326.309.000,00 atau setara dengan 82,52%. *Output* kegiatan adalah penguatan eksistensi DPM-Desa. *Outcome* kegiatan adalah jumlah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(9) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.753,00 dan realisasi sebesar Rp277.617.035,00 atau setara dengan 92,54%. *Output* kegiatan adalah kemudahan penyelenggaraan kegiatan administrasi DPM-Desa. *Outcome* kegiatan adalah jumlah tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Permasalahan

Tidak ada.

b. Solusi

Tidak ada.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 adalah Terkendalnya jumlah anak yang dilahirkan dalam satu keluarga sebesar 2,45 Angka Fertilitas Total dari target sebesar 2,34 Angka Fertilitas Total. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

Capaian Indikator Kinerja Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yakni Angka Fertilitas Total dengan capaian sebesar 2,45 dari target sebesar angka 2,34. Alokasi anggaran Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebesar Rp13.497.499.920,00 dan realisasi Rp12.901.614.769,00 setara dengan 95,59%.

- (1) Kegiatan Ketahanan Keluarga sebesar yang dilaksanakan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp13.497.499.920,00 dan realisasi Rp12.901.614.769,00 atau setara dengan 95,59%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1. Bimbingan Teknis Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR); 2. Evaluasi Laporan Motekar; 3. FGD Kampung Keluarga Bahagia (KALUA); 3. Finalisasi Pedoman Umum, Juklak, Juknis Kalua; 4. Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat; 5. Peringatan Harganas Tingkat Provinsi; 6. Terealisasinya honorarium Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR); 7. Pembinaan Tenaga Motekar; 7. Rakor Program Motekar; 8. Rapat Teknis bidang ketahanan keluarga; 9. Rakor PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan 9. Seminar Hari Keluarga. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya jumlah keluarga prasejahtera di Provinsi Jawa Barat.

b. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Capaian Indikator Kinerja Program Pelayanan Keluarga Berencana yakni tingkat cakupan peserta KB aktif dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pelayanan Keluarga Berencana sebesar

Rp1.699.998.656,00 dan realisasi Rp1.475.163.879,00 setara dengan 86,77%.

- (1) Kegiatan Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat sebesar yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.998.879,00 dan realisasi Rp688.765.765,00 atau setara dengan 83,60%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1. Peningkatan kapasitas TPD/K (Tenaga Penggerak Desa/Kota) dengan peserta sebanyak 100 orang; 2. Rapat koordinasi Sinergitas Program Pengendalian Penduduk dengan peserta sebanyak 54 orang; 3. Sarasehan kependudukan yang diikuti sebanyak 120 peserta; 4. FGD rancangan penyusunan GDPK; serta 5. Studi Koomparatif Program Pengendalian Kependudukan. *Outcome* kegiatan adalah 1. terpadunya kebijakan pengendalian kependudukan di Jawa Barat; 2. Meningkatnya wawasan TPD tentang Program Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat;
- (2) Peningkatan Kesertaan Ber-KB sebesar yang dilaksanakan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp899.999.777,00 dan realisasi Rp806.398.114,00 atau setara dengan 99,60%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya 1. Bhakti Sosial Pelayanan KB untuk 500 akseptor; 2. Kesatuan Kesrak PKK KKBPK Kesehatan di 27 Kabupaten Kota; Pertemuan Paguyuban KB Pria dengan peserta sebanyak 57 orang; TNI KKBPK Kesehatan Terpadu di 27 Kabupaten Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah peserta KB aktif.

c. Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Capaian Indikator Kinerja Program Pendewasaan Usia Perkawinan yakni tingkat usia kawin pertama dengan realisasi sebesar 108,75% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pelayanan Keluarga Berencana sebesar Rp999.996.600,00 dan realisasi Rp888.706.040,00 atau setara dengan 88,87%.

- (1) Pendewasaan Usia Perkawinan sebesar yang dilaksanakan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebesar Rp999.996.600,00 dan realisasi Rp888.706.040,00 atau setara dengan 88,87%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kampanye Akhiri

Perkawinan Anak di Jawa Barat dengan peserta sebanyak 135 peserta dan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan jumlah peserta sebanyak 735 peserta. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita di Jawa Barat menjadi 21 Tahun.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Permasalahan

1. Pertambahan penduduk yang cepat yang disebabkan oleh migrasi dan kelahiran;
2. Masih rendahnya kualitas sebagian besar sumber daya manusia Jawa Barat;
3. Persebaran penduduk yang tidak merata serta tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Belum optimalnya pembangunan keluarga di Jawa Barat;
5. Masih banyaknya usia kawin pertama penduduk Jawa Barat di bawah usia 20 tahun.

b. Solusi

1. Pengendalian penduduk melalui program pelayanan keluarga berencana;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dengan berkolaborasi lintas sektor;
3. Pengelolaan kependudukan efektif dan efisien agar dapat tumbuh seimbang dan ideal antara pembangunan manusia dengan kualitas lingkungan;
4. Penguatan pembangunan keluarga sehingga keluarga dapat menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga dengan baik;
5. Optimalisasi program pendewasaan usia perkawinan.

15. Urusan Perhubungan

Capaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Perhubungan Tahun 2019 adalah Tingkat Konektivitas Antar Wilayah dengan capaian sebesar 46,13% dari target sebesar 41%-43%; jumlah penumpang angkutan umum (darat, laut dan ASDP, kereta api dan udara) dengan capaian sebesar 260.039.637 orang dari target sebesar 174.000.000 orang; persentase angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan dengan capaian sebesar 57,33% dari target sebesar 56%; persentase ketersediaan prasarana kereta api, transportasi darat, laut dan ASDP, dan udara dengan capaian sebesar 73,61% dari target sebesar 79%; persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, PJU, guardrill dan lain lain) pada ruas jalan provinsi dengan capaian sebesar 33,85% dari target sebesar 38%; tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat, perhubungan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan, perhubungan udara dengan capaian sebesar 48,90% dari target sebesar 37%; tingkat ketersediaan jaringan transportasi massal berbasis rel dengan capaian sebesar 20,40% dari target sebesar 16%.

Indikator kinerja dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah ketersediaan prasarana transportasi darat, laut & ASDP, kereta api dan udara dengan capaian sebesar 73,61% dari target sebesar 79%. Alokasi anggaran Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp116.525.258.379,00 dengan realisasi sebesar Rp54.898.555.387,00 setara dengan 47,11%.

- (1) Kegiatan Pembangunan Pagar Perimetri Bandara Nusawiru (Lanjutan) tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.129.941.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.648.169.135,00 setara dengan 77,38%. *Output* kegiatan adalah pagar perimetri Bandara Nusawiru sepanjang 1.681,5 meter (Lanjutan). *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana bandara dan pelayanan jasa kebandarudaraan Bandara Nusawiru;
- (2) Kegiatan Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Terminal Tipe B Wilayah IV, yang dilaksanakan

- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp740.318.000,00 setara dengan 98,71%. *Output* kegiatan adalah sarana dan prasarana Terminal Tipe B Wilayah IV berupa revitalisasi gedung Terminal Ciledug, revitalisasi gedung Terminal Indramayu, revitalisasi gedung Terminal Sumber, revitalisasi bukan gedung Terminal Indramayu, revitalisasi bukan gedung Terminal Sumber, revitalisasi bukan gedung Terminal Ciledug. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV;
- (3) Kegiatan Operasional Gedung Display di BIJB Kertajati Majalengka, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.329.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.040.310.638,00 setara dengan 87,58%. *Output* kegiatan adalah sambungan listrik PLN, *elevator*, eskalator dan peralatan operasional gedung *display* BIJB Kertajati Majalengka. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana bandara dan pelayanan jasa kebandarudaraan Bandara Nusawiru;
 - (4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Bandar Udara Nusawiru Kabupaten Pangandaran, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp415.088.103,00 dan realisasi sebesar Rp301.664.324,00 atau setara dengan 72,67%. *Output* kegiatan adalah dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan Bandar Udara Nusawiru Kabupaten Pangandaran. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan aksesibilitas perhubungan udara di Jawa Barat;
 - (5) Kegiatan Rencana Aksi Multi Pihak (RAMP-IP) Pengembangan Bandar Udara di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp468.067.249,00 dan realisasi sebesar Rp407.522.495,00 atau setara dengan 87,06%. *Output* kegiatan adalah laporan Rencana Aksi Multi Pihak-Implementasi Pekerjaan (RAMP-IP) Pengembangan Bandar Udara di Jawa Barat berupa pembahasan rencana penggunaan lahan PT. PN VIII untuk pencaanangan pembangunan Bandar Udara baru di Sukabumi, pembahasan percepatan proses sertifikasi lahan inbreng BIJB, pembahasan tindak

lanjut surat permohonan lahan Polda Jabar di BIJB Kertajati, pembahasan KKOP Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung, rapat koordinasi peningkatan pengendalian bangunan dan tegakan pada KKOP Bandara Husein Sastranegara Bandung, pembahasan lampu penerangan jalan menuju BIJB, pembahasan rencana pemberangkatan Haji di BIJB, pembahasan rencana pengalihan rute dari Husein Sastranegara Bandung ke BIJB. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan aksesibilitas perhubungan udara di Jawa Barat;

- (6) Kegiatan Pengadaan Konten dan Peningkatan Disain Interior dan Eksterior Gedung *Display* BIJB di Kertajati Majalengka (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.499.999.710,00 dan realisasi sebesar Rp1.033.749.541,00 atau setara dengan 68,92%. *Output* kegiatan adalah dokumen perumusan konten dan penyusunan DED konten interior dan eksterior gedung *display* BIJB di Kertajati Majalengka. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan aksesibilitas perhubungan udara di Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Penyusunan Dokumen AMDAL Bandar Udara di Sukabumi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.999.973,00 dan realisasi sebesar Rp495.816.250,00 atau setara dengan 82,64%. *Output* kegiatan adalah dokumen KA-ANDAL Bandar Udara di Sukabumi. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan aksesibilitas perhubungan udara di Jawa Barat;
- (8) Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Keselamatan Pelayaran di Sungai Dan Danau Di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp697.249.976,00 dan realisasi sebesar Rp683.847.038,00 atau setara dengan 98,08%. *Output* kegiatan adalah (1) Sosialisasi aturan dan pengetahuan keselamatan pelayaran, pengadaan sarana dan prasarana; dan (2) Dokumen pemetaan sarana dan prasarana laut dan ASDP. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan keselamatan perhubungan laut dan ASDP di Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Kerjasama Pembangunan Pelabuhan Laut dan ASDP di Jawa

Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp239.999.678,00 dan realisasi sebesar Rp218.028.815,00 atau setara dengan 90,85%. *Output* kegiatan adalah dokumen kerjasama pembangunan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan keselamatan perhubungan laut dan ASDP di Jawa Barat;

- (10) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpulan Regional di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp709.388.809,00 dan realisasi sebesar Rp650.691.400,00 atau setara dengan 91,73%. *Output* kegiatan adalah dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan pembangunan pelabuhan laut pengumpulan regional di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan keselamatan perhubungan laut dan ASDP di Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Persiapan dan Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga Kapal Wisata Teluk Palangpang di Kabupaten Sukabumi, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.436.089.263,00 dan realisasi sebesar Rp3.253.033.703,00 atau setara dengan 59,84%. *Output* kegiatan adalah lahan untuk pembangunan dermaga kapal wisata Teluk Palangpang seluas 4.997 m². *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan keselamatan perhubungan laut dan ASDP di Jawa Barat;
- (12) Kegiatan Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Laut dan ASDP di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.999.907,00 dan realisasi sebesar Rp266.253.154,00 atau setara dengan 88,75%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan pembinaan lalu lintas angkutan laut dan ASDP di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan keselamatan perhubungan laut dan ASDP di Jawa Barat;
- (13) Kegiatan Sosialisasi Penunjang Angkutan di Perairan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan

- realisasi sebesar Rp199.983.000,00 setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi penunjang angkutan di perairan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan keselamatan perhubungan laut di Jawa Barat;
- (14) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.452.322.064,00 dan realisasi sebesar Rp1.374.891.963,00 setara dengan 94,67%. *Output* kegiatan 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan perkeretaapian di Jawa Barat tahun 2019 yaitu dokumen analisis dampak lalu lintas monorail Bandung Raya Koridor Leuwipanjang-Gedebage-Tegalluar, dokumen analisis dampak lingkungan untuk pembangunan monorail Bandung Raya Koridor Leuwipanjang-Gedebage-Tegal luar dan dokumen KPBU Perkeretaapian Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah pengembangan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis rel dan peningkatan keselamatan perkeretaapian di Jawa Barat;
- (15) Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Reaktivasi Jalur KA Rancaekek-Tanjungsari yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.009.095.999,00 dan realisasi sebesar Rp668.780.335,00 setara dengan 33,29%. *Output* kegiatan adalah 2 (dua) dokumen yaitu dokumen perencanaan pengadaan tambahan lahan untuk reaktivasi jalur KA Rancaekek-Tanjungsari dan penilaian harga tanah jalur Rancaekek-Tanjungsari. *Outcome* kegiatan adalah pengembangan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis rel dan peningkatan keselamatan perkeretaapian di Jawa Barat;
- (16) Kegiatan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian di Jawa Barat tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp807.296.769,00 dan realisasi sebesar Rp624.591.791,00 setara dengan 77,37%. *Output* kegiatan adalah dokumen penanganan dampak sosial pada penutupan perlintasan sebidang kereta api Jawa Barat dan rambu lalu lintas di jalan sekitar perlintasan. *Outcome* kegiatan adalah pengembangan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis rel dan peningkatan keselamatan perkeretaapian di Jawa Barat;

- (17) Kegiatan Persiapan Penertiban Lahan Perkeretaapian di Jawa Barat tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp247.919.700,00 dan realisasi sebesar Rp103.068.844,00 setara dengan 41,57%. *Output* kegiatan adalah operasional tim penertiban lahan dari TNI/Polri, Kab/Kota. *Outcome* kegiatan adalah pengembangan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis rel dan peningkatan keselamatan perkeretaapian di Jawa Barat;
- (18) Kegiatan Studi Trase Pembangunan LRT Bandung Raya koridor Barat-Timur, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp556.890.953,00 dan realisasi sebesar Rp507.997.148,00 setara dengan 91,22%. *Output* kegiatan adalah dokumen kajian studi trase pembangunan LRT Bandung Raya koridor Barat-Timur. *Outcome* kegiatan adalah pengembangan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis rel dan peningkatan keselamatan perkeretaapian di Jawa Barat;
- (19) Kegiatan Perencanaan Angkutan Barang melalui Jaringan Kereta Api di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.684.262,00 dan realisasi sebesar Rp78.874.928,00 setara dengan 79,12%. *Output* kegiatan adalah dokumen kajian potensi angkutan barang melalui jaringan kereta api di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah pengembangan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis rel dan peningkatan keselamatan perkeretaapian di Jawa Barat;
- (20) Kegiatan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Terminal Tipe B Daerah Perbatasan Jawa Barat-Banten UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.024.836.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.611.559.600,00 setara dengan 79,59%. *Output* kegiatan adalah rehabilitasi terminal tipe B Palabuhanratu UPTD pengelolaan prasarana perhubungan LLAJ Wilayah I. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan provinsi di wilayah kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah I;

- (21) Kegiatan Revitalisasi Sarana Prasarana Terminal Tipe B UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp598.978.300,00 setara dengan 99,83%. *Output* kegiatan adalah rehabilitasi/renovasi terminal tipe B Pameungpeuk, Pangandaran dan Singaparna. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan provinsi di wilayah kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III;
- (22) Kegiatan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Terminal Tipe B UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.152.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.062.518.622,00 setara dengan 92,17%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan gedung kantor rehabilitasi terminal tipe B Cikarang, dokumen perencanaan (*Planning*) rehabilitasi terminal tipe B Leuwiliang, pemeliharaan gedung kantor rehabilitasi terminal tipe B Cileungsi, dokumen perencanaan DED revitalisasi terminal tipe B Cikarang Kabupaten Bekasi. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan provinsi di wilayah kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah I;
- (23) Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp998.888.964,00 dan realisasi sebesar Rp992.322.228,00 setara dengan 99,34%. *Output* kegiatan adalah 1) Pembangunan KM/WC di Pos Pengawasan Ciputri Waduk Cirata; 2) Pembangunan mushola di Cipicung; 3) Pembangunan Dermaga Labuh Apung; 4) Pembangunan jalan masuk di Kebon Coklat; 5) Pengadaan dan pemasangan PJU *Solar Cell* di Babakan Garut; 6) Pengadaan dan pemasangan PJU *Solar Cell* di Majingklak. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan keselamatan perhubungan ASDP di Jawa Barat;
- (24) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bandar Udara di Sukabumi, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.000.000.000,00 dan realisasi sebesar

Rp99.139.927,00 setara dengan 0,18%. *Output* kegiatan adalah persiapan pengadaan lahan Bandara Sukabumi dan kegiatan ini tidak dilanjutkan pelaksanaannya, karena penetapan lokasi bandara di Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan KM. 75 tahun 2019 belum ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan, mengingat pada persetujuan DPRD terhadap revisi RTRW Jawa Barat tidak mencantumkan secara spesifik lokasi Bandara di Sukabumi. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana bandara dan pelayanan jasa kebandarudaraan Bandara Nusawiru;

- (25) Kegiatan Pengadaan Tanah BIJB Lanjutan, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.459.551.008,00 setara dengan 98,46%. *Output* kegiatan adalah luas tanah dibebaskan untuk BIJB adalah 64 Bidang, 34.296 m². *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana bandara dan pelayanan jasa kebandarudaraan Bandara Nusawiru;
- (26) Kegiatan Peningkatan Gedung Dan Terminal Tipe B Di Wilayah UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp776.893.200,00 setara dengan 97,11%. *Output* kegiatan adalah instalasi listrik di terminal tipe B Cikarang, instalasi listrik di terminal tipe B Cileungsi, gedung istirahat pengemudi di terminal tipe B Cikarang, selasar terminal tipe B Cikarang, instalasi listrik di terminal tipe B Leuwiliang. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah I.

b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum jumlah penumpang angkutan umum pada program peningkatan pelayanan angkutan dengan capaian sebesar 260.938.472 penumpang dari target sebesar 174.000.000 penumpang. Alokasi anggaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Dinas Perhubungan adalah

sebesar Rp77.042.463.575,00 dengan realisasi sebesar Rp53.450.187.299,00 setara dengan 69,38%.

- (1) Kegiatan Evaluasi Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.299.997.900,00 dan realisasi sebesar Rp29.632.221.410,00 setara dengan 61,35%. *Output* kegiatan adalah (1) dokumen evaluasi angkutan penumpang umum tidak dalam trayek di Jawa Barat (2) Bus wisata untuk kab/kota sebanyak 24 (dua puluh empat) unit. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana perhubungan darat di Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Bermotor Terintegrasi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.049.986.584,00 dan realisasi sebesar Rp3.989.683.547,00 setara dengan 65,95%. *Output* kegiatan sistem informasi manajemen kendaraan bermotor terintegrasi di Jawa Barat dan pengelolaan terminal tipe B dengan menggunakan aplikasi sistem informasi. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana perhubungan darat di Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.968.277,00 dan realisasi sebesar Rp303.833.427,00 setara dengan 75,96%. *Output* kegiatan adalah pembinaan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana perhubungan darat di Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp402.698.627,00 dan realisasi sebesar Rp297.116.000,00 setara dengan 73,78%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi keselamatan terhadap usia dini dan sosialisasi keselamatan melalui media cetak dan elektronik. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana perhubungan darat di Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan, Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

- Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.984.369,00 dan realisasi sebesar Rp420.214.696,00 setara dengan 93,38%. *Output* kegiatan adalah pemilihan Abdi Yasa Teladan, Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana perhubungan darat di Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.983.285.112,00 dan realisasi sebesar Rp2.287.626.265,00 setara dengan 57,43%. *Output* kegiatan adalah (1) Evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas, Analisis dampak lalu lintas; (2) *Pilot Project bike sharing* di kawasan wisata strategis. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana perhubungan darat di Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Evaluasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp549.991.346,00 dan realisasi sebesar Rp531.765.508,00 setara dengan 96,69%. *Output* kegiatan adalah (1) dokumen konversi angkot ke bis di Jawa Barat; (2) dokumen *review* jaringan trayek di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana perhubungan darat di Jawa Barat;
- (8) Kegiatan Operasional Pelayanan Angkutan Umum di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.084.011.877,00 dan realisasi sebesar Rp10.350.160.677,00 setara dengan 93,38%. *Output* kegiatan adalah (1) Operasional bus BRT 10 Unit; (2) Operasional angkutan penyandang disabilitas 8 Unit dan (3) Penyediaan bus gratis/subsidi guru dan siswa, karyawan/buruh dan bus gratis/subsidi disabilitas 5 unit. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana perhubungan darat di Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.722.541.405,00 dan realisasi sebesar Rp5.560.348.730,00 setara dengan 97,17%. *Output* kegiatan adalah (1)Operasional CCTV Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

- (2) Pengembangan CCTV Dishub Jabar berupa CCTV *live view* sebanyak 48 unit (38 mengganti dan 10 titik baru beserta pendukungnya berupa *server, wall display, PC, dan laptop monitoring*). *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana perhubungan darat di Jawa Barat;
- (10) Kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)-Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Transportasi, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.998.078,00 dan realisasi sebesar Rp77.217.039,00 setara dengan 77,22%. *Output* kegiatan adalah dokumen evaluasi RAD-GRK di Bidang Transportasi. *Outcome* kegiatan adalah pemantauan evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)-Gas Rumah Kaca (GRK) di Jawa Barat.

c. Program Fasilitas Perlengkapan Jalan

Capaian Indikator Kinerja Program Fasilitas Perlengkapan Jalan adalah persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi dengan capaian sebesar 33,85% dari target sebesar 38%. Alokasi anggaran Program Fasilitas Perlengkapan Jalan adalah sebesar Rp16.255.508.979,00 dengan realisasi sebesar Rp15.758.057.358,00,00 setara dengan 96,94%.

- (1) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.841.578.006,00 dan realisasi sebesar Rp2.799.392.175,00 setara dengan 98,52%. *Output* kegiatan adalah 1) RPPJ 6 unit; 2) Rambu Lalu Lintas 163 buah; 4) *Traffic cone* 645 buah; 5) Rambu *portable* 20 buah; 6) RPPJ *movable/portable* 20 buah; 7) *Stick cone* 80 buah; 8) *Water barrier* 139 buah; 9) PJU Konvensional 31 buah; 10) *Roller barrier* 80 meter. *Outcome* kegiatan adalah Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II;
- (2) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.982.897.992,00 dan realisasi sebesar Rp2.889.917.890,00 setara dengan 96,88%. *Output* kegiatan adalah 1) Rambu Lalu Lintas 100 unit; 2) RPPJ *movable/portable* 32

- buah; 3) *Traffic cone* 600 buah; 4) *Water barrier* 100 buah; 5) PJU konvensional 53 unit; 6) Lampu peringatan (*Warning Light*) 2 unit; 7) Lampu PJU *LED* 55 unit; 8) Pagar pengaman jalan/*roller barrier* 80 meter. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III;
- (3) Kegiatan Pendukung Perlengkapan Jalan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp753.932.132,00 dan realisasi sebesar Rp627.114.009,00 setara dengan 83,18%. *Output* kegiatan adalah jumlah rambu *portable traffic cone*, *water barrier* dan *data updating* fasilitas perlengkapan jalan. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di Jawa Barat;
- (4) Pengadaan Sarana Penunjang Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp463.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp447.242.000,00 setara dengan 96,55%. *Output* kegiatan adalah alat angkutan darat bermotor khusus *double cabin*. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III;
- (5) Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Daerah Perbatasan Jawa Barat-Banten Di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp628.447.477,00 dan realisasi sebesar Rp576.692.505,00 setara dengan 91,76%. *Output* kegiatan adalah fasilitas lalu lintas jalan meliputi penerangan jalan umum pada ruas jalan Bunar Parung Panjang 12 buah, Karang Hawu Cikotok 12 buah dan Parung BTS Tangerang 12 buah. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan fasilitas perlengkapan jalandi jalan provinsi di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I;

- (6) Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.317.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.314.640.000,00 setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah mobil *crane*, bermotor *jeep* dan *double cabin*. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I;
- (7) Pengadaan Sarana Penunjang Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.634.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.634.000,00 setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah AC mobil 2 unit; *helmet* 27 buah dan perlengkapan kendaraan operasional terminal tipe B 2 set. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II;
- (8) Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.851.033.040,00 dan realisasi sebesar Rp2.816.299.059,00 setara dengan 98,78%. *Output* kegiatan adalah fasilitas lalu lintas rambu, marka dan penerangan jalan umum pada jalan provinsi : 1) PJU konvensional 48 unit; 2) Rambu Lalin 127 buah; 3) *Traffic cone*; 4) *Water barrier* 125 buah; 5) APIL simpang empat 1 buah 6) *Roller barrier* 20 meter. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV;
- (9) Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Daerah Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah Di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan

Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.979.327,00 dan realisasi sebesar Rp963.057.525,00 setara dengan 96,31%. *Output* kegiatan adalah fasilitas lalu lintas daerah perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV : 1) Lampu penerangan jalan umum 24 unit; 2) Pagar pengaman jalan 28 unit; 3) Marka jalan 4.221 meter²; 4) Paku jalan bulat (*tempered*) 498 buah. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV;

- (10) Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp64.600.000,00 setara dengan 91,24%. *Output* kegiatan adalah sarana penunjang rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV: 1) Kendaraan roda 2 untuk sarana evaluasi dan monitoring 1 unit; 2) *Tool kit* perlengkapan *service* elektro 1 set; 3) Tangga 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV;
- (11) Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.296.507.005.00 dan realisasi sebesar Rp3.209.468.195,00 setara dengan 97,36%. *Output* kegiatan adalah fasilitas Lalu Lintas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I: 1) Lampu penerangan jalan umum konvensional 12 buah; 2) Rambu Lalu Lintas *overhead* 40 buah; 3) Papan Peringatan 4 buah; 4) Rambu lalu lintas *portable* 10 buah; 5) *Traffic cone* 600 buah; 6) Cermin tikungan

7 buah; *stick lamp* 350 buah; 7) *Water barrier* 135 buah; 8) APIL konvensional simpang 4 L : 1 buah; 9) *Pelican crossing traffic light* 1 buah; 10) *Warning light (Solar Cell)* 2 buah; 11) Marka jalan 2.000 meter ; 12) Pagar pengaman jalan 28 buah; 13) *Roller barrier* 80 meter. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I.

d. Program Pengendalian dan Pengamanan Perhubungan

Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas adalah persentase Angkutan Penumpang Umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan dengan capaian sebesar 57,33% dari target 56%. Alokasi anggaran program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp9.623.415.775,00 dengan realisasi sebesar Rp8.665.342.096,00 setara dengan 90,04%.

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas Angkutan Jalan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.956.250,00 dan realisasi sebesar Rp300.955.000,00 setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah operasi bersama lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan layanan angkutan penumpang umum (AKDP) di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II;
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas Angkutan Jalan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp529.342.400,00 dan realisasi sebesar Rp527.642.500,00 setara dengan 99,68%. *Output* kegiatan adalah operasi bersama lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah III. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan layanan angkutan penumpang umum (AKDP) di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III;
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas Angkutan Jalan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV, yang dilaksanakan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp676.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp666.035.000,00 setara dengan 98,44%. *Output* kegiatan adalah operasi bersama lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah IV. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan layanan angkutan penumpang umum (AKDP) di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV;

- (4) Kegiatan Penertiban Angkutan Barang Terpadu Daerah Perbatasan Jawa Barat-Banten di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp243.649.253,00 dan realisasi sebesar Rp189.232.800,00 setara dengan 77,67%. *Output* kegiatan adalah kerjasama operasi angkutan barang. *Outcome* kegiatan adalah penertiban angkutan barang terpadu daerah perbatasan Jawa Barat-Banten di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I;
- (5) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp469.899.318,00 dan realisasi sebesar Rp334.556.850,00 setara dengan 71,20%. *Output* kegiatan adalah operasi bersama lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah I. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan layanan angkutan penumpang umum (AKDP) di wilayah UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I;
- (6) Kegiatan Operasi Bersama Penertiban Lalu Lintas Daerah Perbatasan Jawa Barat-Banten di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp165.949.298,00 dan realisasi sebesar Rp127.804.650,00 setara dengan 77,01%. *Output* kegiatan adalah operasi bersama penertiban lalu lintas daerah perbatasan Jawa Barat-Banten di Wilayah Kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah I. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan layanan angkutan

penumpang umum (AKDP) daerah perbatasan Jawa Barat-Banten di wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I;

- (7) Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.237.022.490,00 dan realisasi sebesar Rp5.716.985.971,00 setara dengan 91,66%. *Output* kegiatan adalah (1) Penyelenggaraan posko angkutan Lebaran, natal dan tahun baru (2) Penyelenggaraan mudik gratis. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan jumlah penumpang angkutan umum di Jawa Barat;
- (8) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.996.766,00 dan realisasi sebesar Rp802.129.325,00 setara dengan 80,21%. *Output* kegiatan adalah pengawasan dan pengendalian sarana/prasarana perhubungan di Jawa Barat (*ramp check/operasi gabungan*). *Outcome* kegiatan adalah peningkatan layanan angkutan penumpang umum (AKDP) di Jawa Barat.

e. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Capaian indikator kinerja tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan adalah sebesar 100%. Alokasi anggaran program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp1.596.184.011,00 dengan realisasi sebesar Rp1.136.582.891,00 setara dengan 71,21%.

- (1) Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, Forum Perangkat Daerah dan Monitoring Evaluasi, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp417.499.741,00 dan realisasi sebesar Rp399.435.248,00 setara dengan 95,67%. *Output* kegiatan adalah 1) Dokumen Renja 2020, 2) Forum Perangkat Daerah Bidang Perhubungan; 3) Rapat

- koordinasi evaluasi Renstra dan 4) Laporan monitoring evaluasi kegiatan tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi;
- (2) Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat Bidang Perhubungan, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.999.740,00 dan realisasi sebesar Rp141.887.810,00 setara dengan 94,59%. *Output* kegiatan adalah laporan hasil *monitoring* dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah sinergitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan bantuan keuangan Bidang Perhubungan;
- (3) Kegiatan Pengelolaan *Website* Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp161.150.075,00 dan realisasi sebesar Rp112.140.393,00 setara dengan 69,59%. *Output* kegiatan adalah pengelolaan dan pendayagunaan *website* Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah tingkat ketersediaan data dan informasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Sesuai Amanat Undang-Undang pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.384.845,00 dan realisasi sebesar Rp124.551.040,00 setara dengan 94,80%. *Output* kegiatan adalah laporan kinerja, LKPJ, LPPD dan LKIP. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi;
- (5) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp586.149.950,00 dan realisasi sebesar Rp215.234.850,00 setara dengan 36,72%. *Output* kegiatan adalah 1) Dokumen perencanaan dan penganggaran terdiri dari: dokumen RKA tahun 2020, dokumen DPA tahun 2020, dokumen DPA

Pergeseran TA 2019, dokumen DPA Perubahan TA 2019 2) Dukungan Tim Ahli Jabar Juara (TAJJ) pencapaian Transportasi Juara urusan perhubungan pada bidang dan UPTD. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi;

- (6) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Aset, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.900,00 dan realisasi sebesar Rp93.767.650,00 setara dengan 93,77%. *Output* kegiatan adalah 1) Sosialisasi peraturan perpajakan; 2) Laporan evaluasi penatausahaan keuangan dan aset; 3) Laporan pembinaan pengelolaan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi;
- (7) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan, Bulanan, Triwulan, Semesteran, Prognosis dan Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.999.760,00 dan realisasi sebesar Rp49.565.900,00 setara dengan 99,13%. *Output* kegiatan adalah 1) Laporan Keuangan Bulanan; 2) Laporan keuangan triwulan; 3) Laporan keuangan semesteran; 4) Laporan prognosis dan 5) Laporan tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan

Capaian Indikator Kinerja Program Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perhubungan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan adalah sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp12.488.391.726,00 dengan realisasi sebesar Rp11.156.702.817,00 setara dengan 89,34%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp404.600.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp295.299.949,00 setara dengan 72,99%. *Output* kegiatan adalah bangunan kantor, pembuatan sumur bor dan penataan tempat parkir kendaraan bermotor roda 2. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.753.669.208,00 dan realisasi sebesar Rp2.782.916.177,00 setara dengan 74,14%. *Output* kegiatan adalah perlengkapan dan peralatan gedung kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 1 unit sepeda motor BMW F 750 GS, 1 unit sepeda motor BMW R 1250 GS, 2 unit televisi, 1 paket peralatan olahraga, 10 unit PC, 8 unit *notebook*, 15 unit printer, 5 unit printer berwarna, 1 unit *access point*, 7 buah meja kerja, 4 buah tempat tidur, 10 unit kursi tunggu, 1 paket gorden, 1 paket karpet, 2 unit LCD proyektor, 35 unit *handy talkie*, 2 unit antena *Calwave* PD220, 10 unit radio RIG, rumah genset 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Terminal Tipe B dan Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.133.337.752,00 dan realisasi sebesar Rp1.125.488.600,00 setara dengan 99,31%. *Output* kegiatan adalah perlengkapan terminal tipe B terdiri dari: 5 unit CCTV, 11 set *running text*, 15 *filling cabinet*, 14 unit AC, 3 unit papan nama terminal, 16 unit televisi, 10 buah meja biro, 30 buah meja staf, 30 buah kursi kerja Chitose, 4 buah kursi kerja klasik, 40 unit rak arsip, 100 buah kursi lipat, 40 unit kursi tunggu, 1 unit *sound system*. *Outcome* kegiatan adalah perlengkapan terminal tipe B dan kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I;
- (4) Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp310.467.93,000 dan realisasi sebesar Rp310.252.200,00 setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah 1) Kabel gulung dan 2) Garasi kendaraan operasional UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II; 3) *Mess* UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah II;

- (5) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III Tahap II yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.448.000,00 dan realisasi sebesar Rp843.458.700,00 setara dengan 84,39%. *Output* kegiatan adalah 1) *Mess* pegawai; 2) Mushola dan 3) penataan lahan parkir dan lingkungan kantor. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III;
- (6) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp574.865.237,00 dan realisasi sebesar Rp569.022.941,00 setara dengan 98,98%. *Output* kegiatan adalah 1) Visual elektronik (*running teks*); 2) lemari besi; 3) Rak besi; 4) Brankas; 5) *Filling cabinet*; 6) Alat pendingin ruangan; 5) Televisi; *Jet Washer*; 6) Lambang-lambang negara; 7) *Hard Disk Eksternal*; 8) Meja resepsionis; 9) Meja kerja struktural; 10) Meja kerja Kabag; 11) Meja kerja fungsional; 12) Meja rapat *executive*; 13) Kursi staf; 14) Kursi rapat; 15) Sofa; 16) Kursi tunggu; 17) Kompor gas; 18) Dispenser; 19) Kulkas; 20) Alat dapur; 21) Gorden; 22) Jam dinding. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan Prasarana Kantor UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III;
- (7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp372.115.832,00 dan realisasi sebesar Rp370.877.000,00 setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah 1) Mesin hitung; 2) Mesin penghancur; 3) Papan tulis; 4) Tenda posko; 5) Komputer PC; 6) *Printer*; 7) *Scanner*; 8) *Drone* dan

- layar; 9) CCTV; 10) *Speaker portable wireless*; 11) layar; 12) faksimile; 13) *Handy talky*; 14) GPS dan 15) Meteran dorong. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III;
- (8) Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp968.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp965.975.000,00 setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah 1) Renovasi pos keamanan; 2) Renovasi gedung kantor; 3) Pembuatan taman tematik; 4) Penataan aula kantor; 5) Pemagaran; 6) Penyekatan ruang kantor; 7) Sarana parkir. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV;
- (9) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp409.725.000,00 dan realisasi sebesar Rp400.156.700,00 setara dengan 97,66%. *Output* kegiatan adalah 1) *Filling cabinet*; 2) AC; 3) Televisi; 4) Komputer PC; 5) *Printer*; 6) Proyektor, UPS; 7) Meja kerja; 8) Kursi kerja; 9) Kursi rapat; 10) Perlengkapan *acesories drone*; 11) Perlengkapan *action* kamera ; 12) *Accessories drone* 13) *Sound system* dan 14) *Handy talky*. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV;
- (10) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp168.863.000,00 dan realisasi sebesar Rp167.760.600,00 setara dengan 99,35%. *Output* kegiatan adalah 1) Perlengkapan angkut sampah dan gerobak; 2) Perlengkapan bengkel; 3) Mesin pemotong rumput; 4) Mesin penghancur kertas; 5) Pemadam kebakaran; 6) Generator, 7) Peralatan olah raga; 8) Tabung gas, 9) Dispenser; 10) Peralatan jamuan; 11) *Rice cooker*; 12) Karpet dan 13) Mesin fax. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV;

- (11) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp538.460.000,00 dan realisasi sebesar Rp536.210.000,00 setara dengan 99,58%. *Output* kegiatan adalah Perlengkapan dan peralatan gedung kantor UPTD PPPP Laut terdiri dari: mesin pemotong rumput, mesin foto *copy*, mesin penghancur kertas, tabung pemadam kebakaran, brankas, *vacum cleaner*, televisi, pompa air dan sumur bor, instalasi pompa air dan sumur bor, komputer server UPTD, komputer *All in One*, laptop, *printer*, UPS, tempat tidur *mess*, tabung gas, kompor gas, lemari makan, dispenser, alat makan, alat masak, *rice cooker*, kamera, layar/screen, telepon pabx, *handy talkie*, *harddisk* eksternal, perangkat modem 4G LTE untuk GSM, *website* sistem informasi manajemen UPTD. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PPP Pelabuhan Laut;
- (12) Kegiatan Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp949.697.399,00 dan realisasi sebesar Rp931.413.450,00 setara dengan 98,07%. *Output* kegiatan adalah 1) Mesin pemotong rumput; 2) Tabung pemadam kebakaran; 3) Mesin foto *copy*, 4) Mesin penghancur kertas; 5) Brankas; 6) Televisi; 7) *Vacum cleaner*; 8) Pompa air; 9) Komputer *server*; 10) Komputer PC; 11) Laptop; 12) *Printer*; 13) UPS; 14) Meubelair; 15) Peralatan dapur; 16) Kamera; 17) Layar/ *screen*; 18) PABX; 19) *Handy talky*; 20) *Software* jadi. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
- (13) Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.997.737,00 dan realisasi sebesar

Rp492.893.000,00 setara dengan 98,58%. *Output* kegiatan adalah 1) Rehabilitasi gedung kantor; 2) Pembangunan pos kamdal; 3) Pengaspalan jalan pelabuhan dan 4) Pembangunan pagar. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PPP Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);

- (14) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp435.644.631,00 dan realisasi sebesar Rp422.194.000,00 setara dengan 96,91%. *Output* kegiatan adalah 1) Mesin potong rumput 6 unit; 2) *filling cabinet* 2 unit; 3) *cupboard* 3 buah; 4) AC 4 unit; 5) Papan spanduk 1 unit; 6) Komputer 16 unit; 7) *Printer* 16 unit; 8) Kursi rapat sebanyak 40 buah dan 9) Springbed 9 set. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PPP Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
- (15) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp475.984.500,00 setara dengan 95,20%. *Output* kegiatan adalah 1) Mesin pemotong rumput; 2) Mesin penghancur kertas; 3) Tabung pemadam kebakaran; 4) *Cupboard*; 5) *Filling cabinet*; 6) AC, 7) Televisi, 8) Pompa air, 9) *Scaffolding* 20 set, 10) Komputer 5 unit; 11) UPS 5 unit; 12) *Printer* 2 unit; 13) Meja rapat 1 buah; 14) Kursi lipat 12 buah; 15) Tempat tidur; 16) Kulkas; 17) Kursi tunggu 6 buah; 18) Dispenser; 19) CCTV.; 20) *Fax machine*; 21) Radio SBB; 22) Panel listrik dan 23) Detektor logam. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan prasarana kantor UPTD PJK Nusawiru (Bandara dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Bandara Nusawiru);
- (16) Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Terminal Tipe B Dan Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp469.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp466.800.000,00 setara dengan 99,49%. *Output* kegiatan alat angkutan darat bermotor pickup. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana penunjang kantor UPTD PPP LLAJ Wilayah I.

g. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan

Capaian Indikator Kinerja Program Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Perhubungan pada program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintahan Daerah Dinas Perhubungan adalah sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintahan Daerah pada Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp37.568.943.360,00 dengan realisasi sebesar Rp34.192.347.262,00 setara dengan 91,01%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp245.350.350,00 dan realisasi sebesar Rp244.663.840,00 setara dengan 99,72%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.400.000,00 setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (3) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp431.890.000,00 dan realisasi sebesar Rp424.639.200,00 setara dengan 98,32%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan

- operasional, STNK kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Pembangunan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp499.047.950,00 setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Pembangunan LLAJ Wilayah III. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (5) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.807.400,00 dan realisasi sebesar Rp496.559.500,00 setara dengan 99,35%. *Output* kegiatan adalah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (6) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp450.438.000,00 dan realisasi sebesar Rp424.872.596,00 setara dengan 94,32%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) *double cabin* 1 unit, roda empat 6 unit dan roda dua 10 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp551.166.320,00 dan realisasi sebesar Rp546.644.218,00 setara dengan 99,18%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan,

- fasilitas dan gedung kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (8) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp939.616.150,00 dan realisasi sebesar Rp901.186.377,00 setara dengan 95,91%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (9) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.999.908,00 dan realisasi sebesar Rp175.960.540,00 setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (10) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp459.708.956,00 dan realisasi sebesar Rp450.669.389,00 setara dengan 98,03%. *Output* kegiatan adalah perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II yang terpelihara. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (11) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp433.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp420.967.343,00 setara dengan 97,09%. *Output* kegiatan adalah STNK kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, *service* roda 2 dan roda 4, penggantian suku cadang roda 2 dan roda 4 pelumas roda 2 dan roda 4 (roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 8 unit). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (12) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp822.911.000,00 dan realisasi sebesar Rp717.039.786,00 setara dengan 87,13%. *Output* kegiatan adalah langganan kantor kantor dan tenaga kerja non pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (13) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp455.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp453.374.250,00 setara dengan 99,64%. *Output* kegiatan adalah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (14) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Terminal Tipe B dan Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp222.473.750,00 dan realisasi sebesar Rp221.236.500,00 setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung terminal tipe B dan kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (15) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp633.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp551.585.558,00 setara dengan 87,01%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I sebanyak roda dua 7 unit, roda dua PJR 8 unit dan roda empat 4 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;

- (16) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.247.942.183,00 dan realisasi sebesar Rp1.215.600.686,00 setara dengan 97,41%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan dan jasa kebersihan beserta pendukung pada UPTD PPP LLAJ Wilayah I. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (17) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp288.798.478,00 dan realisasi sebesar Rp285.478.900,00 setara dengan 98,85%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (18) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.302.320.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.116.134.568,00 setara dengan 94,36%. *Output* kegiatan adalah langganan kantor dan tenaga kerja non pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (19) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp467.005.000,00 dan realisasi sebesar Rp452.089.200,00 setara dengan 96,81%.

Output kegiatan adalah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;

- (20) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.453.312,00 setara dengan 97,27%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai kantor UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (21) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.535.094.448,00 dan realisasi sebesar Rp1.401.025.831,00 setara dengan 91,27%. *Output* kegiatan adalah langganan kantor dan tenaga kerja non pegawai UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (22) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp381.890.000,00 dan realisasi sebesar Rp378.837.739,00 setara dengan 99,20%. *Output* kegiatan adalah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (23) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp761.990.000,00 dan realisasi sebesar Rp714.437.000,00 setara dengan 93,76%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;

-
- (24) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp376.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp332.635.369,00 setara dengan 88,40%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan Dinas roda 4 sebanyak 7 unit dan roda 2 sebanyak 8 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (25) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatan Kantor UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp964.726.000,00 dan realisasi sebesar Rp839.588.099,00 setara dengan 87,03%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatan kantor UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (26) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.231.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.181.951.251,00 setara dengan 96,02%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai kantor pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (27) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.392.478.840,00 dan realisasi sebesar Rp1.087.119.327,00 setara dengan 78,07%. *Output* kegiatan adalah jasa komunikasi, air dan listrik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (28) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp1.818.991.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.564.285.036,00 setara dengan 86,00%. *Output* kegiatan adalah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;

- (29) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.877.000,00 dan realisasi sebesar Rp78.130.000,00 setara dengan 50,12%. *Output* kegiatan adalah dokumentasi dan publikasi, dan penyediaan sewa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (30) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.066.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.850.722.968,00 setara dengan 89,56%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (31) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.672.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.165.830.717,00 setara dengan 69,71%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor Dinas Perhubungan kendaraan roda dua sebanyak 36 unit dan roda empat 30 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (32) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.257.438.536,00 dan realisasi sebesar Rp1.217.176.700,00 setara dengan 96,80%. *Output* kegiatan adalah penyediaan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur.

- Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (33) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp826.125.000,00 dan realisasi sebesar Rp308.165.000,00 setara dengan 37,30%. *Output* kegiatan adalah diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (34) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp477.560.000,00 dan realisasi sebesar Rp474.865.516,00 setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (35) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp396.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp396.000.000,00 setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (36) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan tenaga kerja non pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp731.919.800,00 dan realisasi sebesar Rp646.122.391,00 setara dengan 88,28%. *Output* kegiatan adalah langganan kantor dan tenaga kerja non pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;

- (37) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp500.000.000,00 setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (38) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.676.739.400,00 dan realisasi sebesar Rp1.670.006.150,00 setara dengan 99,60%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (39) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.198.000,00 dan realisasi sebesar Rp195.961.600,00 setara dengan 97,88%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV roda dua 12 unit dan roda empat 6 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (40) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp672.701.952,00 dan realisasi sebesar Rp644.052.663,00 setara dengan 95,74%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja

- aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (41) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan laut yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp193.064.000,00 dan realisasi sebesar Rp184.568.250,00 setara dengan 95,60%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor Dinas Perhubungan kendaraan roda dua sebanyak 3 unit dan roda empat 3 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
 - (42) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.000.053,00 dan realisasi sebesar Rp291.866.533,00 setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
 - (43) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp269.156.260,00 dan realisasi sebesar Rp268.900.518,00 setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
 - (44) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut. yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp122.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp117.230.000,00 setara dengan 95,56%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;

- (45) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut. yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp584.236.000,00 dan realisasi sebesar Rp520.514.143,00 setara dengan 89,09%. *Output* kegiatan adalah langganan kantor dan tenaga kerja non pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (46) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp577.627.740,00 dan realisasi sebesar Rp576.673.954,00 setara dengan 99,83%. *Output* kegiatan adalah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya operasional di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut;
- (47) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp793.393.226,00 dan realisasi sebesar Rp716.612.830,00 setara dengan 90,32%. *Output* kegiatan adalah langganan kantor dan tenaga kerja non pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (48) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp815.045.090,00 dan realisasi sebesar Rp798.074.335,00 setara dengan 97,92%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja

- aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- (49) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.452.510.100,00 dan realisasi sebesar Rp1.291.078.100,00 setara dengan 88,89%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (50) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp665.228.120,00 dan realisasi sebesar Rp603.463.703,00 setara dengan 90,72%. *Output* kegiatan adalah langganan kantor dan tenaga kerja non pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur;
- (51) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan dan Luar UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp529.664.800,00 dan realisasi sebesar Rp528.847.806,00 setara dengan 99,85%. *Output* kegiatan adalah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Perhubungan

a. Permasalahan

- (1) Penetapan Lokasi Bandara Di Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan KM. 75 Tahun 2019 belum dapat ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan mengingat pada persetujuan DPRD terhadap revisi RTRW Jawa

- Barat tidak mencantumkan secara spesifik lokasi bandara di Sukabumi;
- (2) Terdapat pekerjaan yang mengalami gagal lelang beberapa kali, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana;
 - (3) Penertiban lahan tidak jadi dilakukan oleh PT. KAI pada tahun 2019, sehingga proses penetapan lokasi, pengadaan tanah serta penilaian harga tanah tidak dapat dilaksanakan;
 - (4) Proses penertiban 4 jalur yang direncanakan akan direaktivasi, hanya dilakukan di dua lokasi, yaitu di jalur Cibatu-Garut dan jalur Ganda Bogor-Sukabumi.

b. Solusi

- (1) Peningkatan Perencanaan, koordinasi dan sinergitas pembangunan Bandar Udara di Sukabumi;
- (2) Untuk pekerjaan yang gagal lelang dan masih dibutuhkan tahun berikutnya akan dianggarkan kembali;
- (3) Dianggarkan kembali untuk reaktivasi jalur KA Rancaekek – Tanjungsari antara lain penetapan lokasi, pengadaan tanah serta penilaian harga tanah;
- (4) Sisa anggaran penertiban dikembalikan ke kas daerah, dan penertiban lahan dikoordinasikan serta disinergikan dengan pemerintah pusat dan PT. KAI.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019 sebesar 3,12 poin dari target yang sebesar 3 poin; Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori Provinsi Informatif dan Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi sebesar 93% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yakni adalah tingkat kematangan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar 4,34 poin dari target sebesar 3 poin; tingkat kematangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar 3,3 poin dari target sebesar 3 poin; tingkat kematangan aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar 3,3 poin dari target sebesar 3 poin; persentase layanan informasi dan komunikasi publik dengan realisasi sebesar 94% dari target sebesar 90,4%; persentase diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi yang dilaksanakan dengan realisasi 92,6% dari target sebesar 90%; persentase media komunikasi publik yang dimanfaatkan dengan realisasi sebesar 96,8% dari target sebesar 90,8%; dan persentase persidangan Komisi Informasi melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi dengan realisasi sebesar 98% dari target sebesar 80%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp64.152.064.752,00 dengan realisasi sebesar Rp59.147.073.228,00 setara dengan 92,20%. Dengan Kegiatan adalah :

- (1) Kegiatan Penyediaan Konten Ruang Informasi Publik Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.840,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp144.225.823,00 atau setara 96,15%. *Output* kegiatan adalah layanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika selama 12

- bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan informasi publik;
- (2) Kegiatan konten *website* resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan media sosial kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.399.999.905,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.357.738.069,00 atau setara 96,98%. *Output* kegiatan adalah liputan kegiatan Gubernur, update konten *website* jabarprov.go.id dan Organisasi Perangkat Daerah serta media sosial selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan informasi publik;
 - (3) Kegiatan Diseminasi informasi melalui media cetak kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp99.874.043,00 atau setara 99,87%. *Output* kegiatan adalah penerbitan majalah untuk kalangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 edisi. *Outcome* kegiatan adalah Majalah untuk kalangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kab/Kota Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat;
 - (4) Kegiatan Diseminasi Informasi Melalui Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp240.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp240.415.100,00 atau setara 87,67%. *Output* kegiatan adalah diseminasi informasi melalui pertunjukan rakyat sebanyak 6 kali. *Outcome* kegiatan adalah diseminasi Informasi melalui pertunjukan rakyat;
 - (5) Kegiatan diseminasi informasi melalui mobil layanan Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp545.234.522,00 atau setara 90,87%. *Output* kegiatan adalah diseminasi informasi melalui mobil layanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 15 kali. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya event diseminasi informasi melalui mobil layanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat terselenggaranya *event* diseminasi informasi melalui mobil layanan Dinas Komunikasi dan Informatika di *Car Free Day*;

- (6) Kegiatan pemberdayaan komunitas komunikasi dan informatika, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.950,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp138.249.250,00 atau setara 92,17%. *Output* kegiatan adalah komunitas yang handal dalam bidangnya dengan target capaian 100 personal. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan informasi publik dengan capaian 100 orang;
- (7) Kegiatan koordinasi dengan badan publik dan komisi informasi pusat kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp610.097.839,00 atau setara 87.16%. *Output* kegiatan adalah jumlah koordinasi selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya koordinasi badan publik dengan kabupaten/kota;
- (8) Kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp649.999.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp559.135.468,00 atau setara 86,02%. *Output* kegiatan adalah Sosialisasi keterbukaan informasi publik dengan sebanyak 3 kali. *Outcome* kegiatan adalah sosialisasi keterbukaan informasi publik;
- (9) Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Persidangan Komisi Informasi, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp156.849.557,00 atau setara 78,42%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi persidangan dan pemeriksaan setempat selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah fasilitasi penyelesaian sengketa informasi;
- (10) Kegiatan monitoring dan pemeringkatan badan publik tingkat Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.950,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp191.791.754,00 atau setara 95,90%. *Output* kegiatan adalah Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi sebanyak 2 kali dan pemeringkatan keterbukaan informasi sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi, Pemeringkatan keterbukaan informasi;
- (11) Kegiatan Seleksi Komisi Informasi Daerah Kegiatan

- ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.999.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp397.564.434,00 atau setara 99,39%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya komisi informasi Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2019-2023 dengan ditetapkannya 5 Komisioner, capaian 7 bulan atau setara 100%. *Outcome* kegiatan adalah terselesaikannya sengketa informasi sebesar 90%;
- (12) Kegiatan implementasi pengelolaan komunikasi publik, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.991.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp294.323.100,00 atau setara 98,11%. *Output* kegiatan adalah terselenggarakannya Bimbingan Teknis implementasi pengelolaan komunikasi publik, sebanyak 3 kali dan Rapat Koordinasi Bidang IKP sebanyak 1 kali atau 100%, dicapai dalam waktu 10 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keterampilan pemangku urusan informasi dan komunikasi publik di Kab/Kota dalam mengelola komunikasi publik sebesar 94%;
- (13) Kegiatan publikasi keterbukaan informasi publik, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.999.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp396.478.270,00 atau setara 99,12%. *Output* kegiatan adalah terpublikasikannya program kerja Pemerintah melalui videotron di 8 titik di Jawa Barat dan pemberdayaan media tradisional menunjang sukses Citarum Harum Juara di 5 Kab/Kota, atau 100% dicapai dalam waktu 6 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan media komunikasi publik sebesar 94%;
- (14) Kegiatan penguatan PPID Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp335.471.865,00 atau setara 95,85%. *Output* kegiatan adalah terselenggarakannya *workshop* sebanyak 4 kali atau setara dengan 100% dicapai dalam waktu 6 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya penguatan PPID Kab/Kota di Jawa Barat dalam mewujudkan Jawa Barat Provinsi Informatif, sebesar 92%;
- (15) Kegiatan pengelolaan dan pengembangan website,

- kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp483.959.278,00 atau setara 96,79%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan informasi melalui portal pelayanan informasi yang berkualitas dan termutakhirkan dengan sebesar 100 persen. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan informasi melalui portal pelayanan informasi yang berkualitas dan termutakhirkan;
- (16) Kegiatan pengelolaan dan pengembangan aplikasi Jabar *Cloud*, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp225.397.120,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp223.958.261,00 atau setara 99,36%. *Output* kegiatan adalah Pengembangan aplikasi ADT sebanyak 1 aplikasi, Bimbingan Teknis aplikasi Jabar *Cloud* dengan sebanyak 4 kali, *Monitoring* Evaluasi penerapan dan pemanfaatan Jabar *Cloud* sebanyak 27 Kabupaten/Kota, Aplikasi Jabar *Cloud* sebanyak 1 sistem. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya aplikasi berbagi pakai data perkantoran berbasis *cloud* di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (17) Kegiatan pengembangan aplikasi administrasi perkantoran, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.560.995.522,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.125.416.040,00 atau setara 82,99%. *Output* kegiatan adalah pengembangan aplikasi (*web* dinas, *mail*, *perjadin*, *simaya*, *drive* jabar) sebanyak 1 aplikasi, pengembangan aplikasi *helpdesk* layanan sebanyak 1 aplikasi, regulasi/Kepgub penerapan aplikasi administrasi perkantoran sebanyak 1 dokumen dan diseminasi dan pelatihan sistem informasi perkantoran sebanyak 50 Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya aplikasi administrasi perkantoran berbasis *online* di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (18) Kegiatan Integrasi dan Interoperabilitas Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.500.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp3.453.270.286,00 atau setara 98,66%. *Output* kegiatan adalah dokumen teknis pengelolaan integrasi dan interoperabilitas sebanyak 1 dokumen dan Aplikasi integrasi dan interoperabilitas dengan sebanyak 1 sistem.

- Outcome* kegiatan adalah terintegrasinya berbagai aplikasi layanan publik dan pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan. Selain itu pula, dalam kegiatan ini termasuk sosialisasi aplikasi sapa warga yang melibatkan 19 Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta sebanyak 5.500 orang peserta berasal dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, Dinas Desa Kabupaten Kota, Kecamatan, Desa dan RW serta Relawan TIK, dan Pendamping Lokal Desa;
- (19) Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Jaringan Komunikasi, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp421.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp357.364.879,00 atau setara 84,88%. *Output* kegiatan adalah *Monitoring* dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dengan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terkoneksi jaringan komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (20) Kegiatan Pengadaan Layanan Internet dan Jaringan Pendukung Administrasi Perkantoran Internal dan Eksternal Pemprov Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp7.821.141.460,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.981.476.289,00 atau setara 89,26%. *Output* kegiatan adalah pengadaan internet utama selama 12 bulan, pengadaan internet backup selama 12 bulan, pengadaan VPN Internet selama 12 bulan, pengadaan layanan akses internet publik selama 12 bulan, pengadaan layanan *mobile internet* selama 12 bulan, pengadaan peralatan pendukung *mobile internet* sebanyak 1 paket dan sewa *bandwith* dan perangkat VSAT sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya konektivitas jaringan komunikasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (21) Kegiatan Pengadaan *Server* dan *Storage*, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.801.808.223,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp3.787.757.889,00 atau setara 99,63%. *Output* kegiatan adalah *server* sebanyak 1 paket, *storage* sebanyak 1 set dan kelengkapan pendukung jaringan sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah perangkat pendukung *data center*, rekonfigurasi perangkat pendukung *data center*;

- (22) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp254.203.590,00 atau setara 84,73%. *Output* kegiatan adalah Dokumen naskah akademik sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya naskah akademik sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah Jawa Barat tentang urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- (23) Kegiatan Penerapan Tata Kelola *E-Gov* di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.640.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.423.784.958,00 atau setara 86,82%. *Output* kegiatan adalah dokumen penerapan *Information Technology* sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Terlaksananya penerapan regulasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi dalam penyelenggaraan *e-Government*;
- (24) Kegiatan Pengadaan Perpanjangan *Software* Pendukung *Data Center*, *Command Center* dan Pengadaan *Software*, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp27.846.472.192,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp25.391.919.160,00 atau setara 91,19%. *Output* kegiatan adalah Lisensi *Software* sebanyak 1 paket, *Software* Pendukung DC dan CC sebanyak 1 paket dan Pengadaan *hardware Command Center* dengan sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah Termanfaatkannya *hardware* dan *software* lisensi pendukung *Data Center*, *Command Center*, dan Layanan Jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (25) Kegiatan Pengelolaan *Service Desk Data Center* dan *Command Center*, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp464.659.341,00 atau setara 92,93%. *Output* kegiatan adalah pengelolaan *data center* sebanyak 1 dokumen, pengelolaan *Command Center* dengan sebanyak 1 dokumen dan Rekemis admin jaringan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah Terlaksananya operasional *Data Center* dan *Command Center* Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

- Barat dengan capaian;
- (26) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Komisi Informasi Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp0 atau setara 0%. *Output* kegiatan adalah pelatihan peningkatan tata persidangan di Komisi Informasi dengan target capaian 5 orang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah aktivitas dengan capaian 0 orang;
- (27) Kegiatan Operasional Tim Jabar Saber Hoaks Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.999.999.990,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.952.538.110,00 atau setara 98,42%. *Output* kegiatan adalah jumlah kajian sebanyak 24 kali dan sosialisasi sebanyak 4 wilayah. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya media sosial yang sehat bebas dari *hoax* di wilayah Jawa Barat;
- (28) Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Jabar *Digital Province*, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.392.186.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.296.750.953,00 atau setara 93,14%. *Output* kegiatan adalah keikutsertaan pameran sebanyak 3 kali, Pelaksanaan seminar sebanyak 15 kali, *event awarding* sebanyak 1 kali dan kegiatan survei sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya masyarakat dan pemangku kepentingan terkait Provinsi Jawa Barat yang memahami dan bergerak bersama menyukkseskan Jabar *Digital Province*;
- (29) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Layanan Publik dan Jabar *Digital Province*, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.778.074.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp4.512.565.100,00 atau setara 94,44%. *Output* kegiatan adalah pengembangan aplikasi sebanyak 2 aplikasi, sewa *software* sebanyak 7 paket, FGD dengan sebanyak 6 kali dan Bimbingan Teknis sebanyak 6 kali. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya aplikasi layanan publik dan aplikasi-aplikasi terkait Jabar *Digital Province*.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Program ini memiliki 5 Kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan indikator Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan realisasi sebesar 100% dan Persentase ketersediaan data Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan realisasi sebesar 100%. alokasi anggaran adalah sebesar Rp1.382.433.404,00 dengan realisasi sebesar Rp1.278.489.256,00 setara dengan 92,48%. Dengan Kegiatan adalah :

- (1) Kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp333.636.653,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp333.636.653,00 atau setara 100%. *Output* kegiatan adalah Forum Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan persandian dengan target capaian 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya sinergitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dengan capaian 100%;
- (2) Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.874,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp259.980.360,00 atau setara 86,66%. *Output* kegiatan adalah Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika persandian dan statistik 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya sinergitas, pembangunan bidang,kominfo dan persandian dengan target capaian 100%;
- (3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp155.253.200,00 dan realisasi sebesar Rp151.331.879,00 atau setara dengan 97,47%. *Output* kegiatan adalah dokumen pelaporan keuangan dengan target capaian 25 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja

- pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). dengan capaian 91,37%;
- (4) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp289.038.720,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp253.421.547,00 atau setara 87,68%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan kinerja dengan target capaian 7 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya sistem pelaksanaan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan capaian 100%;
 - (5) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data Dokumen Pelaporan Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp304.504.957,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp280.118.817,00 atau setara 91,99%. *Output* kegiatan adalah dokumen pelaporan kinerja dengan target capaian 4 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dengan capaian 100%.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika

Program ini memiliki 7 Kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan indikator program persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan realisasi sebesar 85% dari target sebesar 85%. Alokasi anggaran adalah sebesar Rp3.253.338.359,00 dengan realisasi sebesar Rp2.884.315.884,00 setara dengan 88,66% dengan kegiatan adalah:

- (1) Kegiatan Pengadaan *Software* di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp383.476.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp164.651.925,00 atau setara 42,94%. *Output* kegiatan adalah *software* jadi, lisensi dengan target capaian 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah *software* jadi, lisensi dengan capaian belanja langganan aplikasi, dan *software*;
- (2) Kegiatan Belanja Modal *Personal Computer* (PC),

- Laptop dan *Printer* yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp959.862.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp879.638.700,00 atau setara 91,64%. *Output* kegiatan adalah komputer, *printer*, laptop dengan target capaian 3 paket. *Outcome* kegiatan adalah pengadaan laptop, *printer*, PC dengan capaian belanja komputer PC, kelengkapan aksesoris dan jaringan, pengadaan *notebook*, pengadaan kamera, *sound system*, *smartphone*;
- (3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp605.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp561.417.800,00 atau setara 92,80%. *Output* kegiatan adalah mesin tik, penghancur kertas, AC, *vacuum cleaner*, *exhaust fan*, pompa air, tangga, dispenser, kulkas, parket, kamera, *handycam*, *sound system*, faximili dengan target capaian 16 paket. *Outcome* kegiatan adalah pengadaan parket, instalasi listrik, *printer*, kamera, mesin tik, mesin penghancur kertas dengan capaian belanja pengadaan parket, *printer*, kamera, mesin tik, mesin penghancur kertas, kulkas, dispenser, tangga, pompa air, *exhaust fan*, *vacuum cleaner*;
- (4) Kegiatan Pengadaan Meubelair Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp280.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp276.948.000,00 atau setara 98,91%. *Output* kegiatan adalah kursi rapat, kursi kerja, lemari, meja kerja, meja rapat dengan target capaian 5 paket. *Outcome* kegiatan adalah pengadaan kursi rapat, kursi kerja, lemari, meja kerja, meja rapat dengan capaian belanja kursi rapat, meja rapat, kursi kerja, meja kerja, lemari/rak;
- (5) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp890.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp877.764.900,00 atau setara 98,63%. *Output* kegiatan adalah rehab gedung kantor, casing, interior ruang rapat, interior ruang kerja, lift, penangkal petir dengan target capaian 6 paket. *Outcome* kegiatan adalah rehabilitasi gedung kantor, casing, interior dengan capaian rehabilitasi gedung kantor, casing, interior ruang arsip,

- interior ruang rapat, interior ruang kerja;
- (6) Kegiatan Pengadaan Peralatan Komisi Informasi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp84.999.859,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp79.065.159,00 atau setara 93,02%. *Output* kegiatan adalah komputer, *workstation*, penghancur kertas dengan target capaian 3 paket. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya peralatan Komisi Informasi Daerah dengan capaian 100%;
 - (7) Kegiatan Pengadaan Ruang *Record Center* yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.999.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp44.829.400,00 atau setara 89,66%. *Output* kegiatan adalah peralatan record center dengan target capaian 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Interior Ruang *Record Center* dengan capaian 100%.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Program ini memiliki 18 Kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan Indikator Program Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan realisasi sebesar 25,88% dari target sebesar 30% dan Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran adalah sebesar Rp9.353.747.473,00 dengan realisasi sebesar Rp8.344.501.572,00 setara dengan 89,21% dengan kegiatan adalah:

- (1) Kegiatan penyediaan barang habis pakai kantor-ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp719.114.150,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp685.025.700,00 atau setara 95,26%. *Output* kegiatan adalah cetakan, agenda, kalender dengan target capaian 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pengadaan alat tulis kantor, materai, cetak, pengadaan plakat/ vandel/ piala/ cindermata/ karangan bunga/ souvenir dengan capaian belanja alat tulis kantor, pengadaan cetak, pengadaan plakat/ vandel/ piala/ cindermata/ karangan bunga/ souvenir, pengadaan *fotocopy*,

- jilid;
- (2) Kegiatan penyediaan diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur-ASN Diskominfo yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp412.100.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp357.153.000,00 atau setara 86,67%. *Output* kegiatan adalah peningkatan jiwa korsa, Bimbingan Teknis, kursus singkat dengan target capaian 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan jiwa korsa, kursus singkat, Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian peningkatan jiwa korsa, kursus singkat, Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian 100%;
 - (3) Kegiatan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas-ASN Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.997.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp49.896.200,00 atau setara 99,80%. *Output* kegiatan adalah kendaraan roda dua, kendaraan roda empat dengan target capaian 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan Dinas dengan capaian 100%;
 - (4) Kegiatan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas-ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp409.008.300,00 atau setara 90,89%. *Output* kegiatan adalah BBM, STNK, *service* roda dua, *service* roda empat, suku cadang dengan target capaian 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah pengadaan BBM, pembayaran STNK, *service*, suku cadang dengan *outcome* kegiatan adalah pengadaan BBM, pembayaran STNK, *service* roda 2, *service* roda 4, belanja suku cadang kendaraan bermotor;
 - (5) Kegiatan penyediaan alat pendukung fasilitas kantor-ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp760.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp537.098.470,00 atau setara 70,67%. *Output* kegiatan adalah belanja bahan pakai habis dengan target capaian 1 tahun, belanja jasa kantor dengan target capaian 12 bulan, belanja langganan air dengan target capaian 12 bulan dan belanja langganan listrik dengan target capaian 12

- bulan. *Outcome* kegiatan adalah belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja langganan air, belanja langganan listrik, belanja langganan telepon dengan capaian belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja langganan air, belanja langganan listrik, belanja langganan telepon dengan capaian 100%;
- (6) Kegiatan penyediaan alat pendukung fasilitas kantor-ASN komisi informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp52.366.070,00 atau setara 87,28%. *Output* kegiatan langganan telepon dengan target capaian 1 tahun dan langganan listrik dengan target capaian 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah langganan telepon dan listrik dengan capaian 100%;
- (7) Kegiatan penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya-ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.038.199.948,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp980.960.826,00 atau setara 94,49%. *Output* kegiatan adalah jasa kebersihan dengan target capaian 1 tahun, jasa keamanan dengan target capaian 1 tahun, pakaian kerja lapangan dengan target capaian 1 kegiatan dan jasa teknisi dengan target capaian 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah jasa kebersihan, jasa keamanan, pakaian kerja lapangan, jasa teknisi dengan capaian pengadaan jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa teknisi, jasa tenaga teknis, pengadaan pakaian kerja lapangan dengan capaian 100%;
- (8) Kegiatan penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya-ASN Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.399.694,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp286.216.013,00 atau setara 96,56%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya kebersihan dan keamanan kantor dengan target capaian 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya kebersihan dan keamanan kantor dengan capaian 100%;
- (9) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor-ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

sebesar Rp699.999.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp674.720.003,00 atau setara 96,39%. *Output* kegiatan adalah belanja alat listrik dan elektronik dengan target capaian 1 tahun, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan target capaian 1 paket, belanja pengisian tabung pemadam kebakaran dengan target capaian 1 paket, belanja dekorasi dan desain interior/eksterior dengan target capaian 1 paket, belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman habis pakai dengan target capaian 1 paket, belanja dokumentasi dan publikasi dengan target capaian 1 paket, belanja alat-alat rumah tangga/dapur pakai habis dengan target capaian 1 paket, belanja pemeliharaan komputer dengan target capaian 1 paket, belanja pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor dengan target capaian 1 paket, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dengan target capaian 1 paket, belanja pemeliharaan halaman/taman/perkarangan dengan target capaian 1 paket dan belanja pemeliharaan bangunan bukan gedung dengan target capaian 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah belanja alat listrik dan elektronik, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja dekorasi dan desai interior/eksterior, belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman habis pakai, belanja dokumentasi dan publikasi, belanja alat-alat rumah tangga/dapur pakai habis, belanja pemeliharaan komputer, belanja pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan halaman/ taman/perkarangan, belanja pemeliharaan bangunan bukan gedung dengan capaian belanja alat listrik dan elektronik, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja dekorasi dan desai interior/eksterior, belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman habis pakai, belanja dokumentasi dan publikasi, belanja alat-alat rumah tangga/ dapur pakai habis, belanja pemeliharaan komputer, belanja pemeliharaan peralatan/ perlengkapan kantor, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan halaman/ taman/ perkarangan, belanja pemeliharaan bangunan bukan gedung dengan capaian 100%;

- (10) Kegiatan Pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor ASN Komisi Informasi Yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp28.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp24.822.000,00 atau setara 88,65%. *Output* kegiatan adalah belanja dekorasi dan desain interior/ eksterior dengan target capaian 1 tahun, belanja dokumentasi dan publikasi 1 tahun, pemeliharaan komputer dengan target capaian 1 tahun, belanja pemeliharaan peralatan/ perlengkapan kantor dengan target capaian 1 tahun, *Outcome* kegiatan adalah belanja dekorasi dan desain interior/ eksterior, pemeliharaan komputer dan pemeliharaan peralatan/ perlengkapan kantor dengan capaian 100%;
- (11) Kegiatan penyediaan barang habis pakai kantor ASN Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp141.998.814,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp137.964.568,00 atau setara 97,16%. *Output* kegiatan adalah Belanja alat tulis kantor dengan target capaian 1 tahun, dengan target capaian 1 tahun, Belanja perangko, materai dan benda pos dengan target capaian 1 tahun, Belanja plakat/ vandel/ piala/ cinderamata/ karangan bunga/ souvenir dengan target capaian 1 tahun, belanja dokumentasi dan publikasi dengan target capaian 1 tahun, Belanja cetak dengan target capaian 1 tahun, Belanja penggandaan/*fotocopy* dengan target capaian 1 tahun dan belanja penjilidan dengan target capaian 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya barang habis pakai kantor dengan capaian 100%;
- (12) Kegiatan penyediaan langganan kantor ASN Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.224.287.467,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.161.754.012,00 atau setara 94,89%. *Output* kegiatan adalah belanja langganan surat kabar/ majalah dengan target capaian 1 tahun dan belanja jasa profesi dengan target capaian 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah belanja surat kabar/majalah dan jasa profesi dengan capaian 100%;
- (13) Kegiatan penyediaan langganan kantor ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

- Jawa Barat sebesar Rp176.220.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp143.613.980,00 atau setara 81,50%. *Output* kegiatan adalah Langganan kantor dengan target capaian 1 paket dan honorarium tenaga kerja non pegawai dengan target capaian 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah langganan kantor, honorarium tenaga kerja nonpegawai dengan capaian langganan surat kabar/majalah, belanja internet, belanja jasa honorarium tenaga kerja *front office* dan supir dengan capaian 100%;
- (14) Kegiatan penyediaan rapat internal dan luar kantor-ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.640.780.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.289.679.256,00 atau setara 86,70%. *Output* kegiatan adalah makan dan minuman rapat, makan dan minum tamu, perjalanan Dinas lokal, perjalanan Dinas dalam daerah, perjalanan Dinas luar provinsi, perjalanan Dinas luar negeri dengan target capaian 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah makan dan minum rapat, makan dan minum tamu, perjalanan Dinas lokal, perjalanan Dinas dalam daerah, perjalanan Dinas luar provinsi, perjalanan Dinas luar negeri dengan capaian belanja makan dan minum rapat dan tamu, perjalanan Dinas dalam daerah dan luar provinsi PNS dan non PNS, perjalanan Dinas luar negeri dengan capaian 100%;
- (15) Kegiatan penyediaan rapat internal dan luar kantor-ASN Komisi Informasi Yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp59.998.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp38.471.319,00 atau setara 64,12%. *Output* kegiatan adalah makan dan minuman rapat, makan dan minum tamu, dengan target capaian 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah belanja makan minum rapat, makan minum tamu, air mineral/galon dengan capaian 100%;
- (16) Kegiatan penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp153.950.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp146.487.855,00 atau setara 95,15%. *Output* kegiatan adalah sewa tenda, sewa internet, sewa kendaraan dengan target capaian 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah sewa tenda, sewa internet, sewa kendaraan, pengisian tabung

- gas, belanja dokumentasi dan publikasi, belanja sewa meja/kursi dengan capaian belanja jasa sea tenda, belanja pengisian tabung gas, belanja dokumentasi dan publikasi dengan capaian 100%;
- (17) Kegiatan penyediaan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur-ASN Diskominfo yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp424.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp350.820.000,00 atau setara 82,74%. *Output* kegiatan adalah penceramah, instruktur senam, pakaian dinas, baju olahraga dengan target capaian 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penceramah, instruktur senam, pengadaan pakaian Dinas dan baju olahraga dengan capaian 100%;
- (18) Kegiatan penyediaan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur ASN Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebesar Rp18.701.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp18.444.000,00 atau setara 98,63%. *Output* kegiatan adalah pakaian dinas, baju olahraga dengan target capaian 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pakaian Dinas dan alat olahraga dengan capaian 100%.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Permasalahan

Tidak ada.

b. Solusi

Tidak ada.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2019 adalah Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit dengan realisasi sebesar 21,1% dari target sebesar 21%; Laju peningkatan UMKM yang mengakses kredit dengan realisasi sebesar 11,91% dari target sebesar 20%; Laju peningkatan koperasi yang mengakses kredit dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 20%; Persentase koperasi berkualitas dengan realisasi sebesar 26,3% dari target sebesar 30% dan Persentase UMKM yang naik kelas dengan realisasi sebesar 18% dari target sebesar 17%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah :

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yakni pertumbuhan koperasi berkualitas dengan capaian sebesar 29,84% dari target sebesar 20%; pertumbuhan akses modal KUK dengan capaian sebesar 24,61% dari target sebesar 20% dan pertumbuhan jumlah rasio wirausaha dengan capaian sebesar 1,5% dari target sebesar 1,5%. Alokasi Anggaran sebesar Rp129.560.577.577,00 realisasi sebesar Rp100.827.231.109,00 atau setara dengan 77,82%.

- (1) Kegiatan Bintek Pengembangan Usaha Produk UMKM di Jawa Barat yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp239.999.848,00 dan realisasi Rp237.769.050,00 atau setara dengan 99,07%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasi bimbingan teknis pengembangan usaha terhadap 200 pelaku usaha, realisasi 200 UKM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta jaringan pasar para peserta bimtek;
- (2) Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian yang dilaksanakan Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp183.399.776,00 dan realisasi Rp183.338.526,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan berkoperasi dan membentuk koperasi yang berbadan hukum, target : 200

- koperasi, realisasi 200 koperasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman bagi pengurus, pengawas dan anggota akan peraturan perundang-undangan koperasi dan meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas serta meningkatnya usaha koperasi;
- (3) Kegiatan Advokasi Pra-Koperasi yang dilaksanakan Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp115.899.776,00 dan realisasi Rp112.592.526,00 atau setara dengan 97,15%. *Output* kegiatan adalah advokasi pra koperasi, target: 200 koperasi, realisasi 200 koperasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berkoperasi dan meningkatnya jumlah Koperasi baru;
- (4) Kegiatan Sosialisasi Digitalisasi yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.967,00 dan realisasi Rp86.025.000,00 atau setara dengan 86,03%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya 150 pelaku usaha Jawa Barat dalam rangka mengikuti sosialisasi digitalisasi tahun 2019, realisasi 150 orang pelaku usaha. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan akses pasar produk melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- (5) Kegiatan Temu Konsultasi Pengembangan Aneka Usaha Koperasi yang dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.800,00 dan realisasi Rp99.999.800,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah target 50 koperasi peternak susu dan anggotanya dari kabupaten/kota di Jawa Barat, realisasi target: 50 koperasi peternak susu dan anggotanya dari kabupaten/kota di Jawa Barat. *Outcome* meningkatnya pengetahuan mengenai pengolahan produk melalui pemanfaatan teknologi tepat guna bagi koperasi/anggota koperasi;
- (6) Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Usaha KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi yang dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.599.999.946,00 dan realisasi Rp2.585.009.945,00 atau setara dengan 99,42%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis penguatan usaha (digitalisasi koperasi), target: 200 koperasi, realisasi: 200

- koperasi. *Outcome* kegiatan adalah penguatan pengelolaan usaha KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi yang handal dan berdaya saing;
- (7) Kegiatan pendampingan penguatan sistem aplikasi usaha KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi yang dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.878,00. Kegiatan tidak dilaksanakan;
 - (8) Kegiatan *Cooperative Fair* yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp999.999.850,00 dan realisasi Rp997.869.630,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasi UKM sebanyak 200 UKM realisasi 200 UKM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akses pasar serta volume usaha para pelaku usaha yang diikutsertakan dalam kegiatan;
 - (9) Kegiatan Pameran Produk Luar Provinsi yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp849.599.883,00 dan realisasi Rp831.329.750,00 atau setara dengan 97,85%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya fasilitas pameran produk ke luar provinsi, realisasi 30 UKM (5 Provinsi). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akses pemasaran produk unggulan UKM Jawa Barat;
 - (10) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Pemasaran, Inovasi Produk dan Dukungan Pembiayaan Usaha Kecil di Jawa Barat yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp81.999.830,00 dan realisasi Rp80.249.830,00 atau setara dengan 97,87%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi Pengembangan Pemasaran, Inovasi Produk dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya informasi kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019, serta masukan dan saran untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
 - (11) Kegiatan Bimbingan Pengembangan Akses Pembiayaan UMKM yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki alokasi Rp149.999.829,00 dan realisasi

- Rp149.693.029,00 atau setara dengan 99.80%. *Output* kegiatan adalah bimbingan pengembangan akses pembiayaan UMKM. *Output* kegiatan adalah peningkatan akses pembiayaan. Target: 150 orang; *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya peserta sebanyak 150 orang;
- (12) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dana Perbankan dan Non Perbankan yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki alokasi Rp91.999.856,00 dan realisasi Rp91.651.256,00 atau setara dengan 99.62%. *Output* kegiatan adalah monitoring dan evaluasi dana perbankan dan non perbankan, peningkatan kualitas usaha. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya 1000 UKM;
- (13) Kegiatan Penerapan Metode Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang dilaksanakan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.994.172,00 dan realisasi Rp195.846.124,00 atau setara dengan 97,93%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Penerapan metode pengawasan dan pemeriksaan koperasi bagi pengurus koperasi Tk Provinsi Jawa Barat. Target: 100 Orang Realisasi: 100 Orang Studi Komparasi Pola pembinaan, realisasi 100 Orang. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- (14) Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang dilaksanakan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.993.005,00 dan realisasi Rp196.629.100,00 atau setara dengan 98,32%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis pemeriksaan usaha simpan pinjam bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Tingkat Provinsi Jawa Barat target: 100 Orang, realisasi: 100 Orang. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- (15) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Usaha dan Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang dilaksanakan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.646.783,00 atau setara dengan 99,82%. *Output* kegiatan adalah target 75 Orang, realisasi

- 75 orang; *Outcome* kegiatan adalah monitoring dan evaluasi pemeriksaan koperasi;
- (16) Kegiatan *Workshop* Penilaian Kesehatan Koperasi Usaha Simpan Pinjam yang dilaksanakan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.995.307,00 dengan dan realisasinya mencapai sebesar Rp193.324.220,00 atau setara dengan 96,66%. *Output* kegiatan adalah target 100 orang (Pengurus dan Pengawas Koperasi), realisasi 83 orang (Pengurus dan Pengawas Koperasi). *Outcome* kegiatan ini adalah *workshop* penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi;
- (17) Kegiatan Penanganan Khusus Koperasi Bermasalah yang dilaksanakan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.980.527,00 dan realisasi Rp191.549.603,00 atau setara dengan 95,78%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penanganan khusus di KOPJASKUM, KOBUTRI, KOPERASI KARYA NYATA dan KSP CU ODILIA, terlaksananya sosialisasi penanganan khusus koperasi untuk ASN Kab/Kota di Jawa Barat dan pengurus koperasi. target: 80 orang, realisasi: 80 Orang. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- (18) Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Koperasi Bermasalah yang dilaksanakan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.996.218,00 dan realisasi Rp198.803.330,00 atau setara dengan 99,40%. *Output* kegiatan adalah target teridentifikasi dan terverifikasi koperasi bermasalah, realisasi teridentifikasi dan terverifikasi koperasi bermasalah. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- (19) Kegiatan Pelatihan Berbasis Akuntansi dan Manajerial Kewirausahaan Bagi Pengelola Keuangan Koperasi yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi Rp736.075.000,00 atau setara dengan 81,79%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas wirausaha, target: 400 Orang, realisasi: 400 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil;

- (20) Kegiatan Evaluasi Program WUB 2014–2018 yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.990,00 dan realisasi Rp239.909.940,00 atau setara dengan 79,97%. *Output* kegiatan adalah uang pengganti transport 54 orang, belanja atk 1 kali, belanja makanan dan minuman rapat 480 box/dus, belanja perjalanan Dinas dalam daerah PNS Provinsi 1 kegiatan, perjalanan Dinas dalam daerah non PNS 1 kegiatan. Target: 2000 Orang, realisasi: 2000 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- (21) Kegiatan Pelatihan Teknis Substantif bagi Usaha Kecil yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.251.000.000,00 dan realisasi Rp72.520.274.782,00 atau setara dengan 73.07%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas SDM KUKM, target: 500 orang, realisasi: 500 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil. Kendala kegiatan adanya efisiensi anggaran, karena 1) Calon peserta tidak memenuhi kuota 2) Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur;
- (22) Kegiatan Bimbingan Teknis Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Penyusunan SOP, Peraturan Khusus Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dilaksanakan Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp182.349.272,00 dan realisasi Rp168.959.022,00 atau setara dengan 92,66%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan target 200 koperasi dan realisasi: 200 koperasi. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- (23) Kegiatan Revitalisasi Koperasi yang dilaksanakan Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp317.626.507,00 dan realisasi Rp297.581.007,00 atau setara dengan 93.69%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas koperasi, target: 150 koperasi, realisasi 150 koperasi. *Outcome* kegiatan adalah identifikasi koperasi;
- (24) Kegiatan Pemingkatan/Akreditasi Koperasi yang dilaksanakan Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

- sebesar Rp99.999.801,00 dan realisasi Rp98.999.801,00 atau setara dengan 99.00%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, target : 1.500 orang , realisasi 1.500 orang. *Outcome* kegiatan adalah konsolidasi perkoperasian;
- (25) Kegiatan Konsolidasi Gerakan Masyarakat Koperasi yang dilaksanakan Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.997.888,00 dan realisasi Rp495.674.388,00 atau setara dengan 99,14%. *Output* peningkatan kualitas kelembagaan koperasi target:1500 orang, realisasi 1500 orang. *Outcome* kegiatan adalah konsolidasi perkoperasian, Kendala kegiatan ketika pembukaan acara selalu *crowded*;
- (26) Kegiatan Penerapan Manajemen Pengelolaan Kelembagaan Koperasi yang dilaksanakan Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.783,00 dan realisasi Rp99.990.783,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, target: 200 koperasi, realisasi 200 koperasi. *Outcome* kegiatan adalah pendampingan dan kunjungan kerja;
- (27) Kegiatan FGD KKSB (Konsorsium Koperasi Skala Besar) yang dilaksanakan Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.999.830,00 dan realisasi Rp73.227.830,00 atau setara dengan 97,64%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, target: 50 koperasi, realisasi 50 koperasi. *Outcome* kegiatan adalah forum diskusi;
- (28) Kegiatan Usulan dan Verifikasi Tokoh dan Koperasi Berprestasi yang dilaksanakan Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar 74.999.813,00 dan realisasi Rp74.999.813,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, target : 200 koperasi, realisasi 200 koperasi. *Outcome* kegiatan adalah penilaian koperasi;
- (29) Kegiatan *Expo* Pembiayaan Koperasi Syariah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar

Rp449.999.880,00 dan realisasi Rp443.047.380,00 atau setara dengan 98,45%. *Output* kegiatan adalah target 100 Koperasi Syariah, realisasi 100 Koperasi Syariah. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya peningkatan wawasan dan pemahaman usaha koperasi tentang prosedur dan tatacara akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan baik bank maupun non bank;

- (30) Kegiatan Bimbingan dan Pendampingan UKM Berbasis Inovasi yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp14.465.999.896,00 dan realisasi Rp13.313.206.820,00 atau setara dengan 92,03%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya 2.500 UKM Jawa Barat dalam peningkatan akses pasar melalui pendampingan, pelatihan *online* dan *offline*, temu bisnis, gelar produk, benchmarking, promosi produk, realisasi 2.500 pelaku usaha telah difasilitasi melalui pendampingan oleh 236 orang pendamping di 27 kabupaten/kota selama 6 (enam) bulan, telah dilakukan pelatihan *offline*, dilakukan gelar produk di setiap kabupaten/kota, perkembangan usahanya diseleksi untuk dapat mengikuti gelar produk yang dilakukan di Bandung dan yang juara diikutsertakan pada pameran di luar negeri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas (diversifikasi produk) dan kualitas produk (memenuhi standar mutu yang berlaku secara umum/legal aspek/perizinan usaha) peningkatan akses pasar (lokal, regional, nasional dan/atau Internasional), dilakukan melalui: Promosi produk melalui: fasilitasi pameran (dalam/Luar Negeri), media cetak/elektronik, pola kemitraan/kerjasama pemasaran/networking (*offline* atau *online*) dengan perusahaan yang telah sukses mengembangkan akses pasar produk UMKM;
- (31) Kegiatan Gelar Produk Inovasi dan Teknologi Informasi yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.849.984,00 dan realisasi Rp332.620.000,00 atau setara dengan 88,50%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya 100 pelaku usaha Jawa Barat dalam rangka mengikuti festival Jawa Barat Tahun 2019, realisasi 100 pelaku usaha difasilitasi mengikuti Festival Jawa Barat lokasi di Lapangan Gasibu Bandung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan akses pasar

- produk UMKM kreatif Jawa Barat pada festival Jawa Barat Tahun 2019;
- (32) Kegiatan Peningkatan Produk Usaha Kecil Melalui Pameran SMESCO Indonesia yang dilaksanakan Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.865,00 dan realisasi Rp149.499.865,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya gelar produk unggulan di Gedung Smesco, realisasi gelar produk sebanyak 70 UKM. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan akses pasar dan peluang bisnis UKM peserta kegiatan;
- (33) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia KUKM (DAK) yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.504.897.600,00 dan realisasi Rp5.151.837.176,00 atau setara dengan 93,59%. *Output* kegiatan adalah peningkatan usaha koperasi UKM, 1470 UKM. Target: 1470 Orang, realisasi: 1470 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil yakni Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program sebesar Rp2.039.999.350,00 dengan realisasi sebesar Rp1.872.464.288,00 atau setara dengan 91,79%.

- (1) Kegiatan Forum Koordinasi Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat yang dilaksanakan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.039.999.781,00 dan realisasi Rp904.872.541,00 atau setara dengan 87,01%. *Output* kegiatan adalah target: 1. Dokumen forum perencanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil tahun 2019; 2. Dokumen rencana kerja tahun 2019; 3. Terfasilitasinya koordinasi perencanaan melalui Rakortekcan K/L, Rakortas, Rapat Gabungan MPU, Musrenbang Provinsi, Pra Musrenbang dan musrenbangnas. 4.

Identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, realisasi Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2019 2. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 3. Terfasilitasinya Koordinasi Perencanaan Melalui Rakortekcan K/LS, Rakortas, Rapat Gabungan MPU, Musrenbang Provinsi, Pra Musrenbang dan musrenbangnas. 4. Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah 1. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan 2. Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang Pro Publik;

- (2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA yang dilaksanakan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.974,00 dan realisasi Rp97.179.900,00 atau setara dengan 97,18%. *Output* kegiatan adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, realisasi dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya dukungan alokasi pengembangan koperasi dan usaha kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD yang dilaksanakan Subbagin Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.820,00 dan realisasi Rp99.326.100,00 atau setara dengan 99,33%. *Output* kegiatan adalah target laporan kinerja, realisasi laporan kinerja. *Outcome* kegiatan adalah capaian kinerja OPD;
- (4) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang dilaksanakan Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.950,00 dan realisasi Rp99.783.450,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah tersusunya buku laporan keuangan secara periodic, target capaian kinerja keuangan (realisasi keuangan) tahun anggaran 2019 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, realisasi capaian kinerja keuangan TA 2019. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran

serta tertib administrasi. Kendala kegiatan tidak ada. Evaluasi kegiatan tujuan dari kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah untuk dapat mengetahui dan mengukur capaian kinerja pengelolaan keuangan serta tertib administrasi laporan keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat. Capaian kegiatan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2019 sebesar 100 persen dari capaian realisasi keuangan sebesar 98,49%. Kondisi tersebut menunjukkan deviasi sebesar 1,51% merupakan efesiensi atas pelaksanaan belanja kegiatan. Tindak lanjut kegiatan Tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah melaksanakan kembali kegiatan penyusunan laporan keuangan pada tahun anggaran 2020, sehingga pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dilakukan secara tertib, sebagai bahan evaluasi atas capaian kinerja keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, sekaligus mendukung akuntabilitas pengelola keuangan daerah;

- (5) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.920,00 dan realisasi Rp196.974.197,00 atau setara dengan 98,49%. *Output*: Meningkatkan pemahaman sistem tata kelola keuangan bagi pengelola keuangan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, target: tercapai kemampuan pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, realisasi tercapai kemampuan pengelolaan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah terbentuknya pengelola keuangan dengan kemampuan dan pemahaman yang baik, serta tertib administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Updating Website Dinas yang dilaksanakan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.915,00 dan realisasi Rp174.999.850,00 atau setara dengan

87,50%. *Output* kegiatan adalah target penyebaran informasi pengembangan koperasi dan usaha kecil, realisasi penyebaran informasi pengembangan koperasi dan usaha kecil. *Outcome* kegiatan adalah web Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;

- (7) Kegiatan Pendataan Koperasi yang dilaksanakan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.990,00 dan realisasi Rp299.328.250,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah target pendataan koperasi Jawa Barat, realisasi pendataan koperasi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah data koperasi Jawa Barat. Kendala kegiatan tidak ada.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil adalah Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dengan realisasi sebesar 80% dan target sebesar 80%. Alokasi anggaran program sebesar Rp2.338.371.770,00 dengan realisasi sebesar Rp2.170.722.134,00 atau setara dengan 92,83%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Jasa Kantor Dinas KUK yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.838.424.629,00 dan realisasi Rp1.672.637.993,00 atau setara dengan 90,98%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja jasa profesi, belanja cetak dan penggandaan, belanja jasa konsultan, belanja jasa konstruksi, belanja modal pengadaan mesin potocopy, belanja modal pengadaan filling kabinet, belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan, belanja modal pengadaan televisi, belanja modal pengadaan tangga, belanja modal pengadaan komputer pc, belanja modal pengadaan printer, belanja modal pengadaankursi rapat, belanja pekerjaan renovasi lobby dinas, belanja pekerjaan ruang ppid dan ruang tamu, belanja pekerjaan knockdown display, belanja modal pengadaan kamera, belanja modal pengadaan handycam, belanja modal pengadaan proyektor, belanja modal pengadaansound system, belanja pekerjaan renovasi kamar mandi, belanja pekerjaan pemasangan paving blok, target: 100% realisasi:

100%. *Outcome* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja jasa profesi, belanja jasa konstruksi, belanja modal pengadaan mesin *potocopy*, belanja modal pengadaan filling kabinet, belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan, belanja modal pengadaan televisi, belanja modal pengadaan tangga, belanja modal pengadaan komputer PC, belanja modal pengadaan printer, belanja modal pengadaan kursi rapat, belanja pekerjaan renovasi lobby dinas, belanja pekerjaan ruang ppid dan ruang tamu, belanja pekerjaan knockdown display, belanja modal pengadaan kamera, belanja modal pengadaan handycam, belanja modal pengadaan proyektor, belanja modal pengadaan *sound system*, 100%;

- (2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.947.141,00 dan realisasi Rp498.084.141,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang dan jasa 2 paket, belanja dekorasi dan desain interior /eksterior 76 m², belanja modal pengadaan televisi 4 unit, belanja modal pengadaan pompa air 1 unit, belanja modal pengadaan printer 6 unit, belanja modal pengadaan monitor /display 4 unit, belanja modal pengadaan perlengkapan /aksesoris komputer dan jaringan 1 paket, belanja modal pengadaan tempat tidur 7 unit, belanja modal pengadaan rice cooker 2 unit, belanja modal pengadaan jam dinding/meja 32 buah, belanja modal pengadaan karpet 1 paket, belanja modal pengadaan proyektor 1 unit, belanja modal pengadaan sound system 1 unit. Target: 13 jenis barang. Realisasi 13 jenis barang. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil yakni persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 100% dan Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Alokasi

anggaran Program sebesar Rp9.846.869.943,00 dengan realisasi sebesar Rp8.713.121.059,00 atau setara dengan 88.49%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp495.999.950,00 dan realisasi Rp443.867.200,00 atau setara dengan 89,49%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja alat tulis kantor, belanja perangkat/materai dan benda pos, belanja plakat/vandel/piala/cinderamata/karangan bunga/souvenir, belanja dokumentasi dan publikasi, belanja jasa paket dan pengiriman, belanja cetak, belanja penggandaan/photocopy, belanja penjilidan, target:100% realisasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah yang telah selesai dilaksanakan honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja alat tulis kantor, belanja perangkat/materai dan benda pos, belanja plakat/vandel/piala/cinderamata/karangan bunga/souvenir, belanja jasa paket dan pengiriman, belanja cetak, belanja penggandaan/*photocopy*, belanja penjilidan;
- (2) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp491.000.000,00 dan realisasi Rp450.468.500,00 atau setara dengan 91,75%. *Output* kegiatan adalah belanja jasa penerangan/iklan/reklame, film, pemotretan, belanja jasa profesi, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa tenda/stand pameran/panggung, belanja sewa sound system/alat musik/alat studio. Target:100%, realisasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah yang telah selesai dilaksanakan belanja jasa penerangan/iklan/reklame, film, pemotretan, belanja sewa tenda/stand pameran/panggung, belanja sewa sound system/alat musik/alat studio;
- (3) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp654.700.000,00 dan realisasi Rp558.680.449,00 atau setara dengan 85,33%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja langganan telepon,

- belanja langganan listrik, belanja langganan surat kabar/majalah, belanja jasa kawat/faximili/internet. *Outcome* kegiatan adalah yang telah selesai dilaksanakan honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja langganan telepon, belanja langganan listrik, belanja langganan surat kabar/majalah, belanja jasa kawat/faximili/internet;
- (4) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp177.100.000,00 dan realisasi Rp117.428.758,00 atau setara dengan 66,31%. *Output* kegiatan adalah belanja service 14 unit, belanja penggantian sukucadang 10 unit, belanja pelumas 33 unit. Target: 2 unit kendaraan roda empat, 1 unit kendaraan roda dua, 1 unit genset. Realisasi: 2 unit kendaraan roda empat, 1 unit kendaraan roda dua, 1 unit genset. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha. Kendala kegiatan pemeliharaan kendaraan tidak dilakukan secara optimal. Evaluasi kegiatan pemeliharaan kendaraan dilakukan apabila terdapat keluhan atau kerusakan. tindak lanjut selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan secara berkala dan optimal;
- (5) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp449.150.000,00 dan realisasi Rp320.642.000,00 atau setara dengan 71,39%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan spiritual sumber daya aparatur melalui fasilitasi kerohanian (ceramah rohani), meningkatnya mental dan kerjasama aparatur memlalui penanaman sikap mental dan jiwa korsa, meningkatnya kesehatan jasmani sumber daya aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga. fasilitasi olah raga senam, sewa lapang bulutangkis,fulsal,tenis meja, dan renang tersedianya. Target: 100%, realisasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan spiritual sumber daya aparatur melalui fasilitasi kerohanian (ceramah rohani), meningkatnya mental dan kerjasama aparatur

- memlalui penanaman sikap mental dan jiwa korsa, meningkatnya kesehatan jasmani sumber daya aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga, fasilitasi olah raga senam, sewa lapang bulutangkis, futsal, tenis meja, dan renang tersedianya 100%;
- (6) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor BP3W yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi Rp317.046.007,00 atau setara dengan 70,45%. *Output* kegiatan adalah belanja langganan telepon 11 bulan, belanja langganan listrik 11 bulan, belanja langganan surat kabar/majalah 11 bulan, belanja jasa kawat/faksimili/internet 11 bulan, belanja iuran wajib tahunan 11 bulan. Target: 5 Jenis langganan selama 11 bulan, realisasi 5 Jenis langganan selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha;
- (7) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.304.944.385,00 dan realisasi Rp1.125.332.674,00 atau setara dengan 86,24%. *Output* kegiatan adalah kegiatan belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman tamu, belanja minuman air mineral/galon, belanja perjalanan Dinas dalam daerah pns provinsi, belanja perjalanan Dinas luar provinsi pns provinsi, belanja perjalanan Dinas luar negeri pns provinsi, belanja perjalanan Dinas dalam daerah non pns. Target:100%, realisasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah yang telah selesai dilaksanakan belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman tamu, belanja minuman air mineral/galon, belanja perjalanan Dinas dalam daerah pns provinsi, belanja perjalanan Dinas luar provinsi pns provinsi, belanja perjalanan Dinas luar negeri pns provinsi, belanja perjalanan Dinas dalam daerah non pns;
- (8) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp93.282.500,00

- atau setara dengan 93,28%. *Output* kegiatan adalah capaian pendukung kegiatan Dinas koperasi dan usaha kecil. Target: 100%, realisasi: 100%. *Outcome* kegiatan adalah yang telah selesai dilaksanakan capaian kinerja aparatur Dinas 100%;
- (9) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan beserta peralatannya yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.427.752.173,00 dan realisasi Rp1.363.657.953,00 atau setara dengan 95,51%. *Output* kegiatan adalah penyediaan tenaga pendukung kegiatan target 50 orang. Target: 100%, realisasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah yang telah selesai dilaksanakan capaian kinerja aparatur Dinas 100%;
- (10) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp395.078.000,00 dan realisasi Rp357.195.540,00 atau setara dengan 90,41%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas. Target: 100%, realisasi: 100%. *Outcome* kegiatan adalah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan capaian kinerja aparatur Dinas 100%;
- (11) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.828.354.263,00 dan realisasi Rp1.590.709.278,00 atau setara dengan 87,01%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan sarana kantor. Target: 100%, realisasi: 100%. *Outcome* kegiatan adalah yang telah selesai dilaksanakan capaian kinerja aparatur Dinas 100%;
- (12) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp366.496.600,00 dan realisasi Rp272.053.109,00 atau setara dengan 74,23%. *Output* kegiatan adalah uang saku diklat, belanja perjalanan Dinas lokal dalam kota/kabupaten pns provinsi, belanja perjalanan Dinas dalam daerah pns provinsi, belanja perjalanan Dinas luar provinsi pns provinsi, belanja kursus/pelatihan/sosialisasi dan bimbingan

- teknis. Target:100%, realisasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah yang telah selesai dilaksanakan uang saku diklat, belanja perjalanan Dinas lokal dalam kota/kabupaten pns provinsi, belanja perjalanan Dinas dalam daerah pns provinsi, belanja perjalanan Dinas luar provinsi pns provinsi, belanja kursus/pelatihan/sosialisasi dan bimbingan teknis;
- (13) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor BP3W yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp121.500.000,00 dan realisasi Rp121.499.520,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang dan jasa 1 paket, belanja alat tulis kantor 1 paket, belanja cetak 3 kali. Target: 3 Jenis Pengadaan terdiri dari 5 Paket. Realisasi: 3 Jenis Pengadaan terdiri dari 5 Paket. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha;
- (14) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor BP3W yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp246.462.999,00 atau setara dengan 98,59%. *Output* kegiatan adalah belanja makanan dan minuman rapat 330 dus, belanja makanan dan minuman tamu 150 dus, belanja minuman air mineral /galon 1200 dus /galon, perjalanan Dinas dalam daerah pns provinsi 1 kegiatan, perjalanan Dinas luar provinsi pns provinsi 1 kegiatan. target: 132 orang. realisasi: 132 orang. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha;
- (15) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BP3W yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp400.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah belanja alat listrik dan elektornik 4 kali, belanja pemeliharaan komputer 12 kali, belanja pemeliharaan peralatan /perlengkapan kantor 28 kali, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 4 kali, belanja pemeliharaan bangunan air 7 kali. target: 350 unit, realisasi: 350 unit. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana

aparatur uptd pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan wirausaha. Kendala kegiatan tidak ada. Evaluasi kegiatan alokasi anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan adapun dan realisasi sebesar 98,44% karena adanya efisiensi. Tindak lanjut selanjutnya akan dilakukan optimalisasi kegiatan agar sesuai kebutuhan yang di rencanakan;

- (16) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya BP3W yang dilaksanakan UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp934.794.572,00 dan realisasi Rp934.794.572,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 kali, belanja jasa kebersihan 144 orang /bulan, belanja jasa keamanan 120 orang /bulan. Target: belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 kali, belanja jasa kebersihan 12 orang /tahun, belanja jasa keamanan 10 orang /tahun, realisasi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 kali, belanja jasa kebersihan 12 orang /tahun, belanja jasa keamanan 10 orang /tahun. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Permasalahan

- (1) Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan setempat mengenai tata laksana koperasi;
- (2) Kurangnya pengetahuan SDM koperasi tentang pengelolaan dan manajemen koperasi yang baik dan benar;
- (3) Masih banyak UKM yang belum bisa mengakses dana dari perbankan dikarenakan UKM tidak bankabel (titonik).

b. Solusi

- (1) Perlu adanya penyuluhan, sosialisasi maupun bimbingan teknis terhadap koperasi;
- (2) Diadakan pelatihan tentang perkoperasian;
- (3) Memberikan alternatif pembiayaan kepada ukm dengan memberikan sosialisasi dan pengenalan

lembaga2 permpdalan alternatif kredit seperti
kerdit Usaha Mikro (UMI).

18. Urusan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan penanaman modal adalah nilai realisasi investasi PMA-PMDN sebesar 137,5 Triliun Rupiah dari target sebesar 107-115,06 Triliun Rupiah dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dengan capaian sebesar 81,62 poin dari target sebesar 78 poin. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Investasi Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Investasi Daerah adalah realisasi investasi PMA-PMDN sebesar 137,5 Triliun Rupiah dari target sebesar 107-115,06 Triliun Rupiah. Alokasi anggaran Program Peningkatan Investasi Daerah adalah sebesar Rp4.011.429.914,00 dengan realisasi anggaran Rp3.649.007.661,00 setara dengan 90,97%.

- (1) Kegiatan Pembuatan/Produksi Audio Visual dan *Placement* ILM Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Media Elektronik dan Media Sosial yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.999.838,00 dan realisasi sebesar Rp148.711.822,00 atau setara dengan 99,14%. *Output* kegiatan adalah iklan layanan masyarakat di radio dan televisi. *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatnya iklim investasi;
- (2) Kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.895.809,00 dan realisasi sebesar Rp90.212.693,00 atau setara dengan 90,31%. *Output* kegiatan adalah dokumen persyaratan dan SOP. *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatnya iklim investasi;
- (3) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.444.282,00 dan realisasi sebesar Rp144.960.943,00 atau setara dengan 97,00%. *Output* kegiatan adalah *public awareness* terhadap aturan dan tata cara investasi dan perizinan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;

- (4) Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp196.179.555,00 dan realisasi sebesar Rp185.268.430,00 atau setara dengan 94,44%. *Output* kegiatan adalah bahan promosi dalam dan luar negeri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
- (5) Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.022.409.877,00 dan realisasi sebesar Rp913.228.692,00 atau setara dengan 89,32%. *Ouput* kegiatan adalah *business meeting/ matching/forum/workshop/seminar/pameran* di dalam/luar negeri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
- (6) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.916.975,00 dan realisasi sebesar Rp129.555.461,00 atau setara dengan 87,00%. *Ouput* kegiatan adalah *matchmaking* pelaku usaha. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
- (7) Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp598.755.380,00 dan realisasi sebesar Rp525.088.578,00 atau setara dengan 87,70%. *Ouput* kegiatan adalah regulasi PMPTSP. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
- (8) Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati Investor yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.365.057,00 dan realisasi sebesar Rp87.904.548,00 atau setara dengan 88,47%. *Ouput* kegiatan adalah dokumen hasil evaluasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
- (9) Kegiatan Penanganan Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.991.672,00 dan realisasi sebesar Rp185.485.522,00 atau setara dengan 92,75%. *Ouput* kegiatan adalah penanganan permasalahan

- PMA/PMDN. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
- (10) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.993.164,00 dan realisasi sebesar Rp240.588.552,00 atau setara dengan 96,24%. *Ouput* kegiatan adalah jumlah perusahaan yang diawasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
 - (11) Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.995.387,00 dan realisasi sebesar Rp275.327.387,00 atau setara dengan 91,78%. *Ouput* kegiatan adalah jumlah perusahaan yang dibina. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
 - (12) Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.997.041,00 dan realisasi sebesar Rp139.153.250,00 atau setara dengan 92,77%. *Ouput* kegiatan adalah database PMPTSP. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan akurasi data;
 - (13) Kegiatan Pelaksanaan Promosi melalui Media Elektronik ("*Business Corner*" *Talkshow*) yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.516.649,00 dan realisasi sebesar Rp88.815.680,00 atau setara dengan 89,25%. *Ouput* kegiatan adalah *business talkshow*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
 - (14) Kegiatan Pembangunan/Pengembangan *Investment Marketplace* yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp247.647.864,00 dan realisasi sebesar Rp215.993.868,00 atau setara dengan 87,22%. *Ouput* kegiatan adalah aplikasi *West Java Investment Marketplace*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
 - (15) Kegiatan Promosi Media Sosial, *Email Marketing*, dan *e-Newsletter* yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.978.374,00

- dan realisasi sebesar Rp140.950.235,00 atau setara dengan 93,98%. *Ouput* kegiatan adalah promosi melalui media sosial dan email marketing atau *e-newsletter*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi;
- (16) Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.342.990,00 dan realisasi sebesar Rp137.762.000,00 atau setara dengan 92,25%. *Ouput* kegiatan adalah dokumen peta potensi peluang investasi di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

b. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pencapaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 81,62 poin dari target sebesar 78 poin. Alokasi anggaran Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.616.717.935,00 dengan realisasi anggaran Rp5.425.259.284,00 setara dengan 96,59%.

- (1) Kegiatan Pembuatan Bahan/Data Cetakan Terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.894,00 dan realisasi sebesar Rp94.719.000,00 atau setara dengan 94,72%. *Output* kegiatan adalah dokumen persyaratan izin dan non izin. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya bahan informasi perizinan;
- (2) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.997.400,00 dan realisasi sebesar Rp148.932.520,00 atau setara dengan 99,29%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil pelaksanaan tinjauan lapangan perizinan yang sudah terbit. *Outcome* kegiatan adalah terverifikasinya data-data teknis di lapangan izin sektoral;
- (3) Kegiatan Monitoring Proses Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.993.933,00 dan realisasi sebesar Rp97.824.458,00 atau setara dengan 97,83%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil pelaksanaan verifikasi lapangan. *Outcome* kegiatan adalah terverifikasinya data-data teknis di lapangan;

- (4) Kegiatan Penanganan Proses Permasalahan Perizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.999.480,00 dan realisasi sebesar Rp167.531.950,00 atau setara dengan 83,77%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan. *Outcome* kegiatan adalah terselesaikannya permasalahan perizinan di lapangan;
- (5) Kegiatan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.499.687.373,00 dan realisasi sebesar Rp1.476.496.788,00 atau setara dengan 98,45%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil pelaksanaan peninjauan lapangan. *Outcome* kegiatan adalah terverifikasinya data-data teknis perizinan di lapangan;
- (6) Kegiatan Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.752.784,00 dan realisasi sebesar Rp80.761.855,00 atau setara dengan 80,96%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil pelaksanaan rapat koordinasi teknis. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya rekomendasi teknis sektor ekonomi dan sumber daya alam;
- (7) Kegiatan Pelaksanaan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.453.999.528,00 dan realisasi sebesar Rp1.448.555.180,00 atau setara dengan 99,63%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil pelaksanaan peninjauan lapangan. *Outcome* kegiatan adalah terverifikasinya data-data teknis perizinan di lapangan;
- (8) Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.715.050,00 atau setara dengan 34,29%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil penyelenggaraan rapat koordinasi teknis. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya rekomendasi teknis perizinan sektor infrastruktur dan sosial;

- (9) Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi Lainnya yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.999.918,00 dan realisasi sebesar Rp589.132.200,00 atau setara dengan 98,19%. *Output* kegiatan adalah integrasi sistem aplikasi dan sistem informasi lainnya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu layanan perizinan;
- (10) Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.969.780,00 dan realisasi sebesar Rp92.239.710,00 atau setara dengan 92,27%. *Output* kegiatan adalah dokumen pelaksanaan forum replikasi SIMPATIK. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya evaluasi hasil replikasi SIMPATIK;
- (11) Kegiatan Pengembangan Sistem *Call Center* Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.980.350,00 dan realisasi sebesar Rp487.176.850,00 atau setara dengan 97,44%. *Output* kegiatan adalah layanan *call center* pelayanan perizinan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan perizinan;
- (12) Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman Modal dan Perijinan pada Aplikasi SIMPATIK yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.982.462,00 dan realisasi sebesar Rp94.965.000,00 atau setara dengan 94,98%. *Output* kegiatan adalah pengembangan sistem pelaporan pada SIMPATIK. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu layanan perizinan;
- (13) Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.966.289,00 dan realisasi sebesar Rp98.683.750,00 atau setara dengan 98,72%. *Output* kegiatan adalah sistem aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keakuratan data survey kepuasan masyarakat;
- (14) Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp285.516.460,00 dan

- realisasi sebesar Rp279.548.000,00 atau setara dengan 97,91%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan perizinan;
- (15) Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp187.872.412,00 dan realisasi sebesar Rp185.871.000,00 atau setara dengan 98,93%. *Output* kegiatan adalah SP, SOP pelayanan perizinan yang bersertifikasi ISO. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya standarisasi mekanisme pelayanan perizinan;
- (16) Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.872,00 dan realisasi sebesar Rp69.105.973,00 atau setara dengan 69,11%. *Output* kegiatan adalah arsip yang di digitalisasi/alih media. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tata kelola kearsipan melalui database historikal.

c. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Capaian kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.342.803.990,00 dengan realisasi anggaran Rp1.199.518.190,00 setara dengan 89,33%.

- (1) Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp221.107.576,00 dan realisasi sebesar Rp213.042.750,00 atau setara dengan 96,35%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil IKM dan realisasi investasi. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya bahan evaluasi manajemen untuk pengambilan keputusan;
- (2) Kegiatan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp233.711.819,00 dan realisasi sebesar Rp231.792.836,00 atau setara dengan 99,18%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil pelaksanaan forum

- Dinas PMPTSP Se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah sinegritas perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah serta kab/kota terkait;
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan Regional dan Nasional) yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp366.427.400,00 dan realisasi sebesar Rp280.680.174,00 atau setara dengan 76,60%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil keikutsertaan dalam forum perencanaan tingkat daerah, nasional dan regional. *Outcome* kegiatan adalah terakomodirnya usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas Jawa Barat;
 - (4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.052.500,00 dan realisasi sebesar Rp46.030.192,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah dokumen kajian hasil monitoring dan evaluasi. *Outcome* kegiatan adalah terukurnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP;
 - (5) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2020 yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.992.800,00 dan realisasi sebesar Rp68.407.812,00 atau setara dengan 76,01%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan yang dihasilkan. *Outcome* kegiatan adalah kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi;
 - (6) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.355.860,00 dan realisasi sebesar Rp55.483.900,00 atau setara dengan 96,74%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil keikutsertaan dalam penyelenggaraan pameran LKPJ. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya visualisasi pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas PMPTSP;
 - (7) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp53.948.257,00 dan realisasi sebesar Rp42.480.329,00 atau setara dengan 78,74%. *Output*

kegiatan adalah dokumen yang dihasilkan. *Outcome* kegiatan adalah tersampainya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas PMPTSP;

- (8) Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.933.696,00 dan realisasi sebesar Rp79.879.550,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah dokumen penatausahaan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan;
- (9) Kegiatan Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp194.274.082,00 dan realisasi sebesar Rp181.720.647,00 atau setara dengan 93,54%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil pelaksanaan Mukornis 3 Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas, koordinasi, dan kerjasama di bidang penanaman modal dan pengembangan PTSP.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yakni 50% dari target 40%. dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.800.838.753,00 dan realisasi sebesar Rp2.702.943.920,00 atau setara dengan 96,50%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.800.838.753,00 dan realisasi sebesar Rp2.702.943.920,00 atau setara dengan 96,50%. *Output* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas PMPTSP.

e. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas dengan realisasi sebesar 100%. alokasi anggaran Rp22.109.758.320,00 realisasi anggaran Rp20.146.009.880,00 setara dengan 91,12%.

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.491.606.471,00 dan realisasi sebesar Rp2.297.712.090,00 atau setara dengan 92,22%. *Output* kegiatan adalah jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin;
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.753.967.152,00 dan realisasi sebesar Rp1.605.978.554,00 atau setara dengan 91,56%. *Output* kegiatan adalah penyediaan tenaga keamanan, kebersihan, serta peralatannya. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor;
- (3) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp420.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp357.539.091,00 atau setara dengan 85,13%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana secara rutin;
- (4) Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.018.785.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.737.418.500,00 atau setara dengan 95,99%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya renovasi gedung kantor dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Dinas PMPTSP;
- (5) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.463.071.910,00 dan realisasi sebesar Rp3.063.018.221,00 atau setara dengan 88,45%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan rapat internal dan luar kantor, penyediaan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam mendukung tupoksi Dinas PMPTSP;

- (6) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp997.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp956.561.300,00 atau setara dengan 95,86%. *Output* kegiatan adalah penyediaan kegiatan dan kebutuhan rohani, sarana olahraga, dan pakaian dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai Dinas PMPTSP;
- (7) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp412.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp304.950.000,00 atau setara dengan 73,93%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta diklat/kursus singkat/bimtek aparatur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai Dinas PMPTSP;
- (8) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.879.101.164,00 dan realisasi sebesar Rp2.411.496.390,00 atau setara dengan 83,76%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan langganan kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam mendukung tupoksi Dinas PMPTSP;
- (9) Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp679.410.280,00 dan realisasi sebesar Rp606.225.000,00 atau setara dengan 89,23%. *Output* kegiatan adalah jumlah aparatur Dinas PMPTSP yang lulus diklat dengan predikat minimal memuaskan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Dinas PMPTSP pasca pelaksanaan diklat;
- (10) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.993.416.343,00 dan realisasi sebesar Rp1.805.110.734,00 atau setara dengan 90,55%. *Output* kegiatan adalah penyediaan barang pakai habis. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam mendukung tupoksi Dinas PMPTSP.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal

a. Permasalahan

1. Belum tersebarnya investasi ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Investasi masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian Utara;
2. Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier sehingga masih minim minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan;
3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hanya kurang lebih 10% perusahaan (600 perusahaan) yang menyampaikan LKPM secara rutin;
4. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan tidak adanya kewenangan *Tim Task Force* untuk menyelesaikan masalah tersebut;
5. Masih tingginya *gap* antara minat dan realisasi investasi karena kurangnya pengawalan terhadap investasi;
6. Belum efektifnya promosi investasi yang disebabkan oleh promosi investasi yang belum *ready to offer*. Hal ini disebabkan potensi peluang investasi belum sampai kepada *feasibility study* yang dibuat oleh konsultan yang kredibel di mata investor asing.

b. Solusi

1. Penyusunan dokumen profil peluang investasi sampai dengan tahap *Feasibility Study* (FS) dan diusahakan memakai konsultan yang sudah kredibel di mata investor luar negeri, sehingga profil peluang investasi tersebut sudah layak untuk dijual kepada investor, terutama investor dari luar negeri;
2. Penyusunan dokumen profil peluang investasi yang menampilkan peluang investasi dari kabupaten/kota di Jawa Barat bagian selatan sehingga diharapkan Jawa Barat bagian selatan juga akan menarik minat investor untuk menanamkan investasinya;
3. Pembuatan profil peluang investasi lebih diutamakan pada sektor tersier, misalnya sektor pertanian dan perkebunan sehingga minat investor pada kedua sektor tersebut akan meningkat;
4. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM. Selain itu, perlu diwacanakan adanya *reward* bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan;

5. Lebih meningkatkan koordinasi Tim *Task Force* terutama dengan Instansi seperti BPN, Bea Cukai, Pajak dan PLN karena permasalahan yang menyangkut hal itu sulit untuk dicarikan solusinya;
6. Diluncurkannya Koordinasi Pengawasan Investasi memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap) oleh BKPM.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2019 adalah Indeks Pembangunan Pemuda dengan capaian sebesar 46,20 poin dari target 53,63 poin dan Peringkat Provinsi Jawa Barat pada Multievent Nasional POPNAS dengan capaian peringkat 1 (satu) dari target peringkat 1 (satu). Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan yakni jumlah pemuda berprestasi nasional (Pemuda pelopor, PPAN, Paskibraka dan KPN) dengan capaian sebesar 111,76% (19 Orang) dari target sebesar 100% (17 Orang); Persentasi pemuda yang berwirausaha atas pembinaan kewirausahaan dengan capaian sebesar 10% dari target 10%; persentasi pembinaan organisasi kepemudaan yang terdata dengan capaian sebesar 75% dari target sebesar 100%; Prestasi *marching band* di tingkat Nasional peringkat 1 dari target peringkat 1; jumlah penerima penghargaan kepemudaan dan kepramukaan dengan capaian sebesar 5 kategori dari target 5 kategori; jumlah *event* kepemudaan tingkat Jawa Barat dengan capaian sebesar 2 *event* dari target sebesar 2 *event*. Alokasi anggaran program sebesar Rp11.066.624.750,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp10.209.007.571,00 atau setara dengan 92,25%.

- (1) Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Insan Kepemudaan dan Kepramukaan Berprestasi Tingkat Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.999.601,00 dan realisasi sebesar Rp476.442.750,00 atau setara dengan 95,29%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Insan Kepemudaan Dan Kepramukaan Tingkat Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah pemuda Jawa Barat yang menerima penghargaan;
- (2) Kegiatan *Monitoring* Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan dan Hibah Sarana dan Prasarana Kepemudaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp74.999.804,00 dan realisasi sebesar Rp28.834.500,00 atau setara dengan 38,45%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *Monitoring Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan dan Hibah Sarana Prasarana Kepemudaan* di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan di Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Data Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp136.395.421,00 dan realisasi sebesar Rp116.890.250,00 atau setara dengan 85,70%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen Kegiatan *Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota* di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan di Jawa Barat;
- (4) Kegiatan *Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota* di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.957,00 dan realisasi sebesar Rp80.216.500,00 atau setara dengan 80,22%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota* di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan di Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.656.353.058,00 dan realisasi sebesar Rp1.520.306.500,00 atau setara dengan 91,79%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya peningkatan potensi kelembagaan dan kemitraan organisasi kepemudaan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan di Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Ideologi Kebangsaan bagi Generasi Muda yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp434.107.936,00 dan realisasi sebesar Rp416.935.620,00 atau setara dengan 96,04%. *Output* kegiatan adalah

- terlaksananya penyelenggaraan pembinaan mental spiritual dan ideologi kebangsaan bagi generasi muda. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan di Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kader Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp806.397.344,00 dan realisasi sebesar Rp666.457.935,00 atau setara dengan 82,65%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan peningkatan kualitas kader organisasi kepemudaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan di Jawa Barat;
- (8) Kegiatan Pelatihan Kader Pemuda anti Narkoba yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp319.755.824,00 dan realisasi sebesar Rp286.430.086,00 atau setara dengan 89,58%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya penyelenggaraan pelatihan kader pemuda anti narkoba. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan di Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan *Marching Band* Gita Pakuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.242.321.353,00 dan realisasi sebesar Rp1.154.684.888,00 atau setara dengan 92,95%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pembinaan dan pengembangan *marching band* Gita Pakuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya prestasi *marching band* Jawa Barat;
- (10) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan *Marching Band* dan Pengiriman *Marching Band* Gita Pakuan pada Kejuaraan Nasional yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp635.685.533,00 dan realisasi sebesar Rp607.113.500,00 atau setara dengan 95,51%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya penyelenggaraan kejuaraan *marching band* dan pengiriman *marching band* Gita Pakuan pada kejuaraan Nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya prestasi *marching band* Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp1.515.186.930,00 dan realisasi sebesar Rp1.497.156.360,00 atau setara dengan 98,81%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pengembangan kewirausahaan pemuda. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha;
- (12) Kegiatan Pembentukan LPKP (Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp241.796.501,00 dan realisasi sebesar Rp152.294.291,00 atau setara dengan 62,98%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah pemuda Jawa Barat yang menerima penghargaan;
- (13) Kegiatan *Kabizza Fest* Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp534.919.857,00 dan realisasi sebesar Rp512.070.450,00 atau setara dengan 95,73%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pelaksanaan *Kabizza Fest* Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah pemuda Jawa Barat yang menerima penghargaan;
- (14) Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp496.420.150,00 dan realisasi sebesar Rp491.742.150,00 atau setara dengan 99,06%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya jambore pemuda daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* kepemudaan tingkat Jawa Barat;
- (15) Kegiatan Pemantauan Kegiatan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.773.338,00 dan realisasi sebesar Rp40.423.640,00 atau setara dengan 88,31%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pemantauan kegiatan kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

- Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* kepemudaan tingkat Jawa Barat;
- (16) Kegiatan Pemusatan Paskibraka Jawa Barat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.176.911.642,00 dan realisasi sebesar Rp1.160.036.755,00 atau setara dengan 98,57%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pemusatan paskibraka Jawa Barat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah pemuda Jawa Barat yang menerima penghargaan;
- (17) Kegiatan Seleksi Program Peran serta Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp802.418.384,00 dan realisasi sebesar Rp778.384.200,00 atau setara dengan 97,00%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya seleksi Program Peran Serta Kepemudaan tingkat Nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah pemuda Jawa Barat yang menerima penghargaan;
- (18) Kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemuda (LKP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp347.182.117,00 dan realisasi sebesar Rp222.587.196,00 atau setara dengan 64,11%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya Latihan Kepemimpinan Pemuda (LKP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah pemuda Jawa Barat yang menerima penghargaan.

b. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga

Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga yakni jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga yakni dengan capaian sebesar 10.137 orang dari target sebesar 39.367 orang; persentase kecamatan penempatan sarjana pendamping, penggerak, pembangunan olahraga dengan capaian sebesar 17,28% dari target sebesar 17,28%; persentase tenaga olahraga tradisional, layanan khusus dan rekreasi yang dibina yang bersertifikat dengan capaian sebesar 8,5% dari target 10% dan jumlah *event* olahraga tradisional,

layanan khusus dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti dengan capaian sebesar 9 *event* dari target 9 *event*. Alokasi anggaran Rp11.684.174.453,00 dan realisasi anggaran Rp11.550.201.485,00 atau setara dengan 98,85%.

- (1) Kegiatan Festival Pencak Silat Tingkat Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp828.972.358,00 dan realisasi sebesar Rp821.269.858,00 atau setara dengan 99,07%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya festival pencak silat tingkat Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti;
- (2) Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Hibah/Bantuan Di Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.825.000,00 atau setara dengan 95,30%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pengembangan *monitoring* dan evaluasi hibah/bantuan di Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat Jawa Barat berolahraga;
- (3) Kegiatan Invitasi Olahraga Pekerja Tingkat Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp424.998.977,00 dan realisasi sebesar Rp422.880.977,00 atau setara dengan 99,50%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan pengembangan invitasi olahraga pekerja tingkat Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti;
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Segar Bugar Masyarakat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp629.099.730,00 dan realisasi sebesar Rp624.419.730,00 atau setara dengan 99,26%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan gebyar segar bugar masyarakat Jawa Barat di 4 wilayah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti;
- (5) Kegiatan Pelaksanaan lomba Peringatan HAORNAS tingkat Jawa Barat tahun 2019 yang dilaksanakan

- Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp364.999.754,00 dan realisasi sebesar Rp360.299.754,00 atau setara dengan 98,71%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Lomba Peringatan HAORNAS tingkat Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti;
- (6) Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Organisasi Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp174.999.036,00 dan realisasi sebesar Rp161.647.286,00 atau setara dengan 92,37%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pendataan dan pembinaan organisasi olahraga rekreasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti;
 - (7) Kegiatan Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.415.699.764,00 dan realisasi sebesar Rp3.409.422.564,00 atau setara dengan 99,82%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tenaga olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang bersertifikat;
 - (8) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Serta Keterampilan Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp205.579.015,00 dan realisasi sebesar Rp205.081.415,00 atau setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya Peningkatan pengetahuan serta keterampilan Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tenaga olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang bersertifikat;
 - (9) Kegiatan Peningkatan Sertifikasi/Akreditasi Tenaga Olahraga Tradisional, Layanan Khusus dan Rekreasi Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp361.173.142,00 dan realisasi sebesar Rp358.711.142,00 atau setara

- dengan 99,32%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya Peningkatan Sertifikasi/Akreditasi Tenaga Olahraga Tradisional, Layanan Khusus dan Rekreasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti;
- (10) Kegiatan Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Ekstrem Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp314.998.910,00 dan realisasi sebesar Rp314.678.910,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya Invitasi Olahraga Ekstrem Tingkat Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti;
- (11) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Minggu Bergerak (GURAK) oleh Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp637.799.649,00 dan realisasi sebesar Rp633.324.975,00 atau setara dengan 99,30%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya Kegiatan Minggu Bergerak (GURAK) oleh Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat Jawa Barat berolahraga;
- (12) Kegiatan Pelatihan Bagi Pembina/Pelatih Olahraga tradisional se-Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp227.838.736,00 dan realisasi sebesar Rp227.413.736,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya Pelatihan Bagi Pembina/Pelatih Olahraga Tradisional se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tenaga olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang bersertifikat;
- (13) Kegiatan pelatihan bagi pembina/pelatih olahraga di pondok pesantren se-Jawa Barat tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp354.778.790,00 dan realisasi sebesar Rp318.267.790,00 atau setara dengan 89,71%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya Pelatihan Bagi Pembina/Pelatih Olahraga di Pondok Pesantren se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatnya tenaga olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang bersertifikat;
- (14) Kegiatan Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada pekan olahraga Pesantren Nasional (POSPENAS) Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.879.088.809,00 dan realisasi sebesar Rp2.837.976.565,00 atau setara dengan 98,57%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada Pekan Olahraga Pasantren Nasional (Pospenas). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti;
- (15) Kegiatan pengiriman kontingen Jawa Barat pada pekan olahraga tradisional tingkat nasional tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp245.998.846,00 dan realisasi sebesar Rp242.637.846,00 atau setara dengan 98,63%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti;
- (16) Kegiatan penyelenggaraan invitasi olahraga tradisional bagi pelajar tingkat Jawa Barat tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp593.148.937,00 dan realisasi sebesar Rp588.343.937,00 atau setara dengan 99,19%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya invitasi olahraga tradisional bagi pelajar tingkat Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga tradisional, layanan khusus, dan rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti.

c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga

Capaian indikator kinerja Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga adalah jumlah penerima penghargaan insan olahraga berprestasi/berjasa dengan capaian sebesar 342 Orang dari target sebesar 1160 Orang; persentase medali emas yang diperoleh dalam *Event* POPNAS dengan capaian sebesar 17% dari target sebesar 20%; persentase sertifikat lanjutan bagi tenaga

dengan capaian sebesar 12,8% dari target sebesar 10%, jumlah sarana dan prasarana Keolahragaan di kabupaten/kota yang tersedia dengan capaian sebesar 7 Kab/Kota) dari target sebesar 5 Kab/Kota; jumlah *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat sebesar 12 *Event* dari target 5 event. Alokasi anggaran Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Organisasi Olahraga adalah sebesar Rp46.269.936.447,00 dengan realisasi sebesar Rp37.381.942.319,00 setara dengan 80,79%.

- (1) Kegiatan Pembinaan Atlet PPLP Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat sebesar dengan alokasi anggaran Rp8.161.186.500,00 dan realisasi sebesar Rp5.874.871.190,00 atau setara dengan 71,99%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan Pembinaan Atlet PPLP Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perolehan medali pada *Event* POPNAS;
- (2) Kegiatan Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada PEPARPENAS Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp751.469.678,00 dan realisasi sebesar Rp717.931.162,00 atau setara dengan 95,54%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada PEPARPENAS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perolehan medali pada *Event* PEPARPENAS;
- (3) Kegiatan Peningkatan Jumlah dan Mutu Tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.999.709.686,00 dan realisasi sebesar Rp1.948.614.328,00 atau setara dengan 97,44%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Peningkatan Jumlah dan Mutu Tenaga Keolahragaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tenaga olahraga prestasi yang bersertifikat;
- (4) Kegiatan Pengembangan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp986.342.333,00 dan realisasi sebesar Rp946.474.718,00 atau setara dengan 95,96%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan Pengembangan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tenaga olahraga prestasi yang bersertifikat;

- (5) Kegiatan *Monitoring* Evaluasi Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.998.065,00 dan realisasi sebesar Rp141.173.900,00 atau setara dengan 94,12%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *Monitoring* Evaluasi Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tenaga olahraga prestasi yang bersertifikat;
- (6) Kegiatan Dukungan Kegiatan Pengembangan Tenaga Keolahragaan *Event* Nasional dan Internasional yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat sebesar dengan alokasi anggaran Rp374.906.801,00 dan realisasi sebesar Rp237.254.850,00 atau setara dengan 63,28%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan Dukungan Kegiatan Pengembangan Tenaga Keolahragaan *Event* Nasional dan Internasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tenaga olahraga prestasi yang bersertifikat;
- (7) Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan Yang Dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp659.726.320,00 dan realisasi sebesar Rp527.798.810,00 atau setara dengan 80,00%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Peningkatan Jumlah dan Mutu Tenaga Keolahragaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tenaga olahraga prestasi yang bersertifikat;
- (8) Kegiatan Promosi dan Pemasaran Olahraga Prestasi yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp130.298.359,00 dan realisasi sebesar Rp124.736.950,00 atau setara dengan 95,73%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran Olahraga Prestasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Seleksi Calon Atlet PPLP Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.860.000,00 dan realisasi sebesar Rp477.247.500,00 atau setara dengan 95,48%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan Seleksi Calon Atlet PPLP Jawa

- Barat 2018. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perolehan medali pada *Event* POPNAS;
- (10) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat pada HAORNAS Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.939.999.881,00 dan realisasi sebesar Rp1.778.214.000,00 atau setara dengan 91,66%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat pada HAORNAS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penerima penghargaan insan olahraga berprestasi/berjasa;
 - (11) Kegiatan Kejurnas Atlet PPLP Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp389.655.928,00 atau setara dengan 64,94%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan Kejurnas Atlet PPLP Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perolehan medali pada *Event* POPNAS;
 - (12) Kegiatan *Try Out* Atlet PPLP Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.304.000,00 dan realisasi sebesar Rp343.851.300,00 atau setara dengan 68,87%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan *Try Out* Atlet PPLP. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perolehan medali pada *Event* POPNAS;
 - (13) Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga Jawa Barat pada POPNAS dan PEPARNAS Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.699.999.535,00 dan realisasi sebesar Rp2.339.309.000,00 atau setara dengan 86,64%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Jawa Barat pada PON, PEPARNAS, POPNAS, POPWILNAS, PEPAPERNAS dan *MultiEvent* Nasional lainnya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penerima penghargaan insan olahraga berprestasi/berjasa;
 - (14) Kegiatan Kajian Pembuatan Model Sekolah Olahraga yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat sebesar dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp125.639.500,00 atau setara dengan 83,76%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Kajian

- Pembuatan Model Sekolah Olahraga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
- (15) Kegiatan Persiapan Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada POPNAS XV Papua 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.756.296.500,00 dan realisasi sebesar Rp3.751.937.157,00 atau setara dengan 78,88%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya penyelenggaraan atlet dalam Persiapan Pengiriman Kontingen Jabar pada POPNAS XV (500 Atlet). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perolehan medali pada *Event* POPNAS;
 - (16) Kegiatan Pengiriman Kontingen pada POPNAS XV Papua 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.499.966.306,00 dan realisasi sebesar Rp5.360.759.880,00 atau setara dengan 71,48%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya penyelenggaraan atlet yang dikirim dalam POPNAS XV (500 Atlet). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perolehan medali pada *Event* POPNAS;
 - (17) Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan POPWILDA Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.966.250,00 dan realisasi sebesar Rp354.550.000,00 atau setara dengan 78,79%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya persiapan penyelenggaraan POPWILDA Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
 - (18) Kegiatan Penyelenggaraan POPWILDA Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.749.115.500,00 dan realisasi sebesar Rp3.647.996.500,00 atau setara dengan 97,30%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan POPWILDA Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
 - (19) Kegiatan Pembinaan *Club* Olahraga Pelajar Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.839.400,00 dan realisasi sebesar Rp455.691.081,00 atau setara dengan 91,17%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya

- penyelenggaraan Pembinaan *Club* Olahraga Pelajar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
- (20) Kegiatan Kompetisi *Club* Olahraga Pelajar Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.749.878.308,00 dan realisasi sebesar Rp1.531.218.500,00 atau setara dengan 87,50%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan Kompetisi *Club* Olahraga Pelajar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
- (21) Kegiatan Monev Sarana dan Prasarana Keolahragaan Di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.994.250,00 dan realisasi sebesar Rp128.922.700,00 atau setara dengan 85,95%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Monev Sarana dan Prasarana Keolahragaan di Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan di Jawa Barat;
- (22) Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Senior yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.850.978.292,00 atau setara dengan 87,72%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan Olahraga Tingkat Senior. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
- (23) Kegiatan *Monitoring* Evaluasi Prestasi Atlet Jabar Tingkat Nasional dan Internasional yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp437.776.976,00 dan realisasi sebesar Rp115.774.976,00 atau setara dengan 26,45%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *Monitoring* Evaluasi Prestasi Atlet Jabar Tingkat Nasional dan Internasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
- (24) Kegiatan Persiapan dan Sosialisasi Pengembangan IPTEK Olahraga yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.998.999,00 dan realisasi

sebesar Rp176.343.597,00 atau setara dengan 35,27%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Persiapan dan Sosialisasi Pengembangan IPTEK Olahraga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;

- (25) Kegiatan *Jabar International Marathon* yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.673.902.800,00 dan realisasi sebesar Rp1.580.066.000,00 atau setara dengan 94,39%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan *Jabar International Marathon*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
- (26) Kegiatan *Road Race Tour De Jabar* yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.450.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.386.114.000,00 atau setara dengan 95,57%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan *Road Race Tour De Jabar*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat;
- (27) Kegiatan Penyusunan Standardisasi Pengembangan Olahraga Prestasi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.816.500,00 atau setara dengan 13,76%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya penyelenggaraan penyusunan standardisasi pengembangan olahraga prestasi di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya *event* olahraga yang mendukung prestasi olahraga Jawa Barat.

d. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga

Capaian indikator kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga adalah tingkat ketersediaan data dan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 100%, tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 100%, tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 100%, tingkat akurasi, kecepatan dan

kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 100%, dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp2.617.027.536,00 dengan realisasi sebesar Rp2.378.264.669,00 setara dengan 90,88%.

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Basis data Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.490.000,00 dan realisasi sebesar Rp44.490.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan Dokumen Pemeliharaan Aplikasi Basis data Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (2) Kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp305.375.000,00 dan realisasi sebesar Rp273.997.300,00 atau setara dengan 89,72%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan Dokumen Forum Perangkat Daerah (FPD) Urusan Kepemudaan Keolahragaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (3) Kegiatan *Monitoring*, Evaluasi Perencanaan Kepemudaan, dan Keolahragaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp801.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp678.502.789,00 atau setara dengan 84,63%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan Dokumen *Monitoring*, Evaluasi Perencanaan Kepemudaan, dan Keolahragaan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Data Statistik dan Profil Bidang Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp531.541.336,00 dan realisasi sebesar Rp522.229.305,00 atau setara dengan 98,25%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan Dokumen Data Statistika dan Profil Bidang Pemuda dan Olahraga. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (5) Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispora Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.175.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.174.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan Dokumen Rencana Kerja dan (RKA), Dokumen Pelaksanaan (DPA) Dispora Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - (6) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Kinerja Dispora Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat sebesar dengan alokasi anggaran Rp34.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.899.400,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Dispora Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - (7) Kegiatan Perencanaan Regulasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp716.621.200,00 dan realisasi sebesar Rp657.657.875,00 atau setara dengan 91,77%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - (8) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dispora Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.175.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.174.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

- dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dispora Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (9) Kegiatan Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan laporan Dokumen Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akurasi, kecepatan, dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (10) Kegiatan Capaian Keuangan Antar Pemerintah Provinsi dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.040.000,00 atau setara dengan 92,08%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pengolahan data Dokumen Capaian Keuangan Antar Pemerintah Provinsi dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (11) Kegiatan Pelaporan Fungsional Capaian Keuangan dan Pelaporan Keuangan Serta Aset Tahunan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pengolahan data Dokumen Pelaporan Fungsional Capaian Keuangan dan Pelaporan Keuangan Serta Aset. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (12) Kegiatan Sosialisasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Undang-Undang Perpajakan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.100.000,00 atau setara dengan 70,25%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan Dokumen Data Statistika

dan Profil Bidang Pemuda dan Olahraga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda Dan Olahraga

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda Dan Olahraga adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 100%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp1.135.604.925 dengan realisasi sebesar Rp1.080.619.300 setara dengan 95,16%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.994.779,00 dan realisasi sebesar Rp558.925.600,00 atau setara dengan 93,16%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp535.610.146,00 dan realisasi sebesar Rp521.693.700,00 atau setara dengan 97,40%. *Output* kegiatan adalah tersedianya peralatan kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga.

f. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga

Capaian indikator kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga adalah: persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 100% (70%) dari target 70%, jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB sebesar 100% (350 unit) dari target 350 unit, tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga adalah sebesar

Rp14.208.635.160,00 dengan realisasi sebesar Rp13.377.483.075,00 setara dengan 94,15%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp314.082.060,00 dan realisasi sebesar Rp293.975.000,00 atau setara dengan 93,60%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (2) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp549.786.575,00 dan realisasi sebesar Rp449.944.450,00 atau setara dengan 81,84%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (3) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp783.705.824,00 dan realisasi sebesar Rp765.414.353,00 atau setara dengan 97,67%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat pendukung fasilitas kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup dengan alokasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.428.710.167,00 dan realisasi sebesar Rp5.175.058.616,00 atau setara dengan 95,33%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (5) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp523.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp507.401.580,00 atau setara dengan 96,92%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana di PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;

- (6) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.278.419.306,00 dan realisasi sebesar Rp3.170.828.308,00 atau setara dengan 96,72%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (7) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp543.675.426,00 dan realisasi sebesar Rp499.894.063,00 atau setara dengan 91,95%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (8) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.518.089.552,00 dan realisasi sebesar Rp1.248.065.762,00 atau setara dengan 82,21%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana di PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (9) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp62.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp62.750.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana

- di PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (10) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.205.916.250,00 dan realisasi sebesar Rp1.204.150.943,00 atau setara dengan 99,85%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Permasalahan

1. Masih minimnya fasilitas pengembangan ide dan potensi pemuda;
2. Masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Jawa Barat.

b. Solusi

1. Peningkatan fasilitas pengembangan ide dan potensi pemuda di setiap kabupaten/kota;
2. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di setiap kabupaten/kota.

20. Urusan Statistik

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan statistik tahun 2019 adalah tingkat kematangan pengelolaan dan layanan statistik sektoral dengan capaian sebesar 77,99% dari target yang ditetapkan sebesar 77%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah tahun 2019 adalah persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan capaian sebesar 80% dari target sebesar 80%; persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral spasial dan aspasial yang dihasilkan dengan capaian sebesar 70% dari target sebesar 70% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan data dan Informasi dengan capaian sebesar 80,97% dari target sebesar 80%. Alokasi anggaran adalah sebesar Rp3.849.399.297,00 dengan realisasi sebesar Rp3.364.888.135,00 setara dengan 87,41%.

- (1) Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.649.399.964,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.493.570.385,00 atau setara 90,55%. *Output* kegiatan adalah Forum data Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target capaian 2 kali dan Bimtek pengelolaan Data Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten/Kota dengan target capaian 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya *updating* data statistik sektoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan capaian 100%;
- (2) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Pembangunan Jawa Barat Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp649.999.758,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp564.158.617,00 atau setara 86,79%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Kompilasi Data Statistik Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dengan target capaian 2 dokumen.

- Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan data & informasi pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan capaian 100%;
- (3) Kegiatan Pengolahan Data Statistik Sektor Spasial Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp197.487.399,00 atau setara 78,99%. *Output* kegiatan adalah Dokumen data statistik sektoral spasial dengan target capaian 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah pedoman penunjang penerapan statistik sektoral di Provinsi Jawa Barat dengan capaian 100%;
 - (4) Kegiatan Pengolahan Data Statistik Sektor Spasial Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp212.536.133,00 atau setara 85,03%. *Output* kegiatan adalah Dokumen data statistik sektoral Spasial dengan target capaian 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah spasial di Provinsi Jawa Barat dengan capaian 100%;
 - (5) Kegiatan Publikasi Data Statistik Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.999.983,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp283.986.285,00 atau setara 94,66%. *Output* kegiatan adalah Buku Data Statistik Sektor dengan target capaian 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya publikasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan capaian 100%;
 - (6) Kegiatan Regional PDRB Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2019 Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp749.999.592,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp613.122.316,00 atau setara 81,75%. *Output* kegiatan adalah Dokumen kesepakatan Konreg PDRB Se-Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan target capaian 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya Konreg PDRB Se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan capaian 100%.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Statistik

a. Permasalahan

Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan.

b. Solusi

Peningkatan pemanfaatan data statistik bagi pembangunan.

21. Urusan Persandian

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan persandian tahun 2019 adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan capaian kategori Level II+ sd IV+. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Penyelenggaraan Persandian Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian daerah adalah Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan capaian sebesar level II+ s.d IV+ dari target sebesar level III. Alokasi anggaran adalah sebesar Rp7.498.279.623,00 dengan realisasi sebesar Rp7.274.842.431,00 setara dengan 97,02%. Dengan Kegiatan adalah:

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan ISO 27001:2013 Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp396.667.369,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp393.147.002,00 atau setara 99,11%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Surveillance ISO 27001:2013 dengan target capaian 1 paket, Jumlah Self Assessment Indeks KAMI Perangkat Daerah dengan target capaian 3 Perangkat Daerah, Jumlah Self Assessment Indeks KAMI Kabupaten/Kota dengan target capaian 4 Kabupaten/Kota dan Jumlah Sosialisasi ISO 27001:2013 dan Indeks KAMI dengan target capaian 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pengukuran tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan capaian 100%;
- (2) Kegiatan Penyusunan Kajian Pendukung Keamanan Informasi Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.999.810,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp109.046.100,00 atau setara 99,13%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen *roadmap* penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dengan target capaian 1 draft dokumen dan jumlah *draft* Pergub Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan target capaian 1 draft dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya regulasi penyelenggaraan persandian dan keamanan Informasi dengan capaian 100%;

- (3) Kegiatan Rakor Persandian dan Keamanan Informasi Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp107.473.807,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp107.419.825,00 atau setara 99,95%. *Output* kegiatan adalah jumlah Rakor Persandian dan Keamanan Informasi dengan target capaian 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya sinkronisasi urusan persandian dan keamanan informasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian 100%;
- (4) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Sertifikat Elektronik Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.999.901,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp422.397.825,00 atau setara 93,87%. *Output* kegiatan adalah jumlah layanan sertifikat elektronik dengan target capaian 3 Perangkat Daerah, Jumlah sosialisasi layanan Persandian bagi Perangkat Daerah dengan target capaian 1 kali, Jumlah layanan kontra penginderaan dengan target capaian 3 Perangkat daerah dan Jumlah Sosialisasi/Bimtek/FGD Persandian dengan Kabupaten/Kota dengan target capaian 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi dengan capaian 100%;
- (5) Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Keamanan Informasi dan SOC (Security Operation Center) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.434.138.736,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.242.831.679,00 atau setara 97,03%. *Output* kegiatan adalah Jumlah perangkat pendukung SOC dengan target capaian 5 paket, Jumlah Pelatihan Keamanan Informasi bagi Kabupaten/Kota dengan target capaian 2 pelatihan, Jumlah Pelatihan Pengelola Keamanan Informasi dengan target capaian 3 pelatihan, Jumlah pelaksanaan penetration testing aplikasi dengan target capaian 3 aplikasi dan Jumlah FGD dengan komunitas Keamanan Informasi dengan target capaian 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sumber daya pendukung keamanan informasi dengan capaian 100%.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Persandian

a. Permasalahan

Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah.

b. Solusi

Peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah melalui inovasi teknologi.

22. Urusan Kebudayaan

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan kebudayaan tahun 2019 adalah Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat dengan realisasi sebesar 17,43% dari target yang ditetapkan sebesar 16,63%; Persentase seni dan budaya yang dilestarikan dengan realisasi sebesar 16,42% dari target yang ditetapkan sebesar 58,21% dan Persentase bahasa, sastra dan aksara daerah yang dilestarikan dengan realisasi sebesar 59,26% dari target yang ditetapkan sebesar 18,52%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Nilai Budaya adalah persentase cagar budaya yang dilestarikan dengan realisasi sebesar 6% dari target sebesar 6%. Alokasi anggaran Program Pengembangan Nilai Budaya sebesar Rp9.099.526.378,00 dengan realisasi sebesar Rp6.150.055.672,00 setara dengan 67.59%.

- (1) Kegiatan Keikutsertaan pada Festival Keraton Nusantara XIII yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.993.620,00 dan realisasi Rp118.277.470,00 atau setara dengan 47,31%. *Output* kegiatan adalah kirab prajurit keraton, pameran benda pusaka keraton, pertunjukan seni keraton, pagelaran upacara adat, tradisi keraton, musyawarah raja-raja nusantara, seminar budaya dan pameran kerajinan serta kesenian rakyat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pelestarian seni dan budaya daerah;
- (2) Kegiatan Mieling Poe Basa Indung Internasional (Memperingati hari Bahasa Ibu Internasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.587.175,00 dan realisasi Rp195.019.675,00 atau setara dengan 97,71%. *Output* kegiatan dalam rangka mempertahankan eksistensi bahasa daerah setiap dunia agar tidak hilang dan punah serta upaya pelestarian bahasa Daerah sebagai bahasa ibu di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat Jawa Barat terhadap bahasa, sastra, dan aksara daerah;

- (3) Kegiatan Pengusulan Penetapan WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.994.130,00 dan realisasi Rp174.361.473,00 atau setara dengan 87,18%. *Output* kegiatan adalah Pada tanggal 13-16 Agustus 2019 telah dilaksanakan sidang penetapan Warisan Budaya tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud RI yang telah menetapkan 13 karya budaya Jawa Barat sebagai WBTB Indonesia yaitu : 1) Badawang 2) Bajidoran 3) Blenderan 4) Benjang 5) Cingcowong 6) Domyak 7) Kawin Cai 8) Panjang Jimat Kasepuhan Cirebon 9)Reak Dog-dog 10)Seren Taun Cigugur 11)Seren Taun Banten Kidul (Kab. Sukabumi) 11)Tari Trebang Randu Kintir dan 13) Topeng Banjet. *Outcome* kegiatan adalah terlindunginya dan diakuinya warisan budaya tak benda Jawa Barat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia;
- (4) Kegiatan Temu Konsultansi Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.971.299,00 dan realisasi Rp188.370.174,00 atau setara dengan 94,20%. *Output* kegiatan adalah Rakortek Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah di Jawa Barat sebagai bagian dari Obyek Pemajuan Kebudayaan;
- (5) Kegiatan Provinsi Layak Anak (PROVILA), yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.998.244,00 dan realisasi Rp92.179.244,00 atau setara dengan 92,18%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya 1 (satu) kali sosialisasi jenis permainan rakyat bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap peranan nilai budaya dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak di Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Tingkat Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.991.440,00 dan realisasi Rp34.725.435,00 atau setara dengan 11,58%. *Output* kegiatan adalah pengusulan cagar budaya untuk ditetapkan Tingkat Provinsi Jawa

- Barat. *Outcome* kegiatan adalah terlindunginya Cagar Budaya yang ada di Jawa Barat melalui pencatatan dan rekomendasi pengusulan Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Pengusulan HAKI Seni Tradisi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.990.470,00 dan realisasi Rp163.686.238,00 atau setara dengan 81,85%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi pengusulan HAKI Seni Tradisi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya Penetapan HKI Seni Tradisi Jawa Barat;
 - (8) Kegiatan Peringatan Bandung Lautan Api, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100% *Output* kegiatan adalah Seminar Kesejarahan Peristiwa Bandung Lautan Api dan terwujudnya museum sebagai pusat dokumentasai dan informasi sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah Jawa Barat;
 - (9) Kegiatan Peringatan Hari Lahir Dewi Sartika, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah seminar kesejarahan Dewi Sartika dan terwujudnya museum sebagai pusat dokumentasai dan informasi sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi sejarawan dan masyarakat terhadap sejarah hari lahir Dewi Sartika;
 - (10) Kegiatan Apresiasi Juru Pelihara Situs Cagar Budaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp132.025.000,00 atau setara dengan 88,02%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan apresiasi juru pelihara situs cagar budaya di seluruh Kabupaten/Kota Se Jawa Barat sebanyak 50 Orang *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi pemerintah terhadap Juru Pelihara Situs Cagar Budaya Jawa Barat;
 - (11) Kegiatan Museum Sri Baduga Expo, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp171.999.500,00 atau setara dengan 86,00%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya Kegiatan Pameran Nasional Kain Tradisional dan terinformasikan kekayaan dan keragaman Kain tradisional nusantara kepada masyarakat di berbagai daerah/provinsi di Indonesia. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Permuseuman Jawa Barat;
- (12) Kegiatan Promosi Museum, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp145.200.000,00 atau setara dengan 96,80%. *Output* kegiatan adalah pendukung media promosi Museum Sri Baduga berupa cetak poster, baligho dan *backdrop* *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pendukung media promosi museum;
- (13) Kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp1.442.455.963,00 atau setara dengan 48,08% *Output* kegiatan adalah terselenggaranya sertifikasi tenaga ahli cagar budaya Jawa Barat yang telah meluluskan 54 orang dari 18 Kabupaten/Kota, 1 kali sarasehan permuseuman Jawa Barat yang bekerjasama dengan AMIDA Jawa Barat, 1 kali sarasehan nilai budaya yang melibatkan tokoh adat dari 26 masyarakat adat di Jawa Barat, 1 kali dialog budaya mengenai pakaian adat Jawa Barat, 1 kali dialog budaya mengenai tradisi lisan dan manuskrip, tercetaknya 300 eksemplar buku situs Gunung Padang dan tercetaknya 300 eksemplar buku Masjid Kuno. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan Cagar Budaya di Jawa Barat dan meningkatnya pengelolaan obyek pemajuan kebudayaan di Jawa Barat;
- (14) Kegiatan Konservasi dan Restorasi Koleksi Museum (DAK), yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp850.000.000,00 dan realisasi Rp574.900.000,00 atau setara dengan 67,64%. *Output* kegiatan adalah konservasi dan restorasi koleksi museum. *Outcome* kegiatan adalah terinformasikannya naskah tinggalan budaya Jawa Barat untuk penelitian dan pengembangan budaya daerah;

- (15) Kegiatan Pameran Keliling Museum Sri Baduga, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp399.062.500,00 atau setara dengan 99,77%. *Output* kegiatan adalah pameran keliling bertajuk “Sri Baduga Saba Pangandaran dilanjutkan dengan lomba tulis tentang museum untuk anak SMA dengan tujuan agar para siswa memiliki pengetahuan lebih tentang museum. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum Negeri Sri Baduga;
- (16) Kegiatan Pemeliharaan Tata Pamer dan Storage Museum Sri Baduga, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp412.000.000,00 atau setara dengan 82,40%. *Output* kegiatan adalah pengelolaan *display* pameran dan ruang penyimpanan koleksi di Museum Sri Baduga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum Negeri Sri Baduga;
- (17) Kegiatan Kajian Koleksi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp507.500.000,00 dan realisasi Rp375.900.000,00 atau setara dengan 74,07%. *Output* kegiatan adalah kajian peninggalan perjuangan rakyat Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah apresiasi kesejarahan Jawa Barat;
- (18) Kegiatan Pameran Temporer Peranan Santri dalam Perjuangan Kemerdekaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.500.000,00 dan realisasi Rp400.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pameran kesejarahan peranan Santri dalam perjuangan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi kesejarahan Jawa Barat;
- (19) Kegiatan Pameran Museum Keliling yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp252.000.000,00 dan realisasi Rp0 atau setara dengan 0%. *Output* keikutsertaan pada pameran museum-museum di Jawa Barat; *Outcome* meningkatnya apresiasi permuseuman Jawa Barat;

- (20) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.000.000,00 dan realisasi Rp290.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* pengelolaan *display* pameran dan ruang penyimpanan koleksi di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. *Outcome* meningkatnya apresiasi kesejarahan Jawa Barat;
- (21) Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Dan Permuseuman Bagi Pelajar SeJawa Barat (DAK), yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp243.600.000,00 atau setara dengan 97,44%. *Output* kegiatan adalah penyelenggaraan cerdas cermat tentang permuseuman dengan peserta para pelajar (SMP dan SMA) se Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi pelajar terhadap Museum Negeri Sri Baduga;
- (22) Kegiatan Festival Batik, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp395.793.000,00 atau setara dengan 79,16%. *Output* kegiatan adalah event festival batik Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional dan sebagai upaya untuk mengenalkan batik kepada masyarakat, sekitar 36 batik khas Jawa Barat yang ditampilkan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum Negeri Sri Baduga.

b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya yakni persentase seni budaya yang dilestarikan dengan capaian sebesar 58,21% dari target 16,42%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya adalah sebesar Rp11.318.396.034,00 dengan realisasi sebesar Rp9.145.838.369,00 atau setara dengan 80,81%.

- (1) Audisi Gita Bahana Nusantara, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.952.425,00 dan realisasi Rp199.206.900,00 atau setara dengan 99,63%. *Output* kegiatan adalah audisi/seleksi paduan suara yang diikuti oleh

- kalangan remaja pemilik jenis suara pria-wanita (Sopran, Alto, Tenor dan Bass) untuk peserta Paduan Suara Tingkat Nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan apresiasi dan minat generasi muda terhadap seni suara;
- (2) Pergelaran Seni di Ruang Publik, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp541.445.446,00 dan realisasi Rp493.550.556,00 atau setara dengan 91,15%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pertunjukan seni dan budaya daerah Jawa Barat di ruang publik. *Outcome* meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah Jawa Barat;
 - (3) Angklung Day, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.998.195,00 dan realisasi Rp86.523.195,00 atau setara dengan 86,52%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya 1 (satu) kali pentas angklung dari 133 grup angklung meliputi pelajar Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) serta komunitas dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa negara tetangga sebagai bagian dari peringatan diakuinya angklung sebagai warisan dunia oleh UNESCO. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi seniman dan masyarakat terhadap seni angklung;
 - (4) Pergelaran Aneka Ragam Seni Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp300.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan Pergelaran Aneka Ragam Seni meliputi Studi Titik Dua dari Kab. Ciamis, Studio Cantika dari Kab. Bandung, Sanggar Kawistara dari Kab. Bandung, dan Ganitri dari Kota Bandung pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah;
 - (5) Pergelaran Wayang di Gedung PPK, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah menghidupkan aktifitas seni tradisi di gedung PPK, sekaligus mendekatkan kembali seni Wayang Golek dari Padepokan Giri

- Komara dari Kab. Karawang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni wayang;
- (6) Pergelaran Seni Pertunjukan Lakon di Rumentang Siang, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp250.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan Pergelaran Seni Teater Lakon di Rumentang Siang meliputi Teater Dongkrak dari Kota Tasikmalaya, Masres dari Kab. Indramayu, Topeng Banjet Bah Pendul dari Kab. Karawang, pada PTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan apresiasi seniman dan masyarakat terhadap seni teater;
 - (7) Pasanggiri Rampak Sekar dan Anggana Sekar, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan Revitalisasi Seni Budaya di UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat melalui seni Ronggeng Gunung dari Kabupaten Pangandaran, dalam bentuk sosialisasi melalui gladi pementasan dan diskusi seni di daerah setempat, deskripsi seni, serta pertunjukan hasil gladi pementasan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan apresiasi seniman dan masyarakat terhadap seni tradisi;
 - (8) Festival Drama Bahasa Sunda, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Festival Drama Bahasa Sunda di Gedung Rumentang Siang UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah;
 - (9) Festival Budaya Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.999.999.968,00 dan realisasi Rp4.889.557.718,00 atau setara dengan 69,85%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya 1 kali Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat yang merupakan Provinsi pertama penyelenggara PKD turunan dari Pekan Kebudayaan Nasional, 3 kali

penanaman nilai budaya yaitu “someah, rengkuh dan nuhun” melalui 3 kali penyelenggaraan event budaya di 3 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yaitu Kab. Bogor, Kab. Ciamis dan Kab. Indramayu, 3 kali FGD yaitu rakor persiapan penyelenggaraan PKD Jawa Barat 2020, pembahasan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Barat dan peningkatan pengelolaan Cagar Budaya di Jawa Barat, terfasilitasinya dukungan gelar seni budaya pada peringatan hari besar di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terselenggaranya keikutsertaan Jawa Barat dalam Pawai Budaya Pekan Kebudayaan Nasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap internalisasi nilai budaya Jawa Barat;

- (10) Pameran Seni Rupa di Galeri Rumah Teh, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp350.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah penggalan, penggarapan, dan penyajian hasil rekonstruksi seni budaya di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan seni tradisi di Jawa Barat;
- (11) Pergelaran karya Seni Unggulan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi Rp700.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Pergelaran karya Seni Unggulan dari Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan seni tradisi di Jawa Barat;
- (12) Pergelaran Opera Legenda Jawa Barat (DAK) yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp350.000.000,00 atau setara dengan 100% *Output* kegiatan adalah pertunjukan opera untuk mengangkat legenda masyarakat Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan seni tradisi di Jawa Barat;
- (13) Pergelaran Karya Seni Kreasi Baru (DAK), yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp277.000.000,00 dan realisasi Rp277.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pertunjukan seni kreasi baru

pada Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi terhadap inovasi karya seni;

- (14) Pergelaran Seni Tradisional di Pondok Seni Pangandaran, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp950.000.000,00 dan realisasi Rp950.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Pergelaran Seni Tradisional di Pondok Seni merupakan kegiatan mengaktivasi kembali Amphiteater Pondok Seni yang selama ini Vakum dan pengisinya meliputi skala kabupaten/kota yaitu Kab. Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya dan Banjar untuk menampilkan karya-karya unggulan tiap tiap daerah, Ronggeng Amen dan Wayang Golek/Kulit Dalam kegiatan yang dimaksud, setiap kab/kota memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan salah satu materi yang akan ditampilkan dalam peristiwa yang cukup representatif. Materi yang ditampilkan mewakili prestasi yang telah dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya apresiasi seni tradisi Jawa Barat.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Kebudayaan

a. Permasalahan

1. Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal Jawa Barat dan apresiasi terhadap budaya lokal Jawa Barat;
2. Kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri;
3. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya Jawa Barat.

b. Solusi

1. Pembangunan pusat budaya di setiap kabupaten/kota;
2. Pembuatan kalendar karnaval budaya Jawa Barat;
3. Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya lokal.

23. Urusan Perpustakaan

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan perpustakaan tahun 2019 adalah Rata-Rata Lama Sekolah dengan realisasi 8,37 tahun dari target 8,28 tahun; Indeks Membaca Masyarakat dengan realisasi sebesar 68,33 poin dari target sebesar 68,50 poin; persentase naskah kuno berkonten ilmu pengetahuan yang dilestarikan dengan realisasi sebesar 2% dari target yang ditetapkan sebesar 2% dan Persentase karya cetak, karya rekam dan hasil khazanah budaya Jawa Barat yang disimpan sesuai dengan peraturan dengan realisasi sebesar 2,87% dari target yang ditetapkan sebesar 1,17%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yakni laju koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dengan capaian sebesar 2,2% dari target sebesar 3%; rasio perpustakaan persatuan penduduk dengan capaian sebesar 0,3178 poin dari target 0,3575 poin; persentase pustakawan, tenaga teknis dan penilai lingkup provinsi yang memiliki sertifikat dengan capaian sebesar 52,55% dari target sebesar 52,05%; jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dengan capaian sebesar 676.609 orang dari target sebesar 600.154 orang; persentase koleksi buku yang dibaca dengan capaian sebesar 1,01% dari target sebesar 1,65% dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perpustakaan dengan realisasi sebesar 82,75 poin dari target 79,84 poin. Alokasi anggaran Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp11.182.041.921,00 dengan realisasi sebesar Rp10.926.926.317,00 setara dengan 97,72%.

- (1) Kegiatan Pengembangan Bahan Perpustakaan Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp6.651.163.296,00 dan realisasi sebesar Rp6.511.978.042,00 atau setara dengan 97,91%. *Output* kegiatan adalah Katalog Induk Daerah Jawa Barat, Bibliografi Daerah Jawa Barat, Indeks Artikel, *Accession*

- List sebanyak 4 Naskah, Majalah atau Surat Kabar Retrospektif sebanyak 75 bundel, BinteK Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Teknik Informatika dan Kependudukan 40 orang, bahan perpustakaan untuk Kotak Literasi Cerdas (KOLECER) sebanyak 107 Judul dan 16.050 eksemplar, bahan percontohan/praktek model *micro library* desa, kecamatan dan Pontren sebanyak 15 desa, 5 kecamatan dan 15 pontren, 24 Motor Baca. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan bahan perpustakaan untuk masyarakat;
- (2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.147.830.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.143.462.800,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah Layanan Lesehan Perpustakaan sebanyak 98 kali, Pameran Perpustakaan sebanyak 4 kali, Layanan Terpadu Perpustakaan sebanyak 45 titik *Workshop* Perpustakaan sebanyak 48 kali. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan Pembinaan Budaya Baca dan Memberdayakan Perpustakaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp956.009.781,00 dan realisasi sebesar Rp946.433.050,00 atau setara dengan 99,00%. *Output* kegiatan adalah *Workshop* pembudayaan membaca sebanyak 1 kali, Peer Learning meeting sebanyak 250 orang, Aktualisasi Literasi sebanyak 250 orang dan Pemilihan Duta Perpustakaan 2019 sebanyak 54 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kebiasaan membaca;
- (4) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perpustakaan dan Sumberdaya Manusia Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp2.427.038.844,00 dan realisasi sebesar Rp2.325.052.425,00 atau setara dengan 95,80%. *Output* kegiatan adalah BinteK pengelolaan perpustakaan sebanyak 99 orang, Peningkatan kapasitas organisasi perpustakaan sebanyak 1 organisasi, Pemetaan perpustakaan sekolah tingkat SMA sederajat sebanyak 27

Kabupaten Kota dan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Perpustakaan sebanyak 40 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi SDM dan Lembaga perpustakaan.

b. Program Pelestarian Naskah Kuno

Capaian Indikator Kinerja Program Pelestarian Naskah Kuno yakni persentase naskah kuno berkonten ilmu pengetahuan yang dilestarikan dengan capaian sebesar 2% dari target 2%; persentase karya cetak, karya rekam dan hasil khazanah budaya Jawa Barat yang disimpan sesuai dengan peraturan sebesar 2,87% dari target 1,17%. Alokasi anggaran Program Pelestarian Naskah Kuno adalah sebesar Rp453.386.800,00 dengan realisasi sebesar Rp434.709.740,00 setara dengan 95,88%.

- (1) Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khazanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp453.386.800,00 dan realisasi sebesar Rp434.709.740,00 atau setara dengan 95,88%. *Output* kegiatan adalah tersedianya karya cetak dan karya rekam (literatur) sebanyak 115 judul 460 eksemplar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya literatur tentang Jawa Barat.

c. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yakni Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100%, Persentase ketersediaan data Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah sebesar Rp528.739.150,00 dengan realisasi Rp456.130.012,00 setara dengan 86,27%.

- (1) Kegiatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp74.052.000,00 dan realisasi sebesar

Rp60.027.600,00 atau setara dengan 81,06%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen pelaporan internal sebanyak 10 dokumen, wawasan capaian kinerja sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas evaluasi dan capaian kinerja;

- (2) Kegiatan Perencanaan Internal Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp59.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.577.550,00 atau setara dengan 72,69%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen pelaporan sebanyak 4 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kualitas pelaporan internal Dispusipda;
- (3) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.268.327,00 atau setara dengan 97,27%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen laporan keuangan sebanyak 7 dokumen dan orientasi pengelola keuangan sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja keuangan dan aset Dispusipda Jabar;
- (4) Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp294.737.150,00 dan realisasi sebesar Rp256.756.535,00 atau setara dengan 87,11%. *Output* kegiatan adalah forum Perangkat Daerah sebanyak 1 kali. Monev Perencanaan sebanyak 1 kegiatan, wawasan perencanaan sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya koordinasi sinkronisasi perencanaan kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yakni Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp7.771.425.383,00 dengan realisasi sebesar Rp7.479.918.861,00 setara dengan 96,25%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan

- Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp885.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp869.187.251,00 atau setara dengan 98,21%. *Output* kegiatan adalah tabung pemadam kebakaran sebanyak 1 paket, langganan telepon sebanyak 1 tahun, langganan listrik sebanyak 1 tahun, alat alat listrik dan elektronik sebanyak 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Dispusipda;
- (2) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dispusipda Jabar yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp2.814.024.690,00 dan realisasi sebesar Rp2.788.557.140,00 atau setara dengan 99,09%. *Output* kegiatan adalah pengadaan buku sebanyak 17.131 eksemplar, papan nama ruangan 1 unit, komputer pc 10 unit, alat ukur intensitas cahaya 5 unit, container/can arsip film sebanyak 100 kegiatan, *printer* warna sebanyak 10 unit, *roll'o* pack sebanyak 1 unit, filling kabinet sebanyak 5 unit, komputer *notebook* sebanyak 5 unit, *AC cassette* 2 unit. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tupoksi Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
 - (3) Kegiatan Pengadaan Mebel Dispusipda Jabar yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.781.670.693,00 dan realisasi sebesar Rp1.767.178.600,00 atau setara dengan 99,19%. *Output* kegiatan adalah *locker* pengunjung PBI sebanyak 40 paket, *street library/KOLECER* 150 Unit, kursi kerja 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tupoksi di Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
 - (4) Kegiatan Pengadaan Bangunan Bukan Gedung yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp192.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp192.263.420,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah tempat parkir kendaraan sebanyak 1 paket, ruang laboratorium autentisitas arsip statis sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tupoksi di Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
 - (5) Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan

alokasi sebesar Rp2.098.430.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.862.732.450,00 atau setara dengan 88,77%. *Output* kegiatan adalah DED gedung Deposit perpustakaan 1 Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tupoksi di Dispusipda Provinsi Jawa Barat.

e. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yakni persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100%, persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp11.834.545.402,00 dengan realisasi sebesar Rp11.576.311.116,00 setara dengan 97,82%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp925.388.570,00 dan realisasi sebesar Rp912.093.150,00 atau setara dengan 98,60%. *Output* kegiatan adalah alat tulis kantor, plakat, boks arsip, cetak kalender dan agenda, kartu anggota gedung perpustakaan deposit tahap 1 sebanyak 1 kegiatan, DED gedung deposit perpustakaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tupoksi di Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.902.199.680,00 dan realisasi sebesar Rp1.794.849.170,00 atau setara dengan 94,36%. *Output* kegiatan adalah langganan air galon, surat kabar/majalah, internet selama 1 tahun dan tenaga teknis sebanyak 25 orang. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya pelaksanaan tupoksi di Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp2.045.100.000,00 dan realisasi

- sebesar Rp2.022.708.709,00 atau setara dengan 98,91%. *Output* kegiatan adalah Makanan penambah daya tahan tubuh selama 1 tahun, makanan dan minuman rapat selama 1 tahu, perjalanan Dinas dalam Daerah PNS Provinsi selama 1 tahun, Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Provinsi Selama 1 tahun, perjalanan Dinas dalam Daerah non-PNS selama 1 tahun, Perjalanan Dinas Luar Provinsi non-PNS Selama 1. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya pelaksanaan tupoksi Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dispusipda Jabar yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp345.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp304.164,500,00 atau setara dengan 87,99%. *Output* kegiatan adalah Jasa Penceramah, Instruktur senam, Jasa Even organizer, sewa sarana olahraga selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan aparatur Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp122.250.000,00 atau setara dengan 81,50%. *Output* kegiatan adalah Kursus singkat, diklat dan bimtek selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan aparatur Dispusipda Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta peralatannya yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp3.238.117.066,00 dan realisasi sebesar Rp3.237.433.180,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah Jasa keamanan dan kebersihan selama 1 tahun beserta peralatan kebersihannya. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang tupoksi Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp711.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp685.793.963,00 atau setara dengan 96,45%. *Output* kegiatan adalah kendaraan roda 4,

- kendaraan roda 2 KIR, BBM, dan STNK selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
- (8) Kegiatan pemeliharaan Perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp2.367.483.260,00 dan realisasi sebesar Rp2.348.378.944,00 atau setara dengan 99,20%. *Output* kegiatan adalah gedung dan bangunan, instalasi jaringan, halaman/parkir selama 1 tahun *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan fasilitas dan gedung kantor;
- (9) Kegiatan penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor Dinas Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.639.500,00 atau setara dengan 99,09%. *Output* kegiatan adalah dokumentasi dan publikasi kegiatan Dispusipda selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi Dispusipda Provinsi Jawa Barat.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Perpustakaan

a. Permasalahan

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan perpustakaan di Jawa Barat;
2. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam pengembangan perpustakaan di Jawa Barat;
3. Belum optimalnya tenaga perpustakaan dalam peningkatan kualitas perpustakaan Jawa Barat;
4. Masih minimnya minat masyarakat terhadap perpustakaan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan provinsi.

b. Solusi

1. Menjadikan perpustakaan provinsi sebagai destinasi wisata literasi Jawa Barat;
2. Memperkuat peran kelembagaan perpustakaan untuk peningkatan kualitas perpustakaan Jawa Barat;
3. Meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
4. Mendorong gerakan literasi membaca masyarakat.

24. Urusan Kearsipan

Capaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan kearsipan tahun 2019 persentase perangkat daerah yang memenuhi standar baku kearsipan sebesar 2,9% dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 52% dan Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebesar 31% dari target yang ditetapkan sebesar 31%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan yakni persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dengan capaian sebesar 2,9% dengan target 52%; persentase penyusutan arsip dengan capaian sebesar 29,63% dari target 32% dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kearsipan dengan capaian sebesar 0 poin dari target 50 poin. Alokasi anggaran Program Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan adalah sebesar Rp2.898.969.800,00 dengan realisasi sebesar Rp2.860.517.169,00 setara dengan 98,67%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp671.447.800,00 dan realisasi sebesar Rp667.000.420,00 atau setara dengan 99,34%. *Output* kegiatan adalah gelar informasi kearsipan sebanyak 40 kali, pameran kearsipan sebanyak 6 kabupaten/kota, Monev simpul SIKN/JIKN sebanyak 8 kabupaten/kota, Sosialisasi SIKN/JIKN sebanyak 8 kali, Bimtek SIKN/JIKN sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sistem layanan kearsipan berbasis JIKN;
- (2) Kegiatan peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.132.827.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.110.053.810,00 atau setara dengan 97,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah pencipta arsip yang telah memenuhi standar baku kearsipan sebanyak 12 perangkat daerah, jumlah arsip yang dialihmediakan sebanyak 20.000 lembar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perangkat daerah sebagai pencipta arsip yang memenuhi standar baku kearsipan;

- (3) Kegiatan Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.094.695.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.083.462.939,00 atau setara dengan 98,97%. *Output* kegiatan adalah pembinaan kearsipan ke perangkat daerah sebanyak 40 perangkat daerah, sosialisasi arsip masuk desa sebanyak 4 kali dan pengawasan kearsipan internal sebanyak 40 perangkat daerah, Bintek kearsipan ke UPTD sebanyak 75 UPTD. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Capaian Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yakni Tingkat Penyelamatan Arsip Statis dengan capaian sebesar 16,90 poin dari target 16,90 poin; Tingkat Pelestarian Arsip Statis dengan capaian sebesar 17,10 poin dari target sebesar 17,10 poin. Alokasi anggaran Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip adalah sebesar Rp1.362.392.756,00 dengan realisasi sebesar Rp1.351.177.392,00 setara dengan 99,18%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Arsip Statis di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp996.885.881,00 dan realisasi sebesar Rp989.128.267,00 atau setara dengan 99,22%. *Output* kegiatan adalah khasanah arsip statis sebanyak 31 khasanah, restorasi arsip statis sebanyak 150 lembar, reprografi arsip statis sebanyak 500 unit, alih media arsip sebanyak 1500 lembar;
- (2) Kegiatan Penelusuran Arsip Statis di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp365.506.875,00 dan realisasi sebesar Rp362.049.125,00 atau setara dengan 99,05%. *Output* kegiatan adalah jumlah khasanah arsip statis 15 khasanah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan arsip statis kesejarahan Jawa Barat.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Kearsipan

a. Permasalahan

1. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di perangkat daerah;
2. Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif.

b. Solusi

1. Peningkatan pengelolaan kearsipan berbasis IT;
2. Peningkatan pemahaman sadar arsip di perangkat daerah.

3.3.2 Urusan Pilihan

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2019 adalah produksi perikanan dengan realisasi sebesar 1.527.547,84 ton dari target sebesar 1.444.000 ton; jumlah plasma nutfah yang dilestarikan dengan realisasi sebesar 5 jenis dari target sebesar 5 jenis; Kawasan konservasi perairan yang dikelola dengan realisasi sebesar 14,03% dari target sebesar 13,54% dan Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan dengan realisasi sebesar 51,17% dari target sebesar 50%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Produksi Perikanan dan Daya Saing Produk Perikanan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Produksi Perikanan dan Daya Saing Produk Perikanan pada tahun 2019 yaitu peningkatan produksi perikanan dengan capaian sebesar 1.527.547,84 ton dari target sebesar 1.444.000 ton dan capaian konsumsi ikan sebesar 30,53 kg/kap/tahun dari target sebesar 29,63kg/kap/tahun. Alokasi anggaran Rp40.504.999.472,00 dan realisasi Rp33.204.026.786,00 atau setara dengan 81,98%.

- (1) Kegiatan *Monitoring* dan Pembinaan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan Wilayah Pesisir Pantura Jawa Barat di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp201.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp197.794.161,00 atau setara dengan 98,01%. *Output* kegiatan adalah Laporan Hasil *Monitoring* dan Pembinaan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan Wilayah Pesisir Pantura Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Menurunnya serangan hama dan penyakit ikan;
- (2) Kegiatan Pelayanan Dasar di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp501.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp497.282.350,00 atau setara dengan 99,13%. *Output* kegiatan adalah pakan. *Outcome* kegiatan adalah produksi calon induk dan benih nila salin;
- (3) Kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PPI Rancabuaya Kabupaten Garut yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

- dengan alokasi sebesar Rp649.999.583,00 dan realisasi sebesar Rp29.967.613,00 atau setara dengan 4,61%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Amdal PPI Rancabuaya Kab. Garut. *Outcome* kegiatan adalah terkelolanya dampak lingkungan pembangunan PPI Rancabuaya;
- (4) Kegiatan Pengembangan Pusat Informasi Pelabuhan dan Pengelolaan Aset Pelabuhan di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp169.995.961,00 dan realisasi sebesar Rp96.729.047,00 atau setara dengan 56,90%. *Output* kegiatan adalah Pusat Informasi Pelabuhan dan Pengelolaan Aset Pelabuhan di Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya informasi yang akurat sebagai bahan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan yang efisien dan tercapainya fungsi pelabuhan yang optimal di Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Monev Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp188.284.531,00 dan realisasi sebesar Rp75.143.695,00 atau setara dengan 39,91%. *Output* kegiatan adalah Laporan Monev Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pengelolaan pelabuhan yang optimal dan efisien;
- (6) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Andon Penangkapan Ikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.995.559,00 dan realisasi sebesar Rp174.060.096,00 atau setara dengan 87,03%. *Output* kegiatan adalah dukungan kepada para nelayan untuk dapat melakukan penangkapan ikan di luar wilayah perairan Jawa Barat melalui MoU antar provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Andon Penangkapan Ikan;
- (7) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pembenihan/Pembesaran Calon Induk Ikan Nila Salin di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp100.527.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.069.000,00 atau setara dengan 97,55%. *Output* kegiatan adalah calon induk. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya teknologi

- pembenihan dan pembesaran calon induk nila salin;
- (8) Kegiatan Dempond Udang Vaname di Subang yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp201.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp197.358.200,00 atau setara dengan 98,14%. *Output* kegiatan adalah 1 Lokasi Dempon. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi udang;
 - (9) Kegiatan Produksi Bandeng Progresif di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.494.700,00 atau setara dengan 97,49%. *Output* kegiatan adalah produksi bandeng. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi bandeng di Jawa Barat;
 - (10) Kegiatan Produksi Udang Vaname dengan Teknologi Probiotik UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp196.361.500,00 atau setara dengan 98,23%. *Output* kegiatan adalah produksi udang vaname. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi udang di Jawa Barat;
 - (11) Kegiatan Produksi Udang Vaname dengan Teknologi Plastik Mulsa UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp249.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp245.848.050,00 atau setara dengan 98,38%. *Output* kegiatan adalah produksi udang vaname. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi udang di Jawa Barat;
 - (12) Kegiatan Uji Coba Pemebesaran Udang Vaname dengan Teknologi LDFE di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp353.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp346.277.500,00 atau setara dengan 97,85%. *Output* kegiatan adalah benih. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya teknologi pembesaran udang;
 - (13) Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Nelayan di wilayah Pantai Utara Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp460.000.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp459.120.000,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah Peserta Sertifikasi Kompetensi Nelayan Di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Manusia Perikanan Tangkap;
- (14) Kegiatan Wirausaha Baru Perikanan Tangkap di wilayah Utara Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.598.750,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* kegiatan adalah Peserta Pelatihan Wirausaha Baru Perikanan Tangkap di Wilayah Utara Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Manusia Perikanan Tangkap;
- (15) Kegiatan Reakreditasi KAN dan Inhouse Training Pengujian Mutu Produk Perikanan di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp536.599.770,00 dan realisasi sebesar Rp529.193.150,00 atau setara dengan 98,62%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Reakreditasi KAN 17025. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur dan terpeliharanya status akreditasi laboratorium di UPTD PPMHP Cirebon;
- (16) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk UMKM di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.394,00 dan realisasi sebesar Rp195.910.000,00 atau setara dengan 97,96%. *Output* kegiatan adalah Peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Produk UMKM di UPTD PPMPP Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah Tersedianya UMKM yang handal serta meningkatnya pemahaman para pengolah ikan terhadap *standar* kelayakan dasar;
- (17) Kegiatan Penerapan LSPro-HP di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp563.398.930,00 dan realisasi sebesar Rp554.549.527,00 atau setara dengan 98,43%. *Output* kegiatan adalah Pengadaan bahan pengolahan. *Outcome* kegiatan adalah Tersosialisasikan penerapan LSPro-HP kepada 30 orang;
- (18) Kegiatan Peningkatan Produksi Benih Udang Windu dan Udang Vanamei di UPTD Perikanan Air

- Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp270.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp267.776.000,00 atau setara dengan 99,18%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya Produksi udang windu dan udang vannamei. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya produksi udang windu dan udang vannamei;
- (19) Kegiatan Uji Coba Pengembangan Teknologi Demfarm Komoditas Udang Vanamei di Cibalong UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp346.203.950,00 atau setara dengan 98,92%. *Output* kegiatan adalah Demfarm Udang Vannamei. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya produksi udang vannamei;
- (20) Kegiatan Dempond Budidaya Udang Vanamei/Windu di 2 Kabupaten/Kota di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp197.365.000,00 atau setara dengan 98,68%. *Output* kegiatan adalah dempond budidaya udang vannamei/windu. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya produksi udang vannamei;
- (21) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp224.799.500,00 atau setara dengan 89,92%. *Output* kegiatan adalah Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya produksi ikan;
- (22) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Bandeng UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp172.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp171.471.225,00 atau setara dengan 99,52%. *Output* kegiatan adalah Paket Teknologi Pembenihan Ikan Bandeng. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya produksi benih kan bandeng;
- (23) Kegiatan Uji Coba Pembesaran Ikan Bandeng dengan Teknobiologi Intensif di UPTD Perikanan Air

- Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp92.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp91.565.000,00 atau setara dengan 99,53%. *Output* kegiatan adalah Produksi ikan Bandeng Konsumsi. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Produksi Bandeng di Jawa Barat;
- (24) Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Teknologi di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp310.545.460,00 dan realisasi sebesar Rp299.330.500,00 atau setara dengan 96,39%. *Output* kegiatan adalah Pembinaan dan Pelayanan Teknologi Di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi ikan air payau dan laut;
- (25) Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp793.061.425,00 atau setara dengan 99,13%. *Output* kegiatan adalah Stok Induk dan Calon Induk. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi ikan air payau dan laut;
- (26) Kegiatan Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Sarana Perikanan Budidaya di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.962,00 dan realisasi sebesar Rp65.564.476,00 atau setara dengan 65,56%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Sarana Perikanan Budidaya di Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Kualitas Sarana Perikanan Budidaya;
- (27) Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Usaha Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.960.350,00 dan realisasi sebesar Rp30.123.750,00 atau setara dengan 60,30%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Usaha Pembudidayaan Ikan. *Outcome* kegiatan adalah Teridentifikasinya keragaan dan terfasilitasinya pembenahan kelompok;
- (28) Kegiatan Pertemuan Lembaga Pengelolaan Perikanan di Perairan Daratan (LP3D) Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan

- Provinsi Jawa Barat sebesar Rp124.995.108,00 dan realisasi sebesar Rp111.511.000,00 atau setara dengan 89,21%. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya Informasi tentang pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat untuk Keberlanjutan Sumber Daya Ikan dan Usaha Perikanan Tangkap. *Outcome* kegiatan adalah Peserta Pertemuan Pengelolaan Perikanan di Perairan Daratan (P3D) Jawa Barat;
- (29) Kegiatan Pendampingan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (Bidang Perikanan Tangkap) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.973.708,00 dan realisasi sebesar Rp194.486.370,00 atau setara dengan 64,83%. *Output* kegiatan adalah Dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan PPI Rancabuaya. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Fasilitas PPI Rancabuaya;
- (30) Kegiatan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.499.995.688,00 dan realisasi sebesar Rp4.523.700.683,00 atau setara dengan 82,25%. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya hasil tangkapan ikan bagi 12 KUB penerima bantuan. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah bantuan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. (3.000 unit Bubu rajungan, 20 unit pancing rawai, 25 unit fish finder GPS dan 120 unit coolbox);
- (31) Kegiatan Konsultasi Kegiatan Pusat, *Event* Nasional Serta Instansi Lain yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp118.121.326,00 atau setara dengan 98,43%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Hasil Konsultasi Kegiatan Pusat, *Event* Nasional Serta Instansi Lain. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sinergitas perencanaan tangkap daerah dengan pusat;
- (32) Kegiatan Akselerasi Pelayanan Perizinan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.995.032,00 dan realisasi sebesar Rp435.979.750,00 atau setara dengan 62,28%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Pelayanan Perizinan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Kapal Perikanan terfasilitasi pelayanan perijinan,

- pendaftaran dan penandaan kapal perikanan di Jawa Barat;
- (33) Kegiatan Coaching Clinic Petugas Cek Fisik Kapal Perikanan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp119.992.855,00 dan realisasi sebesar Rp104.289.278,00 atau setara dengan 86,91%. *Output* kegiatan adalah Terdatanya ukuran kapal perikanan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Peserta *Coaching Clinic* Cek Fisik dan Penandaan Kapal Perikanan Jawa Barat;
- (34) Kegiatan Pelatihan Kualitas SDM Nelayan dan Kelembagaan Perikanan Tangkap Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.989.163,00 dan realisasi sebesar Rp376.488.446,00 atau setara dengan 94,12%. *Output* kegiatan adalah Terbinanya kelembagaan kenelayanan perikanan tangkap. *Outcome* kegiatan adalah Peserta Pelatihan Kualitas SDM Nelayan dan Kelembagaan Perikanan Tangkap Jawa Barat;
- (35) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Polahsar) Hasil Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.033.250,00 atau setara dengan 86,07%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kelembagaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Polahsar) Hasil Kelautan dan Perikanan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Kemampuan dan Kelas Kelompok Pembudidayaan Ikan;
- (36) Kegiatan Pengadaan Kapal Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.499.990.140,00 dan realisasi sebesar Rp1.405.769.730,00 atau setara dengan 93,72%. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya Kontribusi produksi dan kegiatan usaha penangkapan ikan. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Bantuan Kapal Perikanan;
- (37) Kegiatan Promosi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan pada *Event* Nasional dan Provinsi yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.719.163,00 dan realisasi sebesar Rp371.377.702,00 atau setara dengan 92,91%. *Output* kegiatan adalah Jumlah pelaksanaan Promosi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan pada *Event* Nasional dan Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya

- promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional;
- (38) Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.666,00 dan realisasi sebesar Rp96.446.598,00 atau setara dengan 96,45%. *Output* kegiatan adalah Dokumen *Monitoring* dan Evaluasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan (20 IPHP). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Mutu Produksi Hasil Perikanan;
- (39) Kegiatan Pemantauan Ketersediaan dan Kebutuhan Ikan serta Optimalisasi Cold Storage di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp119.999.907,00 dan realisasi sebesar Rp113.742.482,00 atau setara dengan 94,79%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Pemantauan Ketersediaan dan Kebutuhan Ikan serta Optimalisasi Cold Storage di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Produksi Olahan pada Unit;
- (40) Kegiatan Inventarisasi, Evaluasi dan Verifikasi Rencana Kebutuhan Sarana Logistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.920,00 dan realisasi sebesar Rp90.710.512,00 atau setara dengan 90,71%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Inventarisasi, Evaluasi dan Verifikasi Rencana Kebutuhan Sarana Logistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Kualitas Logistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (41) Kegiatan Sosialisasi Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.982,00 dan realisasi sebesar Rp76.429.500,00 atau setara dengan 76,43%. *Output* kegiatan adalah Peserta Sosialisasi Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Diversifikasi Produk Olahan hasil perikanan;
- (42) Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.999.968,00 dan realisasi sebesar

- Rp353.355.900,00 atau setara dengan 88,34%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Konsumsi Ikan;
- (43) Kegiatan Rapat Koordinasi FORIKAN yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp152.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp134.570.000,00 atau setara dengan 88,53%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Rapat Koordinasi FORIKAN. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Konsumsi Ikan;
- (44) Kegiatan Penerapan Diversifikasi Produk Olahan dalam rangka GEMARIKAN yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.279.000,00 dan realisasi sebesar Rp162.877.244,00. atau setara dengan 81,33%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penerapan Diversifikasi Produk Olahan dalam rangka GEMARIKAN. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Konsumsi Ikan;
- (45) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.720.250,00 atau setara dengan 96,96%. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang Mengajukan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan. *Outcome* kegiatan adalah Terbinanya Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pengajuan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- (46) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.999.900,00 dan realisasi sebesar Rp70.323.700,00 atau setara dengan 93,77%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mengajukan Izin Usaha. *Outcome* kegiatan adalah Terbinanya Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam Rangka Pengajuan Perizinan Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (47) Kegiatan Pengadaan Hardware dan *Software* Aplikasi Sistem Informasi dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan (SIPUPI) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp65.200.000,00 atau setara dengan 86,93%.

- Output* kegiatan adalah Jumlah Hardware dan *Software* Aplikasi Sistem Informasi dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan (SIPUPI). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Penyajian Data dan Informasi Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- (48) Kegiatan Operasional Kapal di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp76.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp75.999.400,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Trip Kapal Perikanan. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Trip Kapal Perikanan;
- (49) Kegiatan Operasional Bengkel di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp88.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp87.995.000,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah Peralatan Bengkel Kapal. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Aktivitas Nelayan;
- (50) Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.035.862.443,00 dan realisasi sebesar Rp3.022.671.103,00 atau setara dengan 99,57%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Dikelola. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Aktivitas Nelayan;
- (51) Kegiatan Pelatihan SDM Nelayan di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp711.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp709.935.000,00 atau setara dengan 99,84%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peserta Pelatihan ANKAPIN III (1 Angkatan) dan BSTF (1 Angkatan). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Kompetensi Nelayan;
- (52) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Pamayangsari Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.999.963.130,00 dan realisasi sebesar Rp1.478.260.760,00 atau setara dengan 73,91%. *Output* kegiatan adalah Kirmir dan Perluasan Kolam Labuh. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kondisi PPI Pamayangsari;
- (53) Kegiatan FGD Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Perikanan yang

- dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.999.782,00 dan realisasi sebesar Rp65.448.000,00 atau setara dengan 87,26%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Rumusan/Kesepakatan Strategi Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) pada Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (54) Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (Bidang Perikanan Tangkap) – DAK yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.609.549.784,00 dan realisasi sebesar Rp4.609.549.783,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Pembangunan *Breakwater* lanjutan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Pemanfaatan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
- (55) Kegiatan Pengadaan Peralatan Depurasi untuk Keekerangan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp246.317.746,00 atau setara dengan 98,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peralatan depurasi keekerangan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Budidaya (SJKMHPB);
- (56) Kegiatan Pengelolaan Data Statistik Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp119.999.995,00 dan realisasi sebesar Rp111.490.035,00 atau setara dengan 92,91%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Data Statistik Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Penyajian Data Statistik Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (57) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.935.603,00 atau setara dengan 61,87%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan dalam Pengajuan dan pemanfaatan dokumen Perizinan yang Dibina dan Dikendalikan. *Outcome* kegiatan adalah

- Terkendalnya Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Telah Memiliki Dokumen Perizinan;
- (58) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp44.244.853,00 atau setara dengan 88,49%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam Pengajuan dan Pemanfaatan Dokumen Perizinan yang Dibina dan Dikendalikan. *Outcome* kegiatan adalah Terkendalnya Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang telah memiliki dokumen perizinan;
- (59) Kegiatan Sosialisasi Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.187.000,00 atau setara dengan 92,37%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta Sosialisasi Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Perikanan Budidaya yang terdaftar dan memiliki Kartu KUSUKA;
- (60) Kegiatan Forum Pemandang Ikan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.330.000,00 atau setara dengan 96,66%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Jejaring Kerja (Networking) antar Pemandang dalam meningkatkan usaha pengolahan ikan pandang di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Produksi Olahan;
- (61) Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Sistem Rantai Dingin yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.998.927,00 dan realisasi sebesar Rp92.996.000,00 atau setara dengan 93,00%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pengolahan dan Sistem Rantai Dingin. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) pada Unit Pengolahan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- (62) Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Utara Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp664.997.578,00

- dan realisasi sebesar Rp653.969.031,00 atau setara dengan 98,34%. *Output* kegiatan adalah Pembelian Bahan Pengelolaan dan Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Utara Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Produktivitas Pelabuhan Perikanan di Wilayah Utara Jawa Barat;
- (63) Kegiatan Uji Coba Pembesaran Udang Vaname dengan Teknologi Resirkulasi di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp196.361.500,00 atau setara dengan 98,23%. *Output* kegiatan adalah Benih. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Teknologi Pembesaran Udang;
- (64) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Air Payau di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp574.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp568.530.000,00 atau setara dengan 98,88%. *Output* kegiatan adalah Pemasangan Plastik, Penataan Saluran, Pengecoran Jalan Produksi, Pembuatan Sumur Bor, Pengadaan Peralatan Laboratorium, Renovasi Gudang. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat;
- (65) Kegiatan Pengadaan Hardware dan *Software* Aplikasi Sistem Informasi Pengolah dan Pemasar (SIPOLAHSAR) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp69.097.900,00 atau setara dengan 92,13%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Hardware dan *Software* Aplikasi Sistem Informasi Pengolah dan Pemasar (SIPOLAHSAR). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Penyajian Data Informasi dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jawa Barat;
- (66) Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha dan Investor Sektor Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp168.309.000,00 atau setara dengan 84,15%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Rumusan/Kesepakatan antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Investor Sub Sektor Perikanan dalam rangka mengembangkan

investasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Investasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- (67) Kegiatan Budidaya Ikan Kerapu di KJA yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.699.998.468,00 dan realisasi sebesar Rp2.503.933.700,00 atau setara dengan 92,74%. *Output* kegiatan adalah Paket Percontohan Budidaya Ikan Kerapu di KJA. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Teknologi Budidaya Ikan Kerapu di KJA;
- (68) Kegiatan Budidaya Ikan Kakap di KJA yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.840.893.665,00 dan realisasi sebesar Rp1.680.060.736,00 atau setara dengan 34,71%. *Output* kegiatan adalah Paket Percontontohan Kegiatan Budidaya Ikan Kakap di KJA. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Teknologi Percontontohan Kegiatan Budidaya Ikan Kakap di KJA;
- (69) Kegiatan Pilot Project Entrepreneur Ikan Juara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp994.252.750,00 atau setara dengan 62,14%. *Output* kegiatan adalah Paket Percontohan Entrepreneur Ikan Juara. *Outcome* kegiatan adalah Paket Percontohan Entrepreneur Ikan Juara dan Digitalisasi Perikanan.

b. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yakni kawasan konservasi perairan yang dikelola dengan realisasi sebesar 14,03% dari target sebesar 13,54%, serta tingkat kepatuhan pelaku usah kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan dengan realisasi sebesar 51,17% dari target sebesar 50%. Alokasi anggaran Rp24.900.202.573,00 dan realisasi Rp23.813.197.519,00 atau setara dengan 95,63%.

- (1) Kegiatan Konservasi Ikan-Ikan Endemik di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp894.125.000,00 dan realisasi sebesar Rp889.578.575,00 atau setara dengan 99,49%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pakan untuk Ikan Endemic. *Outcome*

- kegiatan adalah Meningkatnya Bobot Ikan *Endemic*;
- (2) Kegiatan Konservasi Terumbu Karang Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp149.081.100,00 atau setara dengan 99,39%. *Output* kegiatan adalah Jumlah penanaman terumbu. *Outcome* kegiatan adalah Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
 - (3) Kegiatan Penebaran Benih Ikan Di Perairan Umum Olen Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp780.506.000,00 atau setara dengan 97,56%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Benih Ikan untuk *restocking*. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Stok Populasi Ikan di Perairan Umum dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pengendalian dan pemanfaatan yang berpedoman pada kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya hayati perairan;
 - (4) Kegiatan Pemuliaan Ikan Nila Nirwana dan Ikan Mas Marwana Di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.710.067.578,00 dan realisasi sebesar Rp1.650.260.575,00 atau setara dengan 96,50%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Hasil Pemuliaan Ikan F12 Nila Nirwana dan F2 Mas Marwana. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Produktivitas Ikan Nila dan Mas;
 - (5) Kegiatan Pemuliaan Ikan Patin dan Ikan Lele Di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.652.989.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.606.581.025,00 atau setara dengan 97,19%. *Output* kegiatan adalah Jumlah hasil pemuliaan Ikan patin tetraploid dan ikan lele *hybrid*. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Produktivitas Ikan Nila dan Mas;
 - (6) Kegiatan Sosialisasi Perda RZWP3K Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.994.588,00 dan realisasi sebesar Rp235.468.378,00 atau setara dengan 94,19%. *Output* kegiatan adalah

- Jumlah peserta Sosialisasi Perda RZWP3K ke-11 Kab Kota. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Pengetahuan Tentang Perda RZWP3K Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Pemantauan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan di Laut dan Perairan Umum Wilayah Utara Jabar, UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp678.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp675.399.200,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pemantauan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan di Laut dan Perairan Umum Wilayah Utara, UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara. *Outcome* kegiatan adalah Menurunnya Jumlah Kasus Pelanggaran IUU Fishing;
- (8) Kegiatan Pengawasan Konservasi dan Ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Utara, UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara Jabar, UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp297.268.800,00 atau setara dengan 99,09%. *Output* kegiatan adalah Jumlah pengawasan konservasi dan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil wilayah utara. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Pengawasan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Utara;
- (9) Kegiatan Pengawasan Mutu Produk Hasil Perikanan dengan Metode Uji Organoleptik di Sub Unit Losari UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara Jabar, UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp22.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.927.500,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pengawasan Mutu Produk Hasil Perikanan Dengan Metode Uji Organoleptik di Sub Unit Losari, UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara. *Outcome* kegiatan adalah Terawasinya Mutu Produk Hasil Perikanan dan Distribusi Pemasaran Hasil Perikanan Baik yang beralah dari dalam maupun luar provinsi Jawa Barat;
- (10) Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perairan Umum Wilayah Utara UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara Jabar, UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

- sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp496.950.990,00 atau setara dengan 99,39%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perairan Umum Wilayah Utara, UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan;
- (11) Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Garam yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp749.975.302,00 dan realisasi sebesar Rp730.052.483,00 atau setara dengan 97,34%. *Output* kegiatan adalah Geoisolator. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Produksi Garam Bagi Penerima Bantuan (7 kelompok);
- (12) Kegiatan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp244.203.474,00 dan realisasi sebesar Rp237.574.265,00 atau setara dengan 97,29%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K). *Outcome* kegiatan adalah Terkelolanya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- (13) Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan KUSUKA yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.995.492,00 dan realisasi sebesar Rp45.602.000,00 atau setara dengan 91,21%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peserta Sosialisasi Program KUSUKA. *Outcome* kegiatan adalah Bertambahnya Kepemilikan Kartu Petambak Garam;
- (14) Kegiatan Peningkatan Sarana Pusat Restorasi Pembelajaran Mangrove (PRPM) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.996.944,00 dan realisasi sebesar Rp142.842.450,00 atau setara dengan 95,23%. *Output* kegiatan adalah Pembangunan Menara Pengawas di Lokasi PRPM. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Pengawasan Aktifitas Konservasi Mangrove dan Vegetasi Pantai;
- (15) Kegiatan Penyusunan data series keanekaragaman hayati dan sumberdaya ikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp388.345.431,00 dan realisasi sebesar Rp379.119.500,00 atau setara dengan 97,62%. *Output* kegiatan adalah

- Jumlah Dokumen Data Series Keanekaragaman Hayati dan Sumberdaya Ikan sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Informasi Keanekaragaman Hayati dan SDI di Jawa Barat;
- (16) Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Pesisir yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.535.244.362,00 dan realisasi sebesar Rp2.113.739.512,00 atau setara dengan 83,37%. *Output* kegiatan adalah Terjaganya Kelestarian Plasma Nutfah dan Keanekaragaman Hayati Sumberdaya Kelautan dan Pesisir di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Mangrove dan Terumbu Karang;
- (17) Kegiatan Penyusunan DED Kawasan Wisata BMKT yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp388.390.877,00 dan realisasi sebesar Rp377.737.912,00 atau setara dengan 97,26%. *Output* kegiatan adalah Penyusunan DED Kawasan Wisata BMKT. *Outcome* kegiatan adalah Tercapainya Pembentukan Kawasan Wisata BMKT di Jawa Barat;
- (18) Kegiatan Konservasi Mangrove di Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp119.111.250,00 atau setara dengan 79,41%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Bibit Mangrove di Pesisir Pantai Losari dan Mundu Kab. Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah Terehabilitasinya Kawasan Mangrove di Pesisir Pantai Losari dan Mundu Kabupaten Cirebon;
- (19) Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Garam Rakyat di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp136.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.435.000,00 atau setara dengan 98,11%. *Output* kegiatan adalah Geomembran/Geoisolator untuk Tambak Garam. *Outcome* kegiatan adalah Geomembran/Geoisolator untuk Tambak Garam;
- (20) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produksi Garam Rakyat di Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp135.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp134.743.750,00 atau setara dengan 99,11%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Produksi Garam Rakyat. *Outcome*

- kegiatan adalah Meningkatkan Pemahaman Peserta Terhadap Teknologi Produksi Garam;
- (21) Kegiatan Operasional dan Patroli Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Laut, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.967.510,00 dan realisasi sebesar Rp392.628.301,00 atau setara dengan 98,17%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Outcome* kegiatan adalah Menurunnya Jumlah Kasus Pelanggaran IUU Fishing;
- (22) Kegiatan Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp406.592.500,00 dan realisasi sebesar Rp404.721.800,00 atau setara dengan 99,54%. *Output* kegiatan adalah Jumlah KJA Cirata yang Ditertibkan dan Ditata. *Outcome* kegiatan adalah Berkurangnya Pencemaran Lingkungan di Waduk Cirata;
- (23) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Berbasis Masyarakat di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp599.993.631,00 dan realisasi sebesar Rp596.205.350,00 atau setara dengan 99,37%. *Output* kegiatan adalah Jumlah masyarakat yang dibina dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Berbasis Masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan;
- (24) Kegiatan Bimbingan Teknis Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Rangka Penertiban dan Penataan Waduk Cirata oleh UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.908.570,00 dan realisasi sebesar Rp149.448.050,00 atau setara dengan 99,69%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta Bimbingan

- Teknis Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Rangka Penertiban dan Penataan Waduk Cirata. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan peran serta kelompok masyarakat pengawas dalam Penertiban dan Penataan Waduk Cirata;
- (25) Kegiatan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp51.999.450,00 dan realisasi sebesar Rp51.941.247,00 atau setara dengan 99,89%. *Output* kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat;
- (26) Kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp174.198.750,00 dan realisasi sebesar Rp173.912.500,00 atau setara dengan 99,84%. *Output* kegiatan adalah Jumlah dokumen Pertemuan Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan koordinasi penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu;
- (27) Kegiatan Identifikasi *Monitoring* dan Evaluasi yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp159.996.258,00 dan realisasi sebesar Rp158.871.540,00 atau setara dengan 99,30%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kasus yang diidentifikasi. *Outcome* kegiatan adalah Menurunnya jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan;
- (28) Kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.630,00 dan realisasi sebesar Rp147.232.500,00 atau setara dengan 98,16%. *Output* kegiatan adalah Jumlah dokumen Forum Koordinasi Pengawasan Berbasis Masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Koordinasi Pengawasan Berbasis Masyarakat;
- (29) Kegiatan Dukungan Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.997.300,00 dan realisasi sebesar Rp97.674.432,00 atau setara dengan 97,68%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kasus yang ditangani. *Outcome* kegiatan adalah

- Menurunnya jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan;
- (30) Kegiatan Pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp59.998.242,00 dan realisasi sebesar Rp59.321.122,00 atau setara dengan 98,87%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pokmaswas yang dibina. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya peran aktif Pokmaswas;
- (31) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.884.412,00 dan realisasi sebesar Rp97.125.760,00 atau setara dengan 97,24%. *Output* kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana pengawasan (komputer, kamera, drone, HT). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan kegiatan pengawasan dilapangan;
- (32) Kegiatan Aplikasi Pemantauan dan Pelaporan Pengawasan SDKP yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp80.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp78.025.000,00 atau setara dengan 97,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Aplikasi Pemantauan dan Pelaporan Pengawasan SDKP. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pemantauan dan pelaporan;
- (33) Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (Kelautan-PRL) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp718.716.185,00 dan realisasi sebesar Rp708.716.177,00 atau setara dengan 98,61%. *Output* kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi (Pembangunan pos jaga di kawasan pangumbahan, pembangunan penetasan telur penyu, pembangunan klinik laboratorium penyu, pengadaan geoisolator). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kawasan konservasi;
- (34) Kegiatan Pendampingan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (Bidang Kelautan-PRL) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp179.992.014,00 dan realisasi sebesar Rp94.559.652,00 atau setara dengan 52,54%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan DAK Bidang Kelautan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kawasan konservasi dan produksi garam;

-
- (35) Kegiatan Sosialisasi Gerakan Citarum Harum yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.999.050,00 dan realisasi sebesar Rp48.686.000,00 atau setara dengan 97,37%. *Output* kegiatan Jumlah peserta Sosialisasi Gerakan Citarum Harum. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi terhadap gerakan Citarum Harum;
- (36) Kegiatan Sosialisasi Aturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pengawasan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp192.783.250,00 atau setara dengan 96,39%. *Output* kegiatan Jumlah Jumlah peserta Sosialisasi Aturan Perundangundangan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pengawasan Berbasis Masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan tentang aturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan;
- (37) Kegiatan Temu Teknis Pengawas Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp169.995.700,00 dan realisasi sebesar Rp167.595.640,00 atau setara dengan 98,59%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta temu teknis (Pokmaswas). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kemampuan Pokmaswas dalam pengawasan SDKP;
- (38) Kegiatan Bimtek Pengawasan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.995.250,00 dan realisasi sebesar Rp149.155.250,00 atau setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta Bimtek Pengawas Perikanan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kemampuan pengawas perikanan;
- (39) Kegiatan Koordinasi Pengawasan Lintas Provinsi yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.997.500,00 dan realisasi sebesar Rp99.997.500,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah dokumen Koordinasi Pengawasan Lintas Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi pengawasan lintas provinsi;
- (40) Kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan antar Wilayah Perbatasan yang dilaksanakan Dinas

- Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.061.500,00 atau setara dengan 99,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan antar Wilayah Perbatasan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi pengawasan antar wilayah;
- (41) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pengawasan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.800,00 dan realisasi sebesar Rp147.787.641,00 atau setara dengan 98,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kelompok yang berperan serta pengawasan berbasis masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam pengawasan;
- (42) Kegiatan Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp218.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp215.978.040,00 atau setara dengan 98,71%. *Output* kegiatan adalah Jumlah benih yang ditebar untuk *restocking*. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan ketersediaan komoditas ikan dan udang;
- (43) Kegiatan Konservasi Penyu di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.999.890,00 dan realisasi sebesar Rp772.327.210,00 atau setara dengan 96,54%. *Output* kegiatan adalah Jumlah tukik yang dilepas. *Outcome* kegiatan adalah Tercapainya Jumlah kawasan konservasi yang difasilitasi upaya pemanfaatannya;
- (44) Kegiatan Fasilitas Sarana Produksi Ikan Endemik di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp549.999.880,00 dan realisasi sebesar Rp496.045.840,00 atau setara dengan 90,19%. *Output* kegiatan adalah Jumlah pakan untuk ikan endemik. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya produktivitas ikan endemik;
- (45) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

- sebesar Rp172.999.824,00 dan realisasi sebesar Rp170.767.625,00 atau setara dengan 98,71%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta Pelatihan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman petambak garam terhadap teknologi usaha garam;
- (46) Kegiatan Pemuliaan Ikan di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.508.705.478,00 dan realisasi sebesar Rp3.475.054.400,00 atau setara dengan 99,04%. *Output* kegiatan adalah Jumlah ikan hasil Pemuliaan dan Domestikasi Ikan, Jumlah ikan hasil domestikasi. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya produktivitas ikan gurame dan nilam serta jumlah ikan yang dapat dipelihara oleh masyarakat;
- (47) Kegiatan Penebaran Ikan di Perairan Umum di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.492.145.305,00 dan realisasi sebesar Rp1.423.946.810,00 atau setara dengan 95,43%. *Output* kegiatan adalah Jumlah benih ikan yang ditebar di Perairan Umum. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya stok ikan di perairan umum;
- (48) Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Laut Wilayah Selatan di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp159.999.944,00 dan realisasi sebesar Rp156.147.950,00 atau setara dengan 97,59%. *Output* kegiatan adalah Jumlah penanaman di kawasan konservasi untuk tanaman mangrove dan vegetasi serta penanaman karang buatan. *Outcome* kegiatan adalah Tercapainya Jumlah kawasan konservasi yang difasilitasi upaya pemanfaatannya;
- (49) Kegiatan Pendampingan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (Bidang Pengawasan SDKP) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.996.700,00 dan realisasi sebesar Rp30.070.000,00 atau setara dengan 30,07%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya kegiatan DAK bidang Pengawasan SDKP. *Outcome* kegiatan adalah Terfasilitasinya kegiatan DAK bidang Pengawasan SDKP;
- (50) Kegiatan Sosialisasi Penataan Keramba Jaring Apung yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp99.999.650,00 dan realisasi sebesar Rp98.622.850,00 atau setara dengan 98,62%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi KJA. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya gerakan Citarum Harum;
- (51) Kegiatan Sosialisasi Penataan Keramba Jaring Apung yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp111.449.912,00 dan realisasi sebesar Rp111.448.824,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta Pelatihan untuk. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman terhadap aspek kelautan dan wilayah pesisir;
- (52) Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Pelaku Usaha Perikanan di Lokasi PPP, PPI dan TPI Wilayah Selatan di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.997.950,00 dan realisasi sebesar Rp146.773.750,00 atau setara dengan 97,85%. *Output* kegiatan adalah Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan Pelaku Usaha Perikanan di Lokasi PPP, PPI dan TPI Wilayah Selatan, Pembangunan PPI *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya ketertiban Pelaku Usaha Perikanan di Lokasi PPP, PPI dan TPI Wilayah Selatan;
- (53) Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Sumberdaya Perairan Umum Wilayah Selatan di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.823.050,00 dan realisasi sebesar Rp149.027.735,00 atau setara dengan 99,47%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pengawasan dan Pemantauan Sumberdaya Perairan Umum Wilayah Selatan *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan kinerja pengawasan dalam menjaga dan mengawasi SDKP;
- (54) Kegiatan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Wilayah Utara, UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.309.095,00 atau setara dengan 99,65%.

Output kegiatan adalah Jumlah Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Wilayah Utara
Outcome kegiatan adalah Menurunnya pelanggaran oleh Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Wilayah Utara;

- (55) Kegiatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Wilayah Selatan di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.945.550,00 dan realisasi sebesar Rp143.179.256,00 atau setara dengan 95,49%.
Output kegiatan adalah Jumlah Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Wilayah Selatan
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kinerja pengawasan dalam menjaga dan mengawasi SDKP;
- (56) Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Laut, Wilayah Pesisir dan PPK di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.835.840,00 dan realisasi sebesar Rp195.442.713,00 atau setara dengan 97,80%.
Output kegiatan adalah Jumlah peserta Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Laut, Wilayah Pesisir dan PPK
Outcome kegiatan adalah Meningkatkan kinerja pengawasan dalam menjaga dan mengawasi SDKP;
- (57) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan (SDK) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.900,00 dan realisasi sebesar Rp149.960.794,00 atau setara dengan 99,97%.
Output kegiatan adalah Frekuensi pengawasan SDK
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengawasan SDK;
- (58) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (SDP) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.995.600,00 dan realisasi sebesar Rp149.810.600,00 atau setara dengan 99,88%.
Output kegiatan adalah Frekuensi pengawasan SDP
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengawasan SDP;
- (59) Kegiatan *Inhouse Training* untuk Aparatur yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan

- Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.998.800,00 dan realisasi sebesar Rp97.378.550,00 atau setara dengan 97,38%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta *Inhouse Training* untuk Aparatur *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kemampuan aparatur dalam kegiatan pengawasan SDK;
- (60) Kegiatan Pengadaan Pakan Pemeliharaan Ikan Endemik dan Ikan Hias di Ciherang yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.475.000,00 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah pakan untuk ikan endemik. *Outcome* kegiatan adalah Perpeliharanya ikan endemik dan ikan hias di Ciherang.

c. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Capaian indikator kinerja program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja dinas kelautan dan Perikanan yakni Prosentase Jumlah Produksi Perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan dengan realisasi sebesar 99% dari target sebesar 91%, prosentase peningkatan produksi olahan dengan realisasi sebesar 5% dari target sebesar 2 %, prosentase peningkatan konsumsi Ikan sebesar dengan realisasi sebesar 4,61% dari target sebesar 1,10%, capaian produksi garam dengan realisasi sebesar 509.731,18 ton dari target sebesar 257.235,77 ton. Alokasi anggaran Rp2.066.428.867,00 dan realisasi Rp1.805.286.297,00 atau setara dengan 87,36%.

- (1) Kegiatan Forum OPD yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp193.995.157,00 dan realisasi sebesar Rp193.397.000,00 atau setara dengan 99,69%. *Output* kegiatan adalah Dokumen usulan program dan kegiatan kab/kota. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- (2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Keguatan dan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp895.763.669,00 dan realisasi sebesar Rp653.441.083,00 atau setara dengan 72,95%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Perencanaan, Laporan Kegiatan dan

- Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Operasional Tim Percepatan Pembangunan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (3) Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.726.597,00 dan realisasi sebesar Rp389.193.623,00 atau setara dengan 97,36%. *Output* kegiatan adalah Dokumen laporan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sinergitas perencanaan pemabangunan kelautan dan perikanan Jawa Barat;
 - (4) Kegiatan Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.921.500,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan Jawa Barat;
 - (5) Kegiatan Penyajian Data Statistik Kelautan dan Perikanan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp336.946.193,00 dan realisasi sebesar Rp332.167.053,00 atau setara dengan 98,58%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Data Statistik Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Dinas kelautan dan perikanan;
 - (6) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp219.997.251,00 dan realisasi sebesar Rp217.166.038,00 atau setara dengan 98,71%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Laporan Keuangan Berbasis Akrual. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas kelautan dan perikanan.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan

Capaian Indikator Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan yakni tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur di Dinas, Cabang Dinas dan UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar 95,22% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Rp14.623.870.160,00 dan realisasi Rp13.924.933.803,00 atau setara dengan 95,22%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.934.821,00 dan realisasi sebesar Rp495.921.255,00 atau setara dengan 99,20%. *Output* kegiatan adalah Renovasi Kantor, Renovasi Musholla, Renovasi Asrama, Renovasi Rumah Jaga, Renovasi Rumah Dinas, Renovasi Gedung Desiminasi, Pembuatan Pos Jaga. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp396.929.500,00 atau setara dengan 99,23%. *Output* kegiatan adalah Rehab/pembangunan gedung/bangunan kantor. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
- (3) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.937.013,00 dan realisasi sebesar Rp199.553.500,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah Peralatan/perengkapan kantor, pengadaan alat-alat lab, pengadaan komputer, penambahan jaringan listrik. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
- (4) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.960.834,00 dan realisasi sebesar Rp197.255.550,00 atau setara dengan 98,65%. *Output* kegiatan adalah Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD

- Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelabuhan;
- (5) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp693.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp683.983.638,00 atau setara dengan 98,64%. *Output* kegiatan adalah Kelengkapan Kantor. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
 - (6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp126.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp125.134.288,00 atau setara dengan 99,23%. *Output* kegiatan adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
 - (7) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp502.220.924,00 dan realisasi sebesar Rp481.062.730,00 atau setara dengan 95,79%. *Output* kegiatan adalah 1. TV Asrama 2. Pengadaan komputer 3. Pengadaan laptop 5. Pengadaan Camera CCTV 6. Pengadaan Teropong Laut Digital 7. GPS Map 8. GPS Kapal. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
 - (8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.985.486,00 dan realisasi sebesar Rp694.558.094,00 atau setara dengan 99,22%. *Output* kegiatan adalah Pembangunan Gapura dan Papan Nama, Pembuatan Sumur Artesis, Pembuatan Taman di lokasi Ciherang. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
 - (9) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan

- Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp829.948.550,00 dan realisasi sebesar Rp729.887.500,00 atau setara dengan 87,94%. *Output* kegiatan adalah Penambahan bangunan kantor dan penataan halaman depan kantor. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
- (10) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp342.321.962,00 dan realisasi sebesar Rp325.261.090,00 atau setara dengan 95,02%. *Output* kegiatan adalah Televisi Digital, Almari/Buffet, Peralatan *Video Conference*, Komputer *PC* dan *Printer*. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
- (11) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp227.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp213.318.400,00 atau setara dengan 93,77%. *Output* kegiatan adalah Perlengkapan Kantor. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
- (12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp557.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp557.107.598,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah Peralatan Perikanan dan Huruf Nama Kantor. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
- (13) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp196.849.995,00 dan realisasi sebesar Rp186.056.000,00 atau setara dengan 94,52%. *Output* kegiatan adalah Kelengkapan Kantor. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
- (14) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Rp499.999.962,00 dan

realisasi sebesar Rp491.397.540,00 atau setara dengan 98,28%. *Output* kegiatan adalah Pembangunan sarana dan prasarana aparatur. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur;

- (15) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp8.648.310.613,00 dan realisasi sebesar Rp8.147.507.120,00 atau setara dengan 94,21%. *Output* kegiatan adalah Pembangunan sarana dan prasarana aparatur di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelabuhan.

e. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah daerah Dinas Kelautan dan Perikanan

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah daerah Dinas Kelautan dan Perikanan yakni tingkat pemenuhan kebutuhan operasional dasar pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar 92,51% dari target sebesar sebesar 100%. Alokasi anggaran Rp21.219.784.125,00 dan realisasi Rp19.631.271.094,00 atau setara dengan 92,51%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai di Kantor UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp449.995.562,00 dan realisasi sebesar Rp448.363.250,00 atau setara dengan 96,74%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara. *Outcome* kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut;
- (2) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp295.969.364,00 atau setara dengan 98,66%. *Output* kegiatan adalah Perjalanan Dinas, PHBI, Mamin Rapat dan Tamu. *Outcome* kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam

- mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara;
- (3) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.942.058,00 dan realisasi sebesar Rp73.351.800,00 atau setara dengan 97,88%. *Output* kegiatan adalah Alat listrik dan elektronik 1 paket. *Outcome* kegiatan terlaksananya sarana dan prasarana di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara 1 tahun;
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp549.989.400 dan realisasi sebesar Rp519.912.116,00 atau setara dengan 94,53%. *Output* kegiatan Satuan pengamanan, OB, Pramু Tamu, Tenaga Publikasi dan Dokumentasi, Peralatan Keamanan, dan peralatan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana secara rutin di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara 100%;
 - (5) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.006.972,00 atau setara dengan 98,01%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan roda dua dan empat. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara secara rutin 100%;
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.900.000,00 atau setara dengan 99,27%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kantor, aula, rumah dinas, rumah jaga, gudang, asrama, saluran tambak, gudang, pancangan air laut, hatchery, laboratorium, mushola, jembatan, dan gerbang. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara secara rutin;

- (7) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan alat listrik/elektronik, pengadaan material bahan baku bangunan, pemeliharaan komputer *software* dan hardware, pemeliharaan pompa air, kalibrasi alat ukur kualitas air, pemeliharaan AC, jaringan internet. *Outcome* kegiatan adalah Terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara 1 tahun;
- (8) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.133.100,00 atau setara dengan 99,71%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan Dinas di Cijengkol Subang, Satpel Wanayasa Purwakarta, dan Satpel Jatisari Subang. *Outcome* Terpeliharanya sarana dan prasarana Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara secara rutin;
- (9) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatan dan Pengemudi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp650.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan 10 orang, tenaga kebersihan 9 orang dan pengemudi 1 orang. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya keamanan dan kebersihan lingkup kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara;
- (10) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp95.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp91.595.000,00 atau setara dengan 96,11%. *Output* kegiatan adalah belanja air irigasi, surat kabar/majalah, TV berbayar, dana premi BPJS untuk tenaga teknis non PNS. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan alat pendukung

- fasilitas kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara 1 Tahun;
- (11) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp83.999.200,00 dan realisasi sebesar Rp83.999.200,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah ATK, Blanko Visum SPPD, Kuitansi bendahara, SKA Nota Penjualan, nota disposisi, kalender, ROK, buku juklak, buku juknis, dan laporan tahunan kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Terpenuhinya operasional perangkat daerah lingkup Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara;
- (12) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp461.776.000,00 dan realisasi sebesar Rp456.382.856,00 atau setara dengan 98,83%. *Output* kegiatan adalah belanja langganan telepon, surat kabar/majalah, listrik, dan internet. *Outcome* kegiatan adalah Terpenuhinya langganan kantor pendukung perkantoran di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara 1 tahun;
- (13) Kegiatan Rapat Internal dan Luar Kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp380.898.700,00 atau setara dengan 95,22%. *Output* kegiatan adalah Mamin petugas piket/jaga malam, konsumsi tamu dinas, perdin rutin dalam rangka pemenuhan undangan rapat evaluasi dan koordinasi. *Outcome* kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional perangkat daerah lingkup Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara;
- (14) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp119.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp118.003.459,00 atau setara dengan 98,39%. *Output* kegiatan adalah Jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik, dan LPG di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara. *Outcome* kegiatan adalah

- Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara 100%;
- (15) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp8.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sewa publikasi dan dokumentasi di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara 100%;
- (16) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp174.999.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara 100%;
- (17) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp114.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp113.653.000,00 atau setara dengan 99,00%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara 100%;
- (18) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp321.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp320.354.992,00 atau setara dengan 99,60%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan Dinas di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara. *Outcome* kegiatan adalah Terpeliharanya Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara secara rutin 100%;
- (19) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.999.026,00 dan realisasi sebesar Rp49.948.000,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah Penyediaan barang habis pakai kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD PPMPP 100%;
- (20) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp435.470.000,00 dan realisasi sebesar Rp435.021.500,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah Penyediaan Jasa Pengemudi, keamanan, dan kebersihan beserta peralatannya di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara. *Outcome* kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara secara rutin;
- (21) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp545.338.220,00 dan realisasi sebesar Rp519.239.301,00 atau setara dengan 95,21%. *Output* kegiatan adalah Jasa pemakaian telepon, air, listrik, surat kabar, TV berbayar dan internet. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD PPMPP Cirebon 100%;
- (22) Kegiatan penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.965.000,00 dan realisasi sebesar Rp247.202.697,00 atau setara dengan 98,89%.

- Output* kegiatan adalah perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja, rapat, koordinasi dan evaluasi di dalam dan luar daerah, mamin rapat, mamin petugas piket dab lainnya. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD PPMPP Cirebon;
- (23) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengemudi, Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp466.995.880,00 dan realisasi sebesar Rp464.495.000,00 atau setara dengan 99,46%. *Output* kegiatan adalah penyediaan jasa pengemudi, keamanan dan kebersihan beserta peralatannya. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD PPMPP Cirebon secara rutin 100%;
- (24) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp19.993.550,00 dan realisasi sebesar Rp19.715.000,00 atau setara dengan 98,61%. *Output* kegiatan ini adalah penyediaan isi ulang tabung gas dan alat listrik/elektronik. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mnedukung tugas pokok dan fungsi UPTFD PPMPP Cirebon;
- (25) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.076.900,00 atau setara dengan 95,08%. *Output* kegiatan adalah Penyediaan Jasa STNK dan Servis/Pergantian suku cadang kendaraan roda 2 dan 4 lebih. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD PPMPP Cirebon secara rutin 100%;
- (26) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD PPMPP Cirebon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.540.300,00 atau setara dengan 99,54%. *Output* kegiatan ini adalah pemeliharaan mesin *cold storage*, kalibrasi alat-alat Lab., pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana

- dan prasarana di UPTFD PPMPP Cirebon secara rutin 100%;
- (27) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai di Kantor UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp48.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.392.400,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan ini adalah penyediaan barang pakai habis pakai kantor di UPTD Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan gungsi UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara 100%;
- (28) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.997.297,00 dan realisasi sebesar Rp49.997.200,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan ini adalah Belanja alat tulis kantor, belanja materai, belanja cetak blanko. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem 100%;
- (29) Kegiatan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp220.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp219.532.250,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan ini adalah penyediaan rapat internal dan luar kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem 100%;
- (30) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp32.312.000,00 atau setara dengan 82,32%. *Output* kegiatan ini adalah Pemenuhan peningkatan kapasitas aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;

- (31) Kegiatan Pembinaan Aparatur Cabang Dinas dan UPTD Lingkup Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp79.937.500,00 dan realisasi sebesar Rp79.675.271,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan ini adalah Pembinaan Aparatur Cabang Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (150 orang). *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan aparatur Cabang Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (32) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp640.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp618.571.500,00 atau setara dengan 96,50%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur (230 orang). *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan, pengetahuan, dan keterampilan aparatur Cabang Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (33) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp62.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp32.800.000,00 atau setara dengan 52,10%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur (230 orang). *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan, pengetahuan, dan keterampilan aparatur Cabang Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (34) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.987.500,00 dan realisasi sebesar Rp74.833.469,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam

- rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100%;
- (35) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp269.604.000,00 dan realisasi sebesar Rp252.388.745,00 atau setara dengan 93,61%. *Output* kegiatan ini adalah penyediaan langganan kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan 100%;
- (36) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan luar kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp291.495.944,00 dan realisasi sebesar Rp290.089.755,00 atau setara dengan 99,52%. *Output* kegiatan ini adalah penyediaan rapat internal dan luar kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan 100%;
- (37) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan beserta peralatannya di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.996.006,00 dan realisasi sebesar Rp782.651.563,00 atau setara dengan 97,83%. *Output* kegiatan ini adalah penyediaan jasa kemanan dan kebersihan beserta peralatannya di UPTD Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan 100%;
- (38) Kegiatan Penyediaan pemeliharaan kendaraan Dinas di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Sasaran yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp147.185.967,00 atau setara dengan 98,12% *Output* kegiatan ini adalah

- pemeliharaan kendaraan roda dua dan empat di UPTD Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan secara rutin 100%;
- (39) Kegiatan pemeliharaan perabotan, fasilitas gedung kantor UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.664.307,00 dan realisasi sebesar Rp196.966.479,00 atau setara dengan 98,65%. *Output* kegiatan ini adalah pemeliharaan sarana dan prasarana di UPTD Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan secara rutin 100%;
- (40) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp80.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp79.884.375,00 atau setara dengan 99,86%. *Output* kegiatan ini adalah pemeliharaan sarana dan prasarana di UPTD Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan secara rutin 100%;
- (41) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp149.792.464,00 atau setara dengan 99,86%. *Output* kegiatan ini adalah belanja pemeliharaan perabotan kantor pendukung kegiatan operasional di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan secara rutin 100%;
- (42) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp149.421.600,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan ini adalah belanja jasa profesi, pemeliharaan alat kantor, pemeliharaan instalasi air laut, pemeliharaan alat listrik dan kalibrasi alat lab. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan 100%;

- (43) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.585.325,00 atau setara dengan 98,34%. *Output* kegiatan ini adalah belanja ATK, materai dan penggandaan. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan 100%;
- (44) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan beserta peralatannya di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp278.194.243,00 dan realisasi sebesar Rp278.126.150,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan ini adalah belanja jasa kebersihan, dan keamanan selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan secara rutin 100%;
- (45) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp738.044.601,00 atau setara dengan 49,20%. *Output* kegiatan ini adalah belanja penyelenggaraan administrasi kantor, penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan 100%;
- (46) Kegiatan Penyediaan pemeliharaan kendaraan Dinas di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas

- Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp135.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.352.980,00 atau setara dengan 98,78%. *Output* kegiatan ini adalah belanja BBM, Servis, pelumas, KIR, pembayaran STNK, suku cadang. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan secara rutin 100%;
- (47) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan luar kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp270.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp254.432.548,00 atau setara dengan 94,23%. *Output* kegiatan ini adalah belanja makan minum rapat internal dan tamu Dinas serta perjalanan Dinas dalam daerah. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan 100%;
- (48) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp337.396.400,00 dan realisasi sebesar Rp337.396.400,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan ini adalah belanja kebutuhan alat-alat listrik, elektronik, pengharum ruangan dan pemeliharaan jaringan. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (49) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp551.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp551.478.526,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan ini adalah belanja petugas satpam dan *cleaning service*. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (50) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp177.047.500,00

- dan realisasi sebesar Rp176.586.333,00 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan ini adalah belanja langganan speedy, telepon, air, listrik, dan surat kabar. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (51) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp356.630.000,00 dan realisasi sebesar Rp351.749.748,00 atau setara dengan 98,63%. *Output* kegiatan ini adalah pemeliharaan kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat secara rutin 100%;
- (52) Kegiatan Penyediaan barang Pakai Habis Kantor yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp70.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan ini adalah belanja alat ATK dan Alat Kebersihan. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (53) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.565.000,00 dan realisasi sebesar Rp345.141.365,00 atau setara dengan 98,73%. *Output* kegiatan ini adalah pemeliharaan 4 unit bangunan kantor, 4000 berkas arsip, 50 unit peralatan kantor, 50 unit perlengkapan kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat secara rutin 100%;
- (54) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp439.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp412.552.119,00 atau setara dengan 93,98%. *Output* kegiatan ini adalah jasa pemakaian telepon, air, listrik surat kabar dan internet. *Outcome* kegiatan ini adalah

- terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (55) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp249.131.400,00 atau setara dengan 99,65%. *Output* kegiatan ini adalah belanja barang cetak, ATK, plakat dan benda pos. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (56) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.800.000,00 atau setara dengan 98,80%. *Output* kegiatan ini adalah belanja publikasi, dokumentasi dan sewa tenda kursi. *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (57) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.057.951.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.006.070.842,00 atau setara dengan 95,10%. *Output* kegiatan ini adalah konsumsi rapat, ceramah, tamu Dinas dan perjalanan Dinas PNS *Outcome* kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 100%;
- (58) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengemudi Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp236.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp236.600.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan ini adalah pengemudi, keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat secara rutin 100%.

- (59) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp39.999.898,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan ini adalah Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (60) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp306.026.025,00 dan realisasi sebesar Rp305.477.000,00 atau setara dengan 99,82%. *Output* kegiatan ini adalah Pemeliharaan Gedung dan Perkantoran serta perabotan. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana secara rutin;
- (61) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp242.393.100,00 dan realisasi sebesar Rp241.258.372,00 atau setara dengan 99,53%. *Output* kegiatan ini adalah Pemeliharaan Kendaraan Roda dua, empat dan satu unit Kapal 5 GT dan dua unit 2 GT. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana secara rutin;
- (62) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp249.506.500,00 atau setara dengan 99,80%. *Output* kegiatan ini adalah Mamin Rapat dan Mamin Tamu serta Perjalanan Dinas. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (63) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.982.000,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan ini adalah Kebutuhan Alat - alat Listrik dan Pengisian Tabung Gas. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan

- operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (64) Kegiatan Pengelolaan *Website* di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp232.947.100,00 dan realisasi sebesar Rp232.654.363,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* kegiatan ini adalah Sosialisasi Sistem Informasi dan dokumentasi *website* dan peliputan data *website*. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (65) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp80.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp80.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan ini adalah Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (66) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp287.302.500,00 dan realisasi sebesar Rp278.423.561,00 atau setara dengan 96,91%. *Output* kegiatan ini adalah Penyediaan Langganan Kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (67) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp168.399.850,00 dan realisasi sebesar Rp168.150.750,00 atau setara dengan 99,85%. *Output* kegiatan ini adalah Penyediaan Rapat Internal dan luar kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (68) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp149.690.000,00 atau setara dengan 99,79%.

- Output* kegiatan ini adalah Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana secara rutin;
- (69) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp295.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp256.103.597,00 atau setara dengan 86,67%. *Output* kegiatan ini adalah Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana secara rutin;
- (70) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengemudi, Keamanan dan Jasa Kebersihan beserta peralatannya di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.458.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.342.238.900,00 atau setara dengan 92,00%. *Output* kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Pengemudi, Keamanan dan Jasa Kebersihan beserta peralatannya. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana secara rutin;
- (71) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp17.510.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.506.000,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan ini adalah Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (72) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Asem yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp269.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp129.166.322,00 atau setara dengan 47,85%. *Output* kegiatan ini adalah Belanja Langganan Listrik, Air Bersih, Jasa Internet di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem dan Satuan Pelayanan. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (73) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Asem yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.945.000,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. *Outcome* kegiatan ini adalah Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur di Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Terjaga dengan Baik;

- (74) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Asem yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.997.157,00 dan realisasi sebesar Rp198.591.960,00 atau setara dengan 99,30%. *Output* kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. *Outcome* kegiatan ini adalah Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur di Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Terjaga dengan Baik;
- (75) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Asem yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.998.800,00 dan realisasi sebesar Rp389.730.500,00 atau setara dengan 97,43%. *Output* kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan oprasional kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. *Outcome* kegiatan ini adalah Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur di Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Terjaga dengan Baik;
- (76) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengemudi, Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Asem yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp286.830.000,00 dan realisasi sebesar Rp286.830.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan ini adalah Penyediaan jasa pengemudi, keamanan, dan kebersihan beserta peralatannya di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. *Outcome* kegiatan ini adalah Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur di Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Terjaga dengan Baik;
- (77) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Barat sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp565.711.489,00 atau setara dengan 75,43%. *Output* kegiatan ini adalah Listrik, Air, Telepon, Internet. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;

- (78) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp70.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan ini adalah Jasa resertifikasi ISO 9001:2015 untuk ikan patin dan ikan nila. *Outcome* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Permasalahan

- (1) Daya saing produk kelautan dan perikanan masih rendah;
- (2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan masih kurang;
- (3) Pengawasan dan pengendalian SDKP (Penganggulan dan penyelesaian IUU Fishing);
- (4) Degradasi lingkungan perikanan dan kelautan (Abrasi, intrusi, pencemaran, kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang, kerusakan padang lamun, overfishing dan sedimentasi);
- (5) Pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan laut (manajemen dan teknologi pemanfaatan yang belum optimal dan tidak ramah lingkungan);
- (6) Terbatasnya jumlah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan perikanan;
- (7) Minimnya fasilitas dan infrastruktur di wilayah selatan Jawa Barat sehingga sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada belum termanfaatkan secara optimal;
- (8) Terbatasnya teknologi penangkapan yang dihadapi nelayan khususnya nelayan wilayah selatan Jawa Barat.

b. Solusi

- (1) Sertifikasi kompetensi nelayan dan asuransi nelayan;
- (2) Sertifikasi kompetensi pembudidaya ikan dan asuransi usaha budidaya;
- (3) Sertifikasi kompetensi UPI dan pemasaran hasil perikanan;
- (4) Peningkatan kompetensi petambak garam;
- (5) Peningkatan manajemen usaha kelautan dan perikanan;
- (6) Pengembangan pelabuhan perikanan;
- (7) Peningkatan operasi pelabuhan perikanan;
- (8) Peningkatan sarana dan teknologi perikanan tangkap;
- (9) Restrukturisasi dan rasionalisasi armada perikaann tangkap;
- (10) Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi perikanan budidaya;
- (11) Revitalisasi tambak wilayah utara dan selatan;
- (12) Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi produksi garam;
- (13) Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi distribusi, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
- (14) Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan;
- (15) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan akses permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- (16) Penerapan perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K Jawa Barat;
- (17) Pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang melibatkan semua kelompok masyarakat melalui pendekatan *socio culture*;
- (18) Pelestarian Plasma Nutfah;
- (19) Rehabilitasi kawasan pesisir (mangrove dan sabuk pantai);
- (20) Rehabilitasi kawasan konservasi daerah melalui Transplantasi terumbu karang.

26. Urusan Pariwisata

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan pariwisata tahun 2019 adalah kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan realisasi sebesar 6,84% dari target sebesar 2,30-3%; jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan realisasi sebesar 3.645.433 orang dari target sebesar 1.830.000 orang; jumlah kunjungan wisatawan nusantara dengan realisasi sebesar 64.610.832 orang dari target sebesar 49.000.000 orang dan persentase industri kreatif yang dikembangkan dengan realisasi sebesar 22,22% dari target sebesar 18,52%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yakni jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dengan capaian sebesar 13 DTW dari target sebesar 10 DTW. Alokasi anggaran Program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah sebesar Rp62.356.636.113,00 dengan realisasi sebesar Rp49.162.831.852,00 setara dengan 78,84%.

- (1) Kegiatan Keikutsertaan pada *Asia Pasific Geopark Network*, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.998.634,00 dan realisasi sebesar Rp453.470.871,00 atau setara dengan 90,69%. *Output* kegiatan adalah promosi geopark ciletuh pada *Asia Pasific Geopark Network*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kunjungan wisatawan ke *Geopark Ciletuh*;
- (2) Kegiatan Pembinaan Kompepar, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.999.414,00 dan realisasi sebesar Rp49.711.914,00 atau setara dengan 99,42%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi pembinaan sadar wisata dan sapta pesona kepada kelompok penggerak pariwisata Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman sadar wisata dan sapta pesona pada Kompepar agar menciptakan sesuatu yang inovatif, kreatif, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan di daerahnya;
- (3) Kegiatan Pembinaan Desa Wisata, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp372.073.474,00 dan realisasi sebesar Rp166.997.000,00 atau setara dengan 44,88%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi pembinaan wawasan dan pemahaman tentang desa wisata *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan pengelolaan desa wisata;
- (4) Kegiatan Pembinaan *Homestay*, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.984.416,00 dan realisasi sebesar Rp43.042.500,00 atau setara dengan 86,11%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi pembinaan wawasan dan pemahaman tentang *homestay*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan pengelolaan *homestay*;
- (5) Kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Kawasan Sungai Citarum, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.998.483,00 dan realisasi sebesar Rp141.818.483,00 atau setara dengan 94,55%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona pada masyarakat di kawasan sungai citarum. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman Sadar Wisata dan Sapta Pesona pada masyarakat di Kawasan Sungai Citarum;
- (6) Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Wisata dan Mice di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.499.999.540,00 dan realisasi sebesar Rp1.014.168.550,00 atau setara dengan 67,61%. *Output* kegiatan adalah dokumen pengembangan MICE Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya dokumen kebijakan kepariwisataan;
- (7) Kegiatan Revisi Perda No 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.999.997.770,00 dan realisasi sebesar Rp1.718.938.128,00 atau setara dengan 85,95%. *Output* kegiatan adalah dokumen revisi Perda No 8 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya dokumen kebijakan kepariwisataan;
- (8) Kegiatan Pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu Unesco Global Geopark, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp9.164.844.242,00 dan realisasi sebesar Rp7.873.066.344,00 atau setara dengan 85,91%. *Output* kegiatan adalah pemenuhan rekomendasi UNESCO. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu;
- (9) Kegiatan Pembangunan Daya Tarik dan Sarana Transportasi Wisata di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp31.846.909.640,00 dan realisasi sebesar Rp24.593.905.481,00 atau setara dengan 77,23%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan, lahan tanah dan daya tarik wisata baru di destinasi unggulan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana daya tarik wisata di Jawa Barat;
- (10) Kegiatan Pembentukan Lembaga Ekraf Jabar, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp16.430.379.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.816.708.831,00 atau setara dengan 78,01%. *Output* kegiatan adalah pembentukan perda dan pergub tentang pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat, *Event* Creative Festival Film Bandung (FFB) dan *Event* Pemilihan Mojang dan Jajaka Jawa Barat dan pelaksanaan *event* gelar produk kreative Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pendukung industri pariwisata kreatif di Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana di Kawasan Pariwisata, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp97.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.950.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi dan pembinaan penanganan bencana di kawasan pariwisata. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman dan kemampuan SDM Pariwisata dalam penanganan bencana;
- (12) Kegiatan Pembinaan Wisata Halal, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp194.501.500,00 dan realisasi sebesar Rp193.053.750,00 atau setara dengan 99,26%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi dan pembinaan usaha jasa pariwisata halal. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan usaha jasa pariwisata halal di Jawa Barat.

b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata yakni presentase seni budaya dan wisata yang dipromosikan sebesar 77,77% dari target 18,52%. Alokasi anggaran Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata adalah sebesar Rp13.827.887.600,00 dengan realisasi sebesar Rp12.744.283.461,00 setara dengan 92,16%.

- (1) Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Seni, Budaya dan Pariwisata Jabar melalui Media Cetak dan Elektronik, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.994.688,00 dan realisasi sebesar Rp98.527.188,00 atau setara dengan 98,53%. *Output* kegiatan adalah publikasi pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat oleh jurnalis. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya informasi pariwisata dan budaya Jawa Barat pada media cetak dan elektronik;
- (2) Kegiatan Optimalisasi Peranan Media Sosial dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.000.000,00 atau setara dengan 99,50%. *Output* kegiatan adalah promosi pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat melalui media digital/media sosial di website. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya informasi pariwisata dan budaya Jawa Barat pada media digital/medsos;
- (3) Kegiatan Pengelolaan Pusat Layanan Informasi Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.998.076,00 dan realisasi sebesar Rp199.842.000,00 atau setara dengan 99,92%. *Output* kegiatan adalah penataan dan pengelolaan *Tourist Information Centre* (TIC) sebagai pusat layanan informasi bagi wisatawan yang membutuhkan informasi. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya pariwisata Jawa Barat melalui penyajian informasi pariwisata dan pengelolaan TIC Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Pengolahan Analisis Data dan Informasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.766.750,00 atau 98,77%. *Output* kegiatan adalah berupa buku analisa data dan informasi

- pariwisata Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan dokumen analisa data informasi sebagai bahan kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Penyajian Informasi Potensi Kepariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.547.500,00 atau setara dengan 99,27%. *Output* kegiatan adalah penyediaan bahan/materi informasi pariwisata dan budaya secara *offline* dan *online* berupa Pembuatan *Photo* dan *Video* Promosi Pariwisata dan Budaya Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas penyajian informasi pariwisata budaya;
- (6) Kegiatan Pelaksanaan Promosi dan *Familiarization Tour* Wisata Halal, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.000.000,00 atau setara dengan 99,00%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan kaji banding wisata halal ke Nusa Tenggara Barat (Lombok) satu kali dan pelaksanaan *Familiarization Tour* Wisata Halal di Bandung, Cirebon dan sekitarnya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya promosi kawasan pariwisata halal di Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Pendukung dan Partisipasi dalam *Event* Promosi Pariwisata dan Kebudayaan Pasar Mancanegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.550.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.539.014.150,00 atau setara dengan 99,29%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pendukung dan partisipasi dalam *Event* promosi pariwisata dan kebudayaan pasar mancanegara melalui: 1. Pendukung sales mission di dua negara yaitu Malaysia dan Singapura 2. Pendukung Asita West Java Travel Mart 3. Pendukung *Famtrip Heritage* dan 4. Iuran tahunan *Pacific Asia Travel Association (PATA)* *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya promosi pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat;
- (8) Kegiatan *Event* Promosi di Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.088.549.836,00 dan realisasi sebesar Rp1.075.912.986,00 atau setara dengan 98,84%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan

- event* promosi di dalam negeri (*West Java Festival*)
Outcome kegiatan adalah meningkatnya promosi pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat melalui penyelenggaraan *event* promosi;
- (9) Kegiatan Partisipasi Dalam *Event* Promosi Pariwisata dan Kebudayaan di Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp197.924.960,00 atau setara dengan 98,96%. *Output* kegiatan adalah keikutsertaan pada *event* promosi dalam negeri yaitu: keikutsertaan pameran Majapahit Travel Fair (MTF) di Surabaya dan Gebyar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya promosi pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat melalui *event* promosi dalam negeri;
- (10) Kegiatan Familiarization Tour Pasar Nusantara, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.827.500,00 atau setara dengan 99,83%. *Output* kegiatan adalah *event* Familiarization Tour Pasar Nusantara di Pangandaran dan sekitarnya *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya promosi kawasan pariwisata di Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Nomadic Traveler, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.167.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.149.516.000,00 atau setara dengan 98,48%. *Output* kegiatan adalah Konsep Nomadic Traveller” sebagai portofolio pengembangan pemasaran pariwisata Jawa Barat. Sebanyak 7 (tujuh) orang perwakilan Tour Operator/Agency dan media potensial Malaysia yang ikut serta dalam keunikan Famtour dengan kendaraan roda 2 (dua) oleh seluruh peserta yang sesuai dengan kampanye “*Nomadic Traveller on Two Wheels*” menjelajahi keindahan alam dan budaya Pantai Selatan Jawa Barat dengan Tujuan untuk meningkatkan lama kunjungan di suatu wilayah dan mendorong investasi amenities, murah dan cepat di Majalengka, Nusantara Day di Sumedang dan *Internasional Paragliding* di Sumedang *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya promosi kawasan pariwisata di Jawa Barat;
- (12) Kegiatan Promosi dan Publikasi melalui Media Pasar Nusantara, yang dilaksanakan oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp197.600.000,00 atau setara dengan 98,80%. *Output* kegiatan adalah Promosi dan Publikasi melalui Media Pasar Nusantara melalui promosi melalui videotron di 4 kota yaitu Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan Makassar *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya informasi pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat pada media dalam negeri;

- (13) Kegiatan *Integrated Calendar of Event*, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.921.493.827,00 atau setara dengan 97,38%. *Output* kegiatan adalah penyusunan bersama *calendar of event* Jawa Barat, Pembuatan Aplikasi *Website* *smilingwestjava.event* dan *Launching Calender of Event* *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penyajian informasi *event-event* seni, budaya dan pariwisata;
- (14) Kegiatan *Smart Tourism Sistem Platform*, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.522.145.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.570.310.600,00 atau setara dengan 82,76%. *Output* 1. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi terpadu (SIRARU) *Smiling West Java* 2. Lomba Logo *Smiling West Java* 3. Penataan ruang dan pengadaan sarana prasarana MKK *Outcome* Meningkatnya promosi pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat melalui kegiatan *Smart Tourism Sistem Platform*.

c. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni ketersediaan data dan informasi sebesar 97,61% dari target 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan adalah sebesar Rp2.669.800.769,00 dengan realisasi sebesar Rp2.606.055.973,00 setara dengan 97,61%.

- (1) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan

- Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.998.046,00 dan realisasi sebesar Rp396.607.600,00 atau setara dengan 99,15%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data pariwisata dan budaya dalam angka Tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah terinformasikan data pariwisata, seni dan budaya Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan Program Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.969.989.956,00 dan realisasi sebesar Rp1.937.434.206,00 atau setara dengan 98,35%. *Output* kegiatan adalah dokumen rencana pembangunan pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data rencana pembangunan pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Pengelolaan Laporan Capaian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp122.444.600,00 atau setara dengan 81,63%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja berupa: RKA/DPA SKPD Rencana Kerja (RENJA) SKPD Draf LAKIP Disparbud Jabar Draf LKPJ Disparbud Jabar Draf LPPD Draf Perubahan RKA/DPPA RENSTRA OPD Pengadaan Berkas Pendukung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja dinas melalui penyediaan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas;
- (4) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Internal Dinas, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.812.767,00 dan realisasi sebesar Rp149.569.567,00 atau setara dengan 99,84%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja dinas melalui penyediaan dokumen pelaporan keuangan internal dinas dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yakni persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja sebesar 89,76% dari target 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp7.789.053.735,00 dengan realisasi sebesar Rp6.991.628.595,00 setara dengan 89,76%.

- (1) Kegiatan Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.775.363.467,00 dan realisasi sebesar Rp5.116.922.245,00 atau setara dengan 88,60%. *Output* kegiatan adalah Jasa Konsultasi Perencanaan Masjid Disparbud Pengadaan Komputer PC Pengadaan *printer* Pengadaan Dispenser dan Pembuatan Kanopi. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor yang memadai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Operasional Tim Ciletuh, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.994.524,00 dan realisasi sebesar Rp153.724.350,00 atau setara dengan 61,49%. *Output* kegiatan adalah operasional tim Ciletuh berupa rapat tim koordinasi dan tim operasional pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pendukung ciletuh sebagai Unesco Global Geopark;
- (3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Taman Budaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp562.619.000,00 atau setara dengan 93,77%. *Output* kegiatan adalah pengadaan Alat Studio, Rehab Teater Terbuka Taman Budaya, pengadaan Pompa Air, *Handycamp*, *Sound system* dan alat-alat komunikasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor yang memadai;
- (4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Museum Sri Baduga, yang dilaksanakan oleh

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.187.000,00 atau setara dengan 99,59%. *Output* kegiatan adalah perbaikan bangunan-bangunan di museum meliputi Ruang Laboratorium dan Tata Pamer di Museum Sri Baduga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana prasarana kantor yang memadai;
- (5) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Monumen Perjuangan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.745.000,00 atau setara dengan 99,37%. *Output* kegiatan adalah pengadaan Mesin Potong Rumput dan Perbaikan AC. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana prasarana kantor yang memadai;
- (6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Gedung Penyimpanan Ruang Koleksi Museum, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.568.000,00 atau setara dengan 99,57%. *Output* kegiatan adalah rehap ruang penyimpanan ruang koleksi museum. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana prasarana kantor yang memadai;
- (7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Gedung Indonesia Menggugat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.915.000,00 atau setara dengan 99,83%. *Output* kegiatan adalah pengadaan *Sound system*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana prasarana kantor yang memadai;
- (8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pondok Seni Pangandaran, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.935.000,00 atau setara dengan 99,47%. *Output* kegiatan adalah pengadaan pompa air, mebeulair dan tempat tidur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana prasarana kantor yang memadai;
- (9) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Rumentang Siang, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp199.228.000,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan adalah Rehab Gedung Rumentang Siang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana prasarana kantor yang memadai;
- (10) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di PPK, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp213.695.744,00 dan realisasi sebesar Rp212.785.000,00 atau setara dengan 99,57%. *Output* kegiatan adalah Rehab Gedung Pusat Pengelolaan Kebudayaan (PPK) *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana prasarana kantor yang memadai.

e. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yakni persentase tingkat pemenuhan operasional Perangkat daerah lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar 88,74% dari target 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp31.470.819.613,00 dengan realisasi sebesar Rp27.927.211.645,00 setara dengan 88,74%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.176.485.834,00 dan realisasi sebesar Rp1.014.030.834,00 atau setara dengan 86,19%. *Output* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan belanja ATK, honorarium instruktur olahraga, penceramah, sewa lapang olah raga, belanja pakaian dinas harian, belanja pakaian kerja, belanja pakaian batik tradisonal, belanja pakaian olahraga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan kesejahteraan aparatur;
- (2) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.659.999.103,00 dan realisasi sebesar Rp1.191.622.050,00 atau setara dengan 71,78%. *Output* kegiatan adalah pembinaan wawasan

- aparatur di bidang kepariwisataan dan kebudayaan wawasan jafung angka kredit penanaman sikap dan mental disiplin serta jiwa korsa. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan kesejahteraan aparatur;
- (3) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp933.458.330,00 dan realisasi sebesar Rp794.779.450,00 atau setara dengan 85,14%. *Output* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan belanja ATK dan penggandaan/fotokopi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (4) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja nonpegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.672.538.328,00 dan realisasi sebesar Rp1.144.720.779,00 atau setara dengan 42,83%. *Output* kegiatan adalah penyediaan surat kabar, faksimile, internet, iuran wajib tahunan, langganan TV berbayar, jasa tenaga kerja nonpegawai, belanja jasa keamanan, pengemudi, FO pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (5) Kegiatan Penyediaan Sewa dan Dokumentasi Kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp501.670.000,00 dan realisasi sebesar Rp384.561.000,00 atau setara dengan 76,66%. *Output* kegiatan adalah Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Sewa tenda/stand pameran/panggung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.514.311.870,00 dan realisasi sebesar Rp2.507.908.874,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah belanja makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu dan belanja minuman air mineral/gallon. *Outcome*

- kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (7) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp717.988.000,00 dan realisasi sebesar Rp312.921.884,00 atau setara dengan 43,58%. *Output* kegiatan adalah belanja alat-alat listrik dan elektronik dan langganan telepon dan listrik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (8) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.549.993.877,00 dan realisasi sebesar Rp1.520.675.508,00 atau setara dengan 98,11%. *Output* kegiatan adalah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja jasa kebersihan/pramu bakti, jasa keamanan/pengemudi/FO, belanja pakaian tenaga kebersihan dan pakaian satpam. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (9) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp889.912.036,00 dan realisasi sebesar Rp886.398.782,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan adalah belanja bahan bakar minyak (Pertamax), perpanjangan STNK kendaraan dinas roda empat dan dua dan perawatan kendaraan dinas roda empat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (10) Kegiatan Pemeliharaan Perabot, Fasilitas dan Gedung kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.650.670.195,00 dan realisasi sebesar Rp2.568.117.712,00 atau setara dengan 96,89%. *Output* kegiatan adalah belanja pemeliharaan penataan taman, perencanaan atap gedung eks gallery, atap gedung kantor, penataan ruang kebudayaan, penataan ruang keuangan,

- pengaspalan tempat parkir, pemeliharaan *computer*, laptop dan *printer*, pemeliharaan AC, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan alat rumah tangga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (11) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp452.975.000,00 dan realisasi sebesar Rp400.930.000,00 atau setara dengan 88,51%. *Output* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan belanja ATK, honorarium instruktur olahraga, penceramah, sewa lapang olah raga, belanja pakaian dinas harian, belanja pakaian kerja, belanja pakaian batik tradisonal, belanja pakaian olahraga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan kesejahteraan aparatur;
- (12) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp86.500.000,00 atau setara dengan 57,67%. *Output* kegiatan adalah penanaman sikap dan mental disiplin serta jiwa korsa dalam bentuk outbond, bimtek dan diklat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan kesejahteraan aparatur;
- (13) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.264.278.719,00 atau setara dengan 93,65%. *Output* kegiatan adalah belanja alat-alat listrik dan elektronik, langganan gas, air, telepon, listrik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (14) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp6.285.740.175,00 dan realisasi sebesar Rp6.282.121.950,00 atau setara dengan 99,94%. *Output* kegiatan adalah Belanja Peralatan

- Kebersihan dan bahan Pembersih Belanja Jasa Kebersihan/Pramu Bakti, Jasa Keamanan/Pengemudi/FO, Belanja Pakaian Tenaga Kebersihan, Pakaian Satpam, petugas taman dan terpeliharanya sarana dan prasarana *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (15) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp237.538.000,00 dan realisasi sebesar Rp228.963.376,00 atau setara dengan 96,39%. *Output* kegiatan adalah perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4, 3 dan 2 dan perawatan kendaraan dinas roda 4, 3 dan 2. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (16) Kegiatan Pemeliharaan Perabot, Fasilitas dan Gedung kantor pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.319.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.308.240.700,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah belanja pemeliharaan alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, gedung kantor, jalan, instalasi air bersih, jaringan listrik dan pemeliharaan pagar teater terbuka, pagar Monju, pagar Museum Sri Baduga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (17) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai kantor pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp946.771.725,00 dan realisasi sebesar Rp881.840.826,00 atau setara dengan 93,14%. *Output* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan belanja atk, cendera mata, buku agenda kegiatan, tiket museum dan penggandaan/fotokopi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (18) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Nonpegawai pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.307.127.140,00 dan realisasi sebesar

- Rp3.089.852.360,00 atau setara dengan 93,43%. *Output* kegiatan adalah penyediaan surat kabar, faximile, internet, iuran wajib tahunan, langganan TV berbayar, Jasa tenaga kerja nonpegawai, belanja jasa keamanan, pengemudi, FO, Pakaian kerja lapangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (19) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.086.140.000,00 dan realisasi sebesar Rp990.746.841,00 atau setara dengan 91,22%. *Output* kegiatan adalah belanja makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu dan belanja minuman air mineral/gallon. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor;
- (20) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi kantor pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp68.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah penyediaan belanja sewa, publikasi dan dokumentasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan operasional kantor.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Pariwisata

a. Permasalahan

- (1) Masih terbatasnya ragam atraksi wisata untuk mendorong peningkatan lama kunjungan wisatawan;
- (2) Masih terbatasnya infrastruktur penunjang atraksi wisata dalam wilayah destinasi;
- (3) Masih terbatasnya infrastruktur aksesibilitas ke destinasi wisata yang memiliki waktu tempuh sesuai batas toleransi wisatawan;
- (4) Masih terbatasnya sarana amenities di destinasi wisata yang dapat menunjang peningkatan kenyamanan, keamanan dan pengeluaran wisatawan;
- (5) Masih perlu ditingkatkannya pengarusutamaan Pariwisata kepada Pemerintah lokal dan masyarakat;

- (6) Belum presisinya analisa segmentasi Pasar yang potensial menjadi *captive market* pariwisata Jawa Barat;
- (7) Belum teridentifikasinya event-event reguler Pariwisata di Jabar yang mendorong penciptaan *Calendar of Event*;
- (8) Belum teridentifikasinya keterkaitan tematik dan geografis antar destinasi wisata yang mendukung penciptaan jalur wisata multi destinasi;
- (9) Masih terbatasnya akses calon wisatawan terhadap paket-paket wisata di Jawa Barat Masih perlu ditingkatkannya dampak promosi terhadap pendapatan terhadap sektor Pariwisata.

b. Solusi

- (1) Rehabilitasi dan rekonstruksi atraksi seni budaya, serta peningkatan keragaman atraksi dari aktivitas olahraga dan keseharian masyarakat sekitar;
- (2) Program pengembangan pariwisata tipe 1 dan 2;
- (3) Peningkatan akses infrastruktur transportasi dan perhubungan ke destinasi wisata, khususnya dari bandara terdekat;
- (4) Pengembangan fasilitas penunjang wisatawan dari sektor kesehatan (klinik/puskesmas), keamanan, perdagangan (*souvenir center*), akomodasi (*hotel/homestay*) serta makan-minum (*resto/warung makan*);
- (5) Peningkatan intensitas dan *coverage* sosialisasi sapta pesona, serta pengembangan sekolah vokasi pariwisata;
- (6) Penelaahan market demand pariwisata secara berkala;
- (7) Peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk identifikasi *event* reguler pariwisata dan penyusunan *calendar of event*;
- (8) Peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam identifikasi keterkaitan tematik dan geografis destinasi untuk mendukung penciptaan paket wisata multi destinasi;
- (9) Pembuatan *smart digital tourism platform*;
- (10) Peningkatan presisi promosi pariwisata dengan memperhatikan hasil analisa pasar dan paket wisata multi destinasi;

27. Urusan Pertanian

Capaian Indikator Kinerja Daerah terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pertanian tahun 2019 adalah Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dengan realisasi sebesar 110,68 poin dari target yang ditetapkan sebesar 113,11 poin. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura yakni jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan capaian sebesar 13.393.076 Ton dari target sebesar 12.454.406 Ton. Alokasi anggaran Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebesar Rp91.808.610.749,00 dengan realisasi sebesar Rp87.997.336.667,00 atau setara dengan 95,85%.

- (1) Kegiatan Perbanyak Benih Dasar Padi di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp40.000.000,00 realisasi sebesar Rp39.967.940,00 atau setara dengan 99,92%. *Output* kegiatan adalah kontribusi kebutuhan benih padi Jawa Barat 57%. *Outcome* kegiatan adalah perbanyak benih dasar padi 2 hektar;
- (2) Kegiatan Perbanyak Benih Pokok Padi di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp420.000.000,00 realisasi sebesar Rp418.556.840,00 atau setara dengan 99,66%. *Output* kegiatan adalah kontribusi kebutuhan benih padi Jawa Barat 57%. *Outcome* kegiatan adalah perbanyak benih pokok padi 100 hektar;
- (3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp5.536.422.750,00 realisasi sebesar Rp4.871.328.000,00 atau setara dengan 87,99%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas manajerial kelembagaan penyuluhan kecamatan dan kelembagaan petani 772 unit (50%). *Outcome* kegiatan adalah jumlah kelembagaan

- penyuluhan kecamatan dan kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitas manajerialnya 200 unit;
- (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp3.100.029.420,00 realisasi sebesar Rp2.935.506.531,00 atau setara dengan 94,69%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ketenagakerjaan penyuluhan pertanian dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan, kompetensi penyuluh sebagai fasilitator/penyuluh juara. *Outcome* kegiatan adalah jumlah wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang dibina oleh penyuluh pertanian dalam menerapkan adaptasi teknologi spesifik lokalita berdasarkan program penyuluhan pertanian 270 poktan dan jumlah sistem aplikasi smartmobile yang menyediakan kebutuhan sarana produksi, pupuk, benih, Alsintan, pembiayaan, informasi harga, pemasaran online, dan informasi teknologi 1 paket;
 - (5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan Penyuluh Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp36.360.211.392,00 realisasi sebesar Rp35.227.091.639,00 atau setara dengan 96,88%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ketenagakerjaan penyuluhan pertanian dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan. *Outcome* kegiatan adalah penyuluh yang melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap 1.000 orang petani dan pemanfaatan *smart mobile* dan berbagai media sosial sebagai media pembinaan penyuluhan komunitas 3.708 orang;
 - (6) Kegiatan Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian ke 47 Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp749.999.882,00 realisasi sebesar Rp746.622.500,00 atau setara dengan 99,55%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya wawasan dan kapasitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke 47 tingkat Provinsi Jawa Barat 750 orang;
 - (7) Kegiatan Perbanyak Benih Kentang di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Kentang Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.495.999.885,00

realisasi sebesar Rp1.480.449.769,00 atau setara dengan 98,96%. *Output* kegiatan adalah tersedianya benih penjenis 420.000 knol. *Outcome* kegiatan adalah perbanyak benih kentang penjenis, dasar dan pokok 23 unit;

- (8) Kegiatan Perbanyak Benih Sumber Jagung di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp140.000.000,00 realisasi sebesar Rp139.935.550,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah kontribusi penyediaan benih jagung di Jawa Barat 51%. *Outcome* kegiatan adalah perbanyak benih sumber jagung kelas benih dasar dan kelas benih pokok 3 ton;
- (9) Kegiatan Perbanyak Benih Sumber Kegiatan Kedelai di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp335.000.000,00 realisasi sebesar Rp334.566.080,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* kegiatan adalah kontribusi penyediaan benih kedelai di Jawa Barat 21 hektar. *Outcome* kegiatan adalah perbanyak benih sumber kedelai kelas Benih Dasar (BD) dan kelas Benih Pokok 5 ton;
- (10) Kegiatan Perbanyak Benih Sumber Kacang Hijau di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi sebesar Rp199.907.480,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah kontribusi penyediaan benih kacang hijau di Jawa Barat 100%. *Outcome* kegiatan adalah perbanyak benih sumber kacang hijau kelas Benih Dasar dan kelas Benih Pokok 6 ton;
- (11) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Hortikultura di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.286.867.923,00 realisasi sebesar Rp1.225.154.426,00 atau setara dengan 95,20%. *Output* kegiatan adalah peningkatan produksi komoditas hortikultura 100%. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan produksi tanaman hortikultura melalui sistem pengaturan pola tanam dan teknologi *out off season* 300 kebun/lahan usaha;
- (12) Kegiatan Pengembangan Inovasi Teknologi Konservasi Lahan Berbasis Tanaman Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp742.216.165,00 realisasi sebesar Rp716.183.834,00 atau setara dengan 96,49%. *Output* kegiatan adalah perbaikan konservasi lahan sayuran melalui teknologi tumpang sari tanaman buah tahunan 8 hektar. *Outcome* kegiatan adalah penerapan teknologi konservasi melalui teknologi tumpang sari sayuran dan tanaman buah 8 hektar;

- (13) Kegiatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura Berkelanjutan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp5.954.006.996,00 realisasi sebesar Rp5.328.051.521,00 atau setara dengan 89,49%. *Output* kegiatan adalah teregistrasinya kebun/lahan usaha tanaman hortikultura yang telah menerapkan Good Agriculture Practice (GAP)/Standard Operation Procedure (SOP) 4 kegiatan, tercapainya peningkatan produktivitas tanaman hortikultura 1,5%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kebun/lahan usaha yang melaksanakan *Good Agriculture Practice* (GAP) 200 kebun/lahan usaha, kawasan pengembangan budidaya tanaman unggulan hortikultura dengan teknologi terbaru 200 hektar;
- (14) Kegiatan Gerakan Tanam/Panen Komoditas Padi yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp670.741.479,00 realisasi sebesar Rp654.234.150,00 atau setara dengan 97,54%. *Output* kegiatan adalah tercapainya luas tanam padi tahun 2019 2.090.131 hektar. *Outcome* kegiatan adalah gerakan tanam/panen komoditas padi 1.000 hektar;
- (15) Kegiatan Peningkatan Daya Saing dan Mutu Tanaman Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.141.951.831,00 realisasi sebesar Rp1.110.628.106,00 atau setara dengan 97,26%. *Output* kegiatan adalah dokumen sistem jaminan mutu 61 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah jumlah kelompok yang menerapkan sistem jaminan mutu produk hortikultura 58 kelompok;
- (16) Kegiatan Gerakan Tanam/Panen Komoditas Jagung yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp246.221.300,00 realisasi sebesar Rp233.709.500,00 atau setara dengan 94,92%. *Output* kegiatan adalah tercapainya luas tanam jagung tahun 2019 167.485 hektar. *Outcome* kegiatan adalah gerakan tanam/panen komoditas jagung 100 hektar;

- (17) Kegiatan Pengembangan Penerapan Teknologi Budidaya Padi di Kawasan Geopark Ciletuh-CLTH yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp499.992.910,00 realisasi sebesar Rp424.151.525,00 atau setara dengan 84,83%. *Output* kegiatan adalah tercapainya produksi padi di kawasan Ciletuh 230 ton. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan produktivitas padi di kawasan Ciletuh 5 kuintal/hektar;
- (18) Kegiatan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp4.446.818.750,00 realisasi sebesar Rp4.445.326.750,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah pengamanan luas pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman hortikultura, pengamanan luas pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman pangan 95%. *Outcome* kegiatan adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 5.000 hektar;
- (19) Kegiatan Operasional Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp12.138.643.120,00 realisasi sebesar Rp12.138.643.120,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pengamanan luas pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman hortikultura, pengamanan luas pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman pangan 95%. *Outcome* kegiatan adalah operasional tenaga teknis nonpegawai Negeri Sipil (PNS) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) 387 orang;
- (20) Kegiatan Ketersediaan Benih Hortikultura di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp499.025.000,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah pemenuhan ketersediaan benih buah-buahan dan benih sumber buah-buahan 100%. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan benih buah-buahan dan benih sumber buah-buahan 8.000 pohon;
- (21) Kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Buah- Buahan di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa

Barat, dengan anggaran sebesar Rp834.100.000,00 realisasi sebesar Rp832.332.500,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya pohon induk buah-buahan 100%. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan pohon induk buah-buahan 5.137 pohon;

- (22) Kegiatan Perbanyak dan Pemeliharaan Benih Buah-Buahan dan Tanaman Obat di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.020.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.018.791.700,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah tersedianya benih buah-buahan dan benih pisang hasil kultur jaringan 15.000 pohon, 500 polybag,00 4.000 kilogram,00 2.500 kilogram. *Outcome* kegiatan adalah perbanyak benih buah-buahan 15.000 pohon, perbanyak benih pisang (kultur jaringan) 100 botol, perbanyak benih tanaman obat 500 kilogram;
- (23) Kegiatan Gerakan Tanam/Panen Aneka Kacang dan Ubi yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp499.982.722,00 realisasi sebesar Rp495.491.831,00 atau setara dengan 99,10%. *Output* kegiatan adalah tercapainya luas tanam aneka kacang dan ubi tahun 2019 224.249 hektar. *Outcome* kegiatan adalah gerakan tanam/panen komoditas aneka kacang dan ubi 400 hektar;
- (24) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp490.807.250,00 atau setara dengan 98,16%. *Output* kegiatan adalah terlayannya permohonan sertifikasi benih tanaman pangan di Jawa Barat 3.220 hektar. *Outcome* kegiatan adalah sertifikasi benih tanaman pangan di Jawa Barat 250 unit;
- (25) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp499.999.788,00 realisasi sebesar Rp499.953.750,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah terlayannya permohonan sertifikasi/pemurnian benih tanaman hortikultura di Jawa Barat 65%. *Outcome* kegiatan

- adalah sertifikasi/pemurnian benih tanaman hortikultura di Jawa Barat 200 unit;
- (26) Kegiatan Penilaian Kultivar Tanaman Hortikultura di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp149.999.865,00 realisasi sebesar Rp141.777.300,00 atau setara dengan 94,52%. *Output* kegiatan adalah teridentifikasinya karakteristik tanaman hortikultura varietas unggul daerah 40%. *Outcome* kegiatan adalah observasi/pendaftaran varietas unggul daerah komoditas tanaman hortikultura 4 unit;
- (27) Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp179.999.970,00 realisasi sebesar Rp179.914.800,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah terjaminnya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar di Jawa Barat 55%. *Outcome* kegiatan adalah pengawasan peredaran benih tanaman hortikultura di Jawa Barat 220 unit;
- (28) Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp244.600.000,00 realisasi sebesar Rp231.490.550,00 atau setara dengan 94,64%. *Output* kegiatan adalah terjaminnya mutu benih tanaman pangan yang beredar di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah pengawasan peredaran benih tanaman pangan di Jawa Barat 250 unit;
- (29) Kegiatan Penilaian Kultivar Tanaman Pangan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp212.749.809,00 realisasi sebesar Rp212.488.150,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah teridentifikasinya karakteristik varietas unggul daerah dan kesamaan pemahaman terhadap karakteristik morfologi tanaman pangan 40%. *Outcome* kegiatan adalah observasi varietas unggul daerah dan pengenalan karakteristik tanaman pangan 2 calon varietas;
- (30) Kegiatan Pengelolaan Alokasi Pupuk Bersubsidi yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran

sebesar Rp299.969.550,00 realisasi sebesar Rp289.160.150,00 atau setara dengan 96,40%. *Output* kegiatan adalah alokasi pupuk bersubsidi kabupaten dan kota 100%. *Outcome* kegiatan adalah surat keputusan gubernur tentang alokasi pupuk bersubsidi 1 dokumen;

- (31) Kegiatan Pengelolaan Pembiayaan Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 realisasi sebesar Rp297.255.150,00 atau setara dengan 99,09%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan pengelolaan pembiayaan pertanian melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), kredit program dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM-A); terlaksananya pemberdayaan pengelolaan pembiayaan, pertanian melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), kredit program dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM-A). *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya rapat kegiatan pembiayaan dan tersusunnya 1 (satu) dokumen, evaluasi pelaksanaan kegiatan pembiayaan, tersosialisasikannya program Asuransi Usaha Tani Padi tahun 2019, terlaksananya rapat koordinasi dan tersusunnya 1 (satu) dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi, terlaksananya percepatan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi pada pelaksanaan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi, tersosialisasikannya dan koordinasi kegiatan kredit program, terlaksananya pemberdayaan dan penguatan bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM-A) Jawa Barat, terlaksananya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku pertanian di Jawa Barat;
- (32) Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Alsintan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp199.976.212,00 realisasi sebesar Rp198.778.800,00 atau setara dengan 99,40%. *Output* kegiatan adalah basis data alsintan kabupaten dan kota 100%. *Outcome* kegiatan adalah basis data alsintan kabupaten dan kota 1 dokumen;
- (33) Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Air dan Lahan Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp487.371.689,00 realisasi sebesar Rp366.952.440,00 atau setara dengan 75,29%. *Output* kegiatan adalah basis data lahan baku sawah, bahan penyusunan peraturan gubernur pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis pertanian 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah pemetaan lahan baku sawah 1

- dokumen, rencana induk pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis pertanian 1 dokumen;
- (34) Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian dalam Mendukung Pajale dan Hortikultura di Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Pengembangan (UPTD BP) Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.505.452.835,00 realisasi sebesar Rp1.497.021.050,00 atau setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah tersedianya pengembangan alat mesin tepat guna 100%. *Outcome* kegiatan adalah rancang bangun alat dan mesin pertanian 9 unit;
- (35) Kegiatan Pengujian dan Adaptasi Mutu Alsintan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Pengembangan (UPTD BP) Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp169.743.129,00 realisasi sebesar Rp162.905.995,00 atau setara dengan 95,97%. *Output* kegiatan adalah tersedianya hasil pengujian Alsintan (*test report* dan rekomendasi) 100%. *Outcome* kegiatan adalah pengujian dan pengawasan alat mesin pertanian 23 unit;
- (36) Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp499.999.920,00 realisasi sebesar Rp476.070.290,00 atau setara dengan 95,21%. *Output* kegiatan adalah menurunnya tingkat kehilangan hasil tanaman pangan 12%. *Outcome* kegiatan adalah penurunan tingkat kehilangan hasil tanaman pangan 1 kegiatan;
- (37) Kegiatan Perbanyak Benih Tanaman Sayuran dan Hias di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp499.869.000,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah tersedianya benih tanaman sayuran dan hias 100%. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan benih tanaman sayuran dan hias 25.080 pohon/botol;
- (38) Kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Hias dan Anggrek di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp399.962.500,00 realisasi sebesar Rp399.820.500,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya pohon induk tanaman hias dan anggrek 100%. *Outcome* kegiatan adalah

pemeliharaan pohon induk tanaman hias dan anggrek 38.883 pohon;

- (39) Kegiatan Bimbingan Teknis Penangkar Benih Hortikultura Jawa Barat di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp199.585.000,00 realisasi sebesar Rp195.509.200,00 atau setara dengan 97,96%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan penangkar benih hortikultura di Jawa Barat 100%. *Outcome* kegiatan adalah bimtek penangkar benih hortikultura 60 orang;
- (40) Kegiatan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.499.992.550,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan sumber daya manusia pertanian dalam bidang 1) Perluasan Tambah Tanam (PTT) kedelai, 2) Pertanian Padi Organik, 3) Pengelolaan Alsintan, 4) *Good Agriculture Practice (GAP)* buah-buahan, 5) *Good Agriculture Practice (GAP)* Sayuran, 6) Kewirausahaan Agribisnis, 7) Metodologi Penyuluhan, 8) Manajemen Agribisnis, 9) Teknologi Pengolahan Hasil 100%. *Outcome* kegiatan adalah pelatihan pertanian bagi penyuluh pertanian dan petani 600 orang;
- (41) Kegiatan Pencetakan Wirausahawan Baru Jawa Barat di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.499.998.480,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi wirausaha baru dalam pertanian organik berbasis kewirausahaan agribisnis 100%. *Outcome* kegiatan adalah pelatihan pemantapan wirausaha baru Jawa Barat 480 orang;
- (42) Kegiatan Ketersediaan Benih Tanaman Sayuran dan Hias di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp349.999.970,00 realisasi sebesar Rp344.399.970,00 atau setara dengan 98,40%. *Output* kegiatan adalah tersedianya benih tanaman sayuran dan hias 100%.

Outcome kegiatan adalah penyediaan tanaman sayuran dan hias 20.300 pohon;

- (43) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Percontohan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp2.499.994.223,00 realisasi sebesar Rp1.749.192.650,00 atau setara dengan 69,97%. *Output* kegiatan adalah peningkatan produktivitas tanaman pangan di kawasan pengembangan budidaya tanaman pangan unggul dengan teknologi terbaru 7 kuintal/hektar. *Outcome* kegiatan adalah kawasan pengembangan budidaya tanaman pangan unggul dengan teknologi terbaru 2 unit;
- (44) Kegiatan Percepatan Penyebaran Benih Kentang Varietas Unggul Baru (Dayang Sumbi/Sangkuriang) di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp249.999.764,00 realisasi sebesar Rp248.322.350,00 atau setara dengan 99,33%. *Output* kegiatan adalah tersedianya benih kentang kelas G 2 100%. *Outcome* kegiatan adalah perbanyakan benih dasar kentang 7.500 kilogram.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Capaian Indikator Kinerja Program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah jumlah/jenis dokumen keuangan (neraca, laporan aset, laporan bulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun) 2,5% dari target sebesar 2,5%. Alokasi anggaran program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebesar Rp2.799.999.464,00 dengan realisasi sebesar Rp2.513.696.834,00 atau setara dengan 89,77%.

- (1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp749.999.672,00 realisasi sebesar Rp479.639.266,00 atau setara dengan 63,95%. *Output* kegiatan adalah kesesuaian perencanaan dan evaluasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan implementasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah jumlah/jenis dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 6 dokumen;

- (2) Kegiatan Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp 99.999.960,00 realisasi sebesar Rp99.999.960,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah kesesuaian dokumen evaluasi (LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan) dengan implementasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah jumlah/jenis dokumen evaluasi/pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan di tahun berikutnya 4 dokumen;
- (3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp249.999.990,00 realisasi sebesar Rp245.181.716,00 atau setara dengan 98,07%. *Output* kegiatan adalah kesesuaian penyusunan perencanaan (RKA, DPA, DPPA, Renja Dinas) dengan implementasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah jumlah/jenis dokumen penyusunan perencanaan (RKA, DPA, DPPA, Renja Dinas) 4 dokumen;
- (4) Kegiatan Pengolahan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.199.999.842,00 realisasi sebesar Rp1.189.041.342,00 atau setara dengan 99,09%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura 100%. *Outcome* kegiatan adalah jumlah/jenis dokumen data statistik tanaman pangan dan hortikultura 17 dokumen;
- (5) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp499.834.550,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah kesesuaian laporan keuangan (neraca, laporan aset, laporan bulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun) dengan implementasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah jumlah/jenis dokumen keuangan (neraca, laporan aset, laporan bulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun) 127 dokumen.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Capaian Indikator Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 100%. Alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp15.566.343.257,00 dengan realisasi sebesar Rp15.090.195.038,00 atau setara dengan 96,94%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp349.548.368,00 realisasi sebesar Rp348.637.500,00 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan *pipe house* dalam mendukung produksi benih kentang 100%. *Outcome* kegiatan adalah pengadaan *pipe house* 2 unit, pembuatan bak sterilisasi di *screen house* b 2 unit, pembuatan bak sterilisasi di *screen house* a 1 unit, pengadaan mesin fax 1 unit, proyektor 1 unit, *printer portable* 1 unit, notebook/laptop 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit;
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.298.665.080,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi balai pelatihan 100%. *Outcome* kegiatan adalah renovasi guest house 1 unit, renovasi ruang *laundry* asrama Cisadane 1 unit, renovasi toilet dan kusen asrama peserta pelatihan Cisadane 1 unit, renovasi toilet dan kusen asrama peserta pelatihan Pandanwangi 1 unit, bangunan rumah dinas per-m² tipe a 1 unit, renovasi ruang kantor dan dharma wanita di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Badan Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BAPELTAN) 1 unit, renovasi interior ruang kerja 1 unit, pemasangan CCTV 2 unit;
- (3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp3.412.500.740,00 realisasi sebesar Rp3.369.901.100,00 atau setara dengan 98,75%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan

prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi Distanhor 100%. *Outcome* kegiatan adalah penangkal petir radius 150 meter 30 titik, kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) 1 unit, rumah dinas Tasikmalaya 1 unit, rumah dinas Rancasawo 1 unit, rumah dinas Purwakarta 1 unit, pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 2 unit, pekerjaan pasang layar dan proyektor 4 titik, pengadaan *sound system* 5 kegiatan, pengadaan kamera 4 unit, pekerjaan lampu *downlight* 59 titik, ups 25 unit, pengadaan *printer* 22 unit, *notebook/laptop processor i7* 9 unit, pc desktop processor i7 20 unit, mesin tik manual 12 unit;

- (4) Kegiatan Pembangunan, Perbaikan dan Penyediaan Sarana pendukung di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija (DAK Bidang Pertanian) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp5.179.872.170,00 realisasi sebesar Rp4.873.524.799,00 atau setara dengan 94,09%. *Output* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana UPTD balai benih padi dan palawija 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah pembuatan kanopi lantai jemur di balai benih padi dan palawija 1 unit, pembuatan pagar Cianjur di balai benih padi dan palawija satuan pelayanan Cibeber 1 unit, pembuatan pagar di balai benih padi dan palawija satuan pelayanan Cibeber Cianjur 1 unit, pembuatan pagar keliling kebun dan kantor di balai benih padi dan palawija 1 unit, pembuatan tempat parkir di balai benih padi dan palawija 1 unit, pembangunan kantor balai benih padi dan palawija 1 unit, pembuatan gudang benih padi di balai benih padi dan palawija satuan pelayanan Cibeber 1 unit, pembuatan rumah dinas di balai benih padi dan palawija 1 unit, pembuatan rumah dinas di balai benih padi dan palawija sub unit pengembangan benih padi Kawalu Tasikmalaya 1 unit, pembuatan sumur air dalam di balai benih padi dan palawija 1 unit, pembuatan sumur air dalam di balai benih padi dan palawija di satuan pelayanan Plumbon Cirebon 1 unit, pembuatan jaringan irigasi tersier di balai benih padi dan palawija 1 unit, pembuatan kirmir saluran air di balai benih padi dan palawija 1 unit, pemeliharaan rumah dinas di balai benih padi dan palawija 2 unit, pemeliharaan rumah dinas satuan pelayanan balai benih padi dan palawija Kawalu 2 unit;
- (5) Kegiatan Pembangunan, Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung di Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH) (DAK Bidang Pertanian) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.118.057.408,00 realisasi sebesar Rp1.118.057.408,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pembuatan gudang satuan pelayanan pembuatan kantor dan gudang kantor brigade, pembangunan benteng kantor, pembangunan kanopi kantor, rehabilitasi kantor Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH), pengadaan kendaraan operasional roda 2, pengadaan alat laboratorium 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah pembangunan gudang brigade 1 unit, pembangunan gudang satuan pelayanan 3 unit;

- (6) Kegiatan Pembangunan, Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian (DAK Bidang Pertanian) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp2.875.154.552,00 realisasi sebesar Rp2.769.155.251,00 atau setara dengan 96,31%. *Output* kegiatan adalah tersedianya bangunan, pemeliharaan taman, jalan, laboratorium pengujian, peralatan perbengkelan, *workshop* Alsintan, peralatan pengujian 10 paket. *Outcome* kegiatan adalah tempat parkir di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan (BP) Mekanisasi Pertanian 1 unit, alat-alat studio, kamera CCTV di balai mekanisasi pertanian 1 paket, alat-alat studio, kamera CCTV di balai mekanisasi pertanian, 1 paket rak buku 6 buah, sofa 12 buah, kursi rapat 45 buah, kursi, meja kerja 20 buah, kursi meja pejabat 6 buah, filing kabinet 12 buah, peralatan perbengkelan di Balai Mekanisasi Pertanian 4 buah, kendaraan operasional roda 2 (dua) di Balai Mekanisasi Pertanian 15 unit, rehab *showroom* di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan (BP) Mekanisasi Pertanian 1 unit, rehab laboratorium pengujian di Balai Mekanisasi Pertanian 1 unit, rehab kantor satuan pelayanan padaherang Balai Mekanisasi Pertanian 1 unit, rehab bangunan Rice Milling Unit (RMU) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan (BP) Mekanisasi Pertanian 1 unit, bangunan *workshop* mesin pertanian di Balai Mekanisasi Pertanian 1 unit;
- (7) Kegiatan Pembangunan Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (DAK Bidang Pertanian) yang dilaksanakan Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp191.461.000,00 realisasi sebesar Rp191.461.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi honorarium pengadaan barang dan jasa, penyediaan konstruksi/pembelian bangunan, penyediaan alat - alat laboratorium, penyediaan alat alat angkutan darat bermotor, penyediaan perlengkapan kantor, komputer, meubel, air dan penghias ruangan rumah tangga 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pengadaan konstruksi fisik pagar/benteng gedung kantor satuan pelayanan BPSBTPH wilayah IV Majalengka 1 unit;

- (8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.139.749.019,00 realisasi sebesar Rp1.120.792.900,00 atau setara dengan 98,34%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran di UPTD Balai Benih Hortikultura. *Outcome* kegiatan adalah fasilitasi honorarium pengadaan barang dan jasa, plastik embung, jasa perencanaan pemeliharaan bangunan kantor Balai Benih Hortikultura (BBH), jasa pengawasan pemeliharaan bangunan kantor Balai Benih Hortikultura (BBH), pemeliharaan bangunan kantor 1 unit, pengadaan mesin pemotong rumput 9 unit, pengadaan power sprayer 10 unit, pengadaan pompa air 8 unit, pengadaan *printer* portable 3 unit, pengadaan meja kerja pimpinan 4 unit, pengadaan kursi kerja pimpinan 4 unit, pengadaan kursi tamu 2 unit, . pengadaan *sound system* 4 unit, pengadaan smartphone 10 buah, pengadaan radio HT 19 unit, lampu hias jalan 9 unit, pembangunan kirmir di Balai Benih Hortikultura (BBH) 1 unit, pembangunan tempat parkir di Balai Benih Hortikultura (BBH) 1 unit.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Capaian Indikator Kinerja Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup dinas tanaman pangan dan hortikultura 70% dari target sebesar 70%. Alokasi anggaran adalah sebesar Rp25.101.909.527,00 dengan realisasi sebesar Rp24.454.036.861,00 atau setara dengan 97,42%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di UPTD Balai Benih Kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp450.000.000,00 realisasi sebesar Rp450.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan jasa kebersihan, keamanan kantor, tenaga kerja nonpegawai 12 bulan;
- (2) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Balai Benih Kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp174.999.650,00 realisasi sebesar Rp166.900.313,00 atau setara dengan 95,37%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas 25 unit;
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Balai Benih Kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp199.890.000,00 realisasi sebesar Rp198.741.000,00 atau setara dengan 99,43%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan;
- (4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Balai Benih Kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp19.999.562,00 realisasi sebesar 19.999.562,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan;
- (5) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp192.865.000,00 realisasi sebesar Rp187.068.798,00 atau setara dengan 96,99%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan;

- (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Balai Benih Kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp149.996.250,00 realisasi sebesar Rp147.516.126,00 atau setara dengan 98,35%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan;
- (7) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 realisasi sebesar Rp69.997.740,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan;
- (8) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi sebesar Rp198.038.750,00 atau setara dengan 99,02%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan;
- (9) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp40.000.000,00 realisasi sebesar Rp39.997.500,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 12 bulan;
- (10) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran

sebesar Rp950.000.000,00 realisasi sebesar Rp949.999.039,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan;

- (11) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp335.000.000,00 realisasi sebesar Rp332.489.258,00 atau setara dengan 99,25%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan;
- (12) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.035.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.030.947.835,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan;
- (13) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp123.000.000,00 realisasi sebesar Rp113.768.500,00 atau setara dengan 92,49%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100 persen. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kegiatan dan kebutuhan rohani dan sarana prasarana olahraga serta pakaian dinas 59 orang;
- (14) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Jasa Tenaga Teknis serta Pakaian Aparatur di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 realisasi sebesar Rp244.380.000,00 atau setara dengan 97,75%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kegiatan dan kebutuhan rohani dan sarana prasarana olahraga serta pakaian dinas 56 orang;
- (15) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur di Balai Benih Hortikultura yang

- dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp7.500.000,00 realisasi sebesar Rp7.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya biaya bimbingan teknis, diklat dan kursus singkat 1 tahun;
- (16) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp62.000.000,00 realisasi sebesar Rp785.000,00 atau setara dengan 99,65%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan alat-alat pendukung fasilitas kantor 12 bulan;
- (17) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Teknis, Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.890.400.000,00 realisasi sebesar Rp1.884.900.000,00 atau setara dengan 99,71%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan jasa kebersihan, keamanan kantor, tenaga kerja nonpegawai 12 bulan;
- (18) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp432.995.000,00 realisasi sebesar Rp417.612.500,00 atau setara dengan 96,45%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan;
- (19) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp526.500.000,00 realisasi sebesar Rp505.108.400,00 atau setara dengan 95,94%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan;
- (20) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur di Balai Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan

anggaran sebesar Rp365.200.000,00 realisasi sebesar Rp361.945.000,00 atau setara dengan 99,11%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kegiatan dan kebutuhan rohani dan sarana prasarana olahraga serta pakaian dinas 260 orang;

- (21) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp63.000.000,00 realisasi sebesar Rp63.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan alat-alat pendukung fasilitas kantor 12 bulan;
- (22) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp312.975.478,00 realisasi sebesar Rp312.210.000,00 atau setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan;
- (23) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi, Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp386.300.000,00 realisasi sebesar Rp384.000.000,00 atau setara dengan 99,40%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan jasa kebersihan, keamanan kantor, tenaga kerja nonpegawai 12 bulan;
- (24) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas di Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp900.000.000,00 realisasi sebesar Rp881.475.000,00 atau setara dengan 97,94%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas 200 unit;
- (25) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp327.000.000,00 realisasi sebesar

Rp224.604.677,00 atau setara dengan 68,69%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan;

- (26) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, Menara Air dan Taman Halaman di Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 realisasi sebesar Rp598.305.000,00 atau setara dengan 99,72%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan;
- (27) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp324.999.131,00 realisasi sebesar Rp324.756.350,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan;
- (28) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 realisasi sebesar Rp259.202.623,00 atau setara dengan 74,06%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan;
- (29) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 realisasi sebesar Rp250.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan makanan, minuman

- rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan;
- (30) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp108.998.884,00 realisasi sebesar Rp108.948.884,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan;
- (31) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp519.367.700,00 realisasi sebesar Rp450.542.450,00 atau setara dengan 86,75%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan;
- (32) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp90.000.000,00 realisasi sebesar Rp89.998.898,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan;
- (33) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp121.500.000,00 realisasi sebesar Rp121.250.000,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur, terpenuhinya kebutuhan tenaga teknis 1 kegiatan;
- (34) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp525.000.000,00 realisasi sebesar Rp519.312.000,00 atau setara dengan 98,92%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kegiatan dan kebutuhan rohani dan sarana prasarana olahraga serta pakaian dinas 163 orang;

- (35) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.513.175.000,00 realisasi sebesar Rp1.478.410.800,00 atau setara dengan 97,70%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan jasa kebersihan, keamanan kantor, tenaga kerja nonpegawai 12 bulan;
- (36) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp775.994.000,00 realisasi sebesar Rp770.933.800,00 atau setara dengan 99,35%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas 200 unit;
- (37) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.491.424.175,00 realisasi sebesar Rp1.462.480.448,00 atau setara dengan 98,06%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan;
- (38) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan alat-alat pendukung fasilitas kantor 12 bulan;
- (39) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp749.973.789,00 realisasi sebesar Rp748.954.187,00 atau setara dengan 99,86%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12

- bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan;
- (40) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp440.500.000,00 realisasi sebesar Rp426.489.892,00 atau setara dengan 96,82%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan;
- (41) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp256.799.500,00 realisasi sebesar Rp252.692.000,00 atau setara dengan 98,40%. *Output* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan;
- (42) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp1.273.215.000,00 realisasi sebesar Rp1.266.037.553,00 atau setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan;
- (43) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp264.468.459,00 realisasi sebesar Rp246.613.632,00 atau setara dengan 93,25%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan jasa kebersihan, keamanan kantor, tenaga kerja nonpegawai 12 bulan;

- (44) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp258.932.000,00 realisasi sebesar Rp253.582.779,00 atau setara dengan 97,93%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan alat-alat pendukung fasilitas kantor 12 bulan;
- (45) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp90.000.000,00 realisasi sebesar Rp86.409.545,00 atau setara dengan 96,01%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan;
- (46) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi sebesar Rp48.364.250,00 atau setara dengan 96,73%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kegiatan dan kebutuhan rohani dan sarana prasarana olahraga serta pakaian dinas 12 bulan;
- (47) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp37.000.000,00 realisasi sebesar Rp37.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur 21 orang;
- (48) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp29.000.000,00 realisasi sebesar Rp27.350.000,00 atau setara dengan 94,31%. *Output*

kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kegiatan dan kebutuhan rohani dan sarana prasarana olahraga serta pakaian dinas 101 orang;

- (49) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp954.324.409,00 realisasi sebesar Rp950.870.400,00 atau setara dengan 99,64%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan;
- (50) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp449.999.955,00 realisasi sebesar Rp413.579.489,00 atau setara dengan 91,91%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan;
- (51) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp847.100.000,00 realisasi sebesar Rp846.934.400,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan;
- (52) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp255.000.000,00 realisasi sebesar Rp254.400.000,00 atau setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan;

- (53) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp129.999.788,00 realisasi sebesar Rp129.972.100,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan;
- (54) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BPSBTPH yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp301.000.000,00 realisasi sebesar Rp256.662.492,00 atau setara dengan 85,27%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan;
- (55) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kegiatan dan kebutuhan rohani dan sarana prasarana olahraga serta pakaian dinas 12 bulan;
- (56) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp90.000.000,00 realisasi sebesar Rp89.848.000,00 atau setara dengan 99,83%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur 1 kegiatan;
- (57) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan;

- Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp65.000.000,00 realisasi sebesar Rp65.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan alat-alat pendukung fasilitas kantor 12 bulan;
- (58) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp681.920.000,00 realisasi sebesar Rp681.920.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan jasa kebersihan, keamanan kantor, tenaga kerja nonpegawai 12 bulan;
- (59) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp124.000.000,00 realisasi sebesar Rp121.982.200,00 atau setara dengan 98,37%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan;
- (60) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp409.000.000,00 realisasi sebesar Rp408.911.000,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor 12 bulan;
- (61) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp124.000.000,00 realisasi sebesar Rp123.997.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan

- kebutuhan operasional alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan 12 bulan;
- (62) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp212.000.000,00 realisasi sebesar Rp198.376.025,00 atau setara dengan 93,57%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan;
- (63) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp216.000.000,00 realisasi sebesar Rp215.793.200,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan makanan, minuman rapat internal dan tamu, kebutuhan biaya operasional perjalanan luar kantor 12 bulan;
- (64) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp12.596.797,00 realisasi sebesar Rp12.583.786,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai 100%. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kegiatan dan kebutuhan rohani dan sarana prasarana olahraga serta pakaian dinas 12 bulan;
- (65) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Distanhor yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp95.615.500,00 atau setara dengan 95,62%. *Output* kegiatan adalah terwujudnya cetakan/dokumentasi dan publikasi 100%. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya cetakan/dokumentasi dan publikasi 1 kegiatan;
- (66) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan

Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp415.000.000,00 realisasi sebesar Rp375.971.342,00 atau setara dengan 90,60%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan kebutuhan langganan telepon, air, listrik, koran dan internet 12 bulan.

e. Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Perkebunan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Perkebunan yakni meningkatnya produksi dan produktivitas rata-rata komoditas perkebunan dengan capaian sebesar 4,71% dari target sebesar 2,6%. Alokasi anggaran program sebesar Rp28.435.138.228,00,00 dengan realisasi sebesar Rp27.747.048.876,00,00 atau setara dengan 97,58%.

- (1) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.299.914.708,00 dan dan realisasi sebesar Rp1.286.491.786,00 atau setara dengan 98,97%. *Output* kegiatan adalah Pertemuan teknis penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman teh di 4 lokasi (Cianjur, Sukabumi, Bandung dan Subang); Pertemuan teknis penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman kopi di 7 lokasi (Bandung, Sumedang, Garut, Ciamis, Bandung Barat, Bogor dan Kuningan); Penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman teh seluas 8 ha tersebar di kabupaten Cianjur, sukabumi, Bandung dan Subang masing-masing 2 ha; Penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman kopi seluas 14 ha tersebar di kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Ciamis, Bandung Barat, Bogor dan Kunigan masing-masing 2 ha. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan petani dalam teknis budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
- (2) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim dan Rempah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.299.891.654,00 dan dan realisasi sebesar Rp1.284.139.834,00 atau setara dengan 98,79%. *Output* kegiatan adalah pertemuan teknis penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman serehwangi di Kabupaten Sukabumi; pertemuan teknis penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman cengkeh di 8 lokasi diantaranya Ciamis, Cianjur Garut,

- Tasikmalaya, Majalengka, Subang, Sumedang, dan Kuningan; Pertemuan teknis penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman pala di 4 lokasi diantaranya Bogor, Purwakarta, Sukabumi dan Tasikmalaya; Penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman serehwangi seluas 4 ha di kabupaten Sukabumi; Penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman cengkeh seluas 16 ha tersebar di kabupaten Ciamis, Cianjur Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Subang, Sumedang, dan Kuningan masing- masing 2 ha; Penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman pala seluas 8 ha tersebar di kabupaten Bogor, Purwakarta, Sukabumi dan Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan petani dalam teknis budidaya tanaman semusim dan rempah;
- (3) Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.987.245,00 dan dan realisasi sebesar Rp693.146.050,00 atau setara dengan 99,02%. *Output* kegiatan adalah rapat evaluasi koordinasi sarana produksi tingkat provinsi 1 kali; rapat pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi melalui RDKK pola tertutup 18 Kabupaten/Kota; pertemuan teknologi alsintan pada pemeliharaan tanaman teh di 6 kabupaten; pertemuan teknologi pemupukan ramah lingkungan pada tanaman kopi di 6 kabupaten. *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman petani tentang sarana produksi dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;
- (4) Kegiatan DBHCHT – Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Tembakau yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.999.067,00 dan dan realisasi sebesar Rp787.303.150,00 atau setara dengan 98,41%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi rapat koordinasi kegiatan DBHCHT tingkat provinsi sebanyak 2 kali; pertemuan teknis budidaya tanaman tembakau di 7 kabupaten; penerapan teknologi budidaya (GAP) pada tanaman tembakau di 7 kabupaten; inovasi teknologi budidaya tembakau sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan ini Meningkatnya pemahaman petani dalam budidaya tanaman tembakau sebagai dukungan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;
- (5) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran

- sebesar Rp99.999.834,00 dan dan realisasi sebesar Rp92.628.664,00 atau setara dengan 92,63%. *Output* kegiatan adalah pengendalian OPT pada tanaman kopi arabika java preanger di Kab Garut seluas 25 ha. *Outcome* kegiatan ini adalah terkendalinya serangan OPT pada tanaman Kopi Arabika Java Preanger;
- (6) Kegiatan Adopsi Teknologi Perlindungan Tanaman Kelapa ke Balit Palma di Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.995.559,00 dan dan realisasi sebesar Rp99.043.559,00 atau setara dengan 99,05%. *Output* kegiatan adalah laporan perjalanan dinas dalam rangka adopsi teknologi perlindungan tanaman kelapa ke Provinsi Sulawesi Utara 1 dokumen. *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan tentang teknologi perlindungan tanaman kelapa. adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana dan target yang telah dibuat;
- (7) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kakao, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.989.761,00 dan dan realisasi sebesar Rp96.971.188,00 atau setara dengan 96,98%. *Output* kegiatan adalah pengendalian OPT pada tanaman kakao di Kab Pangandaran seluas 25 Ha. *Outcome* kegiatan adalah terkendalinya OPT pada tanaman kakao;
- (8) Kegiatan PHT pada Tanaman Kopi, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp99.989.761,00 dan dan realisasi sebesar Rp92.371.500,00 atau setara dengan 92,38%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi pengendalian hama terpadu pada tanaman kopi di Kab Bandung seluas 10 Ha. *Outcome* kegiatan adalah terkendalinya OPT pada tanaman kopi;
- (9) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Robusta, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.993.686,00 dan dan realisasi sebesar Rp97.094.000,00 atau setara dengan 97,10%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi pengendalian OPT pada tanaman kopi robusta di Kab Ciamis seluas 40 Ha. *Outcome* kegiatan adalah terkendalinya OPT pada tanaman kopi robusta;
- (10) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Teh, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.997.835,00 dan dan realisasi sebesar Rp98.227.835,00 atau setara dengan 98,23%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi pengendalian OPT pada tanaman teh di Kab Purwakarta seluas 60 Ha. *Outcome* kegiatan ini terkendalinya OPT pada tanaman

- teh;
- (11) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Karet, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.173,00 dan dan realisasi sebesar Rp96.881.800,00 atau setara dengan 96,88%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi pengendalian OPT pada tanaman karet di Kab Pangandaran seluas 40 Ha. *Outcome* kegiatan ini terkendalinya OPT pada tanaman karet;
 - (12) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Tebu, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.990.234,00 dan dan realisasi sebesar Rp96.916.750,00 atau setara dengan 96,93%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi pengendalian OPT pada tanaman tebu di Kab Majalengka seluas 40 Ha. *Outcome* kegiatan ini terkendalinya OPT pada tanaman tebu;
 - (13) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.995.861,00 dan dan realisasi sebesar Rp97.609.400,00 atau setara dengan 97,61%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi pengendalian OPT pada tanaman kelapa di Kota Banjar seluas 40 Ha. *Outcome* kegiatan ini adalah terkendalinya OPT pada tanaman kelapa;
 - (14) Kegiatan Penerapan PHT pada Tanaman Teh, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.993.972,00 dan dan realisasi sebesar Rp96.452.872,00 atau setara dengan 96,46%. *Output* kegiatan fasilitasi penerapan PHT pada tanaman teh di Kab Subang seluas 4 Ha. *Outcome* kegiatan ini adalah terkendalinya OPT pada tanaman the;
 - (15) o. Kegiatan Pengendalian Eksplosif OPT Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.747.398,00 dan dan realisasi sebesar Rp93.885.428,00 atau setara dengan 94,12%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi pengendalian eksplosif OPT perkebunan di Kab Majalengka seluas 10 Ha. *Outcome* kegiatan adalah terkendalinya OPT pada tanaman perkebunan;
 - (16) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.993.827,00 dan dan realisasi sebesar Rp246.267.327,00 atau setara dengan 98,51%. *Output* kegiatan adalah laporan serangan OPT perkebunan di Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Tersedianya laporan serangan OPT perkebunan di Kabupaten/Kota;
 - (17) Kegiatan *Monitoring*, Koordinasi, dan Evaluasi

- Pengembangan Teknologi PHT, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.849.722,00 dan dan realisasi sebesar Rp90.668.722,00 atau setara dengan 90,81%. *Output* kegiatan adalah laporan *monitoring*, koordinasi, dan evaluasi pengembangan teknologi PHT 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya *monitoring*, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengembangan teknologi PHT;
- (18) Kegiatan Pertemuan Teknis/Regional/Nasional, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.928.887,00 dan dan realisasi sebesar Rp135.959.500,00 atau setara dengan 90,68%. *Output* kegiatan adalah Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan Teknis TA 2019 bersama *Stakeholder* terkait; Mengikuti Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2019 di Kendari Sulawesi Tenggara sebanyak 3 orang. *Outcome* kegiatan adalah Sinergitas kerjasama yang baik antara Petugas UPTD BPP dengan *Stakeholder* di Kabupaten/Kota yang membidangi perlindungan tanaman dalam pelaksanaan kegiatan UPTD BPP TA 2019; Meningkatnya gairah dan motivasi petugas dalam memberikan pelayanan kepada petani terkait berbagai kemajuan yang ditampilkan dalam Peringatan Hari Pangan Sedunia;
- (19) Kegiatan Pengembangan Agensia Pengendali Hayati Media Cair (BANG ALI), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.988.504,00 dan dan realisasi sebesar Rp157.049.000,00 atau setara dengan 78,53%. *Output* kegiatan adalah penyediaan APH padat sebanyak 2.000 kg; penyediaan APH cair sebanyak 2.300 liter; fasilitasi konsultasi ke Faperta Unsoed. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya intensitas serangan OPT pada tanaman perkebunan; menurunnya luas serangan OPT kategori berat; terjaganya kualitas produksi APH cair;
- (20) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.948.500,00 dan dan realisasi sebesar Rp167.770.000,00 atau setara dengan 83,91%. *Output* kegiatan adalah penyediaan APH padat sebanyak 500 Kg di 5 lokasi satuan pelayanan; Penyediaan APH cair sebanyak 10.000 Liter di 5 lokasi satuan pelayanan; Penyediaan bibit nimba sebanyak 6.000 pohon di satuan pelayanan Kabupaten Purwakarta. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya intensitas serangan OPT pada tanaman perkebunan;
- (21) Kegiatan Demplot Pengendalian OPT pada Tanaman

- Kopi Robusta, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.997.665,00 dan dan realisasi sebesar Rp113.910.750,00 atau setara dengan 75,94%. *Output* kegiatan adalah pengendalian OPT pada tanaman kopi robusta seluas 10 Ha di Kelompok Tani Mitra Pasundan Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang melibatkan 25 orang petani dan 3 petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung; transfer teknologi Perlindungan tanaman pada komoditi teh sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya intensitas serangan OPT pada tanaman kopi robusta;
- (22) Kegiatan Demplot Pengendalian OPT pada Tanaman Teh, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.996.959,00 dan dan realisasi sebesar Rp132.379.000,00 atau setara dengan 88,25%. *Output* kegiatan adalah pengendalian OPT pada tanaman teh seluas 10 ha di Kelompok Tani Wibawa Mukti Desa Ganjarsari Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat yang melibatkan 25 orang petani dan 3 petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat. *Outcome* kegiatan adalah Tersedianya dokumen laporan pertemuan akses permodalan; transfer teknologi Perlindungan tanaman pada komoditi teh, sebanyak 1 paket;
- (23) Kegiatan DBHCHT – Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Tanaman Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.997.360,00 dan dan realisasi sebesar Rp444.090.420,00 atau setara dengan 88,82%. *Output* kegiatan adalah pengendalian OPT pada tanaman tembakau seluas 30 Ha di 3 kabupaten (Bandung, Garut, Sukabumi); Fasilitasi keikutsertaan pada peringatan Hari Perkebunan Tingkat Nasional di Malang, Jawa Timur sebanyak 7 orang. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya intensitas serangan OPT pada tanaman perkebunan;
- (24) Kegiatan *Monitoring*, Evaluasi, dan Pelaporan Sarana Teknologi PHT yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.942.754,00 dan dan realisasi sebesar Rp96.261.400,00 atau setara dengan 96,32%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi *monitoring* dan evaluasi penggunaan APH cair di Jawa Barat; fasilitasi keikutsertaan dalam peringatan Hari Perkebunan Tingkat Nasional di Malang, Jawa Timur sebanyak 7 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya

- produksi APH cair; meningkatnya gairah dan motivasi petugas dalam memberikan pelayanan kepada petani terkait berbagai kemajuan yang ditampilkan dalam peringatan Hari Perkebunan Tahun 2019;
- (25) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp999.701.974,00 dan dan realisasi sebesar Rp996.287.950,00 atau setara dengan 99,66%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi bintek penangkar benih tanaman perkebunan di 4 wkpp sebanyak 40 orang setiap WKPP; bahan laboratorium kulturjaringan 1 paket; honor petugas updating data penangkar dari kabupaten 50 orang; honorarium tenaga teknis pelaksana kegiatan 10 orang. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pembinaan penangkar benih tanaman perkebunan;
- (26) Kegiatan Penerapan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.999.937.460,00 dan dan realisasi sebesar Rp1.988.283.460,00 atau setara dengan 99,42%. *Output* kegiatan adalah Pembenihan Kakao sebanyak 40.000 pohon, Pembenihan Kopi Arabika Sebanyak 250.000 pohon dan Pembenihan Pala Sebanyak 10.000 pohon; Pemeliharaan Kebun Sumber benih dan Calon Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya Penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan di kebun dinas UPTD BPPBP;
- (27) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Dinas, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan 13 kebun dinas. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan 13 kebun dinas;
- (28) Kegiatan DBHCHT – Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp700.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp697.849.000,00 atau setara dengan 99,69%. *Output* kegiatan adalah Keragaan Benih Tembakau Varietas Unggul Lokal di Jawa Barat; Sosialisasi Varietas Unggul Tembakau Mole Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya Keragaan Benih Tembakau Varietas Unggul Lokal di Jawa Barat dan Sosialisasi Varietas Unggul Tembakau Mole Jawa Barat;
- (29) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan Hasil SID,

- Jalan Produksi dan SID, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp949.999.592,00 dan dan realisasi sebesar Rp920.832.000,00 atau setara dengan 96,93%. *Output* kegiatan adalah pembangunan embung dan pipanisasi di 3 Kabupaten (Kuningan, Sumedang, Cianjur); pembangunan jalan produksi di 1 kabupaten (Cirebon). *Outcome* kegiatan adalah tersedianya embung, pipanisasi, dan jalan produksi;
- (30) Kegiatan DBHCHT – Pengembangan Sarana Lahan Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.980,00 dan dan realisasi sebesar Rp298.047.250,00 atau setara dengan 99,35%. *Output* kegiatan adalah pembangunan jalan produksi di 2 kabupaten (Majalengka dan Sumedang). *Outcome* kegiatan adalah tersedianya jalan produksi;
- (31) Kegiatan Antisipasi terhadap Perubahan Iklim, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.999.951,00 dan dan realisasi sebesar Rp492.454.086,00 atau setara dengan 98,49%. *Output* kegiatan ini adalah demplot antisipasi perubahan iklim seluas 40 Ha. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya demplot antisipasi perubahan iklim seluas 40 Ha;
- (32) Kegiatan Penanganan Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Perkebunan, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.999.849,00 dan dan realisasi sebesar Rp682.016.250,00 atau setara dengan 97,43%. *Output* kegiatan ini adalah penanaman cengkeh seluas 40 Ha di wilayah DAS Citarum. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya fungsi ekologi komoditas perkebunan di wilayah DAS Citarum seluas 40 Ha;
- (33) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.999.881,00 dan dan realisasi sebesar Rp493.290.910,00 atau setara dengan 98,66%. *Output* kegiatan ini adalah penanganan GUP sebanyak 16 Kebun PBS/PBN. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya penanganan GUP serta perlindungan hukum di PBS/PBN dan masyarakat sekitar kebun;
- (34) Kegiatan DBHCHT – Konservasi Lahan Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.826,00 dan dan realisasi sebesar Rp299.990.900,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah percontohan konservasi lahan tembakau di 3 lokasi (kec. Arjasari Kabupaten

- Bandung, Kec. Tarogong dan Kec. Leles Kabupaten Garut). *Outcome* kegiatan adalah terjaganya kelestarian dan keberlanjutan lahan pertanaman tembakau;
- (35) Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.999.753,00 dan dan realisasi sebesar Rp499.739.895,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah masterplan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani untuk 11 jenis tanaman perkebunan (Kopi Arabika, Kopi Robusta, Teh, Kakao, Karet, Kelapa, Cengkeh, Tebu, Tembakau, Lada dan Pala). *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pengawalan aktivitas usaha perkebunan yang lebih fokus khususnya dalam mendorong pengembangan agroindustri perkebunan;
- (36) Kegiatan Pemetaan Komoditas Strategis, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.999.827,00 dan dan realisasi sebesar Rp494.183.750,00 atau setara dengan 98,84%. *Output* kegiatan adalah pemetaan lokasi pertanaman komoditas kopi arabika, kopi robusta, teh. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan lokasi pengembangan tanam yang tepat;
- (37) Kegiatan Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.998.914,00 dan dan realisasi sebesar Rp299.969.900,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah percontohan penataan dan pelestarian lahan kakao di 2 lokasi (Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran). *Outcome* kegiatan adalah terpacunya peningkatan produksi dan keberlanjutan lahan pertanaman kakao;
- (38) Kegiatan Inisiasi Wilayah Indikasi Geografis Komoditas Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.949,00 dan dan realisasi sebesar Rp199.995.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah indikasi keunikan kopi robusta di 14 Kabupaten/Kota (Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Ciamis, Garut, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Karawang, Kuningan, Subang, Sumedang, Sukabumi dan Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya rekomendasi lokasi calon Indikasi Geografis kopi robusta;
- (39) Kegiatan Pelatihan Dinamika Kelompok Tani Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp250.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp244.253.250,00 atau setara dengan 97,70%. *Output* kegiatan adalah jumlah poktan peserta pelatihan dinamika kelompok tani perkebunan sebanyak 14 poktan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi kelembagaan pelaku usaha tani;
- (40) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Bidang Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.999.689,00 dan dan realisasi sebesar Rp794.903.169,00 atau setara dengan 99,36%. *Output* kegiatan adalah wirausaha baru naik kelas bidang perkebunan sebanyak 240 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah masyarakat bidang perkebunan yang menjadi wirausaha sebanyak 20%; meningkatnya kemampuan rata – rata peserta sebanyak 56% dari hasil tes pemahaman materi mengenai manajemen bisnis, desain prodak, kemitraan usaha, hingga pemasaran yang berbasis *digital/e commerce* yang diharapkan para wirausaha baru ini dapat bersaing untuk memasarkan produk – produk unggulannya;
- (41) Kegiatan Penguatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.905,00 dan dan realisasi sebesar Rp149.849.845,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi penguatan kompetensi pelaku usaha perkebunan sebanyak 45 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi peserta pelatihan dalam teknik budidaya dan pengolahan pada bidang perkebunan dengan rata – rata peningkatan peserta mencapai 90% khususnya untuk komoditas kopi dan teh; terlatihnya para pelaku usaha bidang perkebunan yang bergerak di hulu maupun hilir dalam pemahaman mengenai teknik pembudidayaan, pengolahan, pengemasan, dah hama penyakit, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk – produk olahan bidang perkebunan;
- (42) Kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah (Fasda), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.999.957,00 dan dan realisasi sebesar Rp697.177.679,00 atau setara dengan 99,60%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta Bimtek Fasda yang terlatih sebanyak 40 orang peserta, diantaranya 20 Peserta Bimtek FASDA 1, 20 Peserta Bimtek Fasda 3 dan 20 peserta penyegaran kinerja Fasda. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah Fasda dan Pemandu Lapang mencapai 25%; meningkatnya kompetensi fasda dan pemandu lapang dalam hal

- pemahaman materi memfasilitasi dan kelembagaan mencapai rata-rata 35%; terlatihnya para fasilitator daerah dalam memahami materi Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE), Kelembagaan, Koperasi, Penyuluhan & Pembinaan Petani;
- (43) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Asosiasi Petani Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp149.680.000,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah jumlah asosiasi petani perkebunan yang dibina sebanyak 10 asosiasi (Asosiasi Gula Kelapa Priangan/AGKP, Asosiasi Petani Pengolah Minyak Atsiri/APPMA, Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan/Gapperindo, Asosiasi Petani Kelapa Indonesia/APKI, Asosiasi Petani Karet Indonesia/APKARINDO, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia/APCI, Asosiasi Petani Teh Indonesia/APTEH, Asosiasi Petani Kakao Indonesia/APKAI, Asosiasi Petani Tebu Rakyat/APTRI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia/APTI). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya aktivitas asosiasi petani perkebunan;
- (44) Kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.820,00 dan dan realisasi sebesar Rp299.666.500,00 atau setara dengan 99,89%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan sebanyak 45 kelas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi kelembagaan poktan;
- (45) Kegiatan Pendampingan Penguatan Kelembagaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp143.000.000,00 atau setara dengan 95,33%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan pendampingan penguatan kelembagaan 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi kelembagaan poktan;
- (46) Kegiatan Peringatan Hari Besar/Agenda Nasional Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.900.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp195.898.000,00 atau setara dengan 98,00%. *Output* kegiatan adalah laporan partisipasi dalam peringatan hari besar/agenda nasional 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya keikutsertaan pada peringatan hari besar/agenda nasional perkebunan;
- (47) Kegiatan Sistem Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas

- Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.980.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp97.780.000,00 atau setara dengan 97,80%. *Output* kegiatan adalah sistem pendataan kelompok tani perkebunan 1 sistem. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sistem pendataan kelompok tani perkebunan;
- (48) Kegiatan *Monitoring*, Evaluasi, dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.998.840,00 dan dan realisasi sebesar Rp95.585.020,00 atau setara dengan 95,59%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan penguatan kelembagaan 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya *Monitoring*, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan; terkoordinasinya pelaksanaan program/kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan;
- (49) Kegiatan Lomba Kelompok Tani Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.950.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp99.698.950,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah *event* lomba kelompok tani perkebunan 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi kelembagaan poktan;
- (50) Kegiatan DHBCHT – Rapat Kerja APTI Jabar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.950.428,00 dan dan realisasi sebesar Rp199.108.428,00 atau setara dengan 99,58%. *Output* kegiatan adalah laporan hasil rapat kerja APTI Jabar 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya rapat kerja APTI Jabar;
- (51) Kegiatan DBHCHT – Sistem Pendataan Kelompok Tani Tembakau yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp187.500.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp183.500.000,00 atau setara dengan 97,87%. *Output* kegiatan adalah aplikasi sistem pendataan kelompok tani tembakau 1 sistem. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas pendataan kelompok tani tembakau;
- (52) Kegiatan DBHCHT – Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp700.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp691.750.000,00 atau setara dengan 98,82%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pelatihan penumbuhan kebersamaan petani tembakau sebanyak 20 kelas.

- Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi kelembagaan poktan;
- (53) Kegiatan DBHCHT – Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp700.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp699.875.000,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan petani tembakau sebanyak 35 kelas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi kelembagaan poktan tembakau;
- (54) Kegiatan DBHCHT – Diseminasi Budidaya Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp183.095.000,00 atau setara dengan 91,55%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta diseminasi budidaya tembakau sebanyak 20 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi peserta budidaya tembakau;
- (55) Kegiatan DBHCHT – Diseminasi Pengolahan Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp183.100.000,00 atau setara dengan 91,55%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta diseminasi pengolahan tembakau sebanyak 20 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi peserta pengolahan tembakau;
- (56) Kegiatan DBHCHT – Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.950,00 dan dan realisasi sebesar Rp194.630.250,00 atau setara dengan 97,32%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan SDM dan penguatan kelembagaan petani tembakau 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya bahan perumusan kebijakan penguatan kelembagaan petani tembakau;
- (57) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.857,00 dan dan realisasi sebesar Rp99.999.700,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah pelaksanaan pertemuan akses permodalan di 5 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sosialisasi akses permodalan;
- (58) Kegiatan Pendampingan Akses Permodalan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan dan realisasi

- sebesar Rp99.999.500,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pendampingan akses permodalan di 5 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pendampingan akses permodalan;
- (59) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Modal Mandiri, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.500,00 dan dan realisasi sebesar Rp99.999.500,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pembinaan pengelolaan modal mandiri sebanyak 50 orang. *Outcome* kegiatan adalah terlatihnya pelaku usaha dalam pengelolaan modal mandiri;
- (60) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp99.740.250,00 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pembinaan kelembagaan ekonomi masyarakat sebanyak 4 poktan. *Outcome* kegiatan adalah terbinanya lembaga ekonomi kelompok tani perkebunan;
- (61) Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu sesuai SNI, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp98.023.000,00 atau setara dengan 98,02%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pertemuan penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI sebanyak 180 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya mutu produk perkebunan sesuai SNI;
- (62) Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp99.023.000,00 atau setara dengan 99,02%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pertemuan penerapan teknologi pengolahan hasil sebanyak 180 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai tambah produk perkebunan;
- (63) Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp145.064.900,00 atau setara dengan 72,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan dan mutu hasil produk kakao untuk memenuhi *standar* uji mutu sebanyak 3 poktan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya mutu produk kakao sesuai SNI;
- (64) Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

- Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp93.100.000,00 atau setara dengan 93,10%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta bimbingan teknis penguatan mutu hasil produk perkebunan sebanyak 4 poktan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya mutu produk kopi robusta, gula kelapa, dan karet;
- (65) Kegiatan Pendataan Pembinaan Penataan Pengembangan dan *Monitoring* Unit Pengolahan Hasil (UPH), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.895,00 dan dan realisasi sebesar Rp297.492.237,00 atau setara dengan 99,16%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan pendataan, pembinaan, penataan, pengembangan, dan *monitoring* unit pengolahan hasil (UPH). *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan pendataan, pembinaan, penataan, pengembangan, dan *monitoring* unit pengolahan hasil (UPH);
- (66) Kegiatan Demplot Pembinaan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi Arabika Java Preanger, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp145.500.000,00 atau setara dengan 97,00%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta bimtek pengolahan dan mutu hasil kopi arabika java preanger sebanyak 6 poktan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan petani tentang penanganan panen dan pascapanen kopi arabika java preanger;
- (67) Kegiatan Demplot Pembinaan Pengolahan Mutu Hasil Teh, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp138.300.000,00 atau setara dengan 92,20%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta bimtek pengolahan dan mutu hasil teh sebanyak 6 poktan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan petani tentang penanganan panen dan pasca panen teh;
- (68) Kegiatan Bandung Tea Festival Tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp449.989.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp447.630.000,00 atau setara dengan 99,48%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan Bandung Tea Festival 2019 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jaringan pemasaran petani teh Jawa Barat;
- (69) Kegiatan Jabar Lautan Kopi Tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp449.980.000,00 dan dan realisasi

sebesar Rp440.655.000,00 atau setara dengan 97,93%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan Jabar Lautan Kopi tahun 2019 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jaringan pemasaran petani kopi Jawa Barat;

- (70) Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.890,00 dan dan realisasi sebesar Rp197.803.700,00 atau setara dengan 98,90%. *Output* kegiatan adalah data harga pasar komoditi perkebunan Jawa Barat sebanyak 12 komoditi. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya informasi harga pasar produk perkebunan Jawa Barat;
- (71) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp350.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp342.293.250,00 atau setara dengan 97,80%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan promosi produk perkebunan ke Republik Rakyat Tiongkok 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akses pemasaran produk perkebunan Jawa Barat ke luar negeri;
- (72) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp277.324.040,00 atau setara dengan 92,44%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan promosi produk perkebunan ke luar Provinsi Jawa Barat 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akses pemasaran produk perkebunan Jawa Barat di dalam negeri;
- (73) Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, *Monitoring*, dan Evaluasi Pemasaran Produk Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.920,00 dan dan realisasi sebesar Rp149.709.282,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah laporan kegiatan pembinaan, sosialisasi, konsultasi, *monitoring* dan evaluasi pemasaran produk perkebunan (1 laporan). *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, konsultasi, *monitoring* dan evaluasi pemasaran produk perkebunan;
- (74) Kegiatan Pertemuan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.820,00 dan dan realisasi sebesar Rp98.556.000,00 atau setara dengan 98,56%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pertemuan koordinasi

- perkebunan besar di Jawa Barat sebanyak 120 orang. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya koordinasi antara PBN dan PBS dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (75) Kegiatan Pertemuan/Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp195.389.750,00 atau setara dengan 97,69%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pertemuan kemitraan usaha perkebunan di Jawa Barat sebanyak 205 orang. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kemitraan antara PBN/PBS dengan perkebunan rakyat di Jawa Barat;
- (76) Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Perizinan Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.940,00 dan dan realisasi sebesar Rp99.400.000,00 atau setara dengan 99,40%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pertemuan sosialisasi perizinan usaha perkebunan sebanyak 180 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan mengenai proses perizinan usaha perkebunan di Jawa Barat;
- (77) Kegiatan Penilaian Kelas Kebun yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp293.973.364,00 atau setara dengan 97,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pertemuan evaluasi hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2018 sebanyak 126 orang. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya evaluasi hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2018;
- (78) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, *Monitoring*, dan Evaluasi Pembinaan Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.782,00 dan dan realisasi sebesar Rp145.127.900,00 atau setara dengan 96,75%. *Output* kegiatan adalah laporan kegiatan konsultasi, koordinasi, *monitoring* dan evaluasi pembinaan usaha perkebunan (1 laporan). *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan konsultasi, koordinasi, *monitoring* dan evaluasi pembinaan usaha perkebunan;
- (79) Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp97.180.000,00 atau setara dengan 97,18%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pembinaan mutu hasil produk tembakau sesuai SNI sebanyak 90 orang.

- Outcome* kegiatan adalah meningkatnya mutu produk tembakau sesuai SNI;
- (80) Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp94.600.000,00 atau setara dengan 94,60%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pertemuan penerapan teknologi pengolahan tembakau sebanyak 160 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai tambah produk tembakau;
- (81) Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp98.517.100,00 atau setara dengan 98,52%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta pertemuan pengujian mutu produk tembakau sebanyak 90 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan petani tentang pengujian mutu produk tembakau sesuai SNI;
- (82) Kegiatan DBHCHT – Konsultasi, Koordinasi, *Monitoring*, dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp99.611.426,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan adalah laporan kegiatan konsultasi, koordinasi, *monitoring* dan evaluasi pembinaan mutu hasil. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya evaluasi pembinaan mutu hasil tembakau;
- (83) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp749.890.930,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp735.992.710,00 atau setara dengan 98,15%. *Output* kegiatan adalah jumlah pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan di Jawa Barat, pertemuan standar teknis mutu benih tanaman perkebunan, tenaga kerja nonpegawai, pengembangan Aplikasi Sisolehbu. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan sertifikasi mutu benih tanaman perkebunan;
- (84) Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp599.873.377,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp585.630.979,00 atau setara dengan 97,63%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pertemuan pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan, kerjasama pengawasan dan peredaran benih perkebunan Ke

- Provinsi Kalimantan Timur, tenaga kerja nonpegawai, pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan di Kabupaten/Kota Jawa Barat;
- (85) Kegiatan Kegiatan DBH-CHT Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp299.623.668,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp286.959.475,00 atau setara dengan 95,77%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kerjasama pengujian mutu benih tembakau ke Provinsi Jawa Timur, Pelayanan Sertifikasi Benih Tembakau di Jawa Barat, Tenaga Kerja Nonpegawai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya DBHCHT sertifikasi benih tanaman tembakau di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;
- (86) Kegiatan Kegiatan DBH-CHT Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp299.732.941,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp285.441.436,00 atau setara dengan 95,23%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pertemuan teknis pengawasan peredaran benih tanaman tembakau di Jawa Barat, Tenaga Kerja Nonpegawai, Pengawasan Peredaran Benih Tembakau di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya DBHCHT pengawasan dan peredaran benih tanaman tembakau.

f. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan yakni tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perkebunan sebesar 100%; tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perkebunan sebesar 100%; tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Perkebunan sebesar 100%; tingkat ketersediaan data dan informasi pada Dinas Perkebunan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program sebesar Rp2.178.248.839,00 dengan realisasi sebesar Rp2.111.947.384,00 atau setara dengan 96,96%.

- (1) Kegiatan Penyusunan Renja, RKPD, RKA/DPA dan Dokumen Perencanaan Lainnya di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.989.753,00 dan dan realisasi sebesar Rp144.165.170,00 atau setara dengan 96,12%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen Renja Dinas

- Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; 1 dokumen DPA Murni Tahun 2019; 3 dokumen DPA Pergeseran Tahun 2019; 1 dokumen DPA Perubahan Tahun 2019; 1 dokumen RKA Tahun 2020. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019/2020;
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp179.230.635,00 dan dan realisasi sebesar Rp173.980.600,00 atau setara dengan 97,07%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen usulan perencanaan pembangunan perkebunan Tahun 2020. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen arah kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat untuk tahun 2020;
 - (3) Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perkebunan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp175.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp174.426.063,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen arah kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat untuk tahun 2020;
 - (4) Kegiatan Legislasi Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Perkebunan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.995.578,00 dan dan realisasi sebesar Rp141.271.800,00 atau setara dengan 94,18%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen naskah akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perkebunan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya naskah akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perkebunan di Jawa Barat sebagai bahan penyusunan Perda Penyelenggaraan Perkebunan di tahun 2020;
 - (5) Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perkebunan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.998.714,00 dan dan realisasi sebesar Rp281.320.450,00 atau setara dengan 93,77%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen data statistik perkebunan angka sementara tahun 2019; 1 dokumen data statistik perkebunan angka tetap tahun 2018; konten infografis 1 paket; honor pengumpul dan pengolah data statistik perkebunan 44 orang. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya Data/Statistik Spatial dan A Spatial untuk

- bahan perumusan kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Forum Statistik Perkebunan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat sebesar Rp299.999.710,00 dan dan realisasi sebesar Rp293.336.581,00 atau setara dengan 97,78%. *Output* kegiatan adalah laporan *workshop* statistik perkebunan tahun 2019 1 dokumen; data statistik perkebunan angka tetap tahun 2018 1 dokumen; data statistik angka tetap tahun 2018 1 dokumen; fasilitasi perjalanan dinas dalam rangka validasi data statistik perkebunan dengan pusat 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya Data/Statistik Spatial dan A Spatial untuk bahan perumusan kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat;
 - (7) Kegiatan Publikasi Data dan Informasi Perkebunan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat sebesar Rp299.977.714,00 dan dan realisasi sebesar Rp288.686.505,00 atau setara dengan 96,24%. *Output* kegiatan adalah *workshop* penyusunan materi publikasi dan dokumentasi 1 kali; konten medsos 40 pcs; cetak buku informasi perkebunan 30 buah; cetak buku data & informasi statistik sektoral 60 buah; cetak majalah perkebunan 200 eksemplar; pemeliharaan website dinas 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan data dan informasi perkebunan Jawa Barat;
 - (8) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp174.996.790,00 dan dan realisasi sebesar Rp173.488.915,00 atau setara dengan 99,14%. *Output* kegiatan adalah Monev Score Card 12 dokumen; Laporan Triwulanan APBD dan APBN 8 dokumen; Laporan Evaluasi Renja 4 dokumen; Laporan DBHCHT 4 dokumen; LKIP Tahun 2019 1 dokumen; LKPJ Tahun 2019 1 dokumen; LPPD Tahun 2019 1 dokumen; Laporan Tahunan Tahun 2019 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya pelaporan kegiatan sebagai bahan evaluasi perumusan perbaikan kinerja program/kegiatan pada tahun selanjutnya;
 - (9) Kegiatan Penatausahaan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.873.370,00 dan dan realisasi sebesar Rp149.836.100,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi peraturan keuangan terbaru 1 kali; laporan keuangan 12 dokumen. *Outcome*

kegiatan adalah tersedianya pelaporan keuangan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

- (10) Kegiatan Inventarisasi Aset Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.186.710,00 dan dan realisasi sebesar Rp148.693.550,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah data aset sarana dan prasarana Dinas Perkebunan 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data aset sarana dan prasarana Dinas Perkebunan;
- (11) Kegiatan DBHCHT – Penyusunan Data/Informasi Tembakau Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.865,00 dan dan realisasi sebesar Rp142.741.650,00 atau setara dengan 95,16%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi studi banding kegiatan DBHCHT di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 14 orang; video profil tembakau Jawa Barat 1 buah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya hasil studi banding sebagai dasar penyusunan kebijakan kegiatan DBHCHT di Jawa Barat.

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan yakni Tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Dinas Perkebunan sebesar 100%. sebesar program sebesar Rp6.989.586.256,00 dengan realisasi sebesar Rp6.884.558.668,00 atau setara dengan 98,50%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp397.274.300,00 atau setara dengan 99,32%. *Output* kegiatan adalah partisi ruangan dan koridor basement 2 paket; pengaspalan dan batu andesit basement 2 paket; pemeliharaan plafon gedung kantor 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan umum pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.687.480,00 dan dan realisasi sebesar Rp395.287.500,00 atau setara dengan 98,90%. *Output* kegiatan adalah mesin tik manual 3 unit; televisi 2 unit; komputer PC 11 unit; *printer* 10 unit; kursi rapat 74 unit; CCTV 1 set; soundsistem 1 set; HT 5 unit. *Outcome*

- kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan umum pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPTD BPTP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.521.350,00 dan dan realisasi sebesar Rp332.850.000,00 atau setara dengan 95,23%. *Output* kegiatan adalah canopy 1 unit; perbaikan kirmir 1 paket; pembuatan papan nama UPTD BPP 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan umum pada UPTD BPP;
 - (4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Kantor UPTD BPTP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.081.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp284.088.000,00 atau setara dengan 81,38%. *Output* kegiatan adalah pembangunan kamar mandi ruang kepala balai 1 paket; pelaburan Gedung kantor dan pagar bawah 2 paket; alat semprot untuk cuci mobil kendaraan 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan umum pada UPTD BPP;
 - (5) Kegiatan DAK-Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Perlindungan Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.662.359.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp1.661.409.000,00 atau setara dengan 99,94%. *Output* kegiatan adalah kendaraan operasional roda 2 6 unit; rehabilitasi bangunan APH 1 unit; renovasi kantor sub unit di 4 kabupaten; pembangunan sumur submercible pada kantor sub unit di 4 kabupaten. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan umum pada UPTD BPP;
 - (6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPTD BPPB-TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp497.826.000,00 atau setara dengan 99,57%. *Output* kegiatan adalah lanjutan pembuatan benteng kebun dinas Cisarungga 1 paket; pembuatan bak sampah, akses jalan laboratorium, dinding pembatas, dan kirmir pembatas 4 paket; renovasi kolam penampun air kebun dinas Sindanglaya 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan umum pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - (7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Kantor UPTD BPPB-TP, yang dilaksanakan

- oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.231.339,00 dan dan realisasi sebesar Rp493.924.350,00 atau setara dengan 98,94%. *Output* kegiatan adalah mesin potong rumput 14 unit; mesin tik elektrik 2 unit; mesin penghancur kertas 6 unit; papan nama ruangan dan petunjuk 1 paket; vacuum cleaner 2 unit; komputer PC 9 unit; laptop 1 unit; *printer* 6 unit; *scanner* 3 unit; UPS 15 unit; jam dinding 23 buah; kamera DSLR 1 set; drone + aksesoris 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan umum pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (8) Kegiatan DAK-Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.088.815.847,00 dan dan realisasi sebesar Rp2.088.815.847,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah renovasi mushola di kebun dinas pangkalan 1 paket; kendaraan operasional roda 2 4 unit; drainase saluran jalan produksi kebun dinas Pangkalan 1 paket; kirmir saluran jalan produksi kebun dinas Pangkalan 1 paket; pengecoran jalan produksi kebun dinas Pangkalan 1 paket; pengerasan jalan produksi kebun dinas Pangkalan; pembangunan Gudang sarana prasarana kebun dinas Sindanglaya 1 paket; renovasi Gudang kebun dinas Gekbrong 1 paket; pemagaran kebun dinas Ciheulang 1 paket; pemagaran kebun dinas Gekbrong 1 paket; pemagaran kebun dinas Pangkalan 1 paket; paving block di kebun dinas Gekbrong 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan umum pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPTD BPSB-TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.913.800,00 dan dan realisasi sebesar Rp297.647.900,00 atau setara dengan 99,24%. *Output* kegiatan ini adalah dekorasi ruang pertemuan 1 paket; Pemasangan kusen dan teralis kantor UPTD BPSB dan kantor SUP 4 paket; Pemasangan keramik teras kantor sub unit pelayanan 3 paket; papan nama UPTD BPSB 4 set. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana gedung Kantor UPTD BPSBP;
- (10) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Kantor UPTD BPSBP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp272.593.840,00 dan dan realisasi sebesar

Rp267.120.571,00 atau setara dengan 97,99%. *Output* kegiatan ini adalah dekorasi ruangan kantor UPTD BPSB 1 paket; Penyediaan loker 3 unit; komputer unit; AC 3 unit; server 1 unit; Komputer PC 2 unit; mic wireless 1 unit; *scanner* legal/F4 1 unit; *printer* 3 unit; mesin fax 1 unit; dispenser 3 unit; proyektor 1 unit; penangkal petir 2 set. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pendukung Kantor UPTD BPSBP;

- (11) Kegiatan DAK - Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp168.382.600,00 dan dan realisasi sebesar Rp168.315.200,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan adalah jas laboratorium 5 Stel; peralatan laboratorium 1 paket; mesin pembubuk kopi (*grinder*) 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana di Lingkup kantor UPTD BPSBP.

h. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perkebunan

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perkebunan yakni persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Perkebunan sebesar 100%; jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB lingkup Dinas Perkebunan sebesar 100%; tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Dinas Perkebunan sebesar 100%. Alokasi Anggaran Program sebesar Rp9.553.596.963,00 dengan realisasi sebesar Rp9.147.403.328,00 atau setara dengan 95,75%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp499.064.240,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah jasa kebersihan 5 orang; jasa keamanan 6 orang. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.908.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp395.070.500,00 atau setara dengan 98,79%. *Output*

- kegiatan adalah BBM kendaraan dinas operasional 1 tahun; perpanjangan STNK kendaraan roda 4; servis kendaraan operasional roda 4 12 unit; pelumas kendaraan operasional 10 unit. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp398.785.660,00 atau setara dengan 99,70%. *Output* kegiatan adalah peralatan kebersihan 12 bulan; pengisian tabung pemadam kebakaran 1 tahun; jasa kebersihan 12 bulan; seragam dan peralatan kamdal 1 paket; jasa tenaga harian lepas 6 orang; pemeliharaan komputer 4 kali; pemeliharaan mesin tik/fax/ac 4 kali; pemeliharaan *printer* 12 kali; perbaikan mebel 1 paket; pemeliharaan *soundsistem/kamera/handycam* 4 kali; pelaburan bangunan kantor; pemeliharaan instalasi jaringan air, listrik, dan internet; pemeliharaan taman 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, dan Bimtek Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp331.574.000,00 atau setara dengan 82,89%. *Output* kegiatan adalah biaya penunjang *benchmarking* Diklatpim III 2 orang; biaya penunjang *benchmarking* Diklatpim IV 4 orang; uang saku bimtek 5 orang; uang saku Diklatpim 6 orang; ATK 4 kali; cetak dokumen 2 kali; biaya kursus/pelatihan/bimtek 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp457.150.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp428.482.000,00 atau setara dengan 93,73%. *Output* kegiatan adalah goody bag 3 kali; instruktur senam 11 bulan; ceramah bulan Ramadhan 16 orang; penceramah peringatan hari besar Islam 3 orang; guru tahsin 11 bulan; penceramah bulanan 12 bulanan; Jiwa korsa 158 orang; sewa lapangan bulu tangkis dan futsal 11 bulan; mamini porpemprov 1 paket; pakaian batik purnabakti 12 stel; pakaian olahraga 127 stel. *Outcome*

- kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.997.120,00 dan dan realisasi sebesar Rp399.433.750,00 atau setara dengan 99,86%. *Output* kegiatan adalah ATK Sekretariat dan bidang 4 kali; cetak backdrop 3 buah; cetak baliho 12 buah; cetak banner 12 buah; cetak spanduk 12 buah; mamin rapat pimpinan 390 box; mamin rapat internal 890 box; air mineral galon 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - (7) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.992.891,00 dan dan realisasi sebesar Rp339.902.658,00 atau setara dengan 84,98%. *Output* kegiatan adalah alat listrik dan elektronik 12 bulan; plakat 100 buah; langganan telepon 12 bulan; langganan air ledeng 12 bulan; langganan listrik 12 bulan; langganan surat kabar/majalah 12 bulan; langganan jasa fax 12 bulan; langganan internet 12 bulan; langganan TV kabel 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - (8) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp149.682.000,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah cetak dokumen dinas 4 kali; fotokopi dokumen dinas; penjilidan dokumen dinas 8 kali. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - (9) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp498.959.025,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah mamin rapat internal 12 bulan; perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - (10) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang

- dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp399.874.346,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah honor tenaga satpam, pengemudi, dan front office 10 orang. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD BPTP), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.814.749,00 dan dan realisasi sebesar Rp162.686.061,00 atau setara dengan 81,42%. *Output* kegiatan adalah ATK 12 bulan; alat listrik dan elektronik 12 bulan; perangko dan materai 12 bulan; plakat 10 buah; Langganan listrik 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPP;
- (12) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPTP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp150.946.790,00 atau setara dengan 75,47%. *Output* kegiatan adalah jasa tenaga kerja nonpegawai 2 orang; mamim rapat 12 bulan; air mineral galon 20 buah; perjalanan dinas PNS dan Non-PNS 12 bulan . *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPP;
- (13) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor UPTD BPTP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.495.200,00 dan dan realisasi sebesar Rp187.295.200,00 atau setara dengan 93,88%. *Output* kegiatan adalah honor penceramah peringatan hari besar Islam/bulan puasa 12 bulan; jasa tenaga kerja nonpegawai 2 orang; sewa Gedung olahraga 10 bulan; pakaian kerja lapangan 12 stel; pakaian olahraga + sepatu 50 set. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPP;
- (14) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPTP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.996.545,00 dan dan realisasi sebesar Rp170.358.783,00 atau setara dengan 85,18%. *Output* kegiatan adalah pengisian tabung gas 60 tabung; langganan telepon 12 bulan; langganan air 12 bulan; langganan surat kabar/majalah 12 bulan; langganan internet 12 bulan; langganan tv berbayar 12 bulan; jasa tenaga kerja nonpegawai 2 orang; cetak/fotokopi/penjilidan dokumen 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPP;

- (15) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD BPTP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.924.340,00 dan dan realisasi sebesar Rp190.730.453,00 atau setara dengan 99,86%. *Output* kegiatan adalah jasa tenaga kerja nonpegawai 3 orang; pelumas kendaraan operasional 12 bulan; pemeliharaan komputer 12 bulan; pemeliharaan mesin tik/fax/AC 8 kali. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPP;
- (16) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPTP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.607.377,00 dan dan realisasi sebesar Rp143.300.200,00 atau setara dengan 95,78%. *Output* kegiatan adalah alat dan bahan kebersihan 12 bulan; jasa tenaga kerja nonpegawai 12 bulan; pakaian kerja lapangan 7 stel; pemeliharaan instalasi jaringan air, listrik, dan internet 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPP;
- (17) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPTP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.992.300,00 dan dan realisasi sebesar Rp135.467.300,00 atau setara dengan 90,32%. *Output* kegiatan adalah BBM kendaran operasional 12 bulan; perpanjangan STNK kendaraan operasional 12 bulan; jasa KIR 12 bulan; jasa tenaga kerja nonpegawai 1 orang; servis kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 15 unit; pelumas kendaraan operasional roda 2 dan 4 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPP;
- (18) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya UPTD BPTP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.569.260,00 dan dan realisasi sebesar Rp463.849.888,00 atau setara dengan 92,85%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan 7 orang; jasa kebersihan 7 orang; peralatan dan bahan kebersihan 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPP;
- (19) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPPB- TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.889.698,00 dan dan realisasi sebesar Rp199.653.814,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah ATK 12 bulan; Materai 12 bulan; pengisian tabung gas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPPB;

- (20) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPPB-TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp187.207.455,00 atau setara dengan 93,60%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi penyediaan jasa komunikasi, listrik, dan internet 12 bulan; cetakan dokumen 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPPB;
- (21) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, dan Dokumentasi Kantor UPTD BPPB-TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.481.772,00 dan dan realisasi sebesar Rp99.481.754,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tausiah rutin BPPBP 12 bulan, sewa gedung olahraga badminton dan sewa gedung olahraga futsal BPPBP 12 bulan; serta Belanja Pakaian Olahraga BPPBP. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPPB;
- (22) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPPB-TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.997.815,00 dan dan realisasi sebesar Rp299.991.535,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah makanan dan minuman Rapat 12 bulan; Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan BPPBP di kebun dinas 12 bulan; serta Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan BPPBP 12 serta menghadiri undangan ke pusat 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPPB;
- (23) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, dan Gedung Kantor UPTD BPPB-TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.999.587,00 dan dan realisasi sebesar Rp349.486.545,00 atau setara dengan 99,85%. *Output* kegiatan adalah jasa keamanan kantor sub unit dan kebun dinas 4 orang; pemeliharaan komputer, pemeliharaan alat studio dan alat komunikasi, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPPB;
- (24) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPPB-TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.974.100,00 dan dan realisasi sebesar Rp149.804.100,00 atau setara dengan 99,89%. *Output* kegiatan adalah belanja Alat Listrik dan Elektronika 12 bulan; Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12

- bulan. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPPB;
- (25) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPPB-TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.760,00 dan dan realisasi sebesar Rp145.346.427,00 atau setara dengan 96,90%. *Output* kegiatan adalah belanja BBM untuk Kendaraan Operasional untuk Distribusi Benih, Roda Tiga dll; Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Operasional BPBTP R2, R3 dan R4; Servis Kendaraan Operasional Kantor BPBTP (R2, R3 dan R4). *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPPB;
- (26) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya Kantor UPTD BPPB-TP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.131.618,00 dan dan realisasi sebesar Rp498.631.285,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah jasa kebersihan (Cleaning Servis); Jasa Keamanan Kantor Sub Unit dan Kebun Dinas BPPBP; Pakaian Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor UPTD BPPBP. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran UPTD BPPB;
- (27) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPSBP yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.988,00 dan dan realisasi sebesar Rp199.550.360,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah ATK Kantor UPTD BPSB dan 3 sub unit pelayanan BPSB; Materai dan benda pos; plakat unit; perlengkapan olahraga 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam mendukung tupoksi kantor UPTD BPSBP;
- (28) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPSBP yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan dan realisasi sebesar Rp187.730.065,00 atau setara dengan 93,87%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi langganan telepon 12 bulan; langganan air ledeng 12 bulan; langganan listrik 12 bulan; langganan surat kabar 12 bulan; langganan internet 12 bulan; langganan tv kabel 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Terfasilitasinya langganan kantor untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan kantor UPTD BPSBP;
- (29) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD BPSBP yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp149.849.989,00 dan dan realisasi sebesar Rp146.430.000,00 atau setara dengan 97,72%. *Output* kegiatan adalah profil UPTD BPSB 1 paket; pembangunan website UPTD BPSB 1 paket; sewa mesin fotokopi 12 bulan; jasa IT pembuatan aplikasi *e-office* 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam mendukung tupoksi Kantor UPTD BPSBP;
- (30) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPSBP yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.996.350,00 dan dan realisasi sebesar Rp194.650.500,00 atau setara dengan 97,33%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi mamin rapat 12 bulan; mamin tamu 12 bulan; perjalanan dinas 12 bulan; isi ulang air mineral 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Terfasilitasinya penyediaan rapat internal dan luar kantor untuk menunjang kegiatan UPTD BPSBP;
- (31) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD BPSBP yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.838.820,00 dan dan realisasi sebesar Rp249.286.565,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan ini adalah pemeliharaan *computer* dan laptop 12 bulan; pemeliharaan *printer*/mesin tik 12 bulan; pemeliharaan gedung dan bangunan kantor BPSB dan Sub unit pelayanan 4 paket. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD BPSBP;
- (32) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPSBP, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.997.285,00 dan dan realisasi sebesar Rp149.160.861,00 atau setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah alat listrik dan elektronik 12 bulan; pengisian tabung pemadam kebakaran 6 unit; isi ulang tabung gas. *Outcome* kegiatan adalah Terfasilitasinya Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPSBP;
- (33) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPSBP yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp149.995.600,00 dan dan realisasi sebesar Rp149.951.000,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah servis kendaraan operasional 12 bulan; penggantian suku cadang kendaraan dinas 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Terpeliharanya Kendaraan Dinas UPTD BPSBP;
- (34) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Kantor UPTD BPSBP yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.996.799,00 dan dan realisasi sebesar Rp495.578.208,00 atau setara dengan 99,12%. *Output* kegiatan adalah bahan dan alat kebersihan balai dan 3 SUP 4 paket; honor tenaga kebersihan 4 orang; honor tenaga front office 2 orang; honor kamdal 4 orang; pakaian kerja lapangan 30 stel; pakaian kerja pramubakti dan pengemudi 7 stel; pakaian kerja petugas kebersihan 4 stel. *Outcome* kegiatan adalah Terfasilitasinya tenaga Kerja Keamanan dan Kebersihan beserta peralatannya lingkup Kantor UPTD BPSBP.

i. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Peternakan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Peternakan yakni Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP) dengan capaian sebesar 126,07% dari target 126,07%; produksi komoditas peternakan daging 1.065.014 ton dari target 1.043.467 ton, telur 262.989 ton dari target 243.517 ton dan susu 351.885 ton dari 326.698 ton. Alokasi anggaran Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Peternakan adalah sebesar Rp28.711.499.909,00 dengan realisasi sebesar Rp26.902.034.595,00 atau atau setara dengan 93,70%.

- (1) Kegiatan Produksi dan Produktifitas Ternak yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.548.210.006,00 dan realisasi sebesar Rp2.402.322.824,00 atau setara dengan 94,27%. *Output* kegiatan adalah peningkatan angka kebuntingan dan kelahiran ternak ruminansia besar/kecil, peningkatan produksi telur (*hen day*), peningkatan daya tetas, kelompok yang menerapkan prinsip-prinsip *good breeding practice* (bibit) ruminansia kecil/unggas, Jumlah *Good Farming Practice* (budidaya) unggas. *Outcome* kegiatan adalah laju pertumbuhan populasi ternak ruminansia besar, kecil dan unggas;
- (2) Kegiatan Kawasan Peternakan berbasis Korporasi Peternakan Rakyat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.699.960.402,00 dan realisasi sebesar Rp3.618.223.924,00 atau setara dengan 76,98%. *Output* kegiatan adalah fasiltasi pengemb-angan klaster peternakan, sosialisasi dan bimtek pengembangan klaster peternakan, rancangan pilot project pengembangan klaster peternakan, penetapan wilayah sumber bibit. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan populasi dan produksi komoditi ternak;

- (3) Kegiatan Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Usaha Peternakan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp473.463.816,00 atau setara dengan 94,69%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi akses pembiayaan, sosialisasi kemitraan usaha peternakan, pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran, pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang dibina menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)/Good Handling Practices (GHP)*. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan pelaku usaha dengan produktivitas yang meningkat;
- (4) Kegiatan Informasi Harga Pasar Komoditas Peternakan dan Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp319.995.641,00 dan realisasi sebesar Rp309.903.600,00 atau setara dengan 96,85%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kualitas pakan dan bahan pakan ternak, sosialisasi penerapan *Standard Operating Procedure* pasar ternak. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelaku usaha dengan produktivitas peternakan yang meningkat;
- (5) Kegiatan Pengamatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp958,927,703,00 dan realisasi sebesar Rp911.095.044,00 atau setara dengan 95,01%. *Output* kegiatan adalah Hewan Penular Rabies (HPR) yang di vaksinasi Rabies, unggas yang divaksinasi *Review*, sapi perah yang divaksinasi *Brucellosis*, ternak ruminansia yang divaksinasi *Anthrax*. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan status kesehatan hewan dan peningkatan status produk hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal;
- (6) Kegiatan Pembinaan, Penerapan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp704.999.942,00 dan realisasi sebesar Rp666.472.450,00 atau setara dengan 94,54%. *Output* kegiatan adalah unit usaha produk hewan yang diaudit/surveillans jaminan mutu. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan status produk hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal;
- (7) Kegiatan Pelayanan Pengujian Penyakit Hewan di Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp589.151.810,00 dan realisasi sebesar Rp369.424.450,00 atau setara dengan 62,70%. *Output*

kegiatan adalah pengujian penyakit hewan, pengawasan lalu lintas hewan di perbatasan provinsi dan pelatihan Sumber Daya Manusia. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penyidikan, pengujian penyakit dan produk hewan;

- (8) Pelayanan Pengujian Produk Hewan di Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp248.614.405,00 dan realisasi sebesar Rp226.138.331,00 atau setara dengan 90,96%. *Output* kegiatan adalah kepengujian produk hewan, pengawasan produk hewan pada lalu lintas produk hewan di perbatasan provinsi serta pelatihan Sumber Daya Manusia. *Outcome* kegiatan adalah pelayanan pengujian, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan;
- (9) Kegiatan Akreditasi Laboratorium Pengujian di Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp127.492.300,00 dan realisasi sebesar Rp97.757.500,00 atau setara dengan 76,68%. *Output* kegiatan adalah rekomendasi hasil pengujian penyakit hewan dan produk hewan, rekomendasi hasil pemeriksaan lalu lintas hewan dan produk hewan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). *Outcome* kegiatan adalah penambahan ruang lingkup akreditasi ISO/IEC 17025: 2017 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (10) Kegiatan Pelayanan Medis di UPTD Rumah Sakit Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp332.620.411,00 dan realisasi sebesar Rp320.096.537,00 atau setara dengan 96,23%. *Output* kegiatan adalah pelayanan konsultasi medik, pemeriksaan klinis/jasa medik, pengobatan, rawat inap, bedah minor dan mayor serta orthopedik, vaksinasi, ambulatori, USG, *X-Ray*, laboratorium diagnostik, *grooming* sakit dan *scaling* gigi, jumlah fasilitas penunjang medik veteriner, pendidikan berkelanjutan bagi SDM di Rumah Sakit Hewan, lokasi pendampingan pelayanan kesehatan hewan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya tingkat kesembuhan pasien dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (11) Kegiatan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan di Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Ternak Cikole – Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Alokasi anggaran sebesar Rp404.656.548,00 dan

realisasi sebesar Rp365.233.105,00 atau setara dengan 90,26%. *Output* kegiatan adalah pengujian pakan/bahan pakan baik aktif servis maupun pasif servis dan petugas yang mengikuti pelatihan teknis bersertifikat. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan pelayanan pengujian mutu dan keamanan pakan ternak;

- (12) Kegiatan Budidaya Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.311.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.302.403.282,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan adalah produksi susu pertahun, peningkatan kelahiran ternak, penurunan nilai *Service per Conception* (S/C), peningkatan nilai *Conception Rate* (CR) dan penurunan persentase kematian dan produksi Hijauan Pakan Ternak. *Outcome* kegiatan adalah ternak sapi perah yang memiliki produksi individu ≥ 5.000 kg/laktasi;
- (13) Kegiatan Kaji Terap Teknologi Sapi Perah, Pakan dan Produksi Hasil Ternak di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp494.198.500,00 dan realisasi sebesar Rp485.526.479,00 atau setara dengan 98,25%. *Output* kegiatan adalah penerapan teknologi pengolahan pakan, penerapan pemanfaatan limbah ternak, jumlah ternak sapi perah yang disebarkan di masyarakat, assesmen sistem manajemen mutu SNI 9001: 2015, diversifikasi produk olahan susu yang memenuhi persyaratan SNI, diversifikasi produk olahan susu yang tersertifikasi, penjualan diversifikasi produk olahan susu, peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). *Outcome* kegiatan adalah peningkatan produksi hijauan pakan ternak yang berkualitas;
- (14) Kegiatan Pelayanan Teknis Kebutuhan Dasar Ternak di UPTD BPPIBTSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.813.774.037,00 dan realisasi sebesar Rp2.782.273.726,00 atau setara dengan 98,88%. *Output* kegiatan adalah peningkatan angka kelahiran (dari Akspetor) dan penurunan angka kematian. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan produksi susu;
- (15) Kegiatan Pengujian Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPTD BPPIBTSP Bunikasih sebesar Rp210.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp202.989.346,00 atau setara dengan 96,69%. *Output* kegiatan adalah jumlah induk

- laktasi dengan produksi susu per laktasi > 5.000 liter. *Outcome* kegiatan adalah bibit ternak betina sesuai SNI dari produksi bibit betina yang dihasilkan;
- (16) Kegiatan Pelayanan UPTD BPPIBTSP Bunikasih pada kelompok ternak sapi perah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Alokasi anggaran sebesar Rp272.565.000,00 dan realisasi sebesar Rp253.717.25000 atau setara dengan 93,09%. *Output* kegiatan adalah Presentase pendukung sarana prasarana berupa bahan prkatek lapangan (demfarm), jumlah bimtek teknologi pengembangan sapi perah, jumlah penyebaran dokumen informasi dan teknologi pengembangan sapi perah, jumlah assesmen sistem manajemen mutu SNI 9001: 2015. *Outcome* kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai;
- (17) Kegiatan Pelayanan Dasar Teknis Pembibitan Ternak Domba dan Kambing Di UPTD BPPTDK Margawati yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.155.364.705,00 dan realisasi sebesar Rp3.139.391.80800 atau setara dengan 99,49%. *Output* kegiatan adalah parameter teknis yang digunakan sebagai dasar seleksi mutu genetik *Outcome* kegiatan adalah peningkatan bibit domba dan kambing sesuai SNI yang dihasilkan;
- (18) Kegiatan Pengujian dan Aplikasi Teknologi Untuk Peningkatan Performance Ternak Domba dan Kambing di UPTD BPPTDK Margawati yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp417.546.460,00 dan realisasi sebesar Rp416.998.01400 atau setara dengan 99,87%. *Output* kegiatan adalah parameter teknis yang digunakan sebagai dasar seleksi mutu genetik. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan bibit domba dan kambing sesuai SNI yang dihasilkan;
- (19) Kegiatan pelayanan UPTD BPPTDK Margawati pada kelompok ternak domba dan kambing yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp142.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp142.247.78500 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah penanganan pengolahan limbah, assesmen sistem manajemen mutu SNI 9001: 2015, diseminasi teknologi pengembangan ternak domba, penerapan disemniasi tekonologi pengembangan ternak domba di kelompok, penyebaran dokumen informasi dan teknologi pengembangan ternak domba/kambing, jumlah ternak domba/kambing yang disebarakan ke kelompok. *Outcome* kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai;

- (20) Kegiatan Pelayanan Teknis Kebutuhan Dasar Ternak Unggas di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar sebanyak Rp4.099.642.060,00 dan realisasi sebesar Rp4.081.561.55200 atau setara dengan 99,56%. *Output* kegiatan adalah produksi *Day-Old Chick* (DOC) ayam sentul, produksi *Day-Old Duck* (DOD) ternak itik, cetakan publikasi dan dokumentasi, jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan bibit unggas. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan bibit ayam sentul unggul;
- (21) Kegiatan Pemuliaan Ternak Unggas Lokal di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.328.206,00 dan realisasi sebesar Rp373.917.25000 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah peningkatan jumlah produksi telur ayam sentul, jumlah produksi telur itik, jumlah supervisi sistem manajemen mutu. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan bibit itik rambon galur murni, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (22) Kegiatan Penerapan dan Penyebaran Informasi Teknologi Perbibitan Sapi Potong di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis dan Kelompok Perbibitan Sapi Potong di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp580.149.721,00 dan realisasi sebesar Rp560.853.68400 atau setara dengan 96,67%. *Output* kegiatan adalah bibit ternak sapi potong yang dikembangkan di masyarakat, kelompok ternak binaan UPTD Balai, sarana dan prasarana gelar teknologi di UPTD BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis, penyebaran dokumen informasi, benih (semen beku) yang didistribusi ke masyarakat dan teknologi pengembangan ternak sapi potong. *Outcome* kegiatan adalah penyebaran pengetahuan dan keterampilan peternak serat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (23) Kegiatan Pelayanan Teknis Kebutuhan Dasar di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.404.481.106,00 dan realisasi sebesar Rp2.391.028.56800 atau setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana prosesing semen beku, jumlah petugas SDM pelaksana di laboratorium, jumlah peningkatan hasil uji performa bibit ternak Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB), persentase klaster *standar* mutu bibit sapi calon

pengganti (*replacemen stock*), jumlah angka kematian, jumlah angka kelahiran, jumlah peningkatan hasil uji performa bibit ternak SNI, jumlah dokumen rekording mutu bibit ternak sapi potong berstandar SNI. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan laju produksi benih semen beku sapi potong, induk sapi potong yang memiliki SKLB, bibit ternak sapi potong sesuai SNI dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

j. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Capaian indikator kinerja Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan capaian indikator kinerja adalah perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah sebesar Rp1.223.075.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.108.873.414,00 atau setara dengan 90,66%.

- (1) Kegiatan penyusunan data base ketahanan pangan dan peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp305.090.000,00 dengan realisasi sebesar Rp305.084.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data dan informasi pada pembangunan ketahanan pangan dan peternakan dengan pertemuan *workshop* statistik, dokumen data fungsi dan keswan, buletin informasi jumlah verifikasi dan validasi. *Outcome* kegiatan adalah dokumen data statistik ketahanan pangan dan peternakan yang akurat dan akuntabel;
- (2) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp184.400.000,00 dengan dan realisasi sebesar Rp184.371.320,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah tersedianya laporan hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja dinas dengan laporan capaian kinerja(LKPJ; LKIP; LPPD; laporan tahunan; 12 laporan bulanan, 4 laporan triwulan, 4 laporan evaluasi Renja. *Outcome* kegiatan adalah dalam mendukung manajemen perkantoran;
- (3) Kegiatan Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa

Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.713.200,00 atau setara dengan 99,14%. *Output* kegiatan adalah tersedianya laporan dan tertibnya administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif, akurat dan akuntabel;

- (4) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp583.585.000,00 dan realisasi sebesar Rp470.704.894,00 atau setara dengan 80,66%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan (Pra RKA, RKA; DPA; DIPA; DPA Pergeseran; RKA Perubahan; DPA Perubahan, Renja, RKT, Renstra. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya perencanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang efisien, efektif, akurat, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan rencana strategis dinas.

k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja dinas yang efisien, efektif, akurat dan akuntabel dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran program sebesar Rp4.055.450.210,00 dan realisasi Rp3.963.470.595,00 atau setara 97,73%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp340.457.560,00 dan realisasi sebesar Rp297.216.390,00 atau setara dengan 87,30%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan pengadaan peralatan administrasi perkantoran (pengukuran tanah, pengadaan/fotokopi, mesin tik elektrik, komputer *mainframe/server*, meja rapat, sofa, pengadaan CCTV, infokus, dan layar proyektor. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya tingkat pemenuhan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung tupoksi dan kinerja dinas yang berkualitas;
- (2) Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp159.598.290,00 dan realisasi sebesar Rp147.704.470,00 atau setara dengan 92,55%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasnya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kantor dibalai. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya tingkat pemenuhan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- (3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan DAK Pengadaan Sarana Pengujian di BPMKP/BP Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp225.237.863,00 dan realisasi sebesar Rp202.105.717,00 atau setara dengan 89,73%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan pengadaan sarana prasarana perkantoran, laboratorium, mebel, administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang;
 - (4) Kegiatan Sarana dan Prasarana Budidaya Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp729.191.908,00 dan realisasi sebesar Rp728.196.848,00 atau setara dengan 99,86%. *Output* kegiatan adalah sarana dan prasarana peralatan laboratorium pengujian, *Outcome* kegiatan adalah ketersediaan pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang;
 - (5) Kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp58.443.481,00 dan realisasi sebesar Rp57.354.000,00 atau setara dengan 98,14%. *Output* kegiatan adalah sarana prasarana pakaian kerja lapangan pelatihan, peralatan dan perlengkapan kantor. *Outcome* kegiatan adalah ketersediaan pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang;
 - (6) Kegiatan DAK Pembangunan Kandang Ternak dan Pembangunan Greenhouse di BPPIBTSP Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp87.456.750,00 dan realisasi sebesar Rp87.269.250,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* kegiatan adalah pengadaan konstruksi

- fisik/bangunan bukan gedung. *Outcome* kegiatan adalah ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana kerja UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis;
- (7) Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Balai di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp745.986.308,00 dan realisasi sebesar Rp743.665.308,00 atau setara dengan 99,71%. *Output* kegiatan adalah pengadaan konstruksi fisik/bangunan bukan gedung. *Outcome* ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana kerja UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi;
 - (8) Kegiatan DAK Pembangunan Kandang Kambing di Tambak Mekar di BPPTDK Margawati dengan Satuan Pelayanan Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Tambakmekar Subang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp456.617.007,00 dan realisasi sebesar Rp456.617.007,00 atau setara dengan 100%. *Output* pengadaan konstruksi fisik/bangunan bukan gedung. *Outcome* ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana kerja UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati;
 - (9) Kegiatan Penguatan Pelayanan di Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp169.094.855,00 dan realisasi sebesar Rp165.988.700,00 atau setara dengan 98,16%. *Output* kegiatan adalah peralatan peternakan, perlengkapan kantor, administrasi perkantoran, alat-alat laboratorium, alat dapur, penghias rumah. *Outcome* kegiatan adalah ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana kerja UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - (10) Kegiatan Revitalisasi di UPTD BPPDK Margawati dan SP3PDK Tambakmekar yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 relisasi Rp99.290.000,00 atau setara dengan 99,29%. *Output* kegiatan adalah kandang kambing/domba, mess peserta PKL/magang/penelitian, exercise ternak domba/kambing, jalan lingkungan kandang, mesin choper, kendaraan angkut pengunjung dan sarana lainnya. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati;
 - (11) Kegiatan DAK pengadaan sarana Penguujian di BPMKP/BP Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp983.366.188,00 realisasi sebesar Rp977.939.405,00 atau setara dengan 99,45%. *Output* kegiatan adalah alat-alat laboratorium peternakan dan sarana prasarana komputer administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Cikole Lembang.

1. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu terfasilitasinya kebutuhan administrasi perkantoran dalam mendukung kinerja dinas dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp19.432.323.792,00 dan realisasi Rp17.946.561.496,00 atau sebesar 92,35%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp275.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp127.906.500,00 atau setara dengan 46,44%. *Output* kegiatan adalah kapasitas peningkatan sumberdaya apratur dengan penyewaan gedung, makan minum, pakaian batik dan olahraga. *Outcome* ASN yang dapat memiliki kepribadian, kebugaran, dinamis, harmonisasi yang baik dalam meningkatkan kinerja dinas;
- (2) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp342.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp302.230.700,00 atau setara dengan 88,27%. *Output* kegiatan adalah kapasitas peningkatan sumberdaya apratur yang harmonis dengan membangun membangun karakter kebersamaan/keharmonisan (outbond), bimbingan teknis, pelatihan. *Outcome* kegiatan adalah ASN yang dapat memiliki kompetensi dalam meningkatkan kinerja dinas;
- (3) Kegiatan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp497.960.000,00 dengan dan realisasi sebesar Rp377.271.530,00 atau setara dengan 75,76%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pelaksanaan dalam

mendukung kinerja dinas dengan penyediaan alat listrik dan elektronik, alat kebersihan, langganan telpon, air, listrik, penggandaan/fotokopi dan pakaian kerja lapangan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;

- (4) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp314.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp312.822.930,00 atau setara dengan 99,63%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kondisi kendaraan yang dapat digunakan dengan servis, pelumas, suku cadang, KIR, STNK dan bahan bakar. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana operasional kendaraan dinas dalam kondisi baik di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- (5) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp519.657.208,00 dan realisasi sebesar Rp464.008.600,00 atau setara dengan 89,29%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kondisi kendaraan yang dapat digunakan dengan servis, pelumas, suku cadang, KIR, STNK dan bahan bakar serta terpeliharanya gedung kantor dan instalasi jaringan. *Outcome* kegiatan adalah sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas;
- (6) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp237.865.580,00 dan realisasi sebesar Rp181.479.540,00 atau setara dengan 76,29%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran meliputi ATK, materai, cederamata dan penggandaan/fotokopi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran di dinas;
- (7) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp1.410.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.262.936.352,00 atau setara dengan 89,52%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan jasa kebersihan, surat kabar, internet, keamanan dan tenaga kerja nonpegawai. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan

manajemen perkantoran dalam meningkatkan kinerja dinas;

- (8) Kegiatan Penyediaan Langganan Rapat Internal dan Luar kantor yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp1.536.241.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.315.379.474,00 atau sebesar 85%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan pertemuan rapat dan makan minum. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dinas;
- (9) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai di Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (BKHKMV) yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp91.499.190,00 dan realisasi sebesar Rp82.324.955,00 atau sebesar 89,97%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan ATK, materai, cenderamata, alat rumah tangga, jasa pengiriman dan cetak. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (10) Kegiatan penyediaan langganan kantor di BKHKMV yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp379.992.180,00 dan realisasi sebesar Rp343.259.821,00 atau sebesar 90,33%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan surat kabar, internet, jasa pengiriman, keamanan/pengemudi dan tenaga kerja nonpegawai. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (11) Kegiatan Penyediaan Langganan Rapat Internal dan Luar kantor di BKHKMV yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.996.500,00 dan realisasi sebesar Rp246.977.736,00 atau setara dengan 98,79%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan pertemuan rapat dan makan minum dan perjalanan balai. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dinas;
- (12) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di BKHKMV yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan

dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp153.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp111.700.200,00 atau setara dengan 72,77%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pelaksanaan dalam mendukung kinerja balai dengan penyediaan alat listrik dan elektronik, alat kebersihan, langganan telpon, air, listrik, tabung gas. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;

- (13) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di BKHKMV yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp419.998.500,00 realisasi sebesar Rp380.959.712,00 atau setara dengan 90,71%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan sarana kebersihan, keamanan/pengemudi. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (14) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di BKHKMV yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.997.800,00 dan realisasi sebesar Rp90.955.136,00 atau setara dengan 90,96%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kondisi kendaraan yang dapat digunakan dengan servis, pelumas, suku cadang, KIR, STNK dan bahan bakar. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana dalam kendaraan dinas dalam kondisi baik di UPTD BKHKMV;
- (15) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di BKHKMV yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp207.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp184.974.914,00 atau setara dengan 89,14%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan sarana kebersihan, percetakan, angkutan darat bermotor, pemeliharaan komputer, perlengkapan kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat kedokteran, jasa konstruksi, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, halaman pekarangan, dan bangunan bukan gedung. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (16) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Nonpegawai di UPTD Rumah Sakit yang

dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp793.841.570,00 dengan realisasi sebesar Rp783.696.610,00 atau setara dengan 98,72%. *Output* terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan surat kabar, keamanan/pengemudi, sarana pembersih dan tenaga kerja nonpegawai dengan. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;

- (17) Kegiatan Pemeliharaan perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Rumah Sakit Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp92.422.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.263.680,00 atau setara dengan 96,58%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan sarana prasarana pemeliharaan komputer. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (18) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Rumah Sakit Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp165.099.270,00 anggaran Rp153.541.475,00 atau setara dengan 93,00%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat listrik dan elektronik, pengisian tabung pemadam kebakaran, pengisian tabung gas, langganan listrik dan jasa internet. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di UPTD Rumah Sakit Hewan;
- (19) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Rumah Sakit Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp83.994.800,00 dan realisasi sebesar Rp78.338.189,00 atau setara dengan 93,27%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal, evaluasi dan makan minum. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di UPTD Rumah Sakit Hewan;
- (20) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Rumah Sakit Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp270.902.657,00 realisasi sebesar Rp267.773.139,00 atau setara dengan 98,84%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa kebersihan dan keamanan/pengemudi. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di UPTD Rumah Sakit Hewan;

- (21) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai di UPTD Rumah Sakit Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp53.994.619,00 dan realisasi sebesar Rp47.262.600,00 atau sebesar 87,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat tulis kantor, perangko, dekorasi dan desain interior/eksterior, alat-alat rumah tangga habis pakai, cetak, fotokopi dan penjilidan. *Outcome* kegiatan adalah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- (22) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Rumah Sakit Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp64.999.600,00 dan realisasi sebesar Rp42.445.510,00 atau setara dengan 65,30%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kondisi kendaraan yang dapat digunakan dengan servis, pelumas, suku cadang, KIR, STNK dan bahan bakar. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Rumah Sakit Hewan Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- (23) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp87.397.268,00 dan realisasi sebesar Rp86.387.400,00 atau sebesar 98,84%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat tulis kantor, perangko, cetak fotokopi dan penjilidan. *Outcome* kegiatan adalah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- (24) Kegiatan penyediaan langganan kantor di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp146.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp135.429.101,00 atau sebesar 92,63%. *Output* kegiatan adalah jumlah langganan telepon, listrik, surat kabar/majalah, keamanan, tenaga kerja nonpegawai. *Outcome* kegiatan adalah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- (25) Kegiatan Penyediaan Langganan Rapat Internal dan Luar kantor di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp93.517.500,00 dan realisasi sebesar Rp92.174.500,00 atau setara dengan 98,56%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal, evaluasi dan makan minum. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi

perkantoran di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan;

- (26) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp9.996.036,00 anggaran Rp9.900.000,00 atau setara dengan 99,04%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pengisian tabung pemadam kebakaran, pengisian tabung gas dan langganan telpon. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- (27) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp45.790.000,00 dan realisasi sebesar Rp44.668.113,00 atau setara dengan 97,55%. *Output* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- (28) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp177.499.100,00 realisasi sebesar Rp175.312.703,00 atau setara dengan 99,89%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa kebersihan dan keamanan/pengemudi. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- (29) Kegiatan Pemeliharaan perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp66.858.680,00 dan realisasi sebesar Rp66.641.000,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah Pemeliharaan rutin/berkala prabotan. *Outcome* kegiatan adalah sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- (30) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp314.993.000,00 dan realisasi sebesar Rp313.843.041,00 atau setara dengan 99,63%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya

kendaraan dinas Balai, *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di unit kerja;

- (31) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp217.488.000,00 dan realisasi sebesar Rp215.044.526,00 atau setara dengan 98,88%. *Output* kegiatan adalah tersedianya belanja alat listrik dan elektronik, pengisian tabung gas, biaya langganan listrik dan telepon di Balai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di unit kerja;
- (32) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.504,00 dan realisasi sebesar Rp145.908.340,00 atau setara dengan 97,27%. *Output* kegiatan adalah tersedianya belanja alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos, pengadaan obat-obatan untuk kesehatan ternak belanja cetak, belanja pengandaan/fotokopi, belanja penjilidan, belanja pakaian kerja lapangan di Balai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di unit kerja;
- (33) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp179.992.300,00 dan realisasi sebesar Rp174.337.929,00 atau setara dengan 96,86%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah PNS Provinsi, *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di unit kerja;
- (34) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp218.625.000,00 dan realisasi sebesar Rp216.246.000,00 atau setara dengan 98,91%. *Output* kegiatan adalah tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, honor jasa kebersihan/pramu bakti, jasa keamanan, pengemudi dan *front office* di Balai.

- Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di unit kerja;
- (35) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp216.684.016,00 dan realisasi sebesar Rp185.169.606,00 atau setara dengan 98,18%. *Output* terbayarkannya upah harian lepas, belanja bahan bangunan kebutuhan insidentil, pemeliharaan kandang dan bangunan lainnya jasa konsultasi perencanaan, pemeliharaan kandang, kandang *exercise* dan pagar pembatas- di Balai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di unit kerja;
- (36) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp122.152.450,00 dan realisasi sebesar Rp115.717.082,00 atau setara dengan 94,73%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dukungan administrasi perkantoran dalam penyediaan kebutuhan mamim rapat, tamu dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung kinerja balai;
- (37) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi. yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp160.489.945,00 dan realisasi sebesar Rp156.517.872,00 atau setara dengan 97,53%. *Output* kegiatan adalah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya selama 12 bulan di Balai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di unit kerja;
- (38) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp44.998.086,00 dan realisasi sebesar Rp44.995.900,00 atau setara dengan 99,99%. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dukungan administrasi perkantoran dalam penyediaan barang habis pakai kantor berupa ATK, Materai, Belanja cetak, penggandaan dan penjilidan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung kinerja balai yang efisien, efektif dan akuntabel;

- (39) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp47.799.888,00 dan realisasi sebesar Rp45.883.260,00 atau setara dengan 95,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dukungan administrasi perkantoran dalam penyediaan ATK Materai Plakat/Vandel/Suvenir dan Alat-alat rumah tangga, serta belanja cetak, penggandaan dan penjilidan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung kinerja balai;
- (40) Kegiatan Penyediaan Layanan Kantor di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp142.087.889,00 dan realisasi sebesar Rp141.775.690,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dukungan administrasi perkantoran dalam penyediaan langganan surat kabar, internet, jasa pengemudi dan THL pengelola kandang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung manajemen perkantoran balai yang akuntabel;
- (41) Kegiatan Penyediaan rapat internal dan Luar kantor di UPTD BPPIB TSP Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp178.184.500,00 dan realisasi sebesar Rp172.630.514,00 atau setara dengan 96,88%. *Output* tersedianya dukungan administrasi perkantoran dalam penyediaan makan minum rapat dan makan minum tamu, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah PNS Provinsi. *Outcome* meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di unit kerja;
- (42) Kegiatan Penyediaan alat pendukung fasilitas kantor di UPTD BPPIB TSP Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp640.874.498,00 dan realisasi sebesar Rp616.419.854,00 atau setara dengan 96,18%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dukungan administrasi perkantoran dalam penyediaan alat listrik dan elektronik, pengisian tabung gas, jasa telepon, listrik dan air minum, alat-alat las, kompresor, alat bengkel, mesin choper, mesin babat rumput, pompa drainase, *printer*, CCTV, instalasi perpipaan air, dan pembangunan mushola. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di unit kerja;

- (43) Kegiatan Penyediaan jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di UPTD BPPIB TSP Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp215.395.592,00 dan realisasi sebesar Rp214.099.262,00 atau setara dengan 99,40%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dukungan administrasi perkantoran dalam penyediaan meningkatnya kebutuhan dasar operasional kantor dan standar pelayanan di Balai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung manajemen kinerja balai;
- (44) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD BPPIB TSP Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp246.999.916,00 dan realisasi sebesar Rp242.649.594,00 atau setara dengan 98,24%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana prasarana balai dalam kondisi kendaraan yang dapat digunakan dengan penyediaan servis, pelumas, suku cadang, KIR, STNK dan bahan bakar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung manajemen perkantoran di unit kerja balai;
- (45) Kegiatan Pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor di UPTD BPPIB TSP Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp373.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp366.130.050,00 atau setara dengan 98,15%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan honorarium pengadaan barang/jasa (pemeliharaan gedung dan bangunan asrama), pemeliharaan alat peternakan, peralatan/perengkapan kantor, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium peternakan, pemeliharaan gedung kantor dan gudang, jalan produksi hmt, pengawasan jalan lingkungan, perencanaan jalan lingkungan, pemeliharaan jalan dan jembatan, sumur bor, jaringan listrik dan pipa air, halaman asrama, pemeliharaan bangunan bukan gedung (kandang). *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (46) Kegiatan Penyediaan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur di UPTD BPPIB TSP Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp97.985.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.985.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung

perkantoran dengan honorarium penceramah peringatan hari besar Islam, Pakaian Lapangan (*wearpack*), pakaian kerja lapangan (petugas keamanan) dan sepatu lapangan. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja balai;

- (47) Kegiatan Penyediaan langganan kantor di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.341.787,00 dan realisasi sebesar Rp36.395.081,00 atau setara dengan 92,51%. *Output* kegiatan adalah jumlah langganan surat kabar/majalah, internet dan jasa keamanan. *Outcome* kegiatan adalah unit kerja yang mendapatkan pelayanan dukungan manajemen perkantoran untuk mendukung kinerja balai;
- (48) Kegiatan Penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.900.000,00 atau setara dengan 99,00%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan sewa lapangan voly. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (49) Kegiatan Penyediaan pemeliharaan Kendaraan dinas di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp104.996.300,00 dan realisasi sebesar Rp104.554.321,00 atau setara dengan 99,58%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan BBM, STNK, KIR, servis dan pelumas. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (50) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung kantor di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp130.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp120.970.600,00 atau setara dengan 93,05%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan honorarium kelompok ahli jasa Pemeliharaan ISO 9001-2015, pemeliharaan komputer, pemeliharaan alat peternakan, pemeliharaan mesin tik/fax/AC, pemeliharaan instalasi jaringan air minum, pemeliharaan bangunan bukan

gedung (kandang A). *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja balai;

- (51) Kegiatan Penyediaan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp27.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.225.000,00 atau setara dengan 99,18%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan pakaian kerja lapangan (Jas Hujan, sepatu boot, wearpack). *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja balai;
- (52) Kegiatan Penyediaan alat pendukung fasilitas kantor di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp274.993.900,00 dan realisasi sebesar Rp194.446.508,00 atau setara dengan 70,71%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pelaksanaan dalam mendukung kinerja dinas dengan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor (Baterai AAA/AA Data Traveler (USB) Fitting Gantung biasa, Isolasi Listrik, Kabel NYM), kalkulator, peralatan listrik, pengisian tabung gas, langganan telpon, langganan listrik. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;
- (53) Kegiatan Penyediaan langganan kantor di UPTD BPPTSP HPT Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.041.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.038.694.000,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan surat kabar, internet dan tenaga kerja nonpegawai. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja balai;
- (54) Kegiatan Penyediaan barang habis pakai di UPTD BPMKP/BP Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp12.038.403,00 dan realisasi sebesar Rp10.812.500,00 atau setara dengan 89,82%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan ATK, materai, kesehatan

- (instruktur senam), cetak dan fotokopi. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (55) Kegiatan Penyediaan jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di UPTD BPMKP/BP Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp147.279.307,00 dan realisasi sebesar Rp147.151.992,00 atau setara dengan 99,91%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan sarana kebersihan, kesehatan (instruktur senam), jasa kebersihan, keamanan/pengemudi. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (56) Kegiatan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD BPMKP/BP Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp171.497.700,00 dan realisasi sebesar Rp167.183.200,00 atau setara dengan 97,48%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan pertemuan makan minum rapat/tamu, air mineral, dan perjalanan dinas balai. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (57) Kegiatan Penyediaan alat pendukung fasilitas kantor di UPTD BPMKP/BP Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp80.660.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.810.521,00 atau setara dengan 91,51%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pelaksanaan dalam mendukung kinerja dinas dengan penyediaan peralatan listrik, pengisian tabung pendam kebakaran, tabung gas, telepon dan listrik. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;
- (58) Kegiatan Penyediaan pemeliharaan Kendaraan dinas di UPTD BPMKP/BP Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp65.981.083,00 dan realisasi sebesar Rp61.328.008,00 atau setara dengan 92,95%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan jasa Tenaga Satpam. Pengemudi. dan Front Office, STNK, servis, suku cadang dan pelumas. *Outcome* kegiatan adalah

terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;

- (59) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, fasilitas dan gedung kantor di UPTD BPMKP/BP Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp181.692.000,00 dan realisasi sebesar Rp179.080.318,00 atau setara dengan 98,56%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama (*Pest Control*) dan Fumigasi, pemeliharaan komputer, Pemeliharaan mesin tik/fax/AC, Pemeliharaan Meubel air, Pemeliharaan Instalasi Listrik, Penggantian keyboard, Pemeliharaan Alat Laboratorium, dan Gedung Kantor Sekretariat satu lantai. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (60) Kegiatan Penyediaan langganan kantor di UPTD BPMKP/BP Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.459.681,00 atau setara dengan 93,77%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan instruktur senam, surat kabar, internet, pengiriman dokumen, assessment paket B. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (61) Kegiatan Penyediaan alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD BPPIB TSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar.199.602,00 dan realisasi sebesar Rp188.196.300,00 atau setara dengan 93,54%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pelaksanaan dalam mendukung kinerja dinas dengan penyediaan peralatan listrik, telepon dan langganan listrik. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;
- (62) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD BPPIB TSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp560.401.120,00 dan realisasi sebesar Rp560.052.805,00 atau setara dengan 99,94%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan surat kabar, internet dan tenaga kerja nonpegawai. *Outcome* kegiatan adalah

terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;

- (63) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai di UPTD BPPIB TSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp61.999.861,00 dan realisasi sebesar Rp61.890.642,00 atau setara dengan 99,82%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan ATK, materai, fotokopi dan penjiilidan. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (64) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di UPTD BPPIB TSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp433.633.890,00 dan realisasi sebesar Rp433.633.890,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan sarana upah harian lepas, saran kebersihan, keamanan/pengemudi, dan pakaian kerja lapangan. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (65) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi di UPTD BPPIB TSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.940.880,00 dan realisasi sebesar Rp49.800.000,00 atau setara dengan 99,72%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan dokumentasi/publikasi audia visual, foto/video drone, media cetak, surat kabar, Banner Acrylic, Banner Elektrik, *Roll* Banner dan spanduk. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai.
- (66) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD BPPIB TSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp314.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp312.822.930,00 atau setara dengan 99,63%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan BBM, STNK, servis, suku cadang, pelumas, foto copy. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;

- (67) Kegiatan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD BPPIB TSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp180.959.450,00 dan realisasi sebesar Rp178.307.890,00 atau setara dengan 98,53%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan pertemuan makan minum rapat/tamu, air mineral, dan perjalanan dinas balai. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (68) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di UPTD BPPIB TSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp519.657.208,00 dan realisasi sebesar Rp464.008.600,00 atau setara dengan 89,29%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan BBM, suku cadang, pelumas, konsultasi perencanaan, pengawasan, pemeliharaan komputer pemeliharaan alat sarana peternakan.pemeliharaan gedung dan bangunan, instalasi air dan pemeliharaan bangunan bukan gedung. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (69) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD BPPTDK Margawati dan SP3TDK Tambak Mekar Subang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp296.887.999,00 atau setara dengan 98,96%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan BBM, STNK, servis, suku cadang, pelumas, fotokopi. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (70) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya di UPTD BPPTDK Margawati dan SP3TDK Tambak Mekar Subang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp417.149.148,00 dan realisasi sebesar Rp405.765.022,00 atau setara dengan 97,27%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan sarana kebersihan, jasa kebersihan, dan keamanan/pengemudi. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan

manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;

- (71) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung kantor di UPTD BPPTDK Margawati dan SP3TDK Tambak Mekar Subang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp991.902,00 dan realisasi sebesar Rp129.328.489,00 atau setara dengan 99,49%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan sarana kebersihan, jasa kebersihan, dan keamanan/pengemudi. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (72) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD BPPTDK Margawati dan SP3TDK Tambak Mekar Subang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp106.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp102.111.073,00 atau setara dengan 96,33%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pelaksanaan dalam mendukung kinerja dinas dengan penyediaan peralatan listrik, telepon, langganan listrik. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;
- (73) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai di UPTD BPPTDK Margawati dan SP3TDK Tambak Mekar Subang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp29.193.678,00 dan realisasi sebesar Rp29.054.050,00 atau setara dengan 99,52%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan ATK, materai, perlengkapan rumahtangga (bantal/guling, selimut, sprei, piring/sendok/garpu/mangkok/cangkir/gelas/termos), cetak, fotokopi dan penjiilidan. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (74) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp19.940.976,00 dan realisasi sebesar Rp18.033.400,00 atau setara dengan 90,43%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan ATK, cetak dan fotokopi. *Outcome*

kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;

- (75) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD BPPTDK Margawati dan SP3TDK Tambak Mekar Subang alok yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp16.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.310.000,00 atau setara dengan 95,69%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaa surat kabar, internet dan fotokopi. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (76) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp167.475.000,00 dan realisasi sebesar Rp161.552.590,00 atau setara dengan 96,46%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan penyediaan telpon, surat kabar, internet dan tenaga kerja. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (77) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.410.000,00 atau setara dengan 62,19%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan pertemuan Jasa Pemotretan Photo Booth. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (78) Kegiatan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD BPPTDK Margawati dan SP3TDK Tambak Mekar Subang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp270.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp269.782.049,00 atau setara dengan 99,92%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan pertemuan pengandaan/fotokopi, rapat dan makan minum dan perjalanan dinas balai. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;

- (79) Kegiatan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp52.013.675,00 dan realisasi sebesar Rp47.189.012,00 atau setara dengan 90,72%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan pertemuan rapat dan makan minum dan perjalanan dinas balai. *Outcome* kegiatan adalah terseleng-garannya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (80) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat. yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp19.482.788,00 dan realisasi sebesar Rp17.075.520,00 atau setara dengan 87,64%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya pelaksanaan dalam mendukung kinerja dinas dengan penyediaan ATK, alat listrik dan elektronik, langganan listrik dan LPG. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;
- (81) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp170.486.710,00 dan realisasi sebesar Rp155.608.700,00 atau setara dengan 91,27%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan sarana kebersihan, keamanan/pengemudi. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai;
- (82) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp43.454.500,00 dan realisasi sebesar Rp35.137.188,00 atau setara dengan 80,86%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kondisi kendaraan yang dapat digunakan dengan servis, pelumas, suku cadang, KIR, STNK dan bahan bakar. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana operasional kendaraan dinas dalam kondisi baik di balai;

- (83) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Di Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp32.998.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.946.200,00 atau setara dengan 63,48%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung perkantoran dengan sarana pemeliharaan komputer, peralatan dan perlengkapan kantor, gedung dan bangunan dan halaman perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya dukungan manajemen perkantoran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja balai.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanian

a. Permasalahan

- (1) Kekurangcermatan dalam penyusunan Target Keuangan dan Fisik, RUP dan RAK;
- (2) UP/GU tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan;
- (3) ketidaksepahaman antara vefikatur keuangan dengan pengelola kegiatan terkait kelengkapan SPJ;
- (4) kegiatan tergantung oleh kondisi cuaca contoh: kegiatan rumpun pertanian, pemeliharaan jalan);
- (5) Terlambatnya penetapan pejabat pelaksana kegiatan, SK PA/KPA/PPTK/Bendahara terlambat diterima;
- (6) Pengajuan UP/GU dikumpulkan oleh Bendahara Pengeluaran sehingga harus menunggu;
- (7) Adanya kegiatan Penyusunan Rancangan Master Plan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tidak terlaksana karena Pada belanja jasa konsultan sebesar Rp200.860.000,00 secara administrasi sudah dimasukan ke aplikasi Sirup dan LPSE untuk pengadaan lelang Jasa Konsultan tetapi pada proses selanjutnya tidak ada pihak ketiga/penyedia yang merespon atau ikut serta dalam proses tender;
- (8) Tidak terlaksananya kegiatan pengadaan perbaikan Gudang prosesing benih padi dan palawija karena perusahaan yang akan mengerjakan tidak memenuhi syaratkualifikasi pekerjaan;
- (9) Tidak terlaksananya kegiatan pengadaan mesin section bending di Balai Mekanisasi Pertanian karena Terjadi lelang ulang /gagal lelang;
- (10) Terdapat perubahan kesiapan areal tanam di lapangan, dari alokasi 100 ha direalisasi 52 ha;
- (11) Proses penyediaan sarana tidak terealisasi seluruhnya karena menyesuaikan realisasi areal tanam dan adanya penolakan dari penyedia.

b. Solusi

- (1) Akan Melakukan Percepatan Dalam Pengajuan SPP/SPM;
- (2) Secara teknis untuk pembuatan Master Plan sudah melalui konsultasi ke pusat bahwa dalam pembuatan Master Plan tersebut harus menggunakan biaya yang besar, melebihi dari angka Rp200.000.000,00 dan dalam pembuatan Master Plan harus berbasis korporasi dimana dalam penyusunannya lintas OPD sehingga dalam pelaksanaannya harus oleh Badan/Biro yang berfungsi mengkoordinasikan Dinas-dinas lingkup rumpun Pertanian;
- (3) Telah dilakukan perubahan anggaran dengan melaksanakan pembuatan draf Rancangan Master Plan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan identifikasi pengumpulan data ke Kabupaten /Kota;
- (4) Merealisasikan areal kegiatan pada lahan seluas 52 ha;
- (5) Sebagian anggaran dikembalikan ke Kas Negara;
- (6) Mengoptimalkan sarana yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan budidaya;
- (7) Memanfaatkan sumber anggaran lainnya (APBN dan APBD Kabupaten atau Swadaya).

28. Urusan Kehutanan

Capaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan kehutanan Tahun 2019 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan capaian sebesar 52,12 poin dari target sebesar 49,76 poin; Tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan capaian 3,85% dari target sebesar 2,8%; Nilai Tukar Petani (NTP) dengan capaian sebesar 112,36 poin dari target sebesar 113,11 poin; Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian sebesar 38,70 poin dari target sebesar 33,06 poin; Persentase Tutupan Hutan dengan capaian sebesar 40,27% dari target sebesar 38,51%; Tingkat kerusakan hutan dengan capaian sebesar 0,12% dari target sebesar 0,9%; persentase peningkatan habitat dan populasi tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan dengan capaian sebesar 5% dari target sebesar 10%; Produksi hasil hutan (kayu) dengan capaian sebesar 69,8%; Persentase peningkatan produksi hasil hutan non kayu dengan capaian sebesar 57%; Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam dengan capaian sebesar 9,4% dari target sebesar 10%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian Indikator Kinerja Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2019 yaitu persentase bertambahnya produksi hasil hutan kayu dengan capaian sebesar 69,8%; persentase bertambahnya produksi hasil hutan bukan kayu dengan capaian sebesar 215,51%; persentase bertambahnya produksi olahan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan capaian sebesar 176,26% dan persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam 9,4% target sebesar 10%. Alokasi anggaran Rp6.590.084.688,00 dan realisasi Rp6.470.808.791,00 atau setara dengan 98,19%.

- (1) Kegiatan Pendampingan Pembentukan UMHR CDK Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya kelompok UMHR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelas kelompok tani;
- (2) Kegiatan Pendampingan Pembentukan UMHR CDK Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.997.426,00 dan realisasi Rp199.672.426,00 atau setara dengan 99,84%.

- Output* kegiatan adalah terbentuknya kelompok UMHR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelas kelompok tani;
- (3) Kegiatan Pendampingan Pembentukan UMHR CDK Wilayah III dengan alokasi anggaran Rp199.999.830,00 dan realisasi Rp190.947.730,00 atau setara dengan 95,47%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya kelompok UMHR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelas kelompok tani;
 - (4) Kegiatan Pendampingan Pembentukan UMHR CDK Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.997.768,00 dan realisasi Rp187.364.768,00 atau setara dengan 93,68%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya kelompok UMHR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelas kelompok tani;
 - (5) Kegiatan Pendampingan Pembentukan UMHR CDK Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.999.848,00 dan realisasi Rp199.999.848,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya kelompok UMHR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelas kelompok tani;
 - (6) Kegiatan Pendampingan Pembentukan UMHR CDK Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp197.557.500,00 atau setara dengan 98,78%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya kelompok UMHR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelas kelompok tani;
 - (7) Kegiatan Pendampingan Pembentukan UMHR CDK Wilayah VII dengan alokasi anggaran Rp199.995.658,00 dan realisasi Rp199.745.000,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya kelompok UMHR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelas kelompok tani;
 - (8) Kegiatan Pengembangan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Kehutanan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp565.094.775,00 dan realisasi Rp565.094.775,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat usaha ekonomi produktif kehutanan. *Outcome* kegiatan

- adalah meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu;
- (9) Kegiatan Pendampingan Pembentukan UMHR CDK Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.999.793,00 dan realisasi Rp193.191.600,00 atau setara dengan 96,60%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya kelompok UMHR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelas kelompok tani;
 - (10) Kegiatan Pendampingan Pembentukan UMHR CDK Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.999.157,00 dan realisasi Rp199.623.800,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya kelompok UMHR. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kelas kelompok tani;
 - (11) Kegiatan Pengembangan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Kehutanan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp373.520.250,00 dan realisasi Rp373.520.250,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat usaha ekonomi produktif kehutanan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu;
 - (12) Kegiatan Pengembangan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Kehutanan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp811.135.250,00 dan realisasi Rp800.412.500,00 atau setara dengan 98,68%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat usaha ekonomi produktif kehutanan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu;
 - (13) Kegiatan Promosi Wisata Alam Tahura Ir. H. Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp284.974.082,00 atau setara dengan 94,99%. *Output* kegiatan adalah pameran promosi wisata. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya promosi wisata alam Tahura;
 - (14) Kegiatan Pengembangan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Kehutanan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (DAK) yang dilaksanakan Dinas

- Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp170.151.500,00 dan realisasi Rp170.131.500,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat usaha ekonomi produktif kehutanan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu;
- (15) Kegiatan Pengembangan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Kehutanan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp168.617.000,00 dan realisasi Rp168.429.500,00 atau setara dengan 99,89%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat usaha ekonomi produktif kehutanan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu;
- (16) Kegiatan Pengembangan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Kehutanan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp127.101.000,00 dan realisasi Rp127.101.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat usaha ekonomi produktif kehutanan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu;
- (17) Kegiatan Pengembangan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Kehutanan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp87.975.000,00 dan realisasi Rp87.287.500,00 atau setara dengan 99,22%. *Output* kegiatan adalah tersedianya alat usaha ekonomi produktif kehutanan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu;
- (18) Kegiatan Pelatihan Aneka Usaha Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp786.500.451,00 dan realisasi Rp769.982.750,00 atau setara dengan 97,90%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kelompok yang dilatih. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pendapatan kelompok tani;
- (19) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Teknis Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.399.999.982,00 dan realisasi

Rp1.355.772.262,00 atau setara dengan 96,84%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terarahnya bina usaha dan pemberdayaan masyarakat.

b. Program Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pencapaian yaitu Jumlah kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya sebesar 35 kelompok dari target 30 kelompok. Alokasi anggaran sebesar Rp23.211.527.726,00 realisasi anggaran Rp22.523.119.893,00 setara dengan 97,03%.

- (1) Kegiatan Penyusunan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Sektor Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp88.846.878,00 atau setara dengan 88,85%. *Output* kegiatan adalah laporan PEP RAD GRK sektor kehutanan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya bahan PEP RAD GRK Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Pengolahan Sumber Benih Hutan Daerah Kiarapayung yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp249.879.270,00 dan realisasi Rp246.674.040,00 atau setara dengan 98,72%. *Output* kegiatan adalah sumber benih yang dikelola. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya jenis benih tanaman hutan unggul;
- (3) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp399.993.203,00 dan realisasi Rp388.552.880,00 atau setara dengan 97,14%. *Output* kegiatan adalah jumlah sertifikasi benih dan bibit yang diterbitkan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah benih dan bibit yang tersertifikasi dan meningkatnya jumlah pengedar benih yang berijin sesuai dengan rekomendasi PTH;
- (4) Kegiatan Pembangunan Sentra Bibit Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp799.983.403,00 dan realisasi Rp795.804.232,00 atau setara dengan 99,48%. *Output* kegiatan adalah jumlah bibit Siap Tanam. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;

- (5) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih Tanaman Hutan dan Sumber Daya Genetik (SDG) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp349.846.791,00 dan realisasi Rp348.952.491,00 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan adalah jumlah lokasi sumber benih dan SDG. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penyediaan benih unggul dan sumber daya genetik;
- (6) Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.999.999.900,00 dan realisasi Rp1.732.590.041,00 atau setara dengan 86,63%. *Output* kegiatan adalah koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan DAS. *Outcome* kegiatan adalah terarahnya pengelolaan DAS;
- (7) Kegiatan Pemeliharaan tanaman Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp166.500.000,00 dan realisasi Rp166.500.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya tanaman rehabilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (8) Kegiatan Pembuatan Persemaian di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp150.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya persemaian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (9) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp789.142.500,00 dan realisasi Rp789.142.500,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Luas penanaman RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (10) Kegiatan Pemeliharaan tanaman Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II. (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp167.487.500,00 dan realisasi Rp167.487.500,00 atau setara dengan

- 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya tanaman rehabilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (11) Kegiatan Pembuatan Persemaian di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp149.775.000,00 atau setara dengan 99,85%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya persemaian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
 - (12) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan II (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp555.187.500,00 dan realisasi Rp554.887.500,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah luas penanaman RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
 - (13) Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp550.000.000,00 dan realisasi Rp548.562.500,00 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan adalah Laporan pelaksanaan pengamanan hutan. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya gangguan keamanan di Tahura Ir. H. Djuanda;
 - (14) Kegiatan Pengamanan Kawasan Hutan Daerah Kiarapayung yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.997.400,00 dan realisasi Rp99.797.400,00 atau setara dengan 99,80%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan pengamanan hutan. *Outcome* kegiatan adalah menurunnya kerusakan dan gangguan keamanan di Hutan Daerah Kiarapayung;
 - (15) Kegiatan Pembuatan Persemaian di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp149.875.000,00 atau setara dengan 99,92%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya persemaian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
 - (16) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan III (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp904.161.250,00 dan realisasi Rp897.861.250,00 atau setara dengan

- 99,30%. *Output* kegiatan adalah luas penanaman RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (17) Kegiatan Pemeliharaan tanaman Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp167.375.000,00 dan realisasi Rp127.355.000,00 atau setara dengan 76,09%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya tanaman rehabilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (18) Kegiatan Pembuatan Persemaian di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp149.218.750,00 atau setara dengan 99,48%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya persemaian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (19) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan IV (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.575.855.250,00 dan realisasi Rp144.540.250,00 atau setara dengan 72,63%. *Output* kegiatan adalah luas penanaman RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (20) Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar Tahura Ir. H. Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp499.380.750,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah penambahan jumlah TSL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keanekaragaman hayati di Tahura Ir. H. Djuanda;
- (21) Kegiatan Pemeliharaan tanaman Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp102.990.000,00 dan realisasi Rp102.950.000,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya tanaman rehabilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (22) Kegiatan Pembuatan Persemaian di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V yang dilaksanakan Dinas

- Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp142.000.000,00 atau setara dengan 94,67%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya persemaian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (23) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan V (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.208.068.750,00 dan realisasi Rp2.199.018.750,00 atau setara dengan 99,59%. *Output* kegiatan adalah luas penanaman RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (24) Kegiatan Pemeliharaan tanaman Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp154.125.000,00 dan realisasi Rp153.987.500,00 atau setara dengan 99,91%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya tanaman rehabilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (25) Kegiatan Pembuatan Persemaian di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp147.329.750,00 atau setara dengan 98,22%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya persemaian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (26) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan VI (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp900.480.000,00 dan realisasi Rp899.337.500,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* kegiatan adalah luas penanaman RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (27) Kegiatan Pemeliharaan tanaman Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp176.625.000,00 dan realisasi Rp176.531.250,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya tanaman rehabilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;

- (28) Kegiatan Pembuatan Persemaian di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp149.823.500,00 dan realisasi Rp149.206.250,00 atau setara dengan 99,59%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya persemaian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (29) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Teknis Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Eksosistemnya yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp999.970.168,00 dan realisasi Rp993.034.768,00 atau setara dengan 99,31%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi, monitoring wisata alam *Geopark* Ciletuh. *Outcome* kegiatan adalah terarahnya kegiatan perlindungan dan konservasi SDAE;
- (30) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan VII (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.117.427.500,00 dan realisasi Rp1.117.427.500,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah luas penanaman RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (31) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Teknis Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp821.921.473,00 atau setara dengan 82,19%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terarahnya kegiatan pemolaan dan pemanfaatan kawasan hutan;
- (32) Kegiatan Pemeliharaan tanaman Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp80.287.500,00 dan realisasi Rp80.287.500,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya tanaman rehabilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (33) Kegiatan Pembuatan Persemaian di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas

- Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp149.995.600,00 dan realisasi Rp149.450.000,00 atau setara dengan 99,64%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya persemaian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (34) Kegiatan Pembuatan Persemaian di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp148.812.500,00 atau setara dengan 99,21%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya persemaian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (35) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.936.013.750,00 dan realisasi Rp1.933.013.750,00 atau setara dengan 99,85%. *Output* kegiatan adalah luas penanaman RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (36) Kegiatan Pembinaan Pengada dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp149.999.720,00 dan realisasi Rp147.315.380,00 atau setara dengan 98,21%. *Output* kegiatan adalah pengada dan pengedar benih/bibit tanaman hutan yang dibina. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan penyediaan bibit kepada masyarakat;
- (37) Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.000.000,00 atau setara dengan 99,00%. *Output* kegiatan adalah *draft* rencana umum kehutanan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (38) Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan di CDK Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah identifikasi kawasan ekonomi esensial. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kawasan ekonomi esensial;
- (39) Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan di CDK Wilayah II yang dilaksanakan Dinas

- Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah identifikasi kawasan ekonomi esensial. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kawasan ekonomi esensial;
- (40) Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan CDK Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp118.242.500,00 atau setara dengan 78,83%. *Output* kegiatan adalah identifikasi kawasan ekonomi esensial dan MDK *Geopark* Ciletuh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kawasan ekonomi esensial;
- (41) Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan di CDK Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah identifikasi kawasan ekonomi esensial. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kawasan ekonomi esensial;
- (42) Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan di CDK Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp49.999.966,00 dan realisasi Rp49.699.350,00 atau setara dengan 99,40%. *Output* kegiatan adalah identifikasi kawasan ekonomi esensial. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kawasan ekonomi esensial;
- (43) Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan di CDK Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp37.114.780,00 dan realisasi Rp36.863.300,00 atau setara dengan 99,32%. *Output* kegiatan adalah pembinaan pamswakarsa dan pembentukan MDK. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kawasan ekonomi esensial;
- (44) Kegiatan Perlindungan dan KOnservasi Hutan di CDK Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah identifikasi kawasan ekonomi esensial. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kawasan ekonomi esensial;
- (45) Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan di CDK Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

- anggaran Rp49.999.815,00 dan realisasi Rp49.384.500,00 atau setara dengan 98,77%. *Output* kegiatan adalah identifikasi kawasan ekonomi esensial. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kawasan ekonomi esensial;
- (46) Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan di CDK Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp49.999.600,00 dan realisasi Rp49.999.300,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah identifikasi kawasan ekonomi esensial. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kawasan ekonomi esensial;
- (47) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis di Cabang Dinas Kehutanan Wil II (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp86.831.250,00 dan realisasi Rp86.831.250,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah bangunan sipil teknis dalam rangka RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (48) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp953.050.500,00 dan realisasi Rp931.606.750,00 atau setara dengan 97,75%. *Output* kegiatan adalah Bangunan Sipil teknis dalam rangka RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (49) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp705.393.860,00 dan realisasi Rp705.273.860,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah bangunan sipil teknis dalam rangka RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (50) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp114.875.000,00 dan realisasi Rp114.875.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah bangunan sipil teknis dalam rangka RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;

- (51) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp865.302.500,00 dan realisasi Rp865.061.250,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah bangunan sipil teknis dalam rangka RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan;
- (52) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp297.745.000,00 dan realisasi Rp297.745.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah bangunan sipil teknis dalam rangka RHL. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase tutupan hutan.

c. Program Penyuluhan Kehutanan

Capaian Indikator Kinerja Program Penyuluhan Kehutanan pada Tahun 2019 yaitu peningkatan kompetensi penyuluh sebesar 100%. Alokasi anggaran program sebesar Rp1.089.977.559,00 realisasi anggaran Rp1.071.442.305,00 setara dengan 98,30%. dengan jumlah 10 kegiatan.

- (1) Kegiatan Penyusunan Program Penyuluh, Penyegaran Penyuluh dan Temu Penyuluh Rp549.998.730,00 dan realisasi Rp544.095.155,00 atau setara dengan 98,93%. *Output* kegiatan adalah dokumen programa penyuluh, temu penyuluh, lomba wana lestari. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh;
- (2) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan di CDK Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rp59.986.250,00 dan realisasi Rp59.986.250,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah bimbingan teknis penyuluh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh;
- (3) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan di CDK Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp58.928.000,00 atau setara dengan 98,21%. *Output* kegiatan adalah terbinanya kelembagaan kelompok tani hutan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh;

- (4) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan di CDK Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp57.165.000,00 atau setara dengan 95,28%. *Output* kegiatan adalah bimbingan teknis penyuluh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh;
- (5) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan di CDK Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp54.364.000,00 atau setara dengan 90,61%. *Output* kegiatan adalah bimbingan teknis penyuluh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh;
- (6) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan di CDK Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rp59.999.950,00 dan realisasi Rp59.999.950,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah bimbingan teknis penyuluh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh;
- (7) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan di CDK Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp60.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah bimbingan teknis penyuluh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh;
- (8) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan di CDK Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rp59.992.791,00 dan realisasi Rp59.674.000,00 atau setara dengan 99,47%. *Output* kegiatan adalah bimbingan teknis penyuluh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh;
- (9) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan di CDK Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp58.230.750,00 atau setara dengan 97,05%. *Output* kegiatan adalah bimbingan teknis penyuluh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh;
- (10) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan di CDK Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rp59.999.838,00 dan realisasi Rp58.999.200,00 atau setara dengan 98,33%. *Output* kegiatan adalah bimbingan teknis penyuluh. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas penyuluh.

d. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kehutanan

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kehutanan adalah Tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas Kehutanan sebesar 100%; Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kehutanan 100%; dan Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kehutanan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kehutanan adalah sebesar Rp2.105.832.600,00 dengan realisasi sebesar Rp1.812.759.160,00 setara dengan 86,08%.

- (1) Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1,955,832,600,00 dan realisasi Rp1.676.847.960,00 atau setara dengan 88,55%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan dan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan kehutanan, serta data statistik kehutanan. *Outcome* kegiatan adalah terarahnya pembangunan kehutanan di Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75,000,000,00 dan realisasi Rp61.840.000,00 atau setara dengan 82,45%. *Output* kegiatan adalah tersedianya laporan capaian kinerja. *Outcome* kegiatan adalah kesesuaian pelaporan kinerja Dinas Kehutanan;
- (3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp 74.071.200,00 atau setara dengan 98,76%. *Output* kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah akurasi kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kehutanan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kehutanan adalah. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kehutanan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kehutanan adalah sebesar Rp3,617,160,707,00 dengan realisasi sebesar Rp3.292.102.486,00 setara dengan 91,01%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.044.999.938,00 dan realisasi Rp925.367.545,00 atau setara dengan 88,55%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.990.782,00 dan realisasi Rp97.090.000,00 atau setara dengan 97,10%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp373.735.600,00 dan realisasi Rp366.751.000,00 atau setara dengan 98,13%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp737.830.000,00 dan realisasi Rp704.375.159,00 atau setara dengan 95,47%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;

- (5) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp29.800.000,00 dan realisasi Rp25.059.000,00 atau setara dengan 84,09%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp183.207.486,00 dan realisasi Rp171.248.000,00 atau setara dengan 93,47%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp487.126.179,00 dan realisasi Rp371.482.693,00 atau setara dengan 76,26%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.765.708,00 dan realisasi Rp91.549.210,00 atau setara dengan 91,76%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana aparatur. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (9) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp69.645.099,00 dan realisasi Rp64.897.935,00 atau setara dengan 93,18%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (10) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI

- yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp110.000.000,00 dan realisasi Rp105.022.000,00 atau setara dengan 95,47%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (11) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp69.427.613,00 dan realisasi Rp66.260.200,00 atau setara dengan 95,44%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp35.382.392,00 dan realisasi Rp31.230.000,00 atau setara dengan 88,26%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah;
- (13) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp276.249.910,00 dan realisasi Rp271.769.744,00 atau setara dengan 98,38%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.

f. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan adalah: Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB sebanyak 350 unit. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan adalah sebesar Rp29,942,665,176.00 dengan realisasi sebesar Rp26,162,173,658.00 setara dengan 87,37%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di CDK Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan

- Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp78.443.095,00 atau setara dengan 78,44%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (2) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp280.000.000,00 dan realisasi Rp244.150.000,00 atau setara dengan 87,20%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
 - (3) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp674.854.500,00 dan realisasi Rp673.897.680,00 atau setara dengan 99,86%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
 - (4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.999.919,00 dan realisasi Rp 95.966.650,00 atau setara dengan 95,97%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
 - (5) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di CDK Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp79.376.000,00 dan realisasi Rp 30.622.711,00 atau setara dengan 38,58%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk

- menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (6) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp90.000.000,00 dan realisasi Rp55.260.000,00 atau setara dengan 61,40%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor.
 - (7) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp769.177.000,00 dan realisasi Rp738.005.850,00 atau setara dengan 95,95%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
 - (8) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.999.794,00 dan realisasi Rp90.159.794,00 atau setara dengan 90,16%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
 - (9) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di CDK Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp61.000.000,00 dan realisasi Rp35.261.131,00 atau setara dengan 57,81%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
 - (10) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp237.500.000,00 dan realisasi Rp215.000.000,00

- atau setara dengan 90,53%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (11) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp674.960.541,00 dan realisasi Rp647.548.700,00 atau setara dengan 86,29%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (12) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.999.765,00 dan realisasi Rp81.056.600,00 atau setara dengan 81,06%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (13) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp180.000.000,00 atau setara dengan 72,00%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (14) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di CDK Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.200.000,00 dan realisasi Rp28.328.247,00 atau setara dengan 28,56%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan tv berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (15) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV

- yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp683.140.000,00 dan realisasi Rp645.320.000,00 atau setara dengan 94,46%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (16) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp205.298.219,00 atau setara dengan 68,43%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (17) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp 99.999.817,00 dan realisasi Rp 96.630.920,00 atau setara dengan 96,63%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan *fotocopy* dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (18) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di CDK Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp54.876.229,00 atau setara dengan 54,88%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi, *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (19) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp139.700.000,00 atau setara dengan 55,88%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome*

- kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (20) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Kantor Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp746.080.000,00 dan realisasi Rp744.340.000,00 atau setara dengan 99,77%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (21) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp675.000.000,00 dan realisasi Rp632.180.000,00 atau setara dengan 93,66%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (22) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.997.810,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (23) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor di CDK Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp42.000.000,00 dan realisasi Rp28.344.591,00 atau setara dengan 67,49%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (24) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp860.989.000,00 dan realisasi Rp816.741.676,00 atau setara dengan 94,86%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan

- operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (25) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp157.480.000,00 dan realisasi Rp151.480.000,00 atau setara dengan 96,19%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (26) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp675.125.000,00 dan realisasi Rp674.781.919,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (27) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp467.287.049,00 dan realisasi Rp455.668.760,00 atau setara dengan 97,51%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor dinas kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan;
- (28) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp69.837.500,00 dan realisasi Rp66.487.500,00 atau setara dengan 95,20%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (29) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Kantor UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.199.776.000,00 dan realisasi

- Rp1.199.776.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (30) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dengan alokasi anggaran Rp559.200.000,00 dan realisasi Rp441.436.500,00 atau setara dengan 78,94%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (31) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp270.000.000,00 dan realisasi Rp269.992.000,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor dinas kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan;
- (32) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan dengan alokasi anggaran Rp529.999.875,00 dan realisasi Rp528.436.101,00 atau setara dengan 99,70%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (33) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp125.437.626,00 atau setara dengan 83,63%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (34) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan dengan alokasi anggaran Rp259.993.200,00 dan realisasi Rp243.343.657,00 atau setara dengan 93,60%. *Output* kegiatan adalah

- terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (35) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp120.000.000,00 dan realisasi Rp120.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung Kantor Dinas Kehutanan;
- (36) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp122.798.950,00 dan realisasi Rp108.463.652,00 atau setara dengan 88,33%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (37) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan dengan alokasi anggaran Rp473.205.407,00 dan realisasi Rp465.082.975,00 atau setara dengan 98,28%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (38) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan dengan alokasi anggaran Rp242.183.855,00 dan realisasi Rp235.959.900,00 atau setara dengan 97,43%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (39) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- Rp224.998.000,00 dan realisasi Rp222.414.500,00 atau setara dengan 98,85%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan;
- (40) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp120.000.000,00 dan realisasi Rp106.824.894,00 atau setara dengan 89,02%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (41) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I dengan alokasi anggaran Rp494.999.107,00 dan realisasi Rp468.191.607,00 atau setara dengan 94,58%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (42) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I dengan alokasi anggaran Rp74.994.800,00 dan realisasi Rp72.319.500,00 atau setara dengan 96,43%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (43) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp120.000.000,00 dan realisasi Rp119.544.200,00 atau setara dengan 98,85%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan;
- (44) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.995.954,00 dan realisasi Rp99.189.000,00 atau setara dengan

- 99,19%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (45) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp1.250.000,00 atau setara dengan 2,08%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor dinas kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan;
- (46) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II dengan alokasi anggaran Rp74.992.400,00 dan realisasi Rp24.780.092,00 atau setara dengan 33,04%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (47) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.992.568,00 dan realisasi Rp99.688.500,00 atau setara dengan 99,70%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (48) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II dengan alokasi anggaran Rp488.747.501,00 dan realisasi Rp465.250.000,00 atau setara dengan 95,19%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (49) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di CDK Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp66.330.000,00 dan realisasi Rp60.461.637,00

- atau setara dengan 91,15%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya Langganan Internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (50) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah II Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp59.275.445,00 atau setara dengan 59,28%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (51) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp240.000.000,00 dan realisasi Rp240.000.000,00 00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (52) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp674.672.500,00 dan realisasi Rp672.097.500,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (53) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah III Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp79.992.600,00 dan realisasi Rp59.606.979,00 atau setara dengan 74,52%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (54) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Cabang

- Dinas Kehutanan Wilayah III dengan alokasi anggaran Rp494.989.611,00 dan realisasi Rp457.285.215,00 atau setara dengan 92,38%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (55) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III dengan alokasi anggaran Rp53.492.800,00 dan realisasi Rp18.764.300,00 atau setara dengan 35,08%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (56) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.999.915,00 dan realisasi Rp99.722.000,00 atau setara dengan 99,72%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (57) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp43.153.072,00 dan realisasi Rp3.900.000,00 atau setara dengan 9,04%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung Kantor Dinas Kehutanan;
- (58) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV dengan alokasi anggaran Rp494.240.013,00 dan realisasi Rp403.256.233,00 atau setara dengan 81,59%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (59) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di CDK Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- Rp72.682.400,00 dan realisasi Rp66.477.220,00 atau setara dengan 91,46%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (60) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV dengan alokasi anggaran Rp60.220.000,00 dan realisasi Rp31.793.050,00 atau setara dengan 52,79%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (61) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp 100.000.000,00 dan realisasi Rp36.720.000,00 atau setara dengan 36,72%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (62) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp 712.439.600,00 dan realisasi Rp712.439.600,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (63) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;

-
- (64) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IV Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp89.999.000,00 dan realisasi Rp58.886.655,00 atau setara dengan 65,43%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (65) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di CDK Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.600.000,00 dan realisasi Rp94.112.741,00 atau setara dengan 94,49%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan Jasa Profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (66) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp45.000.000,00 dan realisasi Rp5.410.000,00 atau setara dengan 12,02%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan;
- (67) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp90.000.000,00 dan realisasi Rp82.555.500,00 atau setara dengan 91,73%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (68) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp674.465.000,00 dan realisasi Rp673.711.730,00 atau setara dengan 99,89%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah

- tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (69) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp700.000.000,00 dan realisasi Rp652.271.525,00 atau setara dengan 93,18%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (70) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp89.999.700,00 dan realisasi Rp19.182.200,00 atau setara dengan 21,31%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (71) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp600.000.000,00 dan realisasi Rp531.501.324,00 atau setara dengan 88,58%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (72) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V dengan alokasi anggaran Rp376.927.708,00 dan realisasi Rp332.218.341,00 atau setara dengan 88,14%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (73) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp290.000.000,00 dan realisasi Rp279.700.000,00 atau setara dengan 96,45%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan

- TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (74) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V dengan alokasi anggaran Rp74.993.200,00 dan realisasi Rp44.943.000,00 atau setara dengan 59,93%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (75) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.845.111.500,00 dan realisasi Rp2.770.154.810,00 atau setara dengan 97,37%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (76) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp59.995.000,00 dan realisasi Rp0 atau setara dengan 0%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung Kantor Dinas Kehutanan;
- (77) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp42.520.000,00 dan realisasi Rp42.476.460,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (78) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Tahura Ir, H, Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp 384.909.850,00 atau setara dengan 96,23%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan.

- Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (79) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Tahura Ir, H, Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp 399.980.000,00 dan realisasi Rp384.583.94,00 atau setara dengan 96,15%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (80) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp52.691.650,00 atau setara dengan 70,26%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (81) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Tahura Ir, H, Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (82) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI dengan alokasi anggaran Rp274.885.608,00 dan realisasi Rp 273.849.568,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (83) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Tahura Ir, H, Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp500.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah

- tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (84) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.600.000,00 dan realisasi Rp3.600.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan;
- (85) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp150.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (86) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII dengan alokasi anggaran Rp56.202.000,00 dan realisasi Rp46.043.385,00 atau setara dengan 81,92%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (87) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII dengan alokasi anggaran Rp449.331.875,00 dan realisasi Rp448.797.877,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (88) Kegiatan Penyediaan Langganan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp224.983.091,00 dan realisasi Rp214.637.362,00 atau setara dengan 95,40%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan

- adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (89) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp78.203.000,00 dan realisasi Rp75.921.473,00 atau setara dengan 97,08%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (90) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp30.000.000,00 dan realisasi Rp25.035.000,00 atau setara dengan 83,45%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (91) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp96.000.000,00 dan realisasi Rp95.750.000,00 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor dinas kehutanan;
- (92) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp499.501.047,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas;
- (93) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VIII Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp84.600.000,00 dan realisasi

- Rp68.139.874,00 atau setara dengan 80,54%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (94) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.999.669,00 dan realisasi Rp99.899.260,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya ATK, materai, cetak dan penggandaan, belanja alat listrik dan elektronik, dan fotocopy dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor;
- (95) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII dengan alokasi anggaran Rp472.963.204,00 dan realisasi Rp458.197.889,00 atau setara dengan 96,88%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (96) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII dengan alokasi anggaran Rp36.200.000,00 dan realisasi Rp35.341.800,00 atau setara dengan 97,63%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (97) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp59.518.000,00 atau setara dengan 99,20%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan;
- (98) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp155.000.000,00

- dan realisasi Rp139.948.228,00 atau setara dengan 90,29%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (99) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX dengan alokasi anggaran Rp39.996.800,00 dan realisasi Rp39.479.400,00 atau setara dengan 98,71%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan operasional kantor. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor untuk menunjang kelangsungan aktivitas pekerjaan dan optimalisasi pelayanan;
- (100) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX dengan alokasi anggaran Rp494.993.258,00 dan realisasi Rp484.897.724,00 atau setara dengan 97,96%. *Output* kegiatan terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya aspek keamanan dan kebersihan;
- (101) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp25,000,000,00 dan realisasi Rp25,000,000,00 atau setara dengan 100%, *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan internet, surat kabar dan TV berbayar, dan jasa profesi, *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (102) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IX Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp89.983.400,00 dan realisasi Rp72.991.041,00 atau setara dengan 81,12%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya belanja telepon, listrik dan air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional;
- (103) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan

- Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp60.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan. *Outcome* optimasi perabotan, fasilitas dan gedung kantor Dinas Kehutanan;
- (104) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp299.950.000,00 dan realisasi Rp294.050.000,00 atau setara dengan 98,03%. *Output* kegiatan adalah tersedianya layanan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta aparatur. *Outcome* optimasi sumber daya manusia aparatur;
- (105) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp349.996.500,00 dan realisasi Rp184.299.500,00 atau setara dengan 52,66%. *Output* kegiatan adalah tersedianya layanan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta aparatur. *Outcome* optimasi sumber daya manusia aparatur;
- (106) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp286.089.650,00 dan realisasi Rp286.077.550,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi kantor. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makan minum rapat, makan minum tamu, serta perjalanan dinas.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Kehutanan

a. Permasalahan

- (1) Kurangnya kuantitas penyuluh;
- (2) Kurangnya sarana prasarana di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah;
- (3) Pada kegiatan yang bersumber dana alokasi khusus (DAK) keterbatasan waktu penginputan melalui sistem aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara) sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diusulkan pengajuan dananya;
- (4) Adanya perbedaan yang akan dilaksanakan dilapangan dengan Permen LHK SK Menteri LHK,

No,SK,191/MenLHK/SETJEN/SET,14/2018

Tentang rincian dan lokasi kegiatan DAK Bidang LHK, sehingga beberapa kegiatan ada yang tidak dilaksanakan;

- (5) Tata waktu pengisian (input) aplikasi OMSPAN terlalu pendek dengan tata waktu proses lelang, sehingga lelang tidak dapat dilaksanakan;
- (6) Jumlah kegiatan terlalu banyak sehingga menyulitkan dalam monitoring dan pelaporan kegiatan;
- (7) Kegiatan bantuan sarpras ekonomi produktif sumber dana DAK tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;
- (8) Kegiatan peningkatan sarpras wisata Tahura Ir, H, Djuanda tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterlambatan proses barang dan jasa;
- (9) Menurunnya retribusi daerah UPTD Tahura Ir, H, Djuanda dari Tahun 2018 sebesar Rp4,082,168,000,00 menjadi Rp3,688,630,400,00 pada Tahun 2019, Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah kunjungan wisatawan karena aksesibilitas jalan menuju Tahura Ir, H, Djuanda mulai kurang baik dan kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan menuju Tahura Ir, H, Djuanda;
- (10) Pembuatan OED di CDK III tidak dilaksanakan karena biaya jasa konsultansinya terlalu kecil;
- (11) Kurangnya kualitas dan kuantitas penyuluh;
- (12) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) belum mendapatkan honor secara layak;
- (13) Kurangnya sarana prasarana di CDK;
- (14) Beban pekerjaan di CDK V terlalu besar dengan luas wilayah kerja yang sangat luas.

b. Solusi

- (1) Melakukan rekrutmen penyuluh PNS dan penyuluh P3K;
- (2) Pengadaan kantor dan sarana prasarana di CDK;
- (3) Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan proposal yang lengkap pada T-1;
- (4) Mempercepat tata waktu proses pelaksanaan kegiatan;
- (5) Melakukan pengecekan kembali pada beberapa lokasi kegiatan yang bersumber DAK;
- (6) Meningkatkan kemampuan SDM administrasi keuangan dan pengadaan barang dan jasa;

- (7) Optimalisasi kegiatan promosi wisata di Tahura Ir, H, Djuanda dan peningkatan sarana prasarana penunjang wisata;
- (8) Penganggaran untuk OED di CDK III disesuaikan dengan nilai konstruksi bangunan yang akan dikerjakan;
- (9) Peningkatan besaran anggaran pada Program Penyuluhan Kehutanan;
- (10) Wilayah kerja CDK V dimekarkan menjadi dua CDK.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2019 adalah terkait konsumsi listrik per kapita dengan capaian 1.302 kWh/kapita dari target yang ditetapkan sebesar 1.300 kWh/kapita; Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat dengan capaian 63.381 GWh (Gigawatt hour), dari target yang ditetapkan sebesar 58.367 GWh; Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (terhadap BAU 2030) dengan capaian 1,84% dari target yang ditetapkan sebesar 1,63%; Persentase usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis dengan capaian 40,87% dari target yang ditetapkan sebesar 40% dan persentase sumur bor yang meningkat muka air tanahnya dengan capaian 2,06% dari target yang ditetapkan sebesar 2%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Geologi

Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Geologi adalah persentase usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis dengan capaian sebesar 40,87% dari target sebesar 40% dan persentase peningkatan muka air tanah dengan capaian sebesar 5,22% dari target sebesar 5%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp8.100.966.379,00 dengan realisasi sebesar Rp7.366.371.916,00 atau setara dengan 90,93% dan dilaksanakan melalui kegiatan adalah:

- (1) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.998.996,00 dan realisasi sebesar Rp242.800.850,00 atau setara 97,12%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang sesuai peraturan dengan target capaian 400 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terbina, terawasi, dan terkendali dengan capaian 686 titik;
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp95.999.646,00 dan realisasi sebesar Rp91.291.450,00 atau setara 95,10%.

- Output* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan kewajiban 60 perusahaan tambang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang terbina dan terkendali 60 perusahaan tambang;
- (3) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.998.409,00 dan realisasi sebesar Rp243.566.500,00 atau setara 97,43%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terdata 2400 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah data yang tersedia untuk penetapan NPA (Nilai Perolehan Air Tanah) 4 Kabupaten/Kota;
- (4) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp196.873.872,00 dan realisasi sebesar Rp196.538.990,00 atau setara 99,83%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang sesuai peraturan dengan capaian target sebesar 160 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terbina, terawasi, dan terkendali sebesar 303 titik;
- (5) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp174.998.429,00 dan realisasi sebesar Rp159.863.129,00 atau setara 91,35%. *Output* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang terbina dan terkendali sebanyak 45 perusahaan tambang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan kewajibannya sebanyak 45 perusahaan pertambangan;
- (6) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp220.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp209.489.046,00 atau setara 95,22%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terbina, terawasi, dan terkendali dengan capaian target sebanyak 220 titik. *Outcome*

- kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang sesuai peraturan sebanyak 220 titik;
- (7) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp154.998.046,00 dan realisasi sebesar Rp151.286.750,00 atau setara 97,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang terbina dan terkendali sebanyak 60 perusahaan tambang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan kewajibannya sebanyak 138 perusahaan tambang;
 - (8) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp119.993.403,00 dan realisasi sebesar Rp119.012.350,00 atau setara 99,18%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terdata sebanyak 100 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah data yang tersedia untuk penetapan NPA sebanyak 251 titik;
 - (9) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.989.231,00 dan realisasi sebesar Rp144.836.431,00 atau setara 96,56%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terdata dengan capaian target sebesar 1098 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah data yang tersedia untuk penetapan NPA 3 Kabupaten;
 - (10) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp59.999.878,00 dan realisasi sebesar Rp59.768.250,00 atau setara 99,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terdata sebanyak 600 titik sumur. *Outcome* kegiatan adalah jumlah data yang tersedia untuk penetapan NPA sebanyak 600 titik sumur di Wilayah Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi;
 - (11) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur

- dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.999.910,00 dan realisasi sebesar Rp200.238.232,00 atau setara 99,62%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terbina, terawasi dan terkendali dengan capaian target sebanyak 176 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang sesuai dengan peraturan sebanyak 200 titik sumur tersebar di Wilayah Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi;
- (12) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp167.999.875,00 dan realisasi sebesar Rp157.715.400,00 atau setara 93,88%. *Output* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang terkendali dan terbina sebanyak 72 perusahaan tambang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan kewajiban sebanyak 77 perusahaan pertambangan di Wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
- (13) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.281.307.618,00 dan realisasi sebesar Rp1.176.278.846,00 atau setara 91,80%. *Output* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang terawasi dan terkendali sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah 1 dokumen terlaksananya pengawasan dan pengendalian;
- (14) Kegiatan Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp343.457.680,00 atau setara 85,86%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis di 7 cabang Dinas ESDM sebanyak 245 kepala teknik tambang. *Outcome* kegiatan adalah diterapkannya *good mining practice*;
- (15) Kegiatan Inventarisasi Kegiatan Pertambangan Masyarakat Lokal di Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp468.025.858,00 dan realisasi sebesar Rp443.416.362,00 atau setara 94,74%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data

- WPR di 4 kabupaten dan 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah hasil dokumen data WPR sebanyak 2 dokumen;
- (16) Kegiatan Rekonsiliasi Data dan Informasi Pendapatan Daerah Bidang Pertambangan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp245.828.540,00 dan realisasi sebesar Rp223.371.318,00 atau setara 90,86%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen data dan informasi Pendapatan Daerah Bidang Pertambangan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen data dan informasi pendapatan daerah bidang pertambangan;
- (17) Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia UPTD Pengujian ESDM dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.954.402,00 dan realisasi sebesar Rp145.889.262,00 atau setara 72,96% *Output* kegiatan adalah jumlah pendidikan dan pelatihan formal aparatur UPTD Laboratorium ESDM sesuai tugas pokok dan fungsinya sebanyak 6 pelatihan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sumber daya manusia UPTD laboratorium ESDM yang lulus uji keahlian sebanyak 6 pelatihan;
- (18) Kegiatan Pelayanan Rekomendasi Teknis Air Tanah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp193.999.799,00 dan realisasi sebesar Rp183.234.654,00 atau setara 94,45%. *Output* kegiatan adalah jumlah pelayanan rekomendasi teknis penerbitan izin air tanah dan registrasi sumur imbuhan dan sumur pantau sebanyak 100 titik. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelayanan rekomendasi teknis penerbitan izin air tanah dan meningkatnya jumlah sumur imbuhan dan sumur pantau yang terdaftar sebanyak 147 titik sebagai bagian dari upaya konservasi air tanah;
- (19) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp54.999.973,00 dan realisasi sebesar Rp53.460.550,00 atau setara 97,20%. *Output* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang terbina dan terkendali sebanyak 22 Perusahaan Tambang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang

- melaksanakan kewajibannya sebanyak 25 Perusahaan;
- (20) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.808.849,00 dan realisasi sebesar Rp337.870.365,00 atau setara 96,59%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang sesuai peraturan dengan capaian target sebanyak 330 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terbina, terawasi, dan terkendali sebanyak 443 titik;
- (21) Kegiatan Pemantauan Fluktuasi Muka Air Tanah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp445.949.751,00 dan realisasi sebesar Rp332.218.517,00 atau setara 74,50%. *Output* kegiatan adalah revitalisasi sumur pantau sebanyak 3 titik, monitoring sumur imbuhan dan sumur pantau sebanyak 125 titik, 1 aplikasi untuk data dan informasi dari sistem jaringan sumur pantau di Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data dan informasi dari sistem jaringan sumur pantau di Provinsi Jawa Barat;
- (22) Kegiatan Kajian Potensi dan Kuota Air Tanah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp695.993.561,00 dan realisasi sebesar Rp618.545.646,00 atau setara 88,87%. *Output* kegiatan adalah laporan data dan informasi serta peta Potensi dan Kuota Air Tanah sebanyak 6 Cekungan Air Tanah (CAT). *Outcome* kegiatan adalah tersedianya informasi potensi dan Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Barat sebanyak 6 CAT;
- (23) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp219.998.924,00 dan realisasi sebesar Rp217.472.150,00 atau setara 98,85%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terdata sebanyak 165 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah data yang tersedia untuk penetapan NPA sebanyak 374 titik;
- (24) Kegiatan Pembangunan Sumur Imbuhan dan Sumur Pantau dilaksanakan oleh Dinas Energi dan

- Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.905.877,00 dan realisasi sebesar Rp2.720.500,00 atau setara 93,62%. *Output* kegiatan adalah laporan hasil rapat. *Outcome* kegiatan adalah adanya keputusan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan;
- (25) Kegiatan Sosialisasi Pengusahaan Air Tanah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp514.237.932,00 dan realisasi sebesar Rp437.774.409,00 atau setara 85,13%. *Output* kegiatan adalah laporan hasil sosialisasi pengusahaan air tanah terhadap peraturan perundangan air tanah, media audio visual, laporan rapat koordinasi air tanah dan 1 (satu) buah rancangan Peraturan Gubernur tentang Air Tanah. *Outcome* kegiatan adalah tersosialisasikannya peraturan perundangan air tanah kepada 612 peserta, tersedianya media audio visual, terlaksananya koordinasi bidang air tanah dan tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Air Tanah;
- (26) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp172.675.000,00 realisasi sebesar Rp159.247.020,00 setara 92,22%. *Output* kegiatan adalah terbina, terawasi dan terkendalnya pengambilan air tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon sebanyak 197 titik (131,33%) dari target 150 titik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kepatuhan para pengguna/pengambil manfaat air tanah terhadap peraturan perundang-undangan;
- (27) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp140.775.000,00 dan realisasi sebesar Rp110.324.360,00 atau setara 78,37%. *Output* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang terbina dan terkendali sebanyak 50 perusahaan penambangan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan kewajibannya sebanyak 40 perusahaan;

- (28) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.582.397,00 atau setara 37,58%. *Output* kegiatan adalah terdatanya jumlah titik pengambilan air tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon sebanyak 326 titik dari target 440 titik. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data pembanding jumlah titik pengambilan air tanah sebagai dasar penetapan nilai perolehan air tanah dan pajak air tanah;
- (29) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp292.693.750,00 dan realisasi sebesar Rp288.457.552,00 atau setara 98,55%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terbina, terawasi dan terkendali dengan capaian target sebesar 284 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terbina, terawasi, dan terkendali dengan capaian 284 titik;
- (30) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp109.962.500,00 dan realisasi sebesar Rp109.524.500,00 atau setara 99,60%. *Output* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang terbina dan terkendali sebanyak 40 perusahaan pertambangan. *Outcome* kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan kewajibannya sebanyak 60 perusahaan tambang;
- (31) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah Di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp169.999.350,00 dan realisasi sebesar Rp169.118.450,00 atau setara 99,48%. *Output* kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terdata sebanyak 284 titik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah data yang tersedia untuk penetapan NPA sebanyak 284 titik.

b. Program Pengembangan Energi

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Energi adalah Konsumsi Listrik Per kapita dengan capaian sebesar 1.302 kWh/kapita dari target sebesar 1.300 kWh/kapita; dan jumlah instalasi tenaga listrik yang laik operasi dengan capaian sebesar 916 unit dari target sebesar 350 unit. Alokasi Anggaran Program adalah sebesar Rp22.261.652.008,00 dengan realisasi sebesar Rp18.422.711.759 atau setara dengan 82,76%.

- (1) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.979.200,00 dan realisasi sebesar Rp386.314.490,00 atau setara 96,58%. *Output* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, jumlah dokumen hasil identifikasi data ketenagalistrikan rumah tangga miskin sebanyak 120 UPTL-KS, 4 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah UPTL-KS yang melaksanakan kewajibannya jumlah Kabupaten/Kota dengan data ketenagalistrikan rumah tangga miskin yang teridentifikasi 120 uptl-ks di 4 Kabupaten/Kota;
- (2) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wikayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp449.378.008,00 dan realisasi sebesar Rp414.520.818,00 atau setara 92,24%. *Output* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, jumlah dokumen hasil identifikasi data ketenagalistrikan rumah tangga miskin sebanyak 75 UPTL-KS, 3 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, jumlah Kabupaten/Kota dengan ada ketenagalistrikan rumah tangga yang teridentifikasi 121 UPTL-KS di 3 Kabupaten;
- (3) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp447.695.629,00 dan realisasi sebesar Rp447.638.856,00 atau setara 99,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, jumlah

dokumen hasil identifikasi data ketenagalistrikan rumah tangga miskin sebanyak 75 UPTL-KS, 5 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, jumlah Kabupaten/Kota dengan ada ketenagalistrikan rumah tangga yang teridentifikasi sebanyak 111 UPTL-KS;

- (4) Kegiatan Pembangunan Instalasi Biogas Untuk Rumah Tangga yang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.999.884.179,00 dan realisasi sebesar Rp2.619.878.293,00 atau setara 87,33%. *Output* kegiatan adalah pembangunan instalasi biogas untuk rumah tangga sebanyak 150 unit. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan rumah tangga yang memanfaatkan energi baru terbarukan sebanyak 150 unit;
- (5) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Instalasi Biogas pada Lingkungan Pesantren di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp499.898.222,00 dan realisasi sebesar Rp456.046.293,00 atau setara 91,23%. *Output* kegiatan adalah dokumen studi kelayakan dan desain teknis rinci pembangunan instalasi biogas di lingkungan pesantren di Jawa Barat sebanyak 7 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah kesiapan dan kelayakan pesantren yang siap untuk dibangun instalasi biogas sebanyak 7 dokumen;
- (6) Kegiatan Sosialisasi RUED-P, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.904.203,00 dan realisasi sebesar Rp227.426.316,00 atau setara 75,83%. *Output* kegiatan adalah peserta pelaksanaan sosialisasi RUED-P, energi baru terbarukan dan konservasi energi sebanyak 300 orang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah peserta yang mengerti dan memahami RUED-P, energi baru terbarukan dan konservasi energi sebanyak 300 orang;
- (7) Kegiatan rekonsiliasi data dan informasi pendapatan daerah bidang energi yang dilaksanakan oleh dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Jawa Barat sebesar rp249.997.156,00 dan realisasi sebesar rp229.974.995,00 atau setara 91,99%. *output* kegiatan adalah peningkatan capaian pendapatan asli daerah di 3 sektor. *outcome* kegiatan adalah

- terlaksananya rekonsiliasinya sektor pendapatan bidang energi di 3 sektor;
- (8) Kegiatan Survei Potensi Energi pada Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp479.433.215,00 dan realisasi sebesar Rp466.337.776,00 atau setara 97,27%. *Output* kegiatan adalah laporan hasil survey potensi energi di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat;
 - (9) Kegiatan Pelaporan Produksi dan Penggunaan Energi di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.915.303,00 dan realisasi sebesar Rp148.775.860,00 atau setara 49,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan status dan kondisi instalasi penyedia listrik bersumber energi terbarukan dengan skala tertentu di Jawa Barat dan penggunaan listrik pada bangunan di sektor publik sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah laporan instalasi penyedia listrik bersumber energi terbarukan dengan skala tertentu di Jawa Barat dan penggunaan listrik pada bangunan di sektor publik 1 dokumen;
 - (10) Kegiatan Pembangunan PLTS Roof-Top pada Bangunan di Sektor Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp9.749.837.468,00 dan realisasi sebesar Rp7.371.846.101,00 atau setara 75,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah instalasi pembangkit listrik bertenaga surya sebanyak 7 instalasi. *Outcome* kegiatan adalah jumlah energi terbarukan yang terbangkitkan sebanyak 7 instalasi;
 - (11) Kegiatan Pengelolaan Media Informasi dan Promosi Bidang Energi yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.993.687,00 dan realisasi sebesar Rp258.899.250,00 atau setara 86,30%. *Output* kegiatan adalah jumlah media promosi dan bahan tayang pada Bidang Energi sebanyak 2 media. *Outcome* kegiatan adalah jumlah media untuk sosialisasi sektor energi.
 - (12) Kegiatan Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar

Rp399.993.545,00 dan realisasi sebesar Rp326.962.979,00 atau setara 81,74%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta bimbingan teknis energi baru terbarukan dan sertifikasi konservasi energi sebanyak 75 orang. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya peningkatan pengetahuan dan kapasitas pengetahuan di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi sebanyak 75 orang;

- (13) Kegiatan Penerbitan dan Sertifikat Laik Operasi dan Registrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.994.939,00 dan realisasi sebesar Rp297.579.442,00 atau setara 99,19%. *Output* kegiatan adalah jumlah pemohon SLO dan registrasi yang diproses sebanyak 350 pemohon. *Outcome* kegiatan adalah terlayannya permohonan SLO dan registrasi sebanyak 916;
- (14) Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Bidang Ketenagalistrikan (IUPTL, WUPTL, Tarif Tenaga Listrik dan pengesahan RUPTL), yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp179.756.792,00 dan realisasi sebesar Rp164.734.852,00 atau setara 91,64%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya 3 jenis Dokumen pertimbangan teknis, penetapan tarif tenaga listrik dan/atau pengesahan RUPTL sebagai dasar penerbitan perizinan bidang ketenagalistrikan. *Outcome* kegiatan adalah pertimbangan teknis, penetapan tarif tenaga listrik dan/atau pengesahan RUPTL, rapat fasilitasi penerbitan pertimbangan-pertimbangan teknis cabang dinas studi pemodelan WUPTL;
- (15) Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Sektor Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.994.525,00 dan realisasi sebesar Rp245.744.500,00 atau setara 98,30%. *Output* kegiatan adalah 3 dokumen Teknis. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya pedoman teknis pelaksanaan uji laik operasi instalasi tenaga listrik;
- (16) Kegiatan Promosi Media Tayang Sektor Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.846,00 dan dan realisasi sebesar Rp148.831.500,00 atau setara 99,22%. *Output* kegiatan adalah terpromosikannya sektor

ketenagalistrikan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya sektor ketenagalistrikan di Jawa Barat;

- (17) Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Sektor Pengusahaan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.998.554,00 dan realisasi sebesar Rp141.145.500,00 atau setara 94,10%. *Output* kegiatan adalah 2 dokumen pedoman sektor pengusahaan ketenagalistrikan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya pedoman teknis sektor pengusahaan ketenagalistrikan;
- (18) Kegiatan Inventarisasi, Monitoring, Pengawasan Dan Pengendalian Pengusahaan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.993.127,00 dan realisasi sebesar Rp198.009.192,00 atau setara 99,01%. *Output* kegiatan adalah laporan inventarisasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian pengusahaan ketenagalistrikan sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya inventarisasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian pengusahaan ketenagalistrikan;
- (19) Kegiatan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp239.999.401,00 dan realisasi sebesar Rp234.687.000,00 atau setara 97,79%. *Output* kegiatan adalah jumlah aplikasi sistem informasi ketenagalistrikan di Jawa Barat yang dimutakhirkan sebanyak 3 aplikasi. *Outcome* kegiatan adalah *updating* aplikasi sistem informasi ketenagalistrikan di Jawa Barat sebanyak 3 aplikasi;
- (20) Kegiatan Pelaksanaan Event Gebyar Energi yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp298.626.881,00 atau setara 99,54%. *Output* kegiatan adalah 1 event gebyar energi. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya event gebyar energi sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan;
- (21) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pencapaian Rasio Elektrifikasi Jawa Barat 100% yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.865,00 dan realisasi sebesar

- Rp287.588.455,00 atau setara 95,86%. *Output* kegiatan adalah 1 (satu) laporan hasil pengawasan dan pengendalian pencapaian rasio elektrifikasi menuju Jawa Barat 100%, fasilitasi CSR bantuan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dari badan usaha di wilayah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah persentase bantuan listrik yang tepat sasaran;
- (22) Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan Konsumsi Perkapita yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.792,00 dan realisasi sebesar Rp98.015.983,00 atau setara 98,02%. *Output* kegiatan adalah 1 (satu) dokumen pedoman teknis perhitungan konsumsi perkapita. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya pedoman teknis perhitungan konsumsi perkapita 1 dokumen;
- (23) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp574.725.313,00 dan realisasi sebesar Rp566.739.613,00 atau setara 98,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, jumlah dokumen hasil identifikasi data ketenagalistrikan rumah tangga miskin sebanyak 150 UPTL-KS, 4 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, jumlah Kabupaten/Kota dengan ada ketenagalistrikan rumah tangga yang teridentifikasi sebanyak 160 UPTL-KS;
- (24) Kegiatan Pembentukan Laboratorium Energi dan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.467.874,00 dan realisasi sebesar Rp189.057.250,00 atau setara 94,31%. *Output* kegiatan adalah dokumen pembentukan laboratorium energi dan listrik (1 Dokumen, 1 set pengadaan peralatan laboratorium energi dan ketenagalistrikan). *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pelayanan pengujian bidang energi dan ketenagalistrikan;
- (25) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar

Rp510.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp500.572.931,00 atau setara 98,15%. *Output* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi dan terkendali, jumlah dokumen hasil identifikasi data ketenagalistrikan rumah tangga miskin sebanyak 140 UPTL-KS, 3 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, jumlah Kabupaten/Kota dengan ada ketenagalistrikan rumah tangga yang teridentifikasi sebanyak 128 UPTL-KS;

- (26) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp449.996.180,00 dan realisasi sebesar Rp331.928.483,00 atau setara 73,76%. *Output* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi dan terkendali, jumlah dokumen hasil identifikasi data ketenagalistrikan rumah tangga miskin sebanyak 100 UPTL-KS, 5 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, Jumlah Kabupaten/Kota dengan ada ketenagalistrikan rumah tangga yang teridentifikasi sebanyak 141 UPTL KS;
- (27) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp359.994.100,00 dan realisasi sebesar Rp359.218.750,00 atau setara 99,78%. *Output* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi dan terkendali, jumlah dokumen hasil identifikasi data ketenagalistrikan rumah tangga miskin sebanyak 80 UPTL-KS, 3 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah jumlah UPTL-KS yang terbina, terawasi, dan terkendali, jumlah Kabupaten/Kota dengan ada ketenagalistrikan rumah tangga yang teridentifikasi sebanyak 80 UPTL-KS di 3 Kabupaten/Kota;
- (28) Kegiatan Revitalisasi Instalasi Energi Terbarukan Skala Kecil yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.420.821.885,00 dan realisasi Rp1.005.609.400,00 atau setara 70,78%. *Output* kegiatan adalah 3 unit revitalisasi instalasi energi

terbarukan sekala kecil. *Outcome* kegiatan adalah revitalisasi instalasi energi terbarukan sekala kecil sebanyak 2 unit.

c. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah: Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas ESDM dengan realisasi sebesar 100%; Tingkat Akurasi, Kecepatan, dan Kecermatan dalam Pengelolaan Pelaporan Keuangan Dinas ESDM dengan realisasi sebesar 100%; Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan realisasi sebesar 100%; dan Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran program sebesar Rp1.463.300.769,00 dengan realisasi sebesar Rp1.186.835.221,00 atau setara dengan 81,11%.

- (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.990.732,00 dan realisasi sebesar Rp24.771.732,00 atau setara 99,12%. *Output* kegiatan adalah penyusunan laporan capaian kinerja yang dibuat sebanyak 16 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan capaian kinerja Dinas ESDM;
- (2) Kegiatan Update Situs Web Dinas ESDM dan Penerbitan Buku Profil Data Statistik Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp209.990.000,00 dan realisasi sebesar Rp203.326.000,00 atau setara 96,83%. *Output* kegiatan adalah jumlah situs web yang terupdate jumlah buku profil data statistik yang dicetak sebanyak 150 buku dan 1 situs. *Outcome* kegiatan adalah jumlah sektor pembangunan yang terinfomasikan;
- (3) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp245.929.121,00 dan realisasi sebesar

- Rp228.277.333,00 atau setara 92,82%. *Output* kegiatan adalah jumlah aparatur peserta Bimtek sebanyak 50 orang. *Outcome* kegiatan adalah aparatur/peserta Bimtek yang memahami dan mengimplementasikan hasil Bimtek untuk menunjang pengelolaan keuangan Dinas ESDM;
- (4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.998.895,00 dan realisasi sebesar Rp22.522.895,00 atau setara 90,10%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 4 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan anggaran bagi Unit Kerja di Dinas ESDM sebanyak 4 dokumen;
- (5) Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp167.772.317,00 dan realisasi sebesar Rp155.167.718,00 atau setara 92,49%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan keuangan sebanyak 15 laporan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat akuntabilitas laporan keuangan;
- (6) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp789.619.704,00 dan realisasi sebesar Rp552.769.543,00 atau setara 70,00%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas ESDM sebanyak 5 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan sektor pembangunan di Jawa Barat sebanyak 5 dokumen.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Capaian Indikator Kinerja Program Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas/Cabang Dinas/UPTD 100%. Alokasi anggaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar Rp14.415.841.449,00 dengan realisasi sebesar Rp13.531.209.155,00 atau setara dengan 93,86%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp349.941.052,00 dan realisasi sebesar Rp320.354.625,00 atau setara 91,55%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung sebanyak 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Dinas ESDM;
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp354.522.698,00 dan realisasi sebesar Rp333.718.950,00 atau setara 94,13%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang sebanyak 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Dinas ESDM;
- (3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.625.256.242,00 dan realisasi sebesar Rp3.438.719.628,00 atau setara 94,85%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Dinas ESDM sebanyak 5 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp391.295.044,00 dan realisasi sebesar Rp379.719.570,00 atau setara 97,04%. *Output* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Dinas ESDM;
- (5) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dilaksanakan oleh Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp7.994.174.768,00 dan realisasi sebesar Rp7.500.164.162,00 atau setara 93,82%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerjanya sesuai standar daerah di Dinas ESDM, pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor 1 Unit Kerja, 1 tanah untuk pembangunan gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana kerja Dinas ESDM;

- (6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp514.270.000,00 dan realisasi sebesar Rp455.622.500,00 atau setara 88,60%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Dinas ESDM sebanyak sebanyak 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengujian ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp440.994.551,00 dan realisasi sebesar Rp384.902.670,00 atau setara 87,28%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Dinas ESDM sebanyak 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp395.546.756,00 dan realisasi sebesar Rp375.973.550,00 atau setara 95,05%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Dinas ESDM 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (9) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.840.338,00 dan realisasi sebesar Rp342.033.500,00 atau setara 97,77%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai standar daerah di Dinas ESDM 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

e. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 70% dari target sebesar 70%, Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 350 unit dari target sebesar 350 unit dan Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas ESDM 100%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp20.120.766.591,00 dengan realisasi sebesar Rp18.696.072.598,00 atau setara dengan 92,92%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.998.797,00 dan realisasi sebesar Rp74.209.250,00 atau setara 98,95%. *Output* kegiatan adalah penyediaan barang habis pakai Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM selama 1 tahun;
- (2) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.881.620,00 dan realisasi sebesar Rp298.736.620,00 atau setara 99,62%. *Output* kegiatan adalah penyediaan langganan kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM selama 1 tahun;

- (3) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp406.158.000,00 dan realisasi sebesar Rp396.935.610,00 atau setara 97,73%. *Output* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM selama 1 tahun;
- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp86.398.250,00 dan realisasi sebesar Rp80.481.491,00 atau setara 93,15%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat pendukung fasilitas Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM selama 1 tahun;
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp529.283.583,00 dan realisasi sebesar Rp526.513.938,00 atau setara 99,48%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya pada Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan serta peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung;
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.257.000,00 atau setara 99,01%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan Gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM selama 1 tahun;
- (7) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp89.987.000,00 dan realisasi sebesar Rp86.693.016,00 atau setara 96,34%. *Output* kegiatan adalah penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM selama 1 tahun;

- (8) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.785.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.532.492.605,00 atau setara 85,85%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM sebanyak 5 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan langganan kantor dan tenaga kerja non pegawai Dinas ESDM 1 tahun;
- (9) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp115.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp113.373.000,00 atau setara 98,59%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi Kantor Dinas ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (10) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.917.117.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.886.305.212,00 atau setara 98,39%. *Output* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar Kantor Dinas ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan operasionalnya di Dinas ESDM;
- (11) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp339.997.000,00 dan realisasi sebesar Rp220.185.038,00 atau setara 64,76%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat pendukung fasilitas kantor Dinas ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (12) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp355.100.650,00 dan realisasi sebesar Rp333.178.150,00 atau setara 93,83%. *Output* kegiatan adalah penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas Dinas ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;

- (13) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.069.375.850,00 dan realisasi sebesar Rp929.835.805,00 atau setara 86,95%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung Kantor Dinas ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;
- (14) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp631.795.000,00 atau setara 90,38%. *Output* kegiatan adalah penyediaan diklat, kursus singkat dan Bimtek Aparatur Dinas ESDM. *Outcome* kegiatan adalah presentasi pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (15) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.973.580,00 dan realisasi sebesar Rp178.275.613,00 atau setara 89,15%. *Output* kegiatan adalah penyediaan langganan kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (16) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp738.560.000,00 dan realisasi sebesar Rp728.881.600,00 atau setara 98,69%. *Output* kegiatan adalah penyediaan kerohanian, sarana dan prasarana olah raga serta pakaian aparatur Dinas ESDM. *Outcome* kegiatan adalah presentase

- pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (17) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.999.319,00 dan realisasi sebesar Rp48.258.000,00 atau setara 96,52%. *Output* kegiatan adalah penyediaan barang habis pakai kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
 - (18) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp196.800.000,00 atau setara 98,40%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
 - (19) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp486.864.900,00 dan realisasi sebesar Rp432.245.997,00 atau setara 88,78%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang.
 - (20) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.167,00 dan realisasi sebesar Rp299.804.331,00 atau setara 99,94%. *Output* kegiatan adalah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta Peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah V Bandung. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terjaga keamanan dan kebersihannya;
 - (21) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp74.993.800,00 dan realisasi sebesar Rp72.782.750,00 atau setara 97,05%. *Output* kegiatan adalah penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;
- (22) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.999.550,00 dan realisasi sebesar Rp48.247.678,00 atau setara 64,33%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat pendukung fasilitas kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (23) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.999.316,00 dan realisasi sebesar Rp39.999.316,00 atau setara 100%. *Output* kegiatan adalah penyediaan barang habis pakai kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasional di Dinas ESDM;
- (24) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp172.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp171.800.000,00 atau setara 99,71%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (25) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.004.382.639,00 dan realisasi sebesar Rp981.400.827,00 atau setara 97,71%. *Output* kegiatan adalah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya di Dinas ESDM.

- Outcome* kegiatan adalah Jumlah unit kerja yang terjaga keamanan dan kebersihannya;
- (26) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp384.997.974,00 dan realisasi sebesar Rp377.186.000,00 atau setara 97,97%. *Output* kegiatan adalah penyediaan barang habis pakai Kantor Dinas ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
 - (27) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp167.761.160,00 dan realisasi sebesar Rp141.547.480,00 atau setara 84,37%. *Output* kegiatan adalah penyediaan langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
 - (28) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp386.452.114,00 dan realisasi sebesar Rp383.597.880,00 atau setara 99,26%. *Output* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar kantor cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
 - (29) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp310.229.483,00 dan realisasi sebesar Rp310.229.423,00 atau setara 100%. *Output* kegiatan adalah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terjaga keamanan dan kebersihannya;
 - (30) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp40.441.083,00 dan realisasi sebesar

Rp40.168.169,00 atau setara 99,33%. *Output* kegiatan adalah penyediaan barang habis pakai kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;

- (31) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp305.387.847,00 dan realisasi sebesar Rp294.630.385,00 atau setara 96,48%. *Output* kegiatan adalah penyediaan langganan kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (32) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.955.000,00 atau setara 99,55%. *Output* kegiatan adalah penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (33) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp779.674.440,00 dan realisasi Rp749.260.228,00 atau setara 96,10%. *Output* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (34) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp120.990.080,00 dan realisasi sebesar Rp115.873.460,00 atau setara 95,77%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat pendukung fasilitas kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit

- kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (35) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.954.567,00 dan realisasi sebesar Rp398.188.048,00 atau setara 99,56%. *Output* kegiatan adalah penyediaan jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terjaga keamanan dan kebersihannya;
- (36) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp119.483.400,00 dan realisasi sebesar Rp115.827.600,00 atau setara 96,94%. *Output* kegiatan adalah Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;
- (37) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp104.495.000,00 dan realisasi sebesar Rp102.059.620,00 atau setara 97,67%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan Gedung kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;
- (38) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp78.170.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.694.620,00 atau setara 87,88%. *Output* kegiatan adalah penyediaan barang habis pakai kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (39) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- Provinsi Jawa Barat sebesar Rp126.013.000,00 dan realisasi sebesar Rp117.698.750,00 atau setara 93,40%. *Output* kegiatan adalah penyediaan langganan kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (40) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp559.146.650,00 dan realisasi sebesar Rp519.210.760,00 atau setara 92,86%. *Output* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (41) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp42.460.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.684.800,00 atau setara 88,75%. *Output* kegiatan adalah penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;
- (42) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.948.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.948.000,00 atau setara 100%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;
- (43) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp89.009.573,00 dan realisasi sebesar Rp73.369.100,00 atau setara 82,43%. *Output* kegiatan adalah Penyediaan alat pendukung fasilitas kantor cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja

- yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (44) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Pengujian ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp259.380.002,00 dan realisasi sebesar Rp132.073.548,00 atau setara 50,92%. *Output* kegiatan adalah penyediaan barang habis pakai Kantor UPTD Laboratorium ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (45) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp82.836.500,00 dan realisasi sebesar Rp71.957.972,00 atau setara 86,87%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat pendukung fasilitas kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (46) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp309.663.909,00 dan realisasi sebesar Rp307.785.912,00 atau setara 99,39%. *Output* kegiatan adalah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta Peralatannya cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terjaga keamanan dan kebersihannya;
- (47) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp79.220.000,00 dan realisasi sebesar Rp60.720.190,00 atau setara 76,65%. *Output* kegiatan adalah penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;
- (48) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar

- Rp125.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp116.014.000,00 atau setara 92,26%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;
- (49) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pengujian ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp257.264.500,00 dan realisasi sebesar Rp178.220.647,00 atau setara 66,28%. *Output* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar kantor UPTD Laboratorium ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah Unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di UPTD Laboratorium ESDM;
- (50) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Pengujian ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp395.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp385.959.200,00 atau setara 97,47%. *Output* kegiatan adalah penyediaan alat pendukung fasilitas Kantor UPTD Laboratorium ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di UPTD Laboratorium ESDM;
- (51) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Pengujian ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp90.399.756,00 dan realisasi sebesar Rp85.767.670,00 atau setara 94,88%. *Output* kegiatan adalah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya UPTD Laboratorium ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terjaga keamanan dan kebersihannya;
- (52) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Pengujian ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp59.998.000,00 dan realisasi sebesar Rp32.544.500,00 atau setara 54,24%. *Output* kegiatan adalah penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas UPTD Laboratorium ESDM. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM;

- (53) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Pengujian ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp303.944.335,00 atau setara 86,97%. *Output* kegiatan adalah tingkat pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (54) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Pengujian ESDM yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp309.029.600,00 dan realisasi sebesar Rp295.936.798,00 atau setara 95,76%. *Output* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (55) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp26.048.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.015.000,00 atau setara 99,87%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan barang habis pakai Cabang Dinas ESDM Wil. III Purwakarta. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (56) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.996.000,00 dan realisasi sebesar Rp44.502.000,00 atau setara 87,27%. *Output* kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan, fasilitas internet dan jasa paket pengiriman. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (57) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp541.597.950,00 dan realisasi sebesar Rp507.209.755,00 atau setara 93,65%. *Output* kegiatan adalah tersedianya makan minum rapat

- dan jamuan tamu, air minum dan perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (58) Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp98.450.697,00 dan realisasi sebesar Rp79.394.260,00 atau setara 80,64%. *Output* kegiatan adalah adanya tenaga ahli dibidangnya masing-masing sesuai kebutuhan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan jasa profesi Cabang Dinas ESDM Wil. III Purwakarta;
- (59) Kegiatan Penyediaan alat pendukung fasilitas kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp95.802.000,00 dan realisasi sebesar Rp87.782.138,00 atau setara 91,63%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik, gas elpiji, telepon, air dan listrik. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya di Dinas ESDM;
- (60) Kegiatan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Beserta Perlengkapannya Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp455.296.958,00 dan realisasi sebesar Rp439.884.154,00 atau setara 96,61%. *Output* kegiatan adalah terciptanya keamanan dan kebersihan gedung kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta;
- (61) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp30.415.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.414.038,00 atau setara 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalnya di Dinas ESDM. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta;

- (62) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp57.915.000,00 dan realisasi sebesar Rp57.186.630,00 atau setara 98,74%. *Output* kegiatan adalah terawatnya kendaraan operasional roda dua dan roda empat. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan pemeliharaan kendaraan Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta;
- (63) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp29.977.100,00 dan realisasi sebesar Rp29.886.500,00 atau setara 99,70%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur 1 Unit Kerja;
- (64) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp223.828.960,00 dan realisasi sebesar Rp218.699.535,00 atau setara 97,71%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasara operasionalnya 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah rapat internal dan luar Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah I Cianjur;
- (65) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp433.324.800,00 dan realisasi sebesar Rp429.269.002,00 atau setara 99,06%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasionalnya 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan langganan kantor dan tenaga kerja non pegawai Cabang Dinas ESDM wilayah I Cianjur;
- (66) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp57.367.195,00 atau setara 95,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi

- pemeliharaan dan prasarana sebanyak 1 unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan dasar operasional;
- (67) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.890.967,00 dan realisasi sebesar Rp345.406.628,00 atau setara 98,72%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasional di cabang dinas ESDM wilayah I Cianjur. *Outcome* kegiatan adalah penyedia jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur;
- (68) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp69.166.000,00 dan realisasi sebesar Rp63.833.821,00 atau setara 92,29%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana operasional di cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur sebanyak 1 Unit kerja. *Outcome* kegiatan adalah penyedia pemeliharaan kendaraan dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur selama 1 tahun;
- (69) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp45.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp44.680.000,00 atau setara 99,29%. *Output* kegiatan adalah jumlah unit kerja yang terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana operasional. *Outcome* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan Gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur selama 1 tahun.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Permasalahan

- (1) Rendahnya kesadaran para pelaku pengambil air tanah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, seperti kewajiban untuk membuat sumur imbuhan, ataupun telah memiliki sumur imbuhan tetapi belum diregistrasi, dan belum memasang piezometer;

- (2) Adanya keberatan terhadap kewajiban untuk melakukan pengujian konstruksi sumur bor melalui broe hole camera dengan alasan biaya yang mahal;
- (3) Masih ditemukan adanya meter air yang belum dikalibrasi (ditera) atau meter air yang kondisinya rusak;
- (4) Masih banyak pelaku usaha pertambangan yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan, seperti laporan produksi, laporan triwulanan, laporan kemajuan tambang, laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, laporan pelaksanaan reklamasi dan dokumen RKAB;
- (5) Ketersediaan lahan untuk instalasi biogas yang terbatas;
- (6) Kementerian ESDM mengadakan kegiatan yang sama sehingga terjadi duplikasi calon penerima calon lokasi;
- (7) Terjadi gagal lelang karena badan usaha yang memiliki izin usaha di Pembangkit Listrik Tenaga Surya terbatas dan spesifikasi teknis instalasi listrik eksisting di lapangan yang kurang memenuhi kriteria regulasi;
- (8) Masih kurangnya kesadaran para pemilik instalasi tenaga listrik untuk melakukan proses sertifikasi laik operasi;
- (9) Adanya dualisme penyelenggaraan sertifikasi instalasi pembangkit tenaga listrik dengan sektor ketenagakerjaan dan sektor minyak dan gas;
- (10) Masih terkendala dengan penggunaan OSS sebagai pintu gerbang permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan;
- (11) Belum tersedianya peraturan gubernur yang mengatur penetapan tarif tenaga listrik, sehingga permohonan penetapan tarif tenaga listrik belum dapat diproses lebih lanjut;
- (12) Regulasi acuan dari Pemerintah Pusat sebagai NSPK yang berubah-ubah, serta kewenangan pemeriksaan instalasi tenaga listrik yang berbeda, sehingga diperlukan penetapan pedoman teknis yang sesuai dengan objek pemeriksaan pengujian berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- (13) Kompleksitas mata uji pemeriksaan dan pengujian menyebabkan dari 37 (tiga puluh tujuh) butir mata uji jadi baru tersusun pedoman teknis dari 3 (tiga) sub bidang.
- (14) Belum tersedianya Peraturan dari Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM sebagai NSPK bagi

- Pemerintah Daerah untuk menetapkan tingkat mutu pelayanan bagi pemegang IUPTL di Jawa Barat;
- (15) Metode pengambilan titik koordinat instalasi tenaga listrik pada pemegang IUPTL adalah sampling, sehingga base data yang digunakan pada pekerjaan pemetaan infrastruktur ketenagalistrikan perlu disempurnakan;
 - (16) Penerima bantuan subsidi listrik hanya dapat diterima oleh masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah masuk di Basis Data Terpadu Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT TNP2K). Padahal kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat miskin dan tidak mampu yang kondisinya layak untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik namun belum masuk dalam BDT TNP2K;
 - (17) Proses pemasukan masyarakat miskin dan tidak mampu kedalam BDT TNP2K memakan waktu yang cukup lama dan tidak pasti serta birokrasi panjang yang berjenjang;
 - (18) Aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran yang difasilitasi oleh pemerintah pusat belum mampu dan belum efektif menjawab persoalan dilapangan;
 - (19) Peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan terhadap pelayanan aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran belum mampu dilaksanakan secara baik dan benar;
 - (20) Perluasan jaringan listrik pedesaan masih menemukan kendala penyelesaian apabila harus melintasi atau melewati kawasan kehutanan dan atau perkebunan;
 - (21) Belum adanya NSP dari Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM terkait penetapan konsumsi listrik per kapita, dan sebagai Pemerintah Provinsi pertama yang menetapkan konsumsi listrik per kapita sebagai indicator kinerja pembangunan sector ketenagalistrikan, belum ada acuan yang dapat dijadikan sebagai referensi pelaksanaan Perhitungan Konsumsi Perkapita;
 - (22) Sektor terkait sebagai driver factor maupun sebagai pendukung peningkatan konsumsi listrik per kapita belum memiliki pemahaman yang baik mengenai kepentingan perhitungan konsumsi listrik per kapita.

b. Solusi

- (1) Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap pemilik kegiatan usaha yang melakukan pengambilan air tanah terkait kewajibannya;
- (2) Diberikan teguran atau peringatan untuk segera melakukan tera ulang meter air atau memperbaiki/mengganti meter air yang rusak;
- (3) Perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pembuatan laporan terhadap pelaku usaha pertambangan;
- (4) Perubahan CPCL;
- (5) Lelang Ulang dan Koordinasi dengan PT. PLN;
- (6) Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat;
- (7) Pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi tentang pentingnya Keselamatan Ketenagalistrikan dengan sertifikasi instalasi kepada para pelaku usaha maupun ke pemilik instalasi akan lebih ditingkatkan;
- (8) Perlu adanya kesepakatan bersama antar pihak-pihak yang bersinggungan dan kesepakatan tersebut harus mampu diterima dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait;
- (9) DPMPTSP beserta ESDM melakukan sosialisasi penggunaan OSS dan KBLI terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan;
- (10) Menyusun Peraturan Gubernur sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan ketenagalistrikan dan mengajukannya ke Biro Hukum di tahun 2020;
- (11) Diperlukan penyusunan kembali pedoman teknis untuk bidang dan sub bidang lain sehingga pelaksanaan sertifikasi laik operasi dan registrasi di Jawa Barat dapat berjalan optimal;
- (12) Koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, Pelaku Usaha, konsumen tenaga listrik di wilayah usaha dan stakeholders terkait lainnya untuk dapat menyusun tingkat mutu pelayanan pemegang IUPTL yang dapat diaplikasikan dengan baik dan optimal;
- (13) Menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur penetapan tingkat mutu pelayanan;
- (14) Titik koordinat instalasi tenaga listrik pada pemegang IUPTL dilengkapi pada berita acara inventarisasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian perusahaan ketenagalistrikan;
- (15) Perlu dilakukan inventarisasi secara masif dan menyeluruh terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum berlistrik dengan strategi khusus dan spesifik, dengan melibatkan berbagai

- pihak untuk melakukan kolaborasi program/kegiatan;
- (16) Perlu dilakukan terobosan kebijakan terkait kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu masuk kedalam BDT TNP2K yang disepakati oleh setiap stakeholder yang terkait;
 - (17) Pemutakhiran aplikasi yang mampu responsif dan cepat terhadap adanya pengaduan dari masyarakat;
 - (18) Sosialisasi secara berkelanjutan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan terhadap pelayanan aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran bagi masyarakat;
 - (19) Penerapan terobosan kebijakan atau kerjasama antar stakeholder terkait penyelesaian kendala lahan yang harus dilewati atau dilintasi oleh perluasan jaringan pedesaan;
 - (20) Koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat maupun daerah serta stakeholders terkait lainnya dalam merumuskan penetapan konsumsi listrik per kapita di Jawa Barat;
 - (21) Melakukan studi dan mempelajari sistem manajemen peningkatan konsumsi listrik per kapita di negara-negara dengan konsumsi listrik per kapita tinggi;
 - (22) Melakukan sosialisasi yang instensif dan menyeluruh kepada stakeholers terkait mengenai konsumsi listrik per kapita.

30. Urusan Perdagangan

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan perdagangan Tahun 2019 adalah Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan realisasi sebesar 7,51% dari target sebesar 3%; Nilai Ekspor Non Migas dengan realisasi sebesar 29.709,05 Juta USD dari target sebesar 30.000 Juta USD; Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan dengan realisasi sebesar 4,18 poin dari target sebesar 3,00-4,00 poin; Indeks Keberdayaan Konsumen dengan target sebesar 37 poin dari target sebesar 37 poin dan jumlah pengujian mutu barang dengan realisasi sebesar 408 buah dari target sebesar 160 buah. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Capaian Indikator Kinerja Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Tahun 2019 yaitu Indeks Keberdayaan Konsumen dengan capaian sebesar 37 poin dari target sebesar 37 poin. Alokasi anggaran program adalah Rp3.805.181.742,00 dengan realisasi anggaran Rp3.706.651.236,00 atau setara dengan 97,41%.

- (1) Kegiatan Sosialisasi layanan pengujian mutu barang logam dan elektronika UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang sebesar Rp98.400.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp97.800.000,00 atau setara dengan 99,39%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi layanan pengujian mutu barang logam dan elektronika sebanyak 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan Pengujian Barang dan Kalibrasi Alat Ukur;
- (2) Kegiatan Pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang sebesar Rp149.999.800,00 realisasi anggaran sebesar Rp128.930.500,00 atau setara dengan 85,95%. *Output* kegiatan adalah Pengujian Barang dan Kalibrasi Alat Ukur selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan Pengujian Barang dan Kalibrasi Alat Ukur;
- (3) Kegiatan Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang sebesar Rp150.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp148.309.250,00 atau setara dengan 98,87%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pengujian Barang dan Kalibrasi Alat

- Ukur selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan Pengujian Barang dan Kalibrasi Alat Ukur;
- (4) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan BPSK sebesar Rp99.999.803,00 realisasi anggaran sebesar Rp97.902.229,00 atau setara dengan 97,90%. *Output* kegiatan adalah terbinaanya Kelembagaan BPSK sebanyak 16 lembaga. *Outcome* kegiatan adalah Pembinaan Kelembagaan BPSK;
 - (5) Kegiatan Pengawasan Barang Beredar sebesar Rp499.948.360,00 realisasi anggaran sebesar Rp467.192.043,00 atau setara dengan 93,45%. *Output* kegiatan adalah laporan hasil pengawasan barang beredar sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa;
 - (6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen sebesar Rp859.999.635,00 realisasi anggaran sebesar Rp856.724.249,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah Pelatihan /Bimtek Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen sebanyak 300 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan perlindungan konsumen serta meningkatnya pemahaman atas perlindungan konsumen;
 - (7) Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Perlindungan Konsumen sebesar Rp199.960.553,00 realisasi anggaran sebesar Rp199.014.633,00 atau setara dengan 99,53%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi pemahaman terhadap perlindungan konsumen sampai sebanyak 80 aparatur/pelaku usaha. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan konsumen dan keamanan pasar dalam negeri;
 - (8) Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi serta Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon sebesar Rp299.998.250,00 realisasi anggaran sebesar Rp299.882.555,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi serta jasa pengujian dan kalibrasi air minum dalam kemasan sebanyak 408 jumlah pengujian/kalibrasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan konsumen dan kemandirian pasar dalam negeri;
 - (9) Kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi PKTN sebesar Rp149.997.596,00 realisasi anggaran

- sebesar Rp147.879.142,00 atau setara dengan 98,59%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya forum koordinasi dan implementasi PKTN sebanyak 90 Peserta. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman dan meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan PKTN;
- (10) Kegiatan Pengawasan Tertib Niaga sebesar Rp349.999.131,00 realisasi anggaran sebesar Rp338.213.470,00 atau setara dengan 96,63%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya laporan hasil pengawasan tertib niaga selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengawasan niaga komoditi strategis pokok;
- (11) Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian Dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik Dan Tabung Gas Bogor sebesar Rp200.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp197.728.679,00 atau setara dengan 98,86%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan Teknis serta Jasa Pengujian dan Kalibrasi Alat Ukur Keramik dan Tabung Gas selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Pengawasan Niaga Komoditi Strategis Pokok;
- (12) Kegiatan Jasa Pengujian Dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik Dan Tabung Gas Bogor sebesar Rp244.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp242.150.000,00 atau setara dengan 99,24%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Uji Banding/*Assessment/Surveillance/Sertifikasi ISO 9001:2015/Sertifikasi ISO/IEC 17023:2017* sebanyak 1 Kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Ukur;
- (13) Kegiatan Sosialisasi Pengujian Mutu Barang Komoditi Agro di 11 (sebelas) Kabupaten sebesar Rp99.991.464,00 realisasi anggaran sebesar Rp96.001.950,00 atau setara dengan 96,01%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Sosialisasi Pengujian Mutu Barang Komoditi Agro sebanyak 1 Kali. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu barang Komoditi Agro;
- (14) Kegiatan Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung sebesar Rp202.887.400,00 realisasi anggaran sebesar Rp189.973.573,00 atau setara dengan 93,63%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Uji Banding/*Assessment/Surveillance/Sertifikasi ISO 9001:2015/Sertifikasi ISO/IEC 17023:2017* selama 12 bulan. *Outcome*

- kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Pendataan/sosialisasi/pelayanan pengujian mutu barang dan kalibrasi alat ukur;
- (15) Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung sebesar Rp199.999.750,00 realisasi anggaran sebesar Rp198.948.963,00 atau setara dengan 99,47%. *Output* kegiatan adalah Pengujian Barang dan Kalibrasi Alat Ukur selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Pelayanan Pengujian dan kalibrasi Alat Ukur.

b. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Capaian indikator kinerja Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Tahun 2019 yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK) Bahan Makanan dengan realisasi sebesar 4,18 Poin dari target sebesar 3,00-4,00 poin dan Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB dengan capaian sebesar 15,38 persen dari target sebesar 22%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp15.473.318.029,00 realisasi anggaran Rp13.672.351.041,00 setara dengan 88,36%, dengan jumlah kegiatan 13.

- (1) Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) di Jawa Barat - RTM sebesar Rp999.240.248,00 realisasi anggaran sebesar Rp994.459.460,00 atau setara dengan 99,52%. *Output* kegiatan adalah Dukungan OPM Kepokmas di Jawa Barat dan Kajian Besaran Subsidi OPM Kepokmas sebanyak 27 Kab./Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok bagi rumah tangga miskin;
- (2) Kegiatan Prognosa Stabilitas Harga Dan Stok Kebutuhan Pokok (KEPOK) Di Jawa Barat sebesar Rp389.067.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp226.270.500,00 atau setara dengan 58,16%. *Output* kegiatan Tersedianya prognosa Stabilitas Harga dan Stok Kebutuhan Pokok (KEPOK) di Jawa Barat serta Pengembangan Aplikasi *e-logistik* sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya faktor penyebab kenaikan harga dan kelangkaan stok Kebutuhan Pokok (KEPOK) di Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Rapat Pengendalian Harga Pangan sebesar Rp149.999.518,00 realisasi anggaran sebesar Rp147.252.550,00 atau setara dengan 98,17%. *Output* kegiatan adalah Rapat Pengendalian Harga Pangan dilaksanakan sebanyak 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah teridentifikasinya faktor penyebab

- kenaikan harga dan kelangkaan stok Kebutuhan Pokok (KEPOK) di Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Layanan Informasi Harga sebesar Rp199.997.260,00 realisasi anggaran sebesar Rp198.437.829,00 atau setara dengan 99,22%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya data informasi harga kebutuhan pokok selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpantaunya fluktuasi harga kebutuhan pokok;
 - (5) Kegiatan Pameran Dagang Dalam Rangka Peningkatan Produk Dalam Negeri sebesar Rp499.498.692,00 realisasi anggaran sebesar Rp498.208.632,00 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penggunaan produk dalam negeri di masyarakat;
 - (6) Kegiatan Partisipasi Pasar Kerajinan Pada INACRAFT sebesar Rp384.757.534,00 realisasi anggaran sebesar Rp384.503.384,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya INACRAFT 2019 membawa 8 UKM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penggunaan produk kerajinan dalam negeri di masyarakat;
 - (7) Kegiatan Pengembangan Akses Pasar Dan Misi Dagang Untuk Produk Unggulan Jawa Barat sebesar Rp399.999.824,00 realisasi anggaran sebesar Rp357.631.100,00 atau setara dengan 89,41%. *Output* kegiatan adalah Partisipasi Akses Pasar dan Misi Dagang untuk Produk Unggulan Jawa Barat dan kerja sama MPU Pengembangan Akses Pasar Produk Unggulan Jawa Barat serta fasilitas produk lokal di pasar modern dengan memamerkan produk Jawa Barat di pasar modern secara rutin dan sesuai dengan tema tertentu sebanyak 10 Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Terlaksananya Akses Pasar dan Misi Dagang untuk Produk Unggulan Jawa Barat dan Kerjasama MPU Pengembangan Akses Pasar Produk Unggulan Jawa Barat serta fasilitas produk lokal di pasar modern dengan memamerkan produk Jawa Barat di pasar modern secara rutin dan sesuai dengan tema tertentu;
 - (8) Kegiatan Sosialisasi *E-Commerce* Bagi Aparat Yang Membidangi Perdagangan Dalam Negeri di Jawa Barat sebesar Rp99.991.720,00 realisasi anggaran sebesar Rp99.555.500,00 atau setara dengan 99,56%. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya

- penjualan dari pelaku usaha karena pemotongan rantai pasok kepada 250 orang Pelaku Usaha. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatkan Pemahaman Pedagangan Mikro Kecil Menengah dan aparat dalam rangka pengembangan perdagangan melalui sistem elektronik;
- (9) Kegiatan Sosialisasi Pasar rakyat menuju Pasar Ber SNI 8152 bagi Pedagang Pasar Rakyat dan aparat yang membidangi perdagangan di 27 Kab/Kota se Jawa Barat sebesar Rp199.995.880,00 realisasi anggaran sebesar Rp199.003.500,00 atau setara dengan 99,50%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi pasar rakyat kepada 108 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman pedagang dan aparat yang membidangi perdagangan dalam negeri dalam mengelola usahanya;
- (10) Kegiatan Sosialisasi Regulasi Waralaba Bagi Aparat yang Membidangi Perdagangan dalam Negeri sebesar Rp99.996.352,00 realisasi anggaran sebesar Rp99.880.600,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi regulasi waralaba bagi aparat kepada 54 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman Regulasi Waralaba bagi aparat yang membidangi perdagangan dalam negeri;
- (11) Kegiatan Festival Pasar Rakyat sebesar Rp9.017.850.043,00 realisasi anggaran sebesar Rp7.746.254.596,00 atau setara dengan 85,90%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Konsep Pasar Rakyat dan Kontes Pasar Rakyat dalam rangka Festival Pasar kepada 27 kab/kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman pasar rakyat;
- (12) Kegiatan Pilot Project Pusat Distribusi Regional Jawa Barat sebesar Rp2.182.933.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.894.243.800,00 atau setara dengan 86,78%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Gudang Juara Sebagai Contoh bagi gudang-gudang lainnya sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Terbentuknya Gudang Juara sebagai Contoh Bagi gudang-gudang lainnya;
- (13) Kegiatan Sosialisasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce Smart*) Bagi Pelaku Usaha Di Jawa Barat sebesar Rp849.990.958,00 realisasi anggaran sebesar Rp826.649.590,00 atau setara dengan 97,25%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi e-commerce bagi 250

pelaku usaha. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya penjualan dari pelaku usaha karena pemotongan rantai pasok.

c. Program Pengembangan Ekspor

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Ekspor pada Tahun 2019 yaitu Volume Ekspor dengan capaian sebesar 6.795,95 Ribu Ton dari target sebesar 7.500 Ribu Ton dan Nilai Ekspor dengan capaian sebesar 27.490,48 Juta USD dari target sebesar 30.000 Juta USD. Alokasi anggaran program sebesar Rp2.880.452.774,00 dengan realisasi anggaran Rp2.860.183.255,00 atau setara dengan 99,30%.

- (1) Kegiatan Bimbingan Teknis Bagaimana Memulai Ekspor sebesar Rp399.999.929,00 realisasi anggaran sebesar Rp395.639.229,00 atau setara dengan 98,91%. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya Pemahaman mengenai Ekspor dan pembuatan tutorial di *platform youtube* dalam bentuk video mengenai ekspor sebanyak 25 eksportir. *Outcome* kegiatan adalah bimtek bagaimana memulai ekspor dan pembuatan pembuatan manual tutorial di *platform youtube* dalam bentuk video mengenai ekspor;
- (2) Kegiatan Bimbingan Teknis SKA sebesar Rp190.980.105,00 realisasi anggaran sebesar Rp190.980.105,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Bimtek SKA sebanyak 50 eksportir. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah eksportir di Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Program Pendampingan Ekspor (Coaching Programme) sebesar Rp899.999.852,00 realisasi anggaran sebesar Rp899.999.848,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya *Coaching Programme* sebanyak 25 eksportir. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah eksportir di Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Forum Kinerja Ekspor Di Jawa Barat sebesar Rp192.394.022,00 realisasi anggaran sebesar Rp192.381.306,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya forum kinerja ekspor di Jawa Barat 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja ekspor di Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Verifikasi Dan Penelusuran Asal Barang Ekspor Jawa Barat sebesar Rp199.999.965,00 realisasi anggaran sebesar Rp198.455.565,00 atau setara dengan 99,23%. *Output* kegiatan adalah pengumpulan data untuk dokumen/data ekspor

- dan importir dan telah tersusun 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya proses verifikasi dan penelusuran asal barang ekspor Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Post Audit API dan Implementasi Kebijakan Impor sebesar Rp197.109.886,00 realisasi anggaran sebesar Rp197.109.886,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya dokumen /informasi peraturan mengenai kebijakan impor sebanyak 1 Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terkendalinya impor Jawa Barat;
 - (7) Kegiatan *Trade Expo Indonesia* (TEI) sebesar Rp399.995.956,00 realisasi anggaran sebesar Rp390.359.816,00 atau setara dengan 97,59%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Partisipasi dalam kegiatan *Trade Expo Indonesia* (TEI) sebanyak 1 Kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya produk ekspor Jawa Barat;
 - (8) Kegiatan Fasilitasi Pameran/Misi Dagang (Internasional) di 6 Negara sebesar Rp399.973.059,00 realisasi anggaran sebesar Rp395.257.500,00 atau setara dengan 98,82%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pameran/misi dagang internasional sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya produk ekspor Jawa Barat.

d. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebesar Rp2.779.996.423,00 dengan realisasi sebesar Rp2.581.780.743,00 atau setara dengan 92,87%.

- (1) Kegiatan Penyusunan Direktori Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.999.786.- dan realisasi Rp658.603.272.- atau setara dengan 94,09%. *Output* kegiatan adalah proses input data direktori dan informasi bidang

- industri dan perdagangan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data dan informasi industri dan perdagangan yang terdiri dari data potensi industri jawa barat, Direktori Perdagangan Jawa Barat, data harga pasar serta terkelolanya *website* dinas perindustrian dan perdagangan;
- (2) Kegiatan media informasi industri dan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.999.403.- dan realisasi Rp149.816.008.- atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah tersedianya buku media indag edisi I dan pengumpulan bahan dan proses penyusunan buku media informasi indag Edisi II. *Outcome* kegiatan adalah terinformasikannya aktivitas Disperindag Jabar melalui Buku media Informasi indag;
 - (3) Kegiatan Rapat Koordinasi Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.208.- dan realisasi Rp96.945.500.- atau setara dengan 96,95%. *Output* kegiatan adalah terkoordinasikannya data dan informasi bidang industri dan perdagangan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas antara pusat, provinsi dan kab/kota terhadap data dan informasi bidang industri dan perdagangan;
 - (4) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp125.000.000.- dan realisasi Rp123.695.800,00 atau setara dengan 98,96%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi penatausahaan keuangan dan pembinaan keuangan sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan dan pelaksanaan penatausahaan;
 - (5) Kegiatan Pelaporan Capaian Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp124.999.786.- dan realisasi Rp121.075.021.- atau setara dengan 96,86%. *Output* kegiatan adalah laporan keuangan dinas sebanyak 3 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan keuangan;
 - (6) Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000.- dan realisasi Rp197,779,500.- atau setara dengan 98.89%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi arah dan kebijakan perencanaan disperindag kepada masyarakat sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas anatar pusat, provinsi dan kab/kota terhadap data dan informasi bidang industri dan perdagangan;

- (7) Kegiatan Perencanaan Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.279.999.226.- dan realisasi Rp1.134.054.343.- atau setara dengan 88,60%. *Output* kegiatan adalah dokumen RKA dan DPA dan DPPA sebanyak 4 dokumen dan 4 Rekomendasi Teknis RPIK Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Indramayu dan Kab. Ciamis. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas antara pusat, provinsi dan kab/kota terhadap data dan informasi bidang industri dan perdagangan;
- (8) Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.014.- dan realisasi Rp99.811.299.- atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Penyusunan dokumen dan penyusunan laporan evaluasi sebanyak 4 Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas anantara pusat, provinsi dan kab/kota terhadap data dan informasi bidang industri dan perdagangan.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebesar Rp23.201.515.046,00 dengan realisasi sebesar Rp20.301.613.785,00 atau setara dengan 87,50%.

- (1) Kegiatan Pengadaan kelengkapan Kantor untuk peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.739.000.- dan realisasi

- Rp247.088.470,00 atau setara dengan 98,94%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sarana dan prasarana kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya pengadaan kelengkapan kantor untuk peningkatan sarana dan prasarana Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan Dan Kemasan;
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp148.257.264.- dan realisasi Rp148.137.200.- atau setara dengan 99,92%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sarana dan prasarana kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya pengadaan kelengkapan kantor untuk peningkatan sarana dan prasarana Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan Dan Kemasan;
 - (3) Kegiatan Revitalisasi Pengadaan alat pengujian/Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.000.000.000.- dan realisasi Rp2.969.287.000.- atau setara dengan 98,98%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya alat standar pengujian/kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang;
 - (4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Dekranasda Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.213.571.000.- dan realisasi Rp2.130.772.565.- atau setara dengan 96,26%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pengadaan cinderamata, peralatan dan perlengkapan kantor, penghias ruangan selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor Dekranasda Jawa Barat;
 - (5) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.020.025.843.- dan realisasi Rp980.945.000,00 atau setara dengan 96,17%. *Output* kegiatan adalah

- terpenuhinya sarana dan prasarana kantor indag selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah pengadaan cinderamata, peralatan dan perlengkapan kantor, penghias ruangan, renovasi gedung kantor;
- (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp415.079.586.- dan realisasi Rp412.268.103.- atau setara dengan 99,32%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kerja selama 11 bulan. *Outcome* terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam mendukung operasional UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor;
 - (7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp142.765.692.- dan realisasi Rp142.738.000.- atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya peralatan kerja dan kelengkapannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana;
 - (8) Kegiatan Pengadaan Peralatan Standar dan Alat-alat ukur standar UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Air Minum dalam Kemasan Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.499.732.201.- dan realisasi Rp2.346.578.999,00 atau setara dengan 67,05%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya pengadaan peralatan standar dan alat-alat ukur standar selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya peralatan kerja dan kelengkapannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor;
 - (9) Kegiatan Peningkatan Penyediaan Peralatan Kerja Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.900.000.000.- dan realisasi Rp2.643.571.000,00 atau setara dengan 91,16%.

- Output* kegiatan adalah terlaksananya Sarana dan prasarana serta pelayanan kantor UPTD Industri Logam selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kerja;
- (10) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Industri Logam yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.199.967.974.- dan realisasi Rp1.179.603.028,00 atau setara dengan 98,30%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Sarana dan prasarana serta pelayanan kantor UPTD Industri Logam selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keamanan kebersihan dan pelayanan di UPTD Industri Logam;
- (11) Kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor UPTD Industri Logam yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.215.406.486,00 dan realisasi Rp4.253.318.420, atau setara dengan 81,55%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Sarana dan prasarana kantor UPTD Industri Logam selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kondisi sarana dan prasarana antar UPTD Industri Logam;
- (12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang Agro Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.196.970.000,00 dan realisasi Rp2.847.306.000,00 atau setara dengan 89,06%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya Layanan terhadap pelaksanaan pengujian mutu barang agro selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya Peralatan Pengujian Mutu Barang Agro.

f. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebesar Rp23.781.462.540,00

dengan realisasi sebesar Rp22.901.339.491,00 atau setara dengan 96,30%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.139.484.395,00 dan realisasi sebesar Rp1.039.909.400,00 atau setara dengan 91,26%. *Output* Kegiatan adalah terlaksananya peralatan olah raga pakai habis, belanja jasa profesi, belanja sewa lapangan olah raga selama 11 bulan. *Outcome* Kegiatan adalah terlaksananya fasilitas kerohanian, sarana dan prasarana olah raga serta pakaian aparatur;
- (2) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dekranasda sebesar Rp25.000.000.- dan realisasi sebesar Rp25.000.000.- atau setara dengan 100%. *Output* Kegiatan adalah Terpeliharanya Kantor Dekranasda selama 11 bulan. *Outcome* belanja alat listrik;
- (3) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jabar sebesar Rp219.000.000.- dan realisasi sebesar Rp104.200.000.- atau setara dengan 47,58%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kedisiplinan dan kinerja pegawai selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah uang saku Diklatpim III, Diklatpim IV, kontribusi;
- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp337.355.000,00 dan realisasi sebesar Rp293.026.442,00 atau setara dengan 86,86%. *Output* Kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya langganan telepon, langganan listrik, belanja alat listrik elektronik;
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Dekranasda sebesar Rp825.265.000,00 dan realisasi sebesar Rp684.504.252,00 atau setara dengan 82,94%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya Kantor Dekranasda selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah alat-alat kebersihan, iuran sampah, jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa profesi, penggantian, pengadaan seragam, peralatan keamanan;
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dekranasda sebesar Rp414.700.800,00 dan realisasi sebesar Rp198.400.000,00 atau setara dengan 47,84%.

- Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan instalasi jaringan, pemeliharaan taman selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya Kantor Dekranasda;
- (7) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Indag sebesar Rp500.000.000.- dan realisasi sebesar Rp434.516.400,00 atau setara dengan 86,90%. *Output* Kegiatan adalah Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah BBM, STNK, pelumas, service kendaraan;
- (8) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Disperindag Prov. Jabar sebesar Rp1.645.707.811,00 dan realisasi sebesar Rp1.390.925.230,00 atau setara dengan 84,52%. *Output* Kegiatan adalah Terpeliharanya Peralatan kantor selama 11 bulan. *Outcome* Kegiatan adalah terlaksananya Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Peralatan kantor, Pemeliharaan Instalasi Jaringan, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan taman;
- (9) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya kantor Disperindag Prov. Jabar sebesar Rp1.450.071.045,00 dan realisasi sebesar Rp1.167.140.895,00 atau setara dengan 80,49%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasaran Kantor Dinas Indag selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah bahan pembersih, jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa profesi, pakaian kerja, peralatan keamanan;
- (10) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Disperindag sebesar Rp676.380.500,00 dan realisasi sebesar Rp641.774.000,00 atau setara dengan 94,88%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya fasilitas keperluan peralatan kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah ATK, benda pos, cetakan, penggandaan, penjilidan;
- (11) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Disperindag sebesar Rp241.700.000.- dan realisasi sebesar Rp180.249.500,00 atau setara dengan 74,58%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya dokumentasi dan publikasi, sewa kursi, sewa tenda selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya dokumentasi dan publikasi, sewa kursi, sewa tenda;

- (12) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Disperindag sebesar Rp2.142.902.804,00 dan realisasi sebesar Rp1.676.660.975,00 atau setara dengan 78,24%. *Output* kegiatan adalah terepenuhinya jamuan makan dan minum rapat dan perjalanan dinas selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah jamuan makan, air mineral/galon, perjalanan dinas;
- (13) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Disperindag sebesar Rp214.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp184.353.235,00 atau setara dengan 86,11%. *Output* kegiatan adalah tepenuhinya kebutuhan internet, surat kabar dan iuran wajib selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah internet, langganan surat kabar, iuran wajib tahunan;
- (14) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang sebesar Rp99.996.161,00 dan realisasi sebesar Rp99.936.000,00 atau setara dengan 99,94%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja minimal selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan barang habis pakai kantor;
- (15) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang sebesar Rp399.810.400,00 dan realisasi sebesar Rp378.316.400,00 atau setara dengan 94,62%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar kantor;
- (16) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Non PNS UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Elektronika Karawang sebesar Rp545.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp449.100.621,00 atau setara dengan 82,40%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan langganan Kantor dan Tenaga Non PNS;
- (17) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Elektronika Karawang sebesar Rp9.996.500,00 dan realisasi sebesar Rp9.996.000,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana

- kerja selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor;
- (18) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Barang Logam dan elektronika Karawang sebesar Rp49.967.500,00 dan realisasi sebesar Rp49.957.500,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah tersedianya saran dan prasarana kerja selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan alat pendukung fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang;
- (19) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang sebesar Rp610.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp512.700.980,00 atau setara dengan 84,05%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa keamanan, kebersihan dan kendaraan dinas selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang;
- (20) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon sebesar Rp95.999.104,00 dan realisasi sebesar Rp81.363.401,00 atau setara dengan 84,75%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan alat pendukung fasilitas kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan keamanan dan kebersihan kantor;
- (21) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon sebesar Rp288.082.042,00 dan realisasi sebesar Rp245.135.311,00 atau setara dengan 85,09%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan honorarium petugas keamanan dan kebersihan dan perlengkapannya serta pengemudi kendaraan operasional kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan keamanan dan kebersihan Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon;

-
- (22) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon sebesar Rp126.468.794,00 dan realisasi sebesar Rp105.346.807,00 atau setara dengan 83,30%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas;
- (23) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon sebesar Rp106.637.752,00 dan realisasi sebesar Rp91.564.069,00 atau setara dengan 85,86%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan perabotan, fasilitas dan gedung kantor;
- (24) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon sebesar Rp29.999.312,00 dan realisasi sebesar Rp29.913.354,00 atau setara dengan 99,71%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya barang habis pakai kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan barang habis pakai kantor;
- (25) Kegiatan penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Non PNS UPTD BPSMB Air Minum Dalam kemasan Cirebon sebesar Rp110.914.946,00 dan realisasi sebesar Rp93.424.469,00 atau setara dengan 84,23%. *Output* kegiatan adalah jasa langganan kantor dan honorarium Tenaga Non PNS selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya jasa langganan kantor dan Tenaga Non PNS;
- (26) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon sebesar Rp449.970.500,00 dan realisasi sebesar Rp434.362.401,00 atau setara dengan 96,53%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya makanan minuman rapat, tamu dan perjalanan dinas operasional kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan untuk rapat internal, luar kantor;
- (27) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan sebesar Rp414.849.850,00 dan realisasi sebesar Rp414.009.657,00 atau setara dengan 99,80%. *output* kegiatan adalah terpenuhinya barang habis

- pakai selama 11 bulan. *outcome* kegiatan adalah tersedianya barang habis pakai untuk UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan beserta Sub Unit;
- (28) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan sebesar Rp745.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp620.471.837,00 atau setara dengan 83,28%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, internet, telepon selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor uptd industri pangan, olahan dan kemasan beserta sub unit;
- (29) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan sebesar Rp75.000.000.- dan realisasi sebesar Rp74.950.000,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah sewa, dokumentasi dan publikasi, belanja cetak, belanja sewa sarana mobilitas darat selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor uptd industri pangan, olahan dan kemasan beserta sub unit;
- (30) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan sebesar Rp500.000.000.- dan realisasi sebesar Rp463.671.207,00 atau setara dengan 92,73%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya rapat internal, tamu dan perjalanan dinas pns provinsi dalam provinsi dan luar provinsi selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan beserta Sub Unit;
- (31) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp697.086.168,00 atau setara dengan 92,94%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan computer dan printer, pemeliharaan mesin dan alat ukur, pemeliharaan instalasi jaringan, pemeliharaan halaman /taman/pekarangan, pemeliharaan bangunan bukan gedung selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang dan jasa, upah tukang bangunan, pembelian bahan bangunan, Pemeliharaan computer dan printer, pemeliharaan mesin dan alat ukur, pemeliharaan instalasi jaringan, pemeliharaan

- halaman/taman/pekarangan, pemeliharaan bangunan bukan gedung, pengadaan peralatan bengkel mesin dan pengadaan tabung pemadam kebakaran, belanja BBM dan Gas, pelumas, belanja STNK, KIR, servis kendaraan, belanja suku cadang;
- (32) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan, Kebersihan, Operator, Perancang Kemasan, Pengemudi dan Front Office beserta Pendukungnya sebesar Rp2.549.998.358,00 dan realisasi sebesar Rp2.077.993.021,00 atau setara dengan 81,49%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja jasa kebersihan, belanja jasa keamanan dan pengemudi, belanja jasa tenaga kerja non pegawai, belanja pakaian kerja lapangan selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor;
- (33) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor dan perencanaan Renovasi Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Cibaduyut sebesar Rp1.441.259.097,00 dan realisasi sebesar Rp1.093.119.070,00 atau setara dengan 75,84%. *Output* kegiatan adalah belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan dan jembatan, belanja pemeliharaan bangunan bukan gedung selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor;
- (34) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi dan Elektronika Karawang sebesar Rp84.957.600,00 dan realisasi sebesar Rp82.962.900,00 atau setara dengan 97,65%. *Output* kegiatan adalah terealisasinya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas UPTD Balai selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang;
- (35) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang sebesar Rp409.988.100,00.- dan realisasi sebesar Rp408.208.000,00 atau setara dengan 99,57%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Logam Dan Elektronika Karawang selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD Balai

- Pengujian Dan Sertifikasi Logam Dan Elektronika Karawang;
- (36) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung sebesar Rp111.599.220,00 dan realisasi sebesar Rp105.522.850,00 atau setara dengan 94,56%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya barang habis pakai kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya barang habis pakai kantor;
- (37) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung sebesar Rp60.140.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.973.643,00 atau setara dengan 76,44%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan langganan kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi;
- (38) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor sebesar Rp399.991.400,00 dan realisasi sebesar Rp313.108.965,00 atau setara dengan 78,28%. *Output* kegiatan rapat internal dan luar kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan makan dan minum untuk rapat internal, belanja perjalanan dinas lokal dalam kabupaten/kota, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi;
- (39) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor UPTD Industri Logam sebesar Rp99.890.093,00 dan realisasi sebesar Rp74.197.060,00 atau setara dengan 74,28%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya operasional Aparat UPTD Industri Logam;
- (40) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung sebesar Rp132.996.000,00 dan realisasi sebesar Rp119.707.930,00 atau setara dengan 90,01%. *Output* kegiatan adalah kebutuhan dasar operasional Unit Kerja UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai kebutuhan dasar operasional UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung;

-
- (41) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor sebesar Rp69.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp69.627.880,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kerja;
- (42) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor sebesar Rp443.092.573,00 dan realisasi sebesar Rp372.931.631,00 atau setara dengan 84,17%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kerja;
- (43) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor sebesar Rp449.599.249,00 dan realisasi sebesar Rp445.113.500,00 atau setara dengan 99,00%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan perabotan fasilitas dan gedung kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kerja. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Non PNS UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor sebesar Rp241.275.900,00 dan realisasi sebesar Rp195.343.083,00 atau setara dengan 80,96%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kebutuhan penyediaan langganan kantor dan tenaga Non PNS selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersediaan sarana dan prasarana;
- (44) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung sebesar Rp899.727.950,00 dan realisasi sebesar Rp729.382.593,00 atau setara dengan 81,07%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya;
-

- (45) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai UPT Industri Logam sebesar Rp24.685.000,00 dan realisasi sebesar Rp22.019.469,00 atau setara dengan 89,20%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya langganan kantor selama 11 bulan. *outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas informasi dan komunikasi kantor;
- (46) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor sebesar Rp134.251.736,00 dan realisasi sebesar Rp124.877.612,00 atau setara dengan 93,02%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya barang habis pakai selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kerja;
- (47) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Industri Logam sebesar Rp144.987.800,00 dan realisasi sebesar Rp102.079.850,00 atau setara dengan 70,41%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya alat pendukung fasilitas kantor selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya operasional kantor;
- (48) Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Industri Logam sebesar Rp72.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.200.000,00 atau setara dengan 32,22%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya data dan informasi UPTD Industri Logam selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terinformasikannya data dan informasi UPTD Industri Logam;
- (49) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Industri Logam sebesar Rp138.465.008,00 dan realisasi sebesar Rp136.617.005,00 atau setara dengan 98,67%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya barang habis pakai dan pendukung administrasi perkantoran selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan barang habis pakai kantor UPTD Industri Logam;
- (50) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Industri logam sebesar Rp192.995.954,00 dan realisasi sebesar Rp175.376.000,00 atau setara dengan 90,87%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rapat internal, luar kantor dan perjalanan dinas selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan makan dan minum untuk rapat internal, luar kantor dan perjalanan dinas;

- (51) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Industri Logam sebesar Rp158.947.786,00 dan realisasi sebesar Rp46.241.500,00 atau setara dengan 29,09%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan perabotan, fasilitas dan gedung Kantor UPTD Industri Logam selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan perabotan, fasilitas dan gedung Kantor UPTD Industri Logam;
- (52) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung sebesar Rp145.999.500,00 dan realisasi sebesar Rp54.583.545,00 atau setara dengan 37,39%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung selama 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kegiatan pemeliharaan dan kebutuhan kendaraan dinas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung;
- (53) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung sebesar Rp135.454.000,00 dan realisasi sebesar Rp101.340.005,00 atau setara dengan 74,82%. *output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung selama 11 bulan. *outcome* kegiatan adalah kebutuhan perabotan, fasilitas dan gedung kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Perdagangan

a. Permasalahan

- (1) Perlambatan ekonomi global;
- (2) Dominasi barang impor;
- (3) Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
- (4) Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang;
- (5) Persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern;
- (6) Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai;
Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan

b. Solusi

- (1) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui sosialisasi, pameran, dan bazar P3DN;
- (2) Pengawasan Barang Beredar di Kota dan kabupaten;
- (3) Meningkatkan daya saing produk IKM berorientasi ekspor dan Melaksanakan pembinaan terhadap produk potensi ekspor IKM dan promosi ekspor;
- (4) Peningkatan pembangunan sarana perdagangan melalui revitalisasi pasar tradisional;
- (5) Pembinaan Standarisasi Produk dan Pengujian Mutu Barang;
- (6) Pembangunan Jaringan Informasi dan identifikasi Produk Ekspor Daerah.

31. Urusan Perindustrian

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan perindustrian tahun 2019 adalah Laju Pertumbuhan Sektor Industri dengan realisasi sebesar 4,04% dari target sebesar 2,63%; PDRB industri non migas dengan realisasi sebesar 884,12 Trilyun dari target sebesar 821,95 Trilyun; Jumlah unit usaha industri dengan realisasi sebesar 214.287 unit dari target sebesar 211.000 unit; PMA sektor industri dengan realisasi sebesar 50,69 Triliyun dari target sebesar 16,7 Triliyun dan PMDN sektor industri dengan realisasi sebesar 54,59 Triliyun dari target sebesar 4,8 Triliyun. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pembangunan Industri

Capaian Indikator Kinerja Program pada tahun 2019 yaitu persentase pertumbuhan PMA/PMDN sebesar 50,69/54,59 triliyun dari target 16,7/4,8 triliyun. Alokasi anggaran program adalah Rp14.174.708.597,00 realisasi anggaran Rp13.649.845.234,00 atau setara dengan 96,30%.

- (1) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Pelaku Usaha Industri Pertekstilan; Perkayuan dan Rotan sebesar Rp149.999.064,00 realisasi anggaran sebesar Rp148.196.600,00 atau setara dengan 98,80%. *Output* Kegiatan adalah Terlatihnya kompetensi pelaku usaha industri pertekstilan, perkayuan dan rotan sebanyak 175 pelaku usaha Industri Rotan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi pelaku usaha industri pangan olahan dan kemasan;
- (2) Kegiatan Bimbingan Usaha bagi Pelaku Usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan sebesar Rp149.999.776,00 realisasi anggaran sebesar Rp147.956.426,00 atau setara dengan 98,64%. *Output* Kegiatan adalah persiapan pelatihan pelaku usaha industri pangan olahan dan kemasan sebanyak 50 pelaku usaha. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya wawasan dibidang usaha industri bagi pelaku usaha industri pangan olahan dan kemasan;
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Penerapan ISO 9001;2015 di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut dan pada Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung Pada UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan sebesar

- Rp199.997.200,00 realisasi anggaran sebesar Rp192.196.439,00 atau setara dengan 96,10%. *Output* Kegiatan adalah Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2015 pada Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung dan tersertifikasinya Sistem Mutu ISO9001:2015 sebanyak 1 Kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya mutu pelayanan pada satuan pelayanan pengembangan industri pertekstilan dan satuan pengembangan industri perkulitan Garut pada UPTD industri pangan olahan dan kemasan;
- (4) Kegiatan Peningkatan Daya Saing Kemasan UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan sebesar Rp699.998.286,00 realisasi anggaran sebesar Rp696.406.691,00 atau setara dengan 99,49%. *Output* Kegiatan adalah terfasilitasinya kemasan bagi 400 pelaku usaha industri se-Jawa Barat dan terlayannya pelaku usaha industri dibidang kemasan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya daya saing pelaku usaha industri setelah difasilitasi desain dan cetak kemasannya;
- (5) Kegiatan Pameran Produk Wirausaha/IKM Berbasis Inovasi dan Teknologi (JABAR OTOFEST 2019) sebesar Rp599.975.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp594.067.500,00 atau setara dengan 99,02%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pameran produk wirausaha /terfasilitasinya IKM berbasis inovasi dan teknologi pada (JABAR OTOFEST 2019) kepada 20 Pelaku Usaha Industri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya daya saing pelaku usaha industri setelah difasilitasi desain dan cetak kemasannya;
- (6) Kegiatan Bimtek Industri Berbasis Inovasi dan Teknologi sebesar Rp1.049.999.908,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.048.328.633,00 atau setara dengan 99,84%. *Output* Kegiatan adalah Terlatihnya SDM industri logam, mesin, alsintan, alat transportasi dan elektronika/telematika sebanyak 300 Orang . *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan keterampilan dan unit usaha industri logam, mesin, alsintan, alat transportasi dan elektronika/telematika;
- (7) Kegiatan Kegiatan Forum Komunikasi Pengembangan Kawasan Industri di Jawa Barat sebesar Rp1.649.859.260,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.588.254.200,00 atau setara dengan 96,27%. *Output* Kegiatan adalah meningkatnya sinergitas diantara pemangku kepentingan dalam

pengembangan kawasan industri di Jawa Barat serta meningkatnya kawasan industri percontohan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dari mulai bahan baku, perizinan, dan lain-lain yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dari 3 kawasan industri. *Outcome* kegiatan adalah adanya pengembangan kawasan industri di Jawa Barat serta adanya kawasan industri percontohan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dari mulai bahan baku, perizinan, dan lain-lain yang dimiliki oleh pemerintah provinsi;

- (8) Kegiatan Bimtek Sertifikasi Produk dan Profesi sebesar Rp149.999.839,00 realisasi anggaran sebesar Rp147.020.195,00 atau setara dengan 98,01%. *Output* kegiatan adalah terlatihnya sdm industri mengenai sertifikasi produk dan profesi bidang logam dan mesin sebanyak 75 Industri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman mengenai perlunya sertifikasi produk dan profesi dalam persiapan sertifikasi produk dan profesi;
- (9) Kegiatan Diseminasi Penerapan Produksi Bersih Di Industri sebesar Rp299.999.273,00 realisasi anggaran sebesar Rp253.160.373,00 atau setara dengan 84,39%. *Output* kegiatan adalah tersosialisasikannya penerapan produk bersih di industri pada 150 orang dari industri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya wawasan dari para pelaku industri dalam penerapan produksi bersih di industri;
- (10) Kegiatan Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal sebesar Rp799.999.622,00 realisasi anggaran sebesar Rp785.300.150,00 atau setara dengan 98,16%. *Output* kegiatan adalah terlatihnya IKM makanan berbahan baku lokal Jawa Barat sebanyak 250 IKM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengembangkan bahan baku lokal;
- (11) Kegiatan Pembinaan Industri Kerajinan Jawa Barat (DEKARASNDA) sebesar Rp4.700.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp4.436.182.699,00 atau setara dengan 94,39%. *Output* Kegiatan adalah Meningkatnya kemampuan SDM industri kerajinan dan promosi produk kerajinan selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas produk kerajinan di seluruh Jawa Barat;
- (12) Kegiatan Festival Produk Unggulan Industri Akta sebesar Rp1.199.999.900,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.167.629.272,00 atau setara dengan

- 97,30%. *Output* Kegiatan adalah Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Jawa Barat sebanyak 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya IKM industri unggulan Jawa Barat sebanyak 200 IKM;
- (13) Kegiatan Forum Pengembangan Industri AKTA sebesar Rp299.998.968,00 realisasi anggaran sebesar Rp267.754.100,00 atau setara dengan 89,25%. *Output* kegiatan adalah tersosialisasikannya kebijakan regulasi/ketentuan kepada pelaku industri sebanyak 4 angkatan @ 50 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya industri akta Jawa Barat;
- (14) Kegiatan Sertifikasi Produk Halal Produk IKM Tahun 2019 sebesar Rp999.997.092,00 realisasi anggaran sebesar Rp992.623.500,00 atau setara dengan 99,26%. *Output* kegiatan adalah tersertifikasinya 300 IKM yang berasal dari 26 Kab/Kota yang ada di Jawa Barat dalam kerangka peningkatan daya saing IKM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas produk IKM Jawa Barat;
- (15) Kegiatan Fasilitasi HAKI Dan SNI Industri Akta sebesar Rp299.999.948,00 realisasi anggaran sebesar Rp278.276.110,00 atau setara dengan 92,76%. *Output* kegiatan adalah tersertifikasinya IKM wilayah Jawa Barat dengan 120 IKM yang difasilitasi sertifikat HAKI dan 4 yang difasilitasi sertifikat SNI. *Outcome* kegiatan adalah tersertifikasinya IKM wilayah Jawa Barat dengan fasilitasi HAKI dan SNI;
- (16) Kegiatan Pemeliharaan Penerapan ISO 9001:2015 Di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam sebesar Rp74.999.786,00 realisasi anggaran sebesar Rp73.345.563,00 atau setara dengan 97,79%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan penerapan ISO 9001:2015 sebanyak 1 kegiatan *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jasa layanan SATPEL pengembangan industri logam Sukabumi;
- (17) Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Las SMAW Dasar Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Logam sebesar Rp174.999.883,00 realisasi anggaran sebesar Rp171.268.383,00 atau setara dengan 97,87%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan SDM pelaku usaha las SMAW dasar sebanyak 2 angkatan @ 20 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan SDM pelaku usaha las SMAW dasar;
- (18) Kegiatan Diseminasi Produk Bersih di Industri

Logam sebesar Rp149.886.625,00 realisasi anggaran sebesar Rp148.569.000,00 atau setara dengan 99,12%. *Output* kegiatan adalah terdiseminasikannya pemahaman dan penerapan produk bersih pada industri logam sebanyak 100 IKM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman dan penerapan produk bersih pada industri logam;

- (19) Kegiatan Pengembangan Kualitas Produk Unggulan AKTA sebesar Rp299.998.969,00 realisasi anggaran sebesar Rp292.998.900,00 atau setara dengan 97,67%. *Output* kegiatan adalah menggali dan mengumpulkan potensi produk unggulan industri AKTA kepada 140 IKM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas produk unggulan AKTA;
- (20) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Industri Logam melalui Desain Centre sebesar Rp74.999.808,00 realisasi anggaran sebesar Rp71.434.000,00 atau setara dengan 95,25%. *Output* kegiatan adalah terlatihnya pengembangan usaha industri logam melalui desain centre sebanyak 40 peserta dalam 2 kali kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan pelaku usaha tentang desain centre;
- (21) Kegiatan Bimbingan Usaha Industri Logam sebesar Rp149.999.890,00 realisasi anggaran sebesar Rp148.876.500,00 atau setara dengan 99,25%. *Output* Kegiatan adalah terlatihnya usaha industri logam sebanyak 80 peserta dalam 2 kali kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan usaha IKM industri logam.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Perindustrian

a. Permasalahan

Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat.

b. Solusi

Penguatan proses untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan (sustainable) dalam era revolusi industri 4.0.

32. Urusan Transmigrasi

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Transmigrasi Tahun 2018 adalah jumlah perjanjian kerjasama sebanyak 13 naskah perjanjian dari target sebanyak 15 naskah perjanjian.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Transmigrasi

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Transmigrasi yakni jumlah perjanjian kerjasama dengan capaian sebanyak 5 perjanjian dari target sebanyak 15 perjanjian.

Alokasi anggaran Program Pengembangan Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp1.169.906.080,00 dengan realisasi sebesar Rp1.047.857.828,00 setara dengan 89,57%.

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp561.306.523,00 dan realisasi sebesar Rp504.477.448,00 atau setara dengan 89,88%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian sebanyak 1 kali dan evaluasi keberhasilan transmigran 4 lokasi. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya persamaan persepsi dan sinergitas pengerahan dan penempatan transmigrasi;
- (2) Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja Mandiri Masyarakat Translok yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp338.023.877,00 dan realisasi sebesar Rp317.180.500,00 atau setara dengan 93,83%. *Output* kegiatan adalah pelatihan keterampilan kerja mandiri masyarakat translok sebanyak 100 orang. *Outcome* kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat translok;
- (3) Kegiatan Pengembangan Lahan Praktek (*Demplot*) Pelatihan Kerja Mandiri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp118.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp118.400.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pengelolaan lahan praktek (*Demplot*) latihan kerja mandiri selama 1 Tahun.

- Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas fungsi lahan praktek (*Demplot*) pelatihan kerja mandiri;
- (4) Kegiatan Pemandahan Transmigrasi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp152.175.680,00 dan realisasi sebesar Rp107.799.880,00 atau setara dengan 70,84%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya persiapan pemindahan transmigrasi 11 kab/kota. *Outcome* kegiatan adalah kabupaten/kota memahami mekanisme program transmigrasi sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip ketransmigrasian.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan transmigrasi

a. Permasalahan

1. Masih belum terintegrasinya pola perencanaan ketransmigrasian sehingga menyebabkan ketidakpastian Informasi lokasi pemukiman transmigrasi serta Penetapan program penempatan transmigrasi yang kurang jelas;
2. Kabupaten/kota datrans dan dasar masih kurang memahami proses kerjasama antar daerah bidang transmigrasi sehingga berakibat pada lambatnya penyelesaian naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD);
3. Pengelolaan lahan di lokasi transmigrasi yang masih tumpang tindih, sehingga warga terganggu dalam mengolah/memanfaatkan lahan, yang berakibat pada tingkat kesejahteraan yang tidak menentu;
4. Masih kurangnya kepedulian pemerintah daerah asal transmigran dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang di laporkan oleh warga transmigran;
Pelatihan bagi calon transmigran yang semula dilaksanakan di daerah saat ini dilaksanakan di pusat, menjadi kendala tersendiri bagi daerah karena: 1) Tidak tersedianya biaya untuk pendamping calon transmigran, 2) Tidak tersedianya uang saku bagi peserta pelatihan.

b. Solusi

1. Pemberian peluang kepada penduduk miskin dan penganggur di wilayah tujuan dan asal dalam memperoleh aset tempat tinggal, peluang usaha dan atau kesempatan bekerja secara proporsional dan berkelanjutan;

2. *Sharing* anggaran untuk pemindahan dan penempatan transmigran;
3. Pemanfaatan lahan/ruang di Jawa Barat untuk ketransmigrasian;
4. Peningkatan kualitas calon transmigran.

3.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

33. Fungsi Penunjang Perencanaan

Pencapaian Indikator Kinerja terhadap penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Fungsi Penunjang Perencanaan pada tahun 2019 adalah Tingkat Konsistensi Perencanaan Jawa Barat yang tercapai sebesar 93,69% dari target sebesar 80%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan adalah:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi sebesar 35% dari target 30%; tingkat kesesuaian perencanaan provinsi, pusat dan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 85% dari target 80%; tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi sebesar 100%; dan tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp58.366.512.224,00 dan realisasi Rp48.673.303.832,00 atau setara dengan 83,39%.

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp529.999.993,00 dan realisasi Rp517.476.267,00 atau setara dengan 97,64%. *Output* kegiatan adalah penetapan juara perencanaan pembangunan terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan dalam penilaian penghargaan perencanaan pembangunan tingkat nasional. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan tahunan;
- (2) Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.991.250,00 dan realisasi Rp284.038.959,00 atau setara dengan 94,68%. *Output* kegiatan adalah SK pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional; Workshop Jabatan Fungsional Perencana. *Outcome* kegiatan

- adalah meningkatnya presentase aparatur perencana Perangkat Daerah & Kabupaten/Kota yang memiliki Sertifikat Kompetensi;
- (3) Kegiatan Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.005.528.810,00 dan realisasi Rp2.927.247.719,00 atau setara dengan 97,40%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil pembahasan forum perencanaan daerah, rekomendasi tim percepatan pembangunan untuk rencana pembangunan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keselarasan sasaran pembangunan Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota.
 - (4) Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp599.849.726,00 dan realisasi Rp426.218.670,00 atau setara dengan 46,98%. *Output* kegiatan adalah dokumen outlook ekonomi Jawa Barat dan dokumen kajian ekonomi regional Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan tahunan;
 - (5) Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.179.987.960,00 dan realisasi Rp1.144.285.859,00 atau setara dengan 96,97%. *Output* kegiatan adalah dokumen LKPJ Gubernur tahun anggaran 2018. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah/Biro yang berkontribusi terhadap target kinerja pemerintah daerah;
 - (6) Kegiatan Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.324.999.796,00 dan realisasi Rp1.094.257.314,00 atau setara dengan 82,59%. *Output* kegiatan adalah naskah akademik rencana pangan dokumen rencana induk pembangunan pertanian/masterplan pertanian Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tingkat keselarasan dan konsistensi rencana pangan;
 - (7) Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.799.999.815,00 dan realisasi Rp2.610.514.869,00 atau setara dengan 93,23%. *Output* kegiatan adalah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi berita acara hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dokumen sinkronisasi rencana pembangunan KEK Pariwisata. *Outcome* kegiatan adalah tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan.
- (8) Kegiatan Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi pada Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp599.999.992,00 dan realisasi Rp562.094.107,00 atau setara dengan 93,68%. *Output* kegiatan adalah roadmap pengembangan ekonomi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- (9) Kegiatan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.110.834.100,00 dan realisasi Rp1.763.743.773,00 atau setara dengan 83,56%. *Output* kegiatan adalah 818set818 informasi program pembangunan infrastruktur wilayah, model dinamik pengembangan wilayah dan kota di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah mendukung keakuratan informasi serta keterukuran dampak pengembangan wilayah dalam rangka pengambilan keputusan;
- (10) Kegiatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi Rp608.413.569,00 atau setara dengan 76,05%. *Output* kegiatan adalah dokumen pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan irigasi melalui program IPDMIP;
- (11) Kegiatan Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp774.833.970,00 dan realisasi

- Rp690.503.289,00 atau setara dengan 89,12%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen Perda RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan tersosialisasikannya Perda RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian RTRW Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan nasional;
- (12) Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.273.163.763,00 dan realisasi Rp2.092.591.385,00 atau setara dengan 92,06%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan kebijakan pembangunan lingkup bidang fisik. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang fisik antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (13) Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.957.592,00 dan realisasi Rp259.095.259,00 atau setara dengan 86,38%. *Output* kegiatan adalah dokumen Finalisasi Kaji Ulang RAD GRK Provinsi Jawa Barat dan dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keselarasan sasaran pembangunan lintas Provinsi, Nasional, Dan Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan;
- (14) Kegiatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp899.999.258,00 dan realisasi Rp723.229.443,00 atau setara dengan 80,36%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya capaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs;
- (15) Kegiatan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp949.998.318,00 dan realisasi

- Rp799.009.561,00 atau setara dengan 84,11%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan kerjasama pembangunan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergi perencanaan kerjasama pembangunan Jawa Barat;
- (16) Kegiatan Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp599.991.945,00 dan realisasi Rp305.162.927,00 atau setara dengan 50,86%. *Output* kegiatan adalah aplikasi *Jabar Net Pro Poor*. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data kemiskinan yang terintegrasi;
- (17) Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.999.977.086,00 dan realisasi Rp2.545.954.731,00 atau setara dengan 84,87%. *Output* kegiatan adalah Kepgub TKPKP Provinsi Jawa Barat; Kepgub Tim Koordinasi Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat; Kepgub Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Provinsi Jawa Barat; dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
- (18) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp255.203.634,00 atau setara dengan 85,07%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan pembangunan desa di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
- (19) Kegiatan Komda Lansia yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp690.999.743,00 dan realisasi Rp611.562.418,00 atau setara dengan 88,50%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan hasil koordinasi Komda Lansia se-Jawa Barat Tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergi perencanaan pembangunan isu kelansiaan;

- (20) Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.249.996.375,00 dan realisasi Rp983.838.412,00 atau setara dengan 78,71%. *Output* kegiatan adalah dokumen koordinasi TKPKD Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan penanggulangan kemiskinan;
- (21) Kegiatan Pengelolaan Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.199.999.697,00 dan realisasi Rp610.268.006,00 atau setara dengan 50,86%. *Output* kegiatan adalah dokumen capaian kinerja dan Sismontep. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data sinergitas pengendalian pembangunan lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (22) Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.599.999.356,00 dan realisasi Rp503.803.000,00 atau setara dengan 31,49%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan pengendalian dan monitoring kegiatan APBD. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data pengendalian dan monitoring kegiatan APBD;
- (23) Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp8.504.337.845,00 dan realisasi Rp7.810.263.499,00 atau setara dengan 91,84%. *Output* kegiatan adalah 821sset821 perencanaan dan penganggaran daerah. *Outcome* kegiatan adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
- (24) Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp536.457.875,00 dan realisasi Rp278.641.615,00 atau setara dengan 51,94%. *Output* kegiatan adalah 821sset821 monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terukurnya kinerja program pembangunan daerah;

- (25) Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp249.999.950,00 dan realisasi Rp140.199.950,00 atau setara dengan 56,08%. *Output* kegiatan adalah 822sset822 *performance management system*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja sesuai tujuan organisasi.
- (26) Kegiatan Pengembangan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.747.999.954,00 dan realisasi Rp1.737.628.821,00 atau setara dengan 99,41%. *Output* kegiatan adalah Peraturan Gubernur Tentang RKPD Tahun 2020. *Outcome* kegiatan adalah pedoman penyusunan penganggaran daerah Tahun 2020;
- (27) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.649.999.972,00 dan realisasi Rp1.640.670.703,00 atau setara dengan 99,43%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan Musrenbang provinsi Tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah dokumen kesepakatan rencana kegiatan prioritas Tahun 2020;
- (28) Kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.389.546.460,00 dan realisasi Rp1.342.570.222,00 atau setara dengan 96,62%. *Output* kegiatan adalah dokumen Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah pedoman penyusunan perubahan penganggaran Tahun 2019;
- (29) Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.214.999.760,00 dan realisasi Rp1.126.584.202,00 atau setara dengan 92,72%. *Output* kegiatan adalah dokumentasi proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. *Outcome* kegiatan adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
- (30) Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah yang

- dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.328.485.962,00 dan realisasi Rp1.464.588.454,00 atau setara dengan 62,90%. *Output* kegiatan adalah dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025. *Outcome* kegiatan adalah pedoman perencanaan pembangunan daerah;
- (31) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.594.346.683,00 dan realisasi Rp1.918.641.869,00 atau setara dengan 73,95%. *Output* kegiatan adalah dokumen evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan dokumen evaluasi pelaporan APBN /DAK. *Outcome* kegiatan adalah terpantaunya pelaksanaan kinerja perangkat daerah;
- (32) Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.469.999.229,00 dan realisasi Rp1.447.684.051,00 atau setara dengan 98,48%. *Output* kegiatan adalah daftar usulan rencana kegiatan APBN Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah sinergi perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- (33) Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.325.599.959,00 dan realisasi Rp1.951.231.202,00 atau setara dengan 83,90%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan pertemuan teknis mitra CSR Jabar. *Outcome* kegiatan adalah sinergi pembangunan antara pemerintah daerah berdasarkan MoU CSR Jabar dan Swasta;
- (34) Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.264.630.199,00 dan realisasi Rp3.807.075.801,00 atau setara dengan 72,31%. *Output* kegiatan adalah dokumen analisis data perencanaan pembangunan daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan data perencanaan dan kinerja pembangunan daerah yang berkualitas;

- (35) Kegiatan Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp699.999.920,00 dan realisasi Rp675.040.659,00 atau setara dengan 96,43%. *Output* kegiatan adalah dokumen penyusunan perubahan KUA PPAS 2019. *Outcome* kegiatan adalah pedoman penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- (36) Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.999.911,00 dan realisasi Rp782.297.403,00 atau setara dengan 97,79%. *Output* kegiatan adalah dokumen KUA PPAS Tahun 2020. *Outcome* kegiatan adalah tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran;
- (37) Kegiatan Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp231.670.210,00 atau setara dengan 46,33%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpantaunya pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah;

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah (1) Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar 100%; (2) Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar 100%; (3) Tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar 100%; dan (4) Tingkat Ketersediaan data dan informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

adalah sebesar Rp1.253.729.897,00 dan realisasi Rp1.190.806.537,00 atau setara dengan 94,98%.

- (1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp773.731.818,00 dan realisasi Rp760.041.145,00 atau setara dengan 98,23%. *Output* kegiatan adalah dokumen DPA, LKIP, RKT, RA. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Kegiatan Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp179.999.161,00 dan realisasi Rp167.163.906,00 atau setara dengan 92,87%. *Output* kegiatan adalah dokumen pengendalian mutu pekerjaan penyusunan RKPD. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan tahunan;
- (3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.998.918,00 dan realisasi Rp263.601.486,00 atau setara dengan 87,87%. *Output* kegiatan adalah dokumen Renja Tahun 2019 dan dokumen perubahan Renja Tahun 2018. *Outcome* kegiatan adalah tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka 825sset825e, jangka menengah dan tahunan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp5.281.464.658,00 dan realisasi Rp4.474.708.440,00 atau setara dengan 84,72%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Badan Perencanaan

- Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp329.220.000,00 dan realisasi Rp323.794.395,00 atau setara dengan 98,35%. *Output* kegiatan adalah alat pendukung fasilitas kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai Bappeda;
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.947.699.658,00 dan realisasi Rp3.305.968.525,00 atau setara dengan 83,74%. *Output* kegiatan adalah Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor guna mendukung kinerja aparatur;
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Dan Website yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp205.020.000,00 dan realisasi Rp109.712.520,00 atau setara dengan 53,51%. *Output* kegiatan adalah jaringan dan website. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas jaringan internet dan website Bappeda untuk optimalisasi kinerja;
- (4) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp799.525.000,00 dan realisasi Rp735.233.000,00 atau setara dengan 91,96%. *Output* kegiatan adalah sarana dan prasarana olahraga; Penyediaan kerohanian, pakaian aparatur; Jiwa korsa aparatur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah (1) Persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan realisasi sebesar 70% dari target 70%; (2) Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar 100%; (3) Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp13.403.316.230,00 dan realisasi Rp12.323.848.681,00 atau setara dengan 91,95%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.034.931.367,00 dan realisasi Rp2.679.273.920,00 atau setara dengan 88,28%. *Output* kegiatan adalah pengisian tabung gas; langganan telepon; langganan air; langganan listrik; langganan surat kabar majalah; langganan internet; jasa pengiriman; langganan tv kabel; tenaga kerja non pegawai. *Outcome* kegiatan adalah optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappeda;
- (2) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.709.845.500,00 dan realisasi Rp2.505.975.761,00 atau setara dengan 92,48%. *Output* kegiatan adalah makanan dan minuman rapat; Jamuan makanan dan minuman tamu; Air mineral. *Outcome* kegiatan adalah optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappeda;
- (3) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp194.850.000,00 dan realisasi Rp111.116.700,00 atau setara dengan 57,03%. *Output* kegiatan adalah dokumentasi; publikasi serta sewa meja/kursi dan sewatenda. *Outcome* kegiatan adalah optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappeda;
- (4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp999.872.524,00 dan realisasi Rp988.789.700,00 atau setara dengan 98,89%. *Output* kegiatan adalah barang habis pakai kantor.

- Outcome* kegiatan adalah optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappeda;
- (5) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp339.900.000,00 dan realisasi Rp210.365.305,00 atau setara dengan 61,89%. *Output* kegiatan adalah jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi di Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai Bappeda;
 - (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.064.549.379,00 dan realisasi Rp2.039.863.848,00 atau setara dengan 98,80%. *Output* kegiatan adalah alat kebersihan; jasa kebersihan; jasa keamanan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor Bappeda;
 - (7) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.230.628.000,00 dan realisasi Rp1.158.222.881,00 atau setara dengan 94,12%. *Output* kegiatan adalah bahan bakar kendaraan operasional dan genset; Pajak kendaraan operasional; Jasa KIR; Service kendaraan operasional; Suku cadang kendaraan operasional; Pelumas kendaraan operasional. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi kendaraan operasional bagi pegawai;
 - (8) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.839.000.000,00 dan realisasi Rp1.680.834.320,00 atau setara dengan 91,40%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, dan fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan kinerja pegawai;
 - (9) Kegiatan Publikasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak & Elektronik yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp989.739.460,00 dan realisasi Rp949.406.246,00 atau setara dengan 95,92%. *Output* kegiatan adalah penyebaran informasi perencanaan pembangunan melalui media cetak

dan elektronik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pelayanan informasi publik.

2) Permasalahan dan Solusi Fungsi Penunjang Perencanaan

a. Permasalahan

Belum optimalnya pelibatan stakeholder non pemerintah dalam mendukung pembangunan.

b. Solusi

1. Peningkatan proses perencanaan pembangunan tingkat provinsi;
2. Pelibatan stakeholder non pemerintah dalam inovasi dan pendanaan pembangunan.

34. Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Fungsi Penunjang Bidang Keuangan tahun 2019 adalah Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 21,24 triliun rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 20,93 triliun rupiah dan Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan opini WTP yang kedelapan kalinya.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah tinggi sebesar 58% dari target sebesar 80%. Alokasi anggaran program pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp32.286.267.126,00 dengan realisasi sebesar Rp18.691.330.584,00 atau setara dengan 57,89%.

- (1) Kegiatan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp517,893,100,00 dan realisasi sebesar Rp509,783,589,00 atau setara dengan 98,43%. *Output* kegiatan adalah terciptanya dokumentasi pegawai yang akurat, terciptanya jaminan hak gaji dan tunjangan pegawai dan keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terciptanya aplikasi gaji dan tunjangan *Non Core*, terciptanya laporan realisasi bidang perbendaharaan tentang pelaksanaan APBD secara berkala. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan penatausahaan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,403,844,700,00 dan realisasi sebesar Rp1,383,870,307,00 atau setara dengan 99%. *Output* kegiatan adalah terciptanya sosialisasi peraturan-peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terciptanya pengendalian Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), terciptanya pencatatan dan dokumentasi

- penertiban SP2D secara tertib, terciptanya pemenuhan kebutuhan laporan realisasi belanja secara berkala bulanan dan tahunan (1 Tahun). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman penatausahaan keuangan daerah;
- (3) Kegiatan Penyelesaian Penyaluran dana SP2D dan Retur yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp304,854,000,00 dan realisasi sebesar Rp301,780,000,00 atau setara dengan 99%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya pelaporan penyelesaian penyaluran SP2D dan retur dengan Kabupaten/Kota dan Bank BJB seluruh Jawa Barat (1 Tahun). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD;
- (4) Pengelolaan, *Monitoring* dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,500,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp1,310,829,310,00 atau setara dengan 37,45%. *Output* kegiatan adalah Buku informasi APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (3 Buku) serta V tercapainya pemanfaatan 831 aset yang idle (1 Tahun). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan dan pendayagunaan daerah;
- (5) Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp449,916,250,00 dan realisasi sebesar Rp413,256,607,00 atau setara dengan 92%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman pengelola keuangan dan pengelola barang Perangkat Daerah atas regulasi penyusunan laporan keuangan daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas pengelola keuangan dan pengelola barang OPD atas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- (6) Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp578.987.150,00 dan realisasi sebesar

- Rp553,361,309,00 atau setara dengan 96%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data penerimaan dan pendapatan 832sset832 pajak daerah sebagai dana bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya data penerimaan dan pendapatan pajak daerah sebagai dasar bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota;
- (7) Kegiatan Penyusunan Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,070,514,600,00 dan realisasi sebesar Rp972,891,500,00 atau setara dengan 91%. *Output* kegiatan adalah tersedianya informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya informasi yang *Up To Date* yang dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah;
- (8) Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Penjabaran PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp282,920,000,00 dan realisasi sebesar Rp268,893,701,00 atau setara dengan 95%. *Output* kegiatan adalah telaahan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran pertanggungJawaban pelaksanaan APBD dengan realisasi 27 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan Bupati/Wali Kota

- tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- (9) Kegiatan Sinergitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp476,522,000,00 dan realisasi sebesar Rp244,399,070,00 atau setara dengan 51,29%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya wawasan dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan realisasi 27 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- (10) Kegiatan Pengamanan Fisik Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,999,870,593,00 dan realisasi sebesar Rp3,451,038,116,00 atau setara dengan 58%. *Output* kegiatan adalah (1) Pemagaran Bidang Tanah 11 Bidang; (2) Pemasangan Patok/Papan Nama: 600 buah. *Outcome* kegiatan adalah teramankannya secara fisik 833sset tanah dan bangunan milik Pemprovinsi Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,359,937,182,00 dan realisasi sebesar Rp2,567,053,031,00 atau setara dengan 59%. *Output* kegiatan adalah *updating* 833sset833 ATISISBDA 1 Aplikasi; kajian 833sset833er833 833sset833 ATISISBADA 1 Kajian. *Outcome* kegiatan adalah terintegrasinya 833sset833 pengelolaan keuangan dan 833sset daerah;
- (12) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp309,875,051,00 atau setara dengan 51,65%. *Output* kegiatan adalah (1) Daftar Penilaian Kendaraan 1 Daftar; (2) Daftar Penilaian APK: 2 Daftar; (3) Daftar Penilaian Bongkaran Gedung 1 Daftar. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya proses penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- (13) Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah akolasi anggaran sebesar Rp2,193,107,101,00 dan realisasi sebesar Rp1,392,299,585,00 atau setara dengan 63,49%. *Output* kegiatan adalah (1) Daftar inventarisasi Barang Milik Daerah di Pengelola Barang Milik Daerah 1 Daftar; (2) Daftar inventarisasi Barang Milik Daerah yang diserahkan antar OPD berdasarkan Perda 6 Tahun 2016 10 daftar; (3) Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang dialihkan urusan kewenangannya (P2D): 7 urusan. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya data barang inventaris barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (14) Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah akolasi anggaran sebesar Rp500,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp438,852,743,00 atau setara dengan 88%. *Output* kegiatan adalah (1) Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah: 4 Dokumen; (2) Terlaksananya Bimtek Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat 160 orang. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan dan pelaporan yang akuntabel;
- (15) Kegiatan Penyusunan *standar* Harga Barang yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp808,549,637,00 atau setara dengan 81%. *Output* kegiatan adalah tersedianya buku *standar* Harga Barang: 500 Buku. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya dokumen sebagai acuan penyusunan anggaran;
- (16) Kegiatan Pengamanan Administrasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,475,486,000,00 dan realisasi sebesar Rp1,652,971,156,00 atau setara dengan 26%. *Output* kegiatan adalah Sertifikasi Bidang Tanah:

- 48 bidang tanah. *Outcome* kegiatan adalah teramankannya secara administrasi 835 aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (17) Kegiatan Verifikasi Usulan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp675,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp447,122,001,00 atau setara dengan 66,24%. *Output* kegiatan adalah Keputusan Gubernur tentang penghapusan/pemindahtanganan: 5 Keputusan Gubernur. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya proses penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- (18) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat TA. 2019 dan TA. 2020 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,327,664,450,00 dan realisasi sebesar Rp1,286,682,109,00 atau setara dengan 97%. *Output* kegiatan adalah (1) Raperda Nota Keuangan; (2) Nota Keuangan APBD; (3) Pengantar Nota Keuangan APBD; (4) Raperda Persetujuan APBD; (5) Rapergub Persetujuan APBD; DPA/DPPA – SKPD. *Outcome* kegiatan adalah penggunaan anggaran yang akuntabel;
- (19) Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp319,750,000,00 dan realisasi sebesar Rp200,990,453,00 atau setara dengan 63%. *Output* kegiatan Dokumen Telaahan Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD. *Outcome* kegiatan terwujudnya kesesuaian Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD dan Kepentingan Umum

- Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah Lainnya;
- (20) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp176,831,309,00 atau setara dengan 71%. *Output* kegiatan Kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (2 Draf). *Outcome* tersusunnya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar 86% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp1.850.669.908,00 dengan realisasi sebesar Rp1.540.939.462,00 setara dengan 83,26%.

- (1) Kegiatan Pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.497.300,00 dan realisasi sebesar Rp55.497.300,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Laporan Kinerja OPDSP2D secara tertib, terciptanya pemenuhan kebutuhan laporan realisasi belanja secara berkala bulanan dan tahunan (1 Tahun). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp152.573.250,00 dan realisasi sebesar Rp144.985.058,00 atau setara dengan 95,03%. *Output* kegiatan adalah tersedianya buku

- laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp392.604.500,00 dan realisasi sebesar Rp388.875.000,00 atau setara dengan 99,05%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan Barang yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp310.708.554,00 atau setara dengan 62,14%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kompensasi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Sosialisasi standar Harga Barang Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp175.797.500,00 atau setara dengan 70,32%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penerapan UU No 23 Tahun 2014. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kompensasi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.994.858,00 dan realisasi sebesar Rp465.076.050,00 atau setara dengan 93,02%. *Output* kegiatan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelola Inventaris Barang Milik Daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman SDM pengelola barang milik daerah.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar 58% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp38.626.864.173,00 dengan realisasi sebesar Rp22.576.066.750,00 setara dengan 58,45%.

- (1) Kegiatan Pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.582.509.600,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau setara dengan 0%. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya Pelayanan Keuangan dan Aset ke Publik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan pengadaan 838sset838er, printer, jaringan dan *acesoris* lainnya BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.003.067.348,00 dan realisasi sebesar Rp2.015.048.560,00 atau setara dengan 67%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kenyamanan tempat kerja yang mendukung kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.249.768.722,00 dan realisasi sebesar Rp158.280.150,00 atau setara dengan 13%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya peralatan kantor BPKAD. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Pengadaan Mebel BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan

- Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.049.818.503,00 dan realisasi sebesar Rp40.871.500,00 atau setara dengan 2%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pengadaan peralatan kantor BPKAD. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.691.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.848.814.500,00 atau setara dengan 6%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kendaraan dinas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp550.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp383.080.500,00 atau setara dengan 70%. *Output* kegiatan terpenuhinya perlengkapan kantor untuk pengamanan dan pemanfaatan barang daerah. *Outcome* kegiatan terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Balai Pelayanan Pemanfaatan Aset.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar 72% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah sebesar Rp37.776.425.661,00 dengan realisasi sebesar Rp27.193.426.956,00 setara dengan 71,99%.

- (1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Wawasan SDM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan

- Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp403.138.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.540.939,00 atau setara dengan 14,77%. *Output* kegiatan adalah Kegiatan Bersifat Penyediaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompensasi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.525.160.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.144.959.580,00 atau setara dengan 75,07%. *Output* kegiatan terpenuhinya pakaian dinas, dan pakaian olahraga, tersedianya kerohanian, sarana prasarana olahraga bagi pegawai lingkup BPKAD. *Outcome* kegiatan terpenuhinya pakaian dinas, dan pakaian olahraga bagi pegawai lingkup BPKAD; tersedianya kerohanian, sarana prasarana olahraga;
 - (3) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp303.130.000,00 dan realisasi sebesar Rp135.347.900,00 atau setara dengan 44,65%. *Output* kegiatan meningkatnya pengetahuan, sikap dan kinerja aparatur. *Outcome* kegiatan terpenuhinya diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur BPKAD;
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.116.362.900,00 dan realisasi sebesar Rp743.136.089,00 atau setara dengan 66,57%. *Output* kegiatan meningkatnya pelayanan BPKAD. *Outcome* kegiatan tersedianya alat pendukung fasilitas kantor;
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.858.061.898,00 dan realisasi sebesar Rp2.573.712.434,00 atau setara dengan 66,71%. *Output* kegiatan tersedianya jasa keamanan dan kebersihan serta peralatannya. *Outcome* kegiatan meningkatnya pelayanan BPKAD;

- (6) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.183.106.167,00 atau setara dengan 98,59%. *Output* kegiatan meningkatnya pelayanan BPKAD. *Outcome* kegiatan tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional BPKAD;
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.668.798.657,00 dan realisasi sebesar Rp3.082.127.661,00 atau setara dengan 46,22%. *Output* kegiatan meningkatnya pelayanan BPKAD. *Outcome* kegiatan terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor BPKAD;
- (8) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.924.430.095,00 dan realisasi sebesar Rp2.871.738.129,00 atau setara dengan 98,20%. *Output* kegiatan terselenggaranya dan terpenuhinya kebutuhan sarana pendukung yang berkaitan dengan ATK, cetak dan penjilidan dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun anggaran. *Outcome* kegiatan terselenggaranya dan terpenuhinya kebutuhan sarana pendukung yang berkaitan dengan ATK, cetak dan penjilidan dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun anggaran;
- (9) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp150.246.950,00 atau setara dengan 37,56%. *Outcome* kegiatan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran BPKAD. *Output* kegiatan tersedianya jasa sewa publikasi dan dokumentasi kantor BPKAD;
- (10) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.956.378.416,00 dan realisasi sebesar

Rp5.552.078.167,00 atau setara dengan 79,31%. *Output* kegiatan terselenggaranya dan terpenuhinya kegiatan koordinasi dan fasilitasi BPKAD Provinsi Jawa Barat dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. *Outcome* Kegiatan terselenggaranya dan terpenuhinya kegiatan koordinasi dan fasilitasi BPKAD Provinsi Jawa Barat dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- (11) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Untuk Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp31.495.919,00 atau setara dengan 18%. *Output* kegiatan meningkatnya pelayanan BPKAD untuk pengamanan dan pemanfaatan barang daerah. *Outcome* kegiatan terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor BPKAD untuk pengamanan dan pemanfaatan barang daerah;
- (12) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Nonpegawai Untuk Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp523.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp205.687.803,00 atau setara dengan 39,33%. *Output* kegiatan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk pengamanan dan pemanfaatan barang daerah. *Outcome* terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk pengamanan dan pemanfaatan barang daerah;
- (13) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Nonpegawai BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.720.506.471,00 dan realisasi sebesar Rp4.020.743.359,00 atau setara dengan 70,29%. *Output* kegiatan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran BPKAD. *Outcome* kegiatan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran BPKAD;
- (14) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Gedung BKPP I – IV yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp716.910.144,00 dan realisasi sebesar Rp630.308.160,00 atau setara dengan 87,92%. *Output* kegiatan meningkatnya pemeliharaan gedung kantor BKPP. *Outcome* kegiatan tersedianya alat pendukung fasilitas kantor;

- (15) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Gedung BKPP I – IV yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.581.780.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.437.362.576,00 atau setara dengan 96,85%. *Output* kegiatan meningkatnya jaminan keamanan dan kebersihan gedung kantor BKPP. *Outcome* kegiatan tersedianya jasa keamanan dan kebersihan serta peralatannya;
- (16) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BKPP I – IV yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp412.649.080,00 dan realisasi sebesar Rp273.069.685,00 atau setara dengan 66,17%. *Output* kegiatan meningkatnya fasilitas gedung kantor. *Outcome* kegiatan terpeliharanya perabotan, fasilitas dan gedung kantor BKPP;
- (17) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Nonpegawai Gedung BKPP I – IV yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp291.120.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.950.438,00 atau setara dengan 46,01%. *Output* kegiatan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran gedung kantor BKPP. *Outcome* kegiatan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran gedung BKPP.

e. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program pengelolaan pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar 101,07% dari target sebesar 100%; Dana Perimbangan dengan capaian sebesar 97,35% dari target sebesar 100% serta Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan capaian sebesar 100,33% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran program pengelolaan pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp27.779.507.852,00 dengan realisasi sebesar Rp25.705.244.971,00 atau setara dengan 92,53%.

- (1) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah

- Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp439.261.000,00 dan realisasi sebesar Rp438.257.572,00 atau setara dengan 99,77%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I Rp440.557.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I Rp312.380.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I Rp163.280.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I Rp89.404.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I Rp109.366.400,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I yang Terpungut 3.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I Rp228.564.900.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (2) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp545.604.000,00 dan realisasi sebesar Rp448.465.819,00 atau setara dengan 98,65%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere Rp227.869.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere Rp174.923.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere Rp63.900.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere Rp63.847.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere Rp31.366.400,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang Terpungut 3.376 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere Rp59.848.350.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (3) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah

- Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp410.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp409.773.000,00 atau setara dengan 78,48%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor Rp662.029.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor Rp595.772.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor Rp2.954.039.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor Rp57.000.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor Rp48.443.200,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang Terpungut 1.400 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor Rp185.909.400.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (4) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp448.090.000,00 dan realisasi sebesar Rp444.885.500,00 atau setara dengan 99,28%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor Rp298.180.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor Rp209.670.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor Rp340.585.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor Rp29.160.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor Rp60.465.600,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor yang Terpungut 380.942 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor Rp54.934.014.800,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (5) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah

- Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.869.373,00 dan realisasi sebesar Rp445.289.600,00 atau setara dengan 98,98%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi Rp61.184.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi Rp42.596.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi Rp243.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi Rp18.735.500,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi Rp27.040.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi yang Terpungut 100.412 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi Rp15.728.700.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (6) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp448.296.650,00 dan realisasi sebesar Rp418.913.000,00 atau setara dengan 93,45%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Rp125.994.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Rp107.961.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Rp1.101.688.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Rp19.200.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Rp27.040.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang Terpungut 78.404 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Rp32.921.250.000,00. *Outcome* kegiatan adalah

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (7) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp241.606.000,00 dan realisasi sebesar Rp220.620.000,00 atau setara dengan 92,14%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Rp50.684.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Rp48.029.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Rp455.422.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Rp3.960.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Rp25.000.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang Terpungut 49.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Rp900.000.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (8) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp444.317.000,00 dan realisasi sebesar Rp430.327.000,00 atau setara dengan 96,85%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur Rp158.309.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur Rp130.664.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur Rp2.613.346.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur Rp4.218.500,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur Rp54.080.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang Terpungut

- 5.100 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur Rp64.413.439.647,00 *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (9) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp493.659.280,00 dan realisasi sebesar Rp460.898.300,00 atau setara dengan 93,36%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi Rp1.088.917.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi Rp800.303.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi Rp1.070.660.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi Rp77.976.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi Rp140.770.240,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi yang Terpungut 1.262.892 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi Rp294.969.000.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (10) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp471.689.000,00 dan realisasi sebesar Rp452.377.500,00 atau setara dengan 95,91%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi Rp833.220.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi Rp687.050.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi Rp4.525.201.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi Rp15.510.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi Rp125.465.600,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang Terpungut

- 40.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi Rp225.130.350.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (11) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp424.280.000,00 dan realisasi sebesar Rp389.150.000,00 atau setara dengan 91,72%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang Rp359.847.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang Rp330.939.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang Rp4.926.679.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang Rp13.500.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang Rp72.432.256,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang Terpungut 56.355 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang Rp99.980.910.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (12) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp414.475.000,00 dan realisasi sebesar Rp413.975.000,00 atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta Rp120.713.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta Rp103.505.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta Rp18.791.293.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta Rp17.670.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta

- Rp57.148.200,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakartayang Terpungut 4.794 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta Rp3.093.785.100,00 *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (13) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp417.235.000,00 dan realisasi sebesar Rp417.035.000,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang Rp137.652.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang Rp143.800.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang Rp395.351.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang Rp27.120.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang Rp100.377.256,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subangyang Terpungut 15.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang Rp39.478.500.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (14) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp415.624.000,00 dan realisasi sebesar Rp395.681.500,00 atau setara dengan 95,20%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon Rp110.514.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon Rp71.233.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon Rp0,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon Rp9.600.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota

- Cirebon Rp61.381.400,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon yang Terpungut 10.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon Rp27.262.050.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (15) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp404.218.000,00 dan realisasi sebesar Rp396.243.000,00 atau setara dengan 98,03%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Rp171.071.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Rp134.821.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Rp132.081.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Rp14.031.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Rp29.203.200,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang Terpungut 12.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Rp5.200.000.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (16) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp452.120.000,00 dan realisasi sebesar Rp408.670.000,00 atau setara dengan 90,39%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Rp68.775.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Rp56.885.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II

- Ciledug Rp116.882.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Rp14.549.040,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Rp57.148.200,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang Terpungut 10.330 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Rp18.500.000.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (17) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp446.674.000,00 dan realisasi sebesar Rp433.720.000,00 atau setara dengan 97,10%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I Rp122.027.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I Rp110.585.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I Rp201.957.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I Rp5.800.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I Rp68.389.415,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang Terpungut 3.964 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I Rp34.081.650.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (18) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp437.735.000,00 dan realisasi sebesar Rp393.995.000,00 atau setara dengan 90,01%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Rp48.526.000.000,00; (2) Jumlah

- Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Rp48.806.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Rp8.100.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Rp27.040.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang Terpungut 54.562 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Rp13.691.250.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (19) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp411.792.000,00 dan realisasi sebesar Rp377.029.500,00 atau setara dengan 91,56%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan Rp104.169.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan Rp70.290.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan Rp304.345.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan Rp6.000.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan Rp58.126.500,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang Terpungut 24.670 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan Rp25.304.850.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (20) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp413.589.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp388.039.000,00 atau setara dengan 93,82%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka Rp111.472.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka Rp77.473.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka Rp144.424.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka Rp21.225.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka Rp29.744.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang Terpungut 18.239 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka Rp17.335.400.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (21) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp487.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp446.675.000,00 atau setara dengan 91,59%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Rp453.124.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Rp241.277.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Rp30.000.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Rp14.585.100,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Rp64.325.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang Terpungut 31.795 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Rp108.256.500.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (22) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah

- Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp457.870.000,00 dan realisasi sebesar Rp453.592.000,00 atau setara dengan 99,07%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Rp460.088.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Rp243.113.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Rp356.833.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Rp24.900.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Rp96.614.600,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang Terpungut 2.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Rp109.386.900.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (23) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp570.133.500,00 dan realisasi sebesar Rp562.961.500,00 atau setara dengan 98,74%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Rp411.733.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Rp256.728.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Rp29.144.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Rp32.055.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Rp201.182.810,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang Terpungut 5.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III

- Soekarno Hatta Rp100.923.150.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (24) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp431.288.000,00 dan realisasi sebesar Rp420.248.000,00 atau setara dengan 97,44%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat Rp258.049.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat Rp197.756.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat Rp14.781.887.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat Rp31.380.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat Rp114.970.325,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang Terpungut 30.350 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat Rp70.080.300.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (25) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp429.228.000,00 dan realisasi sebesar Rp409.478.000,00 atau setara dengan 95,40%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Rp215.271.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Rp174.696.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Rp1.530.106.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Rp5.760.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten

- Bandung I Rancaekek Rp57.148.200,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang Terpungut 17.866 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Rp56.520.450.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (26) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp494.468.000,00 dan realisasi sebesar Rp490.668.000,00 atau setara dengan 99,23%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Rp233.811.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Rp179.455.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Rp2.480.017.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Rp28.526.600,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Rp29.224.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang Terpungut 20.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Rp60.953.250.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (27) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp420.090.000,00 dan realisasi sebesar Rp407.250.000,00 atau setara dengan 96,94%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang Rp93.558.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang Rp69.142.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah

- Kabupaten Sumedang Rp1.279.248.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang Rp3.600.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang Rp29.744.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang Terpungut 2.850 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang Rp23.665.950.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (28) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp452.887.000,00 dan realisasi sebesar Rp410.604.980,00 atau setara dengan 90,66%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut Rp133.053.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut Rp106.189.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut Rp600.614.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut Rp16.200.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut Rp102.915.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut yang Terpungut 11.250 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut Rp34.987.200.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (29) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp411.210.000,00 dan realisasi sebesar Rp395.250.000,00 atau setara dengan 96,12%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya Rp96.010.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya Rp60.513.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota

- Tasikmalaya Rp15.930.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya Rp36.900.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya Rp29.744.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang Terpungut 16.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya Rp24.206.850.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (30) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp617.077.000,00 dan realisasi sebesar Rp533.974.000,00 atau setara dengan 86,53%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Rp90.353.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Rp64.847.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Rp132.009.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Rp7.200.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Rp29.744.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang Terpungut 15.650 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Rp22.195.950.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (31) Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp422.279.000,00 dan realisasi sebesar Rp394.281.000,00 atau setara dengan 93,37%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis Rp80.971.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis Rp47.852.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP

- Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis Rp75.094.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis Rp14.400.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis Rp27.040.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang Terpungut 233.379 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis Rp19.534.500.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (32) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp441.623.000,00 dan realisasi sebesar Rp406.164.000,00 atau setara dengan 91,97%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran Rp26.509.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran Rp15.144.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran Rp6.255.000.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran Rp12.900.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran Rp38.999.973,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang Terpungut 5.152 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran Rp6.168.900.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (33) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp373.230.100,00 dan realisasi sebesar Rp364.006.500,00 atau setara dengan 97,53%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi Rp160.415.000.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota

- Cimahi Rp99.218.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi Rp332.079.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi Rp20.400.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi Rp59.015.000,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi yang Terpungut 16.578 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi Rp40.757.550.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (34) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp386.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp379.030.000,00 atau setara dengan 98,17%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PKB Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar Rp19.865.000,00; (2) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar Rp12.459.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar Rp49.408.000,00; (4) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar Rp8.310.000,00; (5) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar Rp34.847.956,00; (6) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar yang Terpungut 3.000 KBM; (7) Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB melalui Layanan Nontunai Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar Rp4.598.100.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (35) Kegiatan Rapat Kerja Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp948.226.286,00 dan realisasi sebesar Rp809.328.500,00 atau setara dengan 85,35%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Inovasi dan Kreativitas Layanan yang diimplementasikan 14 layanan; (2) Jumlah Wajib Pajak yang Mengajukan Keberatan dan/atau Keringanan yang dilayani 8 WP; (3) Jumlah Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah yang dilaksanakan 2 kali; (4) Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Survei

- Kepuasan Masyarakat Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00, dana Perimbangan sebesar Rp15.110.000.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp77.990.000.000,00;
- (36) Kegiatan Sosialisasi dan *Monitoring* Pajak Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp586.399.950,00 dan realisasi sebesar Rp549.461.575,00 atau setara dengan 93,70%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup Badan Pendapatan Daerah yang terverifikasi 508.262 KBM; (2) Jumlah Realisasi PKB Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Rp8.034.519.000.000,00; (3) Jumlah Realisasi BBNKB Lingkup Badan Pendapatan Daerah Rp6.026.074.000.000,00; (4) Jumlah Realisasi PAP Lingkup Badan Pendapatan Daerah Rp60.000.000.000,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00, dana Perimbangan sebesar Rp15.110.000.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp77.990.000.000,00;
- (37) Kegiatan Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Wilayah Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp805.674.963,00 dan realisasi sebesar Rp737.590.850,00 atau setara dengan 91,55%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Dokumen Regulasi Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB; Jumlah Dealer yang disurvei; (2) Jumlah Data Potensi PKB Aktif dan Pasif Rp20.033.528,00; (3) Jumlah Data Wajib Pajak PKB dan PAP yang akan dihapus; (4) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup Badan Pendapatan Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00, dana Perimbangan sebesar Rp15.110.000.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp77.990.000.000,00;
- (38) Kegiatan Intensifikasi PBBKB dan Lain-lain PAD yang Sah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp332.897.500,00 dan realisasi sebesar Rp295.239.370,00 atau setara dengan 88,69%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi PBBKB Lingkup Badan Pendapatan Daerah Rp2.563.169.934.000,00; (2) Jumlah Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Badan Pendapatan Daerah Rp1.270.525.213.416,00 *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00, dana Perimbangan sebesar Rp15.110.000.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp77.990.000.000,00;
- (39) Kegiatan Intensifikasi/Ektensifikasi Pendapatan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp337.283.300,00 dan realisasi sebesar Rp335.886.800,00 atau setara dengan 99,59%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah Rp53.183.796.175,00; (2) Jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp387.109.923.387,00. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00, dana Perimbangan sebesar Rp15.110.000.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp77.990.000.000,00;
- (40) Kegiatan Intensifikasi Penerimaan dan Pendataan Pajak Rokok, dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp425.950.800,00 dan realisasi sebesar Rp425.862.550,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Realisasi Pajak Rokok Rp2.539.238.008.000,00; Frekuensi Pelaksanaan Tugas dengan Instansi Terkait 3 kali; (2) Jumlah Realisasi dana Perimbangan Rp15.115.298.993.485,00; Frekuensi Pelaksanaan Tugas dengan Kemenkeu dan Kemendagri 6 kali; (3) Jumlah Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp77.999.644.000,00; (4) Frekuensi Pelaksanaan Tugas dengan Instansi Pemberi Hibah/Bantuan 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar

- Rp20.930.000.000.000,00, dana Perimbangan sebesar Rp15.110.000.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp77.990.000.000,00;
- (41) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp394.330.000,00 dan realisasi sebesar Rp286.426.500,00 atau setara dengan 72,64%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I yang ditelusuri 30.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I yang ditelusuri 2 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I yang ditelusuri 14 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I yang ditelusuri 1 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (42) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp215.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp214.000.000,00 atau setara dengan 99,19%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang ditelusuri 15.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang ditelusuri 4 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang ditelusuri 10 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang ditelusuri 1 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere 50 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (43) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp308.148.000,00 dan realisasi sebesar Rp240.449.900,00 atau setara

- dengan 72,36%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang ditelusuri 20.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang ditelusuri 43 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang ditelusuri 3 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor 40 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (44) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp272.560.000,00 dan realisasi sebesar Rp271.122.800,00 atau setara dengan 99,47%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor yang ditelusuri 20.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor yang ditelusuri 7 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor yang ditelusuri 7 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Bogor 10 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (45) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp132.040.000,00 dan realisasi sebesar Rp132.040.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi yang ditelusuri 5.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi yang ditelusuri 1 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi yang ditelusuri 2 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi yang ditelusuri 1 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi 45 WP. *Outcome* kegiatan adalah

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (46) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp307.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp276.880.000,00 atau setara dengan 89,94%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang ditelusuri 21.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang ditelusuri 26 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang ditelusuri 4 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang ditelusuri 4 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 72 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (47) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.492.000,00 dan realisasi sebesar Rp221.540.000,00 atau setara dengan 97,81%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang ditelusuri 7.262 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang ditelusuri 25 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang ditelusuri 3 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang ditelusuri 1 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu 7 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (48) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan

- alokasi anggaran sebesar Rp130.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp103.000.000,00 atau setara dengan 78,82%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang ditelusuri 13.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang ditelusuri 12 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang ditelusuri 3 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang ditelusuri 1 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur 15 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (49) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp532.120.000,00 dan realisasi sebesar Rp499.720.000,00 atau setara dengan 93,91%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi yang ditelusuri 40.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi yang ditelusuri 10 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi yang ditelusuri 10 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi yang ditelusuri 3 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi 570 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (50) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp559.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp465.917.400,00 atau setara dengan 83,27%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang ditelusuri 40.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang ditelusuri 43 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang ditelusuri 3 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah

- Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi 3 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (51) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp408.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp227.620.000,00 atau setara dengan 55,71%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang ditelusuri 40.900 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang ditelusuri 37 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang ditelusuri 2 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang 3.000 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (52) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp307.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp303.388.000,00 atau setara dengan 98,74%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang ditelusuri 15.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang ditelusuri 21 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang ditelusuri 4 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta 6 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (53) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah

- Kabupaten Subang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp297.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp296.200.000,00 atau setara dengan 99,46%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang yang ditelusuri 15.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang yang ditelusuri 8 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang yang ditelusuri 3 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang yang ditelusuri 3 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang 1 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (54) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.282.750,00 dan realisasi sebesar Rp101.750.000,00 atau setara dengan 90,62%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon yang ditelusuri 500 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon yang ditelusuri 4 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon yang ditelusuri 2 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon yang ditelusuri; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Cirebon 5 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (55) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp309.691.700,00 dan realisasi sebesar Rp290.670.150,00 atau setara dengan 93,86%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang ditelusuri 12.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang ditelusuri 4 objek; (3)

- Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang ditelusuri 5 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang ditelusuri 1 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (56) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp194.327.500,00 dan realisasi sebesar Rp161.489.525,00 atau setara dengan 83,10%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang ditelusuri 10.330 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang ditelusuri 3 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang ditelusuri 5 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 24 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (57) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp168.848.000,00 atau setara dengan 60,84%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang ditelusuri; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang ditelusuri; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang ditelusuri; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang ditelusuri; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I. *Outcome* kegiatan

- adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (58) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp170.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp158.250.000,00 atau setara dengan 92,92%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang ditelusuri 12.500 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang ditelusuri 3 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang ditelusuri 4 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang ditelusuri; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis 5 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (59) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp257.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp253.035.000,00 atau setara dengan 98,30%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang ditelusuri 14.230 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang ditelusuri 3 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang ditelusuri 2 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan 1 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (60) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp277.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp256.641.000,00 atau setara dengan 92,50%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang ditelusuri 12.00 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang ditelusuri 4 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang ditelusuri 2 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang ditelusuri 1 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka 10 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (61) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp301.090.000,00 dan realisasi sebesar Rp279.168.400,00 atau setara dengan 92,72%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang ditelusuri 20.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang ditelusuri 5 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang ditelusuri 4 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 202 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (62) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp309.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp296.000.000,00 atau setara dengan 95,64%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang ditelusuri 11.447 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang ditelusuri 9 objek;

- (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang ditelusuri 7 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang ditelusuri 3 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan 140 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (63) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp335.805.800,00 dan realisasi sebesar Rp329.406.480,00 atau setara dengan 98,09%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang ditelusuri 20.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang ditelusuri 54 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang ditelusuri 15 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang ditelusuri 3 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta 22 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (64) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp357.575.000,00 dan realisasi sebesar Rp278.679.600,00 atau setara dengan 77,94%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ditelusuri 30.350 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ditelusuri 31 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ditelusuri 13 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ditelusuri 4 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat 1 WP. *Outcome* kegiatan adalah

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (65) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp358.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp357.800.000,00 atau setara dengan 99,92%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang ditelusuri 20.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang ditelusuri 87 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang ditelusuri 1 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek 22 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (66) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp358.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp337.970.000,00 atau setara dengan 94,37%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang ditelusuri; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang ditelusuri; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang ditelusuri; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang ditelusuri; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (67) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan

- alokasi anggaran sebesar Rp257.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp213.692.000,00 atau setara dengan 83,05%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang ditelusuri 9.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang ditelusuri 10 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang ditelusuri 1 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang ditelusuri 1 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sumedang 5 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (68) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp307.820.000,00 dan realisasi sebesar Rp305.034.600,00 atau setara dengan 99,10%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut yang ditelusuri 15.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut yang ditelusuri 13 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut yang ditelusuri 5 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut yang ditelusuri 3 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Garut 20 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (69) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp188.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp181.380.000,00 atau setara dengan 96,15%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang ditelusuri 800 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang ditelusuri 4 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang ditelusuri 7 objek; (4)

- Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang ditelusuri 4 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Tasikmalaya 12 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (70) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp237.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp218.410.000,00 atau setara dengan 92,00%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ditelusuri 8.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ditelusuri 8 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ditelusuri 2 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 12 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (71) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp237.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp226.700.000,00 atau setara dengan 95,57%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditelusuri 8.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditelusuri 8 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditelusuri 7 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditelusuri 1 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis 5 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (72) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah

- Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp138.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp122.850.000,00 atau setara dengan 88,48%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang ditelusuri 3.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang ditelusuri 4 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang ditelusuri 7 objek Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang ditelusuri 1 objek; (4) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran 6 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (73) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.279.400,00 dan realisasi sebesar Rp144.467.700,00 atau setara dengan 99,44%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi yang ditelusuri 10.000 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi yang ditelusuri 22 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi yang ditelusuri 11 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi yang ditelusuri 2 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi 20 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00;
- (74) Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp71.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp71.800.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah KTMDU Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar yang ditelusuri 6.600 KBM; (2) Jumlah Objek PAP Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar yang ditelusuri 5 objek; (3) Jumlah Objek Retribusi

Daerah Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar yang ditelusuri 3 objek; (4) Jumlah Objek Lain-lain PAD yang Sah Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar yang ditelusuri 60 objek; (5) Jumlah Kesalahan Penetapan Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar 8 WP. *Outcome* kegiatan adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.930.000.000.000,00.

f. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah sebesar 100 % dari target sebesar 100%, Tingkat Akurasi, Kecepatan dan Kecermatan dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah sebesar 100% dan Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp6.582.840.341,00 dengan realisasi sebesar Rp6.216.720.592,00 setara dengan 94,44%.

- (1) Kegiatan Dokumen Kinerja Tahunan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp597.629.880,00 dan realisasi sebesar Rp578.390.650,00 atau setara dengan 96,78%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 1 dokumen; (2) Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 1 dokumen; (3) Jumlah Dokumen Revisi Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 1 dokumen; (4) Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 161 dokumen; (5) Jumlah Dokumen RKA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 1 dokumen; (6) Jumlah Dokumen DPA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 2 dokumen; (7) Jumlah Dokumen DPPA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 1 dokumen; (8) Jumlah Dokumen Pakta Integritas

- Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 161 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran 100%;
- (2) Kegiatan *Monitoring* Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp53.760.000,00 dan realisasi sebesar Rp53.152.250,00 atau setara dengan 98,87%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Laporan Pembinaan dan Kepatuhan terhadap Tupoksi Pegawai 2 dokumen; (2) Jumlah Laporan Pembinaan dan Kepatuhan terhadap SPIP 1 dokumen; (3) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Kepatuhan terhadap Disiplin Pegawai 1 dokumen; (4) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Kepatuhan Tupoksi dan SPIP 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase kepatuhan unit kerja terhadap tupoksi dan SPIP 100%;
- (3) Kegiatan Pemeriksaan, Pemutakhiran dan Pendampingan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.283.599.220,00 dan realisasi sebesar Rp1.283.347.600,00 atau setara dengan 99,98%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemutakhiran atas Pemeriksaan dan Pengendalian UPTD P3D se-Jawa Barat, PLOPD, Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 35 dokumen; Jumlah Dokumen Laporan Hasil atas Pemeriksaan (LHP) terhadap UPTD P3D se-Jawa Barat, PLOPD, Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 36 dokumen; (2) Jumlah Dokumen Laporan/Nota Dinas Hasil Pembahasan dan Pemutakhiran UPTD P3D se-Jawa Barat, PLOPD, Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 12 dokumen; Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI atas Pemeriksaan LKPD 1 dokumen; (3) Jumlah Dokumen Laporan Pendampingan Pemeriksaan Internal dan Eksternal, Pengaduan Masyarakat 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase akurasi, kecepatan, dan kecermatan unit kerja

- dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100%;
- (4) Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pelaporan Internal Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp485.848.661,00 dan realisasi sebesar Rp479.135.586,00 atau setara dengan 98,62%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Laporan TEpra 12 dokumen; (2) Jumlah Dokumen Laporan *Monev scorecard* 12 dokumen; (3) Jumlah Dokumen Laporan Format Kendali Barang dan Jasa 12 dokumen; (4) Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan Daerah 12 dokumen; Jumlah Dokumen LKIP 1 dokumen; (5) Jumlah Dokumen LKPJ 1 dokumen; Jumlah Dokumen Laporan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1 dokumen; (6) Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan 4 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja badan pendapatan daerah 100%;
- (5) Kegiatan Pengembangan Aplikasi *Switching E-Samsat* yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.524.829,00 dan realisasi sebesar Rp57.630.100,00 atau setara dengan 96,82%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen pengembangan Aplikasi *Switching E-Samsat* 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase validasi dan keakuratan Basis data sistem pendapatan 79,00%;
- (6) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sisten Samsat *Online* Sentralisasi (SSOS) dengan Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIK) yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.524.804,00 dan realisasi sebesar Rp83.684.400,00 atau setara dengan 96,72%. *Output* kegiatan adalah jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Sistem Samsat *Online* Sentralisasi (SSOS) dengan Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIK). *Outcome* kegiatan adalah Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah 100%, Tingkat Akurasi, Kecepatan dan Kecermatan dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah 100%, Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan

- Perencanaan Badan Pendapatan Daerah 100%, Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (7) Kegiatan Penyusunan Integrasi Sistem Samsat *Online* Sentralisasi (SSOS) dengan Dirjen Pajak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.524.889,00 dan realisasi sebesar Rp84.187.800,00 atau setara dengan 97,30%. *Output* kegiatan adalah jumlah dokumen penyusunan Integrasi Sistem Samsat *Online* Sentralisasi (SSOS) dengan Dirjen Pajak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase validasi dan keakuratan Basis data sistem pendapatan 79,00%;
- (8) Kegiatan Pengembangan KTP Elektronik Berbasis *Mobile* Sistem yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.524.885,00 dan realisasi sebesar Rp83.678.300,00 atau setara dengan 96,71%. *Output* kegiatan adalah jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan dan Belanja (SIPATEN). *Outcome* kegiatan adalah tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah 100%, Tingkat Akurasi, Kecepatan dan Kecermatan dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah 100%, Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah 100%, Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (9) Kegiatan Penyusunan Aplikasi Penelusuran Pajak Kendaraan Bermotor (AP2KB) Berbasis *Mobile* Sistem yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.399.909,00 dan realisasi sebesar Rp100.518.800,00 atau setara dengan 91,05%. *Output* kegiatan adalah jumlah Dokumen Penyusunan Aplikasi Penelusuran Pajak Kendaraan Bermotor (AP2KB) Berbasis *Mobile* Sistem 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase validasi dan keakuratan Basis data sistem pendapatan 79,00%;
- (10) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Pendapatan Terpadu (SIPANDU) yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp86.524.882,00 dan realisasi sebesar Rp83.797.000,00 atau setara dengan 96,85%. *Output* kegiatan adalah jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Pendapatan Terpadu (SIPANDU) 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase validasi dan keakuratan Basis data sistem pendapatan 79%;
- (11) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Pendapatan dengan Instansi Vertikal/Horizontal yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.524.950,00 dan realisasi sebesar Rp82.743.800,00 atau setara dengan 95,63%. *Output* kegiatan adalah jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase validasi dan keakuratan Basis data sistem pendapatan 79%;
- (12) Kegiatan Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.499.946,00 dan realisasi sebesar Rp87.991.800,00 atau setara dengan 92,14%. *Output* kegiatan adalah jumlah Dokumen Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah 100%, Tingkat Akurasi, Kecepatan dan Kecermatan dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah 100%, Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah 100%, Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (13) Kegiatan Pengembangan Pengayaan Instrumen Pelayanan Pendapatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.178.368.750,00 dan realisasi sebesar Rp1.102.138.950,00 atau setara dengan 93,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Pendapatan Daerah 2 dokumen; Jumlah Dokumen Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah 4 dokumen; Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Instrumen Layanan Pajak Daerah 20 dokumen; Jumlah Dokumen Hasil Kajian Ekstensifikasi

- dan Intensifikasi Pajak Daerah 20 dokumen; Jumlah Kapita Selektia 5 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan dokumen analisis realisasi dan proyeksi 100%;
- (14) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Samsat *Mobile* Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.524.804,00 dan realisasi sebesar Rp83.964.600,00 atau setara dengan 97,04%. *Output* kegiatan adalah jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Sambara 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase validasi dan keakuratan Basis data sistem pendapatan 79%;
- (15) Kegiatan Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.594.080.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.425.937.250,00 atau setara dengan 89,45%. *Output* kegiatan adalah jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kader Penggerak Taat Pajak yang berprestasi dalam menyukseskan kinerja pendapatan daerah 13 instansi/individu. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan dokumen analisis realisasi dan proyeksi 100%;
- (16) Kegiatan Pengembangan Regulasi dan Kerjasama Pendapatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp604.979.932,00 dan realisasi sebesar Rp546.421.706,00 atau setara dengan 90,32%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Dokumen Regulasi Pelayanan dan/atau Pendapatan Daerah 70 dokumen 2.Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelayanan dan/atau Pendapatan Daerah 150 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan dokumen analisis realisasi dan proyeksi 100%;

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah adalah, Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Pendapatan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 90% . Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar

Rp119.433.065.457,00 dengan realisasi sebesar Rp112.231.508.610,00 atau setara dengan 93,97%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.958.144.159,00 dan realisasi sebesar Rp37.786.499.990,00 atau setara dengan 94,57%. *Output* kegiatan adalah honorarium organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 1 tahun, pengembangan *software* aplikasi manajemen kontrol kelistrikan 1 paket, *software* aplikasi manajemen barang 1 paket, aplikasi keuangan sub bidang verifikasi *on line* berbasis *web* 1 paket, *software* aplikasi manajemen kendaraan 1 paket, *software* aplikasi manajemen kontrol set 1 paket, *software* aplikasi *chat* android di lingkungan Bapenda 1 paket, pengadaan aplikasi sistem *monitoring* penyusunan program kerja sub bagian kepegawaian bapenda jabar berbasis *web* *smartphone* 1 paket, *software* aplikasi manajemen kepegawaian 1 paket, pengembangan aplikasi keuangan sub bidang kas daerah berbasis *web* 1 paket, belanja kendaraan bermotor *mini bus* 5 unit, belanja kendaraan bermotor roda 2 108 unit, belanja kendaraan bermotor roda 2 untuk kader 10 unit, pengadaan *lift* kantor badan pendapatan provinsi Jawa Barat (terpasang dan termasuk renovasi konstruksi bangunannya) 2 paket, mesin tik manual 10 buah, *film switch glass* 1 paket, *spliter videowall* 1 paket, *advertising display screen* 3 unit, televisi 10 unit, genset 400 KVA 1 unit, genset 200-250 KVA 4 unit, genset 200 KVA 4 unit, genset 100 KVA 1 paket, genset 30 KVA 1 paket, genset samkel *bus* 1 paket, genset samkel mikrobus 1 paket, genset samdong 34 unit, *server* bapenda pusat 3 unit, *storage server* bapenda 5 unit, komputer 170 unit, laptop 140 unit, *printer* dotmatrik untuk samsat 40 unit, *printer* dotmatrik kecil untuk samsat 30 unit, *printer laserjet* kecil 10 unit, *printer inkjet* 50 unit, *printer* untuk kertas tebal di samsat 50 unit, *scanner* 40 unit, pengadaan *UPS* (terpasang) 102 unit, *thin client* 102 unit, monitor untuk *thin client* 102 unit, *mouse* untuk *thin client* 24 unit, *hardisk server* 2.5" 24 unit, *hardisk server* 3.5" 3 unit, *switch hub* 40 unit, *eksternal hardisk* untuk

- backup digital arsip P3D 18 unit, *memory server* 1 paket, barang kebutuhan jaringan lantai 1 dan 2 (2 unit), *remote switch glass* dan *switch film* 1 buah, meja interaktif 20 unit, dispenser 1 kegiatan, aksesoris kamera 1 unit, *drone* 1 unit, kamera *mirrorless* 1 paket, CCTV 1 paket, program *videowall* 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (2) Kegiatan Penataan Sarana Penunjang Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.128.980.608,00 dan realisasi sebesar Rp12.225.856.955,00 atau setara dengan 93,12%. *Output* kegiatan adalah honorarium organisasi pengadaan barang dan jasa 1 tahun, perencanaan pembangunan gedung sarana olahraga dan sarana pendukungnya Bapenda Provinsi Jawa Barat 1 kegiatan, pengawasan pembangunan gedung sarana olahraga dan sarana pendukungnya Bapenda Provinsi Jawa Barat 1 kegiatan, pengadaan tanah Kantor P3D Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 1 kegiatan, biaya *appraisal* penilaian pengadaan tanah Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur 1 paket, Pajak dan Notaris Wilayah Kabupaten Cianjur 1 paket, pembangunan gedung sarana olahraga dan sarana pendukungnya Bapenda Provinsi Jawa Barat 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (3) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp389.039.634,00 dan realisasi sebesar Rp371.669.000,00 atau setara dengan 95,53%. *Output* kegiatan adalah 1. Mesin tik manual 1 unit 2. Mesin fotokopi 1 unit 3. *Water heater* 4 unit 4. Televisi 4 unit 5. *Exhaust fan* 10 unit 6. Gorden 72 m² 7. Karpet 37 buah, 8. *Wallpaper* 311 m², 9. Telepon PABX 1 unit, 10. CCTV 2 set. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak 100%;

- (4) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp398.539.364,00 dan realisasi sebesar Rp376.008.990,00 atau setara dengan 94,35%. *Output* kegiatan adalah Pengadaan dongkrak buaya 1 kegiatan; Pengadaan mesin pemotong rumput 1 kegiatan; Pengadaan AC 1 kegiatan; Pengadaan televisi 1 kegiatan; Pengadaan tangga 1 kegiatan; Pengadaan komputer PC 1 kegiatan; Pengadaan *printer* 1 kegiatan; Pengadaan meja makan; Pengadaan lemari pakaian 1 kegiatan; Pengadaan kulkas 1 kegiatan; Pengadaan kelengkapan/peralatan jasa keamanan 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (5) Kegiatan Pengadaan Rumah Dinas/Mess P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.236.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.909.922.000,00 atau setara dengan 92,30%. *Output* kegiatan adalah pengadaan rumah dinas/mess 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (6) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.620.025.912,00 dan realisasi sebesar Rp3.317.149.702,00 atau setara dengan 91,63%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 100%. *Outcome* kegiatan adalah kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 100%;
- (7) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp118.092.335,00 dan realisasi sebesar Rp116.630.000,00 atau setara dengan 98,76%. *Output* kegiatan adalah (1) Terfasilitasinya pengadaan komputer 5 unit; (2) Terfasilitasinya

- pengadaan *printer* canon 5 unit; (3) Terfasilitasinya *radio/tape/VCD/DVD* 1 unit; (4) Terfasilitasinya pengadaan organ tunggal 1 set; (5) Terfasilitasinya pengadaan 1 set; (6) Terfasilitasinya pengadaan peralatan band 2 buah; (7) Terfasilitasinya pengadaan tangga alumunium 1 unit; (8) Terfasilitasinya pengadaan tabung gas 1 tabung; (9) Terfasilitasinya pengadaan rak piring (dapur) 1 set. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 90%;
- (8) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.700.000,00 atau setara dengan 93,03%. *Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Peraturan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (9) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp997.399.974,00 dan realisasi sebesar Rp971.081.400,00 atau setara dengan 97,36%. *Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Perundang-undangan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (10) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp523.990.666,00 dan realisasi sebesar Rp493.570.510,00 atau setara dengan 94,19%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana Kerja Badan Pendapatan Daerah 90%;
- (11) Kegiatan Pengadaan Konstruksi P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang

- dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp841.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp841.880.000,00 atau setara dengan 75,49%. *Output* kegiatan adalah 1.dana 2.SDM 3.Sarana dan Prasarana 4.Perundang-undangan. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana unutm mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (12) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp316.582.166,00 dan realisasi sebesar Rp310.300.000,00 atau setara dengan 98,02%. *Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (13) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.454.519.957,00 dan realisasi sebesar Rp18.354.652.402,00 atau setara dengan 94,35%. *Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (14) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp975.008.798,00 dan realisasi sebesar Rp942.271.000,00 atau setara dengan 96,64%. *Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (15) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.412.270,00 dan realisasi sebesar Rp35.280.000,00 atau setara dengan 99,63%.

- Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (16) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.176.462.954,00 dan realisasi sebesar Rp1.105.050.000,00 atau setara dengan 93,93%. *Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah (1) Pengadaan alat rumah tangga; (2) Pengadaan mesin fotokopi; (3) Brangkas digital; (4) Belanja papan nama kantor; (5) Alat olahraga kantor dan kelengkapannya; (6) Pengadaan komputer dan kelengkapannya; (7) Pengadaan *printer*; (8) Pengadaan kursi sice; dan (9) Belanja dispenser 1 tahun;
- (17) Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp892.552.140,00 dan realisasi sebesar Rp813.280.374,00 atau setara dengan 91,12%. *Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Perundang-undangan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (18) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp364.099.644,00 dan realisasi sebesar Rp347.769.516,00 atau setara dengan 95,51%. *Output* kegiatan adalah (1) Pengadaan peralatan rumah tangga; (2) Pengadaan mebel; (3) Pengadaan detektor uang palsu; (4) Pengadaan CCTV; (5) Belanja perkakas; (6) Meja gambar; (7) Almari *baby box*; (8) Pendingin ruangan; (9) Mesin cuci; (10) Pompa air; (11) Rak koran; (12) Karpet; (13) Lensa dan aksesoris kamera; dan (14) Buku perpustakaan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah sarana dan prasarana untuk

- mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (19) Kegiatan Pengadaan Konstruksi pada P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp873.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp682.417.850,00 atau setara dengan 78,14%. *Output* kegiatan adalah jumlah Konstruksi P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 90%;
- (20) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp293.785.574,00 dan realisasi sebesar Rp278.957.000,00 atau setara dengan 94,95%. *Output* kegiatan adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan masyarakat 1 tahun.
- (21) Kegiatan Pengadaan Konstruksi P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.519.494,00 dan realisasi sebesar Rp151.531.000,00 atau setara dengan 98,70%. *Output* kegiatan adalah pengadaan ruang layanan arsip 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan masyarakat 1 tahun;
- (22) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp211.472.856,00 dan realisasi sebesar Rp209.341.500,00 atau setara dengan 98,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Cirebon yang disediakan 11 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (23) Kegiatan Pengadaan Konstruksi P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp441.374.591,00 dan realisasi sebesar Rp432.669.530,00 atau setara

- dengan 98,03%. *Output* kegiatan adalah jumlah Konstruksi P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja di UPTD P3D Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (24) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.110.488.407,00 dan realisasi sebesar Rp2.077.074.177,00 atau setara dengan 98,42%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang disediakan 25 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 85%;
- (25) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp111.545.191,00 dan realisasi sebesar Rp108.450.000,00 atau setara dengan 97,23%. *Output* kegiatan adalah jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang disediakan 20 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (26) Kegiatan Pengadaan Konstruksi P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp390.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp379.987.000,00 atau setara dengan 97,28%. *Output* kegiatan adalah jumlah Konstruksi P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan 3 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (27) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp749.039.658,00 dan realisasi sebesar Rp680.742.806,00 atau setara dengan 90,88%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah

- Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang disediakan 10 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana Kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (28) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp456.495.347,00 dan realisasi sebesar Rp429.031.900,00 atau setara dengan 93,98%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang disediakan 924 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 79,90%;
- (29) Kegiatan Pengadaan Konstruksi P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.870.000,00 dan realisasi sebesar Rp171.139.000,00 atau setara dengan 98,43%. *Output* kegiatan adalah jumlah Konstruksi P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 79,90%;
- (30) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.547.700,00 atau setara dengan 76,81%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang disediakan 8 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (31) Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.148.768.283,00 dan realisasi sebesar Rp1.965.439.101,00 atau setara dengan 91,47%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan 11 gedung. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;

- (32) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.115.364,00 dan realisasi sebesar Rp64.847.630,00 atau setara dengan 88,69%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang disediakan 19 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (33) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.339.939.114,00 dan realisasi sebesar Rp1.293.084.125,00 atau setara dengan 96,50%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang disediakan 195 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana Kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (34) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp627.343.067,00 dan realisasi sebesar Rp575.381.600,00 atau setara dengan 91,72%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang disediakan 75 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (35) Kegiatan Pengadaan Konstruksi P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp568.167.408,00 dan realisasi sebesar Rp476.785.900,00 atau setara dengan 83,92%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Konstruksi P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (36) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan

- Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp466.988.083,00 dan realisasi sebesar Rp442.784.630,00 atau setara dengan 94,82%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang disediakan 9 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (37) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp101.333.596,00 dan realisasi sebesar Rp92.858.600,00 atau setara dengan 91,64%. *Output* kegiatan adalah 1.Terfasilitasinya mesin penghancur kertas 2.Terfasilitasinya perlengkapan atau peralatan alat-alat rumah tangga/dapur 3. Terfasilitasinya pengadaan projector multimedia portable 1 tahun . *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (38) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp486.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp468.920.000,00 atau setara dengan 96,37%. *Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah (1) Belanja modal pengadaan AC; (2) Belanja modal pengadaan meja kerja; (3) Belanja modal pengadaan kursi kerja; (4) Belanja modal pengadaan kursi rapat (5) Belanja modal pengadaan kursi tamu; dan (6) Penyekat ruangan atau interior 1 kegiatan;
- (39) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahap II P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.010.630.696,00 dan realisasi sebesar Rp5.563.307.997,00 atau setara dengan 92,64%. *Output* kegiatan adalah (1) Dana; (2) SDM; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk

- mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (40) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp481.120.800,00 dan realisasi sebesar Rp462.875.155,00 atau setara dengan 96,21%. *Output* kegiatan adalah (1) Tersedianya belanja modal papan tulis; (2) Tersedianya peralatan olahraga; (3) Tersedianya pengadaan kulkas; (4) Tersedianya pengadaan gorden; (5) Tersedianya pengadaan CCTV; dan (6) Tersedianya pengadaan *sound system* 100%. *Outcome* kegiatan adalah sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (41) Kegiatan Pembangunan Gedung Arsip P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.003.510.000,00 dan realisasi sebesar Rp851.467.286,00 atau setara dengan 84,85%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang atau jasa 3 paket, makan dan minuman rapat 120 box, perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi 1 kegiatan, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan 2 paket, pengadaan konstruksi atau pembelian gedung gudang 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (42) Kegiatan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Kantor P3D Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp714.364.770,00 dan realisasi sebesar Rp588.492.750,00 atau setara dengan 82,38%. *Output* kegiatan adalah DED Gedung kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (43) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp313.389.659,00 dan realisasi sebesar Rp304.101.200,00 atau setara dengan 97,04%.

- Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang disediakan 46 unit dan 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana dasar operasinal untuk unit kerja pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (44) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp582.374.667,00 dan realisasi sebesar Rp547.372.000,00 atau setara dengan 93,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang disediakan 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (45) Kegiatan Pengadaan Konstruksi P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp183.645.000,00 dan realisasi sebesar Rp180.281.000,00 atau setara dengan 98,17%. *Output* kegiatan adalah jumlah Konstruksi P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan 3 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (46) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp42.200.000,00 atau setara dengan 98,60%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang disediakan 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (47) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp574.074.006,00 dan realisasi sebesar Rp525.894.500,00 atau setara dengan 91,61%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang disediakan 68 unit. *Outcome*

- kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (48) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp384.618.118,00 dan realisasi sebesar Rp361.760.000,00 atau setara dengan 94,06%. *Output* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja 101 unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (49) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp790.703.000,00 dan realisasi sebesar Rp783.463.300,00 atau setara dengan 99,08%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang disediakan 4 Unit. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (50) Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.509.229.754,00 dan realisasi sebesar Rp4.500.326.753,00 atau setara dengan 99,80%. *Output* kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang disediakan 1 gedung. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 90%;
- (51) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.064.068.260,00 dan realisasi sebesar Rp2.894.328.556,00 atau setara dengan 94,46%. *Output* kegiatan adalah Pengadaan *trolley* 2 unit; Pengadaan televisi 2 unit; pengadaan vacuum 2 unit; pengadaan alat pembersih lantai (mesin poliser lantai) 4 unit; pengadaan komputer PC 10 unit; Pengadaan komputer *notebook/laptop* 7 unit; pengadaan *printer* 5 unit; pengadaan perangkat *networking/jaringan* 1 paket; pengadaan perangkat penunjang data 1 paket; pengadaan

- meja rapat 1 paket; pengadaan kursi rapat 20 unit; pengadaan sofa 1 paket; pengadaan kursi 1 paket; pengadaan karpet 1 paket; pengadaan ruang rapat 1 paket; pengadaan penataan ruang kerja 1 paket; pengadaan penataan ruang tunggu 1 paket; pengadaan penataan ruang CGV 1 paket; pengadaan *sound system* 1 paket; Pengadaan telepon/*smartphone* 6 unit; pengadaan tanaman 1 paket; pengadaan *software* 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;
- (52) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp659.039.000,00 dan realisasi sebesar Rp650.559.627,00 atau setara dengan 98,71%. *Output* kegiatan adalah pengadaan ruang *lobby* 1 paket; pengadaan kanopi 1 paket; pengadaan taman/tanaman 1 paket; pengadaan sumur bor 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (53) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat P3D Wilayah Kota Depok Iyang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp322.367.400,00 dan realisasi sebesar Rp313.779.000,00 atau setara dengan 97,34%. *Output* kegiatan adalah Kanopi 155 m²; Teralis 48 m²; Halaman parkir dan gazebo 1 kegiatan; Meja rapat 7 unit; *Kitchen set* 2 unit. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya sarana prasarana unit kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (54) Kegiatan Pengadaan Konstruksi P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp453.053.713,00 dan realisasi sebesar Rp442.057.900,00 atau setara dengan 97,57%. *Output* kegiatan adalah jumlah Konstruksi P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan 6 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah 85%.

h. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah adalah, Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Pendapatan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 90%, dan Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp187.409.467.046,00 dengan realisasi sebesar Rp162.516.148.938,00 atau setara dengan 86,72%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.857.901.883,00 dan realisasi sebesar Rp4.037.552.560,00 atau setara dengan 83,11%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang disediakan 7.021 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.392.766.090,00 dan realisasi sebesar Rp3.692.789.762,00 atau setara dengan 84,07%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang disediakan 756 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (3) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.188.397.300,00

- dan realisasi sebesar Rp940.533.300,00 atau setara dengan 79,14%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dipelihara 864 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.040.077.750,00 dan realisasi sebesar Rp12.064.828.570,00 atau setara dengan 80,22%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (5) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.710.851,00 atau setara dengan 74,70%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor Kota P3D Wilayah Depok I yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp990.110.117,00 dan realisasi sebesar Rp907.212.647,00 atau setara dengan 91,63%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

- P3D Wilayah Depok I yang disediakan 8 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85,00%;
- (7) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp177.070.000,00 dan realisasi sebesar Rp130.840.845,00 atau setara dengan 73,89%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Depok I yang dipelihara 16 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (8) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp418.870.000,00 dan realisasi sebesar Rp411.274.500,00 atau setara dengan 98,19%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang dipelihara 13 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (9) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp39.910.900,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang disediakan 16 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (10) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai dan Tenaga Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.760.738.352,00 dan realisasi sebesar Rp30.468.007.646,00 atau setara dengan 90,25%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang disediakan 84 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang disediakan 552 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang

- mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (11) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp659.947.672,00 dan realisasi sebesar Rp652.643.286,00 atau setara dengan 98,89%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (12) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.360.729.890,00 dan realisasi sebesar Rp4.559.123.853,00 atau setara dengan 44,00%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang disewa 22 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 3.067 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang didokumentasikan 22 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (13) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp113.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp63.797.137,00 atau setara dengan 54,46%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang

- dipelihara 13 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (14) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.288.130.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.229.902.959,00 atau setara dengan 95,48%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dipelihara 11 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dipelihara 7 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (15) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.114.949.124,00 dan realisasi sebesar Rp4.674.438.701,00 atau setara dengan 91,39%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan/dihadiri 40.553 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (16) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp197.291.412,00 dan realisasi sebesar Rp194.666.300,00 atau setara dengan 98,67%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang disediakan 1 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (17) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.683.359.532,00 dan realisasi sebesar Rp1.568.296.307,00 atau setara dengan

- 93,16%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang disediakan 24 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (18) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp340.968.456,00 dan realisasi sebesar Rp312.090.800,00 atau setara dengan 91,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dipelihara 21 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (19) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp769.385.000,00 dan realisasi sebesar Rp681.504.950,00 atau setara dengan 88,58%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dipelihara 15 unit; Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dipelihara 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (20) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.648.250,00 dan realisasi sebesar Rp16.762.000,00 atau setara dengan 89,89%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang disediakan 2 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (21) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp540.482.897,00 dan realisasi sebesar Rp533.602.154,00 atau setara dengan 98,73%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang disediakan.

- Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (22) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.608.000,00 dan realisasi sebesar Rp111.840.868,00 atau setara dengan 75,26%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Bogor yang dipelihara 7 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (23) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp179.059.360,00 dan realisasi sebesar Rp162.581.200,00 atau setara dengan 90,80%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dipelihara 50 unit; Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dipelihara 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (24) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.991.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.971.750,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang disediakan 7 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (25) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp302.961.000,00 dan realisasi sebesar Rp286.456.339,00 atau setara dengan 94,55%.

- Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang disediakan 8 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85,00%;
- (26) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp67.071.900,00 atau setara dengan 89,67%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dipelihara 11 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (27) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp855.790.032,00 dan realisasi sebesar Rp837.898.500,00 atau setara dengan 97,91%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dipelihara 37 unit; Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dipelihara 6 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (28) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp548.260.950,00 dan realisasi sebesar Rp499.457.356,00 atau setara dengan 91,10%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang disediakan 11 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (29) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.840.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.440.000,00 atau setara dengan 98,66%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang disediakan

- 3 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (30) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp437.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp366.408.907,00 atau setara dengan 83,67%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang disediakan 6 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang disediakan 24 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (31) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp705.935.665,00 dan realisasi sebesar Rp692.416.144,00 atau setara dengan 98,10%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang disediakan 16 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (32) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.633.680,00 atau setara dengan 82,49%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang disewa 5 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Depok I yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan,00 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kota Depok I yang didokumentasikan 36 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (33) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp108.236.032,00 dan realisasi sebesar Rp72.759.354,00 atau setara dengan 67,22%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dipelihara 13 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (34) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp505.607.500,00 dan realisasi sebesar Rp364.565.374,00 atau setara dengan 72,10%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan/dihadiri 24 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (35) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.919.765,00 dan realisasi sebesar Rp576.203.200,00 atau setara dengan 95,89%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dipelihara 950 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (36) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.756,00 dan realisasi sebesar Rp216.943.813,00 atau setara dengan 86,78%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang disediakan 6 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (37) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.799.030,00 dan realisasi sebesar Rp27.763.040,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang

- disediakan 16 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (38) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp509.145.365,00 dan realisasi sebesar Rp497.147.734,00 atau setara dengan 97,05%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang disediakan 3 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang disediakan 2 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (39) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp620.469.252,00 dan realisasi sebesar Rp591.981.000,00 atau setara dengan 95,41%. *Output* kegiatan adalah dana; SDM; Sarana dan Prasarana; Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah Persentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (40) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp67.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp63.850.000,00 atau setara dengan 94,94%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang disewa 1 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang didokumentasikan 30 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (41) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II

- Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp107.220.500,00 atau setara dengan 97,85%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dipelihara 14 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase sarana daan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (42) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp478.060.200,00 dan realisasi sebesar Rp457.869.075,00 atau setara dengan 95,78%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan/dihadiri 4 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (43) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp433.172.600,00 dan realisasi sebesar Rp405.552.925,00 atau setara dengan 93,62%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dipelihara 112 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dipelihara 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase sarana daan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (44) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp818.695.067,00 dan realisasi sebesar Rp685.380.300,00 atau setara dengan 83,72%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang

- dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (45) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.718.748,00 dan realisasi sebesar Rp44.080.600,00 atau setara dengan 92,38%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang disediakan 349 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (46) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp381.238.665,00 dan realisasi sebesar Rp340.295.886,00 atau setara dengan 89,26%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang disediakan 7 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang disediakan 30 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (47) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp356.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp341.500.000,00 atau setara dengan 95,93%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang disewa 2 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang didokumentasikan 48 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit nkerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;

- (48) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp626.984.600,00 dan realisasi sebesar Rp483.378.450,00 atau setara dengan 71,51%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan/dihadiri 24 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (49) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp281.375.300,00 dan realisasi sebesar Rp256.399.159,00 atau setara dengan 91,12%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang disediakan 8 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (50) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.489.800,00 dan realisasi sebesar Rp83.661.627,00 atau setara dengan 95,62%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dipelihara 15 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (51) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.733.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.156.374,00 atau setara dengan 42,23%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dipelihara 41 unit; Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dipelihara 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;

- (52) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp380.063.805,00 dan realisasi sebesar Rp341.975.750,00 atau setara dengan 88,98%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang disediakan 101 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (53) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp462.665.750,00 dan realisasi sebesar Rp449.558.391,00 atau setara dengan 97,17%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang disediakan 3 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang disediakan 8 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (54) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.716.883,00 dan realisasi sebesar Rp19.668.200,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang disediakan 57 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (55) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp242.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp242.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang disewa 2 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Bogor yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 1 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D

- Wilayah Kota Bogor yang didokumentasikan 12 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (56) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp312.484.250,00 dan realisasi sebesar Rp253.546.550,00 atau setara dengan 81,14%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan/dihadiri 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (57) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.615.570,00 dan realisasi sebesar Rp497.305.135,00 atau setara dengan 99,54%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang disediakan 9 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (58) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp133.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp125.713.429,00 atau setara dengan 94,52%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dipelihara 12 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (59) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp765.559.728,00 dan realisasi sebesar Rp541.925.000,00 atau setara dengan 70,79%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dipelihara 10 unit,. *Outcome* kegiatan adalah Persentase dana; SDM; Sarana dan Prasarana; Peraturan;

- (60) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp69.797.000,00 atau setara dengan 98,89%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang disediakan 656 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (61) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp863.680.960,00 dan realisasi sebesar Rp861.540.660,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang disediakan 13 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (62) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp67.422.500,00 atau setara dengan 38,84%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dipelihara 17 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (63) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.384.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.520.615.200,00 atau setara dengan 74,47%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang disediakan 152 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang disewa 77 kali 3.Jumlah Pakaian Aparatur Badan Pendapatan Daerah

- Provinsi Jawa Barat 1760 stel. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Badan Pendapatan Daerah 67%;
- (64) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp348.560.000,00 dan realisasi sebesar Rp245.739.250,00 atau setara dengan 70,50%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dipelihara 82 unit; Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dipelihara 4 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (65) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp389.649.000,00 dan realisasi sebesar Rp361.431.800,00 atau setara dengan 92,76%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang disediakan 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (66) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.413.565.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.138.940.693,00 atau setara dengan 91,95%. *Output* kegiatan adalah Jumlah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti Diklat/Kursus Singkat/Bimtek 377 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Badan Pendapatan Daerah 67%;
- (67) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp248.312.480,00 dan realisasi sebesar Rp240.140.290,00 atau setara dengan 96,71%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang disediakan 1 kegiatan; Jumlah Tenaga

- Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang disediakan 2 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (68) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp29.750.000,00 atau setara dengan 99,17%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang disewa; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Sukabumi yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kota Sukabumi yang didokumentasikan 4 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (69) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian P3D Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.700.000,00 atau setara dengan 60,88%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 23 kali; Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 11 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (70) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp396.344.600,00 dan realisasi sebesar Rp395.474.549,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan/dihadiri 191 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (71) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah

- Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.864.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.408.000,00 atau setara dengan 98,80%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang disediakan 5 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (72) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp572.608.903,00 dan realisasi sebesar Rp565.431.377,00 atau setara dengan 98,75%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang disediakan 10 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (73) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp411.739.747,00 dan realisasi sebesar Rp385.370.050,00 atau setara dengan 93,60%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (74) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp110.729.966,00 atau setara dengan 96,26%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dipelihara 15 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;

- (75) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp360.019.349,00 dan realisasi sebesar Rp355.734.021,00 atau setara dengan 98,81%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang disediakan 4 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang disediakan 6 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (76) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp501.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp493.584.600,00 atau setara dengan 98,36%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dipelihara 15 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dipelihara 5 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (77) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp64.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp63.950.000,00 atau setara dengan 99,61%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang disewa 6 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadakyang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 12 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadakyang didokumentasikan 80 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;

- (78) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp450.883.000,00 dan realisasi sebesar Rp400.637.700,00 atau setara dengan 88,86%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan/dihadiri 96 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (79) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.512.200,00 dan realisasi sebesar Rp21.103.500,00 atau setara dengan 79,60%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang disediakan . *Outcome* kegiatan adalah persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (80) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp482.178.784,00 dan realisasi sebesar Rp478.690.704,00 atau setara dengan 98,87%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang disediakan 12 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (81) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.778.667,00 dan realisasi sebesar Rp74.150.972,00 atau setara dengan 82,59%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dipelihara 14 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (82) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah

- Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp576.082.213,00 dan realisasi sebesar Rp563.844.000,00 atau setara dengan 97,88%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dipelihara 18 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dipelihara 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (83) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp201.958.280,00 dan realisasi sebesar Rp192.961.635,00 atau setara dengan 95,55%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang disediakan 8 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (84) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp268.379.424,00 dan realisasi sebesar Rp264.159.400,00 atau setara dengan 98,43%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang disediakan 4 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang disediakan 7 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (85) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.000.000,00 atau setara dengan 97,96%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang disewa 2 unit 2.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan

- Ratu yang didokumentasikan 8 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (86) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.945.600,00 dan realisasi sebesar Rp355.000.077,00 atau setara dengan 88,76%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan/dihadiri 23 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (87) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp64000.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.000.000,00 atau setara dengan 71,88%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 52 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana yang disewa 22 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (88) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.050.000,00 atau setara dengan 66,79%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 52 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana yang disewa 22 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (89) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.730.000,00 dan realisasi sebesar Rp32.900.000,00 atau setara dengan 97,54%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang

- disediakan 24 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana yang disewa 48 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (90) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.540.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.100.000,00 atau setara dengan 72,19%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 2 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana yang disewa 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (91) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp358.937.624,00 dan realisasi sebesar Rp320.853.461,00 atau setara dengan 89,39%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang disediakan 12 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (92) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.662.604,00 dan realisasi sebesar Rp135.504.400,00 atau setara dengan 93,03%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang disediakan 5 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang disediakan 4 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (93) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp242.180.000,00 dan realisasi sebesar Rp109.699.741,00 atau setara dengan 45,30%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah

- Kabupaten Cianjur yang disewa 4 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 6 titik iklan; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang didokumentasikan 20 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (94) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.115.000,00 dan realisasi sebesar Rp176.247.018,00 atau setara dengan 97,85%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan/dihadiri 140 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (95) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp418.959.150,00 dan realisasi sebesar Rp407.043.659,00 atau setara dengan 97,16%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang disediakan 4 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (96) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp566.668.280,00 dan realisasi sebesar Rp552.978.147,00 atau setara dengan 97,58%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang disediakan 2 kegiatan,00 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang disediakan 4 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (97) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi

- yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp211.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp211.197.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang disewa 3 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Bekasi yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 12 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kota Bekasi yang didokumentasikan 100 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (98) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp351.863.150,00 dan realisasi sebesar Rp339.884.843,00 atau setara dengan 96,60%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan/dihadiri 96 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (99) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.500.000,00 atau setara dengan 64,05%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 36 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (100) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.992.050,00 dan realisasi sebesar Rp47.316.000,00 atau setara dengan 96,58%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang disediakan 54 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;

- (101) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp480.035.831,00 dan realisasi sebesar Rp463.063.141,00 atau setara dengan 96,46%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang disediakan 14 Orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon 85%;
- (102) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp104.293.000,00 dan realisasi sebesar Rp36.794.754,00 atau setara dengan 35,28%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang dipelihara 12 Unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon 85%;
- (103) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp427.411.839,00 dan realisasi sebesar Rp417.053.026,00 atau setara dengan 97,58%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang dipelihara 80 Unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang dipelihara 4 Kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D di Wilayah Kota Cirebon 85%;
- (104) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp472.991.636,00 dan realisasi sebesar Rp455.984.400,00 atau setara dengan 96,40%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang disediakan 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;

- (105) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.537.500,00 atau setara dengan 99,91%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang disediakan 8 Unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D di Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 85%;
- (106) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp444.002.624,00 dan realisasi sebesar Rp442.531.800,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang disediakan 2 kegiatan 2. Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang disediakan 8 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (107) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp848.069.780,00 dan realisasi sebesar Rp732.211.308,00 atau setara dengan 86,34%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Lingkup UPTD P3D di Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang disediakan 15 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 85%;
- (108) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp210.000.000,00 atau setara dengan 42,00%. *Output* kegiatan adalah Jumlah

- Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang disewa 4 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 270 aktivitas; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang didokumentasikan 15 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (109) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp91.318.840,00 dan realisasi sebesar Rp68.519.294,00 atau setara dengan 75,03%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dipelihara 14 Unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 85%;
- (110) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp394.060.000,00 dan realisasi sebesar Rp389.493.274,00 atau setara dengan 98,84%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan/dihadiri 220 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (111) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp833.909.000,00 dan realisasi sebesar Rp748.010.996,00 atau setara dengan 89,70%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dipelihara 40 Unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dipelihara 3 Kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase

- Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 85%;
- (112) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp402.367.830,00 dan realisasi sebesar Rp336.525.306,00 atau setara dengan 83,64%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang disediakan 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (113) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.693.000,00 dan realisasi sebesar Rp33.223.000,00 atau setara dengan 98,61%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang disediakan 54 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 85%;
- (114) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp495.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp483.238.162,00 atau setara dengan 97,62%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang disediakan 3 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang disediakan 9 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (115) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp456.243.423,00 dan realisasi sebesar Rp440.376.056,00 atau setara dengan 96,52%.

- Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang disediakan 12 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 85%;
- (116) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp476.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp406.625.453,00 atau setara dengan 85,91%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang disewa 3 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 7 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang didokumentasikan 1 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (117) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp53.683.500,00 dan realisasi sebesar Rp37.588.500,00 atau setara dengan 70,02%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Kantor UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dipelihara 14 Unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 85%;
- (118) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp402.362.500,00 dan realisasi sebesar Rp348.332.010,00 atau setara dengan 86,57%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan/dihadiri 6 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja

- yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (119) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp858.113.500,00 dan realisasi sebesar Rp802.169.812,00 atau setara dengan 93,48%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dipelihara 50 Unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dipelihara 4 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 85%;
- (120) Kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Kerja, *Outbond* dan Sepatu Olah Raga P3D Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.900.000,00 atau setara dengan 99,50%. *Output* kegiatan adalah Jumlah ASN Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cianjur yang mengikuti 15 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (121) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 11 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (122) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp404.413.500,00 dan realisasi sebesar Rp369.325.400,00 atau setara dengan 91,32%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dipelihara. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (123) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.273.000,00 atau setara dengan 76,66%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 2 kali 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (124) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.750.000,00 atau setara dengan 78,70%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 80 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (125) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp520.273.349,00 dan realisasi sebesar Rp504.495.150,00 atau setara dengan 96,67%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang disediakan 6 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang disediakan 2 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja

- yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (126) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakartayang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp111.932.500,00 atau setara dengan 99,94%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang disewa 1 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 7 titik iklan; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang didokumentasikan 7 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (127) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.510.000,00 dan realisasi sebesar Rp61.250.000,00 atau setara dengan 99,58%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 28 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 28 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (128) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp52.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp52.000.000,00 atau setara dengan 99,05%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang disediakan 3 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (129) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp576.381.400,00 dan realisasi sebesar

- Rp549.002.071,00 atau setara dengan 95,25%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan/dihadiri 14 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (130) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.350.000,00 atau setara dengan 86,67%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 4 kali 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (131) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp22.150.000,00 atau setara dengan 67,63%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kegiatan kerohanian 24 kali, instruktur senam 44 kali, sewa lapangan Bulu tangkis 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya Kesehatan Jasmani dan Rohani 100%;
- (132) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp225.720.500,00 atau setara dengan 99,57%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang disediakan 5 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (133) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp113.589.200,00 dan realisasi sebesar Rp98.842.019,00 atau setara dengan 87,02%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan

- Dinas P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dipelihara 15 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (134) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp808.517.078,00 dan realisasi sebesar Rp784.963.000,00 atau setara dengan 97,09%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dipelihara 111 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dipelihara 3 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (135) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga Lingkup UPTD P3D yang disediakan 12 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di UPTD P3D Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 67%;
- (136) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp66.115.500,00 atau setara dengan 96,87%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang disediakan 57 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (137) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp578.286.021,00 dan realisasi sebesar Rp507.988.679,00 atau setara dengan 87,84%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang disediakan 8 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (138) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.769.600,00 dan realisasi sebesar Rp62.411.167,00 atau setara dengan 52,11%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dipelihara 13 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (139) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.804.978,00 dan realisasi sebesar Rp332.566.922,00 atau setara dengan 94,80%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dipelihara 10 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (140) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp650.756.000,00 dan realisasi sebesar Rp618.802.571,00 atau setara dengan 95,09%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dipelihara 50 unit; Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dipelihara. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (141) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.506.160,00 dan

- realisasi sebesar Rp245.490.786,00 atau setara dengan 98,39%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang disediakan 10 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang disediakan 1 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (142) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.612.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.500.000,00 atau setara dengan 99,70%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang disediakan 41 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (143) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp108.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp104.700.000,00 atau setara dengan 96,14%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang disewa 3 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Subang yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 8 titik iklan 3. Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Subang yang didokumentasikan 12 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (144) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp472.925.999,00 dan realisasi sebesar Rp470.902.600,00 atau setara dengan 99,57%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang disediakan 16 orang.

- Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (145) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp151.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.805.250,00 atau setara dengan 31,00%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dipelihara 8 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (146) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.550.600,00 dan realisasi sebesar Rp293.992.500,00 atau setara dengan 98,14%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Subang yang dilaksanakan/dihadiri 58 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (147) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp737.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp492.446.113,00 atau setara dengan 66,79%. *Output* kegiatan adalah 1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dipelihara 10 unit 2. Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dipelihara 8 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (148) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp326.264.029,00 dan realisasi sebesar Rp294.822.568,00 atau setara dengan 90,36%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang disediakan 8 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Unit Kerja

- Administrasi Perkantoran di UPTD P3D Wilayah kota Cirebon 100%;
- (149) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp294.598.918,00 dan realisasi sebesar Rp269.206.259,00 atau setara dengan 91,38%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang disediakan 3 kegiatan, Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang disediakan 5 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Administrasi Perkantoran di UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon 100%;
- (150) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp174.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp160.490.000,00 atau setara dengan 92,24%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang disewa 2 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang didokumentasikan 73 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Unit Kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran di UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon 100%;
- (151) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp420.067.300,00 dan realisasi sebesar Rp366.109.373,00 atau setara dengan 87,15%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan/dihadiri 60 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon 100%;

- (152) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.937.500,00 dan realisasi sebesar Rp97.191.600,00 atau setara dengan 99,24%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang disediakan 15 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (153) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.550.000,00 atau setara dengan 94,38%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 48 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (154) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.800.000,00 atau setara dengan 90,00%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 2 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 10 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (155) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.050.000,00 atau setara dengan 37,66%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 44 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;

- (156) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.150.000,00 atau setara dengan 55,89%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan; Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya Tingkat Kesehatan Jasmani dan Rohani Aparatur 100%;
- (157) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp519.089.810,00 dan realisasi sebesar Rp505.236.579,00 atau setara dengan 97,33%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang disediakan 18 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (158) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.450.000,00 atau setara dengan 68,08%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (159) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp44.925.000,00 atau setara dengan 99,83%. *Output* kegiatan adalah Jumlah

- Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan, Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 24 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (160) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp76.958.800,00 dan realisasi sebesar Rp27.470.890,00 atau setara dengan 35,70%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dipelihara. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (161) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp575.298.448,00 dan realisasi sebesar Rp562.843.000,00 atau setara dengan 97,83%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dipelihara 91 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dipelihara 3 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (162) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.530.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.300.000,00 atau setara dengan 69,90%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 2 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 96 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;

- (163) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.926.600,00 dan realisasi sebesar Rp33.766.770,00 atau setara dengan 93,99%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang disediakan 520 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (164) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp709.942.117,00 dan realisasi sebesar Rp699.028.637,00 atau setara dengan 98,46%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang disediakan 15 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (165) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan, Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (166) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.502.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.794.405,00 atau setara dengan 74,92%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dipelihara 12 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (167) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan

- Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp321.590.000,00 dan realisasi sebesar Rp308.830.278,00 atau setara dengan 96,03%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dipelihara, Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dipelihara 362 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (168) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.400.000,00 atau setara dengan 92,86%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan, Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (169) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp273.991.015,00 dan realisasi sebesar Rp194.875.000,00 atau setara dengan 71,12%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang disediakan 3 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (170) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp737.094.625,00 dan realisasi sebesar Rp682.971.775,00 atau setara dengan 92,66%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang disediakan 12 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (171) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp112.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp80.212.000,00 atau setara dengan 71,43%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dipelihara 18 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (172) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.444.108.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.409.243.348,00 atau setara dengan 97,59%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dipelihara 64 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dipelihara 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (173) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.569.200,00 dan realisasi sebesar Rp33.066.745,00 atau setara dengan 98,50%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang disediakan 744 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (174) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp560.135.472,00 dan realisasi sebesar Rp538.688.151,00 atau setara dengan 96,17%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang disediakan 19 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (175) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp151.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp144.225.076,00 atau setara dengan 95,01%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dipelihara 13 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (176) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.768.753.512,00 dan realisasi sebesar Rp1.727.026.513,00 atau setara dengan 97,64%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dipelihara 225 unit; Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dipelihara 7 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (177) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp51.400.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 92 kali 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 4 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (178) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.080.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.439.000,00 atau setara dengan 76,57%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang disediakan 700 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (179) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp567.305.190,00 dan realisasi sebesar Rp537.014.687,00 atau setara dengan 94,66%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang disediakan 12 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (180) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp147.711.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.587.974,00 atau setara dengan 67,42%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dipelihara 17 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (181) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.764.892.011,00 dan realisasi sebesar Rp1.742.716.288,00 atau setara dengan 98,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dipelihara 112 unit 2. Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dipelihara 7 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (182) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.499.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.499.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang disediakan 1.031 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (183) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp277.724.691,00 dan realisasi sebesar

- Rp260.952.336,00 atau setara dengan 93,96%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang disediakan 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Unit Kerja yang dapat pelayanan administrasi perkantoran di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 100%;
- (184) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp42.500.000,00 atau setara dengan 83,99%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 1 tahun 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah Persentase terwujudnya profesionalisme dan keterampilan aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 100%;
- (185) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp22.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp22.750.000,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah (1) Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 1 tahun; (2) Instruktur senam 1 tahun; (3) Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya profesionalisme dan keterampilan aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (186) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp301.412.480,00 dan realisasi sebesar Rp274.402.174,00 atau setara dengan 91,04%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang disediakan 3 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon

- I Sumber yang disediakan 14 Orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Unit Kerja yang dapat pelayanan administrasi perkantoran di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 100%;
- (187) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp578.296.991,00 dan realisasi sebesar Rp561.809.343,00 atau setara dengan 97,15%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang disediakan 11 orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (188) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.180.000,00 atau setara dengan 92,00%. *Output* kegiatan adalah Honorarium narasumber atau penceramah 50 kali perminggu. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keagamaan aparatur P3D dan WP 100%;
- (189) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp118.605.905,00 atau setara dengan 98,36%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dipelihara 14 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (190) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.300.000,00 atau setara dengan 65,85%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 8 kali; Jumlah Sarana

- dan Prasarana Olahraga yang disewa 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (191) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp396.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp376.120.000,00 atau setara dengan 94,83%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang disewa 3 Unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 2 titik Iklan,00 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang didokumentasikan 30 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Unit Kerja yang dapat pelayanan administrasi perkantoran di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 100%;
- (192) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.750.000,00 atau setara dengan 92,50%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 1 tahun 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah Persentase terfasilitasinya peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur 100%;
- (193) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp446.313.350,00 dan realisasi sebesar Rp410.809.046,00 atau setara dengan 92,04%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan/dihadiri 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;

- (194) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp269.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp266.834.954,00 atau setara dengan 99,12%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dipelihara 88 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dipelihara 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (195) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.993.140,00 dan realisasi sebesar Rp19.153.100,00 atau setara dengan 95,80%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang disediakan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah Persentase terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (196) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp723.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp711.939.263,00 atau setara dengan 98,43%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah Persentase terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (197) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp184.062.897,00 dan realisasi sebesar Rp170.071.748,00 atau setara dengan 92,40%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan operasional kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug melalui kebutuhan ATK, Materai, Cetakan, Penjilidan, BBM/Gas, Pengisian tabung Gas dan Suvenir untuk wajib

- Pajak. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 100%;
- (198) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.824.755,00 dan realisasi sebesar Rp147.052.300,00 atau setara dengan 95,60%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang disediakan 7 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor Lingkup UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang disediakan 5 orang. *Outcome* kegiatan adalah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD P3D Wilayah Kabupaten Cirebon li Ciledug 100%;
- (199) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang disewa 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang didokumentasikan. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap daerah 90%, tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (200) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.460.000,00 dan

- realisasi sebesar Rp261.631.975,00 atau setara dengan 87,37%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar kantor P3D Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan/dihadiri 117 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (201) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.000.000,00 atau setara dengan 96,55%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 24 kali; Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 48 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (202) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp144.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp47.500.000,00 atau setara dengan 32,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah penceramah keagamaan dan instruktur olahraga yang disediakan 48 kali, Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewa 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (203) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.104.959,00 atau setara dengan 48,20%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya belanja surat tanda nomor kendaraan; Terfasilitasinya belanja servis kendaraan bermotor dan belanja pelumas 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (204) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan

- alokasi anggaran sebesar Rp231.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp172.153.000,00 atau setara dengan 74,36%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya pemeliharaan bangunan air; Terfasilitasinya pemeliharaan instalasi jaringan; Terfasilitasinya pemeliharaan bangunan bukan gedung; Terfasilitasinya pemeliharaan peralatan lainnya; Terfasilitasinya pemeliharaan alat studio; Terfasilitasinya pemeliharaan perangkat lainnya 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (205) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.422.740,00 dan realisasi sebesar Rp71.033.600,00 atau setara dengan 71,45%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap daerah 90%, tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (206) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp55.800.000,00 atau setara dengan 93,00%. *Output* kegiatan adalah jumlah penceramah keagamaan dan instruktur olahraga yang disediakan 72 kali, *Outcome* kegiatan adalah tingkat kompetensi dan kinerja aparatur 67%;
- (207) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.800.000,00 atau setara dengan 64,29%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Penceramah Keagamaan dan Instruktur Olahraga yang disediakan 16 kali; Jumlah Sarana dan

- Prasarana Olahraga yang disewa 8 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase asn yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (208) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp420.199.775,00 dan realisasi sebesar Rp390.672.343,00 atau setara dengan 92,97%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang habis pakai kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang disediakan 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (209) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp557.833.550,00 dan realisasi sebesar Rp543.087.840,00 atau setara dengan 97,36%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang disediakan 3 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang disediakan 15 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (210) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.930.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.930.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor Kabupaten Indramayu I yang disewa; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat Kabupaten Indramayu I yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup Kabupaten Indramayu I yang didokumentasikan. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, tingkat pemenuhan

- operasional perangkat daerah lingkup badan pendapatan daerah 100%;
- (211) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp419.863.600,00 dan realisasi sebesar Rp376.153.250,00 atau setara dengan 89,59%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan/dihadiri 360 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (212) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp964.125.480,00 dan realisasi sebesar Rp935.767.143,00 atau setara dengan 97,06%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Personil Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup badan pendapatan daerah 70%, jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap daerah 90%, tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (213) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp476.550.262,00 dan realisasi sebesar Rp393.159.000,00 atau setara dengan 82,50%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang habis pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang disediakan 9 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (214) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp76.700.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp42.406.051,00 atau setara dengan 55,29%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (215) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp361.932.480,00 dan realisasi sebesar Rp309.560.700,00 atau setara dengan 85,53%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang disediakan 7 kegiatan,00 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang disediakan 8 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (216) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp56.650.000,00 atau setara dengan 77,29%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang disewa 3 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 270 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang didokumentasikan 15 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (217) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp428.239.950,00 dan realisasi sebesar Rp378.151.250,00 atau setara

- dengan 88.30%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan/dihadiri 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (218) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp442.260.000,00 dan realisasi sebesar Rp329.469.652,00 atau setara dengan 74,50%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang disediakan 7 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (219) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp279.591.334,00 dan realisasi sebesar Rp256.359.212,00 atau setara dengan 91,69%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang disediakan 3 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang disediakan 8 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (220) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.700.000,00 atau setara dengan 81,67%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang disewa 5 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang didokumentasikan 2 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;

- (221) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp437.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp313.440.510,00 atau setara dengan 71,73%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar kantor P3D Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan/dihadiri 120 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (222) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp438.300.359,00 dan realisasi sebesar Rp346.144.398,00 atau setara dengan 78,97%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang habis pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang disediakan 12 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (223) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp79.780.000,00 atau setara dengan 97,29%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang atau jasa 1 kegiatan, alat listrik dan elektronik 1 paket, pengisian tabung pemadam kebakaran (APAR) 6 Tabung. *Outcome* kegiatan adalah sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (224) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp340.620.000,00 dan realisasi sebesar Rp339.931.064,00 atau setara dengan 99,80%. *Output* kegiatan adalah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4 triwulan, jasa kebersihan 1 tahun, jasa kamanan 1 tahun, pengendalian hama (Pest control) fumigasi 1 kegiatan, pakaian kerja lapangan 24 stel. *Outcome* kegiatan adalah sarana prasarana

- untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (225) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp40.641.032,00 atau setara dengan 89,60%. *Output* kegiatan adalah perpanjangan STNK 1 tahun, jasa servis kendaraan dinas 1 tahun, pelumasa 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (226) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp740.526.458,00 dan realisasi sebesar Rp727.171.992,00 atau setara dengan 98,20%. *Output* kegiatan adalah honorarium pengadaan barang atau jasa 10 kegiatan, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan 6 paket, pemeliharaan komputer 1 tahun, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun, pemeliharaan alat studio atau alat komunikasi 1 tahun, pemeliharaan gedung dan bangunan 3 paket, pemeliharaan instalasi jaringan 1 kegiatan, pemeliharaan bangunan bukan gedung 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (227) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp316.476.475,00 dan realisasi sebesar Rp257.622.176,00 atau setara dengan 81,40%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang disediakan 13 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang disediakan 7 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (228) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah

- Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.991.435,00 dan realisasi sebesar Rp56.031.000,00 atau setara dengan 80,05%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pendukung fasilitas kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang disediakan 120 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (229) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang disewa 1 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 5 titik iklan; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang didokumentasikan 9 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (230) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp414.475.968,00 dan realisasi sebesar Rp399.894.994,00 atau setara dengan 96,48%. *Output* kegiatan adalah jumlah personil jasa keamanan dan kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang disediakan 156 orang, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun, pemeliharaan ruang arsip 1 tahun, belanja pakaian kerja lapangan 24 stel. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (231) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp367.836.600,00 dan realisasi sebesar Rp305.333.471,00 atau setara dengan 83,01%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal

- dan luar kantor P3D Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan/dihadiri 24 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (232) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp107.912.000,00 dan realisasi sebesar Rp55.761.500,00 atau setara dengan 51,67%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dipelihara 16 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (233) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp365.448.000,00 dan realisasi sebesar Rp357.900.000,00 atau setara dengan 97,93%. *Output* kegiatan adalah Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor 1 kegiatan; Pemeliharaan gedung dan bangunan mess 1 kegiatan; Pemeliharaan halaman/taman/pekarangan 1 kegiatan; Pemeliharaan komputer SAMSAT 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (234) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp411.140.275,00 dan realisasi sebesar Rp397.560.238,00 atau setara dengan 96,70%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang disediakan 8 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (235) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp566.906.457,00 dan realisasi sebesar Rp499.767.454,00 atau setara dengan 88,31%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kota

- Bandung I Pajajaran yang disediakan 17 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang disediakan 12 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (236) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.320.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.220.000,00 atau setara dengan 99,45%. *Output* kegiatan adalah dana; SDM; Sarana dan Prasarana; Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (237) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp509.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp501.211.849,00 atau setara dengan 98,47%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang disewa 9 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 7 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang didokumentasikan 12 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (238) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp194.439.500,00 dan realisasi sebesar Rp181.692.201,00 atau setara dengan 93,44%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar kantor P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan/dihadiri 48 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;

- (239) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp506.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp497.259.500,00 atau setara dengan 98,23%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang disediakan 5 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (240) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp549.548.271,00 dan realisasi sebesar Rp528.882.369,00 atau setara dengan 96,24%. *Output* kegiatan adalah dana; SDM; Sarana dan Prasarana; Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (241) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp603.300.270,00 dan realisasi sebesar Rp581.770.582,00 atau setara dengan 96,43%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang disediakan 3 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang disediakan 4 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (242) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp423.130.000,00 dan realisasi sebesar Rp384.499.500,00 atau setara dengan 90,63%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang disewa 2 unit 2.Jumlah

- Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 12 titik iklan 3. Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang didokumentasikan 65 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (243) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.596.400,00 dan realisasi sebesar Rp138.061.000,00 atau setara dengan 88,73%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar kantor P3D Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang dilaksanakan/dihadiri 22 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (244) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp215.714.584,00 dan realisasi sebesar Rp202.142.000,00 atau setara dengan 93,71%. *Output* kegiatan adalah dana SDM Sarana dan Prasarana Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (245) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp404.283.668,00 dan realisasi sebesar Rp364.686.226,00 atau setara dengan 90,21%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang disediakan 7 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (246) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan

- alokasi anggaran sebesar Rp396.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp392.602.235,00 atau setara dengan 98,94%. *Output* kegiatan adalah dana; SDM; Sarana dan Prasarana; Peraturan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 90%;
- (247) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp363.820.631,00 dan realisasi sebesar Rp355.714.666,00 atau setara dengan 97,77%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang disediakan 9 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang disediakan 3 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (248) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp187.907.750,00 dan realisasi sebesar Rp184.592.000,00 atau setara dengan 98,24%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang disewa 2 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang didokumentasikan 36 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (249) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.145.050,00 dan realisasi sebesar Rp192.270.701,00 atau setara dengan 96,07%. *Output* kegiatan adalah Jumlah

- rapat internal dan luar kantor P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan/dihadiri 35 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (250) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.386.875,00 dan realisasi sebesar Rp17.263.500,00 atau setara dengan 99,29%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pendukung fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang disediakan 283 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (251) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp312.040.000,00 dan realisasi sebesar Rp302.894.384,00 atau setara dengan 97,07%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang habis pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang disediakan 4 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (252) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp494.893.304,00 dan realisasi sebesar Rp489.208.870,00 atau setara dengan 98,85%. *Output* kegiatan adalah jumlah personil jasa keamanan dan kebersihan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang disediakan 18 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (253) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp260.794.000,00 dan realisasi sebesar Rp235.398.990,00 atau setara dengan 90,26%. *Output* kegiatan adalah jumlah langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat

- yang disediakan 5 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang disediakan 6 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (254) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp151.574.136,00 dan realisasi sebesar Rp131.836.100,00 atau setara dengan 86,98%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dipelihara. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin di setiap Daerah 90%, tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (255) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah jumlah sarana pendukung kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang disewa 1 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang didokumentasikan 30 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (256) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp711.951.000,00 dan realisasi sebesar Rp702.076.500,00 atau setara dengan 98,61%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Peralatan dan

- Perengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dipelihara 925 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dipelihara 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (257) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp165.545.000,00 dan realisasi sebesar Rp164.765.400,00 atau setara dengan 99,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan/dihadiri 12 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (258) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp369.270.000,00 dan realisasi sebesar Rp365.128.830,00 atau setara dengan 98,88%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang disediakan 9 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (259) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp213.320.185,00 dan realisasi sebesar Rp206.146.215,00 atau setara dengan 96,65%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang disediakan 36 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang disediakan 5 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (260) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp68.778.860,00 dan realisasi sebesar Rp68.435.000,00 atau setara dengan 99,50%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pendukung fasilitas kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang disediakan 1.105 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (261) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.225.000,00 atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang disewa 1 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang didokumentasikan 24 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100%;
- (262) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.999.950,00 dan realisasi sebesar Rp290.049.950,00 atau setara dengan 98,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan/dihadiri 24 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (263) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp463.140.700,00 dan realisasi sebesar Rp436.412.571,00 atau setara dengan 94,23%. *Output* kegiatan adalah jumlah personil jasa keamanan dan kebersihan kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang disediakan 13

- orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (264) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp186.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.197.920,00 atau setara dengan 60,32%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dipelihara 157 unit. *Outcome* kegiatan adalah sarana prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (265) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp659.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp627.119.520,00 atau setara dengan 95,07%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dipelihara 95 unit, *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (266) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.710.400,00 atau setara dengan 92,99%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pendukung fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang disediakan 3 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (267) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp433.677.300,00 dan realisasi sebesar Rp324.376.800,00 atau setara dengan 74,80%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya barang habis pakai terdiri dari ATK, perangko, cetak, penggandaan, benda pos lainnya, gas, dan BBM 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah persentase terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan 100%;
- (268) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan

- Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp566.941.677,00 dan realisasi sebesar Rp511.385.403,00 atau setara dengan 90,20%. *Output* kegiatan adalah jumlah personil jasa keamanan dan kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang disediakan 10 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (269) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp528.696.580,00 dan realisasi sebesar Rp519.599.470,00 atau setara dengan 98,28%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang disediakan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Badan Pendapatan Daerah 70%, jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap daerah 90%, tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah 100%;
- (270) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp122.141.000,00 dan realisasi sebesar Rp85.189.500,00 atau setara dengan 69,75%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas P3D Wilayah Kota Cimahi yang dipelihara 13 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (271) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp101.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.470.935,00 atau setara dengan 98,49%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya belanja dokumentasi dan publikasi 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan operasional dasar 100%;

- (272) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp315.982.250,00 dan realisasi sebesar Rp280.881.500,00 atau setara dengan 88,89%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya belanja makanan dan minuman rapat serta air mineral atau galon; terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah PNS provinsi 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan operasional dasar 100%;
- (273) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp271.404.308,00 dan realisasi sebesar Rp214.385.302,00 atau setara dengan 78,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan operasional dasar kantor UPTD P3D Wilayah Kabupaten Sumedang melalui kebutuhan atk, materai, pengisian tabung gas, BBM, dan suvenir 100%. *Outcome* kegiatan adalah kebutuhan operasional dasar kantor UPTD P3D Wilayah Kabupaten Sumedang melalui kebutuhan atk, materai, pengisian tabung gas, BBM, dan suvenir 100%;
- (274) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.073.533.402,00 dan realisasi sebesar Rp1.045.340.000,00 atau setara dengan 97,37%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dipelihara 65 unit; Jumlah Sarana Konstruksi Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dipelihara 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (275) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp390.071.000,00 dan realisasi sebesar Rp345.627.482,00 atau setara dengan 88,61%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan operasional dasar kantor

- UPTD P3D Wilayah Kabupaten Sumedang melalui kebutuhan Langganan air PDAM; Langganan surat kabar; Jasa penerangan atau iklan/reklame; Belanja iuran tahunan; Belanja jasa tenaga kerja nonpegawai; Belanja pakaian kerja lapangan 100%. *Outcome* kegiatan adalah Langganan air PDAM; Langganan surat kabar; Jasa penerangan atau iklan/reklame; Belanja iuran tahunan; Belanja jasa tenaga kerja nonpegawai; Belanja pakaian kerja lapangan 100%;
- (276) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.200.000,00 atau setara dengan 88,00%. *Output* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan operasional dasar kantor UPTD P3D Wilayah Kabupaten Sumedang melalui kebutuhan belanja sewa, publikasi, dan dokumentasi kantor 100%. *Outcome* kegiatan adalah belanja sewa, publikasi, dan dokumentasi kantor 100%;
- (277) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp265.628.900,00 dan realisasi sebesar Rp227.773.750,00 atau setara dengan 85,75%. *Output* kegiatan kebutuhan belanja perjalanan dinas PNS Provinsi 100%. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya kebutuhan operasional dasar kantor UPTD P3D Wilayah Kabupaten Sumedang melalui kebutuhan belanja perjalanan dinas PNS Provinsi 100%;
- (278) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp345.472.000,00 dan realisasi sebesar Rp297.044.650,00 atau setara dengan 85,98%. *Output* kegiatan adalah Honorarium pengadaan barang atau jasa 2 paket, ATK 2 kegiatan, materai 250 buah, BBM atau gas 1 tahun, pengisian tabung gas 1 tahun, souvenir 1 paket, dokumentasi dan publikasi 1 tahun, cetak 1 paket, penggandaan atau fotokopi 40.000 lembar, penjilidan 1 tahun. *Outcome*

- terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (279) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp124.565.000,00 dan realisasi sebesar Rp124.092.527,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan adalah Langganan surat kabar daerah 1 tahun, pajak bumi dan bangunan PBB 1 tahun, jasa tenaga kerja nonpegawai 1 tahun, pakaian kerja lapangan 10 stel. *Outcome* kegiatan adalah sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (280) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.250.000,00 atau setara dengan 76,70%. *Output* kegiatan adalah jasa penerangan jadwal samkel dan samades melalui spanduk 36 kali, sewa gedung untuk samades 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhi kebutuhan dasar operasional 90%;
- (281) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp355.663.690,00 dan realisasi sebesar Rp265.922.100,00 atau setara dengan 74,77%. *Output* kegiatan adalah makanan dan minuman rapat 400 box, minum air mineral atau galon 1 tahun, perjalanan dinas dalam daerah PNS provinsi 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (282) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp423.366.557,00 dan realisasi sebesar Rp332.745.884,00 atau setara dengan 78,60%. *Output* kegiatan adalah Belanja ATK, materai, administrasi bank, pengadaan fotokopi 1 tahun; Belanja tabung gas dan souvenir 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya

- kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (283) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp161.559.410,00 atau setara dengan 93,28%. *Output* kegiatan adalah; Belanja langganan 1 tahun; Belanja surat kabar 24 eksemplar; Belanja jasa nonpegawai 78; Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12 Stel. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (284) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.000.000,00 atau setara dengan 80,95%. *Output* kegiatan adalah Sosialisasi samsat keliling di radio lokal 12 kali; Sosialisasi operasi terpadu tertib KB 4 kali; Dokumentasi dan publikasi 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (285) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp437.793.000,00 dan realisasi sebesar Rp308.078.037,00 atau setara dengan 70,37%. *Output* kegiatan adalah Belanja mamin snack dan snack rapat 1 tahun; Belanja perjalanan dinas 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (286) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp406.979.255,00 dan realisasi sebesar Rp392.098.000,00 atau setara dengan 96,34%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya alat listrik dan elektronik 1 tahun; Terfasilitasinya Bahan Bakar Minyak/Gas 1 tahun;

- Terfasilitasinya ATK 1 tahun; Terfasilitasinya belanja cetak 1 tahun; Terfasilitasinya fotokopi dan penjiwaan 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (287) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp239.500.704,00 dan realisasi sebesar Rp238.421.609,00 atau setara dengan 99,55%. *Output* kegiatan adalah Belanja ATK 1 tahun; Belanja material 1 tahun; Belanja pengisian tabung gas 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (288) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp303.489.925,00 dan realisasi sebesar Rp303.000.000,00 atau setara dengan 99,84%. *Output* kegiatan adalah sewa *outlet* 1 tahun, rumah dinas dan gudang belanja dan publikasi 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (289) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp477.415.500,00 dan realisasi sebesar Rp429.993.750,00 atau setara dengan 90,07%. *Output* kegiatan adalah Belanja perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi 1 tahun; Belanja makan dan *snack* 11 bulan 3. Belanja air mineral galon 11 bulan. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (290) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp267.295.211,00 dan realisasi sebesar

- Rp261.735.734,00 atau setara dengan 97,92%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang habis pakai kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang disediakan 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (291) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp279.921.991,00 dan realisasi sebesar Rp250.937.692,00 atau setara dengan 89,65%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang disediakan 3 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang disediakan 9 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (292) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp104.937.500,00 dan realisasi sebesar Rp104.425.500,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang disewa 3 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang didokumentasikan 30 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (293) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp278.574.250,00 dan realisasi sebesar Rp273.188.250,00 atau setara dengan 98,07%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya belanja makanan dan minuman rapat 420 box; Terfasilitasinya air mineral galon 360 galon; Terfasilitasinya belanja perjalanan dinas lokal

- dalam kota/kabupaten PNS Provinsi 1 tahun; Terfasilitasinya belanja perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (294) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp579.674.069,00 dan realisasi sebesar Rp439.635.387,00 atau setara dengan 75,84%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang habis pakai kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang disediakan 14 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (295) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp192.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp152.652.718,00 atau setara dengan 79,51%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang disediakan 60 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang disediakan 11 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (296) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.975.000,00 atau setara dengan 87,86%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang disewa 73 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang didokumentasikan 40 aktivitas. *Outcome*

- kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (297) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp348.645.822,00 realisasi sebesar Rp324.575.300,00 atau setara dengan 93,10%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang habis pakai kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang disediakan 6 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (298) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp241.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp214.708.705,00 atau setara dengan 88,94%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Langganan Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang disediakan 4 kegiatan; Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang disediakan 5 Orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (299) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.999.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.554.500,00 atau setara dengan 69,31%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang disewa 1 unit; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Cimahi yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 36 titik iklan; Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kota Cimahi yang didokumentasikan 97 aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (300) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp226.547.050,00 dan realisasi sebesar Rp189.276.550,00 atau setara dengan 83,55%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar kantor P3D Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan/dihadiri 21 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (301) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp246.677.230,00 dan realisasi sebesar Rp241.016.720,00 atau setara dengan 97,71%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang habis pakai Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang disediakan 9 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (302) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp257.636.474,00 dan realisasi sebesar Rp230.583.211,00 atau setara dengan 89,50%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya belanja langganan air 12 bulan; Terfasilitasinya belanja langganan surat kabar/majalah 48 ekstempel; Terfasilitasinya belanja pajak 1 tahun; Terfasilitasinya jasa tenaga kerja nonpegawai 13 bulan; Terfasilitasinya belanja pakaian kerja lapangan 12 stel. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 100%;
- (303) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp76.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp70.196.880,00 atau setara dengan 91,19%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Sarana Pendukung Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang disewa 1 unit 2.Jumlah Iklan Layanan Masyarakat P3D Wilayah Kota Banjar yang ditayangkan/disiarkan melalui Media Massa dan/atau Media Luar Ruang 4 titik iklan 3.Jumlah Aktivitas Kedinasan Lingkup P3D Wilayah Kota Banjar yang didokumentasikan 11

- aktivitas. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%;
- (304) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp369.274.000,00 dan realisasi sebesar Rp360.559.492,00 atau setara dengan 97,64%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan/dihadir 32 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (305) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.844.680,00 dan realisasi sebesar Rp76.268.614,00 atau setara dengan 94,34%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pendukung fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang disediakan 396 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (306) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp264.460.000,00 dan realisasi sebesar Rp189.464.499,00 atau setara dengan 71,64%. *Output* kegiatan adalah jumlah barang habis pakai kantor pusat layanan operasional pendapatan daerah yang disediakan 8 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (307) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp782.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp676.296.940,00 atau setara dengan 86,38%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Langganan Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang disediakan 3 kegiatan 2.Jumlah Tenaga Teknis Nonpegawai Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang disediakan 11 orang. *Outcome* kegiatan adalah

- persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 85%;
- (308) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp942.491.254,00 dan realisasi sebesar Rp760.687.100,00 atau setara dengan 80,71%. *Output* kegiatan adalah jumlah rapat internal dan luar Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan/dihadiri 167 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (309) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp477.238.035,00 dan realisasi sebesar Rp468.340.326,00 atau setara dengan 98,14%. *Output* kegiatan adalah jumlah personil jasa keamanan dan kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang disediakan 15 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (310) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.221.000,00 dan realisasi sebesar Rp69.375.500,00 atau setara dengan 94,75%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas P3D Wilayah Kota Banjar yang dipelihara 12 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (311) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.300.000,00 atau setara dengan 98,17%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Banjar yang dipelihara 36 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;

- (312) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp184.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp183.113.070,00 atau setara dengan 99,30%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pendukung fasilitas kantor pusat layanan operasional pendapatan daerah yang disediakan 73 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasana dalam kondisi baik 85%;
- (313) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp458.370.000,00 dan realisasi sebesar Rp410.462.388,00 atau setara dengan 89,55%. *Output* kegiatan adalah jumlah personil jasa keamanan dan kebersihan Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang disediakan 8 orang. *Outcome* kegiatan persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (314) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp134.625.600,00 dan realisasi sebesar Rp110.489.562,00 atau setara dengan 82,07%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas kantor pusat layanan operasional pendapatan daerah yang dipelihara 13 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasana dalam kondisi baik 85%;
- (315) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp597.481.000,00 dan realisasi sebesar Rp544.959.120,00 atau setara dengan 91,21%. *Output* kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor pusat layanan operasional Pendapatan Daerah yang dipelihara 136 unit 2.jumlah sarana konstruksi kantor pusat layanan operasional Pendapatan Daerah yang dipelihara 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasana dalam kondisi baik 85%;

- (316) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.936.438.027,00 dan realisasi sebesar Rp6.140.497.285,00 atau setara dengan 88,53%. *Output* kegiatan adalah 1.Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dipelihara 4.063 unit 2.Jumlah Sarana Konstruksi KantorBadan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dipelihara 14 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Badan Pendapatan Daerah 85%;
- (317) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.793.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.435.722,00 atau setara dengan 97,77%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat pendukung fasilitas Kantor P3D Wilayah P3D Wilayah Kota Bekasi yang disediakan 15 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (318) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Beserta Peralatannya di P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.623.892.624,00 dan realisasi sebesar Rp1.622.244.767,00 atau setara dengan 99,90%. *Output* kegiatan adalah jumlah personil jasa keamanan dan kebersihan Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang disediakan 12 orang. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (319) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp102.385.800,00 dan realisasi sebesar Rp84.024.655,00 atau setara dengan 82,07%. *Output* kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas P3D Wilayah Kota Bekasi yang dipelihara 13 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;

- (320) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.435.308.617,00 dan realisasi sebesar Rp2.377.647.568,00 atau setara dengan 97,63%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor P3D Wilayah Kota Bekasi yang dipelihara 120 unit. *Outcome* kegiatan adalah persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 85%;
- (321) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp582.990.850,00 dan realisasi sebesar Rp540.120.792,00 atau setara dengan 92,65%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Internal dan Luar Kantor P3D Wilayah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan/dihadiri 558 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%;
- (322) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.067.500,00 atau setara dengan 70,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah penceramah keagamaan dan instruktur olahraga lingkup Badan Pendapatan Daerah yang disediakan 46 kali 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang disewa 16 kali. *Outcome* kegiatan adalah persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 67%.

2) Permasalahan dan Solusi Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

a. Permasalahan

- (1) Masih banyak aset/tanah yang belum tersertifikasi;
- (2) Masih adanya sengketa aset.

b. Solusi

- (1) Dengan masih banyaknya aset/tanah yang belum tersertifikasi solusinya yakni membuat MOU dengan BPN agar dapat mengakselerasi percepatan sertifikasi aset;
- (2) Untuk mengatasi sengketa aset solusinya yakni membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Aset.

35. Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan penunjang Urusan Pemerintahan untuk Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019 adalah Indeks Merit Sistem dengan Capaian sebesar 277 poin dari target yang ditetapkan sebesar 294 poin dan Indeks Profesionalisme ASN dengan realisasi sebesar 76% dari target sebesar 64,50%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Kompetensi Aparatur yakni tingkat kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan capaian sebesar 98,52% dari target sebesar 36%. Alokasi anggaran Program Pengembangan Kompetensi Aparatur adalah sebesar Rp40.064.823.124,00 dengan realisasi sebesar Rp27.049.853.943,00 atau setara dengan 67,52%.

- (1) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi se-Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp299.999.916,00 dan realisasi Rp283.766.800,00 atau setara dengan 94,59%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi se-Jawa Barat 60 orang perwakilan dari 27 Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Pengembangan Kepribadian Aparatur (*Aparatur Personality Development Training*) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp324.850.000,00 dan realisasi Rp262.959.546,00 atau setara dengan 80,95%. *Output* kegiatan adalah lulusnya 720 orang yang terfasilitasi mengikuti pengembangan kepribadian aparatur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Manajemen Konflik (*Conflic Management*) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp324.720.000,00 dan realisasi Rp271.827.575,00 atau setara dengan 83,71%. *Output* kegiatan adalah lulusnya 720 orang yang

- terfasilitasi mengikuti manajemen konflik. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Penerbitan majalah informasi, majalah karya tulis ilmiah dan E-jurnal yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp399.997.799,00 dan realisasi Rp395.505.269,00 atau setara dengan 98,88%. *Output* kegiatan adalah 20 karya tulis ilmiah dan tulisan berita. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (5) Kegiatan Pengelolaan laboratorium komputer dan perpustakaan dan *E-Library* sebagai sumber belajar yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.935.338,00 dan realisasi Rp169.673.558,00 atau setara dengan 84,86%. *Output* kegiatan adalah pengelolaan 2 laboratorium dan perpustakaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (6) Kegiatan Pengelolaan lembaga sertifikasi propesi pmda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp273.341.864,00 dan realisasi Rp272.821.480,00 atau setara dengan 99,81%. *Output* kegiatan adalah terbentuknya lembaga sertifikasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (7) Kegiatan Uji kompetensi sertifikasi ASN bidang pemerintahan dan teknis yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp2.157.449.930,00 dan realisasi Rp2.120.468.581,00 atau setara dengan 98,29%. *Output* kegiatan adalah 200 orang ASN yang terfasilitasi uji keahlian kompetensi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (8) Kegiatan Analisis kesenjangan (GAP) kompetensi PNS pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp392.890.926,00 atau setara dengan 98,22%. *Output* kegiatan adalah Terselenggaranya analisis kesenjangan kompetensi untuk 720 orang PNS Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (9) Kegiatan Analisis kesenjangan (GAP) kompetensi PNS pemerintahan kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp799.999.807,00 dan realisasi Rp778.250.301,00 atau setara dengan 97,28%. *Output* kegiatan adalah 720 orang PNS Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (10) Kegiatan Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2019-2024 yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi Rp421.580.230,00 atau setara dengan 93,68%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS Provinsi Jawa Barat 2019—2024. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Peningkatan kompetensi tenaga pengembangan kompetensi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp298.775.781,00 dan realisasi Rp295.342.944,00 atau setara dengan 98,85%. *Output* kegiatan adalah 40 Orang ASN yang terfasilitasi pengembangan kompetensi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (12) Kegiatan Peningkatan sinergitas antar lembaga pembangunan kompetensi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi

- Rp248.290.592,00 atau setara dengan 99,32%. *Output* kegiatan adalah 50 lembaga pembangunan kompetensi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (13) Kegiatan Pengelolaan klinik kompetensi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp249.994.151,00 dan realisasi Rp238.032.500,00 atau setara dengan 95,22%. *Output* kegiatan adalah 50 orang PNS yang terfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (14) Kegiatan Monitoring dan evaluasi pasca diklat dan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp242.557.500,00 atau setara dengan 97,02%. *Output* kegiatan adalah 100 orang sebagai evaluasi pasca diklat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (15) Kegiatan Pameran inovasi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp499.999.860,00 dan realisasi Rp477.499.860,00 atau setara dengan 95,50%. *Output* kegiatan adalah 80 orang yang terlibat dalam pameran inovasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (16) Kegiatan Pengelolaan sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi (SIMPEKOM) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp499.969.347,00 dan realisasi Rp453.301.243,00 atau setara dengan 90,67%. *Output* kegiatan adalah 60 orang PNS mengikuti pengelolaan sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (17) Kegiatan Upgrade aplikasi *E-learning* uji coba implementasi *E-learning* yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar

- Rp399.999.805,00 dan realisasi Rp382.204.284,00 atau setara dengan 95,55%. *Output* 100 orang PNS Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota dapat mempergunakan *E-learning*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (18) Kegiatan Diklat teknis substantif agribisnis peternakan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp341.794.400,00 atau setara dengan 97,66%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis agribisnis peternakan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (19) Kegiatan Diklat teknis substantif pengembangan industri pariwisata yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp349.900.000,00 dan realisasi Rp327.134.200,00 atau setara dengan 93,49%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis subatantif pengembangan industri pariwisata. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (20) Kegiatan Diklat teknis substantif kerjasama perdagangan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp349.900.000,00 dan realisasi Rp337.732.400,00 atau setara dengan 96,52%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis subatantif kerjasama perdagangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (21) Kegiatan Diklat teknis substantif kesehatan bidang bina penyehatan masyarakat yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp349.995.836,00 dan realisasi Rp316.549.200,00 atau setara dengan 90,44%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis subatantif kesehatan bina penyehatan masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (22) Kegiatan Diklat Teknis Substantif Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp349.900.000,00 dan realisasi Rp333.334.974,00 atau setara dengan 95,27%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis subatantif administrasi kependudukan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (23) Kegiatan Diklat teknis substantif peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp349.991.910,00 dan realisasi Rp296.565.400,00 atau setara dengan 84,73%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis subatantif pemerintahan desa. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (24) Kegiatan Diklat teknis substantif manajemen aset yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp349.900.000,00 dan realisasi Rp336.117.800,00 atau setara dengan 96,06%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis subatantif manajemen aset. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (25) Kegiatan Diklat teknis substantif kesekretariatan DPRD yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp349.900.000,00 dan realisasi Rp289.798.800,00 atau setara dengan 82,82%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis subatantif kesekretariatan DPRD. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (26) Kegiatan Konsultasi ke kementerian dan pembinaan ke kabupaten/kota yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi

- Rp144.573.320,00 atau setara dengan 96,38%. *Output* kegiatan adalah 220 orang dari Kabupaten/Kota yang berkonsultasi dengan kementerian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (27) Kegiatan Diklat teknis substantif *fraud auditing* yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp349.900.000,00 dan realisasi Rp319.705.250,00 atau setara dengan 91,37%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis subatantif *fraud auditing*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (28) Kegiatan Bimbingan teknis *soft skill operator* yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.999.622,00 dan realisasi Rp150.296.207,00 atau setara dengan 75,15%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek *soft skill operator*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (29) Kegiatan Bimbingan pengadilan tata usaha negara yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp152.268.000,00 atau setara dengan 76,13%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek pengadilan tata usaha. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (30) Kegiatan Bimbingan teknis penilaian angka kredit guru yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.999.622,00 dan realisasi Rp149.681.300,00 atau setara dengan 74,84%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek penilaian angka kredit guru. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (31) Kegiatan Bimbingan teknis penilaian rutilahu yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.999.622,00 dan realisasi

- Rp147.968.000,00 atau setara dengan 73,98%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek penilaian rutilahu. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (32) Kegiatan Bimbingan teknis penyelamatan dan perlindungan arsip yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.999.622,00 dan realisasi Rp150.399.710,00 atau setara dengan 75,20%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek penyelamatan dan perlindungan arsip. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (33) Kegiatan Bimbingan teknis dasar-dasar penginderaan jauh bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.998.463,00 dan realisasi Rp170.386.280,00 atau setara dengan 85,02%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek dasar-dasar penginderaan jauh bidang lingkungan hidup. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (34) Kegiatan Bimbingan teknis pengambilan sampel air udara dan limbah padat yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.999.622,00 dan realisasi Rp162.188.880,00 atau setara dengan 81,09%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek pengambilan sampel air udara dan limbah padat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (35) Kegiatan Bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur bidang motivasi berprestasi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.999.518,00 dan realisasi Rp149.425.018,00 atau setara dengan 74,71%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek peningkatan kompetensi aparatur bidang motivasi berprestasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi

- sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (36) Kegiatan Bimbingan teknis wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.999.920,00 dan realisasi Rp102.050.000,00 atau setara dengan 51,03%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek wawasan kebangsaan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (37) Kegiatan Bimbingan Revolusi Mental yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp118.600.867,00 atau setara dengan 59,30%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek revolusi mental. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (38) Kegiatan Bimbingan Manajemen Qolbu yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp147.040.800,00 atau setara dengan 73,52%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek manajemen Qolbu. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (39) Kegiatan Bimbingan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp181.219.000,00 atau setara dengan 90,61%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek kompetensi ASN. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (40) Kegiatan Bimbingan *Capacity Building* yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp148.621.750,00 atau setara dengan 74,31%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan mengikuti bimtek *capacity building*. *Outcome*

- kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (41) Kegiatan Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup SMA/SMK yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp329.999.750,00 dan realisasi Rp249.299.750,00 atau setara dengan 75,55%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis pengelolaan barang milik daerah lingkup SMA/SMK. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (42) Kegiatan Diklat Teknis Administrasi Keuangan Lingkup SMA/SMK yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp329.999.750,00 dan realisasi Rp274.724.750,00 atau setara dengan 83,25%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis administrasi keuangan lingkup SMA/SMK. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (43) Kegiatan Diklat Teknis Manajemen Kearsipan Tingkat Dasar lingkup SMA/SMK yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp659.915.000,00 dan realisasi Rp542.691.000,00 atau setara dengan 82,24%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis manajemen kearsipan lingkup SMA/SMK. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (44) Kegiatan Diklat Teknis Penyusunan Kontrak dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp550.000.000,00 dan realisasi Rp462.475.376,00 atau setara dengan 84,09%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat teknis penyusunan kontrak dan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintahan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (45) Kegiatan Diklat Fungsional Perencana yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp322.000.000,00 dan realisasi Rp269.764.300,00 atau setara dengan 83,78%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat fungsional perencana. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (46) Kegiatan Diklat Fungsional Arsiparis yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp322.000.000,00 dan realisasi Rp277.407.443,00 atau setara dengan 86,15%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat fungsional arsiparis. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (47) Kegiatan Diklat Fungsional Pustakawan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp322.000.000,00 dan realisasi Rp276.678.147,00 atau setara dengan 85,93%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat fungsional pustakawan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (48) Kegiatan ESQ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menuju Jawa Barat Juara yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.762.226.000,00 dan realisasi Rp701.115.266,00 atau setara dengan 39,79%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat ESQ. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (49) Kegiatan Bimtek Pengembangan Pemberitaan Pemerintah yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp205.108.903,00 dan realisasi Rp126.957.500,00 atau setara dengan 61,90%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan bimtek pengembangan pemberitaan pemerintah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (50) Kegiatan Pelatihan Agen Perubahan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp205.069.903,00 dan realisasi Rp149.654.000,00 atau setara dengan 72,98%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan pelatihan agen perubahan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (51) Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.824.040.495,00 dan realisasi Rp1.470.744.386,00 atau setara dengan 80,63%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat Kepemimpinan Tingkat II. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (52) Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III (APBD) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp669.208.891,00 dan realisasi Rp493.917.178,00 atau setara dengan 73,81%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat Kepemimpinan Tingkat III (APBD). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (53) Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PENGIRIMAN) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.800.000.000,00 dan realisasi Rp1.220.557.267,00 atau setara dengan 67,81%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat Kepemimpinan Tingkat III (PENGIRIMAN). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (54) Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp2.754.468.000,00 atau setara dengan 91,82%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan Pelatihan Dasar CPNS. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (55) Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Fasilitasi Prajabatan (APBD) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp2.600.000.000,00 dan realisasi Rp2.234.308.944,00 atau setara dengan 85,93%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Fasilitasi Prajabatan (APBD). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (56) Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Fasilitasi Prajabatan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp3.436.265.200,00 dan realisasi Rp2.678.486.687,00 atau setara dengan 77,95%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Fasilitasi Prajabatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (57) Kegiatan Diklat Pengembangan Kepemimpinan melalui komunikasi publik yang efektif (Leadership Development Training Through Effective Public Communication) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp325.000.000,00 dan realisasi Rp236.453.000,00 atau setara dengan 72,75%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan diklat Pengembangan Kepemimpinan melalui komunikasi publik yang efektif. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (58) Kegiatan Orientasi Anggota DPRD Kab/Kota yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp786.905.532,00 dan realisasi Rp85.561.032,00 atau setara dengan 10,87%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan Orientasi Anggota DPRD Kab/Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (59) Kegiatan *Visiting Training* Kepala Daerah ke Luar Negeri yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp5.402.945,00 dan

realisasi Rp5.402.500,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah 720 orang *Visiting Training* Kepala Daerah ke Luar Negeri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (60) Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan Desa /Manajemen Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp5.056.393.400,00 dan realisasi Rp2.568.723.014,00 atau setara dengan 50,80%. *Output* kegiatan adalah 720 orang lulusan Tata Kelola Pemerintahan Desa /Manajemen Pemerintahan Desa. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (61) Kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.574.870.000,00 dan realisasi Rp1.322.704.250,00 atau setara dengan 83,99%. *Output* kegiatan adalah 543 orang lulusan Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni tingkat capaian kinerja pelaporan sengan kualitas baik dengan realisasi sebesar 76,71% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar Rp1.878.728.645,00 dan realisasi Rp 1.469.335.967,00 atau setara dengan 78,21%.

- (1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja BPSDM yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp399.999.365,00 dan realisasi Rp195.671.771,00 atau setara dengan 48,92%.

- Output* kegiatan adalah 100% tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan BPSDM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyusunan Renstra BPSDM yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp99.967.392,00 dan realisasi Rp98.057.600,00 atau setara dengan 98,09%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya kesesuaian perencanaan daerah dengan perencanaan BPSDM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan BPSDM yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp155.646.260,00 atau setara dengan 62,26%. *Output* kegiatan adalah 100% tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (4) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan BPSDM yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp159.995.541,00 dan realisasi Rp150.317.541,00 atau setara dengan 93,95%. *Output* kegiatan adalah 100% tingkat kesesuaian pengelolaan pendapatan BPSDM. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (5) Kegiatan Pemetaan Data Jabatan Fungsional Widyaiswara Pemrov Jabar dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp199.932.140,00 dan realisasi Rp180.282.945,00 atau setara dengan 90,17%. *Output* kegiatan adalah 100% tingkat kesesuaian pemetaan data jabatan fungsional widyaiswara. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (6) Kegiatan Implementasi Penjamin Mutu Kediklatan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp499.145.000,00 dan realisasi Rp481.151.500,00 atau setara dengan 96,40%. *Output* kegiatan adalah 100% tingkat kesesuaian implemetasi penjaminan mutu kediklatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (7) Kegiatan Forum OPD yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp269.689.207,00 dan realisasi Rp208.208.350,00 atau setara dengan 77,20%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1 Dokumen Rencana Program/Kegiatan BPSDM Tahun 2020. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar Rp25.806.117.860,00 dengan realisasi sebesar Rp20.412.401.641,00 atau setara dengan 79,10%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp12.411.342.890,00 dan realisasi sebesar Rp11.022.000.110,00 atau setara dengan 88,81%. *Output* kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor yang terdiri dari pengadaan sofa ruang serbaguna Twin Tower, pengadaan meja rapat ruang pimpinan, pemeliharaan pengharum ruangan asrama twintower, penataan ruang tunggu kantor, penataan interior lobby, penataan ruang pimpinan, sepeda listrik, pengadaan rak arsip, pengadaan filling cabiner, pengadaan mesin penghancur kertas, pengadaan televisi untuk ruang rapat dan kamar asrama, pengadaan PC, pengadaan laptop dan printer, pengadaan meja pegawai, meja ruang rapat utama, meja makan asrama, kursi pegawai, kursi rapat, sofa asrama,

- kursi teras asrama, kelengkapan springbed, dispenser, kulkas, jam dinding, vertical blind, pemasangan wallpaper asrama, pengadaan LCD, pengembangan jaringan LAN, pengadaan sistem audio, dsb. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penataan Roof Garden yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.999.928.360,00 dan realisasi sebesar Rp1.893.042.319,00 atau setara dengan 94,66%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1 unit roof garden. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Penataan Trotoar dan Pedestrian yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp3.999.992.520,00 dan realisasi sebesar Rp3.405.929.017,00 atau setara dengan 85,15%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya trotoar dan pedestrian Kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat sebesar 94%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Penataan Pintu Gerbang yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp999.987.985,00 dan realisasi sebesar Rp692.133.350,00 atau setara dengan 69,21%. *Output* kegiatan adalah tersedianya pintu gerbang BPSDM Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Pembuatan Videotron yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.980.512,00 dan realisasi Rp928.870.000,00 atau setara dengan 92,89%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1 unit videotron di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai *standard* di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (6) Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.394.885.593,00 dan realisasi Rp2.470.426.845,00 atau setara dengan 45,79%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1 unit Gedung Kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni Tersedianya Administrasi Perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar Rp29.534.614.317,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.134.321.245,00 atau setara 78,33%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.499.230.569,00 dan realisasi Rp1.498.769.202,00 atau setara dengan 99,97%. *Output* kegiatan adalah tersedianya Jasa Profesi Pengemudi, Purnabakti dan Front Office selama 12 Bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.499.985.851,00 dan realisasi sebesar Rp937.569.700,00 atau setara dengan 62,51%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya 40 unit kendaraan diinas BPSDM Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya

- Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp3.799.999.923,00 dan realisasi sebesar Rp3.470.301.556,00 atau setara dengan 91,32%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa keamanan dan kebersihan selama 12 Bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp349.800.883,00 dan realisasi sebesar Rp263.874.900,00 atau setara dengan 75,44%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1 paket barang habis pakai antara lain : ATK, Materai dan Perangkat, Pencetakan dan Penggandaan Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp347.935.000,00 atau setara dengan 57,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya langganan Surat Kabar dan Majalah, jasa keuangan, iuran TV Kabel, Pencetakan dan Penggandaan Dokumen selama 12 Bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp3.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.885.044.625,00 atau setara dengan 53,86%. *Output* kegiatan adalah tersedianya fasilitas telepon, listrik, air dan internet selama 12 Bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp10.814.536.265,00 dan realisasi sebesar

- Rp10.056.615.980,00 atau setara dengan 92,99%. *Output* kegiatan adalah tersedianya Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat yang siap pakai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (8) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp749.708.140,00 dan realisasi sebesar Rp620.908.640,00 atau setara dengan 82,82%. *Output* kegiatan adalah tersedianya fasilitas kerohanian, sarana olahraga dan pakaian dinas untuk 125 orang pegawai BPSDM Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp499.966.280,00 dan realisasi sebesar Rp202.947.119,00 atau setara dengan 40,59%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya Kompetensi 50 orang sumber daya aparatur BPSDM Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (10) Kegiatan Orasi Ilmiah dan Pendukung Kinerja Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp399.835.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.359.000,00 atau setara dengan 23,10%. *Output* kegiatan adalah tersedianya pelayanan kepegawaian selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Orasi ilmiah jabatan Fungsional Widyaiswara dan Pendukung kinerja Kepegawaian dan Umum yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp614.909.346,00 dan realisasi sebesar Rp415.455.802,00 atau setara dengan 67,56%.

- Output* kegiatan adalah tersedianya pelayanan kepegawaian selama 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (12) Kegiatan Implementasi Pemeliharaan ISO 9001:2015 yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp249.976.660,00 dan realisasi sebesar Rp210.496.660,00 atau setara dengan 84,21%. *Output* kegiatan adalah tersedianya 1 Sertifikat ISO 9001 : 2015. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (13) Kegiatan Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi BPSDM yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp0,00 atau setara dengan 0,00%. Kegiatan tidak dilaksanakan;
- (14) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp 4.806.665.400,00 dan realisasi sebesar Rp 3.132.043.061,00 atau setara dengan 65,16%. *Output* kegiatan adalah tersedianya operasional perjalanan dinas dan makan minum rapat selama 12 Bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yakni persentase pegawai yang mendapat nilai skp > 80% dengan capaian sebesar 87,88% dari target 80%; Jumlah SDM aparatur yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya dengan capaian sebesar 10% dari target 10%; Persentase ketersediaan aparatur sesuai kebutuhan dengan capaian sebesar 60% dari target 60%; Persentase pegawai yang disiplin dengan capaian 80% dari target 80%; Persentase pegawai yang mendapat penghargaan 97% dari target 97%; Persentase SK kenaikan pangkat pegawai tepat waktu dengan capaian sebesar 70% dari target 70%; Persentase SK pensiun pegawai tepat waktu dengan

capaian 75% dari target 75%; Persentase pegawai yang memenuhi standar kesejahteraan pegawai daerah dengan capaian sebesar 50% dari target 50%. Alokasi anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah sebesar Rp35.567.119.780,00 dengan realisasi sebesar Rp28.086.408.484,00 setara dengan 78,97%.

- (1) Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Perceraian ke Balai-Balai/UPTD, OPD dan /Atau Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp566.335.316,00 dan realisasi Rp563.385.316,00 atau setara dengan 99,48%. *Output* kegiatan adalah Pembinaan disiplin dan perceraian ke balai- balai/UPTD/OPD dan/atau Kab/Kota lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 20 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya disiplin dan berkurangnya perceraian di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Pembekalan Keluarga Sakinah PNSD Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp155.929.102,00 dan realisasi sebesar Rp155.929.102,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah pembinaan keluarga PNSD 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah terbinanya keluarga PNSD,
- (3) Kegiatan Penyelesaian Masalah Disiplin, Kedudukan Hukum PNS dan Proses BAP Sengketa Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp123.497.217,00 dan realisasi sebesar Rp123.496.792,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah penyelesaian masalah disiplin kedudukan hukum PNS dan Proses BAP sengketa kepegawaian selama 1 (satu) tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman tentang sengketa kepegawaian;
- (4) Kegiatan *Workshop* Penyelesaian Sengketa Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp139.926.491,00 dan realisasi Sebesar Rp139.926.491,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah *workshop* penyelesaian sengketa kepegawaian 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman tentang sengketa kepegawaian;

- (5) Kegiatan Pembekalan *Basic Life Support* (BLS) Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.999.992,00 dan realisasi Rp99.820.750,00 atau setara dengan 99,82%. *Output* kegiatan adalah pembekalan ketrampilan BLS pada aparatur sebesar 70%. *Outcome* kegiatan adalah pembekalan ketrampilan BLS pada aparatur;
- (6) Pembekalan Penanaman Sikap Mental Disiplin Dan Jiwa Korsa Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.998.630,00 dan realisasi Rp199.280.630,00 atau setara dengan 99,64%. *Output* kegiatan adalah pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa aparatur sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sikap mental dan disiplin aparatur;
- (7) Penghargaan Gubernur bagi PNSD, Badan dan Masyarakat serta Pemberian SLKS dan Tanda Jasa bagi PNSD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp813.749.421,00 dan realisasi Rp775.024.521,00 setara dengan 95,24%. *Output* kegiatan adalah pemberian SLKS penghargaan dan tanda jasa bagi PNSD, badan dan masyarakat 2019 sebanyak 1 kali, dan penghargaan Gubernur sebanyak 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya penghargaan untuk PNS;
- (8) Penghargaan PNS Berprestasi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.124.999.785,00 dan realisasi Rp2.086.198.135,00 setara dengan 98,17%. *Output* kegiatan adalah Pemberian rewards PNS berprestasi 24 orang. *Outcome* kegiatan adalah adanya PNS berprestasi sebagai role model PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (9) Peningkatan Wawasan dalam Pengelolaan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp79.925.989,00 dan realisasi sebesar Rp71.003.250,00 atau setara dengan 88,84%. *Output* kegiatan adalah peningkatan wawasan pengelolaan administrasi jabatan fungsional 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan layanan kepegawaian;
- (10) Pembekalan Kewirausahaan Aparatur Pra Purnabhakti Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang

- dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.999.999.996,00 dan realisasi Rp1.854.197.646,00 atau setara dengan 92,71%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya motivasi dan kesejahteraan aparatur sebesar 70,00%. *Outcome* kegiatan meningkatnya motivasi dan kesejahteraan aparatur;
- (11) Kegiatan Pemetaan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.425.130,00 dan realisasi sebesar Rp41.649.250,00 atau setara dengan 27,87%. *Output* kegiatan adalah SK pengangkatan dalam jabatan fungsional 12 bulan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan kepegawaian;
- (12) Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp93.352.861,00 dan realisasi sebesar Rp73.270.700,00 atau setara dengan 78,49%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kinerja organisasi sebesar 90%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja organisasi;
- (13) Kegiatan Bimbingan Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.950.561,00 dan realisasi sebesar Rp82.988.200,00 atau setara dengan 83,03%. *Output* kegiatan adalah bimtek Jabatan Fungsional 3 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai;
- (14) Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp93.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp56.610.500,00 atau setara dengan 60,38%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi jabatan fungsional 2 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan kepegawaian;
- (15) Peningkatan Pendidikan Mental Aparatur Pemerintrah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.399.999.922,00 dan realisasi Rp1.395.772.172,00 atau setara dengan 99,70%. *Output* kegiatan peningkatan pendidikan mental aparatur pemerintah provinsi Jawa Barat sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya spriritualitas kerja aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

- (16) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp74.999.688,00 dan realisasi sebesar Rp71.997.500,00 atau setara dengan 96,00%. *Output* kegiatan adalah *Workshop* Analis Kepegawaian 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan kepegawaian;
- (17) Kegiatan Pelaksanaan Baperjakat Calon Pejabat Struktural dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp999.169.808,00 dan realisasi sebesar Rp728.427.870,00 atau setara dengan 72,90%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan SK pengangkatan dalam jabatan, struktural dan pelantikan pejabat, struktural dalam 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pemetaan jabatan;
- (18) Pembekalan Peningkatan Kebugaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.999.162,00 dan realisasi Rp198.230.412,00 atau setara dengan 99,12%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pegawai BKD sebesar 90,00%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kebugaran dan ketrampilan aparatur;
- (19) Kegiatan Sosialisasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp79.996.249,00 dan realisasi sebesar Rp74.779.500,00 atau setara dengan 93,48%. *Output* kegiatan adalah Sosialisasi seleksi terbuka JPT sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah terpedomaninya proses seleksi terbuka JPT di Provinsi Jawa Barat;
- (20) Kegiatan Seleksi Terbuka/Open Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.499.305.070,00 dan realisasi sebesar Rp2.239.522.592,00 atau setara dengan 64,00%. *Output* kegiatan penempatan dalam jabatan pimpinan tinggi sebanyak 11 orang. *Outcome* kegiatan adalah terisinya JPT Provinsi Jawa Barat;
- (21) Pembekalan Peningkatan Wawasan Keagamaan Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

- Jawa Barat sebesar Rp549.999.951,00 dan realisasi sebesar Rp523.248.151,00 atau setara dengan 95,14%. *Output* kegiatan adalah peningkatan wawasan keagamaan aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 90 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya wawasan keagamaan aparatur;
- (22) Kegiatan Rekomendasi dan Penataan Jabatan Administrasi dan Rekomendasi JPT Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.990.228,00 dan realisasi sebesar Rp90.954.750,00 atau setara dengan 90,96%. *Output* kegiatan adalah dokumen rekomendasi dalam 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kepemimpinan pegawai;
- (23) Penyusunan Buku *Knowledge Second Carier Training And Aducation Program* yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49.999.384,00 dan realisasi sebesar Rp49.811.884,00 atau setara dengan 99,62%. *Output* kegiatan penyusunan buku *knowledge sharing* pra purnabakti sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelatihan/pembakalan aparatur;
- (24) Kegiatan Pelantikan Dan Pengukuhan Anggota Ran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp129.999.622,00 dan realisasi sebesar Rp129.362.372,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah pembekalan peningkatan kapasitas anggota RAN sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan. meningkatnya kapasitas dan kualitas anggota RAN;
- (25) Kegiatan Tata Kelola PNSD dalam Jabatan Pelaksana yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp337.314.958,00 dan realisasi sebesar Rp312.612.250,00 atau setara dengan 92,68%. *Output* kegiatan adalah tata kelola PNSD dalam jabatan fungsional umum 44 OPD. *Outcome* kegiatan adalah terkelolanya PNSD dalam jabatan fungsional umum;
- (26) Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian Bagi Kepala Bagian TU SMA/SMK 3 Angkatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp357.713.208,00 dan realisasi sebesar Rp324.680.250,00 atau setara dengan 90,77%.

- Output* kegiatan adalah bimbingan teknis jabatan fungsional umum sebanyak 180 orang. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya bimbingan teknis jabatan fungsional umum;
- (27) Kegiatan Pelayanan Perpindahan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp231.756.250,00 dan realisasi sebesar Rp210.164.750,00 atau setara dengan 90,68%. *Output* kegiatan adalah Pelayanan Perpindahan Kab./Kota di Provinsi Jawa Barat dan pelayanan perpindahan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2014 sebanyak 2500 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya pelayanan perpindahan.
- (28) Kegiatan Penataan dan Redistribusi Pegawai di OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp332.954.830,00 dan realisasi sebesar Rp301.441.650,00 atau setara dengan 90,54%. *Output* kegiatan adalah penataan dan redistribusi pegawai di OPD Provinsi Jawa Barat dan seleksi pindah PNS ke Provinsi Jawa Barat 120 dokumen. *Outcome* Kegiatan adalah tertata dan dsitribusi pegawai di OPD secara merata.
- (29) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode April yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp174.990.038,00 dan realisasi sebesar Rp173.983.800,00 atau setara dengan 99,42%. *Output* kegiatan adalah ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat April 250 orang. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji;
- (30) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode Oktober yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp174.998.641,00 dan realisasi sebesar Rp174.061.000,00 atau 99,46%. *Output* kegiatan adalah ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Oktober sebanyak 250 orang. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang, tepat gaji;
- (31) Pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode April yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp309.954.905,00 dan realisasi sebesar Rp250.319.858,00 atau setara dengan 80,76%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya proses

- pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji sebesar 100%. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji;
- (32) Pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Oktober yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp309.949.204,00 dan realisasi sebesar Rp296.515.306,00 atau setara dengan 95.67%. *Output* kegiatan adalah pemrosesan kenaikan pangkat periode Oktober 2019 4.000 SK. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji 100%;
- (33) Kegiatan Rekonsiliasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pertama yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.990.830,00 dan realisasi sebesar Rp72.630.000,00 atau setara dengan 72,64%. *Output* kegiatan adalah rekonsiliasi data kenaikan pangkat dan pensiun pertama 100 orang. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji 100%;
- (34) Rekonsiliasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Kedua yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.989.448,00 dan realisasi sebesar Rp91.203.800,00 atau setara dengan 91.21%. *Output* kegiatan adalah rekonsiliasi data kenaikan pangkat dan pensiun kedua 100 orang. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji 100%;
- (35) Pelaksanaan Pemrosesan Pensiun PNS Semester 1 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp131.164.200,00 atau setara dengan 91,44%. *Output* kegiatan adalah pemrosesan keputusan pensiun PNS semester I 100 SK. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji 100%;
- (36) Pelaksanaan Pemrosesan Pensiun PNS Semester 2 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp145.718.300,00 atau setara dengan 97,15%. *Output* kegiatan adalah

- pemrosesan keputusan pensiun PNS semester 2 300 SK. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji 100%;
- (37) Penerimaan Calon ASN Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.499.989.550,00 dan realisasi sebesar Rp718,377,450,00 atau setara dengan 47,89%. *Output* kegiatan adalah Penerimaan Calon ASN Tahun 2019 300 Orang. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pegawai Tahun 2019;
- (38) Bimtek e-formasi Tata Kelola Calon ASN dan ASN 2019 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp181.244.172,00 dan realisasi sebesar Rp149.933.000,00 atau setara dengan 82.72%. *Output* kegiatan adalah Bimtek e-formasi 178 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (39) Pengelolaan Penataan Calon ASN dan ASN yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.645.255.797,00 dan realisasi sebesar Rp1.614.074.277,00 atau setara dengan 98,10%. *Output* kegiatan adalah Pengelolaan Penataan Calon ASN dan ASN 660 Orang. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya pengelolaan penataan Calon ASN dan ASN;
- (40) Pengiriman Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp394.909.935,00 dan realisasi sebesar Rp361.550.500,00 atau setara dengan 91,55%. *Output* kegiatan adalah pengiriman Peserta Diklat PIM 8 orang. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kompetensi kepemimpinan pegawai;
- (41) Bantuan Riset PNS yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp374.976.815,00 dan realisasi sebesar Rp275.469.500,00 atau setara dengan 73,46%. *Output* kegiatan adalah Bantuan Riset PNSD sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kompetensi analisis pegawai;
- (42) Kegiatan 300 Doktor Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.032.174.150,00 dan realisasi sebesar Rp1.836.698.736,00 atau setara dengan 60,57%. *Output* kegiatan adalah PNSD

- bergelar doktor 20 Orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompensasi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (43) Bantuan Pendidikan Lanjutan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.001.232.270,00 dan realisasi sebesar Rp2.099.814.741,00 atau setara dengan 69,97%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi pegawai tugas belajar dan izin belajar sebanyak 4 jenjang pendidikan. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kualifikasi Pendidikan;
- (44) Monitoring, Evaluasi Pemetaan Kompetensi dan Kinerja yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp187.437.278,00 dan realisasi sebesar Rp87.234.385,00 atau setara dengan 46,54%. *Output* kegiatan adalah evaluasi kegiatan kompetensi dan kinerja selama 1 Tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (45) Pemetaan Kompetensi Pegawai yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp407.559.500,00 dan realisasi sebesar Rp330.791.200,00 atau setara dengan 81,16%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai sebanyak 2 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualifikasi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (46) Pengukuran Kinerja Pegawai yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.612.415.180,00 dan realisasi sebesar Rp1.537.094.650,00 atau setara dengan 58,84%. *Output* kegiatan adalah pengukuran kinerja ASN provinsi Jawa Barat, pembuatan modul SIAP, pembuatan modul SIMPEG, pembuatan modul sistem penilaian kinerja dan penyediaan server. *Outcome* kegiatan adalah terselenggaranya pengukuran kinerja pegawai;
- (47) Kegiatan Penyelenggaraan PORPEMPROV Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp566.249.917,00 dan realisasi sebesar Rp566.249.917,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah PORPEMROV Ke XVII 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya PORPEMPROV;

- (48) Kegiatan Pengiriman Kontingen PEMPROV pada PORPEMDA Jabar yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp3.149.999.915,00 dan realisasi sebesar Rp3.041.309.115,00 atau setara dengan 95,19%. *Output* kegiatan adalah pengiriman atlit dan official PORPEMPROV. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat;
- (49) Sosialisasi LKBH DP Korpri yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp124.999.850,00 dan realisasi sebesar Rp95.100.000,00 ataus setara dengan 76,08%. *Output* kegiatan adalah sosialisasi LKBH 4 wilayah. *Outcome* kegiatan adalah tersosialisasinya LKBH;
- (50) Kegiatan Fasilitasi DP Korpri yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp99.999.757,00 dan realisasi sebesar Rp43.090.958,00 atau setara dengan 43,09%. *Output* kegiatan adalah fasilitas dewan pengurus Korpri selama 1 Tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya dewan pengurus Korpri;
- (51) Kegiatan Bantuan Hukum bagi PNS dan Pengembangan Wawasan LKBH DP Korpri/ASN yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp299.999.972,00 dan realisasi sebesar Rp220.798.026,00 atau setara dengan 76.60%. *Output* kegiatan adalah bantuan hukum bagi PNS dan pengembangan wawasan LKBH Kopri sebanyak 1 kegiaiatan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya bantuan hukum bagi PNS;
- (52) Kegiatan Rakor LKBH DP Korpri/ASN se Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp124.999.887,00 dan realisasi sebesar Rp104.538.587,00 atau setara dengan 83,63%. *Output* kegiatan adalah rapat koordinasi LKBH sebanyak 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terkoordinasinya LKBH korpri se Jawa Barat;
- (53) Kegiatan MTQ Korpri/ASN tingkat Provinsi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp187.499.853,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau setara dengan 0%;
- (54) Kegiatan Pengiriman Kontingen Korpri/ASN Jabar yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar

- Rp249.999.961,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau setara dengan 0%;
- (55) Kegiatan Upacara Puncak dalam rangka memperingati HUT Korpri yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp187.499.782,00 dan realisasi sebesar Rp184.647.782,00 atau setara dengan 98,48%. *Output* kegiatan adalah HUT korpri 1 kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya upacara HUT Korpri;
- (56) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pembinaan Olahraga yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp62.499.971,00 dan realisasi sebesar Rp22.213.400,00 atau setara dengan 35,54%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya kelembagaan badan pembinaan olahraga. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya kelembagaan badan pembinaan olahraga;
- (57) Kegiatan Survei Layanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.999.197,00 dan realisasi Rp93.757.000,00 atau setara dengan 93,76%. *Output* kegiatan adalah surveyi layanan kepegawaian sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan kepegawaian;
- (58) Kegiatan Survei Kesejahteraan Pegawai yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.998.872,00 dan realisasi Rp91.676.000,00 atau setara dengan 91,68%. *Output* kegiatan adalah survei kesejahteraan pegawai sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai;
- (59) Kegiatan Uji Kinerja Pejabat Struktural di Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.993.312,00 dan realisasi sebesar Rp30.600.250,00 atau setara dengan 30,60%. *Output* kegiatan adalah data kinerja para pejabat struktural sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah PNS Jawa Barat yang mempunyai kinerja memuaskan;
- (60) Kegiatan Penyelenggaraan Rakor Kepegawaian 2019 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp277.273.000,00 dan realisasi sebesar Rp266.006.360,00 atau setara dengan 95,94%. *Output* kegiatan adalah rakor kepegawaian

sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan peningkatan manajemen kepegawaian.

f. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah yakni Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian dengan capaian sebesar 80% dari target 80%; Layanan kepegawaian bersertifikat ISO 9001:2015 dengan capaian 4% dari target 4%; Akurasi data SIMPEG dengan capaian sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp3.739.832.889,00 dengan realisasi sebesar Rp3.008.055.162,00 setara dengan 80,43%.

- (1) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp139.979.856,00 dan realisasi sebesar Rp129.578.162,00 atau setara dengan 92,57%. *Output* kegiatan adalah fasilitasi penerbitan karpeg dan taspen, sosialisasi mekanisme dokumentasi dan arsip kepegawaian, alih media dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 3 kali. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akurasi data PNS;
- (2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp209.354.220,00 dan realisasi sebesar Rp172.964.600,00 atau setara dengan 82,62%. *Output* kegiatan adalah bimtek dan peningkatan kapasitas pengelola dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 3 kali. *Outcome* kegiatan adalah koordinasi data dan informasi;
- (3) Kegiatan Preservasi Dokumen dan Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp349.949.154,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp323.656.056,00 atau setara dengan 92,49%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan arsip selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan layanan;
- (4) Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Aplikasi Simpeg yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.950.040,00 dan realisasi sebesar Rp212.887.850,00 setara dengan 53,23%. *Output*

- kegiatan adalah Aplikasi Simpeg versi baru 1 tahun; Rekonsiliasi Data selama 1 Tahun. *Outcome* kegiatan adalah terkoordinasinya data dan informasi bidang industri dan perdagangan;
- (5) Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Absensi Terintegrasi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp206.832.550,00 setara dengan 51,71%. *Output* kegiatan adalah Pemeliharaan jaringan absensi online 1 Tahun; Pengelolaan SIAO 1 Tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya manajemen aparatur;
 - (6) Kegiatan Rekonsiliasi Data Kepegawaian Integrasi Sistem Secara Elektronik yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp239.852.898,00 dan realisasi sebesar Rp197.972.003,00 setara dengan 82,54%. *Output* kegiatan adalah rekonsiliasi data kepegawaian integrasi sistem secara elektronik sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah keakuratan data kepegawaian;
 - (7) Bimtek Operator Simpeg SIAO yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.789.410,00 dan realisasi sebesar Rp257.732.398,00 setara dengan 85,97%. *Output* kegiatan adalah Bimtek operator SIMPEG SIAO sebanyak 1 paket. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi operator;
 - (8) Kegiatan *Surveillance* ISO BKD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp399.999.909,00 dan realisasi sebesar Rp355.157.999,00 atau setara dengan 88,79%. *Output* kegiatan adalah ISO BKD Provinsi Jawa Barat sebanyak 7 Layanan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya ISO BKD Provinsi Jawa Barat;
 - (9) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan BKD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp939.712.676,00 dan realisasi Rp796.928.902,00 atau setara dengan 84,81%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Forum OPD bidang Kepegawaian Provinsi Jawa Barat 1 kali forum OPD, Fasilitasi Pra Musrenbang, Terlaksananya Revisi Renstra BKD Provinsi Jawa Barat selama 1 Tahun. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan kepegawaian;

- (10) Kegiatan Penyusunan Laporan dan Dokumen Anggaran BKD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp161.246.834,00 dan realisasi Rp154.863.000,00 setara dengan 96,04%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Perencanaan Anggaran BKD Provinsi Jawa Barat sebanyak 7 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan anggaran BKD Provinsi Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp199.997.892,00 dan realisasi Rp199.481.642,00 setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan adalah Pelaporan Keuangan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk mempertahankan WTP 21 Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya WTP.

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah yakni tersedianya sarana dan prasarana aparatur Badan Kepegawaian Daerah sebesar 72,15% dari target 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp1.037.664.225,00 dengan realisasi sebesar Rp770.421.969,00 setara dengan 74,25%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp322.805.533,00 dan realisasi Rp291.041.720,00 atau setara dengan 90,16%. *Output* kegiatan adalah pengadaan peralatan kantor BKD, kendaraan roda empat untuk pejabat Esselon II. *Outcome* kegiatan adalah pengadaan peralatan kantor BKD Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Korpri/ASN yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp402.366.688,00 dan realisasi Rp367.000.000,00 atau setara dengan 91,21%. *Output* kegiatan adalah sarana dan prasarana gedung korps ASN selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah terfasilitasinya gedung Korps ASN;
- (3) Kegiatan Kesekretariatan LKBH DP Korps ASN yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Barat sebesar Rp212.499.779,00 dan realisasi sebesar Rp16.424.249,00 atau setara dengan 7,73%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya sarana prasarana. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana sekretariat LKBH;

- (4) Kegiatan Perencanaan Publik Mart yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp99.992.225,00 dan realisasi Rp95.956.000,00 atau setara dengan 95,96%. *Output* kegiatan adalah layanan publik mart selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan kepegawaian.

h. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah yakni tersedianya administrasi perkantoran pemerintah daerah Badan Kepegawaian Daerah sebesar 79,54% dari target sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp10.540.567.228,00 dengan realisasi sebesar Rp9.617.955.261,00 setara dengan 91,25%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Kantor yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.000.000,00 dan realisasi Rp337.503.025,00 atau setara dengan 90,00%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai BKD Provinsi Jawa Barat. *Output* adalah penyediaan barang habis pakai kantor selama 1 tahun;
- (2) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.349.784.229,00 dan realisasi Rp3.154.969.208,00 atau setara dengan 94,18%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai BKD Provinsi Jawa Barat. *Output* kegiatan adalah penyediaan langganan kantor selama 1 tahun;
- (3) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp214.255.000,00 dan realisasi Rp99.955.000,00 atau setara dengan 46,65%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai BKD Provinsi Jawa Barat. *Output* kegiatan penyediaan

- sewa, publikasi dan dokumentasi kantor selama 1 tahun;
- (4) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan luar kantor yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.678.935.000,00 dan realisasi Rp2.434.698.205,00 atau setara dengan 90,88%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai BKD provinsi Jawa Barat. *Output* kegiatan adalah penyediaan rapat internal dan luar kota selama 1 tahun;
 - (5) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana, dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp707.110.900,00 dan realisasi Rp635.527.300,00 atau setara dengan 89,98%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai BKD Provinsi Jawa Barat. *Output* kegiatan adalah penyediaan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur selama 1 tahun;
 - (6) Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bimbingan Teknis Aparatur yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp325.000.000,00 dan realisasi Rp285.200.000,00 atau setara dengan 87,75%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur sebanyak 60 orang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pegawai BKD;
 - (7) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp843.547.856,00 dan realisasi Rp689.194.567,00 atau setara dengan 81,70%. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai BKD. *Output* kegiatan adalah alat pendukung fasilitas kantor selama 1 tahun;
 - (8) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp749.740.550,00 dan realisasi Rp746.248.700,00 atau setara dengan 99,53%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas BKD Provinsi Jawa Barat selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai BKD Provinsi Jawa Barat;
 - (9) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.147.893.693,00 dan realisasi Rp1.088.308.756,00 atau setara dengan 94,81%. *Output* kegiatan adalah pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor selama 1 tahun. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pegawai BKD Provinsi Jawa Barat;

- (10) Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp149.300.000,00 dan realisasi Rp146.350.500,00 atau setara dengan 98,02%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kinerja pegawai sebanyak 1 kali. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan jiwa korsas.

2) Permasalahan dan Solusi Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Permasalahan

Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur.

b. Solusi

Meningkatkan pembinaan dan kompetensi aparatur.

36. Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan tahun 2019 Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan sebesar 10% dari target 20%; Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan oleh perangkat daerah sebesar 20% dari target 20% dan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 37,1% dari target sebesar 20%.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK

Capaian Indikator Kinerja Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK yakni adalah persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan dengan capaian sebesar 10% dari target sebesar 20%; persentase hasil kelitbangan yang diterapkan oleh perangkat daerah dengan capaian sebesar 20% dari target sebesar 20% dan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan capaian sebesar 37,1% dari target sebesar 20%. Alokasi anggaran Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah adalah sebesar Rp7.024.353.195,00 dengan realisasi sebesar Rp5.901.975.930,00 setara dengan 84,02%.

- (1) Kegiatan Pengembangan *Day Old Chicken* (DOC) Ayam Sentul yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.999.933,00 dan realisasi sebesar Rp349.453.030,00 atau setara dengan 87.36%. *Output* kegiatan adalah telah terbentuk 8 (delapan) *Village Breeding Center* di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Penerapan teknologi pemendekan umur masa panen ayam melalui teknik *in ovo* dengan menyuntik asam amino pada telur ayam sentul bibit *parent stock* sebanyak 105 ekor di Balai Pengembangan Pembibitan Ternak Unggas Jatiwangi. bekerjasama dengan peneliti dari Universitas Hasannudin. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;

- (2) Kajian Penerapan Padi Tahan Genangan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.999.945,00 dan realisasi sebesar Rp283.794.877,00 atau setara dengan 94,60%. *Output* kegiatan adalah peningkatan pemanfaatan kajian penerapan padi tahan genangan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (3) Penelitian Mobil Pedesaan Untuk Spesifikasi Mesin Dan Prototipe Multifungsi (Lanjutan) yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.999.992,00 dan realisasi sebesar Rp331.239.197,00 atau setara dengan 82,81%. *Output* kegiatan adalah terbangunnya prototype mobil pedesaan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (4) Intermediasi Teknologi untuk Pengembangan SIDA yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp559.996.866,00 dan realisasi sebesar Rp455.436.607,00 atau setara dengan 75,91%. *Output* kegiatan adalah intermediasi teknologi berupa proses pengelolaan sampah organik dengan metode maggot bsf (black soldier fly), intermediasi teknologi berupa pengolahan pupuk organik berbahan dasar biogas dan intermediasi teknologi pengankaran benih kentang di dataran medium. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (5) Penguatan Kelembagaan SIDA Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp165.177.155,00 dan realisasi sebesar Rp142.686.050,00 atau setara dengan 86,38%. *Output* kegiatan rakor sistem inovasi daerah serta sosialisasi seluruh Kab/Kota di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (6) Pengelolaan Kekayaan Intelektual Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp287.758.205,00 dan realisasi sebesar Rp141.482.850,00 atau setara dengan 49,17%. *Output* kegiatan adalah terakomodirnya Inovasi yang didaftarkan kekayaan intelektualnya berupa 2 hak paten, yaitu pestisida organik berbahan dasar jamur antagonis dan proses pembuatannya dan rodentisida organik untuk mengendalikan hama tikus. Serta 18 Karya Cipta, yaitu Petik Iptek, Selaras Jabar Online, Si Bulubabeh, Si Kembang Benih, Si Kontak, Simpatik Jabar, Simple Arsip, Simponi, Sitalas Android, Euis Jabar, Gan Hattra, Jabar *D'sign*, Jabar *Sprint*, Lappoex, Modul "West Java Water Quality Index", Simpatik Versi Android, Teman Jabar Dan Silat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (7) Penelitian Mandiri yang Dilakukan Oleh Fungsional Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp649.929.013,00 dan realisasi sebesar Rp599.185.891,00 atau setara dengan 92,19%. *Output* kegiatan adalah penerapan teknologi budidaya kentang menggunakan benih stek pucuk, kebijakan pengembangan smart village, persepsi dan perilaku guru terhadap kesehatan reproduksi remaja, sistem penyediaan perumahan dan infrastruktur permukiman di kawasan metropolitan Jawa Barat, analisis keberhasilan pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Jawa Barat, optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten/kota dalam upaya mengurangi ketimpangan di Jawa Barat, penerapan gerakan literasi sekolah dan kondisi minat baca peserta didik SMK, evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam perspektif keberlanjutan program Citarum harum, pengembangan zero waste index untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah perkotaan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (8) FGD Perumusan Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis Iptek yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.999.860,00 dan realisasi sebesar Rp571.977.503,00 atau setara dengan 95,33%.

- Output* kegiatan adalah kebijakan penanganan limbah dan sampah di Jawa Barat untuk mendukung Citarum Harum, kajian kelayakan potensi dan peluang investasi untuk mendukung Jawa Barat Juara Lahir Dan Batin, kajian rumah tahan gempa menggunakan teknologi blok kayu modular dan kajian izin usaha pertambangan di kawasan hutan Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (9) Penyebarluasan Hasil-Hasil Penelitian Di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.984.710,00 dan realisasi sebesar Rp292.157.198,00 atau setara dengan 97,39%. *Output* kegiatan adalah kolokium, pameran, publikasi media masa. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (10) Perumusan Arah Kebijakan Dewan Riset Daerah untuk pengembangan dan penerapan IPTEK di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.999.940,00 dan realisasi sebesar Rp284.748.536,00 atau setara dengan 94,92%. *Output* kegiatan adalah *policy brief* rekomendasi kegiatan untuk kemajuan Jawa Barat, dokumen *prosiding*. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (11) Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.799.999.783,00 dan realisasi sebesar Rp2.280.832.940,00 atau setara dengan 81,46%. *Output* kegiatan adalah penyusunan *feasibility study* KST dan penyusunan rencana induk pembangunan KST untuk empat lokasi KST Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;
- (12) Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp221.507.793,00 dan realisasi sebesar Rp168.981.248,00 atau setara 76,29%. *Output* kegiatan adalah laporan naskah

akademik dan pedoman penyusunan pergub kekayaan intelektual. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah.

b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar 100%; Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar 100%; Tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar 100%; Tingkat ketersediaan data dan informasi pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar 100%, dengan Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp1.529.656.025,00 dengan realisasi sebesar Rp1.467.330.739,00 setara dengan 95,93%.

- (1) Monitoring dan Evaluasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp295.617.163,00 dan realisasi sebesar Rp287.666.990,00 atau setara dengan 97,31%. *Output* kegiatan adalah dokumen monev dan rekomendasi usulan kegiatan Kelitbangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dalam pengembangan dan pembangunan daerah;
- (2) Penyusunan Perencanaan Tahunan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp357.839.543,00 dan realisasi Rp355.126.492,00 atau setara dengan 99,24%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya perencanaan selama satu tahunan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya

- sinkronisasi perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- (3) Pengelolaan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.312.192,00 dan realisasi sebesar Rp97.062.080,00 atau setara dengan 98,73%. *Output* kegiatan adalah dokumen laporan keuangan 19 dokumen;
 - (4) Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Internal yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.787.316,00 dan realisasi sebesar Rp148.167.971,00 atau setara dengan 98,92%. *Output* kegiatan adalah dokumen evaluasi - 4 dokumen, laporan, pertanggung jawaban (LKIP) - 1 dokumen, capaian kinerja - 12 dokumen, kendali barang dan jasa - 12 dokumen, kendali sismonteptra - 12 dokumen, dokumen perjanjian kinerja - 1 dokumen, prosiding - 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (5) Kegiatan Pengembangan Website Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp194.077.388,00 dan realisasi Rp188.445.840,00 atau setara dengan 97,10%. *Output* kegiatan adalah pengelolaan website dan media sosial BP2D. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dalam pengembangan dan pembangunan daerah;
 - (6) Penerbitan e-Jurnal dan Buletin yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp293.428.148,00 dan realisasi sebesar Rp253.891.399,00 atau setara dengan 86,53%. *Output* kegiatan adalah 2 Jurnal Volume 4 no 1 dan 2 : CR- Journal Vol.5 No. 01 Juni 2019 : Model A.I.D.A : Minat Pelajar Kota Bandung Menggunakan Bus Sekolah - Ani Solihat, Kajian Rakitan Teknologi PATBO Super Pada Lahan Sawah Tadah Hujan di Provinsi Jawa Barat - Nana Sutrisna, Agus Ruswandi, Yanto Surdianto, dan Liferdi, Sesar Lembang : Potensi Bencana di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis) – Rismawati, Peluang Penerapan Berbagai Inovasi

Teknologi dalam Meningkatkan Produksi Pertanian di Jawa Barat - Ani Suryani dan Darajat Prawiranegara, Strategi Pengembangan Ayam KUB pada Program #Bekerja di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat - Darajat Prawiranegara, Liferdi dan Bambang Sunandar. *CR Journal Volume 05 Nomor 02 Desember 2019 : Zero Waste Management Index—Sebuah Tinjauan* - Eka Jatnika Sundana, Arief Dhany Sutadian, dan Iwan Juwana, Modal Sosial, Persepsi Tentang Keterlibatan Militer dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Citarum Harum - Muthya Diana, dan Pius Suratman Kartasmita, Kinerja Teknologi Budidaya Padi Salibu di Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Cianjur - Yanto Surdianto, Nana Sutrisna, Darajat Prawiranegara, dan Agus Ruswandi, Strategi Pemasaran Perusahaan *Start-Up* pada Bidang Pendidikan di CV. Big Edu Indonesia-Nurkholifatul Maula, Pengaruh Penambahan Biochar pada Komponen Teknologi Budidaya Jagung Di Lahan Kering Majalengka - Nana Sutrisna, Yanto Surdianto, dan Agus Ruswandi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah;

- (7) Penyelenggaraan Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp140.594.275,00 dan realisasi sebesar Rp136.969.967,00 atau setara dengan 97,49%. *Output* kegiatan adalah dokumen kerja sama penelitian dan pengembangan IPTEK, tindak lanjut kerja sama BP2D dengan Balitbangda Kalsel, Penjajakan, perumusan naskah PKS dan penandatanganan PKS antara BP2D Jabar dan BP2D Maluku Utara. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yakni Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar 100%, dengan alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp893.578.250,00 dengan realisasi sebesar Rp816.984.266,00 setara dengan 91,43%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp554.653.250,00 dan realisasi sebesar Rp527.650.266,00 atau setara dengan 95,13%. *Output* kegiatan adalah belanja modal pengadaan printer dan belanja modal pengadaan scanner, belanja modal pengadaan almari dan belanja modal pengadaan komputer, perlengkapan kantor, peralatan kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp91.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp89.550.000,00 setara dengan 97,87%. *Output* kegiatan adalah terealisasinya kegiatan kapasitas dan kualitas aparatur BP2D. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur;
- (3) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.425.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp173.734.000,00 setara dengan 87,12%. *Output* kegiatan adalah terealisasinya kegiatan kerohanian dan olahraga di BP2D. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur;
- (4) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp48.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp26.050.000,00 setara dengan 54,27%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya Bimtek dan diklat aparatur. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yakni Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar 100%, dengan alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp893.578.250,00 dengan realisasi sebesar Rp816.984.266,00 setara dengan 91,43%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp554.653.250,00 dan realisasi sebesar Rp527.650.266,00 atau setara dengan 95,13%. *Output* kegiatan adalah belanja modal pengadaan printer dan belanja modal pengadaan scanner, belanja modal pengadaan almari dan belanja modal pengadaan komputer, perlengkapan kantor, peralatan kantor. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp91.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp89.550.000,00 setara dengan 97,87%. *Output* kegiatan adalah terealisasinya kegiatan kapasitas dan kualitas aparatur BP2D. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur;
- (3) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.425.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp173.734.000,00 setara dengan 87,12%. *Output* kegiatan adalah terealisasinya kegiatan kerohanian dan olahraga di BP2D. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur;

- (4) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp48.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp26.050.000,00 setara dengan 54,27%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya Bimtek dan diklat aparatur. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur.

2) Permasalahan dan Solusi Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

a. Permasalahan

- (1) Belum optimalnya penggunaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan riset dalam perencanaan dan pembangunan daerah;
- (2) Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Provinsi Jawa Barat belum optimal.

b. Solusi

- (1) Meningkatkan pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam perencanaan dan pembangunan daerah;
- (2) Meningkatkan sosialisasi mengenai pendaftaran HAKI di Jawa Barat.

37. Fungsi Penunjang Lainnya

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Fungsi Penunjang Lainnya tahun 2019 adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan realisasi sebesar BB (kategori) usulan dari target sebesar BB (kategori); Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah dengan realisasi sebesar 61,22% dari target sebesar 50%; Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru dengan realisasi sebesar 0 usulan dari target sebesar 0 Usulan; Skoring LPPD Provinsi di tingkat nasional dengan realisasi sebesar 3,34 poin dari target sebesar 3,34 poin; Prosentase naskah kerja sama yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 78,91% dari target sebesar 75%; Prosentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum dengan realisasi sebesar 100% dan nilai peningkatan kualitas pelayanan publik dengan realisasi sebesar 4,22 poin dari target 4,10 poin.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah adalah Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat dengan realisasi A dari target A; skoring LPPD Provinsi di tingkat nasional dengan realisasi 3,34 dari target 3,34 dan Level/Tingkat Maturitas UKPBJ dengan realisasi 2 dari target 2. Alokasi anggaran Program Rp15.821.273.300,00 dengan realisasi sebesar Rp13.469.277.795,00 setara dengan 85,13%.

- (1) Kegiatan Pengendalian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp245.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp238.909.591,00 atau setara dengan 97,51%. *Output* kegiatan adalah laporan hasil survey Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp210.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp203.567.500,00 atau setara dengan 96,94%.

- Output* kegiatan adalah 1 dokumen *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya strategi, arah dan kebijakan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat;
- (3) Kegiatan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp415.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp365.151.597,00 atau setara dengan 87,99%. *Output* kegiatan adalah 1 (satu) dokumen Draft Peraturan Gubernur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - (4) Kegiatan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp105.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.652.797,00 atau setara dengan 93%. *Output* kegiatan adalah 17 dokumen rekomendasi penerapan SOP UPTD/UPTB pada 17 Perangkat Daerah di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya mutu pelayanan, kualitas dan kuantitas dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - (5) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp140.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp134.257.094,00 atau setara dengan 95,90%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat;
 - (6) Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp415.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 381.901.175,00 atau setara dengan 92,02%. *Output* kegiatan adalah 2 dokumen rancangan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah

- meningkatnya kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp385.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp379.136.839,00 atau setara dengan 98,48%. *Output* kegiatan adalah 27 laporan hasil pelaksanaan pembinaan penyusunan dokumen SAKIP di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;
 - (8) Kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp373.148.800,00 dan realisasi sebesar Rp354.320.027,00 atau setara dengan 94,95%. *Output* kegiatan adalah 1 dokumen laporan hasil penyelenggaraan pembinaan penyusunan dokumen SAKIP Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Perangkat Daerah;
 - (9) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp345.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp319.919.638,00 atau setara dengan 92,73%. *Output* kegiatan adalah rekomendasi gubernur kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan;
 - (10) Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp280.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp259.765.707,00 atau setara dengan 92,77%. *Output* kegiatan adalah dokumen analisis standar belanja, standar biaya umum dan standar belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya

- Regulasi Standarisasi Belanja di Provinsi Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp275.000.000,00 dan realisasi Rp245.089.882,00 atau setara dengan 89,12%. *Output* kegiatan adalah 2 dokumen rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (12) Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp154.984.847,00 atau setara dengan 88,56%. *Output* kegiatan adalah 2 dokumen draft Kepgub tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya pemetaan bisnis proses Provinsi Jawa Barat secara efektif, efisien, produktif dan akuntabel;
- (13) Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp140.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp66.726.364,00 atau setara dengan 47,66%. *Output* kegiatan adalah 1 Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya keterbukaan informasi pelayanan publik dan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (14) Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp2.350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.132.154.401,00 atau setara dengan 48,18%. *Output* kegiatan adalah 1 laporan hasil evaluasi pelayanan publik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 42 Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya efektivitas layanan publik di Jawa Barat;

- (15) Kegiatan Pengendalian Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.210.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.087.427.756,00 atau setara dengan 89,87%. *Output* kegiatan adalah rekomendasi Gubernur Jawa Barat tentang usulan inovasi pelayanan publik yang diajukan ke Tingkat Nasional. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional;
- (16) Kegiatan Pembinaan dalam Pemenuhan dan Pelaksanaan 17 Standar LPSE Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp186.614.450,00 atau setara dengan 93,31% *Output* kegiatan adalah dokumen laporan pengelolaan layanan LPSE Kab/Kota sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terbinanya LPSE di 27 Kabupaten/Kota;
- (17) Kegiatan Peningkatan Layanan Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp382.703.590,00 atau setara dengan 95,68%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Survey IKM, Laporan Rakor LPSE, Laporan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan LPSE sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terlayannya pengguna LPSE lingkup Provinsi Jawa Barat;
- (18) Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) LPSE yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.299.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.934.435.183,00 atau setara dengan 91,50% *Output* kegiatan adalah Dokumen Laporan Pengelolaan TIK LPSE sebanyak 12 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terkelolanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) LPSE Provinsi Jawa Barat;
- (19) Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.988.430,00 dengan realisasi

- anggaran sebesar Rp188.749.216,00 atau setara dengan 94,38%. *Output*, 1 Dokumen Penamaan Rupa Bumi Unsur buatan Kabupaten/Kota di Jabar. *Outcome* meningkatnya tertib administrasi penamaan rupa bumi unsur buatan Kabupaten/Kota di Jabar;
- (20) Kegiatan Pengelolaan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.934.372,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp349.932.581,00 atau setara dengan 87,50%. *Output* Dokumen Batas Daerah antar Provinsi dan kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Outcome* meningkatnya tertib administrasi penetapan batas daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- (21) Kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp849.757.376,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp809.760.168,00 atau setara dengan 95,29%. *Output* Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. *Outcome* meningkatnya presentase capaian kinerja urusan pemerintahan daerah provinsi;
- (22) Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp258.798.910,00 atau setara dengan 86,27%. *Output* Berita Acara Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Outcome* meningkatnya presentase capaian kinerja urusan pemerintahan daerah provinsi;
- (23) Kegiatan Regulasi Urusan Pemerintahan Provinsi yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp461.637.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp401.618.500,00 atau setara dengan 87,00%. *Output* terselenggaranya 4 (empat)

kali Forum Asisten Pemerintahan Kabupaten/kota se-Jawa Barat, 4 (empat) kali rapat peningkatan kapasitas internal terkait isu-isu strategis otonomi daerah, kajian instrumen evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan. *Outcome* presentase capaian kinerja urusan pemerintahan daerah provinsi;

- (24) Kegiatan Persiapan/Monitoring/Evaluasi Penataan Daerah di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp488.964.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp411.812.730,00 atau setara dengan 84,22%. *Output* 4 (empat) kali rapat Forum *desk* Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB), kajian penataan daerah dan verifikasi persyaratan usulan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB). *Outcome* tersedianya dokumen penataan daerah di Jawa Barat;
- (25) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.158.042.822,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.123.887.252,00 atau setara dengan 97,05%. *Output* 1 Dokumen Inventarisasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum; 1 Dokumen laporan pelaksanaan Kopdar. *Outcome* terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan umum Provinsi dan Kabupaten/Kota; optimalisasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM

Capaian Indikator Kinerja Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM adalah jumlah desa/kelurahan sadar hukum dengan realisasi 130 dari target 130; jumlah produk hukum kabupaten/kota yang diharmonisasi, dievaluasi dan difasilitasi dengan realisasi 205 dari target 205; jumlah produk hukum provinsi yang disusun, dievaluasi dan ditetapkan dengan realisasi 16 dari target 10; jumlah penanganan perkara perdata, TUN secara Litigasi dengan realisasi 21 dari target 18; jumlah penyelesaian sengketa hukum secara non litigasi dengan realisasi 35 dari target 32. Alokasi anggaran program adalah sebesar

Rp11.014.017.551,00 dengan realisasi sebesar Rp10.627.045.971,00 setara dengan 96,49%.

- (1) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.999.999.939,00 dan realisasi sebesar Rp2.950.750.564,00 atau setara dengan 98,36%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang ditetapkan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang ditetapkan;
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan alokasi sebesar Rp356.499.632,00 dan realisasi sebesar Rp355.563.500 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan adalah yaitu terinformasinya peraturan perundang-undangan melalui website JDIH, sedangkan *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah pengunjung website sebanyak 20.000 orang;
- (3) Kegiatan Evaluasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi sebesar Rp637.655.980,00 dan realisasi sebesar Rp626.436.582,00 atau setara dengan 98,24%. *Output* kegiatan adalah yaitu Jumlah Pra Rancangan Produk Hukum yang dievaluasi, *Outcome* kegiatan adalah terevaluasi dan terharmonisasinya Produk Hukum Kabupaten/Kota;
- (4) Kegiatan Pengkajian Pra Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebesar Rp200.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.135.000,00 atau setara dengan 99,57%. *Output* kegiatan adalah jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi. *Outcome* kegiatan adalah terkaji dan terevaluasi Pra Raperda Kab/Kota;
- (5) Kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.943.903.075,00 atau setara dengan 97,20%. *Output* kegiatan adalah yaitu Jumlah Produk Hukum yang dibentuk, *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya 10 Raperda untuk di bahas di DPRD Provinsi Jawa Barat;
- (6) Kegiatan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebesar Rp1.286.865.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.230.263.200,00 atau setara dengan 95,60%. Keegiatannya adalah yaitu jumlah Peserta Impelentasi RANHAM, *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah masyarakat dan aparat yang memahami HAM;

- (7) Kegiatan Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi sebesar Rp550.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp542.532.400,00 atau setara dengan 98,64%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Produk Hukum Provinsi yang dievaluasi. *Outcome* kegiatan adalah terevaluasinya 10 buah Produk Hukum;
- (8) Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp442.193.250,00 atau setara dengan 98,27%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Peraturan Gubernur yang Ditetapkan. *Outcome* kegiatan adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur;
- (9) Kegiatan Penanganan Perkara Secara Litigasi sebesar Rp1.385.996.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.325.694.050,00 atau setara dengan 95,65%. *Output* kegiatan adalah terselesaikannya persoalan hukum perdata maupun TUN yang masuk ke Biro Hukum dan HAM, *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya penanganan perkara yang masuk ke Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali baik perkara perdata maupun perkara TUN;
- (10) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Secara Non Litigasi sebesar Rp447.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp440.409.550,00 atau setara dengan 98,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah Sengketa Perdata, TUN dan Pendampingan yang diselesaikan secara Non Litigasi. *Outcome* kegiatan adalah Penyelesaian sengketa hukum secara Non litigasi;
- (11) Kegiatan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp389.096.600,00 atau setara dengan 77,82%. *Output* kegiatan adalah jumlah bantuan hukum secara Litigasi untuk Masyarakat Miskin . *Outcome* kegiatan adalah tertanganinya perkara litigasi yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Jawa Barat;
- (12) Kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp181.068.200,00 atau setara dengan 90,53%. *Output* kegiatan adalah jumlah masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembentukan Perda dan pergub di website. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja

pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik.

c. Program Kerja Sama Pembangunan

Capaian Indikator Kinerja Program Kerja Sama Pembangunan adalah persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan realisasi 78,91% dari target 75%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp13.994.262.347,00 dengan realisasi sebesar Rp13.597.107.580,00 setara dengan 97,16%.

- (1) Kegiatan Penataan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.163.452.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.150.692.726,00 atau setara dengan 98,74%. *Output* kegiatan adalah 87 dokumen kerja sama antar daerah; 54 dokumen kerja sama dengan pihak ketiga. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Fasilitas Naskah Kerja Sama Daerah;
- (2) Kegiatan Evaluasi Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.161.408.250,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.143.243.618,00 atau setara dengan 98,44%. *Output* kegiatan adalah 24 *adendum* kerja sama. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya fasilitas naskah kerja sama daerah;
- (3) Kegiatan Kerja sama Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.769.402.097,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.403.209.788,00 atau setara dengan 96,60%. *Output* kegiatan adalah 3 naskah MoU (*Memorandum of Understanding*); 2 Naskah LoI (*Letter of Intent*), 1 Naskah MoA (*Memorandum of Agreement*); 5 peninjauan kerja sama luar negeri. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya fasilitas naskah kerja sama daerah;
- (4) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kerja Gubernur yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi Rp899.961.448,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya rapat

kerja Gubernur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi naskah kerja sama daerah.

d. Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Capaian Indikator Kinerja Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan adalah kualifikasi indeks keterbukaan informasi publik dengan realisasi informatif dari target informatif; tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan dengan realisasi baik dari target baik; Indeks Kerukunan umat beragama dengan realisasi 68,5 dari target 68,6-69,0 poin; persentase fasilitasi administrasi pemerintahan umum dengan realisasi 100 dari target 90; persentase perumusan bahan kebijakan umum lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti dengan realisasi 87,70% dari target 100%; dan persentase perumusan bahan kebijakan umum lingkup BUMD yang ditindaklanjuti dengan realisasi 69,18% dari target 100%. Alokasi anggaran Program adalah sebesar Rp89.031.228.381,00 dengan realisasi sebesar Rp77.625.072.727,00 setara dengan 87,19%.

- (1) Pengelolaan Web dan Media Sosial Tahun 2019 yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp574.995.840,00 dan realisasi sebesar Rp509.067.610,00 atau setara dengan 88,53%. *Output* kegiatan adalah Pengelola konten dan admin Website Humas, Pengelola konten dan admin Medsos Humas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Produksi Materi Publikasi Iklan Layanan Masyarakat, Infografis dan Videografis Tahun 2019 yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.674.999.470,00 dan realisasi sebesar Rp2.138.193.527,00 atau setara dengan 79,93%. *Output* kegiatan adalah Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan Advertorial Televisi; info grafis; bahan tayang museum gedung sate; desainer komunikasi visual publikasi; reporter materi publikasi; buku laporan tahunan dan publikasi kehumasan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (3) Publikasi Program dan Kebijakan Tahun 2019 yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.401.900.148,00 dan realisasi sebesar Rp22.872.851.392,00 atau setara dengan 90,04%. *Output* kegiatan adalah Publikasi Media Cetak, Publikasi Radio, Publikasi Televisi, Publikasi Media Online, Publikasi Media Luar Ruang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (4) Monitoring Media yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.099.089,00 dan realisasi sebesar Rp489.197.280,00 atau setara dengan 81,52%. *Output* kegiatan adalah umlah Laporan Sentiment Pemberitaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang di muat Media Massa. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (5) Media *Gathering* yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp546.980.660,00 dan realisasi sebesar Rp471.208.500,00 atau setara dengan 86,15%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Forum Media *Gathering* yang dilaksanakan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Forum Media *Gathering* yang Dilaksanakan guna Terciptanya Kesepahaman dan Kebersamaan antara Humas Pemprov Jabar dengan Awak Media yang bertugas di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (6) Konferensi Pers dan Perjalanan Jurnalistik yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.680.296.160,00 dan realisasi sebesar Rp2.892.780.794,00 atau setara dengan 78,60%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Laporan Pemberitaan Kegiatan Pemprov Jabar pada Media Massa. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (7) Pengelolaan Digital Clipping yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp120.160.580,00 dan realisasi sebesar Rp97.553.920,00 atau setara dengan 81,19%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Laporan Pemberitaan dalam bentuk Aplikasi Digital Klipping. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (8) Pembuatan Majalah Bulanan yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp364.48.0250,00 dan realisasi sebesar Rp315.920.750,00 atau setara dengan 86,68%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Majalah Gedung Sate dan *Java Lane* yang Dicitak. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (9) Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.016.171.802,00 dan realisasi sebesar Rp769.529.692,00 atau setara dengan 75,73%. *Output* kegiatan adalah Laporan Rakor PPID Perangkat Daerah, Laporan Rakor Forum Koordinasi dan Komunikasi BUMD, Penyusunan Dokumen Daftar Informasi Publik, Jurnal PPID, Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID), Pembinaan Front Liner Perangkat Daerah, Laporan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (10) Pengelolaan Penanganan Pelayanan Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.727.322.200,00 dan realisasi sebesar Rp3.211.999.601,00 atau setara dengan 86,17%. *Output* kegiatan adalah Laporan Bimtek Pelayanan Pengaduan, Laporan Rakor Forum Komunikasi Pengaduan Jawa Barat, Materi Sosialisasi Pengaduan, Laporan Layanan Pengaduan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang

- positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (11) Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan PPID Kab/Kota yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp602.778.851,00 dan realisasi sebesar Rp429.838.671,00 atau setara dengan 71,73%. *Output* kegiatan adalah Laporan Rakor Forum Koordinasi PPID Kab/Kota, Laporan PPID Kab/Kota Gathering, Dokumen Kumpulan Aturan PPID dan Pelayanan Publik, Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Kab/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (12) Rapat Koordinasi dan Seminar Kehumasan yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp267.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp211.147.550,00 atau setara dengan 78,99%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan Seminar Kehumasan yang Diselenggarakan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (13) Fasilitasi dan Sosialisasi Melalui *Event* yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.073.994.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.773.452.344,00 atau setara dengan 92,62%. *Output* kegiatan adalah Jumlah *Event* yang Diselenggarakan. *Outcome* kegiatan adalah ersentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (14) Penyusunan Strategi dan Pengelolaan Program Kehumasan akolasi anggaran sebesar Rp1.023.023.000,00 dan realisasi sebesar Rp833.079.178,00 atau setara dengan 81,43%. *Output* kegiatan adalah Rapat/FGD/Kajian terkait Perumusan Strategi Komunikasi dan Manajemen Kehumasan dan penyusunan Bahan/Materi dukungan Publikasi Kehumasan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (15) Pengelolaan Hasil Peliputan dan Dokumentasi yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.103.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.927.625.256,00 atau setara dengan 91,64%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Hasil Liputan dan Dokumentasi yang Dikelola. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (16) Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.289.686.190,00 dan realisasi sebesar Rp5.248.417.344,00 atau setara dengan 99,22%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Hasil Liputan Kegiatan Prov. Jawa Barat yang di Dokumentasikan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (17) Apresiasi Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.515.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.494.729.610,00 atau setara dengan 98,62%. *Output* kegiatan adalah Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah (Jasa Kesenian, Jasa Pengawalan Tamu), Cetakan Penunjang acara Pimpinan dan PHBN, ATK Penunjang acara Pimpinan dan PHBN. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (18) Apresiasi Penyelenggaraan Keprotokolan yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.299.995.897,00 dan realisasi sebesar Rp3.244.687.072,00 atau setara dengan 98,32%. *Output* kegiatan adalah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan (Pimpinan,) Apresiasi Peringatan Hari besar dan hari jadi Jawa Barat, Petugas Protokoler dan petugas Front Office. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;

-
- (19) Pelayanan Administrasi TU Pimpinan Tahun 2019 yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.481.999.593,00 dan realisasi sebesar Rp2.309.321.972,00 atau setara dengan 93,04%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi TU Pimpinan, ATK TU Pimpinan, Jasa Penerjemah, Jasa Pengurusan Arsip,) Tenaga non Teknis, Rapat TU Pimpinan, Perjalanan Dinas Pendukung Kegiatan, BBM Operasional. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (20) Dukungan Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.264.799.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.949.399.782,00 atau setara dengan 69,16%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pengawal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan kualifikasi baik pada tingkat persepsi publik yang positif terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (21) Kegiatan Penguatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp548.552.433,00 dan realisasi sebesar Rp547.264.433,00 atau setara dengan 99,77%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (22) Kegiatan Optimalisasi Peran Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pembangunan Pendidikan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp429.560.890,00 dan realisasi sebesar Rp424.811.842,00 atau setara dengan 98,89%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (23) Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pendidikan Khusus yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan

- Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp325.589.771,00 dan realisasi sebesar Rp324.234.771,00 atau setara dengan 99,58%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (24) Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pendidikan Menengah yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.999.909,00 dan realisasi sebesar Rp296.079.709,00 atau setara dengan 98,69%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (25) Kegiatan Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dan Siaga yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp749.994.886,00 dan realisasi sebesar Rp638.762.573,00 atau setara dengan 85,17%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (26) Kegiatan Penguatan Sinergitas Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.883.100,00 dan realisasi sebesar Rp149.509.932,00 atau setara dengan 49,86%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (27) Kegiatan Implementasi Penguatan Kelembagaan TP-UKS dan Tim Pembina Sekolah Sehat di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp949.969.859,00 dan realisasi sebesar Rp901.152.234,00 atau setara dengan 94,86%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah

- Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (28) Kegiatan Implementasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp263.098.509,00 atau setara dengan 87,70%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (29) Kegiatan Penguatan Sinergitas Tim Koordinasi Pengendalian Penyakit Menular dan Komisi Zoonosis Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp137.295.000,00 dan realisasi sebesar Rp121.002.366,00 atau setara dengan 88,13%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (30) Kegiatan Peningkatan Sinergitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Fasilitas Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit Provins) yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.999.645,00 dan realisasi sebesar Rp242.212.700,00 atau setara dengan 80,74%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (31) Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Dibidang Kesehatan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.996.200,00 dan realisasi sebesar Rp314.635.659,00 atau setara dengan 62,93%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (32) Kegiatan Lintas Sektor Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp239.178.650,00 atau setara dengan 95,67%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (33) Kegiatan Penghargaan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.936.747,00 dan realisasi sebesar Rp195.394.750,00 atau setara dengan 97,73%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (34) Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp223.913.350,00 atau setara dengan 89,57%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (35) Kegiatan Lintas Sektor Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.140.500,00 atau setara dengan 98,76%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (36) Kegiatan Kegiatan Implementasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp327.031.970,00 dan realisasi sebesar Rp293.119.050,00 atau setara dengan 89,63%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;

- (37) Kegiatan Apresiasi Para Teladan Berprestasi Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp345.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp320.420.750,00 atau setara dengan 92,88%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (38) Kegiatan Penyusunan Profil Masyarakat Adat di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.980.045,00 dan realisasi sebesar Rp293.356.080,00 atau setara dengan 97,79%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (39) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.981.877,00 dan realisasi sebesar Rp143.448.725,00 atau setara dengan 95,64%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (40) Kegiatan Perluasan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Bukan Penerima Upah Lintas Sektor yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.999.979,00 dan realisasi sebesar Rp374.855.660,00 atau setara dengan 83,30%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (41) Kegiatan Peningkatan Kualitas KSAD Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp230.175.849,00 dan realisasi sebesar Rp214.982150,00 atau setara dengan 93,40%. *Output* kegiatan adalah Persentase

- Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (42) Kegiatan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Pekerja Teladan dan Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.999.751,00 dan realisasi sebesar Rp539.548.650,00 atau setara dengan 89,92%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (43) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Revitalisasi Badan Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.999.828,00 dan realisasi sebesar Rp281.829.000,00 atau setara dengan 93,94%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (44) Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Visualisasi Kesejahteraan Transmigran asal Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp202.532.419,00 dan realisasi sebesar Rp198.951.264,00 atau setara dengan 98,23%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (45) Kegiatan Penguatan Kebijakan Jabar Tolak Kekerasan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp659.084.527,00 dan realisasi sebesar Rp612.708.750,00 atau setara dengan 92,96%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;

- (46) Kegiatan Apresiasi Kepada Wirausahawan Muda organisasi kepemudaan dan Pramuka di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.978.910,00 dan realisasi sebesar Rp291.237,250,00 atau setara dengan 97,09%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (47) Kegiatan Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keolahragaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.938.840,00 dan realisasi sebesar Rp484.102.252,00 atau setara dengan 96,83%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (48) Kegiatan Anugerah Inovasi Dan Prakarsa Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp817.963.142,00 dan realisasi sebesar Rp800.993.500,00 atau setara dengan 97,93%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (49) Kegiatan Fasilitasi Pendukung Penyusunan Kebijakan Pokok-pokok Pikiran tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.981,00 dan realisasi sebesar Rp240.248.171,00 atau setara dengan 96,10%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (50) Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dalam mendukung Kearifan Lokal yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.971,00 dan realisasi sebesar Rp230.594.870,00 atau setara dengan 92,24%.

- Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (51) Kegiatan Penguatan Pendukung Pergub Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Dewan Kebudayaan Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp957.804.850,00 dan realisasi sebesar Rp747.681.465,00 atau setara dengan 78,06%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (52) Kegiatan Fasilitasi pendukung Pokok-Pokok Pikiran tentang Kebijakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.868,00 dan realisasi sebesar Rp248.785.668,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (53) Kegiatan Penyusunan Strategi Kebudayaan Jawa Barat dalam Mendukung UU Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.999.890,00 dan realisasi sebesar Rp248.894.290,00 atau setara dengan 99,56%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (54) Kegiatan Optimalisasi Fungsi Manajemen dalam Layanan Bantuan Hibah Subbidang Bina Mental dan Kerohanian yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp829.602.399,00 dan realisasi sebesar Rp464.450.000,00 atau setara dengan 55,98%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;

- (55) Kegiatan Implementasi Fungsi Manajemen pada RAM-IP Pembangunan Masjid Monumental yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.998.366,00 dan realisasi sebesar Rp48.304.750,00 atau setara dengan 48,31%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (56) Kegiatan Pembinaan Mental dan Kerohanian Melalui Pemahaman dan Pengamalan Baca dan Tulis Al-Qur'an Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.999.673,00 dan realisasi sebesar Rp130.042.750,00 atau setara dengan 65,02%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (57) Kegiatan Bina Kerohanian melalui Implementasi Pengamalan Agama Safari Ramadhan Gubernur dan Peringatan Hari Besar Agama Islam yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.980.802,00 dan realisasi sebesar Rp242.443.300,00 atau setara dengan 80,82%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti;
- (58) Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp474.761.600,00 dan realisasi sebesar Rp461.377.750,00 atau setara dengan 97,18%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen Laporan/Rekomendasi/Rumusan Kebijakan tentang Pengembangan Penanaman Modal dan Perijinan di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan tentang Pengembangan Penanaman Modal dan Perijinan di Jawa Barat;

- (59) Kegiatan Pengembangan Investasi Daerah yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp832.113.673,00 dan realisasi sebesar Rp794.398.370,00 atau setara dengan 95,47%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya 3 (tiga) Dokumen Hasil Kajian Investasi Pemerintah Daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan tentang Investasi Pemerintah Daerah;
- (60) Kegiatan Pembinaan BUMD Non Keuangan yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.468.618.208,00 atau setara dengan 56,49%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya 3 (tiga) dokumen Laporan/Rekomendasi/Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Pembinaan BUMD Non Lembaga Keuangan dan laporan perencanaan, pengembangan dan evaluasi BUMD. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan pengembangan BUMD Non lembaga Keuangan;
- (61) Kegiatan Pembinaan BUMD Perbankan dan Jasa Keuangan yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp404.940.166,00 dan realisasi Rp372.866.000,00 atau setara dengan 92,08%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen Laporan/Rekomendasi/Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Pembinaan BUMD Lembaga Keuangan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan pengembangan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan dan Jasa Keuangan;
- (62) Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.299.995.628,00 dan realisasi sebesar Rp1.269.860.090,00 atau setara dengan 97,68%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti pada bidang Sumber Daya Alam. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya Jumlah dokumen bahan kebijakan hasil koordinasi,

- integrasi dan sinkronisasi aspek sumber daya alam di Jawa Barat;
- (63) Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan yang dilaksanakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.299.991.046,00 dan realisasi sebesar Rp1,264,582,995.00 atau setara dengan 97,28%. *Output* kegiatan adalah persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti pada bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya Jumlah dokumen bahan kebijakan hasil koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aspek pertanian, peternakan, ketahanan pangan perikanan dan kelautan di Jawa Barat;
- (64) Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Industri Perdagangan dan Pariwisata yang dilaksanakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.299.993.046,00 dan realisasi sebesar realisasi sebesar Rp915.397.875.00 atau setara dengan 70,42%. *Output* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan yang ditindaklanjuti pada bidang Sarana Perekonomian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya Jumlah dokumen bahan kebijakan hasil koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aspek Sarana Perekonomian di Jawa Barat;
- (65) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pendukung Usaha Bagi Usaha Koperasi Kecil yang dilaksanakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.999.416,00 dan realisasi sebesar realisasi sebesar Rp440.111.750,00 atau setara dengan 73,35%. *Output* kegiatan adalah persentase rekomendasi/laporan/bahan kebijakan yang ditindaklanjuti dalam pemberdayaan KUK dan penyelesaian Kredit Program Dakabalarea. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase rekomendasi/laporan/bahan kebijakan peningkatan penyelesaian kredit Dakabalarea, dan akses pembiayaan bagi Kredit Usaha Kecil (KUK) di Jawa Barat;
- (66) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Aspek Pekerjaan umum dan Energi yang dilaksanakan

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp759.996.308,00 dan realisasi sebesar realisasi sebesar Rp723.289.345.00 atau setara dengan 95,17%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan/rekomendasi/rumusan kebijakan dalam bidang sumber daya air, kebinamargaan, perhubungan, pemukiman perumahan, dan esdm. *outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase laporan/rekomendasi/rumusan kebijakan dalam bidang sumber daya air, kebinamargaan, perhubungan, pemukiman perumahan, dan ESDM di Jawa Barat;

- (67) Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp486.469.893,00 realisasi anggaran sebesar Rp341.909.586,00 atau setara dengan 70,28%. *Output* 1 Dokumen Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Barat. *Outcome* meningkatnya tertib administrasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Barat;
- (68) Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp590.155.493,00 realisasi anggaran sebesar Rp453.095.600,00 atau setara dengan 76,78%. *Output* 1 Dokumen administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian serta Penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. *Outcome* meningkatnya tertib administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian serta Penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
- (69) Kegiatan Perijinan Pejabat Negara dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp142.824.891,00 realisasi anggaran sebesar Rp120.713.049 atau setara dengan 84,52%. *Output* 1 Dokumen Perijinan Pejabat Negara dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. *Outcome*

meningkatnya tertib administrasi perijinan pejabat negara dan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;

- (70) Kegiatan Penataan Aspek Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.953.114,00 realisasi anggaran sebesar Rp328.460.900,00 atau setara dengan 93,85%. *Output* 17 Dokumen Penetapan Lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *Outcome* meningkatnya tertib administrasi penetapan lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

e. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah adalah persentase ketercapaian program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi lingkup Biro Humas dengan realisasi 78,45% dari target 100%; persentase ketercapaian program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi lingkup Biro Yanbangsos dengan realisasi 91,85% dari target 100%; persentase ketercapaian program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi lingkup Biro Pemerintahan dan kerja sama dengan realisasi 69% dari target 100%; persentase ketercapaian program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi lingkup biro pengadaan barang dan jasa dengan realisasi 40,09% dari target 100%; persentase ketercapaian program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi lingkup Biro Umum dengan realisasi 92.93% dari target 100%; persentase ketercapaian program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi lingkup Biro Perekonomian dengan realisasi 78.20% dari target 100%; persentase ketercapaian program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi lingkup Biro BUMD dengan realisasi 67% dari target 100%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp13.070.041.505,00 dengan realisasi sebesar Rp10.610.093.773,00 setara dengan 81,18%.

- (1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran

- sebesar Rp653.907.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp454.437.917,00 atau setara dengan 69,50%. *Output* kegiatan jumlah bahan dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Internal Biro Pemerintahan dan Kerja Sama. *Outcome* tingkat Kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi;
- (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Hukum dan HAM dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.249.999,00 dan realisasi sebesar Rp141.269.879,00 atau setara dengan 91,00%. *Output* kegiatan Jumlah bahan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Hukum dan HAM. *Outcome* tingkat Kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi;
 - (3) Kegiatan Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp959.148.541,00 dan realisasi sebesar Rp804.816.972,00 atau setara dengan 83,91%. *Output* tersedianya data dan informasi pada Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah jumlah bahan dokumen perencanaan dan pelaporan internal Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;
 - (4) Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Ketatausahaan dan Monitoring Evaluasi di Lingkungan Biro Pelayanan dan Pengembangan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.997.500,00 dan realisasi sebesar Rp99.228.750,00 atau setara dengan 99,23%. *Output* tersedianya data dan informasi pada Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah jumlah bahan dokumen perencanaan dan pelaporan internal Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;
 - (5) Kegiatan Membangun Database dan Sistem Informasi Managemen Pesantren (SINTREN) yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.559.987.900,00 dan realisasi sebesar Rp1.432.818.348,00 atau setara dengan 91,85%. *Output* Tersedianya data dan informasi pada Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah data dan informasi Pondok Pesantren;
 - (6) Kegiatan Pembuatan Perda Pendidikan Keagamaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan

- alokasi anggaran sebesar Rp299.978.713,00 dan realisasi sebesar Rp251.050.200,00 atau setara dengan 83,69%. *Output* Tersedianya data dan informasi pada Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perda Pendidikan Keagamaan di Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp33.500.900,00 atau setara dengan 67,00%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya 10 (sepuluh) Dokumen Perencanaan, dan Pelaporan kinerja internal. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya perencanaan pembangunan yang akuntabel;
- (8) Kegiatan Penguatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.700.502.614,00 dan realisasi sebesar realisasi sebesar Rp1,329.718.256.00 atau setara dengan 78,20%. *Output* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pelayanan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Asisten Perekonomian dan Pembangunan di Jawa Barat;
- (9) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Perekonomian yang dilaksanakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.852.500,00 dan realisasi sebesar Rp177.001.762,00 atau setara dengan 70,56%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan operasional dan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (10) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp140.323.500,00 atau setara dengan 40,09%. *Output* kegiatan adalah Laporan hasil Sosialisasi

- sebanyak 6 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya dan terkelolanya paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Supervisi dan Pengendalian Rencana Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp620.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp422.042.460,00 atau setara dengan 68,07%. *Output* kegiatan adalah Dokumen hasil Supervisi dan pengendalian proses pengadaan barang/jasa sebanyak 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya dan terkelolanya paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - (12) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp570.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp255.216.030,00 atau setara dengan 44,77%. *Output* kegiatan adalah Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Tersusunnya dan terkelolanya paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - (13) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sanggah dan Aduan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp462.848.175,00 atau setara dengan 71,21%. *Output* kegiatan adalah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyelesaian Sanggah dan Aduan Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Tersusunnya dan terkelolanya paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - (14) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Riset Pasar dan Aduan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp78.310.030,00 atau setara dengan 39,16%. *Output* kegiatan adalah Laporan hasil riset dan Aduan sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya dan

- terkelolanya paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (15) Kegiatan Fasilitasi Standarisasi E-Katalog yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp309.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp231.686.368,00 atau setara dengan 74,80%. *Output* kegiatan adalah Dokumen E-Katalog Lokal sebanyak 1 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya dan terkelolanya paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (16) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp377.874.450,00 dan realisasi sebesar Rp357.072.280,00 atau setara dengan 94,49%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. *Outcome* kegiatan adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja;
- (17) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Humas dan Protokol yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.669.600,00 dan realisasi sebesar Rp122.119.150,00 atau setara dengan 78,45%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Bahan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Internal. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Ketersediaan data dan informasi pada Sekretariat Daerah;
- (18) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp234.994.250,00 dan realisasi sebesar Rp215.978.399,00 atau setara dengan 91,91%. *Output* kegiatan adalah Tersusunnya laporan kinerja Sekretariat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan, LKIP, PK, RKT, RKA, DPA, IKU, IKI). *Outcome* kegiatan adalah Terfasilitasinya Biro-biro dalam penyusunan Laporan Kinerja lingkup Sekretariat Daerah;
- (19) Kegiatan Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.618.393.030,00 dan realisasi sebesar Rp1.509.377.151,00 atau setara dengan 93,26%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Berita acara rekonsiliasi sata asset pengangkutan barang. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Sekretariat Daerah;

- (20) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp549.998.556,00 dan realisasi sebesar Rp546.237.791,00 atau setara dengan 99,32%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya 2 kali pelaksanaan FGD dan sosialisasi terkait peraturan Pengelolaan Keuangan bagi Pengelola Keuangan di Lingkup Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan pengelolaan keuangan bagi para Verifikatur, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan para pengelola Keuangan di Biro-Biro;
- (21) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp126.106.000,00 atau setara dengan 84,07%. *Output* kegiatan adalah Telah dilakukan *update* fitur pada Sistem Pelayanan Administrasi Keuangan berupa tampilan *report* rekap penyerapan anggaran dan tampilan kecepatan proses verifikasi SPM dan SPJ. *Outcome* kegiatan adalah Proses verifikasi SPM dan SPJ dapat lebih mudah dipantau dan ter-*record* dalam sistem;
- (22) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp524.999.108,00 dan realisasi sebesar Rp478.311.500,00 atau setara dengan 91,11%. *Output* kegiatan adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Membantu proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akurat dan akuntabel yang dapat

- diukur dari hasil penilaian/opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- (23) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp584.015.180,00 dan realisasi sebesar Rp566.384.705,00 atau setara dengan 96,98%. *Output* kegiatan adalah jumlah bahan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja internal Biro Umum. *Outcome* kegiatan adalah Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Sekretariat Daerah;
- (24) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp225.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp178.284.500,00 atau setara dengan 79,18%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (25) Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Prov. Jabar yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp94.957.125,00 dan realisasi sebesar Rp83.752.500,00 atau setara dengan 88,20%. *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen data barang milik daerah yang dipindahtangankan, data barang milik daerah yang akan dimusnahkan dan data barang milik daerah yang akan dihapus. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Sekretariat Daerah;
- (26) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp124.614.939,00 dan realisasi sebesar Rp112.200.250,00 atau setara dengan 90,04%. *Output* kegiatan adalah Jumlah ASN yang dibina sebanyak 30 orang. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pada Sekretariat Daerah.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah yakni persentase ketercapaian program peningkatan sarana dan prasarana lingkup Biro Organisasi dengan realisasi 100%; persentase ketercapaian program peningkatan sarana dan prasarana lingkup Biro Yanbangsos dengan realisasi 86,50% dari target 100%; persentase ketercapaian program peningkatan sarana dan prasarana lingkup Biro Perekonomian dengan realisasi 75,47% dari target 100%; persentase ketercapaian program peningkatan sarana dan prasarana lingkup Biro BUMD dengan realisasi 98,67% dari target 100%; dan persentase ketercapaian program peningkatan sarana dan prasarana lingkup Biro Umum dengan realisasi 83,48% dari target 100%. Alokasi anggaran program adalah sebesar Rp24.505.697.057,00 dengan realisasi sebesar Rp20.746.363.689,00 setara dengan 84,66%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.523.363.210,00 dan realisasi sebesar Rp13.960.052.871,00 atau setara dengan 96,12%. *Output* kegiatan adalah tersedianya catatan laporan persediaan barang APK. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya Pemenuhan perlengkapan dan peralatan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas di lingkungan Sekretariat Daerah;
- (2) Kegiatan Renovasi Gedung ULP beserta Interior yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.199.999.966,00 dan realisasi sebesar Rp 0 atau setara dengan 0%. *Output* dan *Outcome* kegiatan adalah tidak terleasisasikan;
- (3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp225.787.000,00 dan realisasi sebesar Rp222.787.000,00 atau setara dengan 98,67%. *Output* kegiatan adalah pembelian Alat Perlengkapan Kantor sebanyak 30 (tiga puluh) unit. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional serta

- meningkatnya kualitas dan fungsi sarana prasarana kantor;
- (4) Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Komputer Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah 20 (dua puluh) unit perangkat komputer yang dipelihara. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin perangkat komputer secara berkala;
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masjid, Gedung, Instalasi, Taman, Jalan, Halaman Dilingkungan Badan Pengelola *Islamic Centre* yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.309.121.777,00 dan realisasi sebesar Rp5.457.387.618,00 atau setara dengan 86,50%. *Output* Persentase pemenuhan sarana prasarana. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Masjid yang dipelihara;
 - (6) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp877.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp822.140.000,00 atau setara dengan 93,68% *Output* kegiatan adalah Alat Perlengkapan Kantor (komputer, laptop, printer dan *smartphone*) sebanyak 68 unit. *Outcome* kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (7) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.825.104,00 dan realisasi sebesar Rp263.995.700,00 atau setara dengan 75,47%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

g. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah;

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah yakni persentase kualitas layanan umum, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah dengan realisasi 89,81% dari target 100%; persentase ketercapaian program pendukung administrasi perkantoran lingkup Biro Humas dengan realisasi 82,91% dari target 100%; Persentase ketercapaian program pendukung administrasi perkantoran lingkup Biro Organisasi dengan realisasi 73,94% dari target 100%; persentase ketercapaian program pendukung administrasi perkantoran lingkup Biro Yanbangsos dengan realisasi 95,25% dari target 100%; persentase ketercapaian program pendukung administrasi perkantoran lingkup Biro Pemerintahan dan Kerjasama dengan realisasi 99% dari target 100%; persentase ketercapaian program pendukung administrasi perkantoran lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan realisasi 69,43% dari target 100%; Persentase ketercapaian program pendukung administrasi perkantoran lingkup biro perekonomian dengan realisasi 97,63% dari target 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp215.213.426.067,00 dengan realisasi sebesar Rp193.252.510.180,00 setara dengan 89,80 %.

- (1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pemerintahan dan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.574.990.223,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.560.741.435,00 atau setara dengan 99,10%. *Output* Pemenuhan Operasional Biro. *Outcome* Porsentase Pemenuhan Operasional Lingkup Biro;
- (2) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi sebesar atau setara dengan 74,76%. *Output* kegiatan jumlah dokumen yang difotocopy, tersedianya bahan interior dan eksterior. *Outcome* terpenuhinya layanan kebutuhan pada Biro Hukum dan HAM;
- (3) Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.027.600,00 atau setara dengan 96,11%. *Output* kegiatan adalah jumlah alat Perlengkapan Kantor. *Outcome* presentase pemenuhan operasional dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (4) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp253.060.080,00 dan realisasi sebesar Rp236.953.734,00 atau setara dengan 93,64%. *Output* kegiatan Tenaga Teknis/Non PNS. *Outcome* presentase pemenuhan operasional dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (5) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp797.921.192,00 atau setara dengan 99,74%. *Output* kegiatan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum. *Outcome* jumlah laporan pelaksanaan kegiatan operasional Biro Hukum dan HAM;
- (6) Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa Aparatur Biro Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.730.000,00 atau setara dengan 99,55%. *Output* kegiatan jumlah pegawai yang mengikuti Kegiatan Jiwa Korsa Biro Hukum dan HAM. *Outcome* terlaksananya Jiwa Korsa Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum dan HAM;
- (7) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp868.640.000 dan realisasi sebesar Rp848.043.700,00 atau setara dengan 97,63%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi operasional pimpinan pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian;

- (8) Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa Aparatur Biro Perekonomian yang dilaksanakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.414.800,00 atau setara dengan 86,83%. *Output* kegiatan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai lingkup Biro Perekonomian. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan jiwa korsas;
- (9) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.005.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp697.767.494,00 atau setara dengan 69,43%. *Output* kegiatan adalah Tenaga Teknis/Non PNS sebanyak 15 orang, langganan internet 9 bulan, langganan listrik dan air selama 4 bulan. *Outcome* kegiatan adalah Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah;
- (10) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.994.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.806.102.589,00 atau setara dengan 90,53%. *Output* kegiatan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Biro Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 12 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah;
- (11) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.570.763,00 atau setara dengan 56,61%. *Output* kegiatan adalah Sewa mesin fotocopy sebanyak 2 unit. *Outcome* kegiatan adalah Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah;
- (12) Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsas Aparatur Biro Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp79.710.000,00 atau setara dengan 66,43%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pegawai yang

- mengikuti kegiatan jiwa korsa Biro Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 117 orang. *Outcome* kegiatan adalah Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah;
- (13) Penyediaan Langganan Surat Kabar yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp295.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp295.200.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Langganan Surat Kabar. *Outcome* kegiatan adalah persentasen Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (14) Penyediaan Penunjang Kegiatan Hubungan Antar Lembaga yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.595.000,00 dan realisasi sebesar Rp377.115.484,00 atau setara dengan 75,33%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Penunjang Kegiatan Hubungan Antar Lembaga. *Outcome* kegiatan adalah Persentasen Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (15) Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp84.290.090,00 atau setara dengan 84,29%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Peningkatan Kapasitas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kesejahteraan Pegawai;
- (16) Penyediaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.749.862.250,00 dan realisasi sebesar Rp3.147.198.030,00 atau setara dengan 83,93%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Perjalanan Dinas. *Outcome* kegiatan adalah Persentasen Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (17) Penyediaan Jasa Kantor Biro Humas dan Protokol Tahun 2019 yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp338.029.140,00 dan realisasi sebesar Rp331.503.430,00 atau setara dengan 98,07%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor Biro Humas dan Protokol.

- Outcome* kegiatan adalah Persentasen Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (18) Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp549.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp364.679.632,00 atau setara dengan 66,32%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Barang Habis Pakai. *Outcome* kegiatan adalah Persentasen Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (19) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.360.000,00 atau setara dengan 74,91%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor. *Outcome* kegiatan adalah Persentasen Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (20) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IT yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.493.116.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.427.360.120,00 atau setara dengan 97,36%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Sarana dan Prasarana Jaringan Telepon /Telekomunikasi. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Pemenuhan Pemeliharaan Rutin di Lingkup Sekretariat Daerah;
- (21) Kegiatan Penyediaan Langganan Telepon yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 520.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 429.463.204,00 atau setara dengan 82,59%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Langganan Telepon. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Pemenuhan Pemeliharaan Rutin di Lingkup Sekretariat Daerah;
- (22) Kegiatan Penyediaan Honorarium Petugas Penjaga Repeater dan Operator Telepon Sentral yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp288.879.220,00 dan realisasi sebesar Rp288.879.220,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah honorarium untuk petugas *repeater* dan operator telepon. *Outcome* kegiatan

- adalah tersedianya honorarium untuk penjaga *repeater* telepon dan operator;
- (23) Kegiatan Penyediaan Langganan Internet yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.328.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.318.100.000,00 atau setara dengan 99,80%. *Output* kegiatan adalah akses Internet di kantor Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah ketersediaan jaringan internet 100%;
- (24) Kegiatan Penyediaan Langganan TV Kabel yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp306.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp298.868.400,00 atau setara dengan 97,67%. *Output* kegiatan adalah Akses TV Kabel di Kantor Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya jaringan TV Kabel;
- (25) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.535.139.192,00 dan realisasi sebesar Rp4.166.895.235,00 atau setara dengan 91,88%. *Output* kegiatan adalah Barang pakai habis *Outcome* kegiatan adalah tercukupinya 100% kebutuhan barang pakai habis;
- (26) Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Listrik Dan Air yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.053.347.640,00 dan realisasi sebesar Rp1.049.051.000,00 atau setara dengan 99,59%. *Output* kegiatan adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik, Air, Exhaustfan, dan Genset pada 18 Gedung di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah sebesar 100%;
- (27) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.995.000,00 dan realisasi sebesar Rp344.742.176,00 atau setara dengan 98,50%. *Output* kegiatan adalah penyediaan perjalanan dinas *Outcome* kegiatan adalah Persentase pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (28) Kegiatan Pelayanan Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah

- Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.981.799.680,00 dan realisasi sebesar Rp5.277.527.234,00 atau setara dengan 66,12%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pimpinan dalam dan luar Provinsi Tersusunnya agenda pertemuan Pimpinan di Kabupaten/Kota;
- (29) Kegiatan Fasilitasi Akomodasi yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.485.578.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.251.002.807,00 atau setara dengan 84,21%. *Output* kegiatan adalah Terakomodirnya fasilitas hotel bagi para tamu di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Terselenggaranya agenda kegiatan para tamu pemerintah provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (30) Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.579.212.950,00 dan realisasi sebesar Rp8.539.994.993,00 atau setara dengan 99,51%. *Output* kegiatan adalah tersedianya Honorarium PNS Provinsi, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman. *Outcome* kegiatan adalah Persentase pemenuhan operasional lingkup Sekretariat Daerah;
- (31) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.078.451.800,00 dan realisasi sebesar Rp961.457.924,00 atau setara dengan 89,15%. *Output* kegiatan adalah langganan kantor. *Outcome* kegiatan adalah ketersediaan langganan kantor di kantor Sekretariat Daerah;
- (32) Kegiatan Penyelenggaraan Hari Raya Keagamaan di Lingkup Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 560.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 476.298.000,00 atau setara dengan 85,05%. *Output* kegiatan adalah sarana dan prasarana Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- (33) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp3.282.512.450,00 dan realisasi sebesar Rp3.235.366.330,00 atau setara dengan 98,56%. *Output* kegiatan adalah Penyediaan seluruh alat pendukung fasilitas kantor dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di 9 gedung kantor, 3 rumah dinas, 3 mess, 2 masjid, 6 sarana olahraga Lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah sebesar 100%;
- (34) Kegiatan Fasilitasi Jamuan Makan dan Minum yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.730.113.300,00 dan realisasi sebesar Rp10.702.933.216,00 atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa serta Melaksanakan Penyediaan Bahan Makanan di Lingkungan Sekretariat Daerah maupun di Mess dan Rumah Dinas lainnya yang berada di dalam pengelolaan Biro Umum. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya Penyediaan Jamuan Makanan dan Minuman;
- (35) Kegiatan Pelayanan Kegiatan Staf Ahli yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.514.591.096,00 dan realisasi sebesar Rp7.392.859.414,00 atau setara dengan 70,31%. *Output* kegiatan adalah pelayanan terhadap staf ahli. *Outcome* kegiatan adalah terlayani kebutuhan untuk staf ahli;
- (36) Kegiatan Pembayaran Langganan Listrik dan Air yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.338.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.034.098.508,00 atau setara dengan 92,99%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya kebutuhan listrik dan air untuk operasional kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah sebesar 100 persen;
- (37) Kegiatan Pemeliharaan Taman yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp711.703.796,00 dan realisasi sebesar Rp677.690.700,00 atau setara dengan 95,22%. *Output* kegiatan adalah Taman yang terawat dan

- terpelihara *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah;
- (38) Kegiatan Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.571.365.100,00 dan realisasi sebesar Rp19.888.933.724,00 atau setara dengan 96,68%. *Output* kegiatan adalah 330 tenaga keamanan. *Outcome* kegiatan adalah terjaganya stabilitas keamanan agar terciptanya keadaan lingkungan yang nyaman, aman, terkendali di area Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan berikut ini: Gedung Sate, Gedung Setda, Gedung PKK, Gedung Dharma Wanita, Mess, Rumah Dinas, dan bangunan lainnya;
- (39) Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.740.978.810,00 dan realisasi sebesar Rp18.485.912.910,00 atau setara dengan 93,64%. *Output* kegiatan adalah RTP 28 orang dan RTS 273 orang. *Outcome* kegiatan adalah Terpeliharanya Kebersihan di lingkungan Sekretariat Daerah maupun di mess dan bangunan lainnya yang berada dalam pengelolaan Biro Umum. Melaksanakan Pelayanan Kebersihan Keindahan dan Kesegaran di Lingkup Sekretariat Daerah maupun di Mess dan lainnya yang berada dalam pengelolaan Biro Umum;
- (40) Kegiatan Sewa Tanaman Hias Interior & Eksterior yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.298.883.060,00 dan realisasi sebesar Rp1.284.318.120,00 atau setara dengan 98,88%. *Output* kegiatan adalah 300 *polybag*. *Outcome* kegiatan adalah Penambahan Bunga dan Tanaman di Lingkungan Kantor Setda Mess dan Bangunan Lainnya;
- (41) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.828.033.251,00 dan realisasi sebesar Rp4.816.600.385,00 atau setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah penyelenggaraan kebutuhan Administrasi Kerumahtanggaan.

- Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (42) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesejahteraan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.124.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.046.569.792,00 atau setara dengan 93,04%. *Output* kegiatan adalah tersedianya bahan material, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja jasa kantor, belanja pakaian khusus. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan operasional lingkup Sekretariat Daerah;
- (43) Kegiatan Pelayanan Asisten Administrasi yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp851.776.740,00 dan realisasi sebesar Rp803.652.550,00 atau setara dengan 94,35%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi Dalam dan Luar Provinsi Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan operasional lingkup Sekretariat Daerah;
- (44) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.199.999.818,00 dan realisasi sebesar Rp1.176.120.990,00 atau setara dengan 98,01%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, untuk melaksanakan konsultasi dan menghadiri seminar, rapat dan undangan pengelolaan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel dan percepatan penyerapan anggaran;
- (45) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.559.946.560,00 dan realisasi sebesar Rp7.556.013.200,00 atau setara dengan 99,95%. *Output* kegiatan adalah 100% Kendaraan di Kantor Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kegiatan Penyediaan BBM Kendaraan Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp 725.000.000,00 dan

- realisasi sebesar Rp724.979.000,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* 100%. *Outcome* kegiatan adalah Tersedianya pemenuhan BBM Kendaraan Operasional di Kantor Sekretariat Daerah;
- (46) Kegiatan Penyediaan BBM Kendaraan Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp725.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp724.979.000,00 atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah 100% kendaraan operasional. *Outcome* kegiatan adalah Tersedianya pemenuhan BBM Kendaraan Operasional di Kantor Sekretariat Daerah;
- (47) Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Mess, Rumah Jabatan, Sarana Olah Raga dan Renovasi Ruang Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.089.896.870,00 dan realisasi sebesar Rp29.866.329.980,00 atau setara dengan 78,41%. *Output* kegiatan adalah Revitalisasi Halaman Depan dan Belakang Gedung Sate, Revitalisasi Halaman Belakang, Gedung Pakuan dan Terpeliharanya seluruh fasilitas sarana dan prasarana Gedung Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah;
- (48) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan dan Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.554.970.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.511.857.846,00 atau setara dengan 98,31%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran fasilitasi perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan kinerja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (49) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.198.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.168.079.931,00 atau setara dengan 97,45%. *Output* kegiatan adalah Honorarium bagi peserta Diklat PIM 3 dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Honorarium bagi peserta Diklat PIM 4 dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai;
- (50) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kesenian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.032.532.240,00 dan realisasi sebesar Rp1.992.085.640,00 atau setara

- dengan 98,01%. *Output* kegiatan adalah jumlah pembinaan kerohanian dalam bentuk ceramah keagamaan, jumlah fasilitas sarana prasarana olahraga, dan jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan jiwa korsa. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai;
- (51) Kegiatan Pengelolaan Gedung Merdeka dengan alokasi anggaran sebesar Rp497.290.965,00 dan realisasi sebesar Rp492.415.660,00 atau setara dengan 99,02%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional Gedung Merdeka. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- (52) Kegiatan Pengelolaan *Gallery* Sejarah Gedung Sate dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.140.670.379,00 dan realisasi sebesar Rp1.136.950.229,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional gallery sejarah Gedung Sate. *Outcome* kegiatan adalah presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- (53) Kegiatan Pengelolaan LPSE dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.891.033.891,00 dan realisasi sebesar Rp1.804.880.479,00 atau setara dengan 95,44%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional LPSE. *Outcome* kegiatan adalah presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
- (54) Kegiatan Pengelolaan GOR Saparua dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.318.860.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.074.893.098,00 atau setara dengan 96,14%. *Output* kegiatan adalah tertatanya GOR Saparua dan terlaksananya pengelolaan GOR Saparua. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- (55) Kegiatan Fasilitasi Kelengkapan Acara dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.731.531.960,00 dan realisasi sebesar Rp8.563.285.325,00 atau setara dengan 98,07%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya kebutuhan peralatan tenda/*stand* pameran/panggung/meja dan kursi/genset/ac/kipas angin dan *sound* sistem, terlaksananya kegiatan acara dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan terselenggaranya kegiatan pimpinan dengan

- lancar. *outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan operasional lingkup Sekretariat Daerah;
- (56) Kegiatan Penyelenggaraan PHBN/HBI dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.616.925.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.057.040.000,00 atau setara dengan 73,49%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya kebutuhan peralatan tenda/*stand* pameran/panggung/meja dan kursi/genset/AC/kipas angin dan *sound* sistem, terlaksananya kegiatan acara dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Terselenggaranya Kegiatan Pimpinan dengan Lancar. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan operasional lingkup Sekretariat Daerah;
- (57) Kegiatan Pelayanan Kegiatan Sekretaris Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.686.517.540,00 dan realisasi sebesar Rp2.146.837.484,00 atau setara dengan 72,33%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan operasional kegiatan Sekretariat Daerah dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Operasional Lingkup Sekretariat Daerah;
- (58) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp59.148.362,00 dan realisasi sebesar Rp59.148.362,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan barang habis pakai kantor. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan operasional lingkup Sekretariat Daerah;
- (59) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp79.981.204,00 dan realisasi sebesar Rp72.701.468,00 atau setara dengan 90,90%. *Output* kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan penyediaan langganan kantor. *Outcome* kegiatan adalah persentase operasional lingkup Setda;
- (60) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dengan alokasi sebesar Rp1.899.826.750,00 dan realisasi sebesar Rp1.375.671.350,00 atau setara dengan 72,41%.

Output kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan kegiatan operasional Biro Organisasi. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan operasional lingkup Setda;

- (61) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp816.834.650,00 dan realisasi Rp775.602.740,00 atau setara dengan 94,95%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Operasional Biro BUMD dan Investasi sebanyak 12 dokumen. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi biro;
- (62) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp25.978.332,00 dan realisasi Rp25.000.000,00 atau setara dengan 96,23%. *Output* kegiatan adalah Jumlah ATK dan Barang Cetakan yang tersedia sebanyak 2 paket. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi biro;
- (63) Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa Aparatur Kantor Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp47.000.000,00 dan realisasi Rp39.000.000,00 atau setara dengan 82,98%. *Output* kegiatan adalah Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan jiwa korsanya sebanyak 45 orang. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jiwa korsanya aparatur Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (64) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kantor Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.674.000,00 dan realisasi Rp22.450.000,00 atau setara dengan 90,99%. *Output* Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur sebanyak 33 orang. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jiwa

- korsa aparatur Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (65) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp465.802.600,00 dan realisasi Rp462.850.600,00 atau setara dengan 99,37%. *Output* Jumlah tenaga teknis non pns sebanyak 10 orang. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya operasional tenaga teknis Non PNS;
- (66) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.299.884.875,00 dan realisasi sebesar Rp1.147.749.791,00 atau setara dengan 88,30%. *Output* tingkat pemenuhan operasional Perangkat Daerah lingkup Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan kegiatan operasional Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;
- (67) Kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja Non Pegawai yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.199.977.357,00 dan realisasi sebesar Rp1.181.799.748,00 atau setara dengan 98,49%. *Output* Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan oprasional Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;
- (68) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor untuk Kegiatan Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp699.210.476,00 dan realisasi sebesar Rp693.904.205,00 atau setara dengan 99,24%. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan oprasional Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;
- (69) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Badan Islamic Centre Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.199.998.460,00 dan realisasi sebesar Rp5.925.717.722,00 atau setara dengan 95,58%.

Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan operasional Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

- (70) Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa Aparatur Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp 98.045.000,00 atau setara dengan 98,69%. *Output* Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan kegiatan operasional Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial.

h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah terwujudnya kinerja DPRD dan aktifitas yang sudah dilakukan dalam upaya mencapai target pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan capaian sebesar 80% dari target sebesar 80%. Alokasi anggaran sebesar Rp143.668.880.160,00 dengan realisasi sebesar Rp129.163.329.093,00 setara dengan 89,90%.

- (1) Kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp31.373.701.000,00 dan realisasi Rp30.553.183.188,00 atau setara dengan 97,38%. *Output* kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya pembangunan melalui aspirasi DPRD;
- (2) Kegiatan *hearing*/dialog yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.380.000.000,00 dan realisasi Rp2.458.192.527,00 atau setara dengan 72,73%. *Output* kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya pembangunan melalui aspirasi DPRD;
- (3) Kegiatan Advetorial dan Parleментарia yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp12.065.990.000,00 dan realisasi Rp11.060.628.190,00 atau setara dengan 91,67%. *Output* kegiatan adalah Terpublikasikannya

- kegiatan DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya informasi publik kinerja parlemen;
- (4) Kegiatan Pengamanan Terbuka dan Tertutup DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp978.500.000,00 dan realisasi Rp829.721.148,00 atau setara dengan 84,80%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya keamanan DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kepada DPRD;
 - (5) Kegiatan Peningkatan Hubungan Kelembagaan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.414.108.500,00 dan realisasi Rp748.257.783,00 atau setara dengan 52,91%. *Output* kegiatan adalah Terjalinnnya harmonisasi hubungan kelembagaan. *Outcome* Kegiatan adalah Terwujudnya lembaga DPRD yang kredible;
 - (6) Kegiatan Peningkatan Layanan Aspirasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp229.514.308,00 atau setara dengan 91,81%. *Output* kegiatan adalah Terwujudnya layanan aspirasi yang responsive. *Outcome* Kegiatan adalah Terwujudnya DPRD yang aspiratif;
 - (7) Kegiatan *Medichal Check up* DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp340.000.000,00 dan realisasi Rp115.940.432,00 atau setara dengan 34,10%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya medichal checkup DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah Meningkatnya kesejahteraan DPRD;
 - (8) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Kegiatan kelengkapannya bagi DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.958.550.000,00 dan realisasi Rp2.781.042.000,00 atau setara dengan 94,00%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya pakaian dinas DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah Meningkatnya kesejahteraan DPRD;
 - (9) Kegiatan Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.500.000.000,00 dan realisasi Rp1.402.599.582,00 atau setara dengan 93,51%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya

- kebutuhan operasional OPD. *Outcome* Kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga pimpinan;
- (10) Kegiatan Survei kepuasan masyarakat dan penerapan mutu pelayanan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp550.000.000,00 dan realisasi Rp499.936.000,00 atau setara dengan 90,90%. *Output* kegiatan adalah survey kepuasan DPRD *Outcome* Kegiatan adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelayanan prima kepada DPRD;
 - (11) Kegiatan Peningkatan layanan administrasi kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp12.796.396.000,00 dan realisasi Rp10.757.336.158,00 atau setara dengan 84,07%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya layanan administrasi kepada DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah Meningkatnya kinerja DPRD;
 - (12) Kegiatan Parlemen Dalam Angka dan Grafis yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp959.982.720,00 atau setara dengan 96,00%. *Output* kegiatan adalah Aplikasi/website capaian indikator pembangunan daerah *Outcome* Kegiatan adalah Tersedianya data spasial parlemen dalam perencanaan pembangunan.
 - (13) Kegiatan Studi Komparatif yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp39.066.839.553,00 dan realisasi Rp37.203.000.693,00 atau setara dengan 95,23%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan studi komparatif DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya Peran dan fungsi DPRD yang efektif;
 - (14) Kegiatan Orientasi bagi Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp 80.000.000,00 dan realisasi Rp72.518.390,00 atau setara dengan 90,65%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan orientasi bagi anggota DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya Peran dan fungsi DPRD yang efektif.
 - (15) Kegiatan Workshop/bintek/lokakarya/seminar DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp440.000.000,00 atau setara dengan 44,00%.

- Output* kegiatan adalah pelaksanaan Workshop/bintek/lokakarya/seminar DPR. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kompetensi anggota DPRD;
- (16) Kegiatan Monitoring dan pengawasan DPRD dalam pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp21.774.800.000,00 dan realisasi Rp19.967.645.520,00 atau setara dengan 91,70%. *Output* kegiatan adalah pengawasan pembangunan dan pemerintahan oleh DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya pembangunan dan kinerja pemerintahan daerah;
- (17) Kegiatan Pengawasan Perda Prakarsa yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp170.000.000,00 dan realisasi Rp101.572.982,00 atau setara dengan 59,75%. *Output* kegiatan adalah pelaksanaan perda prakarsa *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya perda yang pro rakyat;
- (18) Kegiatan Penyusunan dan pembahasan produk hukum DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.499.995.653,00 dan realisasi Rp1.024.105.011,00 atau setara dengan 68,27%. *Output* kegiatan adalah produk hukum yang pro rakyat. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya perda yang pro rakyat;
- (19) Kegiatan Peningkatan layanan pimpinan DPRD dan AKD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp7.170.000.000,00 dan realisasi Rp4.797.254.971,00 atau setara dengan 66,91%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kepada DPRD dan AKD. *Outcome* Kegiatan adalah Meningkatnya kinerja DPRD;
- (20) Kegiatan Advokasi hukum kelembagaan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp102.000.000,00 dan realisasi Rp 0;
- (21) Kegiatan *Research Brief* dan Naskah Akademik yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.250.000.000,00 dan realisasi Rp1.124.660.000,00 atau setara dengan 89,97%. *Output* kegiatan adalah Raperda Prakarsa. *Outcome*

- Kegiatan adalah meningkatnya *research base policy*.
- (22) Kegiatan Risalah dan dokumentasi rapat DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp679.999.960,00 dan realisasi Rp534.444.303,00 atau setara dengan 78,59%. *Output* kegiatan adalah dokumentasi kerja DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya informasi kinerja DPRD.
 - (23) Kegiatan ADPSI, Kaukus Perempuan Parlemen dan Forkom Setwan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp238.000.000,00 dan realisasi Rp168.652.462,00 atau setara dengan 70,86%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya ADPSI, Kaukus Perempuan dan Forkom. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja DPRD;
 - (24) Kegiatan Citra Bhakti DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp393.532.789,00 atau setara dengan 78,71%. *Output* kegiatan adalah terwujudnya citra bhakti DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya lembaga DPRD yang aspiratif;
 - (25) Kegiatan Sosialisasi Perda Prakarsa yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp169.999.664,00 dan realisasi Rp 0;
 - (26) Kegiatan Penyediaan tenaga ahli fraksi dan AKD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.359.999.830,00 dan realisasi Rp939.607.936,00 atau setara dengan 69,09%. *Output* kegiatan adalah tersedianya tenaga ahli fraksi dan AKD. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja AKD.

i. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi adalah terwujudnya akuntabilitas Kelembagaan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi adalah sebesar

Rp1.049.999.516,00 dengan realisasi sebesar Rp1.018.736.561,00 setara dengan 97,02%.

- (1) Kegiatan Penyusunan dan pengelolaan data keuangan DPRD dan Set. DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp399.999.890,00 dan realisasi Rp396.872.976,00 atau setara dengan 99,22%. *Output* kegiatan adalah data keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan keuangan secara akuntabel;
- (2) Kegiatan Penyusunan Appraisal Asset yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp299.999.716,00 dan realisasi Rp299.020.584,00 atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah Appraisal Asset. *Outcome* Kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan asset secara akuntabel;
- (3) Kegiatan Penyusunan laporan kinerja DPRD dan Set DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp349.999.910,00 dan realisasi Rp322.843.001,00 atau setara dengan 92,24%. *Output* Kegiatan adalah laporan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah terlaksananya pelaporan kinerja yang komperhensif.

j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi adalah Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100%. Alokasi anggaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi adalah sebesar Rp24.614.795.032,00 dengan realisasi sebesar Rp21.935.962.820,00 setara dengan 89,12%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp6.897.700.000 dan realisasi Rp6.023.415.500 atau setara dengan 87,32%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional DPRD dan Sekretariat DPRD. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD;

- (2) Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp7.007.245.032 dan realisasi Rp6.371.235.927 atau setara dengan 90.92%. *Output* kegiatan adalah tersedianya perlengkapan penunjang kinerja *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (3) Kegiatan Penyediaan prasarana fisik ruang kerja DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp4.481.500.000 dan realisasi Rp3.638.240.023 atau setara dengan 81.18%. *Output* Kegiatan adalah tersedianya prasarana ruang kerja DPRD *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (4) Kegiatan Penyediaan meubelair dan peralatan kantor yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp6.228.350.000 dan realisasi Rp5.903.071.370 atau setara dengan 94.78%. *Output* Kegiatan adalah tersedianya meubelair dan peralatan kantor. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.

k. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Provinsi

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Provinsi adalah Optimalisasi tugas pokok dan fungsi sebesar 100%. Alokasi anggaran Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Provinsi adalah sebesar Rp40.160.054.379,00 dengan realisasi sebesar Rp35.126.615.068,00 setara dengan 87,47%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.536.233.200 dan realisasi Rp2.703.898.772 atau setara dengan 76.46%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan langganan kantor. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (2) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kegiatan Kantor yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.609.245.400 dan realisasi Rp3.155.720.027 atau setara dengan 87.43%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan

- rapat *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (3) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Kegiatan Dokumentasi Kantor yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.954.000.000 dan realisasi Rp1.443.277.600 atau setara dengan 73.86%. *Output* kegiatan adalah tersedianya publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya informasi kinerja publik DPRD;
 - (4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp4.877.037.160 dan realisasi Rp 3.672.590.025 atau setara dengan 75.30%. *Output* Kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan barang pakai habis *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - (5) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp510.000.000 dan realisasi Rp383.500.000 atau setara dengan 75.20%. *Output* kegiatan adalah peningkatan kompetensi ASN. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja ASN dan Organisasi;
 - (6) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp700.000.000 dan realisasi Rp560.279.850 atau setara dengan 80.04%. *Output* Kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan aparatur. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur;
 - (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp6.200.000.000 dan realisasi Rp5.879.469.932 atau setara dengan 94.83%. *Output* Kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur;
 - (8) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.144.225.000 dan realisasi Rp2.891.105.216 atau setara dengan 91.95%. *Output* Kegiatan adalah terselenggaranya pemeliharaan kendaraan

- dinas. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur;
- (9) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp14.526.163.619 dan realisasi Rp13.509.674.646 atau setara dengan 93.00%. *Output* Kegiatan adalah terpeliharanya fasilitas kantor. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur;
- (10) Kegiatan Pelantikan DPRD dan HUT Jabar yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.103.150.000 dan realisasi Rp927.099.000 atau setara dengan 84.04%. *Output* Kegiatan adalah terselenggaranya pelantikan DPRD dan HUT Jabar *Outcome* Kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan pelantikan DPRD dan HUT Jabar.

1. Program Pembinaan dan Pengawasan

Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan yakni tingkat kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan realisasi sebesar 96,04 % dari target yang sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan adalah sebesar Rp32.573.493.170,00 dengan realisasi sebesar Rp31.283.434.874,00 setara dengan 96,04%.

- (1) Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.940,00 dan realisasi Rp196.344.050,00 atau setara dengan 66,45% *Output* kegiatan adalah dilaksanakannya evaluasi dan pembinaan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 4 (empat) Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Pengawasan Rutin terhadap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp8.749.725.120,00 dan realisasi sebesar Rp8.620.666.030,00 atau setara dengan 98,52%. *Output* kegiatan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan keuangan pada 46 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- (3) Kegiatan Pemeriksaan Dana BOS SMA/SMK dan Pemeriksaan Bantuan Keuangan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp6.811.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.766.600.000,00 atau setara dengan 99,34%. *Output* kegiatan adalah 25 LHP Dana BOS SMA Kabupaten/Kota dan 27 LHP Bantuan Keuangan terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS dan Bantuan Keuangan;
- (4) Kegiatan Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan monitoring-evaluasi dana Desa sebesar Rp1.119.963.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.118.900.000,00 atau setara dengan 99,91%. *Output* kegiatan adalah 14 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap monitoring-evaluasi Dana Desa pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. *Outcome* meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- (5) Kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tingkat Nasional yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp662.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp532.471.000,00 atau setara dengan 80,39%. *Output* kegiatan adalah Berita Acara Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut (BAHP TL) APIP Kementerian. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- (6) Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.190.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.128.630.000,00 atau setara dengan 94,82%. *Output* kegiatan adalah 27 LHE Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat;
- (7) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi (RAD-PPK) se-Jawa Barat dan Evaluasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp340.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp332.675.500,00 atau setara

- dengan 97,85%. *Output* kegiatan adalah 27 Laporan Hasil Pengawasan RAD PPK Pemerintah Daerah kabupaten/kota. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya pemerintahan daerah yang lebih bersih dan berintegritas;
- (8) Kegiatan Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.830,00 dan realisasi sebesar Rp266.842.910,00 atau setara dengan 88,96%. *Output* kegiatan adalah dokumen Laporan Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya pemerintahan daerah yang lebih bersih dan berintegritas karena terimplementasinya sistem pengendalian intern yang bertingkat;
- (9) Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP dan Penegakan Integritas yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp299.999.830,00 dan realisasi sebesar Rp267.007.061,00 atau setara dengan 89,00%. *Output* kegiatan adalah dipeuhinya semua (100%) dokumen pendukung peningkatan kapabilitas APIP. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan Inspektorat yang berkualitas dan handal;
- (10) Kegiatan Desk Akuntabilitas/Unit Layanan Konsultasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat (DAULAT JABAR) yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp83.380.000,00 atau setara dengan 83,38%. *Output* kegiatan adalah laporan hasil konsultasi Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Jawa Barat dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebesar Rp3.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.093.262.000,00 atau setara dengan 99,78%. *Output* kegiatan adalah 1 (satu) LHR LKIP Provinsi Jawa Barat, 43 LHE SAKIP Perangkat Daerah dan 14 LHE SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja

- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota;
- (12) Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat dan Pemeriksaan On Call yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.326.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.249.000.000,00 atau setara dengan 94,19%. *Output* kegiatan adalah 1 (satu) LHR LKPD Provinsi Jawa Barat, dan dipenuhinya semua pemeriksaan atas permintaan pimpinan (100%). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (13) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp580.478.000,00 atau setara dengan 96,75%. *Output* kegiatan adalah ditanganinya semua kasus pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya pemerintahan daerah yang lebih bersih dan berintegritas;
 - (14) Kegiatan Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat sebesar Rp785.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp773.402.510,00 atau setara dengan 98,52%. *Output* kegiatan adalah BAHF TL Kasus Pengaduan Masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah dimanfaatkannya kegiatan terciptanya pemerintahan daerah yang lebih bersih dan berintegritas;
 - (15) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp761.107.460,00 dan realisasi sebesar Rp574.331.250,00 atau setara dengan 75,46%. *Output* kegiatan adalah diterbitkannya Kebijakan Pengawasan, Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat, dan Standar Operasional Prosedur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan Inspektorat;
 - (16) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dengan Inspektorat Jenderal Kementerian sebesar Rp843.490.000,00 dan realisasi sebesar Rp756.924.000,00 atau setara dengan 89,74%. *Output* kegiatan adalah Laporan Penyelenggaraan

- Rakorwasda dan Laporan mengikuti Rakorwasnas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- (17) Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat/APIP sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp377.150.000,00 atau setara dengan 83,81%. *Output* kegiatan adalah BAHP TL Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- (18) Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebesar Rp4.833.548.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.564.981.563,00 atau setara dengan 94,44%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan sapu bersih pungutan liar. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya pemerintahan daerah yang lebih bersih dan berintegritas.

m. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi yakni tingkat akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dengan realisasi sebesar 79,37 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi adalah sebesar Rp1.285.868.582,00 dengan realisasi sebesar Rp1.020.630.949,00 setara dengan 79,37%.

- (1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat sebesar Rp349.999.820,00 dan realisasi sebesar Rp333.487.620,00 atau setara dengan 95,28%. *Output* kegiatan adalah tersedianya semua dokumen perencanaan dan pelaporan (100%) Inspektorat, meliputi 1 dokumen Renstra, 1 dokumen Renja, 1 dokumen RKT, 1 Dokumen RKA/DPA, 1 dokumen LKIP, 1 dokumen LKPJ, dan 1 dokumen LPPD. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat;
- (2) Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp149.999.762,00 dan realisasi sebesar Rp112.124.039,00 atau setara dengan 74,75%. *Output* kegiatan

- diselesaikannya semua (100%) temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- (3) Kegiatan Reviu Perencanaan, Penganggaran, dan Penyerapan APBD sebesar Rp539.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp355.500.000,00 atau setara dengan 65,96%. *Output* kegiatan adalah Laporan Hasil Reviu (LHR) Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen) dan LHR Penyerapan APBD (4 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas perencanaan, penganggaran dan penyerapan APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sebesar Rp2.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp567.000,00 atau setara dengan 19,56%. *Output* kegiatan adalah tersedianya jasa administrasi keuangan pada Inspektorat. *Outcome* kegiatan adalah dukungan terhadap tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat berjalan dengan baik;
 - (5) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp243.969.000,00 dan realisasi sebesar Rp218.952.290,00 atau setara dengan 89,75%. *Output* kegiatan adalah 1 (satu) Laporan SPJ, 4 (empat) Laporan Keuangan Triwulnan, 1 (satu) Laporan Prognosis, dan 1 (satu) Laporan Keuangan Tahunan Inspektorat. *Outcome* kegiatan adalah tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat berjalan dengan baik.

n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi yakni tingkat kompetensi dan kinerja aparatur dengan realisasi sebesar 95,42% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi adalah sebesar Rp645.143.405,00 dengan realisasi sebesar Rp615.613.181,00 setara dengan 95,42%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor sebesar Rp327.192.000,00 dan realisasi sebesar Rp318.377.300,00 atau setara dengan 97,31%. *Output* kegiatan adalah tersedianya semua (100%) bahan pakai habis kebutuhan operasional pada Inspektorat. *Outcome* kegiatan adalah dukungan

- terhadap tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat berjalan dengan baik;
- (2) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan sebesar Rp45.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.600.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan bertambahnya literasi terkait tugas pembinaan dan pengawasan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya wawasan aparat Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan Data Informasi sebesar Rp272.351.405,00 dan realisasi sebesar Rp251.635.881,00 atau setara dengan 92,39%. *Output* kegiatan adalah dipenuhinya sarana komunikasi, listrik, dan pelayanan data informasi. *Outcome* kegiatan adalah dukungan terhadap tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat berjalan dengan baik.

o. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Provinsi

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Provinsi yakni tingkat kompetensi dan kinerja aparatur dengan realisasi sebesar 82,77 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Provinsi adalah sebesar Rp6.337.404.935,00 dengan realisasi sebesar Rp6.081.851.212,00 setara dengan 95,97%.

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Seminar dan Bimtek sebesar Rp271.713.000,00 dan realisasi sebesar Rp238.392.828,00 atau setara dengan 87,74%. *Output* tersedianya dokumen dari laporan seminar dan bimtek. *Outcome* dimanfaatkannya dokumen seminar dan bimtek sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan seluruh Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD);
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp398.952.000,00 dan realisasi sebesar Rp364.182.850,00 atau setara dengan 91,28%. *Output* tersedianya pemeliharaan sarana mobilitas darat. *Outcome* dimanfaatkannya dan terpeliharanya sarana dan prasarana operasional perangkat daerah;
- (3) Kegiatan Penyediaan Perjalanan Dinas sebesar Rp1.010.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp972.328.899,00 atau setara dengan 96,28%. *Output* tersedianya biaya perjalanan dinas.

- Outcome* dimanfaatkannya pembiayaan perjalanan dinas;
- (4) Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Gedung, Lingkungan dan Pengamanan Kantor sebesar Rp1.297.545.935,00 dan realisasi sebesar Rp1.237.698.641,00 atau setara dengan 95,39%. *Output* tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. *Outcome* dimanfaatkannya dan terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kantor;
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan Halaman, Gedung dan Bangunan Kantor sebesar Rp452.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp450.418.500,00 atau setara dengan 99,58%. *Output* tersedianya biaya pemeliharaan halaman, gedung dan bangunan kantor. *Outcome* dimanfaatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana operasional perangkat daerah;
 - (6) Kegiatan Pembinaan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp957.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp877.077.100,00 atau setara dengan 91,64%. *Output* tersedianya pembinaan kinerja dan kemampuan aparatur. *Outcome* dimanfaatkannya biaya peningkatan kesejahteraan jamani/rohani;
 - (7) Kegiatan Pembinaan budaya baca al quran dan keagamaan sebesar Rp79.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp79.331.500,00 atau setara dengan 99,79%. *Output* tersedianya pembinaan budaya baca al'quran dan keagamaan. *Outcome* dimanfaatkannya peningkatan kerohanian aparat pengawasa Inspektorat;
 - (8) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp389.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp384.445.850,00 atau setara dengan 98,78%. *Output* tersedianya kebutuhan alat tulis kantor. *Outcome* dimanfaatkannya kebutuhan alat tulis kantor;
 - (9) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp374.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp372.778.100,00 atau setara dengan 99,54%. *Output* tersedianya kebutuhan barang cetakan. *Outcome* dimanfaatkannya kebutuhan barang cetakan;
 - (10) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp26.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.984.000,00 atau setara dengan 99,94%. *Output* tersedianya kebutuhan pelayanan jasa

- surat menyurat. *Outcome* dimanfaatkannya kebutuhan pelayanan jasa surat menyurat;
- (11) Kegiatan Penyediaan makan-minum sebesar Rp840.594.000,00 dan realisasi sebesar Rp839.475.544,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* tersedianya kebutuhan makan/minum rapat dan tamu. *Outcome* dimanfaatkannya kebutuhan makan/minum rapat dan tamu;
- (12) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp240.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp239.683.400,00 atau setara dengan 99,87%. *Output* tersedianya kebutuhan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana kantor. *Outcome* dimanfaatkannya dan terpeliharanya kebutuhan sarana dan prasarana operasional perangkat daerah.

p. Program Fasilitasi Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat

Capaian Indikator Kinerja Program Fasilitasi Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat adalah persentase penyelenggaraan promosi potensi pembangunan Jawa Barat dengan capaian sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Fasilitasi Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat adalah sebesar Rp4.133.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.736.627.655,00 setara dengan 90,41%.

- (1) Kegiatan Paket Khusus "*West Java Night*" Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp449.905.000,00 dan realisasi sebesar Rp433.874.300,00 atau setara dengan 96,44%. *Output* kegiatan adalah Paket Acara Khusus "*West Java Night*", jasa profesi, dekorasi, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya aktivitas kreativitas serta apresiasi seni budaya Jawa Barat;
- (2) Kegiatan Gelar Pesona Seni Budaya Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp763.698.350,00 atau setara dengan 95,46%. *Output* kegiatan adalah Gelar Pesona Seni Budaya Jawa Barat, jasa profesi, dekorasi, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya dan terinformasikannya tatanan kesenian Jawa Barat, baik yang berbentuk seni tradisi maupun seni modern;
- (3) Kegiatan Pengelolaan Data Promosi dan Informasi Potensi Pembangunan Jawa Barat Badan

- Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp348.330.000,00 dan realisasi sebesar Rp277.579.197,00 atau setara dengan 79,69%. *Output* kegiatan adalah data promosi dan informasi yang dikelola dan disampaikan melalui media informasi; barang kerajinan; dummy kerajinan khas Jawa Barat; mamin rapat, perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (4) Kegiatan Parade Tari Daerah Nusantara Tingkat Nasional Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.240.000,00 atau setara dengan 97,24%. *Output* kegiatan adalah Parade Tari Daerah Nusantara Tingkat Nasional, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah dilestarikannya seni budaya tari daerah Jawa Barat di tingkat nasional;
 - (5) Kegiatan Parade Lagu Daerah Nusantara Tingkat Nasional Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp99.910.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.821.000,00 atau setara dengan 95,91%. *Output* kegiatan adalah Parade Lagu Daerah Nusantara Tingkat Nasional, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah dilestarikannya seni budaya tari daerah Jawa Barat di tingkat nasional;
 - (6) Kegiatan Karnaval Prajurit Nusantara Tingkat Nasional Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp71.248.000,00 atau setara dengan 57,00%. *Output* kegiatan adalah Karnaval Prajurit Nusantara Tingkat Nasional, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pakaian kontingen. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya kegiatan Karnaval Prajurit Nusantara Tingkat Nasional;
 - (7) Kegiatan Karnaval Citra Budaya Tradisi Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp99.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.337.500,00 atau setara dengan 92,37%. *Output* kegiatan adalah terlestarikannya dan terpromosikannya budaya daerah dan kreativitas

- masyarakat Jawa Barat di tingkat nasional. *Outcome* kegiatan adalah Karnaval Citra Budaya daerah Tingkat nasional, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas;
- (8) Kegiatan Parade Musik Daerah Nusantara Tingkat Nasional Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp78.790.000,00 atau setara dengan 78,79%. *Output* kegiatan adalah Parade Musik Daerah Nusantara Tingkat Nasional, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kreativitas serta daya cipta seniman-seniwati musik, serta terpromosikannya dan memasyarakatkan khasanah budaya daerah;
- (9) Kegiatan Festival Seni Tari Kreasi Baru Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp299.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp296.924.200,00 atau setara dengan 98,99%. *Output* kegiatan adalah Festival Seni Tari Kreasi Baru, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya bakat kreasi baru generasi muda dalam dunia seni tari;
- (10) Kegiatan Pameran Peragaan Pembuatan Kerajinan Khas Jawa Barat Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp263.847.308,00 atau setara dengan 87,95%. *Output* kegiatan adalah Pameran Peragaan Pembuatan Kerajinan Khas Jawa Barat, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah terlestarikannya dan terpromosikannya kerajinan khas Jawa Barat;
- (11) Kegiatan Pameran Batik Jawa Barat Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp234.735.000,00 atau setara dengan 93,89%. *Output* kegiatan adalah Pameran Batik Jawa Barat, jasa profesi, dekorasi, cendera mata/plakat, dokumentasi, mamin, perjalanan dinas adalah. *Outcome* kegiatan adalah terlestarikannya dan terpromosikannya ragam baik daerah di Jawa Barat;

- (12) Kegiatan Pameran Produk Unggulan Jawa Barat Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp225.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp225.000.000,00 atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Pameran Produk Unggulan Jawa Barat, Jasa Profesi, Dekorasi, Cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas, cetak, sewa tenda, piala, sewa gedung. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya produk unggulan asli daerah Jawa Barat;
- (13) Kegiatan Partisipasi Temu *Expo* Wisata Nusantara Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.412.800,00 atau setara dengan 63,61%. *Output* kegiatan adalah partisipasi temu *Expo* wisata nusantara, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas, cetak, sewa tenda, piala, sewa gedung. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya obyek wisata daerah Jawa Barat;
- (14) Kegiatan Pameran Kuliner Khas Jawa Barat Tingkat Provinsi Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp127.490.000,00 atau setara dengan 84,99%. *Output* kegiatan adalah Pameran Kuliner Khas Jawa Barat Tingkat Provinsi, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas, cetak, jasa boga. *Outcome* kegiatan terpromosikannya kuliner khas Jawa Barat di tingkat nasional;
- (15) Kegiatan Parade Busana Daerah Nusantara Tingkat Nasional Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp165.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp134.805.000,00 atau setara dengan 81,70% *Output* kegiatan adalah Parade Busana Daerah Nusantara tingkat Nasional, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas, cetak, sewa tenda, piala, sewa gedung. *Outcome* kegiatan adalah terlestarikannya dan terpromosikannya busana daerah Jawa Barat di tingkat nasional;
- (16) Kegiatan Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat Tingkat Nasional Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp270.000.000,00 dan realisasi sebesar

- Rp248.160.000,00 atau setara dengan 91,91%. *Output* kegiatan adalah Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat Tingkat Provinsi, Jasa Profesi, Dekorasi, Cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas, cetak, sewa tenda, piala, sewa gedung. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya obyek wisata daerah Jawa Barat di tingkat nasional;
- (17) Kegiatan Karnaval Citra Budaya Daerah Tingkat Nasional Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.705.000,00 atau setara dengan 99,71%. *Output* kegiatan adalah terlestarikannya dan terpromosikannya budaya daerah dan kreativitas masyarakat Jawa Barat di tingkat nasional. *Outcome* kegiatan adalah Karnaval Citra Budaya daerah tingkat nasional, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas;
- (18) Kegiatan Gelar Semarak Tahun Baru Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp99.995.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.960.000,00 atau setara dengan 99,96%. *Output* kegiatan adalah Gelar Semarak Tahun Baru, jasa profesi, dekorasi, cenderamata/plakat, dokumentasi, makanan dan minuman, perjalanan dinas. *Outcome* kegiatan adalah terpromosikannya kekayaan dan keragaman budaya dalam semarak tahun baru.

q. Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah, Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan realisasi sebesar 100%. Alokasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah sebesar Rp423.765.000,00 dengan realisasi sebesar Rp419.326.019,00 setara dengan 98,95%.

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp223.860.000,00 dan realisasi sebesar Rp223.451.750,00 atau setara dengan 99,82%. *Output* kegiatan adalah Jumlah pelayanan keprotokolan di DKI Jakarta dan sekitar Banten, perjalanan dinas, pakaian kerja protokol,

makanan dan minuman. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya fungsi keprotokolan dalam pelayanan urusan provinsi Jawa barat;

- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp199.905.000,00 dan realisasi sebesar Rp195.874.269,00 atau setara dengan 97,98%. *Output* kegiatan adalah jumlah koordinasi dan pertemuan antar stakeholder pemerintahan dan pembangunan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, Forum komunikasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya hubungan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak lain dalam pembangunan.

r. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung

Capaian Indikator Kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung adalah presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan di Badan Penghubung realisasi 100%. Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung adalah sebesar Rp99.376.000,00 dengan realisasi sebesar Rp98.819.850,00 setara dengan 99,44%.

- (1) Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.376.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.819.850,00 atau setara dengan 94,44%. *Output* kegiatan adalah dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan Penghubung, perjalanan dinas, fotokopi, mamin rapat, bimtek. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Badan Penghubung.

s. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung adalah tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja di Badan Penghubung realisasi 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung sebesar Rp1.954.981.495,00 dengan realisasi sebesar Rp1.892.868.190,00 setara dengan 96,82%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.954.981.495,00 dan realisasi sebesar Rp1.892.868.190,00 atau setara dengan 96,82%. *Output* kegiatan adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (Interior R. Banhub, mesin tik, AC, TV 65", komputer, jaringan LAN, speaker, kursi tunggu, kursi chitos, kamera, video, pembuatan mini teater anjjabar, pembuatan groundtank anjjabar, mobil, CCTV banhub 8MP, CCTV anjjabar 4MP, mesin pompa, lemari arsip, biaya persiapan pengadaan jasa perencanaan dan pengawasan, alat kesenian (kendang rampak), device oculus rift & pc workstation, tempat tidur dan pelengkapannya, pembuatan dak. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

t. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penghubung

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penghubung adalah persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Badan Penghubung realisasi 100%. Alokasi anggaran Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penghubung sebesar Rp9.154.274.762,00 dengan realisasi sebesar Rp8.447.496.550,00 setara dengan 92,28%.

- (1) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp808.180.000,00 dan realisasi sebesar Rp733.531.036,00 atau setara dengan 90,76%. *Output* kegiatan adalah jumlah waktu penyediaan barang habis pakai kantor (ATK, alat rumah tangga, potocopy, penjilidan, karangan bunga, blanko, brosur, kalender, papperbag,

- cinderamata, belanja cetak). *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB;
- (2) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor, Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp299.090.908,00 dan realisasi sebesar Rp208.590.512,00 atau setara dengan 69,74%. *Output* kegiatan adalah jumlah waktu sewa, publikasi, dan dokumentasi kantor (Sewa mesin potocopy, umbul-umbul, pengiriman paket, sewa hotel/penginapan, sewa bunga, karangan bunga, sewa truck kendaraan). *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB;
 - (3) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp449.988.000,00 dan realisasi sebesar Rp425.914.500,00 atau setara dengan 94,65%. *Output* kegiatan adalah jumlah waktu penyediaan kerohanian, sarana dan prasarana olahraga serta pakaian aparatur (Seragam PDH khaki, seragam PDH putih, outbond, perjalanan dinas, pengajian mingguan, halal bihalal, makanan dan minuman, senam mingguan, snack, pakaian korpri, pakaian olahraga, dan perlengkapannya, guru pengajian, pengajian menyambut ramadhan). *Outcome* meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi aparatur Pemerintah Daerah;
 - (4) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp69.808.000,00 dan realisasi sebesar Rp56.924.275,00 atau setara dengan 81,54%. *Output* kegiatan adalah jumlah waktu diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kompetensi pegawai Badan Penghubung;
 - (5) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp1.399.406.549,00 dan realisasi sebesar Rp1.245.607.562,00 atau setara dengan 89,01%. *Output* kegiatan adalah jumlah waktu penyediaan langganan kantor (surat kabar harian, honorarium Non PNS, BPJS non PNS, iuran

- sampah, iuran tv kabel, iuran internet. *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp2.425.020.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.359.395.575,00 atau setara dengan 97,29%. *Output* kegiatan adalah jumlah waktu penyediaan rapat internal dan luar kantor (perjalanan dinas, makanan dan minuman). *Outcome* kegiatan adalah persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp499.792.192,00 dan realisasi sebesar Rp497.386.550,00 atau setara dengan 99,52%. *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB;
- (8) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp1.244.795.970,00 dan realisasi sebesar Rp1.191.604.144,00 atau setara dengan 95,73%. *Output* kegiatan adalah jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (BBM, perpanjangan STNK, service kendaraan bermotor, pelumas kendaraan). *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB;
- (9) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp736.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp572.828.217,00 atau setara dengan 77,75%. *Output* kegiatan adalah Jumlah waktu alat pendukung Fasilitas Kantor (tersedianya gas elpiji, langganan telepon, langganan Air PDAM, langganan listrik, belanja listrik dan elektronik). *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana

- dan prasarana operasional
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB;
- (10) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp1.221.483.143,00 dan realisasi sebesar Rp1.155.714.179,00 atau setara dengan 94,62%. *Output* kegiatan adalah jumlah pemeliharaan perabotan fasilitas gedung kantor (pemeliharaan komputer pemeliharaan water heater, genset, pompa jetpum, kran, kloset, aquarium dan lain-lain, pemeliharaan telepon dan *handy talkie*, peralatan rumah tangga, obat nyamuk semprot ruangan, laundry AC, honorarium biaya persiapan pengadaan jasa perencanaan jasa pengawasan rehab gedung kantor banhub, rehab rumah adat pelaburan anjjabar, pelaburan banhub, pemeliharaan lahan parkir, rehab ruangan perpustakaan jaringan listrik dan air). *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB.

2) Permasalahan dan Solusi Fungsi Penunjang Lainnya

a. Permasalahan

- (1) Terdapat BPR yang sudah melakukan proses Merger di Kabupaten Bogor, Cirebon, Indramayu yang sampai saat ini masih menunggu diterbitkannya Perda untuk melakukan perubahan bentuk Hukum menjadi Perseroan Daerah;
- (2) Masih adanya BUMD yang belum menerapkan sistem dan pengelolaan BUMD berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik ataupun berdasarkan prinsip *Good CoRporate Governance* (GCG);
- (3) Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam mengisi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- (4) Adanya keterlambatan dalam penunjukan PPK di tiap Perangkat Daerah;
- (5) Pengisian paket kegiatan saat ini dilakukan oleh staf/operator di Perangkat Daerah, yang belum sepenuhnya memahami metode pengadaan barang dan jasa;
- (6) Permasalahan dalam integrasi e-Budgeting dengan SIRUP, dimana terdapat beberapa data yang belum

ada di form sebelumnya, sehingga harus menambahkan lagi informasi yang sesuai dengan kebutuhan data SIRUP;

- (7) Penandatanganan kesepakatan bersama/perjanjian kerja sama tanpa disertai tindak lanjut lainnya;
- (8) Permasalahan terkait penyelesaian perselisihan kerja sama yang prosesnya panjang;
- (9) Tindaklanjut dari kesepakatan bersama yang ditandatangani pada acara rapat kerja Gubernur FKD MPU;
- (10) Belum sinerginya perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri oleh PD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota serta tidak ada perencanaan skala prioritas;
- (11) Dalam penyusunan dokumen perencanaan, Koordinasi antar Biro yang belum efektif, SDM yang belum menguasai kompetensi dalam bidang perencanaan;
- (12) Dalam aspek keuangan, jadwal kegiatan yang mengalami beberapa perubahan, disebabkan banyaknya acara undangan yang diharuskan hadir dan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di Biro-Biro;
- (13) Dalam pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah masih diperlukan asistensi dari operator program untuk dapat membiasakan diri bagi para pengguna sistem;
- (14) Belum tersedianya instrument dan indikator monitoring dan evaluasi kerja sama yang bersifat universal;
- (15) Ketersediaan dan validitas data capaian kinerja provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (16) Masih diberlakukannya kebijakan moratorium oleh Pemerintah Pusat;
- (17) Belum terbitnya aturan yang mengatur tentang Penataan Daerah (PP tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah);
- (18) Kurang lengkapnya persyaratan administrasi dari pemohon fasilitasi administrasi pemerintahan umum;
- (19) Masih banyak kesalahan dalam persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- (20) Jumlah kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang masih terbatas;
- (21) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah, bahwa Raperda yang sudah dibahas dalam Pansus DPRD sebelum ditetapkan harus difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut hanya 15 (lima belas hari) kerja tetapi pada prakteknya mencapai 120 hari kerja, sehingga Raperda selanjutnya tidak bisa diusulkan kembali ke dewan karena Pansus DPRD belum bisa dibubarkan dan sudah melewati batas tahun;
- (22) Masih kurangnya Desa/Kelurahan yang belum memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan sadar hukum;
 - (23) Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan kajian produk hukum Kabupaten/Kota serta pemahaman yang belum optimal dalam perancangan produk hukum di Kabupaten/Kota;
 - (24) Terdapat BPR yang sudah melakukan proses Merger di Kabupaten Bogor, Cirebon, Indramayu yang sampai saat ini masih menunggu diterbitkannya Perda untuk melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Daerah;
 - (25) Masih adanya BUMD yang belum menerapkan sistem dan pengelolaan BUMD berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik ataupun berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
 - (26) Belum memiliki pedoman pengaturan investasi Pemerintah Daerah tentang investasi Pemerintah Daerah yang meliputi investasi langsung dan investasi pembelian surat berharga;
 - (27) Adanya perubahan regulasi tentang kelembagaan yang berakibat kepada penyesuaian secara cepat kepada struktur Organisasi Perangkat Daerah dan tugas pokok serta fungsinya. Seperti PP nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Permendagri nomor 56 tahun 2019 tentang nomenklatur sekretariat daerah serta surat edaran Menteri PAN&RB dan Menteri Dalam Negeri tentang penyerderhanaan birokrasi;
 - (28) Adanya perubahan regulasi tentang kelembagaan yang berakibat kepada penyesuaian secara cepat kepada struktur organisasi perangkat daerah dan tugas pokok serta fungsinya. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang nomenklatur Sekretariat Daerah serta surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi serta surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang penyerderhanaan birokrasi;
- (29) Belum semua Perangkat Daerah menetapkan standar pelayanan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - (30) Belum meratanya akses dan mutu pendidikan di Jawa Barat;
 - (31) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
 - (32) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya;
 - (33) Melaksanakan prinsip *good governance*; dan
 - (34) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

b. Solusi

- (1) Mengajukan segera proses penyusunan Raperda perubahan bentuk Hukum BPR yang sudah melakukan proses merger di Kabupaten Bogor, Cirebon, Indramayu menjadi perseroan daerah kepada badan pembentukan peraturan daerah melalui Biro Hukum kepada DPRD Provinsi Jawa Barat;
- (2) Melakukan evaluasi, restrukturisasi organisasi terhadap BUMD Non Lembaga Keuangan;
- (3) Melakukan percepatan pengadaan dengan langkah-langkah, untuk pengumuman RUP 2020, aplikasi SiRUP akan ditutup aksesnya mulai 1 Februari 2020, pengajuan pemilihan penyedia barang/jasa melalui Pokja pemilihan ditutup 1 Oktober 2020 dan perbaikan hasil kajian pokja pemilihan oleh PPK dibatasi 1 minggu, jika lebih dari waktu tersebut, dokumen pemilihan akan dikembalikan kepada PPK;
- (4) Penunjukkan PPK tidak berdasarkan kegiatan dan tahun anggaran, tetapi berdasarkan Bidang/Bagian/UPTD/Cabang Dinas;
- (5) Untuk mengatasi masalah pengisian/input oleh staf/operator, maka sudah dibuatkan menu penambahan user PPK dan pemaketan dilakukan oleh PPK;
- (6) Untuk mengatasi masalah intergrasi e-Budgeting dengan SIRUP, maka perlu dilakukan perbaikan pada form pemaketan;
- (7) Membangun dan menggunakan aplikasi "SINERJI" untuk mempermudah pengelolaan Dokumen Kerja Sama KSDN, KSDPK serta KSLN secara online dan digital sehingga monitoring terhadap tindaklanjut

- dari kesepakatan bersama/perjajian kerja sama dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- (8) Mengantisipasi terjadinya perselisihan kerja sama dengan fokus pada konsep naskah kerja sama yang dilakukan pemerintah harus melalui proses mediasi;
 - (9) Berkoordinasi dengan sekretariat bersama MPU untuk mengadakan rapat khusus untuk membahas perjanjian kerja sama dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada acara rapat kerja Gubernur FKD MPU tersebut;
 - (10) Mendorong PD maupun Kabupaten/Kota untuk membuat skala prioritas dan perencanaan kerja sama secara sinergis;
 - (11) Pelaksanaan Diklat/Bimtek untuk menambah kompetensi dalam bidang perencanaan, dilaksanakan rapat rutin lingkup perencanaan Setda;
 - (12) Perluasan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi melalui pemberian beasiswa pendidikan, pendidikan di luar domisili, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);
 - (13) Menempatkan satu orang operator programmer untuk dapat membantu *troubleshooting* dalam menjalankan aplikasi;
 - (14) Selalu membuat dan melampirkan rencana program kerja sesuai kesepakatan pada setiap naskah perjanjian kerja sama ataupun kesepakatan bersama sinergitas perencanaan dan pembangunan daerah;
 - (15) Membangun dan menggunakan aplikasi "SINERJI" untuk mempermudah pengelolaan dokumen kerja sama KSDN, KSDPK serta KSLN secara online dan digital sehingga monitoring terhadap tindaklanjut dari kesepakatan bersama/perjajian kerja sama dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - (16) Pendampingan dan pembinaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - (17) Menganalisis capaian kinerja provinsi dan Kabupaten/Kota yang menurun agar dapat ditingkatkan;
 - (18) Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkonsultasi kepada pihak Pemerintah Pusat terkait kebijakan moratorium;
 - (19) Persyaratan usulan pembentukan daerah persiapan otonom baru menggunakan UU No 23 Tahun 2014 dan RPP Penataan Daerah dan Desain

- besar penataan daerah dengan asumsi PP yang akan diterbitkan tidak jauh berbeda dengan RPP;
- (20) Sosialisasi dan koordinasi terkait fasilitasi administrasi pemerintahan umum dengan stakeholders terkait;
 - (21) Dibuat aplikasi Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, aplikasi tersebut akan mempermudah organisasi bantuan hukum dalam pengajuan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
 - (22) Menyampaikan permintaan tambahan personil/SDM berbasis Sarjana Hukum baik S1, S2 maupun S3 ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (23) Sisa Raperda yang belum, diusulkan kembali untuk dibahas di awal tahun berikutnya;
 - (24) Meningkatkan kualitas sosialisasi dan pembinaan Desa/Kelurahan sadar hukum kepada aparatur Desa/Kelurahan dan masyarakat;
 - (25) Mengusulkan ASN untuk diklat perancang peraturan perundang-undangan;
 - (26) Mengajukan segera proses penyusunan Raperda perubahan bentuk Hukum BPR yang sudah melakukan proses Merger di Kabupaten Bogor, Cirebon, Indramayu menjadi Perseroan Daerah kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah melalui Biro Hukum kepada DPRD Provinsi Jawa Barat;
 - (27) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMD termasuk pengelolaannya dan melakukan kerjasama pendampingan dengan Lembaga IFC, BPKP dan BPK dalam rangka meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMD;
 - (28) Melakukan pengajuan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2019 Raperda tentang Investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah melalui Biro Hukum dan HAM;
 - (29) Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan sosialisasi ke Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota serta fasilitasi penyusunan tugas pokok dan fungsi serta konsultasi ke Pemerintah Pusat;
 - (30) Ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 58 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan sandar pelayanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta melakukan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah

- untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- (31) Meningkatkan sinkronisasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah serta mengoptimalkan penegakan hukum dan HAM;
 - (32) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pemantapan reformasi birokrasi;
 - (33) Optimalisasi pelayanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi.

3.4 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 telah menetapkan 8 Prioritas Pembangunan yang disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2019. Dari hasil proses tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, adalah:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, secara umum dapat diartikan bila seseorang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di Jawa Barat permasalahan kemiskinan dan pengangguran pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain: tingkat pendidikan yang rendah; terbatasnya lapangan kerja; akses kesuatu daerah; fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Provinsi Jawa Barat merumuskan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran sebagai Prioritas Pembangunan.

2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan.

Sumber daya alam atau modal alam memiliki peranan penting dalam pembangunan. Sebuah pembangunan tidak akan terjadi jika tidak didorong dengan ketersediaan modal pembangunan yang cukup. Jawa Barat sangat beruntung memiliki ketersediaan sumber daya alam yang cukup melimpah, namun masih memerlukan pengelolaan serta pemanfaatan yang optimal untuk ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam harus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata.

Sektor Industri dan Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Jawa Barat, untuk meningkatkan Devisa dan pendorong bagi peningkatan nilai tambah sektor sektor lainnya. Pengembangan kawasan industri di Jawa Barat diarahkan ke wilayah baru supaya lebih merata. Dalam bidang industri terdapat lima sektor pengembangan industri manufaktur yang akan menjadi percontohan, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronik.

Selanjutnya dalam sektor pariwisata kondisi saat ini dirasakan masih kalah bersaing dengan daerah tujuan pariwisata lain di Indonesia, meskipun potensi pariwisata di Jawa Barat tidak kalah dengan daerah lain. Sehingga pengelolaan kepariwisataan harus lebih ditingkatkan agar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah serta pengembangan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Provinsi Jawa Barat merumuskan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata sebagai prioritas pembangunan.

4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan pusat-pusat pertumbuhan, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan konektivitas antar pusat-pusat tersebut, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemenuhan kehidupan masyarakat sekitar serta kegiatan ekonomi baik berupa pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan Infrastruktur serta pembangunan fisik di wilayah tersebut. Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan yang tumbuh dengan sangat pesat sehingga menjadi pusat pembangunan yang akan mempengaruhi kawasan lain di sekitarnya seperti Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi) ataupun wilayah bandung raya.

5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman.

Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi keahlian dan berdaya saing serta mempunyai karakter dan budi pekerti unggul.

Pembangunan bidang pendidikan diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dengan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin. Peningkatan layanan pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan bidang kesehatan diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pelayanan kesehatan yang merata dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan lingkungan hidup di Jawa Barat adalah menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem DAS Jawa Barat yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi dan alih fungsi lahan produktif, menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik dan industri, meningkatnya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan, menurunnya kualitas udara ambien dan meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta meningkatnya frekuensi dan risiko bencana serta kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu prioritas pembangunan.

7. Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat.

Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan atau daya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat yang saat ini dirasakan masih belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Jawa Barat sebagai salah satu prioritas pembangunan.

8. Penguatan Reformasi dan Birokrasi.

Reformasi dan birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa-Cita), sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan kesemua tingkatan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Sinergi pencapaian prioritas pembangunan Jawa Barat dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa-Cita)
dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah	
1	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara	1	Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat.
2	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih,	1	Penguatan Reformasi dan Birokrasi.

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah	
	efektif, demokratis, dan terpercaya		
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	1	Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi.
		2	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
		3	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman.
4	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	1	Penguatan Reformasi dan Birokrasi.
		2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	1	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
		2	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman.
		3	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	1	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata.
		2	Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi.

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah	
		3	Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan.
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik	1	Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan.
		2	Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi.
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	1	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman.
		2	Penguatan Reformasi dan Birokrasi.
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	1	Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat.
		2	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman.

3.5 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2018 yang diselenggarakan pada Senin, 28 Maret 2018 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 untuk melakukan pembahasan kinerja Gubernur pada Tahun Anggaran 2018.

Proses pelaksanaan Rapat PANSUS bertujuan mendalami pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah dan Biro Provinsi Jawa Barat yang dilaporkan dalam Buku Naskah LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018. Melalui pembahasan dalam Rapat PANSUS diperoleh beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan kinerja kegiatan Perangkat Daerah dan Biro Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, yang selanjutnya diharapkan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat pada tahun anggaran selanjutnya.

Hasil pembahasan rapat PANSUS tersebut diperoleh 54 rekomendasi yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat nomor: 121.04/Kep.DPRD-06/2019. Sebagai sekretariat Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya juga terdapat unsur pengendalian dan pelaporan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi koordinator dalam melakukan proses pengumpulan dan penyampaian tanggapan dari rekomendasi PANSUS LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018. Adapun tindaklanjut rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 disajikan pada berikut:

TABEL 3.4
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT
TERHADAP LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	<p>Tentang Bandara Kertajati yang dibangun dengan biaya besar dari APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bandara internasional yang dikelola oleh BUMD PT. BIJB dengan operator pengelola angkasa pura sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti berfungsi sebagai bandara internasional, oleh karena itu pemerintah provinsi harus melakukan langkah-langkah yang berani dan lebih jauh lagi dengan pemerintah pusat terutama yang berkaitan dengan kebijakan penerbangan.</p>	<p>✓ Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan BUMD Non Keuangan;</p>	<p>✓ Melakukan evaluasi dan pembahasan terkait dengan upaya-upaya PT. BIJB dalam meningkatkan jumlah kunjungan/penumpang baik dalam evaluasi Rencana Kerja maupun dalam evaluasi triwulan dan tahunan;</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>✓ Pemasangan peralatan tersebut belum terbebaskan, dan sedang dilakukan kegiatan Pengadaan Tanah BIJB Lanjutan Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 35.000.000.000,00,00;</p> <p>Upaya untuk mengoptimalkan operasional Bandara Kertajati telah dilaksanakan melalui dukungan kebijakan Kementerian Perhubungan, antara lain yang telah dan sedang dilaksanakan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan verifikasi dan sertifikasi pemenuhan persyaratan laik fungsi bandar udara, termasuk persyaratan sebagai bandara yang melayani penerbangan internasional; 2. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan kebijakan melakukan penataan rute penerbangan Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, dengan pengaturan penerbangan pesawat jet penerbangan luar 	<p>✓ Saat ini Bandara Kertajati telah memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk dapat diterbangi pesawat <i>wide body</i> seperti Boeing 747 ataupun Boeing 777, dengan panjang <i>runway</i> 3.000 m (perpanjangan dari semula 2.500 m) dan tipe PKPPK (pemadam kebakaran) <i>category</i> 8 (untuk spesifikasi pesawat <i>wide body</i>). Oleh karena itu, sudah sangat memungkinkan untuk melayani penerbangan <i>direct</i> jarak jauh antar negara.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>pulau jawa dipindahkan ke Bandara Kertajati, sedangkan Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan domestik dengan menggunakan pesawat propeller dan tetap ada penerbangan internasional (Singapura dan Malaysia);</p> <p>3. Kementerian Perhubungan memberikan kemudahan kepada airlines untuk mendapatkan <i>slot time</i> dan <i>flight approval</i> terhadap penerbangan baru domestik yang terbang dari Bandara Kertajati;</p> <p>4. Dengan mempertimbangkan masih adanya keterbatasan fasilitas infrastruktur menuju Bandara Kertajati, maka Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan pengajuan izin terbang dari Bandara Kertajati dibandingkan pengajuan izin dari bandara lain disekitarnya;</p> <p>5. Kementerian Perhubungan memberikan insentif kepada airlines yang mengajukan <i>slot time</i> dan <i>flight approval</i> untuk penerbangan internasional dari Bandara Kertajati;</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>6. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan untuk mendorong penerbangan jamaah umroh terbang dari Bandara Kertajati dan menjadikan bandara Kertajati sebagai embarkasi haji Jawa Barat Tahun 2020;</p> <p>7. Namun demikian, untuk mendapatkan hasil yang optimal dari upaya tersebut, perlu dukungan untuk percepatan penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu dan jalan akses tol ke Bandara Kertajati, fasilitas penginapan yang representatif, rumah sakit, destinasi wisata yang menarik masyarakat;</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di atas diakomodir dalam kegiatan Rencana Aksi Multi Pihak (RAM-IP) Pengembangan Bandar Udara di Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp 468.067.249,00,00.</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
2	BIJB <i>Aerocity</i> harus lebih di dorong percepatan pembangunannya sehingga mampu menjadi pendukung pertumbuhan wilayah timur jawa barat dan sekaligus meningkatkan fungsi BIJB itu sendiri.	✓ Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan BUMD Non Keuangan.	✓ Melakukan Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka membangun kemitraan dan bersinergi antara BUMD, BUMN dan swasta.
3	Pembangunan Tol Cisumdawu yang sampai hari ini lambat dalam pembangunannya harus pula mendapatkan perhatian serius dan mendorong pemerintah pusat dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan	✓ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, dijelaskan bahwa wewenang pengelolaan jalan tol berada pada pemerintah pusat. Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung dan mendorong sepenuhnya agar pembangunan jalan tol cisumdawu dapat terwujud sesuai rencana. Total panjang rencana jalan tol cisumdawu yaitu 60,10 km yang terbagi menjadi 6 seksi;	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>Untuk seksi 1 phase III; cileunyi – rancakalong sepanjang 10,57 km, progres pembebasan tanah sebesar 72,77% dan progres konstruksi sebesar 54,55% dan direncanakan akan selesai pada tahun 2020;</p> <p>Seksi 2 phase I; rancakalong – ciherang sepanjang 6,35 km, pembebasan tanah dan fisik sudah selesai;</p> <p>Seksi 2 phase II; ciherang - sumedang sepanjang 10,70 km, progres pembebasan tanah sebesar 92,20% dan progres konstruksi sebesar 76,62% dan direncanakan akan selesai akhir tahun 2019;</p> <p>Seksi 3; sumedang - cimalaka sepanjang 4,05 km, progres pembebasan tanah sebesar 99,80% dan progres konstruksi sebesar 87,53% dan direncanakan akan selesai akhir tahun 2019;</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>Seksi 4; cimalaka - legok sepanjang 8,20 km, progres pembebasan tanah sebesar 5,23% dan progres konstruksi belum dimulai atau 0%;</p> <p>Seksi 5; legok – ujung jaya sepanjang 14,90 km pembebasan tanah dan konstruksi belum dimulai atau 0%;</p> <p>Seksi 6: ujung jaya – dawuan sepanjang 6,07 km progres tanah 16,34% dan konstruksi belum dimulai atau 0%.</p>	
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit kinerja PT. BIJB oleh auditor independen terhadap pengelolaan bandara kertajati.	✓ Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan BUMD Non Keuangan.	✓ Adanya Monitoring dan Evaluasi BUMD Non Keuangan melalui RUPS dan pra RUPS Tahun 2018 termasuk evaluasi atas kinerja laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang independen.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
5	Gubernur agar melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menggali peningkatan pendapatan daerah untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan program kegiatan pembangunan di Jawa Barat yang dari tahun ke tahun terus meningkat.	✓ Terus melakukan kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber PAD, dengan kegiatan penelusuran penunggak pajak dan penggalian penerimaan lainnya serta terus melakukan pengembangan <i>system</i> pembayaran melalui samsat Jbret dimana pembayaran dapat dilakukan di gerai modern (alfamart, alfamidi, indomart dan <i>fintech</i> bukalapak, tokopedia, kaspro dan PPOB serta BUMDES).	✓ Mengurangi jumlah penunggak pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan peningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan.
6	Agar Gubernur segera menerbitkan peraturan gubernur sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan daerah sehingga dapat memperlancar pelaksanaannya.	✓ Sudah ada beberapa Peraturan Gubernur Jawa Barat untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah. Diantaranya aturan tentang Jasa Lingkungan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Untuk mengoptimalisasi penyusunan peraturan pelaksana dilakukan desk dengan masing-masing Perangkat Daerah secara terus-menerus.	✓ Peraturan Pelaksana disusun untuk lebih menegaskan peran masing-masing pihak dalam melaksanakan Peraturan Daerah. Masalah yang akan diselesaikan dapat dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
7	<p>Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mampu mempertahankan penghargaan selama 7 kali WTP, dari prestasi ini harus dipertahankan diwaktu mendatang.</p>	<p>✓ Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mempertahankan opini WTP antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komitmen seluruh tingkat pimpinan pemerintah daerah provinsi jawa barat untuk patuh pada Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; 2. Pengembangan SDM pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui penyelenggaraan bimtek pengelolaan keuangan daerah; 3. Melakukan perbaikan berkelanjutan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rekomendasi BPK; b. Melakukan proses tindak lanjut atas temuan BPK. 4. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait termasuk DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah; 	<p>✓ Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berhasil mempertahankan opini WTP kedelapan kalinya secara berturut-turut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 oleh BPK-RI.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
8	Pariwisata menjadi salah satu unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karenanya kehadiran Badan Penghubung daerah yang didalamnya diberi tanggungjawab mengelola Anjungan Jawa Barat di TMII keberadaannya baik secara kelembagaan mampu SDM harus menjadi perhatian yang serius dan mampu menjadi perhatian yang serius dan mampu berperan dalam melaksanakan peningkatan pariwisata nusantara maupun wisata mancanegara,.	✓ Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada, sesuai kewenangan tupoksi Badan Penghubung dalam memfasilitasi urusan pemerintahan di bidang pariwisata dengan peningkatan fungsi anjungan jawa barat taman mini indonesia indah.	✓ Meningkatnya fungsi Anjungan Jawa Barat Taman Mini “Indonesia Indah” dalam mendukung peningkatan sektor pariwisata Jawa Barat.
9	Keberadaan BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan pengkajian lagi bagi BUMD yang sampai saat ini dan kedepan tidak prospektif sebaiknya ditinjau lagi. Keberadaannya.	✓ Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan BUMD Non Keuangan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap keberadaan BUMD.	✓ Adanya evaluasi dan pengkajian terhadap keberadaan BUMD dan melakukan restrukturisasi/penyelesaian masalah-masalah BUMD dengan melibatkan para praktisi dan akademisi yang berkompeten.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
10	<p>Perlunya ditingkatkan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai basis pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan.</p>	<p>✓ Diskominfo Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mewujudkan repositori aset data provinsi dalam bentuk sistem Satu Data Jawa Barat dengan teknologi data <i>warehouse</i> dan <i>big data analytics</i>. Dalam perwujudannya setiap pengayaan data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sektoral akan tereplikasi ke sistem Satu Data dalam rangka menghasilkan data yang akurat, valid dan mutakhir. Berbagai upaya yang dilakukan adalah melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data Statistik Pembangunan Jawa Barat; 2. Penguatan Penyelenggaraan Pengumpulan Data Statistik Sektoral; 3. Penguatan Penyelenggaraan Layanan data Statistik Sektoral, Anggaran; 4. Layanan dan Diseminasi data Statistik Sektoral, Anggaran; 5. Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral A Spasial, Anggaran; 	<p>✓ Dimulai dengan pendataan fungsi akuisisi data sektoral rutin dari setiap Perangkat Daerah beserta sistem informasi pengolahannya untuk disiapkan mekanisme replikasi data secara otomatis melalui transaksi data berbasis <i>web-service</i>.</p> <p>✓ Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar setiap pengelola data pada instansi Perangkat Daerah dalam hal ini berperan sebagai Wali data Pendukung memahami tahapan, metode dan mekanisme pengelolaan data sehingga dapat menghasilkan data yang akurat, valid dan mutakhir; 2. Memudahkan mekanisme pengumpulan data melalui Teknologi informasi, mendukung terwujudnya integrasi antar sistem data, memudahkan database dikelola sesuai kebutuhan

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>6. Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral Spasial, Anggaran;</p> <p>7. Penguatan Penyelenggaraan Pengolahan dan analisis data Statistik Sektoral.</p>	<p>pemerintah daerah dan memudahkan akses pengguna data dalam rangka penyebarluasan data, baik untuk pengguna data internal maupun eksternal.</p> <p>✓ Masalah yang diselesaikan Mengoptimalkan integrasi data perencanaan pembangunan yang didapatkan dari berbagai sumber data.</p>
		<p>✓ Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia melalui pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi pada tahun 2019 dengan menghadirkan Bappeda Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Rencana tindak lanjut kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan:</p>	<p>✓ Tujuan dari kegiatan Forum Satu Data adalah adanya persamaan data yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Satu Data Indonesia sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan kebijakan untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Tata Kelola Satu Data Indonesia di tingkat provinsi (penetapan Wali data & Produsen Data dan Tata Kerjanya); 2. Membuat Peraturan/Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Forum Satu Data; 3. Membuat Peraturan/Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Forum Satu Data; 4. Membuat Peraturan/Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Pengelola Data dan Informasi Pemerintahan Daerah; 5. Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia di tingkat provinsi secara periodik; 6. Melaksanakan dan Memantau Pelaksanaan Rencana Aksi SDI di tingkat provinsi. 	
11	Mengurangi jumlah program/kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun, sehingga bisa fokus untuk mengembangkan suatu program/komoditas unggulan	✓ Tahun 2019, anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan komoditas unggulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.100.000.000,00 dari sebelumnya Rp414.300.000,00 pada tahun 2018. Selain itu pada Dinas Tanaman	✓ Meningkatkan efektifitas program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja, serta fokus dalam mengembangkan program unggulan.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	dengan pembiayaan yang lebih besar.	Pangan dan Hortikultura pada tahun 2019 dialokasikan Rp10.300.000.000,00, lebih besar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp935.000.000,00.	
12	Memperbanyak program yang berkategori program transformatif, bukan memperbanyak yang <i>basic activity</i> atau <i>basic office</i> .	✓ Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 sudah mengakomodir Program-Program yang bersifat baru dan lebih Inovasi terhadap Pembangunan Daerah, selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menjalankan <i>Dynamic Government</i> , dengan mengikuti perkembangan sistem Pemerintahan yang mampu berkolaborasi dengan berbagai elemen sehingga dapat mengimbangi perkembangan <i>Government 3.0</i> .	✓ Tujuannya adalah agar Program dan Kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan perubahan yang positif sesuai dengan tujuan <i>Dynamic Government</i> , baik dalam hal pelayanan dasar maupun non dasar, sehingga hasil pembangunan daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan bersifat inklusif.
13	Perlu memberikan perhatian terhadap pentingnya perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap barang yang beredar baik dipasar tradisional maupun di toko modern.	✓ Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) di Jalan Diponegoro Bandung. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI. Adapun tema harkonas	✓ Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap barang beredar untuk lebih meningkatkan tertib tata niaga dan perlindungan terhadap konsumen.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>tahun 2019 adalah “Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya”. Peringatan harkonas tahun 2019 terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan yaitu bakti sosial donor darah/cek kesehatan, penandatanganan prasasti pendirian unit metrologi legal Se-Indonesia, <i>talkshow</i>, sosialisasi konsumen cerdas kepada pelajar dan mahasiswa, pameran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pameran tematik perlindungan konsumen, klinik pengaduan konsumen 10 (sepuluh) toko modern di Kota Bandung dan puncak peringatan harkonas di Lapangan Gasibu Gedung Sate, Bandung. Pada peringatan Harkonas tahun 2019, Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen tahun 2018 terbaik. Penghargaan ini sudah dua kali diterima oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Adapun perhatian terhadap barang beredar di pasar</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>dan toko modern dilakukan melalui pengawasan terhadap komoditas kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat (kepokmas) menjelang hari besar keagamaan nasional. Pengawasan dilakukan bersama-sama dengan tim satgas pengawasan terpadu. Tim diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Anggota Tim Satgas terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Bpom, Ditjen Bea Cukai, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung serta Polda Jabar. Selain itu, provinsi jawa barat melakukan kerjasama dengan provinsi banten dan provinsi jawa tengah untuk melakukan pengawasan barang beredar dan tertib niaga di perbatasan.</p>	
14	Perlu pengembangan kerjasama industri kecil, menengah dan besar dalam rangka penguatan rantai	✓ Hal ini dilaksanakan melalui <i>Business Matching</i> antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar,	✓ Untuk menjelaskan permintaan pasar dalam bidang tertentu terkait spesifikasi, kualitas dan UMKM

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	pasok produk dan produk pendukung.	serta pola kemitraan antara Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan Industri Besar. Kedua hal tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan keterlibatan dan kinerja industri, serta dunia usaha Jawa Barat dalam <i>Global Value Chain</i> (GVC).	melalui bimbingan Dinas biasa memproduksi sesuai kebutuhan industri; ✓ Meningkatkan pola kemitraan antara IKM dengan industri besar, serta membuka akses permodalan bagi IKM dengan melibatkan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.
15	Pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan dan institusi lain sehingga memberikan kemudahan akses informasi pembiayaan.	✓ Menjajaki dan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan seperti: 1. Lembaga penjamin kredit; 2. Perusahaan penjamin infra struktur; 3. Pembiayaan sekunder perumahan Badan penyelenggara jaminan sosial lembaga keuangan mikro.	✓ Memberikan pinjaman kredit kepada nasabah. Perusahaan penjaminan kredit bertujuan untuk membantu Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Mikro untuk mengakses dana dari lembaga keuangan lain, misalnya perbankan; ✓ Memberi jaminan kepada proyek-proyek yang bekerjasama dengan pemerintah namun badan usaha ini bergerak hanya di bidang infrastruktur yang dilakukan dengan cara menyediakan penjaminan infrastruktur;

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan agar dapat dijangkau oleh masyarakat di berbagai kalangan; ✓ Memberi pinjaman dan pembiayaan secara langsung untuk usaha yang berskala mikro baik kepada anggotanya atau kepada masyarakat.
16	Melanjutkan kembali dan memperkuat pasar tradisional dengan standar yang ditingkatkan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan pasar rakyat dilakukan melalui program pasar juara yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat serta mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi pasar rakyat; 2. Peningkatan kesejahteraan para pedagang dengan meningkatkan omzet penjualan di pasar rakyat; 3. Pengembangan pasar rakyat ber-SNI (standar nasional indonesia); 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sertifikasi pasar rakyat ber-SNI minimal 1 pasar bersertifikat SNI untuk setiap Kab./kota untuk lebih meningkatkan daya saing pasar rakyat di tengah persaingan perdagangan global.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>4. Pengembangan pasar kreatif dan pasar tematik; serta</p> <p>5. Peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga.</p> <p>Hasil implementasi langkah-langkah diatas pada tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target berupa terwujudnya pasar rakyat di kabupaten/kota yang memenuhi standar sni serta terwujudnya pasar kreatif dan pasar tematik Provinsi Jawa Barat. Diharapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan sudah ada pasar rakyat di jawa barat yang memenuhi standar sni, serta terwujudnya pasar kreatif dan pasar tematik Jawa Barat.</p>	
17	Menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas Pemerintah Jawa Barat yang ditandai dengan ditingkatkannya alokasi pendanaan bagi pengembangan pariwisata, khususnya bagi peningkatan kualitas SDM pariwisata, promosi <i>icon</i> pariwisata Jawa Barat,	<p>✓ Program pengembangan destinasi pariwisata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan ciletuh-palabuhanratu <i>UNESCO Global Geopark</i>, dengan alokasi anggaran Rp9.164.844.242,00; 2. Pembangunan daya tarik dan sarana transportasi wisata di Jawa Barat 	<p>✓ Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun kedepan telah menetapkan program strategis pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan pengembangan SDM pariwisata, dengan kegiatan pembangunan</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	pembangunan infrastruktur perhubungan dan penunjang pariwisata, serta pengembangan kawasan wisata terpadu yang potensial.	dengan alokasi anggaran Rp31.846.909.640,00; 3. Pembinaan Kompepar, dengan alokasi anggaran Rp49.999.414,00; 4. Pembinaan desa wisata dengan alokasi anggaran Rp372.073.474,00; 5. Program pengembangan pemasaran pariwisata kegiatan <i>smart tourism system platform</i> , dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.522.145.000,00.	pariwisata tipe 1 dan 2 serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sehingga diharapkan 1 (satu) Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) unggulan destinasi pariwisata yang menjadi <i>icon</i> tujuan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.
18	Menghubungkan dinas-dinas penghasil bahan baku dengan industri pengolahan dan pasar.	✓ Sinergi antara dinas-dinas penghasil bahan baku dengan industri pengolahan berbasis 2 (dua) komoditas industri yaitu industri agro, kimia, tekstil dan aneka serta industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika melalui kegiatan pengembangan teknologi produksi industri. Sementara sinergi antara dinas-dinas penghasil bahan baku dengan pasar dilakukan melalui kegiatan penguatan stabilisasi harga dan stok kepokmas. Selain itu, pada tahun 2019 beberapa kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan	✓ Membuka akses bagi produsen komoditas/bahan baku lokal agar dapat masuk dalam rantai produksi industri Jawa Barat baik skala lokal maupun orientasi ekspor.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		berkolaborasi dengan Dinas penghasil bahan baku, antara lain kegiatan <i>west java specialty coffee</i> festival yang bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.	
19	Melakukan koordinasi perangkat daerah lintas sektoral untuk mengawal capaian target program dan kegiatan agar berkontribusi secara signifikan terhadap indikator makro ekonomi Jawa Barat.	✓ Koordinasi lintas sektoral dilakukan diantaranya melalui kegiatan Pra Musrenbang, Musrenbang Kab./kota, serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat. Dari rangkaian kegiatan-kegiatan Musrenbang tersebut, diharapkan baik Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah (sektoral) Provinsi Jawa Barat dapat bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.	✓ Program-program pembangunan (sektoral) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta keterlibatan dari <i>stakeholders</i> lainnya diharapkan mampu secara signifikan meningkatkan capaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan Jawa Barat yang inklusif.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
20	Agar Gubernur melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menggali pendapatan daerah untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan program kegiatan dan pembangunan di Jawa Barat yang dari tahun ke tahun terus meningkat.	✓ Dalam upaya memaksimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penelusuran penunggak pajak dan mengoptimalkan sumber penerimaan daerah lainnya, serta terus melakukan pengembangan sistem pembayaran melalui Samsat Jbret sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran yang dapat dilakukan di gerai modern (Alfamart, Alfamidi, Indomart, aplikasi <i>Fintech</i> , Bukalapak, Tokopedia, Kaspro, dan PPOB serta BUMDES).	✓ Mengurangi jumlah penunggak pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan PAD, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan.
21	Agar Gubernur Jawa Barat juga segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam berbagai Peraturan Daerah baik diinisiasi oleh Eksekutif maupun yang diinisiasi oleh Legislatif, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan peraturan daerah.	✓ Sudah ada beberapa Peraturan Gubernur Jawa Barat untuk mengimplementasikan suatu Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut diantaranya aturan tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur pada Pasal 5 ayat (2) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan	✓ Agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai target, maka perlu dilakukan akselerasi dalam hal pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah melalui diterbitkannya Peraturan Gubernur ataupun Keputusan Gubernur sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk memperlancar pelaksanaan peraturan tersebut diatas, maka telah diatur Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota
22	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura bersama Biro Hukum segera menyusun Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	✓ Telah disusun Naskah Akademik Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	✓ Adanya acuan/pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani di Jawa Barat untuk menciptakan Petani Juara.
23	Dinas Kelautan dan Perikanan Bersama Biro Hukum segera menyusun Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.	✓ Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Biro Hukum telah menyusun Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Kegiatan ini dianggarkan pada program peningkatan produksi perikanan dan daya saing produk perikanan, kegiatan peningkatan kualitas	✓ Adanya acuan/pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Jawa Barat untuk menciptakan Nelayan Juara.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		SDM nelayan dan kelembagaan perikanan tangkap (bagian dari kegiatan ini) sebesar Rp50.000.000,00.	
24	Biro Pemerintahan dan Kerjasama bersama dinas/badan teknis terkait perekonomian segera merealisasikan MoU <i>Sister Province</i> Jawa Barat – Shizuoka menjadi program-program, terutama kerjasama pemagangan, pendidikan, perindustrian, umkm, pariwisata dan budaya.	✓ Pada tahun ke-2 kerja sama sektor ekonomi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan <i>prefecture</i> Shizuoka, komunikasi yang berlangsung antara kedua pihak telah dalam proses pembicaraan mengenai peningkatan status kerja sama menjadi <i>sister province</i> . Salah satu langkah penting adalah dengan kunjungan bapak Gubernur Jawa Barat ke Shizuoka pada bulan November 2019 lalu, dimana direncanakan Gubernur Shizuoka akan melakukan kunjungan balasan ke Jawa Barat pada tahun 2020. Dalam dokumen rencana kerja sama (<i>workplan</i>), tercatat dari 30 program kerja sama, mayoritas telah terlaksana. Terdapat 8 program yang	✓ Tujuan dari MoU <i>Sister Province</i> Jawa Barat – Shizuoka adalah untuk membina hubungan antar pemerintah daerah yang diharapkan bisa membangkitkan hubungan bisnis to bisnis dan <i>people to people</i> . ✓ Adapun ruang lingkup kerja sama yang akan disepakati, di antaranya kesenian, kebudayaan, pendidikan, transportasi, perdagangan, investasi. Termasuk sharing pengetahuan riset dan teknologi kemampuan pemdanya.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>belum terlaksana dan diantaranya telah diagendakan untuk dapat terlaksana pada tahun 2020. Kesuksesan atas terlaksananya mayoritas program terutama dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dan komitmen kedua belah pihak yang tinggi serta peran dan dukungan perwakilan pemerintah Shizuoka untuk ASEAN yang senantiasa menjadi penghubung yang efektif dalam mewujudkan program-program terkait. Adapun kendala yang dihadapi dari belum terlaksananya program-program terkait adalah berkenaan dengan strategi prioritas dalam menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia dari kedua belah pihak sehingga, program-program yang belum terlaksana diupayakan untuk dapat terealisasi pada tahun anggaran selanjutnya (2020).</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
25	Menyelenggarakan <i>event marathon</i> internasional secara profesional sebagai daya tarik pariwisata Jawa Barat.	Telah dilaksanakan <i>event</i> Jabar Internasional <i>Marathon</i> dengan rute melintasi kawasan objek wisata pantai di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat sekali mengkampanyekan lingkungan hidup dengan tema <i>eco friendly</i> . Rencananya <i>event</i> ini akan dijadikan agenda tahunan olahraga Internasional Jawa Barat.	✓ Penyelenggaraan <i>event</i> olahraga memberi dampak terhadap daya tarik pariwisata salah satunya melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan mendorong partisipasi publik berupa petunjukan seni budaya, kuliner. Sehingga ada keterikatan antara pelari, masyarakat sekitar dan <i>event</i> .
26	Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah, khususnya pemanfaatan atap gedung pemerintahan sebagai sumber energi surya melalui pemasangan solar panel.	✓ Salah satu prioritas dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah pengembangan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diantaranya adalah PLTS <i>Roof Top</i> . Hal ini dilaksanakan pada Program Pengembangan Energi, melalui Kegiatan Pembangunan PLTS <i>Roof-Top</i> Pada Bangunan di Sektor Publik, dengan Anggaran Rp9.749.837.468,00.	✓ Meningkatkan porsi energi terbarukan pada bauran energi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan memanfaatkan energi matahari pada atap 7 (tujuh) gedung milik Pemerintah Provinsi, dengan total daya yang terbangkitkan sebesar 191,1 kWp.
27	Mengumumkan semua aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat	✓ Hal ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi	✓ Tingkat Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Daerah.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan usaha dan mendayagunakan semua aset perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi kepentingan masyarakat sebagai fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas perekonomian sesuai Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah.	Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	
28	Membangun sistem kereta api terpadu bandung raya sesuai amanat Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.	✓ Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang merencanakan Sistem Perkeretaan Perkotaan di Bandung Raya. Dinas Perhubungan telah merencanakan 7 (Tujuh) Koridor Jalur Kereta Api dengan panjang total 142 Km, yang melintasi 5 (Lima) Kabupaten/Kota di Wilayah Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Adapun untuk Fase Pertama, telah diusulkan Proyek Pembangunan Koridor Leuwipanjang – Tegalluar Sepanjang 16,55 Km, yang akan menjadi salah satu <i>Feeder</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyediakan perencanaan sistem perkeretaapian di Bandung Raya berupa perencanaan jalur kereta perkotaan; ✓ Menyiapkan skema pendanaan pembangunan bagi pengembangan perkeretaapian perkotaan di Bandung Raya; ✓ Melakukan persiapan reaktivasi jalur kereta api lama yang merupakan bagian dari Bandung Raya, untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah Bandung Raya;

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>atau simpul bagi Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang Stasiun Akhirnya berada di Tegalluar, Kabupaten Bandung.</p> <p>Fase Pertama atau Fase I tersebut direncanakan dibiayai dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan saat ini sedang dilakukan <i>Review</i> atau penelaahan ulang terhadap Dokumen <i>Outline Business Case</i> (OBC) yang dilakukan oleh Bappenas hingga pertengahan Tahun 2020. Diharapkan selambatnya pada tahun 2021, Proses Lelang Investasinya dapat dilaksanakan dan pada awal Tahun 2022 proses pekerjaan konstruksinya dapat dilakukan;</p> <p>Selain merencanakan pembangunan jalur kereta Leuwipanjang-Gedebage-Tegalluar, Dinas Perhubungan juga bekerjasama dengan PT. KAI merencanakan jalur shortcut Tegalluar- Cimekar untuk jalur pengumpan dari stasiun kereta api cepat di Tegalluar menuju ke pusat kota bandung (dan sebaliknya), dengan menyambungkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengakselerasi jalur <i>shortcut</i> Tegalluar- Cimekar untuk jalur pengumpan dari stasiun kereta api cepat di Tegalluar menuju ke pusat kota bandung (dan sebaliknya), dengan menyambungkan rel baru dari Tegalluar sepanjang 2 km ke rel <i>existing</i> di Cimekar; ✓ Mendorong pembangunan jalur ganda dari Rancaekek ke Kiaracondong dan <i>elevated rail</i> dari Kiaracondong ke Stasiun Bandung; ✓ Mendorong elektrifikasi jalur Cicalengka ke Padalarang

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>rel baru dari Tegalluar sepanjang 2 km ke rel <i>existing</i> di Cimekar.</p> <p>Implikasi dari pembangunan <i>shortcut</i> ini, maka Dinas Perhubungan mendorong juga ke Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kapasitas jalur eksisting pada jalur Rancaekek ke Kiaracondong yang semula masih berupa jalur tunggal (<i>single track</i>) menjadi jalur ganda (<i>double track</i>), serta membangun <i>elevated rail</i> dari Kiaracondong ke Stasiun Bandung agar perlintasan sebidang pada jalur tersebut dikurangi, yang nantinya akan meningkatkan frekuensi dan kecepatan perjalanan kereta di wilayah Bandung Raya. Kedepannya, Dinas Perhubungan mendorong dilakukannya elektrifikasi pada jalur Padalarang menuju Cicalengka;</p> <p>Upaya lain yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah menyiapkan Dokumen Studi Trase untuk Koridor-Koridor perkeretaapian perkotaan Bandung Raya yang lainnya, Dimana sampai dengan Tahun 2019, telah dilakukan Studi Trase</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>untuk Koridor Leuwipanjang-Jatinangor dan Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-Ciburuy. Sedangkan untuk koridor Banjaran-Martadinata, pada tahun 2019 telah dilakukan Studi Pendahuluan untuk skema KPBU, yang dilanjutkan dengan Studi Trase pada Tahun 2020;</p> <p>Selain itu, untuk mengembangkan aksesibilitas Ke daerah Jatinangor sebagai salah satu Pusat Pendidikan di Wilayah Bandung Raya dan ke Ciwidey sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Wilayah Bandung Raya, Dinas Perhubungan bersama dengan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. Kereta Api Indonesia, sedang berupaya melakukan reaktivasi beberapa jalur kereta api yang dulu ada di Wilayah Bandung Raya yaitu Jalur Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari dan Cikudapateuh-Ciwidey;</p> <p>Dalam upaya melakukan reaktivasi Jalur Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari, dalam RPJMD Prov. Jabar 2013-2018, Pemerintah</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan dana untuk kegiatan Pengadaan Tambahan Tanah Dalam Rangka Reaktivasi Jalur Tersebut Selama Kurun Waktu 2019-2023. Sedangkan untuk Reaktivasi Jalur Bandung-Ciwidey, Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menganggarkan dana untuk kegiatan Persiapan Penertiban Lahan untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Di Jawa Barat, yang akan dianggarkan secara rutin selama 2018-2023. Kegiatan Ini dimaksudkan untuk mendukung Kementerian Perhubungan dan PT. KAI dalam upaya melakukan sosialisasi rencana reaktivasi serta penertiban lahan;</p> <p>✓ Tindak Lanjut pada Tahun 2019 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat Tahun 2019 dengan anggaran Rp1.452.322.064,00, yang didalamnya terdapat pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Kajian Dokumen KPBU Perkeretaapian di Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp99.469.700,00 	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>b. Penyusunan Kajian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan untuk Pembangunan Monorel Bandung Raya Koridor Leuwipanjang-Gedebage-Tegalluar dengan anggaran sebesar Rp649.000.000,00</p> <p>c. Penyusunan Kajian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Monorel Bandung Raya Koridor Leuwipanjang-Gedebage-Tegalluar dengan anggaran sebesar Rp231.742.500,00</p> <p>Ketiga pekerjaan ini dilakukan untuk mendukung perencanaan perkeretaapian perkotaan di Bandung Raya. Sedangkan anggaran lainnya digunakan untuk melakukan fasilitasi dan rapat-rapat koordinasi pengembangan jalur kereta api lainnya di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Raya;</p> <p>2. Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur KA Rancaekek – Tanjungsari, sebagai persiapan reaktivasi jalur KA Rancaekek-Tanjungsari:</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>a. Jasa Konsultansi Review Dokumen Rencana Pengadaan Tambahan Lahan Untuk Reaktivasi Jalur KA Rancaekek – Tanjungsari dengan anggaran sebesar Rp579.950.800;</p> <p>b. Jasa Konsultansi Penilaian Harga Tanah Jalur KA Rancaekek – Tanjungsari dengan anggaran sebesar Rp399.998.500, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019, karena Penertiban lahan belum dilaksanakan PT.KAI /Kementerian Perhubungan, sedangkan lahan yang akan dinilai (akan dibebaskan) berada di sisi luar dari lahan yang akan ditertibkan. Sehingga seharusnya pembebasan lahan dilaksanakan setelah penertiban lahan oleh PT. KAI /Kementerian Perhubungan. Mengingat sebelum dilaksanakan kajian penilaian harga, akan dilaksanakan penetapan lokasi terlebih dahulu, berarti hak pemilik</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>tanah akan dibatasi, maka penetapan lokasi belum dilaksanakan sampai ada kepastian pembebasan lahan (setelah penertiban lahan) dapat dilaksanakan. Disamping penetapan lokasi sendiri memiliki masa berlaku 1 tahun yang hanya dapat diperpanjang maksimal 2 kali.;</p> <p>3. Kegiatan Persiapan Penertiban Lahan Perkeretaapian di Jawa Barat Tahun 2019, merupakan kegiatan yang berisi rapat-rapat koordinasi percepatan reaktivasi jalur KA di Jabar dengan anggaran sebesar Rp247.919.700,00;</p> <p>4. Kegiatan Studi Trase Pembangunan LRT Bandung Raya Koridor Barat – Timur, untuk mendukung perencanaan perkeretaapian perkotaan di Bandung Raya dengan anggaran Rp556.890.953,00.</p>	
29	Membangun kawasan Sukabumi Selatan menjadi kawasan khusus pengembangan budidaya lobster.	✓ Untuk membangun kawasan budidaya lobster di Kabupaten Sukabumi Selatan masih terkendala dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik	✓ Mengusulkan peninjauan kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>Indonesia nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (<i>panulirus spp.</i>), Kepiting (<i>scylla spp.</i>), dan Rajungan (<i>portunus spp.</i>) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 2 (dua), bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (<i>panulirus spp.</i>), dengan harmonized system code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah negara republik indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan; b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor, Serta pasal 7 ayat (1), bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya. Merujuk dari peraturan diatas, jelas bahwa budidaya lobster tidak bisa dilakukan, karena nelayan tidak bisa melakukan penangkapan benih lobster untuk dibudidayakan, kecuali untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan 	<p>Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (<i>Panulirus Spp.</i>), Kepiting (<i>Scylla Spp.</i>), dan Rajungan (<i>Portunus Spp.</i>) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		pengembangan Namun demikian, peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 56/permen-kp/2016 akan ditinjau kembali dan sedang dilakukan kajian terkait hal ini oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI.	
30	Membuat aturan khusus terkait pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang persyaratannya dikaitkan dengan kinerja pelaksanaan program sebelumnya serta kesesuaian dengan RPJMD Jawa Barat periode 2018-2023.	✓ Terkait regulasi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota persyaratannya dikaitkan dengan kinerja pelaksanaan program sebelumnya serta kesesuaian dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 bahwa mekanisme pengajuan bantuan keuangan kabupaten/kota disesuaikan dengan rpjmd secara tupoksi berada di ranah bappeda. Adapun regulasi terkait pedoman pemberian bantuan keuangan kepada daerah kabupaten/kota dan desa telah di atur dalam peraturan Gubernur nomor 96 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2017.	✓ Dengan tertibnya Peraturan Nomor 96 Tahun 2015 sebgaimana telah diubah ke Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 diharapkan Penatausahaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa menjadi tertib dan sesuai ketentuan yang ada.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
31	Membentuk lembaga dana bergulir berupa suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai implementasi amanat perda nomor 8 tahun 2011.	Untuk saat ini belum ada BLUD yang mengelola dana bergulir di Provinsi Jawa Barat.	Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana bergulir yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas untuk mencapai tujuan dari penyaluran dana bergulir yang terintegrasi terhadap usaha ekonomi.
32	Membentuk lembaga pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat sesuai amanat Perda nomor 15 tahun 2017.	✓ Program pengembangan destinasi pariwisata dengan Kegiatan Pembentukan Lembaga Ekraf Jabar 2019, Rp16.430.379.000,00 berupa pembentukan Perda dan Pergub tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat, <i>Event Creative Festival Film Bandung (FFB)</i> dan <i>Event Pemilihan Mojang dan Jajaka Jawa Barat</i> .	✓ Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif terwujud dengan Pusat Ekraf (<i>Creative Hub</i>), dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah yang akan terwujud di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hal tersebut sebagai upaya penggalan potensi ekraf di setiap Kabupaten/Kota.
33	Mendorong taman hutan rakyat sebagai sarana edukasi dan pariwisata alam yang berskala internasional.	✓ Sudah diakomodir dalam program pemanfaatan sumber daya hutan dan pemberdayaan masyarakat/Kegiatan promosi wisata alam tahura ir. H. Djuanda dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 (bentuknya berupa	✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal maupun internasional dalam pelestarian taman hutan raya.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		kegiatan pameran promosi wisata dan even edukasi pelestarian alam).	
34	Meningkatkan sarana dan prasarana museum-museum di Jawa Barat sebagai daya tarik pariwisata Jawa Barat berskala internasional.	✓ Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di Museum Sri Baduga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di gedung penyimpanan ruang koleksi museum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00.	✓ Perbaiki bangunan-bangunan dan Rehabilitasi ruang Penyimpanan Ruang Koleksi Museum.
35	Membangun fasilitas penelitian bidang teknologi dan kelautan, bidang teknologi energi terbarukan, bidang teknologi digital dan <i>center of excellence</i> untuk peningkatan kualitas pendidikan.	<p>✓ Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penelitian bidang teknologi dan kelautan berada di badan penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Jawa Barat serta menjadi kewenangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan);</p> <p>✓ Kementerian Kelautan Dan Perikanan melalui Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan telah</p>	<p>✓ Tujuan khusus untuk meningkatkan riset di bidang energi baru terbarukan serta dibidang kelautan untuk meningkatkan kinerja kedua sector tersebut melalui skema pendidikan.</p> <p>✓ Melalui kegiatan Pembentukan Laboratorium Energi dan Ketenagalistrikan, UPTD Laboratorium Dinas ESDM akan menambah pelayanan yang salah satunya di bidang energi Baru</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>membangun lembaga penelitian teknologi kelautan dan perikanan di kabupaten pangandaran yaitu pangandaran <i>integrated</i> aquarium dan <i>marine research institute</i> (pamari).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Pengembangan Energi, Kegiatan Pembentukan Laboratorium Energi dan Ketenagalistrikan, Anggaran Rp 200.467.874,00; ✓ Program Pengembangan Energi, Kegiatan Pembangunan PLTS <i>Roof-Top</i> Pada Bangunan di Sektor Publik, Anggaran Rp9.749.837.468,00. 	<p>Terbarukan melalui pengadaan alat Metan Detector dan Solar Meter. Diharapkan mulai tahun 2020 laboratorium energi dan ketenagalistrikan ini bisa mulai beroperasi. Salah satu <i>Output</i> kegiatan Pembangunan PLTS <i>Roof-Top</i> Pada Bangunan di Sektor Publik adalah pemasangan PLTS <i>Roof-Top</i> dengan kapasitas 25,2 kWp di SMKN 4 Bandung. Dengan pemasangan ini, selain untuk mengaplikasikan energi bersih di fasilitas gedung milik Pemprov Jabar, SMKN 4 sudah berkomitmen untuk menjadi center of excellence teknologi energi terbarukan PLTS dengan memanfaatkan instalasi yang telah dipasang sebagai objek pembelajaran bagi siswa dan guru dari berbagai wilayah di Indonesia.</p>
36	Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi pemerintah	✓ Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan evaluasi perangkat	✓ Pelaksanaan evaluasi Perangkat Daerah ini untuk mendapatkan

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	daerah sesuai amanat Permendagri Nomor 99 Tahun 2018, dengan menerapkan prinsip efisiensi dan sesuai dengan potensi Jawa Barat.	<p>daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas. Padjadjaran melalui perjanjian kerjasama nomor 100/113.a/org tanggal 18 april 2019. Adapun tahapan yang dilakukan diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan instrumen evaluasi; 2. Tabulasi dan pengolahan data; 3. Analisis data; 4. Laporan evaluasi perangkat daerah; 5. Naskah akademik. <p>✓ Hasil evaluasi telah diajukan ke Bapemperda, namun karena adanya kebijakan pemerintah pusat, yaitu adanya surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 390 tahun 2019 tentang Langkah Strategis Dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi, hasil evaluasi akan disampaikan pada Propemperda perubahan.</p>	Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran guna mendukung ketercapaian visi-misi Pemerintah Daerah.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
37	Menjadikan Cirebon Raya sebagai destinasi pariwisata Jawa Barat berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif dengan menjadikan keraton sebagai salah satu daya tarik utama.	✓ Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi daya tarik wisata Keraton Cirebon melalui pemberian bantuan hibah pada tahun 2019 meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Keraton Kacirebonan sebesar Rp400.000.000,00; 2. Kegiatan FKN XII Keraton Kaprabonan sebesar Rp400.000.000,00; 3. Keraton Kasepuhan sebesar Rp1.000.000.000,00; 4. Sanggar Seni Budaya Andika Nada Kab. Cirebon sebesar Rp50.000.000,00; 5. Sanggar Seni Pangreksa Budhi Kab. Cirebon sebesar Rp50.000.000,00. 	✓ Meningkatkan potensi keraton sebagai daya tarik wisata Jawa Barat disamping tujuan untuk melestarikan kebudayaan Jawa Barat.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
38	Menfasilitasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat melalui pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, penyelenggaraan event budaya dan olahraga serta pusat penyelenggaraan haji dan umroh.	✓ Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 telah mengusulkan penyelenggaraan <i>event</i> budaya melalui program pengembangan destinasi pariwisata. Kegiatan Jabar <i>Creative Event Of</i> Kertajati, dengan alokasi anggaran Rp2.500.000.000,00;	Meningkatkan kapasitas dan potensi kawasan BIJB sebagai gerbang pariwisata Jawa Barat;

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		✓ Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan BUMD Non Lembaga Keuangan;	Memfasilitasi dan mendorong PT. BIJB untuk membangun kemitraan dengan pihak terkait (PD Provinsi, Pemerintah Pusat, Travel Umroh termasuk asosiasinya serta maskapai penerbangan.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>✓ Terima kasih atas perhatiannya terhadap pengembangan olahraga di kawasan BIJB, kami sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga baik <i>single event</i> maupun <i>multievent</i> yang tentunya dengan keberadaan BIJB akan memudahkan transportasi atlet dari dalam negeri maupun luar negeri yang tentu perlu disesuaikan dengan potensi dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang telah ada di Wilayah Ciayumajakuning, diantaranya selam nomor perairan terbuka/laut di Indramayu, selam nomor kolam dan badminton di Kota Cirebon, <i>road race (tour de Linggarjati)</i> di Kuningan dan gantole di Majalengka;</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>✓ Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial menganggarkan melalui program koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, kegiatan pembinaan calon Jemaah haji Jawa Barat sebesar Rp.15.000.000.000,00,- (Hibah kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provisi Jawa Barat).</p>	<p>✓ Membantu penyelenggaraan Jamah Haji Jawa Barat agar pelaksanaan ibadah haji tertib dan teratur yaitu dengan membiayai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Jawa Barat.</p>
39	<p>Memanfaatkan teknologi terbaru penggunaan karet dan plastik dalam peningkatan kualitas jalan raya, untuk menghasilkan kualitas jalan yang lebih baik dan tahan lama.</p>	<p>✓ Secara umum penggunaan karet dan plastik mempunyai kelebihan dibandingkan dengan aspal biasa. Diantaranya adalah aspal karet memiliki tingkat pengerasan yang lebih baik dan memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan aspal biasa. Untuk plastik memiliki ketahanan yang lebih baik dan lama terhadap deformasi jalan. Namun demikian terdapat juga kelemahannya yaitu lebih mahal karena temperatur pencampuran lebih tinggi 15-25 celcius. Dan ada resiko tidak tercampur merata serta kualitas sumber bahan karet ataupun plastik yang buruk/tidak</p>	<p>✓ Alternatif teknologi bahan baku untuk peningkatan kualitas jalan raya di Provinsi Jawa Barat.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		memenuhi persyaratan. Oleh karena diperlukan riset yang menyeluruh terkait dengan aplikasinya di lapangan, ketersediaan bahan baku, dan dampak lingkungan yang mungkin terjadi.	
40	Meningkatkan kualitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi ramah instan sederhana sehat (risha).	✓ Telah dilaksanakan pekerjaan pengadaan rumah lego, yaitu menggunakan teknologi rumah unggul sistem panel instan (ruspin) dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin, yang baru uji coba diaplikasikan di 3 lokasi, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, kab. Pangandaran dan kab. Karawang dengan total anggaran senilai Rp198.075.000,00. Kedepan akan dikembangkan mekanisme bantuan dengan menggunakan risha ataupun ruspin.	✓ Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Jawa Barat.
41	Membangun fasilitasi teknologi informasi <i>video conference</i> di setiap sekolah SMA/SMK untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diskominfo siap memfasilitasi kebutuhan jaringan komunikasi data ke sekolah-sekolah menengah atas rekomendasi dari Dinas terkait; ✓ <i>Video conference</i> tercantum dalam tugas pokok dan Uraian Tugas Seksi Layanan Infrastruktur Bidang <i>e-Government</i>. Dapat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dibutuhkan kajian kebutuhan dan kemanfaatan penyediaan akses dan perangkat untuk menentukan sekolah/wilayah yang cukup layak difasilitasi; ✓ Memfasilitasi kebutuhan komunikasi jarak jauh yang lebih

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		dilaksanakan baik terjadwal maupun insidental sesuai kebutuhan.	komprehensif dan interaktif dua arah.
42	Membangun sekolah-sekolah baru disetiap Kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri.	Program Pendidikan Menengah 1. Pembangunan USB SMK Negeri : • SMKN 3 Depok, biaya Rp2.921.931.206,00; • SMKN Bungursari, biaya Rp2.921.315.730,00; 2. Pembangunan USB SMA Negeri • SMA Negeri 2 Lembang, biaya Rp2.415.345.861,00; • SMA Negeri 4 Subang, biaya Rp2,335,712,000,00; • SMA Negeri 1 Jamanis, biaya Rp2.280.454,000,00; • SMA Negeri 2 Pagaden, biaya Rp2.578.334.000,00; • SMA Negeri 12 Depok, biaya Rp2.344.533.000,00;	✓ Dengan adanya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) bertujuan untuk Memberikan ruang bagi kesempatan proses belajar mengajar bagi siswa dan tenaga pendidik di dalam lingkungan satuan pendidikan sendiri tanpa membebani pihak sekolah yang di tumpangi, dengan begitu kemandirian pada sekolah baru lebih tertata dalam pemerataan baik segi pembelajaran ataupun segi sarana prasarannya yang ditunjang dari bantuan berbagai pihak yang berkompeten dibidangnya dengan tujuan utamanya adalah peningkatan aksesibilitas dalam rangka

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 22 Bekasi, biaya Rp2.423.195.000,00. 	<p>menampung dan memberikan kesempatan pada masyarakat usia sekolah untuk bisa mengikuti pendidikan di wilayah tersebut sehingga bisa menghasilkan lulusan yang berdaya saing sehingga dapat diterima bekerja didunia usaha, industri dan mampu menciptakan wirausaha;</p> <p>✓ Begitupun bagi lulusan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) yaitu agar lulusan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta.</p>
43	Membangun kerjasama <i>sister school</i> , dengan provinsi-provinsi dinegara maju yang memiliki MoU dengan Jawa Barat, yaitu: Australia Selatan, Shizouka Jepang, Wallonia Belgia, Chongqing China dan Incheon Korea Selatan.	<p>✓ Program sister school telah dilaksanakan dengan provinsi australia selatan sehubungan kegiatan ini memang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam workplan kerja sama Sister Province, adapun untuk mitra pemerintah lainnya seperti Shizuoka (Jepang), Wallonia (Belgia), Chongqing (China) dan Incheon (Korea Selatan) program sister school tidak</p>	<p>✓ <i>Sister School Partnership</i> merupakan kegiatan yang dilakukan antara sekolah baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka menjalin kerjasama guna mencapai tujuan tertentu terutama dalam bidang pendidikan, budaya dan peningkatan mutu guru serta</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>secara eksplisit disepakati dalam salah satu program yang dimuat dalam workplan kerja sama tersebut.</p> <p>Adapun program sister school atas kerja sama dengan pemerintah Australia Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki 11 pasang sekolah yang telah bermitra dengan sekolah di wilayah australia selatan tersebut. Di samping itu, perlu disampaikan pula bahwa terdapat program-program terkait yang juga telah dilaksanakan dengan australia selatan yaitu sahabat pena, joint class, dan teacher exchange dari sekolah-sekolah antar kedua pihak;</p> <p>Lebih jauh, kesuksesan skema kerja sama dengan australia selatan pada dasarnya dapat direplikasi untuk diterapkan dengan mitra-mitra pemerintah terkait lainnya dengan proses adendum kerja sama dan wokplan terkait, hal ini sangat memungkinkan untuk dapat dilakukan namun demikian membutuhkan proses dan komunikasi yang intensif dengan mitra-</p>	kepala sekolah antar kedua sekolah.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		mitra pemerintah tersebut sehingga belum dapat dilaksanakan pada tahun 2019. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pada bulan desember 2019, dalam rangka penjajakan kerjasama lebih kongkrit, telah diusulkan kepada pemerintah provinsi Gyeossngbuk-Do program sisterschool dan pihak Gyeosangbuk-Do menyambut baik usulan ini dan menawarkan program anak-anak sekolah di Jawa Barat untuk mengikuti program di provinsi Gyeosangbuk-Do pada tahun 2020.	
44	Menyederhanakan BUMD Jawa Barat, dengan melakukan <i>merger</i> serta likuidasi bagi BUMD yang tidak mampu memberikan pemasukan terhadap PAD serta tidak mendorong perekonomian masyarakat.	✓ Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan BUMD Lembaga Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penggabungan usaha atau <i>merger</i> 7 (Tujuh) PD. BPR BKPD di Kab Cirebon ke Dalam PD. BPR-BKPD Astanajapura dan atau perubahan bentuk hukum PD. BPR BKPD Cilamaya Kab Karawang dan PD. BPR Serang menjadi Perseroan; ✓ RUPS Tahunan dan Rencana Kerja/Rencana Bisnis; ✓ Penerapan tata kelola yang baik atau <i>Good Corporate Governance</i>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			pada BUMD sesuai dengan regulasi.
45	Menjadikan pengolahan sampah dan limbah termasuk limbah rumah sakit sebagai bisnis utama bumd jasa sarana dan menutup semua anak perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan.	✓ Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan BUMD Non Keuangan.	✓ Adanya Monitoring dan Evaluasi BUMD Non Keuangan termasuk pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait termasuk Evaluasi BUMD yang melibatkan Narasumber. Menyusun Rencana Strategis BUMD dan melakukan evaluasi terhadap rencana perbaikan serta melaksanakan pengkajian atas keterlibatan PT. Jasa Sarana di anak perusahaan serta menjadikan pengolahan limbah Rumah Sakit sebagai bagian dari bisnis utamanya.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
46	Membangun industri olahraga berbasis ekonomi rakyat, terutama pengembangan industri <i>outdoor sport</i> sebagai daya tarik utama pariwisata dan produk unggulan Ekspor Jawa Barat.	✓ Kami mendukung pengembangan industri <i>outdoor sport</i> , namun tentu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota melalui perangkat daerah yang mengelola olahraga dan industri untuk mengembangkan potensi dan ketersediaan <i>outdoor sport</i> domestik yang dimiliki masing-masing untuk selanjutnya dapat diajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat, provinsi atau melalui kolaborasi dengan pihak dunia usaha setempat.	✓ Mengembangkan <i>outdoor sport</i> sebagai salah satu daya tarik pariwisata Jawa Barat.
47	Membentuk ulang badan promosi pariwisata Jawa Barat yang lebih profesional, milenial dan mampu memanfaatkan teknologi informasi tercanggih.	✓ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Pusat Layanan Informasi Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp199.998.076,00,00.	✓ Mendukung Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat melalui : 1) Pendukung kegiatan Pengelolaan Pusat Layanan Informasi Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat; 2) Pembayaran honorarium Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan dan partisipasi generasi millenial didominasi usia pemuda (16 s/d 30 tahun), karena kepariwisataan telah menjadi lokomotif perekonomian nasional, sehingga keterlibatan langsung pemuda dalam berbagai aspek kepariwisataan, tentunya diharapkan mampu mendorong peran aktif pemuda dalam investasi pembangunan di daerah untuk masa depan Jawa Barat. 	
48	Membangun pusat pengolahan sampah dan bank sampah di setiap instansi pemerintah dan sekolah-sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pada tingkat instansi pemerintah, di setiap instansi pemerintah provinsi telah ada Program <i>Ecco Office</i> yang salah satu kegiatannya adalah pengolahan sampah; ✓ Pada tingkat sekolah-sekolah, terdapat Program sekolah peduli & berbudaya lingkungan (Adiwiyata) dimana setiap sekolah wajib mengelola sampahnya masing masing dengan cara 3R/Bank Sampah; ✓ Hal ini ditindaklanjuti dengan kegiatan pada Program Pembinaan Konservasi Lingkungan untuk Masyarakat dan Mitra Lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dengan Adanya Kewajiban sekolah untuk mengelola sampah melalui bank sampah di sekolah bertujuan untuk memberikan edukasi dan mengubah perilaku warga sekolah dalam mengelola sampah sesuai dengan misi ke 3 dimana sasarannya kelola sampah juara. ✓ Untuk Tahun 2019 terdapat 144 sekolah yang menyandang predikat sekolah berbudaya lingkungan.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
49	Membangun kerjasama dengan PTPN VIII untuk memperluas area perkebunan kopi java preangaer.	✓ Tindak lanjut dari RAM-IP Pengembangan Kopi di Jawa Barat, dengan Kegiatan Penyediaan 5 juta benih kopi, yang salah satunya akan dihibahkan kepada para Kelompok Tani di lahan PTPN VIII.	✓ Meningkatkan potensi kopi java preanger sebagai komoditas unggulan Jawa barat.
50	Menyusun <i>blueprint</i> pengembangan ternak unggulan Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat juara di sektor peternakan.	✓ Program produksi peternakan; kegiatan produksi dan produktivitas ternak dengan anggaran kegiatan sebesar Rp2.131.065.182,00. Khusus penyusunan blueprint, dialokasikan anggaran sebesar Rp119.759.126,00.	✓ <i>Blueprint</i> pengembangan ternak unggulan di Jawa Barat diharapkan dapat menjadi kerangka kerja pembuatan kebijakan strategis yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja dalam mendukung pengembangan ternak unggul di Jawa Barat.
51	Memfungsikan Balai-Balai Di Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Dinas Peternakan Dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian	✓ Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan	✓ Usulan telah dibahas dengan Biro Organisasi pada saat evaluasi perangkat daerah dan akan ditindaklanjuti kembali sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019;

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Dan Perdagangan serta PD lainnya sebagai sarana edukasi masyarakat dan objek wisata.	<p>Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, telah diusulkan kembali untuk memfungsikan balai-balai pengembangan budidaya ikan di Dinas kelautan dan perikanan provinsi Jawa Barat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Balai-balai di Dinas perindustrian dan perdagangan telah difungsikan sebagai sarana edukasi masyarakat fokus pada pengujian mutu barang dan peningkatan daya saing produk; ✓ Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kunjungan dari pemerintah daerah lain dan masyarakat yang ingin belajar dari satuan pelayanan yang ada pada dinas, salah satunya di satuan pelayanan pengembangan industri perkulitan garut sudah termasuk ke daftar kunjungan wisata garut, sehingga pelajar dan mahasiswa yang wisata ke garut selalu berkunjung ke satuan pelayanan tersebut. Setiap bulan rata-rata 4 (empat) – 5 (lima) grup yang datang berkunjung; 	<p>✓ Sesuai dengan Pergub. Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, salah satu fungsi yang melekat pada UPTD yaitu sebagai sarana edukasi (<i>farm education</i>) yang representatif dalam memfasilitasi kegiatan penelitian, kaji terap, magang, pelatihan, praktek kerja lapang, studi banding, kunjungan kerja dan lain-lain. Sehingga sampai dengan saat ini, UPTD di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat telah menjadi salah satu sarana edukasi masyarakat. Namun demikian, sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan, pada Tahun 2020 akan dilaksanakan pengembangan sarana edukasi wisata adalah:</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur uptd balai pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak cikole lembang; kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di uptd balai pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak Cikole Lembang, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan <i>Cikole Dairy Park</i> yaitu sebesar Rp361.666.785,00; ✓ Program: Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Kegiatan Ketersediaan Benih Hortikultura Di Balai Benih Hortikultura, Kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Buah-Buahan Di Balai Benih Hortikultura, Kegiatan Perbanyak Dan Pemeliharaan Benih Buah-Buahan Dan Tanaman Obat Di Balai Benih Hortikultura, Kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Hias Dan Anggrek Di Balai Benih Hortikultura, Kegiatan Ketersediaan Benih Tanaman Sayuran Dan Hias Di Balai Benih Hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) pada UPTD BPT Sapi Perah dan HPT Cikole akan dikembangkan "<i>Cikole Dairy Park</i>" sebagai sarana eduwisata terpadu mengenai sapi perah; 2) pada UPTD BPPT Domba/Kambing Margawati akan dikembangkan sarana edukasi yang berkolaborasi dengan salah satu objek wisata yang terdapat di sekitar lingkungan UPTD yaitu "<i>karacak valley</i>"; 3) pada UPTD BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih akan dikembangkan <i>show window</i> sebagai sarana eduwisata dari prasarana dan sarana yang telah ada sebelumnya. <p>✓ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi 7 (tujuh) UPTD/Balai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, 3</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1 UPTD/Balai Perlindungan TPH, 1 UPTD/Balai Sertifikasi Benih TPH, 1 UPTD/Balai Pelatihan TPH dan 1 UPTD/Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, selain mengerjakan sesuai tupoksinya UPTD/Balai keberadaannya telah rutin untuk dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan objek wisata diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dijadikan sebagai sarana /tempat untuk melakukan praktek, pelatihan, magang dan kunjungan baik yang sudah reguler maupun yang sifatnya insidental oleh pelajar, mahasiswa, kelompok tani, KWT dari provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat; 2) Kerjasama penelitian dari Perguruan Tinggi dengan BBH

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>dalam rangka uji coba kesuburan tanah dan pengembangan benih hortikultura melalui kultur jaringan;</p> <p>3) Penjajagan kerjasama dalam rangka aplikasi teknologi digital dalam mendeteksi secara dini serangan hama dan penyakit terhadap tanaman jeruk serta pendeteksi keberhasilan tanaman jeruk. Dijadikan sebagai objek wisata, sudah mulai dirintis salah satu balai yaitu pengembangan untuk dijadikan sebagai objek wisata sekaligus wisata edukasi di satuan pelayanan BBH Margahayu Lembang. Sedang dirintis pengembangan agrowisata yaitu pengembangan jalan kontrol</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			dan <i>track MTB</i> sebagai sarana untuk wisata olah raga.
52	Membangun embung-embung untuk mengurangi banjir dan mengantisipasi kekeringan khususnya di daerah sentra produksi pertanian.	✓ Pada tahun anggaran 2020 terdapat kegiatan survey potensi situ, waduk, sungai, embung, dan kolam tampungan air lainnya dengan <i>Output</i> kegiatan adalah dokumen survey lokasi embung.	✓ Sebagai pedoman penentuan pembangunan lokasi embung yang memiliki potensi sumber air yang melimpah yang dapat mengantisipasi kekeringan.
53	Mendorong pemanfaatan dana desa dalam membangun desa wisata berbasis kehutanan, untuk mendorong peningkatan luas kawasan hutan, untuk mendorong peningkatan luas kawasan hutan di Jawa Barat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat desa.	✓ Program pengembangan destinasi pariwisata dan kegiatan pembinaan desa wisata, dengan alokasi anggaran Rp372.073.474,00.	✓ Berupa sosialisasi pembinaan wawasan dan pemahaman tentang desa wisata untuk mendorong tercapainya desa-desa wisata di seluruh pelosok Jawa Barat, melalui program pengembangan jaringan desa wisata berbasis budaya, keindahan alam, produk kreatif, dan pertanian.
54	Pembangunan pengelolaan sampah baik di Legok Nangka maupun di Cinambo segera diselesaikan jangan sampai berlarut-larut.	✓ Untuk TPPAS Legok Nambo dan Nambo sudah terbangun fasilitas dari Kementerian PUPR, namun fasilitas yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut berupa <i>sanitary landfill</i> , dan sudah diperkirakan hanya untuk menampung	✓ TPPAS Regional Legok Nangka dan Lulut Nambo akan dioperasikan dgn menggunakan teknologi pengolahan sampah yg disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pemanfaatan hasil

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>residu pengolahan sampah, sehingga apabila digunakan untuk pembuangan sampah tanpa pengolahan maka masa operasi <i>sanitary landfill</i> hanya cukup untuk 2-3 tahun saja;</p> <p>Khusus untuk TPPAS Regional Lulut Nambo, sudah ada surat dari DLH Kabupaten Bogor dan Desa Lulut yang belum dapat menerima pembuangan sampah dari Kota Depok apabila seluruh fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara (<i>refuse derived fuel</i> - RDF) belum selesai dibangun;</p> <p>Hal ini ditindaklanjuti dengan kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah Regional.</p>	<p>pengolahan sampahnya, hal ini bertujuan agar masa operasional TPPAS dapat lebih panjang dibandingkan dengan sistem operasi penimbunan (<i>sanitary landfill</i>). Selain itu sejalan juga dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 tentang Pengolahan Sampah yaitu memanfaatkan sampah sebagai sumberdaya;</p> <p>✓ Pada saat ini di TPPAS Regional Lulut Nambo telah dibangun infrastruktur dasar berupa: sel <i>sanitary landfill</i>, jalan operasi, saluran <i>drainase</i> dan IPAL serta bangunan penunjang yaitu: pintu gerbang, pagar keliling, jembatan timbang, kantor, gudang dan rumah jaga. Instalasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara (<i>refuse derived fuel</i> - RDF) masih dalam proses konstruksi, diharapkan dapat</p>

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>dioperasikan pada Bulan Juni 2020;</p> <p>✓ Untuk TPPAS Regional Legok Nangka telah dibangun infrastruktur dasar berupa: sel <i>sanitary landfill</i>, jalan operasi, saluran drainase dan IPAL serta bangunan penunjang yaitu: pintu gerbang, pagar keliling, jembatan timbang dan rumah jaga. Untuk pengadaan teknologi pengolahan sampah pada saat ini masih dalam tahap persiapan lelang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diharapkan pada Bulan Januari 2020 dapat dimulai proses prakualifikasi. Proses prakualifikasi dapat dimulai apabila sudah terbit surat persetujuan prinsip bantuan kelayakan (<i>viability gap fund</i> - VGF) dari Kementerian Keuangan.</p>

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah lain agar memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan karena tidak semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat menggunakan Asas Desentralisasi.

Pemerintah dapat memberikan sebagian pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

4.1.1 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Dan Jumlah Anggaran

Instansi Pusat Pemberi Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Barat terdiri 2 (dua) Kementerian sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Pagu anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019 sebesar Rp136.444.407.000,00 sedangkan pagu dari Kementerian Pertanian sebesar Rp302.714.829.000,00.

4.1.2 Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp439.159.236.000,00 dengan realisasi Rp 375.267.624.892,00 yang tersebar pada 5 (lima) Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Provinsi Jawa Barat, diantaranya sebagai berikut yaitu:

- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
- Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	33.272.537.000,00	24.742.884.240,00	74,36
2	Dinas Sumber Daya Air	Pengembangan an pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	103.171.870.000,00	101.613.974.763,00	98,49
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	a. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.	26.359.620.000,00	23.602.722.234,00	89,54
4	Dinas Perkebunan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	42.543.267.000,00	41.158.662.950,00	96,75
5	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; b. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura; c. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan	233.811.942.000,00	184.149.380.705,00	78,76

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
		Sarana Pertanian; d. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian.			
Total			439.159.236.000,00	375.267.624.892,00	85,45

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020

4.1.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap berpedoman petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
2. Meningkatkan koordinasi diantara Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan tugas pembantuan, Bappeda Provinsi Jawa Barat, KPPN, maupun Kementerian/Lembaga (K/L) pemberian penugasan, sehingga dapat meminimalisir kendala, baik yang bersifat teknis maupun administratif;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Bappenas dan juga dengan Satker sebagai penyedia data sehingga pelaporan dapat dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Selain daripada itu disajikan beberapa permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan TP pada 6 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- a. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
Pada Satker Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat permasalahan yang dihadapi adalah kekurangan SDM pengelola kegiatan yang berakibat sering terjadi keterlambatan pelaporan kegiatan TP. Terkait permasalahan tersebut solusinya adalah perlu ada penambahan SDM.
- b. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, terdapat keterlambatan pelaksanaan pembangunan tempat pemotongan hewan qurban (dana tugas pembantuan) disebabkan adanya pemindahan lokasi kegiatan dari Mesjid Pusdai ke Mesjid Agung Provinsi Jawa Barat karena Pusdai merupakan *heritage*. Untuk vaksinasi AI, dari 400.000 dosis yang didistribusikan, hanya 280.000 dosis yang dibiayai operasionalnya. Pengajuan pengadaan vaksin PHMS kepada Pokja ULP Jawa Barat sudah dilaksanakan sejak Pebruari 2019, namun baru dapat diproses pada bulan Mei 2019, disebabkan Pokja ULP tidak segera memprosesnya dengan alasan pengadaan barang/jasa APBN bukan tanggung jawab ULP di tingkat Provinsi melainkan tanggung jawab ULP Pusat. Pengadaan terlambat, menyebabkan distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi menjadi terlambat. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Merubah lokasi Tugas Pembantuan Qurban dan percepatan pembangunan;
- 2) Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan *Road Map* Pembahasan *Brucellosis*.

d. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Permasalahan struktural dalam pelaksanaan kegiatan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat baik Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 dan alternatif solusinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengorganisasian kegiatan yang difasilitasi APBN melekat pada pemegang Tupoksi di 8 unit eselon III lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yaitu Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengolahan Pemasaran dan Usaha Perkebunan, Bidang Sumber Daya Perkebunan, Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan, Balai Perlindungan Perkebunan, Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, serta dinas kabupaten yang menangani bidang perkebunan di 15 kabupaten/kota sehingga seluruh pegawai melakukan tugas rangkap, yaitu di samping melaksanakan tugas yang difasilitasi APBN juga melaksanakan kegiatan yang difasilitasi APBD, sehingga memerlukan penanganan yang lebih ekstra terhadap waktu, tenaga, fasilitas pendukung dan sumber-sumber manajemen lainnya, dengan keterbatasan sumber daya tersebut pada satu waktu terjadi overlap kegiatan yang berakibat kesulitan pelaksanaan di samping ada beberapa sumber daya yang malfungsi. Salah satu alternatif solusinya dengan menyusun sistem kendali intern kegiatan secara detil di masing-masing pelaksana kegiatan agar seluruhnya dapat tertangani sesuai target waktu, biaya dan fisik yang telah ditetapkan.
- 2) Kondisi barang inventaris APBN yang ada, diantaranya seperti bangunan, baik eks kantor UPP PRPTE, eks kantor BP2BPR-ADB (TCSSP-ADB) dan rumah dinas Eks UPP PRPTE, eks PPBPR-ADB sudah tidak biayai eksploitasinya lagi dalam APBN sejak Tahun Anggaran 2007 sampai sekarang, baik untuk pemeliharaan, rekening listrik dan telpon. Secara keseluruhan berjumlah 42 unit bangunan eks UPP-UPP

yang tersebar di 12 Kabupaten se- Jawa Barat (setiap kabupaten terdapat 2 – 4 unit UPP), sehingga kondisinya rusak berat. dan bahkan masih ada BMN Rumah Jabatan yang masih ditempati oleh yang bukan berhak (masyarakat umum) dengan tidak dikenakan biaya sewa. Di samping itu terdapat Kendaraan Roda 4 berjumlah 18 unit dan Roda 2 sebanyak 227 unit yang tidak biayai eksplotasinya sehingga sebagian besar kondisinya tidak terpelihara dan tidak efektif mendukung operasional kegiatan. Alternatif solusinya segera diinventarisasi dan dipilah untuk dilakukan penghapusan terhadap BMN yang memenuhi syarat waktu dan wujud fisiknya.

- 3) Pada Tahun 2019 seyogyanya dapat diperoleh data hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal pada periode renstra, namun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya dapat dievaluasi secara maksimal ke lokasi/lapangan, karena tidak teralokasi dana operasional yang memadai, solusinya dipadukan pelaksanaannya dengan kegiatan yang lokasinya sama agar diperoleh data primer kondisi kinerja (dampak) kegiatan yang telah dilakukan.
 - 4) Pengelolaan administrasi kelompok tani penerima bantuan masih belum optimal ditandai dengan masih belum secara berkala menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakannya, pencatatan barang yang belum tertib. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih belum diterapkannya hasil pembinaan kelompok tani dari segi kelembagaan maupun aspek pemberdayaan kelompok tani lainnya, di samping itu masih banyak kelompok tani yang belum terdaftar di Simluhtan Kementerian Pertanian RI, solusinya perlu dilakukan pendampingan secara berkala dan berkelanjutan dari tim teknis kabupaten maupun petugas pendamping.
- e. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

4.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan juga dipengaruhi oleh penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang dikelola. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 meliputi:

1. Kerjasama antar daerah;
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

4.2.1 Kerja Sama Antar Daerah

Kerja sama antar daerah sangat perlu dijalin dan diciptakan oleh suatu daerah, baik dalam tingkatan dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa alasan penting perlunya kerja sama antar daerah, yaitu: 1) Interdependensi antar daerah; 2) Adanya pengakuan atas potensi dan kebutuhan daerah; 3) Perlunya memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah; 4) Adanya kerja sama wajib dan sukarela; 5) Efisiensi; 6) Globalisasi; dan 7) Otonomi daerah.

Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa kerja sama daerah didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta adanya prinsip saling menguntungkan, yang dapat dilakukan oleh Daerah dengan: 1) Daerah lain; 2) Pihak ketiga; dan/atau 3) Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Pertama, penyelenggaraan kerja sama dengan daerah lain bersifat wajib dan sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara bersama. Kerja sama wajib mencakup: 1) Kerja sama antar daerah provinsi; 2) Kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; 3) Kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; 4) Kerja sama antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda; dan 5) Kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, apabila kerja sama wajib tidak dilaksanakan oleh Daerah, dengan ketentuan biaya pelaksanaan kerja sama wajib dihitung berdasarkan APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan. Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam melaksanakan kerja sama wajib. Sekretariat kerja sama bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.

Selanjutnya, kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

4.2.1.1 Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan kerja sama antar daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 diarahkan pada peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintah yaitu dengan pemerintah, antar daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dalam Pelaksanaan kerja sama antar daerah diarahkan pula pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan kerja sama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan;
2. Kerja sama antar daerah dikembangkan guna menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah serta efektivitas dalam pengelolaannya, khususnya di Kawasan Metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi; dan
3. Kerja sama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik, penanganan urusan maupun pembangunan lainnya melalui kerja sama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerja sama.

4.2.1.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta realisasi dari alokasi anggaran kegiatan pada Tahun 2019 yang terkait dengan kerja sama antar daerah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Evaluasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.161.408.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.143.243.618,- atau 98,43 %. Output 24 Addendum/pembaharuan kerja sama, Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah. Outcome Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah.
2. Kegiatan Penataan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.163.452.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.150.692.726,- atau 98,90%. Output dari kegiatan ini adalah fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar daerah, meliputi:
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat turut berperan aktif dalam kelembagaan kerja sama antar daerah serta asosiasi lingkup Gubernur, seperti :
 - 1) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yaitu forum kerjasama daerah yang beranggotakan 10 (sepuluh) Provinsi meliputi wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, 2 (dua) agenda tetap FKD-MPU setiap tahun adalah menyelenggarakan Rapat Gabungan, yaitu Rapat perumusan teknis dan pembahasan bidang kerjasama yang diikuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama yang akan dilakukan, lalu agenda Rapat Kerja Gubernur, yaitu Rapat Kerja lingkup Gubernur dalam rangka menyepakati bidang kerjasama yang akan dilaksanakan serta membahas *common issue* yang terjadi di lingkup Pemerintah Daerah.

- 2) Asosiasi Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yaitu forum Gubernur seluruh Indonesia, forum ini diketuai oleh Ketua yang dipilih secara demokratis oleh anggota APPSI, Ketua APPSI bertanggungjawab langsung kepada Presiden, agenda pokok dari APPSI adalah Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional, dalam agenda tersebut para Gubernur membahas *common issue* yang terjadi secara nasional dalam tataran penyelenggaraan Pemerintahan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- 3) Badan Kerja Sama antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama, yaitu Badan Kerjasama di wilayah Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, BKAD ini *supporting* dalam mengidentifikasi potensi kerjasama di wilayah perbatasan serta membahas secara Profesional dari segi kebutuhan masyarakat serta kemampuan pemerintah.
- 4) Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur), yaitu Badan Kerjasama di wilayah Perbatasan Jawa Barat dan Banten, serta Jawa Barat dengan DKI Jakarta, agenda pokok dari BKSP adalah Rapat Teknis yaitu Rapat yang diikuti oleh Eselon 3 dan 4 dalam rangka membahas kerjasama yang diperlukan, Rapat Pleno yaitu Rapat yang diikuti oleh eselon 2 dalam rangka menyepakati kerjasama yang diperlukan serta membahas persiapan Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna diikuti oleh Gubernur dalam rangka menyepakati serta menyetujui kerjasama yang dilakukan melalui penandatanganan naskah kerjasama secara.
- 5) Kerja sama Antar Daerah dan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Instansi Vertikal yang dilakukan pada Tahun 2019 melalui fasilitasi 87 naskah kerja sama.

4.2.1.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 yang terkait dengan kerja sama antar daerah, sebagai berikut:

a. Permasalahan:

- 1) Belum terintegrasinya perencanaan kerja sama dengan pengalokasian anggaran;
- 2) Keterbatasan kewenangan Provinsi dalam pemenuhan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Belum optimalnya peran kelembagaan kerja sama antar daerah (seperti: FKD-MPU, APPSI, BKSP Jabodetabekjur, dan BKAD Kunci Bersama) dalam pemecahan permasalahan bersama;
- 4) Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama tanpa disertai tindak lanjut lainnya;
- 5) Penatausahaan Dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama belum terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan yang baik;
- 6) Kurangnya SDM pengelola kerja sama daerah dan dinamisnya pergantian SDM Kerja Sama (Promosi/Mutasi) di Kabupaten/Kota;

- 7) Minimnya pemahaman tentang regulasi kerja sama dikarenakan adanya pergantian peraturan Perundang-undangan yang baru dan belum terbitnya Peraturan turunannya (Permendagri tentang Pelaksanaan Kerja Sama);
- 8) Belum tersedianya instrument dan indikator monitoring dan evaluasi kerja sama yang bersifat universal.

b. Solusi:

- 1) Pengintegrasian perencanaan Kerja Sama Antar Daerah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
- 2) Peningkatan Kerja Sama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kewenangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Kerja Sama antar daerah melalui optimalisasi kelembagaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat;
- 4) Merevitalisasi badan Kerja Sama daerah dan/atau meningkatkan peran kelembagaan Kerja Sama antar daerah, yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya selaku anggota kelembagaan Kerja Sama antar daerah;
- 5) Membangun dan menggunakan aplikasi "SINERJI" untuk mempermudah pengelolaan Dokumen Kerja Sama KSDN, KSDPK serta KSLN secara online dan digital sehingga Monitoring terhadap tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama/Perjajian Kerja Sama dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 6) Membuat dan melampirkan Rencana Program Kerja sesuai Kesepakatan pada setiap Naskah Perjanjian Kerja Sama ataupun Kesepakatan Bersama Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- 7) Rutin mengadakan sosialisasi tentang regulasi kerja sama dan kegiatan peningkatan kemampuan (*Softskill* dan *Hardskill*) SDM Kerja Sama;
- 8) Membuat aplikasi kerja sama "sinerji" untuk memantau kerja sama yang telah dilaksanakan;
- 9) Mengantisipasi terjadinya perselisihan kerja sama dengan fokus pada konsep naskah kerja sama yang dilakukan pemerintah harus melalui proses mediasi;
- 10) Menyusun kajian instrument monitoring dan evaluasi untuk ditetapkan dalam produk hukum.

4.2.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerja Sama daerah dengan pihak ketiga meliputi: 1) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik; 2) Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; 3) Kerja Sama investasi; dan 4) Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit mengatur: 1) Objek Kerja Sama; 2) Ruang Lingkup Kerja Sama; 3) Pelaksanaan Kerja Sama; 4) Hak dan kewajiban para pihak; 5) Jangka waktu kerja sama; 6) Penyelesaian perselisihan; dan 7) Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian; 8) Korespondensi; dan 9) Penutup.

4.2.2.1 Kebijakan dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Disamping itu telah ditetapkan beberapa produk kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016 tentang Koordinasi Kerja Sama Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 119-05/Kep 245-Pemksm/2017 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat.

Manfaat dari adanya Kerja Sama daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di Daerah dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan Urusan Daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
- d. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumberdaya, dan memperoleh manfaat dari sumberdaya yang tersedia.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, yang substansinya diharmonisasikan dengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Disamping itu telah ditetapkan beberapa produk kebijaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kerjasama Daerah, yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016 tentang Koordinasi Kerjasama Daerah; dan
- e. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 119-05/Kep 245-Pemksm/2017 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat.

Manfaat dari adanya kerjasama daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di Daerah dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan Urusan Daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
- d. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumberdaya, dan memperoleh manfaat dari sumberdaya yang tersedia.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, yang substansinya diharmonisasikan dengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kerjasama Daerah.

4.2.2.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga diwadahi dalam Kegiatan Penataan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebesar Rp1.163.452.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.150.692.726,- atau 98,90%. Hasil pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah terfasilitasinya Kerja Sama yang diajukan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pihak Ketiga, dan tercapainya target setiap PD yang menyelenggarakan Kerja Sama dengan pihak ketiga, sesuai kegiatan/program yang dimiliki. Output dari adalah fasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebanyak 54 naskah. Adapun outcome dari kegiatan ini, adalah: terfasilitasinya kerja sama dengan pihak ketiga.

4.2.2.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 yang terkait dengan kerja sama dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

a. Permasalahan:

- 1) Kurang baiknya dokumentasi naskah Kerja Sama pada Pemerintah Daerah, baik secara manual maupun digital;
- 2) Belum terintegrasinya perencanaan Kerja Sama dengan pengalokasian anggaran;
- 3) Keterbatasan kewenangan Provinsi dalam pemenuhan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- 4) Belum tersedianya instrument dan indikator monitoring dan evaluasi kerja sama yang bersifat universal.

b. Solusi:

- 1) Peningkatan pengelolaan dokumentasi Naskah Kerja Sama Daerah baik secara manual maupun digital, antara lain dengan menyusun kodifikasi Naskah Kerja Sama Daerah;
- 2) Peningkatan koordinasi antara TKKSD dengan kelembagaan yang mengawali proses Kerja Sama, seperti panitia lelang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAPPENAS dan Kementerian Sektorial;
- 3) Peningkatan Profesionalisme TKKSD terutama berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur; dan
- 4) Menyusun kajian instrument monitoring dan evaluasi untuk ditetapkan dalam produk hukum.

4.2.3 Kerjasama Luar Negeri

Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi: 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Pertukaran budaya; 3) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; 4) Promosi potensi Daerah; dan 5) Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.3.1 Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan luar negeri diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sebagai landasan operasional, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non-Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan Kerja Sama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak luar negeri, Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkannya kepada Gubernur.

4.2.3.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan kerja sama dengan luar negeri pada Tahun Anggaran 2019 yaitu Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri dengan alokasi Rp10.769.402.097,- realisasi Rp10.403.209.788,- atau 96,59%. Output dari kegiatan ini, yaitu:

- a. 6 (enam) Naskah kerja sama:
 - 1) *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan *British Council* tentang Kerja Sama Pelatihan Bahasa Inggris di Jawa Barat;
 - 2) *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan *Plastic Energy Limited* tentang Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pengurangan Sampah Plastik di Jawa Barat;
 - 3) *Letter of Intent* antara Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan *International Copper Association (ICA) Southeast Asia* tentang Pengembangan Program *Safe, Green and Smart Electricity* untuk mendukung pencapaian misi energi juara;
 - 4) *Letter of Intent* antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan *Australia-Indonesia Center* tentang penguatan mutu pendidikan serta pengembangan keterampilan dan pelatihan, kesehatan, infrastruktur, transportasi serta manajemen logistik dan rantai pasokan, lingkungan hidup, energi, industrialisasi dan ekonomi digital serta dapat diperluas mencakup bidang-bidang lainnya seperti kerja sama pada bidang penelitian dan pengembangan daerah atas kesepakatan bersama oleh para Pihak;
 - 5) *Memorandum of Understanding* antara Izu Peninsula Geopark Promotion Council dan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark Management Board tentang *sister geopark*; dan
 - 6) *Memorandum of Agreement* antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nara Prefektur tentang Penyelenggaraan *the 11th East Asia Local and Regional Government Congress*.
- b. 5 (lima) Penjajakan Kerja Sama
 - 1) Penjajakan Kerja Sama *Sister Geopark* antara *Geopark Ciletuh* dan Izu Peninsula ke Jepang;
 - 2) Tindak lanjut kerja sama mengenai *English for West Java* dan Pembukaan Pusat Budaya Sunda di Brecknel, Inggris dan Berpartisipasi pada FI di Swedia dan pertemuan bisnis di Swedia serta Penjajakan di Sektor Pendidikan (*Vocational School*), KS antar Pemerintah Mancaster, Penjajakan KS *Waste to Energy, Human Resources Development* dan Diplomasi Budaya ke Inggris;
 - 3) Penjajakan Kerja sama investasi dan Penandatanganan MOU kerja sama *Sister Geopark* antara Ciletuh dan Izu Peninsula (antara *Management Geopark Ciletuh* (Sekda Kab. Sukabumi) dan *Management Geopark Izu Peninsula* (Wali Kota Izu) ke Korea dan Jepang;
 - 4) Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara serta Penjajakan Peningkatan Dokumen Kerja Sama Jabar-Victoria menjadi MoU (*Sister Province*) dan Penjajakan Kerja Sama Pengembangan

Inkubator *Startup* antara Jawa Barat, ITB dan *LaunchVic* ke Australia; dan

- 5) Penjajakan kerja sama investasi di sektor energi terbarukan, transfer logistik (REBANA), pengembangan kawasan (REBANA), WJ Convention Hall ke Abu Dhabi.

4.2.3.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2019 yang terkait dengan kerja sama dengan luar negeri, sebagai berikut:

a. Permasalahan:

- 1) Keterbatasan data penyelenggaraan Kerja Sama luar negeri oleh kabupaten/kota dan PD sebagai bahan evaluasi;
- 2) Belum sinerginya perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri oleh PD Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota serta tidak ada perencanaan skala prioritas;
- 3) Perencanaan program/kegiatan kerja sama luar negeri yang tidak matang; dan
- 4) Kurangnya komitmen dari PD untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah dijalin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui perencanaan program/kegiatan sekaligus alokasi anggarannya.

b. Solusi:

- 1) Mendorong PD maupun kab/kota melakukan evaluasi secara berkala;
- 2) Mengoptimalkan dan efektifitas rapat koordinasi / evaluasi dengan PD dan kab/kota;
- 3) Mendorong PD maupun kabupaten/kota untuk membuat skala prioritas dan perencanaan kerja sama secara sinergis; dan
- 4) Peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kerja sama untuk menciptakan sinergi dan harmonisasi program/kegiatan.

4.2.4 Pembinaan Batas Wilayah

4.2.4.1 Kebijakan dan Kegiatan

Secara umum, wilayah perbatasan merupakan daerah yang relatif tertinggal dalam kegiatan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menjelaskan bahwa Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

Prinsip-prinsip pokok batas daerah yaitu: 1) Mewujudkan batas antar daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan; 2) Berpedoman pada batas-batas daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan daerah; 3) Melalui tahapan yang disepakati; 4) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

Batas Daerah bermanfaat sangat penting untuk tertib administrasi kewilayahan, tertib penyelenggaraan pembangunan, tertib pelayanan umum dan tertib kegiatan kemasyarakatan. Penataan batas daerah bukan untuk mengkotakkan Wilayah Nusantara, tetapi untuk penataan batas wilayah kerja administrasi pemerintahan, sehingga mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Penataan batas daerah memerlukan kesepakatan berbagai pihak. Pemerintah Daerah Provinsi berperan untuk memfasilitasi penegasan batas daerah, melaksanakan penegasan batas daerah, memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah dan koordinator tim penegasan batas daerah yang bersangkutan.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota memiliki 69 segmen perbatasan, baik yang berbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari 69 segmen batas yang sudah mendapatkan penegasan dari Menteri Dalam Negeri, sudah 68 segmen yang sudah ditetapkan yaitu 53 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, 5 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Banten, 5 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan Kota di DKI Jakarta dan 5 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Adapun masih terdapat 1 segmen perbatasan yang masih dalam proses penetapan di Kemendagri, yaitu: segmen batas antara Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Cilacap.

Adapun segmen batas yang harus direvisi sebanyak 7 Segmen, yaitu: Kabupaten Cirebon – Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon – Kabupaten Kuningan, Kabupaten Kuningan – Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kuningan – Kabupaten Brebes, dikarenakan segmen tersebut ditetapkan dalam dua Permendagri dengan penjelasan tarikan garis batas yang berbeda sehingga terjadi ketidakpastian Permendagri yang menjadi acuan bagi daerah dalam penentuan wilayah administrasi. Dengan demikian maka Permendagri tersebut harus direvisi agar tarikan garis batas menjadi satu. Selanjutnya Segmen Batas Kabupaten Cirebon – Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon – Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Tasikmalaya – Kota Tasikmalaya, dikarenakan tarikan garis batas pada Permendagri sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini di lapangan.

4.2.4.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pada Tahun Anggaran 2019 yaitu Kegiatan Penegasan Batas daerah antar provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 399.934.372, realisasi anggaran sebesar Rp. 349.932.581 (87,49%). Output kegiatan adalah: dokumen batas daerah antar provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat. Outcomenya tertibnya administrasi batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

4.2.4.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan pembinaan batas wilayah adalah kabupaten/kota belum melakukan kegiatan tindak lanjut setelah Batas Daerah ditetapkan dengan Permendagri yaitu sosialisasi permendagri dan survey lapangan ulang untuk memastikan tarikan garis batas daerah sesuai dengan kondisi dilapangan, sehingga rawan timbul konflik yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Solusi yang dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik adalah melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan penegasan batas daerah sangat diperlukan dukungan penuh dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun Pemerintah Provinsi yang berbatasan.

4.2.5 Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

4.2.5.1 Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangan Bencana

Kejadian bencana di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mengalami Peningkatan bila di banding tahun 2018. Pada tahun 2018 terdapat 1.127 bencana meliputi tanah longsor sebanyak 544 kejadian, kemudian angin puting beliung 286 kejadian, banjir sebanyak 149 kejadian, dan gempa bumi dengan 2 kejadian. Sedangkan tahun 2019 terdapat 2.057 bencana meliputi tanah longsor sebanyak 625 kejadian, kemudian angin puting beliung 489 kejadian, banjir sebanyak 164 kejadian, gempa bumi 17 kejadian.

Kejadian tersebut merupakan kejadian bencana yang intensitasnya besar dan laporannya diterima oleh BPBD Provinsi Jawa Barat untuk lebih rinci kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota berikut ini dalam Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Di Jawa Barat Tahun 2018 – 2019

No	Tahun	Jenis Bencana						Ket
		Kebakaran Lahan dan Bangunan	Banjir	Tanah Longsor	Puting Beliung	Gempa Bumi	Gelombang Pasang	
1	2018	141	149	544	286	2	5	1.127
2	2019	762	164	625	489	17	-	2.057
JUMLAH		903	313	1.169	775	19	5	

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat

Dampak yang terjadi ketika bencana terjadi dapat menimbulkan kerugian baik moril maupun materil. Selain itu setiap bencana yang terjadi pasti menyisakan penderitaan baik harta benda maupun jiwa, baik yang meninggal, luka-luka, maupun karena kondisi terpaksa harus mengungsi untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi. Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 korban jiwa yang diakibatkan dari bencana di Jawa Barat tercatat sebanyak 92.593 jiwa

menderita, yang meliputi sebanyak 35 orang meninggal dunia. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.3
Daftar Korban Jiwa Akibat Bencana Di Jawa Barat
Tahun 2018 - 2019

NO	Tahun	Korban Jiwa						KET	
		Menderita		Hilang	Meninggal Dunia	Luka-Luka	Mengungsi		
		KK	Jiwa				KK		Jiwa
1	2018	27.316	90.923	21	41	97	3.390	10.629	
2	2019	49.761	92.593	2	35	178	1.323	4.646	
JUMLAH		77.077	183.516	23	76	275	4.713	15.275	

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.4
Daftar Kerusakan Akibat Bencana Di Jawa Barat
Tahun 2018 - 2019

No	Tahun	Kerusakan										
		Rumah / Tempat Tinggal						Sarana Lain				
		Hancur	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terancam	Terendam/Tertimbun	Sekolah	Tempat Ibadah	Sawah	Fasilitas Umum	Lahan/Hutan
1	2018	36	1.922	3.513	6.887	3.055	42.701	83	1	0	134	145
2	2019	1	921	2.217	2.942	1.826	24.406	86	89	1.067	86	400
JUMLAH		37	2.843	5.730	9.829	4.881	67.107	169	90	1.067	220	545

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan penetapan status keadaan darurat bencana tidak berhenti hanya pada saat menetapkan suatu keadaan dapat dinyatakan darurat bencana atau tidak, akan tetapi dilanjutkan sampai dengan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan. Sesuai dengan penjelasan pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pada masing-masing status keadaan darurat bencana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Status Siaga Darurat

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Artinya bahwa ancaman bencana pasti terjadi dan telah mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat, hanya saja pada saat status siaga darurat diberlakukan kejadian bencananya belum terjadi. Status siaga

darurat ini tentunya hanya dapat diberlakukan kepada jenis bencana yang perkembangannya dapat diamati berdasarkan sistem peringatan dini dan tidak mendadak. Dalam menetapkan status siaga darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

- 1) Informasi potensi ancaman bencana.
Adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan potensi ancaman dimaksud.
- 2) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status siaga darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- 1) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
- 2) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat;
- 3) Evakuasi masyarakat terancam;
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam;
- 5) Perlindungan kelompok rentan; dan
- 6) Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.

b. Status Tanggap Darurat

Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Dalam menetapkan status tanggap darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

- 1) Informasi ancaman bencana yang terjadi. Adanya ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait telah terjadinya ancaman bencana dimaksud.
- 2) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan. Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan:

- 1) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
- 2) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- 5) Perlindungan kelompok rentan;

- 6) Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana; dan
- 7) Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

c. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung. Dalam menetapkan status transisi darurat ke pemulihan indikator yang dapat digunakan adalah:

- 1) Informasi ancaman bencana yang terjadi.
Adanya ancaman bencana yang telah terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana dimaksud.
- 2) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan
Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:

- 1) Kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
- 2) Tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- 4) Perlindungan kelompok rentan;
- 5) Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
- 6) Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
- 7) Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

4.2.5.2 Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mengalokasikan anggaran Tahun 2019 Sebesar Rp21.490.760.081,00 dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menghadapi kebencanaan. Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2019 sebanyak 61 orang, terdiri dari TRC orang berasal dari unsur PNS, serta Pusdalops sebanyak 50 orang.

4.2.5.3 Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Pada dasarnya bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dimanapun dan kapanpun, terutama di wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana, termasuk di dalamnya adalah daerah-daerah di Jawa Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai antisipasi untuk kemungkinan tersebut. Langkah-langkah nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Relokasi Pemukiman di daerah rawan Bencana Banjir dan longsor di daerah Kabupaten maupun Kota;
2. Menyelenggarakan Sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat dikawasan Rawan bencana Banjir maupun Tanah longsor;
3. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Evakuasi Penanggulangan bencana terhadap masyarakat di daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor;

4. Penyediaan Logistik dalam kesiap-siagaan menghadapi Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
5. Mensiagakan Petugas Penanggulangan bencana baik Aparatur, Satgas PB, Pusdalops serta Organisasi Perangkat Daerah dan TNI / Polri;
6. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Barat;
7. Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman;
8. Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan Mitigasi Bencana;
9. Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada seluruh Stakeholders kebencanaan Jawa Barat. Serta memetakan Daerah Rawan Bencana secara komprehensif, guna optimalisasi dan sinkronisasi program mitigasi bencana di Jawa Barat;
10. Melakukan Simulasi dan Sosialisasi Kebencanaan secara berlanjut kepada masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sadar bencana di Jawa Barat, khususnya di daerah rawan bencana;
11. Melakukan Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat, sebagai basis data pengambilan kebijakan dan pengendalian operasional kebencanaan di Jawa Barat;
12. Melakukan Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor secara khusus; dan
13. Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas PD, baik dalam lingkup Kabupaten/Kota, provinsi maupun dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat yang dirumuskan dalam Forum PD Bidang Kebencanaan serta Rapat Koordinasi Kebencanaan di Tingkat wilayah Perwakilan.

4.2.5.4 Prioritas Nasional Risiko Bencana Wilayah Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dan tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Selain itu, Jawa Barat memiliki karakteristik perpaduan antara daerah pegunungan yang berada di wilayah Selatan dan dataran rendah di wilayah pantai Utara, memiliki curah hujan yang tinggi yaitu rata-rata 219 mm/tahun dengan curah hujan yang tinggi dan berada pada jalur gempa tektonik yang topografinya bergunung-gunung dan aliran sungai yang pada umumnya bermuara diwilayah pantai utara, maka dibeberapa daerah merupakan daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain.

4.2.5.5 Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Peraturan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, menjadi pedoman dalam keikutsertaan aparat keamanan untuk mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penanggulangan permasalahan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Penanggulangan permasalahan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terpadu dan memperlancar serta mempercepat penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, serta kerjasama dalam penegakan Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan hal tersebut, telah melakukan upaya penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat perlu didukung Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi. Peran aktif diantara kedua pihak yaitu pihak pemerintah dan kepolisian memberikan dampak yang besar dalam penanganan gangguan yang dihadapi agar dapat ditangani secara menyeluruh dengan efektif dan efisien, karena memanfaatkan komponen yang ada dalam struktur tugas Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kodam III/ Siliwangi.

4.2.6 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilaksanakan dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi terwujudnya keserasian dan keberhasilan pembangunan. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh gubernur dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Instansi vertikal di daerah merupakan perangkat dari kementerian atau lembaga non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Jawa Barat. Koordinasi dengan instansi vertikal juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan bidang urusan pemerintahannya. Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat koordinasi kepala wilayah secara lengkap/terbatas, permintaan penyampaian data, informasi atau pendapat pada forum koordinasi sesuai peraturan yang berlaku, serta konsultasi antar kepala instansi vertikal dengan kepala perangkat daerah. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah meliputi:

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD). Forum ini terdiri dari Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Kajati Jawa Barat, serta Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
2. Forum Koordinasi Teknis oleh Perangkat Daerah, Penyelenggaraan forum koordinasi teknis dilaksanakan pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan di setiap urusan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah provinsi. Penyelenggaraan forum koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan pada Tahun 2019 meliputi:
 - a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 dalam rangka penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh para pihak yang terlibat dalam pembangunan Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, BUMN/D, serta organisasi masyarakat;
 - b) Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat dengan menghadirkan para pihak terkait termasuk di dalamnya instansi vertikal yang ada di Jawa Barat;

- c) Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renja tahun 2020 dengan menghadirkan instansi terkait, termasuk instansi vertikal di daerah yang menjadi mitra perangkat daerah.

4.2.7 Pengelolaan Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus mengatur tentang jenis-jenis kawasan khusus, yaitu meliputi kawasan otorita, kawasan/wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/terluar, kawasan pertahanan negara, kawasan lembaga pemasyarakatan, kawasan budaya, kawasan pelestarian lingkungan hidup, kawasan riset dan teknologi, kawasan pengembangan tenaga nuklir, kawasan peluncuran peluru kendali, kawasan pengembangan prasarana komunikasi dan telekomunikasi, kawasan pengembangan sarana transportasi, kawasan penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, kawasan eksploitasi dan konservasi bahan galian strategis, dan kawasan lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan. Kawasan khusus yang telah ditetapkan di Jawa Barat serta diselaraskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Jenis kawasan khusus yang dikelola pemerintah daerah provinsi Jawa Barat adalah Kawasan Pelestarian Lingkungan Hidup Taman Hutan Raya Djuanda yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Anggaran untuk pengelolaan TAHURA tersebut bersumber dari APBD Provinsi. Berdasarkan status asset, Kawasan TAHURA merupakan asset milik negara.

4.2.8 Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan bersifat Konkuren. Berkenaan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jawa Barat, suasana aman dan kondusif menjadi modal utama bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut merupakan upaya penanganan gangguan yang ditangani secara efektif mulai dari hulu sampai hilir, dengan meningkatkan koordinasi antara Kepolisian Daerah Jawa Barat (Optimalisasi fungsi Babinkamtibmas), Kodam/III Siliwangi (Optimalisasi fungsi Babinsa) dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, salah satunya melaksanakan fungsi penegakan Perda. Jumlah Pelanggaran Perda pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus yustisi 73 Kasus Non Yustisi, sedangkan tahun 2018 sebanyak 104 Kasus Yustisi 20 Kasus Non Yustisi. Penyebab yang memicu terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:

1. Penduduk Jawa Barat berjumlah sangat banyak, tetapi sebagian besar memiliki rata-rata tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang rendah, mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Daerah, serta pemahaman terhadap nilai/ norma agama, sehingga mudah dipengaruhi dan dipropokasi oleh oknum/ pihak yang tidak bertanggungjawab;
2. Potensi alam dan masyarakat di Jawa Barat yang kondusif memicu masyarakat dari daerah lain untuk mencari mata pencaharian serta mengembangkan usaha sektor informal di perkotaan, berdampak terhadap penggunaan fasilitas dan ruang publik yang melanggar peruntukannya;
3. Posisi strategis daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki akses yang dekat ke ibukota negara dan daerah lainnya, berpotensi munculnya kerawanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:

1. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran hukum;
2. Peningkatan fungsi deteksi dini pada OPD yang berwenang dalam penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, guna mengantisipasi kejadian yang akan berpotensi mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Peningkatan koordinasi lintas instansi dan antar tingkatan Pemerintahan.

4.2.9 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bagian keempat meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
3. Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan komponen yang menjadi urusan Pemerintahan Umum diatas, terdapat beberapa permasalahan yang terkait SARA dan konflik sosial, antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	TAHUN	ISU DASAR YANG MENJADI KONFLIK	DAMPAK YANG TIMBUL AKIBAT KONFLIK SOSIAL	JENIS KONFLIK
1.	2019	1. Hilangnya 2.467 surat suara untuk 6 TPS di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Terhambatnya pelaksanaan pemungutan suara dan keresahan di masyarakat	Konflik Politik
		2. Peristiwa pembakaran bendera yang berlafalkan kalimat tauhid dan ikat kepala yang diyakini sebagai simbol Hizbut Tahir Indonesia (HTI) pada peringatan Hari Santri Nasional ke 3 di Lapangan Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut	Unjuk rasa, pro dan kontra di masyarakat, ormas dan umat beragama.	Konflik Sara
		3. Rencana pembangunan rumah ibadah (gereja) di Komplek Perumahan Pondok Hijau Indah di Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang mendapat penolakan dari warga masyarakat	Konflik antar masyarakat	Konflik Sara
		4. Penistaan agama yang dilakukan oleh Sdr. Hamdani dan kelompoknya bertempat di Mesjid Jami Al Mubarakah Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, dimana yang bersangkutan melaksanakan sholat magrib dan isya berjamaah namun posisinya membelakangi arah kiblat. Kemudian yang bersangkutan juga berkirim surat kepada pemerintah daerah yang berisi pernyataan bahwa mereka mengakui Drs. Sensen Komara sebagai Rosul Allah.	Konflik antar masyarakat dan umat beragama	Konflik Sara
2.	2019	1. Opini Tempel (Opel) #147 Gema Pembebasan Jabar, merupakan selebaran yang ditempel disejumlah tempat yang bertujuan sebagai bentuk protes dan untuk menggugah kesadaran bagi yang membacanya, Isi materi Opel edisi #147	pro dan kontra di masyarakat.	Konflik Sara

NO	TAHUN	ISU DASAR YANG MENJADI KONFLIK	DAMPAK YANG TIMBUL AKIBAT KONFLIK SOSIAL	JENIS KONFLIK
		tersebut, yaitu: Proyek Obor : Penjajahan Gaya Baru Cina Tolak Kapitalisme, Sosialisme-Marxisme. Terapkan Islam.		
		2. Jamaah Anshoru Syariah (JAS) Kab Tasikmalaya di Madrasah Ihwanul Muslimin Kp. Pamegatan RT. 09/01 Desa Pakemitan Cikatomas Kab Tasikmalaya Jawa Barat yang membahas tentang "Ummat islam harus bersatu dalam menghadapi kekuatan lawan", Pada umumnya masih mencita-citakan berdirinya Negara Islam di Indonesia	Menimbulkan keresahan di Masyarakat	Konflik Sara
		3. Pembentukan Rumah binaan Ex HTI sebagai wadah pembinaan intensif (tasqif) dan rekrutmen anggota baru di luar area kampus	pro dan kontra di masyarakat	Konflik Sara
		4. Anarko dan Acab-1312 (All Cops Are Bastards-Semua Polisi Bajingan), kedua kelompok tersebut merupakan sebuah kesatuan Anarko-Sindikalis harus berpaham dan bertindak Acab-1312 (All Cops Are Bastards-Semua Polisi Bajingan). Berkembang di Jawa Barat khususnya Kota Bandung adalah Anarko-Punk yang berpaham kepada teori Anarkisme	Menimbulkan keresahan di Masyarakat	Konflik Sosial
		5. Di Desa Kawung Sari Kec Cibingbin Kab. Kuningan, terkait reaksi masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendungan Waduk Kuningan, masih belum mendapatkan ganti rugi	Dapat memunculkan reaksi dari sejumlah aktifis, dan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa	Konflik Sosial
		6. Perkembangan progres dan hambatan pembangunan pelabuhan laut internasional Patimban Subang	Tuntutan dari nelayan terkait area tangkapan ikan, belum adanya tanggapan atas surat dari para nelayan Desa	Konflik Sosial

NO	TAHUN	ISU DASAR YANG MENJADI KONFLIK	DAMPAK YANG TIMBUL AKIBAT KONFLIK SOSIAL	JENIS KONFLIK
			Patimban melalui KUD Mina Misaya Guna kepada Kementerian terkait, atas dampak yang dialami oleh para nelayan	
		7. Pengerjaan Proyek Tol Cisumdawu di Ds. Margaluyu Kec. Tanjungsari kab. Sumedang terkait dampak kegiatan pengerjaan Tol Cisumdawu phase 3 berupa suara bising alat berat, debu dan waktu kerja yang melebihi batas waktu kerja.	Dapat memunculkan reaksi dari masyarakat, dan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa	Konflik Sosial
		8. Permasalahan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Desa Sukajaya dan Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat (Blok Gunung Sembung) dan Pembangunan Trase Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC)	Menimbulkan keresahan di Masyarakat	Konflik Sosial
		9. Permasalahan terorisme pada Tahun 2019 cukup menonjol dimana terdapat penangkapan terduga jaringan teroris oleh Densus 88 di wilayah Jawa Barat	Menimbulkan keresahan di Masyarakat	Konflik Sara

Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 35.377,76 km² dengan jumlah penduduk 49.316.700 jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota dalam keadaan aman dan kondusif. Program pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar. Pada umumnya masyarakat dapat menyikapi permasalahan yang ada dengan arif dan bijaksana, termasuk dalam menyikapi adanya keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang relatif cukup beragam di beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Apabila timbul permasalahan di tengah masyarakat, hal itu hanya bersifat lokal, tidak sampai meluas dan berkepanjangan.

Secara umum beberapa permasalahan yang terkait di tahun 2019 dengan bidang IPOLEKSOSBUD yang perlu diantisipasi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ideologi:

- a. Opini Tempel (Opel) #147 Gema Pembebasan Jabar, merupakan selebaran yang ditempel disejumlah tempat, diantaranya Masjid Al Furqan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Telkom University, Masjid Ihya Ulumuddin Universitas Komputer Indonesia (Unikom), dll yang berisi opini Gema Pembebasan Jabar yang diperbanyak oleh Gema Pembebasan yang ada di tiap kota/kabupaten se-Jabar. Tujuannya sebagai bentuk protes dan untuk menggugah kesadaran bagi yang membacanya, Isi materi Opel edisi #147 tersebut, yaitu: Proyek Obor: Penjajahan Gaya Baru Cina Tolak Kapitalisme, Sosialisme-Marxisme. Terapkan Islam. Upaya yang dilakukan adalah Penggalangan berkerjasama dengan Aparat TNI POLRI untuk mencegah terjadinya konflik.
- b. Jamaah Anshoru Syariah (JAS) Kab Tasikmalaya di Madrasah Ihwanul Muslimin Kp. Pamegatan RT. 09/01 Desa Pakemitan Cikatomas Kab Tasikmalaya Jawa Barat yang membahas tentang "Ummat islam harus bersatu dalam menghadapi kekuatan lawan", MPP (Majelis Persiapan Pembebasan) di Kp Rawagirang Desa Linggawangi Kec. Leuwisari Kab Tasikmalaya, yaitu membahas tentang perjuangan menegakkan hukum Islam di Indonesia dan di Markaz Jamaah MPP (rumah Ustad Jajang) Kp Cibeurih Desa Sukakarsa Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya Jawa Barat berlangsung pertemuan MPP (Majelis Persiapan Pembebasan) Materi yang disampaikan dalam pembinaan tersebut yaitu perjuangan menegakkan hukum Islam dari penjajah NKRI serta NII Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dalam bahasannya tentang "Mensolidkan barisan jamaah dalam menghadapi Pemilu tahun 2019". Pada umumnya masih mencita-citakan berdirinya Negara Islam di Indonesia. Upaya yang dilakukan adalah Melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Deteksi Dini dengan Jaringan Intelijen Se Jawa Barat dalam rangka meminimalisir potensi konflik yang terjadi.
- c. Pembentukan Rumah Binaan Jaringan Ex HTI Khusus Mahasiswa UIN SGD Bandung, Rumah binaan tersebut bernama "Pondok Asyasyabab, Pondok Pemuda Perindu Syurga", pimpinan Paelani Setia (Ketua LSPI UIN SGD/HP. 081224601631). Pondok ini berdiri satu tahun lalu yang beralamat di Jl. Permai V, Cipadung, Cibiru, Bandung, Upaya yang dilakukan adalah memberikan pemahaman terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- d. Anarko dan Acab-1312 (All Cops Are Bastards-Semua Polisi Adalah Bajingan), kedua kelompok tersebut merupakan sebuah kesatuan Anarko-Sindikalis harus berpaham dan bertindak Acab-1312 (All Cops Are Bastards-Semua Polisi Bajingan). Kelompok Punk terpecah menjadi dua kelompok yakni Chaos-Punk dan Anarko-Punk. di Jawa Barat hampir setiap Kabupaten dan Kota ada anggota Anarko-Punk dan Acab, anggota se-Jabar sekitar 2.000 orang apabila aktif semua dan bisa berkumpul jika ada konser anak Anarko-Punk, tidak ada junior dan senioritas dalam Anarko-Punk. Upaya yang dilakukan adalah Melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Deteksi Dini dengan Jaringan Intelijen Se Jawa Barat dalam rangka meminimalisir potensi konflik yang terjadi.

- e. Permasalahan terorisme pada Tahun 2019 cukup menonjol dimana terdapat penangkapan terduga jaringan teroris oleh Densus 88 di wilayah Jawa Barat:
- 1) YOYO YAHYA, alamat Kampung Cikoneng Cinta Harja Kabupaten Ciamis;
 - 2) ADI, alamat Kampung Jelat Desa Pataruman Kecamatan Pataruman Kabupaten Banjar;
 - 3) JONI, alamat Jl. Raden Okas Ds/Kecamatan/Kabupaten Ciamis;
 - 4) BADRUDIN, alamat Kampung Cikoneng Cinta Harja Kabupaten Ciamis;
 - 5) SAPRI, Jl. Raden Okas Desa/Kecamatan/Kabupaten Ciamis;
 - 6) HARIN alias ABU ZAHRA. Waktu Penangkapan pada 10 Juni 2019, pukul 21.00 WIB. TKP Penangkapan Jln. Lampirin Raya, Kel. Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
 - 7) AHMAD ADHI SUDIRO, IKHSAN dan KHAIRUL AMIN ALIAS AMIN. Waktu Penangkapan pada 11 Juni 2019, pukul 01.58 WIB. TKP Penangkapan : Kontrakan No. 43B RT-001/RW-02 Kel. Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Bekasi;
 - 8) AGUNG NUR ALAM alias ABU USAMAH NUR IRHAB (Ketua JAS Cirebon), Alamat Gang Karang Baru Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - 9) ANDI MULYA (Ketua Ormas Almanar/anggota MMI), Alamat Jl. Cideng Raya Gg Kebon Pring Rt 006 Rw 002 Kelurahan Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kota Cirebon.

2. Bidang Politik

Pada tahun 2019 merupakan tahun politik, dimana dilaksanakan Pemilu Langsung Pemilihan Pileg, Pil.DPD dan Pilpres Tahun 2019. Berdasarkan Indek Kerawanan Pemilu 2019 yang disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat termasuk katagori kerawanan sedang dan rendah. Kerawanan sedang hanya di beberapa tempat, yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, sedangkan kabupaten kota lainnya termasuk katagori Rendah.

Permasalahan yang timbul terkait konflik politik (Pemilihan Pileg, Pil.DPD dan Pilpres) yaitu: Secara data di Wilayah Kabupaten Indramayu terjadi pelanggaran 7 Kasus Kode Etik, secara garis besar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Indramayu dapat terlaksana dengan lancar, hanya sanksi administrasi (teguran) saja.

3. Bidang Ekonomi:

- a) Di Desa Kawung Sari Kec Cibingbin Kab. Kuningan, terkait reaksi masyarakat terdampak pembangunan Bendungan Waduk Kuningan. Sebelumnya Pemerintah Daerah (Pemda) menjanjikan penyelesaian ganti rugi pada April 2019, namun hingga Mei 2019 warga yang terdampak pembangunan Waduk Kuningan masih belum mendapatkan ganti rugi.

- b) Perkembangan dan hambatan pembangunan pelabuhan laut internasional Patimban Subang, Pembebasan lahan terdampak acces road secara total sebanyak 145 bidang yang terdiri dari 94 bidang milik warga masyarakat dan 51 bidang milik negara. Dari 94 bidang milik warga s.d Rabu 02 Januari 2019, telah terbayarkan sebanyak 60 bidang, sisa belum terbayarkan sebanyak 34 bidang. Sementara itu, pembebasan lahan untuk backup area zona 15 s.d 20 sebanyak 154 bidang, 114 orang pemilik dan 720 orang penggarap. Tuntutan dari nelayan terkait area tangkapan ikan, belum adanya tanggapan atas surat dari para nelayan Desa Patimban melalui KUD Mina Misaya Guna kepada Kementerian terkait, atas dampak yang dialami oleh para nelayan.
- c) Pengerjaan Proyek Tol Cisumdawu, dilaksanakan Aksi Unjuk Rasa dan musyawarah dari Warga RT. 01 dan 02 RW. 09 Dsn. Cijolang dan Warga RT. 01 RW 10 Ds. Margaluyu Kec. Tanjungsari kab. Sumedang terkait dampak kegiatan pengerjaan Tol Cisumdawu phase 3 berupa suara bising alat berat, debu dan waktu kerja yang melebihi batas waktu kerja. Masyarakat menginginkan pimpinan PT. Adhi Karya yang turun ke lapangan langsung, sebelum pihak pimpinan PT. Adhi Karya menemui warga maka aktivitas pekerjaan Tol akan ditutup oleh warga.

4. Bidang Sosial Budaya:

Permasalahan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Desa Sukajaya dan Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat (Blok Gunung Sembung) dan Pembangunan Trase Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), Pemalsuan 15 Akta Jual Beli "AJB" oleh Sdr. MARDIAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban untuk mengurangi terjadinya konflik, dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan, untuk mencapai sasaran dalam penanganan konflik tersebut, ditunjang oleh berbagai kegiatan diantaranya Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Potensi konflik dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jawa Barat, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat, Pengawasan Orang Asing di Jawa Barat. Dalam Tingkat Partisipasi Pemilu Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 82,30% atau naik 17,70% partisipasi dari tahun sebelumnya yaitu 64,60%, untuk meningkatkan partisipasi ini ditunjang dengan beberapa kegiatan diantaranya Pemantauan Perkembangan Politik di Jawa Barat, Gebyar Jawa Barat Memilih Menjelang Pileg, Pil.DPD dan Pilpres Tahun 2019 dan Pendidikan Politik Masyarakat. Dalam upaya mengoptimalkan peran Ormas untuk menunjang pembangunan di Jawa Barat dilakukan melalui kegiatan Jambore Ormas dan Pemberdayaan Ormas, selain itu untuk menjaga kerukunan umat beragama dilaksanakan kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dengan program unggulannya yaitu Jawa Barat Welas Asih yang bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan, pendidikan dan penyadaran

masyarakat tentang makna toleransi, menghargai keberagaman dan mempererat jalinan yang semakin erat baik antar sekolah maupun masyarakat, selain itu untuk menjaga kondusifitas daerah dan meningkatkan nilai - nilai kebangsaan diupayakan melalui kegiatan Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda, Peningkatan Ideologi Bangsa, Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan, dan Peningkatan Peran Forum Pembauran Kebangsaan di Jawa Barat, semua kegiatan tersebut dituangkan dalam Program Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp16.604.809.719,00, terealisasi sebesar Rp15.049.551.405,00 (90.63%).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan seluruh elemen masyarakat secara terus menerus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah yang terjadi berkaitan dengan konflik sosial melalui deteksi dini, tindakan preventif dan penguatan ideologi/jati diri bangsa, serta pemulihan pasca konflik untuk mewujudkan Jawa Barat Kondusif.

BAB V PENUTUP

5.1 PENGHARGAAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya serta media telah mewujudkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dianugerahi berbagai penghargaan. Berbagai prestasi dan penghargaan telah ditorehkan dalam berbagai bidang pembangunan dan memperoleh pengakuan baik pada level nasional maupun internasional. Adapun penghargaan dan prestasi yang telah dicapai pada periode tahun 2019 dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Penghargaan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
1.	Predikat WTP Yang Kedelapan Kali	BPK RI	Gubernur Jawa Barat (BPKAD Provinsi Jawa Barat)
2.	Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori BB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Gubernur Jawa Barat (Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat)
3.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Kategori A	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Gubernur Jawa Barat (Bappeda Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat)
4.	Indeks Maladministrasi (INPERMA) dengan kategori Maladministrasi Rendah	Ombudsman RI	Gubernur Jawa Barat (Biro Organisasi Setda)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
			Provinsi Jawa Barat)
5.	Lembaga Kesejahteraan Terakreditasi	Diklat Sosial RI Kementerian Sosial	Gubernur Jawa Barat (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat)
6.	Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Utama Pada Abdibaktitani 2019	Kementerian Pertanian RI	Gubernur Jawa Barat (Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian & Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat)
7.	APPSI Gubernur Awards, Kategori Adhi Purna Prima, Pada Bidang Ekonomi Kreatif, dengan Program Bandung Silicon Valley, serta Pembangunan Pusat Ekonomi Kreatif Di 27 Kota/ Kabupaten Di Jawa Barat	Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Gubernur Jawa Barat

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
8.	Kategori "Baik" Dalam Pengawasan Kearsipan Tahun 2018	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Gubernur Jawa Barat
9.	Kepala Daerah Terbaik "Best Regional Leaders".	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Gubernur Jawa Barat
10.	Provinsi Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen	Kementerian Perdagangan RI	Gubernur Jawa Barat
11.	PR INDONESIA AWARDS 2019 Gold Winner Kategori Media Cetak Java Lane Edisi 05 Tahun 2018	PR Indonesia	Gubernur Jawa Barat (Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat)
12.	PR INDONESIA AWARDS 2019 Gold Winner Kategori Media Cetak Java Lane Edisi 06 Tahun 2018	PR Indonesia	Gubernur Jawa Barat (Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat)
13.	PR INDONESIA AWARDS 2019 Silver Winner Kategori Website Pemerintah Jawa Barat	PR Indonesia	Gubernur Jawa Barat (Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat)
14.	PR INDONESIA AWARDS 2019 Silver Winner Kategori Media Sosial Pemerintah Jawa Barat	PR Indonesia	Gubernur Jawa Barat (Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat)
15.	PR INDONESIA AWARDS 2019 Gold Winner Kategori Penanganan Krisis Pemerintah Jawa Barat	PR Indonesia	Gubernur Jawa Barat (Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
16.	PR INDONESIA AWARDS 2019 Silver Winner Program GPR “100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar”	PR Indonesia	Gubernur Jawa Barat (Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat)
17.	PR INDONESIA AWARDS 2019 Gold Winner Kategori Departemen PR Pemerintah Provinsi Jawa Barat	PR Indonesia	Gubernur Jawa Barat
18.	PR INDONESIA AWARDS 2019 Platinum Award . Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mendapatkan Platinum Award Pada Acara PR AWARD	PR Indonesia	Gubernur Jawa Barat
19.	Penghargaan Sistem Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Gubernur Jawa Barat (Diskominfo Provinsi Jawa Barat)
20.	Penghargaan INDONESIA VISIONARY LEADER	Kementerian Dalam Negeri RI	Gubernur Jawa Barat
21.	Anugerah Indonesia Maju 2018- 2019. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinobatkan Sebagai <i>Millennial Governor Of The Year</i> atau Gubernur Milenial	Media Grup Warta Ekonomi dan Rakyat Merdeka	Gubernur Jawa Barat
22.	Provinsi dengan Persentase Graduasi Tertinggi	Kementerian Sosial RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Sosial)
23.	Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2019, Sebagai Pembina K3 Terbaik Nasional	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Gubernur Jawa Barat

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
24.	Anugerah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2019, Peringkat Ke I Nasional Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Terbaik	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Gubernur Jawa Barat
25.	Anugerah Paramakarya Tahun 2019, sebagai Pembina Pelaku Usaha Kecil, Menengah Dan Besar	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Gubernur Jawa Barat
26.	Apresiasi Pelaksanaan Hari Otonomi Daerah XXII	Kementerian Dalam Negeri RI	Gubernur Jawa Barat
27.	Penghargaan Top Pembina BUMD 2019.	Majalah Top Business	Gubernur Jawa Barat
28.	Inovation Leadership Award 2019. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Raih Penghargaan Sebagai Indonesian <i>Innovative Leader</i> Pada Malam Apresiasi <i>Government Award</i> 2019	MNC Group	Gubernur Jawa Barat
29.	Sindo <i>Government Award</i> Kategori Investasi	MNC Group	Gubernur Jawa Barat
30.	Tokoh Nasional Peduli Lansia	Kementerian Sosial RI	Gubernur Jawa Barat
31.	Penghargaan 'Recognition Of Excellence 2019' untuk Kategori Inisiatif Desa Digital dalam Ajang Indonesia Opengov Leadership Forum 2019	Organisasi OpenGov	Gubernur Jawa Barat (Diskominfo Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
32.	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019, Penghargaan Atas Inovasi Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan (Si Perut Laper)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi Reformasi RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat)
33.	Penghargaan Platinum Provinsi Besar Kategori Investasi Dalam Indonesia Attractiveness Award (IAI) 2019	Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group	Gubernur Jawa Barat (Bappeda Provinsi Jawa Barat)
34.	Penghargaan Lembaga Pelatihan Berprestasi 2019. Sebagai "Learning Centre For The Fourth Industrial Revolution" Peringkat Kedua dengan Kategori Instansi Pemerintah Daerah Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	LAN AWARDS Tahun 2019	Gubernur Jawa Barat (BPSDM Provinsi Jawa Barat)
35.	Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi Reformasi RI. Penghargaan Atas Inovasi Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan (Si Perut Laper)	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat)
36.	Kepala Daerah Inovatif 2019 Inovasinya Dalam Pelayanan Terhadap	Koran Sindo	Gubernur Jawa Barat

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
	Masyarakat Melalui Program JQR		
37.	Penghargaan Diaspora Atau Diaspora Award	Khusus Special (BritCham) Indonesia	Gubernur Jawa Barat
38.	Anugerah Humas Indonesia Kategori Terpopuler di Media Online 2019 Sub Kategori Pemerintah Provinsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Gubernur Jawa Barat (Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jawa Barat)
39.	Penghargaan Nugra Jasa Darma Pustaloka Untuk Kategori Pejabat Publik yang Berperan Aktif terhadap Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Perpustakaan Nasional RI	Gubernur Jawa Barat
40.	Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik II Tahun 2019 Tingkat Pemerintah Provinsi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Gubernur Jawa Barat
41.	Penghargaan DX Leader Di IDC Digital Transformation Awards 2019 Untuk Kategori Transformasi Digital (DX) Leader Dalam Ajang IDC Digital Transformation Awards 2019	International Data Corporation (IDC)	Gubernur Jawa Barat
42.	Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama. Penghargaan kepada pemerintah daerah yang	Kementerian Perhubungan RI	Gubernur Jawa Barat

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
	dinilai berprestasi dalam manajemen penyelenggaraan transportasi perkotaan yang tertib, lancar, aman, dan berkelanjutan.		
43.	Kepala Daerah Terbaik Atas Pembinaan Kepada Inovator Teknologi Tepat Guna (TTG) Dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), Inovasi Alat Teknologi Solid Tech Coffe Dari Kabupaten Kuningan Keluar Sebagai Juara TTG Inovasi Tingkat Nasional	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI	Gubernur Jawa Barat (DPMD Provinsi Jawa Barat)
44.	Best Use Of Crowdsourcing. Melalui Pemanfaatan Media Sosial Jabarprov.Go.Id Dengan Mengajak Khalayak Umum Berpartisipasi Untuk Mensosialisasikan Program Pemda Jabar Masagi Mendapat Penghargaan Dalam Government Social Media Summit (GSMS)	Open Government Partnership	Gubernur Jawa Barat (Diskominfo Provinsi Jawa Barat)
45.	Pemda dengan Tingkat Kinerja Pengawasan Terbaik Secara Nasional	Kementerian Dalam Negeri RI	Gubernur Jawa Barat (Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat)
46.	Piagam Penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award 2019, pada Kampung Naga Di Kabupaten Tasikmalaya Sebagai Pemenang Green	Kementerian Pariwisata RI	Gubernur Jawa Barat (Disparbud Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
	Gold Kategori Pelestarian Budaya		
47.	Piagam Penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award 2019, pada Wisata Alam Green Canyon di Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemenang Green Bronze Kategori Tata Kelola Destinasi	Kementerian Pariwisata RI	Gubernur Jawa Barat (Disparbud Provinsi Jawa Barat)
48.	Piagam Penghargaan Indonesi Sustainable Tourism Award 2019 Pada Wisata Cibuntu di Kabupaten Kuningan Sebagai Pemenang Green Kategori Tata Kelola Destinasi	Kementerian Pariwisata RI	Gubernur Jawa Barat (Disparbud Provinsi Jawa Barat)
49.	Penghargaan Pemerintah Terinovatif Dalam Ajang Government Award 2019 Sebagai Provinsi Peringkat 2 Innovative Award (IGA)	Kementerian Dalam Negeri RI	Gubernur Jawa Barat
50.	13 Kebudayaan Asal Jawa Barat Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda, Sertifikat Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	Gubernur Jawa Barat
51.	Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Gubernur Jawa Barat (Disbun Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
52.	Inspirational Leader Di Kawasan Asia Pasifik Pada Ajang Govinsider Innovation Awards 2019 Di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Asia Pasifik Bangkok	Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)	Gubernur Jawa Barat
53.	Pemimpin Inovatif Dalam Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 Kategori Gold Untuk Pemerintah Provinsi.	Indonesian Institute For Public Governance (IIPG)	Gubernur Jawa Barat
54.	Provinsi Jawa Barat (Jabar) Meraih Tiga Penghargaan Dalam Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2019 Kategori Siaran Pers/Pemberitaan	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Gubernur Jawa Barat
55.	Provinsi Jawa Barat (Jabar) Meraih Tiga Penghargaan Dalam Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2019 Kategori Website	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Gubernur Jawa Barat (Diskominfo Provinsi Jawa Barat)
56.	Provinsi Jawa Barat (Jabar) Meraih Tiga Penghargaan Dalam Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2019 Kategori Pemain/Aktor Terbaik Festival Pertunjukan Rakyat	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Gubernur Jawa Barat (Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jawa Barat)
57.	Penghargaan Dalam The 5th JAMPIRO (Jambore PR Indonesia) Silver Winner Insan PR Indonesia 2019 Untuk Kategori Kepala Biro Humas	PR Indonesia	Gubernur Jawa Barat (Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
58.	Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2019 Dengan Nilai A	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Gubernur Jawa Barat (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat)
59.	Penghargaan Best IT, Data Tech And AI Governance 2019	Asosiasi Big Data & Artificial Intelligent (ABDI)	Gubernur Jawa Barat (Diskominfo Provinsi Jawa Barat)
60.	Penghargaan National Procurement Award 2019, untuk kategori komitmen penggunaan LPSE Support dalam penyelesaian permasalahan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Gubernur Jawa Barat
61.	Penghargaan Swasti Saba, meraih Penghargaan Terbaik III Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2019. Acara Ini Diselenggarakan Oleh	Kementerian Kesehatan RI	Gubernur Jawa Barat
62.	Penghargaan Sebagai Destinasi Wisata Halal Terfavorit Pada Anugerah Syariah Republika (ASR) 2019	Republika	Gubernur Jawa Barat
63.	Jawa Barat Menjadi Juara Umum Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) Ke-XV Tahun 2019	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Gubernur Jawa Barat
64.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Gubernur Jawa Barat

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
65.	Juara Umum Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Xv/2019	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Gubernur Jawa Barat
66.	Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Gubernur Jawa Barat
67.	Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dinobatkan sebagai pemerintah daerah peduli penyiaran.	Komisi Penyiaran Indonesia	Gubernur Jawa Barat
68.	Gubernur Entrepreneur Award 2019 Kategori Pendidikan Dan Investasi Serta Special Mention Sebagai Marketeer Of The Year 2019 Pada Regional Leader Entrepreneur Award 2019 Dalam Rangkaian Markplus Conference 2020	Founder & chairman perusahaan marketing Markplus, Inc	Gubernur Jawa Barat
69.	Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meraih penghargaan sebagai pendorong akses keuangan melalui sektor unggulan daerah tingkat provinsi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia (RI)	Gubernur Jawa Barat
70.	Perangkat Daerah Masuk Kategori Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI – WBK)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Gubernur Jawa Barat (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
71.	MCP KPK Mencapai 100 %	Komisi Pemberantasan Korupsi	Gubernur Jawa Barat (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat)
72.	Kontribusi Pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019 Untuk Pencetakan Izin Secara Mandiri Oleh Pemohon (JABAR SPRINT)	Kementerian Dalam Negeri RI	Gubernur Jawa Barat (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat)
73.	Salah Satu PD Yang Menjadi Pilot Project Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Gubernur Jawa Barat (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat)
74.	Apresiasi Sebagai Mitra Terbaik Ditjen Pajak	Direktorat Jenderal Pajak	Gubernur Jawa Barat (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat)
75.	Provinsi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tertinggi Di Indonesia	BKPM RI	Gubernur Jawa Barat (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat)
76.	Destinasi Wisata Halal Unggulan (Jakarta 9 April 2019)	Indonesia Muslim Travel Index (IMTI)	Gubernur Jawa Barat (Disparbud Provinsi Jawa Barat)
77.	Green Destination (Jakarta 27 September 2019) Melalui 5 Destinasi Di Jawa Barat, Yaitu: 1)Desa Wisata Cibuntu Kab. Kuningan; 2)Green Canyon Kab. Pangandaran; 3)Kampung Naga; 4)Dusun Bambu Kab.	Indonesia Sustainable Tourism Awards Festival (ISTA)/ Kementerian Pariwisata RI	Gubernur Jawa Barat (Disparbud Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
	Bandung Barat; 5)Juara 3 Pendampingan Desa Wisata Oleh Perguruan Tinggi Podomoro		
78.	Pembina Forum Anak Terbaik Tingkat Provinsi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Gubernur Jawa Barat (DP3AKB Provinsi Jawa Barat)
79.	Penghargaan Sebagai Penggerak Provinsi Layak Anak Tahun 2019	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Gubernur Jawa Barat (DP3AKB Provinsi Jawa Barat)
80.	Indriya Mandrawa	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Gubernur Jawa Barat (Bappeda Provinsi Jawa Barat)
81.	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pertama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kementerian Dalam Negeri RI	Gubernur Jawa Barat (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat)
82.	Peringkat II Lembaga Pelatihan Berprestasi	Lembaga Administrasi Negara RI	Gubernur Jawa Barat (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat)
83.	Abdibaktitani Tingkat Nasional	Kementerian Pertanian RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
			Provinsi Jawa Barat)
84.	Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha	Presiden RI	Gubernur Jawa Barat (Biro Pemerintahan dan Kerja Sama)
85.	Anubhawa Desa/Kelurahan Hukum	Sasana Sadar BPHN Kementerian Hukum dan HAM	Gubernur Jawa Barat (Biro Hukum dan HAM)
86.	Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2019	Kementerian Kesehatan RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat)
87.	Penghargaan Parahita	Pastika Kementerian Kesehatan RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat)
88.	Penghargaan Terinovatif Aplikasi Pengawasan Obat Expired (Lappoex)	Provinsi Kementerian Dalam Negeri RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat)
89.	Peghargaan Kinerja Pelaksanaan Dekonsetrasi Tahun 2019	Pencapaian Kesehatan Kementerian Kesehatan	Gubernur Jawa Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat)
90.	Anugerah Desa Wisata Nusantara Tahun 2019 Desa Wisata Kategori Maju : 1) Desa Kertayasa, Pangandaran, Jawa Barat (Juara 1) Dan 2) Desa Sukalaksana, Garut, Jawa Barat (Juara 2) Desa Wisata Berkembang : Kategori : Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia	Gubernur Jawa Barat (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
	Sukaratu, Garut, Jawa Barat (Masuk 10 Besar)		
91.	Penghargaan Tahun 2019 Keselamatan Dan Keamanan Nuklir	Bapeten Bidang Dan (BAPETEN)	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Dinas ESDM Prov Jabar)
92.	Penerima Hak Cipta Tahun 2019 Untuk Aplikasi Selaras Jabar Online	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas ESDM Prov Jabar)
93.	Penghargaan sebagai Pembina Terbaik III Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional Tahun 2019	Kementerian Perhubungan RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat)
94.	Penyaji Unggulan Cita Rasa Boga Jawa, Bali Dwipa	Kementerian Pariwisata RI	Gubernur Jawa Barat (Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat)
95.	Penyaji Terbaik, Festival Kuliner Nusantara	Kementerian Pariwisata RI	Gubernur Jawa Barat (Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat)
96.	Penata Atraksi Dan Arak Arakan Terbaik, Karnaval Budaya Nusantara	Kementerian Pariwisata RI	Gubernur Jawa Barat (Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat)
97.	Penyaji Terbaik, Karnaval Budaya Nusantara	Kementerian Pariwisata RI	Gubernur Jawa Barat (Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
98.	Anugerah IPTEK Dan Inovasi Budhipura Tahun 2019 (Peringkat 2 Budhipura 2019)	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia	Gubernur Jawa Barat (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat)
99.	Rekonsiliasi Data Tahun 2019	Kepala Kanreg III BKN	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
100.	Penghargaan Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2019	Kementerian Sosial RI	Gubernur Jawa Barat (Dinsos Provinsi Jawa Barat)
101.	Penghargaan Terbaik I Atas Capaian Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2019	Kementerian Sosial RI	Gubernur Jawa Barat (Dinsos Provinsi Jawa Barat)
102.	Pembina Forum Anak Terbaik Tingkat Provinsi Pada Acara Hari Anak Nasional (HAN)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Gubernur Jawa Barat (DP3AKB Provinsi Jawa Barat)
103.	Penggerak Provinsi Layak Anak Tahun 2019	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Gubernur Jawa Barat (DP3AKB Provinsi Jawa Barat)
104.	Kota Layak Anak (KLA)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Gubernur Jawa Barat (DP3AKB Provinsi Jawa Barat)
105.	Penghargaan dalam hal pengembangan forum anak di daerahnya masing-masing	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Gubernur Jawa Barat (DP3AKB Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
		Perlindungan Anak RI	
106.	Penghargaan Sekolah Ramah Anak Terbaik Tingkat Sekolah Luar Biasa	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Gubernur Jawa Barat (DP3AKB Provinsi Jawa Barat)
107.	Puskesmas dengan Pelayanan Anak Terbaik Tingkat Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Gubernur Jawa Barat (DP3AKB Provinsi Jawa Barat)
108.	Juara Umum Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Tahun 2019	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Gubernur Jawa Barat (DISPORA Provinsi Jawa Barat)
109.	Peringkat Ke-5 Pekan Olahraga Pelajar Paralimpik Nasional (PEPARPENAS)	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Gubernur Jawa Barat (DISPORA Provinsi Jawa Barat)
110.	Pejabat Publik Yang Berperan Aktif Terhadap Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Gemar Membaca	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Gubernur Jawa Barat (DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat)
111.	Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018	Kepala Arsip Nasional Indonesia	Gubernur Jawa Barat (DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat)
112.	Terbaik II Tingkat Nasional Lomba Wana Lestari Tahun 20 19 Kategori Penyuluh Kehutanan Pns	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Gubernur Jawa Barat (DISHUT Provinsi Jawa Barat)
113.	Pembina Perlebahan Untuk Jawa Barat Lumbang Madu Kelulut Nasional	Asosiasi Perlebahan Indonesia	Gubernur Jawa Barat (DISHUT Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
114.	Hari Perkebunan Ke 62 Tahun 2019	Kemeneterian Pertanian RI	Gubernur Jawa Barat (DISBUN Provinsi Jawa Barat)
115.	Juara III Lomba Inovasi TIK	Kementerian Pertanian RI	Gubernur Jawa Barat (DISBUN Provinsi Jawa Barat)
116.	Akreditasi "A" Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Barang/Jasa	LKPP	Gubernur Jawa Barat (BPSDM Provinsi Jawa Barat)
117.	Apresiasi KPK Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dan Penerbitan Pergub 55 Tahun 2019	KPK	Gubernur Jawa Barat (BPSDM Provinsi Jawa Barat)
118.	Innovative Government Award (IGA)	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Gubernur Jawa Barat (DISBUN Provinsi Jawa Barat)
119.	Penghargaan Top Leader On IT Leadership 2019 Pada IT Works Digital Awards 2019	Majalah IT Works	Gubernur Jawa Barat (Diskominfo Provinsi Jawa Barat)
120.	Penghargaan Top Digital Implementation On Province Government # Level Star 4 Pada IT Works Digital Awards 2019	Majalah IT Works	Gubernur Jawa Barat (Diskominfo Provinsi Jawa Barat)
121.	Best Adaptation Untuk Desa Digital Pada Ajang Govinsider Innovation Awards 2019 Di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Asia Pasifik Bangkok	Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)	Gubernur Jawa Barat (Diskominfo Provinsi Jawa Barat)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
122.	Best Team Under 35 Untuk Jabar Digital Service (JDS) Pada Ajang Govinsider Innovation Awards 2019 Di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Asia Pasifik Bangkok	Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)	Gubernur Jawa Barat (Diskominfo Provinsi Jawa Barat)
123.	Internasional Excellence Awards 2019	Publisher Internasional Book Fair	Gubernur Jawa Barat (Dispusipda Provinsi Jawa barat)
124.	Himpaudi Award	HIMPAUDI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Kelautan dan Perikanan Povinsi Jawa Barat)
125.	Penghargaan Gemarikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Kelautan dan Perikanan Povinsi Jawa Barat)
126.	Satker Dengan Kinerja Terbaik	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Gubernur Jawa Barat (Dinas Kelautan dan Perikanan Povinsi Jawa Barat)
127.	Pembina Tingkat Nasional terbaik kabupaten/kota sehat.	Kementerian Dalam Negeri RI	Gubernur Jawa Barat (Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial)
128.	Pembina Provinsi Terbaik Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	Gubernur Jawa Barat (Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial)
129.	Lembaga Terbaik Pengelola Zakat Tingkat Nasional	Badan Amil Zakat Nasional	Gubernur Jawa Barat (Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial)

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan	PD/Biro/ Lembaga Pengampu
130.	Juara umum PORSADIN (Pekan Olahraga dan Seni Santri Madrasah Diniyah) Tingkat Nasional	Kementerian Agama RI	Gubernur Jawa Barat (Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial)
131.	Rekor MURI terbanyak Hafidz Qur'an 30 Juz Sebanyak 1500 untuk 1.500 Desa	Museum Rekor Indonesia (MURI)	Gubernur Jawa Barat (Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial)

Selama kurun waktu 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berhasil meraih 131 (seratus tiga puluh satu) penghargaan dalam berbagai urusan pembangunan, yang terdiri dari :

1. 6 (enam) penghargaan internasional;
2. 100 (seratus) penghargaan dari pemerintah pusat; dan
3. 25 (dua puluh lima) penghargaan dari lembaga non pemerintah.

5.2 PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Jawa Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan "JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI".

